

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2021-2026





GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa agar pelaksanaan rencana pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan terarah serta mempunyai sasaran, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik;
 - d. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang termuat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis SKPD Provinsi Kalimantan Selatan adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Gubernur.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program SKPD dan lintas SKPD yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan RPJMD adalah:

- a. sebagai pedoman SKPD menyusun Rencana Strategis SKPD;
- b. sebagai pedoman penyusunan RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
- c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- d. sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III	Gambaran Keuangan Daerah
BAB IV	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
BAB V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
BAB VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
BAB VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB IX	Penutup

- (2) Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Setelah RPJMD ini berakhir dan belum ditetapkan RPJMD baru periode berikutnya, maka penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD, RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 terdapat kebijakan Pemerintah Pusat atau Kebijakan Pemerintah Provinsi yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD yang telah ditetapkan, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah, Pemutakhiran/Perubahan Peraturan Perencanaan dan kebijakan di sektor keuangan terkait alokasi dana transfer ke Daerah.
- (3) Kebijakan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan pengaturan dan implementasi yang terkait susunan Perangkat Daerah serta peraturan lainnya yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Maret 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,



ROY RIZALI ANWAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:

(2-34/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program SKPD dan lintas SKPD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Renja SKPD serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan sangat tergantung dari kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 120



R P J M D

P r o v i n s i

K A L I M A N T A N

S E L A T A N

T a h u n

2 0 2 1 - 2 0 2 6

DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum.....	I-3
1.3	Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.3.1	RPJMD dengan RPJMN	I-8
1.3.2	RPJMD dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan	I-9
1.3.3	RPJMD dengan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan.....	I-10
1.3.4	RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah.....	I-10
1.3.5	RPJMD dengan KLHS.....	I-11
1.3.6	RPJMD Kalimantan Selatan, RPJMD Kalimantan Timur dan RPJMD Kalimantan Tengah.....	I-12
1.3.7	RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-14
1.4	Maksud dan Tujuan.....	I-15
1.4.1	Maksud	I-15
1.4.2	Tujuan.....	I-15
1.5	Sistematika Penulisan.....	I-16
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1	Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.2	Topografi.....	II-3
2.1.3	Geologi.....	II-5
2.1.4	Hidrologi.....	II-7
2.1.5	Meteorologi dan Klimatologi.....	II-9
2.1.6	Penggunaan dan Tutupan Lahan	II-12
2.1.7	Demografi	II-16
2.1.7.1	Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-16
2.1.7.2	Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan	II-19
2.1.7.3	Penduduk Menurut Pekerjaan.....	II-20
2.1.7.4	Penduduk Menurut Agama.....	II-22
2.1.7.5	Penduduk Menurut Kepala Keluarga	II-22
2.1.7.6	Penduduk Menurut Usia Sekolah	II-23
2.1.7.7	Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan	II-24
2.1.8	Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	II-25
2.1.8.1	Daya Dukung Permukiman	II-25
2.1.8.1	Daya Dukung Lahan Pertanian.....	II-26
2.1.8.2	Daya Dukung Air	II-28
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-37
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-37
2.2.1.1	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	II-37
2.2.1.2	Struktur Perekonomian Wilayah	II-40
2.2.1.3	Pertumbuhan Ekonomi	II-45
2.2.1.4	Gini Rasio	II-47
2.2.1.5	Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Wilayah).....	II-49
2.2.1.6	Angka Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan, dan Garis Kemiskinan.....	II-51
2.2.1.7	Indeks Kedalaman Dan Keparahakan Kemiskinan.....	II-54
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-55
2.2.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	II-56
2.2.2.1.1	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	II-57
2.2.2.1.2	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	II-58
2.2.2.1.3	Angka Harapan Hidup (AHH).....	II-59
2.2.2.1.4	Rata rata Pengeluaran Perkapita.....	II-66



2.2.2.2	Ketenagakerjaan	II-67
2.2.2.2.1	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-67
2.2.2.2.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-69
2.2.3	Seni Budaya dan Olahraga.....	II-72
2.3	Aspek Pelayanan Umum.....	II-74
2.3.1	Layanan Urusan Wajib.....	II-74
2.3.1.1	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar	II-74
2.3.1.1.1	Pendidikan	II-74
2.3.1.1.2	Kesehatan	II-78
2.3.1.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-86
2.3.1.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-99
2.3.1.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-103
2.3.1.1.6	Sosial	II-104
2.3.1.2	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Non-Dasar	II-110
2.3.1.2.1	Tenaga Kerja.....	II-110
2.3.1.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-111
2.3.1.2.3	Pangan	II-113
2.3.1.2.4	Lingkungan Hidup	II-115
2.3.1.2.5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-140
2.3.1.2.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-142
2.3.1.2.7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-145
2.3.1.2.8	Perhubungan	II-147
2.3.1.2.9	Komunikasi dan Informatika	II-155
2.3.1.2.10	Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	II-159
2.3.1.2.11	Penanaman Modal.....	II-163
2.3.1.2.12	Kepemudaan dan Olahraga.....	II-163
2.3.1.2.13	Statistik	II-165
2.3.1.2.14	Persandian	II-166
2.3.1.2.15	Kebudayaan.....	II-167
2.3.1.2.16	Perpustakaan dan Kearsipan	II-170
2.3.2	Layanan Urusan Pilihan	II-172
2.3.2.1	Pertanian	II-172
2.3.2.2	Kelautan dan Perikanan	II-180
2.3.2.3	Kehutanan.....	II-184
2.3.2.4	Energi dan Sumber Daya Alam.....	II-188
2.3.2.5	Pariwisata	II-191
2.3.2.6	Perdagangan	II-191
2.3.2.7	Industri	II-192
2.3.2.8	Transmigrasi	II-194
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-194
2.4.1	Kemampuan Ekonomi Daerah	II-194
2.4.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita.....	II-195
2.4.1.2	Nilai Tukar Petani	II-195
2.4.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-196
2.4.3	Sumber Daya Manusia	II-198
2.4.4	Capaian Kinerja Sasaran RPJMD Periode 2016-2021	II-198
2.4.5	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2019-2020 (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018).....	II-208
2.4.5.1	Bidang Urusan Pendidikan	II-209
2.4.5.2	Bidang Urusan Kesehatan.....	II-211
2.4.5.3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	II-212
2.4.5.4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	II-214
2.4.5.5	Bidang Urusan Tramtibumlinmas	II-216



2.4.5.6	Bidang Urusan Sosial	II-218
2.4.6	Kondisi Umum Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Selatan.....	II-220
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1	Kinerja Keuangan di Masa Lalu	III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-3
3.1.1.1	Pendapatan Daerah	III-9
3.1.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	III-10
3.1.1.1.2	Pendapatan Transfer	III-15
3.1.1.1.3	Lain – Lain Pendapatan yang Sah.....	III-18
3.1.1.1.4	Kemandirian Fiskal.....	III-19
3.1.1.2	Belanja Daerah.....	III-20
3.1.1.2.1	Belanja Operasi	III-22
3.1.1.2.2	Belanja Modal.....	III-26
3.1.1.2.3	Belanja Tak Terduga	III-30
3.1.1.2.4	Belanja Transfer.....	III-30
3.1.1.3	Pembiayaan	III-31
3.1.2	Neraca Daerah	III-34
3.1.2.1	Analisis Neraca Daerah.....	III-39
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-48
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-54
3.2.2	Analisis Pembiayaan.....	III-55
3.2.2.1	Defisit Riil Anggaran	III-55
3.2.2.2	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran	III-56
3.3	Kerangka Pendanaan.....	III-59
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-59
3.3.1.1	Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah	III-59
3.3.1.2	Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah.....	III-61
3.3.1.3	Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah.....	III-62
3.3.2	Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	III-68
3.4	Sumber Pendanaan Lainnya.....	III-72
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-2
4.1.1	Permasalahan Pokok Pembangunan Kalimantan Selatan	IV-2
4.1.1.1	Ketimpangan Antara Wilayah	IV-2
4.1.1.2	Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan	IV-3
4.1.1.3	Disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Wilayah	IV-5
4.1.1.4	Pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19).....	IV-6
4.1.1.5	Struktur Perekonomian Daerah Berkelanjutan Yang Masih Belum Kuat ..	IV-9
4.1.1.6	Sumber Daya Manusia Yang Belum Berdaya Saing.....	IV-11
4.1.1.7	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan yang Belum Optimal.....	IV-13
4.1.1.8	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Masih Perlu Ditingkatkan	IV-16
4.1.1.9	Keterbatasan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan.....	IV-17
4.1.2	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan	IV-17
4.1.2.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar.....	IV-17
4.1.2.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	IV-20
4.1.2.3	Urusan Pemerintahan Pilihan.....	IV-25
4.1.2.4	Urusan Penunjang Pemerintahan	IV-29
4.2	Isu Strategis.....	IV-31
4.2.1	Isu Strategis Internasional	IV-31
4.2.1.1	Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)	IV-31



4.2.1.2	Kesadaran Aksi Global terkait Climate Action (Aksi Iklim)	IV-32
4.2.1.3	Revolusi Industri 4.0.....	IV-34
4.2.1.4	Kesenjangan Global dalam Pembangunan Manusia (Global Inequality Human Development)	IV-36
4.2.1.5	Menipisnya cadangan mineral dunia.....	IV-37
4.2.1.6	Ancaman Krisis Ekonomi Global.....	IV-39
4.2.2	Isu Kebijakan Nasional.....	IV-40
4.2.2.1	Penelaahan RPJMN Tahun 2020-2024.....	IV-40
4.2.2.2	Kebijakan Pemerintah Tentang Penanganan Dampak COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi)	IV-46
4.2.2.3	Undang-Undang Pemindahan Ibukota Negara	IV-48
4.2.2.4	Proyek Strategis Nasional di Kalimantan Selatan	IV-51
4.2.3	Isu Kebijakan Lainnya	IV-53
4.2.3.1	Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalsel.....	IV-53
4.2.3.2	Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK)	IV-63
4.2.3.3	Isu Strategis Daerah Lainnya.....	IV-65
4.2.4	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026	IV-68
4.2.4.1	Sumber Daya Manusia	IV-68
4.2.4.2	Ekonomi	IV-69
4.2.4.3	Infrastruktur	IV-71
4.2.4.4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.....	IV-73
4.2.4.5	Peningkatan Kualitas Lingkungan.....	IV-74
4.2.4.6	Gerbang Ibukota Negara dan Food Estate.....	IV-75
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V-1
5.1	Visi	V-1
5.2	Misi	V-3
5.3	Tujuan dan Sasaran	V-5
5.4	Keselarasn RPJMD 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024	V-11
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ..	VI-1
6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	VI-1
6.2	Rencana Proyek Prioritas Pembangunan Daerah	VI-20
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1	Kerangka Pendanaan.....	VII-1
7.2	Program Perangkat Daerah	VII-4
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
BAB IX	PENUTUP	IX-1
9.1	Pedoman Transisi.....	IX-1
9.2	Kaidah Pelaksanaan.....	IX-2
9.3	Perubahan RPJMD	IX-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-8
Gambar I-2	Penyelarasan antara RPJMD dan RPJMN.....	I-9
Gambar I-3	Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan dokumen Perencanaan Lainnya ..	I-11
Gambar I-4	Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan KLHS	I-12
Gambar I-5	Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan dokumen Perencanaan Lainnya ..	I-15
Gambar II-1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Selatan	II-2
Gambar II-2	Topografi Provinsi Kalimantan Selatan	II-7
Gambar II-3	Peta Hidrologi Provinsi Kalimantan Selatan	II-8



Gambar II-4	Peta Klimatologi Provinsi Kalimantan Selatan	II-11
Gambar II-5	Peta Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-15
Gambar II-6	Perkembangan Penduduk dan Laju pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020	II-17
Gambar II-7	Perbandingan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-19
Gambar II-8	Laju pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020.....	II-19
Gambar II-9	Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Berdasarkan Jenis Kelamin Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020	II-21
Gambar II-10	Perbandingan Jumlah Penduduk berdasarkan Umur di Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-24
Gambar II-11	Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Kepmen LHK 2019 Secara Administrasi	II-30
Gambar II-12	Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Hasil Analisis Secara Administrasi	II-31
Gambar II-13	Status Pangan.....	II-34
Gambar II-14	Status Air	II-35
Gambar II-15	Status Air Analisis	II-36
Gambar II-16	Struktur PDRB ADHB Per Sektor Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021	II-41
Gambar II-17	Struktur PDRB ADHB Per Sektor Menurut Pengeluaran Tahun 2021	II-44
Gambar II-18	Struktur PDRB ADHB Per Sektor Menurut Pengeluaran Tw 1 – Tw 3 (C-to-C) Tahun 2021	II-44
Gambar II-19	Gini Ratio Indonesia Per Provinsi per September Tahun 2021	II-49
Gambar II-20	Distribusi Pengeluaran Penduduk Kalimantan Selatan per September 2021 .II-50	
Gambar II-21	Perkembangan Indeks Williamson Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020..	II-51
Gambar II-22	Angka Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021. Serta AHH Kabupaten/Kota Tahun 2021	II-60
Gambar II-23	Angka Kematian Ibu di Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2021 dan Kasus Kabupaten/Kota Tahun 2021	II-61
Gambar II-24	Angka Kematian Bayi di Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2021 dan Kasus Kabupaten/Kota Tahun 2021	II-62
Gambar II-25	Angka Kematian Balita di Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2020 dan Kasus Kabupaten/Kota Tahun 2021	II-63
Gambar II-26	Pekembangan Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2020	II-66
Gambar II-27	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017–2021	II-68
Gambar II-28	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2021	II-69
Gambar II-29	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2022	II-81
Gambar II-30	Jumlah Tenaga Dokter di Kabupaten/Kota Tahun 2021	II-81
Gambar II-31	Jumlah Tenaga Keperawatan dan Bidan di Kabupaten/Kota Tahun 2021	II-82
Gambar II-32	Jumlah Kefarmasian Dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2021	II-82
Gambar II-33	Capaian Kondisi Jalan Mantap Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 .II-88	
Gambar II-34	Wilayah Sungai di Kalimantan Selatan, a) WS Barito, b) WS Cengal – Batulicin, c) WS Pulau Laut	II-89
Gambar II-35	Capaian Air Minum Kalimantan Selatan 2016 – 2020.....	II-93
Gambar II-36	Capaian Air Minum Kab/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2019-2020 ...	II-94
Gambar II-37	Capaian Air Minum Kab/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2019-2020 ...	II-95
Gambar II-38	Persentase Penganganan Kumuh Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018-2021	II-102
Gambar II-39	Kerusakan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-103
Gambar II-40	Jumlah angkatan kerja (Jiwa) Provinsi Kalimantan Selatan. 2016-2020 ...	II-111
Gambar II-41	Gambar Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Kualitas Air (IKA) di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020.....	II-118
Gambar II-42	Grafik Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kalimantan Selatan	



	Tahun 2016-2020	II-118
Gambar II-43	Peta Fungsi ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Selatan	II-121
Gambar II-44	Bus AKAP Prov. Kalimantan Selatan	II-151
Gambar II-45	Kunjungan Wisata di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020.....	II-192
Gambar II-46	Pertumbuhan Produksi Industri Kecil dan Menengah serta Industri Besar dan Sedang Per Triwulan Tahun 2017 - 2019 (year to year)	II-194
Gambar II-47	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran Per Kapita Tahun 2020 dan Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-196
Gambar II-48	Tukar Petani Kalimantan Selatan dan Rata-rata Nasional Tahun 2016-2020	II-197
Gambar II-49	Persentase peningkatan pengguna listrik dan informasi jenis pelanggan di Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2020	II-198
Gambar II-50	Tingkat Penghunian Kamar per Bulan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan Rata-rata Lama Menginap tamu Asing dan tamu Domestik ...	II-198
Gambar II-51	Bagan Struktur Organisasi BLUD Balai Pengelolaan Air Minum Banjarmakula	II-215
Gambar III.1	Pendapatan Daerah.....	III-9
Gambar III.2	Struktur Pendapatan Daerah	III-10
Gambar III.3	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	III-11
Gambar III.4	Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020.....	III-12
Gambar III.5	Pendapatan Pajak Daerah	III-13
Gambar III.6	Pendapatan Retribusi Daerah	III-13
Gambar III.7	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	III-14
Gambar III.8	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	III-15
Gambar III.9	Pendapatan Transfer.....	III-16
Gambar III.10	Struktur Pendapatan Transfer Tahun 2020.....	III-16
Gambar III.11	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	III-17
Gambar III.12	Struktur Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2020.....	III-17
Gambar III.13	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	III-18
Gambar III.14	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	III-19
Gambar III.15	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 - 2019	III-20
Gambar III.16	Belanja Daerah.....	III-21
Gambar III.17	Struktur Belanja Daerah	III-22
Gambar III.18	Belanja Operasi	III-22
Gambar III.19	Struktur Belanja Operasi Tahun 2020.....	III-23
Gambar III.20	Belanja Pegawai.....	III-23
Gambar III.21	Belanja Barang dan Jasa	III-24
Gambar III.22	Belanja Hibah.....	III-25
Gambar III.23	Belanja Bantuan Sosial.....	III-25
Gambar III.24	Belanja Bantuan Keuangan	III-26
Gambar III.25	Belanja Modal.....	III-26
Gambar III.26	Struktur Belanja Modal Tahun 2020.....	III-27
Gambar III.27	Belanja Tanah	III-27
Gambar III.28	Belanja Peralatan dan Mesin	III-28
Gambar III.29	Belanja Bangunan dan Gedung	III-28
Gambar III.30	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	III-29
Gambar III.31	Belanja Aset Tetap Lainnya	III-29
Gambar III.32	Belanja Tak Terduga.....	III-30
Gambar III.33	Belanja Transfer.....	III-31
Gambar III.34	Struktur Belanja Transfer Tahun 2020	III-31
Gambar III.35	Pembiayaan Daerah	III-32
Gambar III.36	Penerimaan Pembiayaan	III-33
Gambar III.37	Pengeluaran Pembiayaan	III-33
Gambar III.38	Struktur Pembiayaan.....	III-34
Gambar III.39	Aset Daerah	III-35
Gambar III.40	Aset Lancar	III-35



Gambar III.41	Aset Lancar	III-36
Gambar III.42	Aset Tetap	III-36
Gambar III.43	Aset Lainnya.....	III-37
Gambar III.44	Dana Cadangan.....	III-37
Gambar III.45	Struktur Aset Daerah.....	III-38
Gambar III.46	Kewajiban	III-38
Gambar III.47	Kewajiban Jangka Pendek	III-39
Gambar III.48	Ekuitas Dana	III-39
Gambar III.49	Rasio Lancar.....	III-40
Gambar III.50	Rasio Quick.....	III-41
Gambar III.51	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	III-42
Gambar III.52	Rasio Hutang terhadap Modal	III-43
Gambar III.53	Rasio Hutang terhadap Modal	III-44
Gambar III.54	Rata-rata Umur Persediaan	III-45
Gambar IV-1	Alur Metodologi Penetapan Isu-Isu Strategis Pembangunan	IV-1
Gambar IV-2	Perkembangan Indeks Williamson Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020 .	IV-3
Gambar IV-3	Perkembangan Data Perkembangan Kasus Konfirmasi, Sembuh dan Meninggal (COVID-19) di Provinsi Kalimantan Selatan.....	IV-8
Gambar IV-4	Dukungan transportasi konektivitas terhadap distribusi logistik	IV-50
Gambar IV-5	Konektivitas IKN	IV-50
Gambar V-1	Strategi Dalam Pelaksanaan Misi Nawacita dan Pencapaian Sasaran Visi Indonesia 2045	V-12
Gambar V-2	Target Pembangunan Wilayah Tahun 2024	V-14

DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Keterkaitan antara RPJMD dan RPJPD	I-9
Tabel I-2	Keterkaitan antara RPJMD Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah	I-13
Tabel II-1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021	II-3
Tabel II-2	Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Lereng/Kemiringan dan Kelas Ketinggian dari Permukaan Laut, 2021	II-4
Tabel II-3	Potensi Bencana Di Provinsi Kalimantan Selatan	II-6
Tabel II-4	Pembagian Luas DAS Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	II-8
Tabel II-5	Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, Rata-rata Tekanan Udara, dan Rata-rata Penyinaran Matahari, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019	II-10
Tabel II-6	Kelembaban Udara (%) dan Temperatur (°C) Provinsi Kalimantan Selatan, 2020	II-12
Tabel II-7	Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 - 2020.....	II-13
Tabel II-8	Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.....	II-13
Tabel II-9	Luas Tutupan Lahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019	II-16
Tabel II-10	Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kab/Kota Tahun 2016-2020	II-17
Tabel II-11	Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.....	II-18
Tabel II-12	Laju pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten Kota Tahun 2016-2020.....	II-20
Tabel II-13	Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan menurut Jenis Pekerjaan/Lapangan Usaha	II-20
Tabel II-14	Sebaran Penduduk Menurut Agama.....	II-22
Tabel II-15	Sebaran Penduduk Menurut Kepala Keluarga	II-22
Tabel II-16	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-23
Tabel II-17	Perhitungan Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2019	II-27
Tabel II-18	Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Air Setiap Kabupaten/Kota BerdasarkanKepmen LHK	II-29
Tabel II-19	Hasil Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air Setiap Kabupaten/Kota Berdasarkan Analisis	II-30
Tabel II-20	Perhitungan Daya Dukung Air Berdasarkan Administrasi Tahun 2019	II-33



Tabel II-21	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Selatan 2017-2021 (Juta Rupiah)	II-38
Tabel II-22	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Selatan 2017-2021 (Juta Rupiah)	II-39
Tabel II-23	PDRB Provinsi Kalimantan Selatan 2017-2021 (Triliun Rupiah) Menurut Pengeluaran	II-40
Tabel II-24	Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 - 2021	II-42
Tabel II-25	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Konstan 2010	II-45
Tabel II-26	LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020 Menurut Pengeluaran	II-47
Tabel II-27	Gini Ratio Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. 2017-2021	II-47
Tabel II-28	Indeks Williamson Kalimantan Selatan (2016-2020)	II-50
Tabel II-29	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021	II-51
Tabel II-30	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Semester I di Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2020-2021	II-52
Tabel II-31	Garis Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2014 s.d. 2021 (Rupiah)	II-53
Tabel II-32	Garis Kemiskinan Menurut Tempat Tinggal Tahun 2014 s.d. 2021 (Rupiah)	II-54
Tabel II-33	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota 2017 s.d. 2021 (Rupiah)	II-54
Tabel II-34	Persentase Penduduk Miskin (P0), Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2021	II-55
Tabel II-35	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional Kalimantan dan dan Nasional Tahun 2017-2021	II-56
Tabel II-36	Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. 2021	II-57
Tabel II-37	Angka Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. 2017-2021	II-58
Tabel II-38	Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. 2017-2021	II-58
Tabel II-39	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) Provinsi Kalimantan Selatan. 2015-2021	II-60
Tabel II-40	Perkembangan Penyakit menular di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020	II-63
Tabel II-41	Penyakit Tidak Menular Tahun 2020	II-63
Tabel II-42	Perkembangan Status Gizi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020	II-64
Tabel II-43	Jumlah Stunting di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-65
Tabel II-44	Perkembangan pengalangan perkapita di Provinsi Pulau Kalimantan Tahun 2017-2021	II-66
Tabel II-45	Persentase Penduduk Bekerja, Pengangguran, dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2020	II-69
Tabel II-46	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Selama Tahun 2017-2021	II-70
Tabel II-47	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020	II-70
Tabel II-48	Lulusan SMK Kalimantan Selatan yang diterima Bekerja pada Tahun 2020-2021	II-71
Tabel II-49	Sertifikasi Lulusan SMK Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	II-72
Tabel II-50	Berbagai Seni Budaya di Kalimantan Selatan	II-73
Tabel II-51	Pencapaian APS pada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan Di Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020	II-75
Tabel II-52	Pencapaian APK ada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan di Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020	II-75
Tabel II-53	Pencapaian APM ada Semua Jenjang Dan Jenis Pendidikan Di Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020	II-75
Tabel II-54	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru, serta Indikatornya di Provinsi Kalimantan Selatan 2013-2020	II-76
Tabel II-55	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-78
Tabel II-56	Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-79
Tabel II-57	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-82
Tabel II-58	Capaian Kinerja Urusan RS Ulin Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-84
Tabel II-59	Capaian Kinerja Urusan RS Ansari Saleh Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-85
Tabel II-60	Capaian Kinerja Urusan RSJ Sambang Lihum Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-85



Tabel II-61	Luasan Banjir/Genangan di DAS kewenangan Provinsi Tahun 2019.....	II-89
Tabel II-62	Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI di Kalimantan Selatan Tahun 2019	II-90
Tabel II-63	Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI/DIR di Kalimantan Selatan berdasarkan One Map Irigasi pada Tahun 2019	II-90
Tabel II-64	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Provinsi Kalimantan Selatan	II-91
Tabel II-65	Infrastruktur Penyediaan Air Minum di Provinsi Kalimantan Selatan	II-93
Tabel II-66	Kondisi Pencapaian Cakupan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan	II-95
Tabel II-67	Realisasi Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2020.....	II-95
Tabel II-68	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2018 sampai 2021	II-96
Tabel II-69	Status RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan	II-97
Tabel II-70	Status RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan	II-98
Tabel II-71	Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Kewenangan Penanganan	II-99
Tabel II-72	Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan	II-100
Tabel II-73	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-101
Tabel II-74	Penangan PSU di Kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	II-102
Tabel II-75	Kondisi Keamanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2019	II-103
Tabel II-76	Capaian Kinerja Urusan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-103
Tabel II-77	Perkembangan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan	II-103
Tabel II-78	Capaian Kinerja Urusan BPBD Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-104
Tabel II-79	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2016-2020	II-105
Tabel II-80	Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-106
Tabel II-81	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	II-107
Tabel II-82	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.....	II-109
Tabel II-83	Perkembangan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020.....	II-111
Tabel II-84	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kalimantan Selatan 2011-2020	II-111
Tabel II-85	Pemberdayaan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2020	II-112
Tabel II-86	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 - 2020.....	II-113
Tabel II-87	Capaian Kinerja Urusan DPPP Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-113
Tabel II-88	Produksi Pangan Utama di Kalimantan Selatan Tahun 2012-2019	II-114
Tabel II-89	Capaian Kinerja Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-114
Tabel II-90	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020	II-115
Tabel II-91	Kondisi Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020	II-116
Tabel II-92	Parameter Status Pencemar Udara	II-118
Tabel II-93	Perubahan Emisi GRK Tahun 2016-2020 di Kalimantan Selatan	II-118
Tabel II-94	Luas dan Sebaran Indikator Fungsi Ekosistem Gambut per Kabupaten	II-121
Tabel II-95	Sebaran Status Kerusakan Pada Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	II-122
Tabel II-96	Sebaran Status Kerusakan Pada Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut	II-122
Tabel II-97	Kondisi Tutupan Lahan di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020	II-124
Tabel II-98	Timbulan Limbah Covid 19 Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.....	II-127
Tabel II-99	Timbulan Limbah Covid 19 Provinsi Kalimantan Selatan s.d Bulan Oktober 2021 ...	II-128
Tabel II-100	Tabel Status Mutu Air Sungai Provinsi Kalsel Tahun 2021	II-130
Tabel II-101	Parameter Indeks Kualitas Air (IKA).....	II-132
Tabel II-102	Capaian Kinerja Urusan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-139
Tabel II-103	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-140
Tabel II-104	Inventarisasi Peraturan Perundangan terkait Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil di Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan	II-141
Tabel II-105	Pertumbuhan Jumlah Badan Usaha Milik Desa Kalimantan Selatan dari Tahun 2015 - 2020	II-142
Tabel II-106	Data Registrasi Bumdes Tahun 2020	II-143



Tabel II-107	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-144
Tabel II-108	Perkembangan Kepesertaan KB di Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-145
Tabel II-109	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-146
Tabel II-110	Data Terminal Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	II-149
Tabel II-111	Trayek dan Tarif Bus AKAP	II-150
Tabel II-112	Koridor Pelayanan BRT Banjarbakula	II-151
Tabel II-113	Data Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi Kalimantan Selatan	II-151
Tabel II-114	Data Eksisting Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan	II-153
Tabel II-115	Aktivitas Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017-2021	II-153
Tabel II-116	Aktivitas Bandara di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2019	II-154
Tabel II-117	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016-2021 Provinsi Kalimantan Selatan	II-155
Tabel II-118	Persebaran Desa Bebas <i>Blank Spot</i> dan Desa <i>Blank Spot</i>	II-155
Tabel II-119	Jumlah BTS di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 - 2019	II-156
Tabel II-120	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Internet di Kantor Desa/Lurah menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah (Desa)	II-157
Tabel II-121	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Keluarga Pelanggan Telepon Tetap Kabel Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah (Desa)	II-157
Tabel II-122	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-157
Tabel II-123	Rekapitulasi Data Aduan Masyarakat yang Masuk Melalui SP4N-LAPOR (LAPORPAMAN) Tahun 2017 - 2021	II-158
Tabel II-124	Rekapitulasi Top Isu Publik yang Beredar di Masyarakat Tahun 2017 - 2021	II-158
Tabel II-125	Tabel Jumlah Informasi Publik Yang Disebarluaskan	II-159
Tabel II-126	Jumlah Unit Koperasi Menurut Jenis Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020	II-160
Tabel II-127	Jumlah Jenis Usaha Mikro Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-161
Tabel II-128	Jumlah Jenis Usaha Menengah Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-161
Tabel II-129	Jumlah Jenis Usaha Kecil Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-161
Tabel II-130	Rekap Data UMKM Provinsi Kalimantan Selatan	II-162
Tabel II-131	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-162
Tabel II-132	Jumlah Proyek, Rencana, dan Realisasi Investasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2020 PMA dan PMDN	II-163
Tabel II-133	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-163
Tabel II-134	Athlet Dan Pelatih Tahun 2021	II-164
Tabel II-135	Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-164
Tabel II-136	Daftar Penetapan Warisan Budaya Takbenda Kalimantan Selatan Tahun 2013 - 2020	II-168
Tabel II-137	Jenis Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Selatan	II-169
Tabel II-138	Perkembangan Indikator Perpustakaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020	II-171
Tabel II-139	Pengelolaan Arsip Secara Baku di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2020	II-171
Tabel II-140	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-172
Tabel II-141	Luas Panen, Produksi, serta Produktivitas Padi dan Palawija Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2018-2020	II-173
Tabel II-142	Produksi Delapan Komoditas Buah-buahan Utama di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2018 - 2020(Dibuat Antar Wilayah)	II-174
Tabel II-143	Produksi Komoditas Sayuran Utama di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2018 - 2019	II-174
Tabel II-144	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-174
Tabel II-145	Luas Perkebunan dan Produksi Perkebunan berdasarkan Jenis Perkebunan di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2019	II-175
Tabel II-146	Produksi Lima Komoditas Tertinggi Komoditas Perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2018 - 2019	II-176
Tabel II-147	Jumlah Ternak Besar, Ternak Kecil, dan Unggas (Ekor) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008-2019	II-178



Tabel II-148	Jumlah Produksi Telur (Kg) di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2010-2019	II-178
Tabel II-149	Capaian Kinerja Urusan Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-179
Tabel II-150	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga, Produksi, dan Nilai Produksi Sub Sektor Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2010-2019	II-183
Tabel II-151	Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-183
Tabel II-152	Perkembangan Produksi Kayu Bulat (m ³) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2020	II-185
Tabel II-153	Kondisi Lahan Kritis dan sangat Kritis di Kalimantan Selatan Tahun 2019	II-187
Tabel II-154	Kondisi Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan di Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-187
Tabel II-155	Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-188
Tabel II-156	Jumlah Produksi Batubara Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2020	II-188
Tabel II-157	Data Penjualan Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan	II-189
Tabel II-158	Jumlah IUP di Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-189
Tabel II-159	Jumlah Peningkatan Pelanggan Listrik di Kalimantan Selatan Tahun Tahun 2016 - 2020	II-190
Tabel II-160	Jumlah Pelanggan Listrik menurut Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2014 - 2020	II-190
Tabel II-161	Capaian Kinerja Urusan ESDM Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-190
Tabel II-162	Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-191
Tabel II-163	Volume dan Nilai Realisasi Ekspor Menurut Komoditas Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2020	II-192
Tabel II-164	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-192
Tabel II-165	Perkembangan Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020	II-193
Tabel II-166	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-193
Tabel II-167	Rasio Ketergantungan di Provinsi Kalimantan Selatan. 2020	II-198
Tabel II-168	Capaian Kinerja RPJMD Periode 2016-2021	II-200
Tabel II-169	Realisasi Pencapaian SPM Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019	II-209
Tabel II-170	Realisasi Pencapaian SPM Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-210
Tabel II-171	Pencapaian SPM Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan	II-210
Tabel II-172	Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	II-211
Tabel II-173	Dukungan Personil dalam Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	II-212
Tabel II-174	Target Pencapaian SPM Sub Bidang Air Minum Daerah	II-213
Tabel II-175	Target Pencapaian SPM Bidang Tramfibunlinmas	II-217
Tabel II-176	Jumlah Indikator TPB Berdasarkan Kategori di Kalimantan Selatan	II-220
Tabel III-1	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2019 (Struktur APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006)	III-4
Tabel III-2	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020 (Struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)	III-6
Tabel III-3	Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah	III-19
Tabel III-4	Rasio Lancar Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020	III-40
Tabel III-5	Rasio Quick Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020	III-41
Tabel III-6	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020	III-42
Tabel III-7	Rasio Hutang terhadap Modal Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020	III-42
Tabel III-8	Rata-rata Umur Piutang Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020	III-43
Tabel III-9	Rata-rata Umur Persediaan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020	III-44
Tabel III-10	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020	III-46
Tabel III-11	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020	III-54



Tabel III-12	Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020	III-55
Tabel III-13	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020	III-56
Tabel III-14	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020	III-58
Tabel III-15	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 s/d Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Selatan	III-64
Tabel III-16	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 s/d Tahun 2026	III-69
Tabel III-17	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 s/d Tahun 2026	III-71
Tabel IV-1	Indeks Williamson Kalimantan Selatan (2016-2020)	IV-3
Tabel IV-2	Data Perbandingan Kasus COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan	IV-8
Tabel IV-3	Daftar Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024 terkait dengan Provinsi Kalimantan Selatan	IV-51
Tabel IV-4	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Pada Pilar Sosial	IV-54
Tabel IV-5	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Pada Pilar Ekonomi	IV-57
Tabel IV-6	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Pada Pilar Lingkungan	IV-60
Tabel IV-7	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola	IV-63
Tabel V-1	Penekanan 5 Tahun RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan	V-2
Tabel V-2	Penyusunan Penjelasan Visi	V-3
Tabel V-3	Perumusan Penjelasan Misi RPJMD	V-4
Tabel V-4	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026	V-6
Tabel V-5	Penyelarasan Visi-Misi-Tujuan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan	V-14
Tabel V-6	Penyelarasan Target Indikator Makro Nasional dan Provinsi	V-16
Tabel VI-1	Agenda/Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026	VI-2
Tabel VI-2	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan	VI-2
Tabel VI-3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Misi 1	VI-3
Tabel VI-4	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Misi 2	VI-5
Tabel VI-5	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Misi 3	VI-12
Tabel VI-6	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Misi 4	VI-15
Tabel VI-7	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Misi 5	VI-17
Tabel VI-8	Proyek Prioritas Pembangunan	VI-20
Tabel VI-9	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Kalimantan Selatan	VI-21
Tabel VII-1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Provinsi Kalimantan Selatan	VII-2
Tabel VII-2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026	VI-20
Tabel VII-1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Provinsi Kalimantan Selatan	VII-2
Tabel VII-2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026	VI-20
Tabel VIII-1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Selatan	VIII-3
Tabel VIII-2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	VIII-4

2021 - 2026



R P J M D

P r o v i n s i

K A L I M A N T A N

PENDAHULUAN

S E L A T A N

T a h u n

2 0 2 1 - 2 0 2 6

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada setiap Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang integral dalam satu Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. Dinamika proses demokrasi yang terjadi berdampak pada waktu pelantikan Kepala Daerah terpilih, sehingga baru pada tanggal 25 Agustus 2021 Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih periode 2021-2024 dilantik oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia



Nomor 105/P Tahun 2021, tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur, dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Dengan demikian terhitung sejak 25 Agustus 2021 Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh **H. Sahbirin Noor** sebagai Kepala Daerah dan **H. Muhidin** sebagai Wakil Kepala Daerah yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus menyusun RPJMD. Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 merupakan tahapan keempat atau tahapan terakhir RPJPD Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025. Penekanan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan pada periode keempat RPJPD yakni mewujudkan perdagangan dan jasa berbasis agroindustri dalam rangka mencapai masyarakat maju dan sejahtera. Dengan demikian, kebijakan pembangunan dalam RPJMD ini diarahkan untuk mencapai target akhir pembangunan jangka panjang provinsi, melaksanakan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah, dan sekaligus melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Proses persiapan penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dimulai sebelum pelantikan kepala daerah. Tahapan penyusunan RPJMD dilakukan sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, meliputi: 1). persiapan penyusunan; 2). penyusunan rancangan awal; 3). penyusunan rancangan; 4). pelaksanaan Musrenbang; 5). perumusan rancangan akhir; dan 6). penetapan. Dalam pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut, melibatkan multi-pihak yang memuat unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang disusun melalui proses pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas-bawah serta bawah-atas (*top down-bottom up*). Melengkapi pendekatan di atas, penyusunan dokumen ini juga menggunakan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, diharapkan dapat dihasilkan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang mampu menjawab permasalahan



dan tantangan pembangunan dengan mengoptimalkan sumberdaya dan peluang yang ada. Dokumen RPJMD ini disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang ditunjukkan dari pengintegrasian hasil KLHS ke dalam dokumen RPJMD Kalimantan Selatan.

Dokumen RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai periode berkenaan.

Dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Tahun 2021-2026 juga menjadi acuan untuk menyusun RKPD Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi seluruh alur pembangunan jangka menengah dan berkaitan dengan seluruh *stakeholder* di Provinsi Kalimantan Selatan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta



- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

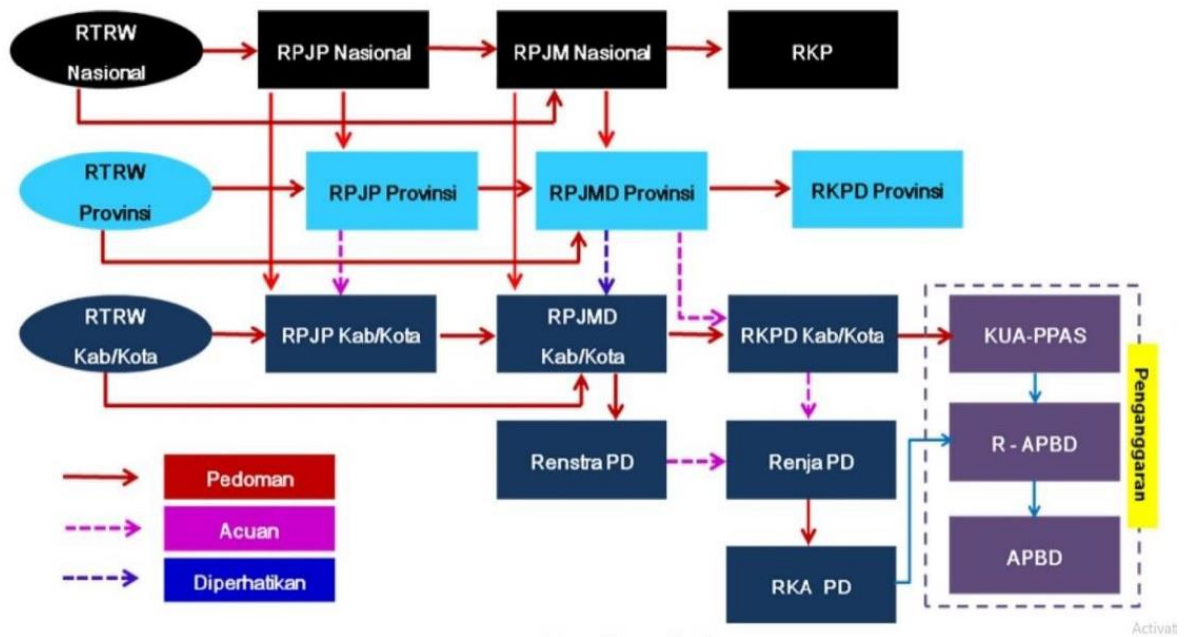


30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015–2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 10); dan
37. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, dimana dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJMN, RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan, Dokumen RPJMD Provinsi tetangga, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan

Peraturan – peraturan daerah yang berlaku juga dokumen – dokumen sectoral lainnya.



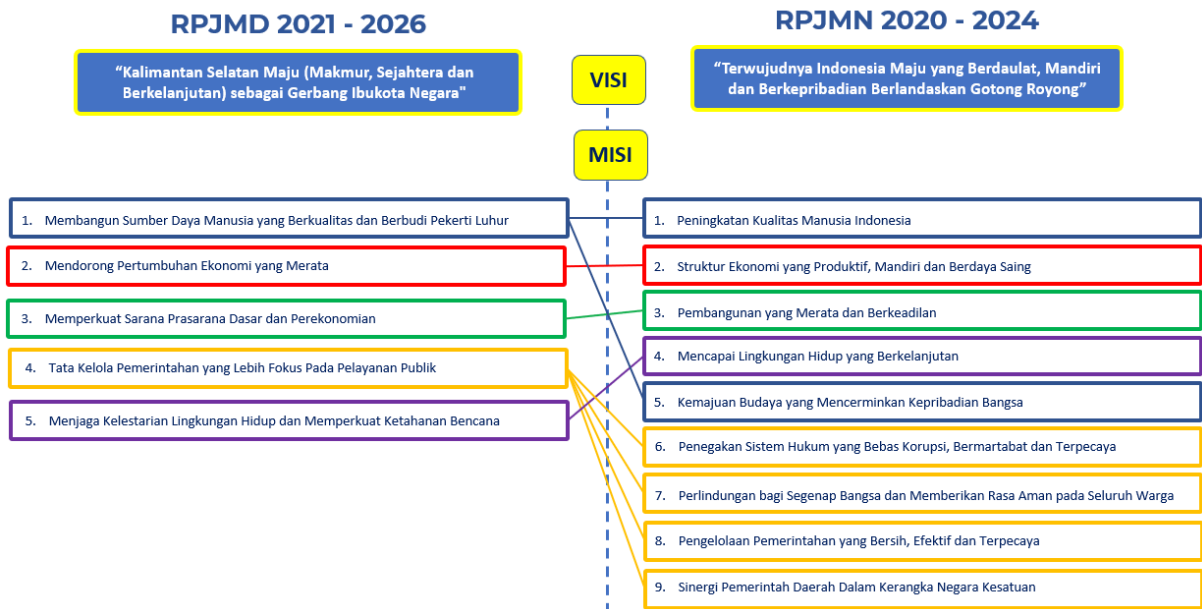
Gambar I-1 Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Permendagri 86 tahun 2017

Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya diuraikan sebagai berikut:

1.3.1 RPJMD dengan RPJMN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Selain itu target-target nasional yang dicanangkan dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yang perlu mendapatkan dukungan dari Provinsi Kalimantan Selatan juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.



Gambar I-2 Penyelarasan antara RPJMD dan RPJMN

1.3.2 RPJMD dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan

Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan di dalam RPJPD Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025. RPJMD periode ini merupakan tahapan keempat dalam RPJPD Tahun 2005-2025 yang ditujukan untuk mewujudkan wilayah perdagangan dan jasa berbasis agroindustri dalam rangka mencapai masyarakat maju dan sejahtera. Keterkaitan antara RPJMD dan RPJPD terlihat pada tabel berikut:

Tabel I-1 Keterkaitan antara RPJMD dan RPJPD

RPJMD 2021-2026	RPJPD 2005-2025
VISI	
"Kalimantan Selatan Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara".	"Maju dan Sejahtera Sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agroindustri"
MISI	
Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata	Mengembangkan ekonomi ke arah industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik
Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	Mengembangkan sarana dan prasarana pembangunan yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan

Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik	Menciptakan taat asas dan tertib hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama
Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana	Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan

Sumber: Hasil Analisis, 2021

1.3.3 RPJMD dengan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan

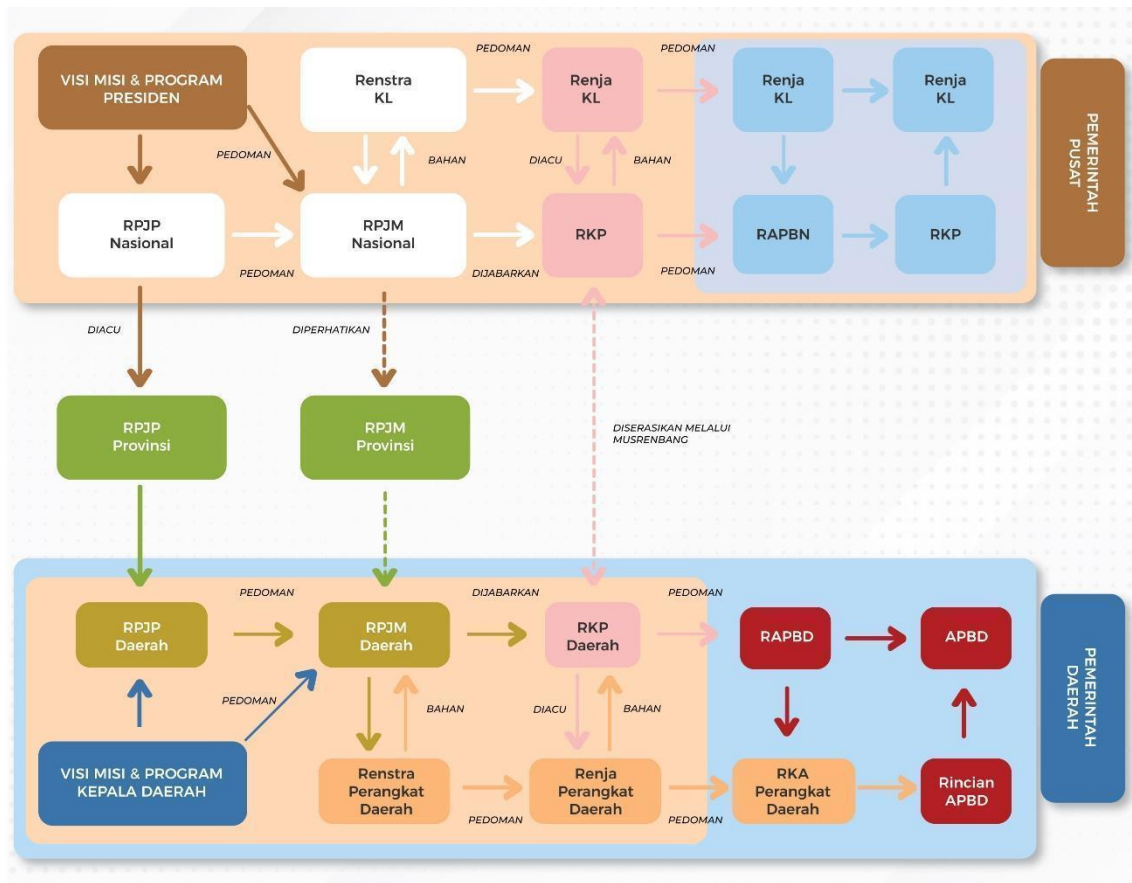
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bukan hanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015–2035, namun juga Revisinya yang saat ini sedang berproses. Konsep pengembangan Provinsi Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh upaya optimalisasi peluang geostrategis dan kebijakan nasional, diantaranya optimalisasi jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia II, rencana pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, rencana pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, dan kecenderungan peralihan dari ekonomi ekstraktif menuju non ekstraktif, serta potensi pengembangan sektor kelautan dan pariwisata. Konsepsi ini mengharuskan adanya keterikatan koordinasi dan kolaborasi (kerjasama antar kabupaten/kota) yang mengikat. Kerjasama tersebut melingkupi pemenuhan kebutuhan mobilitas, infrastruktur untuk ekonomi (angkutan barang dan penumpang) yang terintegrasi, serta perwujudan lingkungan wilayah yang sehat, cerdas dan efisien.

1.3.4 RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

Dokumen RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan serta sub kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimuat dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Gambaran singkat keterkaitan antara dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar I-3 Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diolah

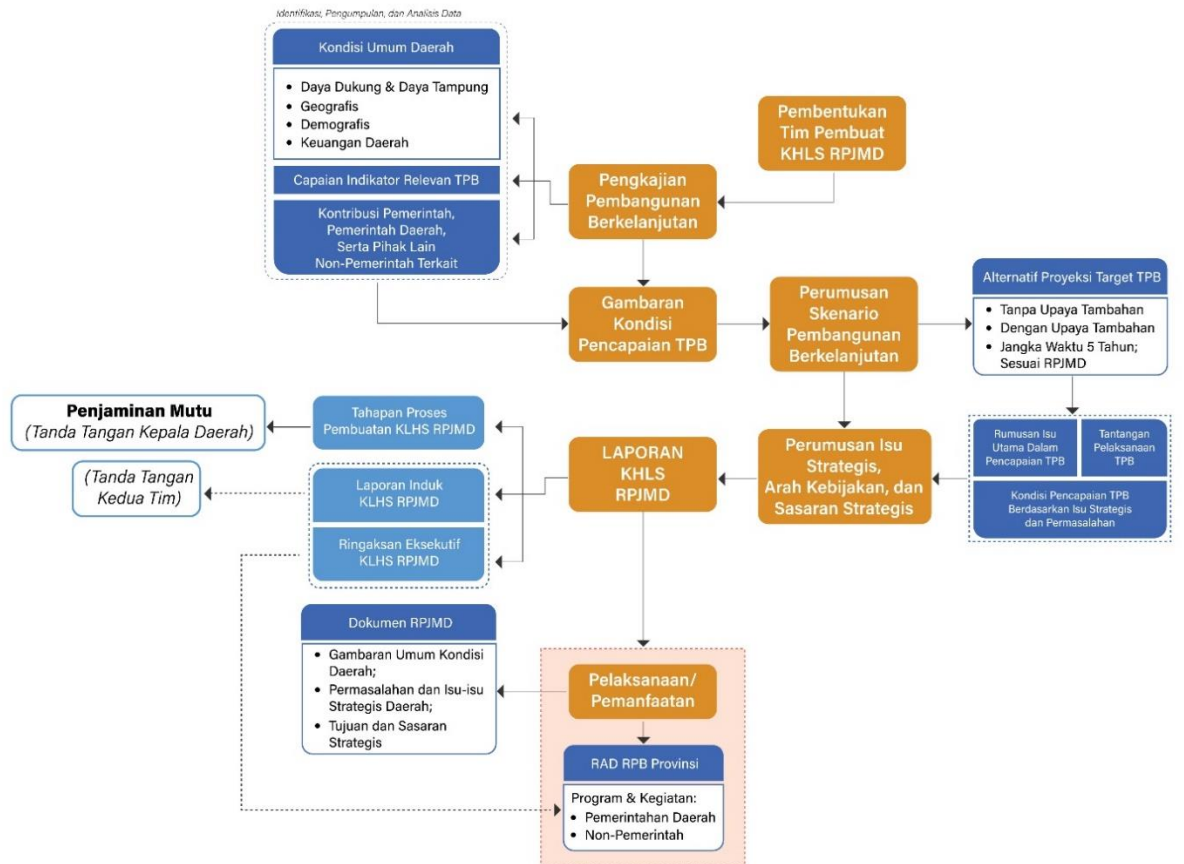
1.3.5 RPJMD dengan KLHS

Penyusunan RPJMD mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam RPJMD. KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif dalam kebijakan, rencana, program dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan.

Berdasarkan KLHS, maka RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan disusun dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Penjabaran Visi dan Misi agar memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan.

2. Memperhatikan kajian pengaruh yang berdampak negatif terhadap isu strategis yang muncul
3. Memperhatikan karakteristik wilayah kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sehingga berhasil guna dan berdaya guna.



Gambar I-4 Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan KLHS

Sumber: KLHS RPJMD 2021 - 2026

1.3.6 RPJMD Kalimantan Selatan, RPJMD Kalimantan Timur dan RPJMD Kalimantan Tengah

Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 perlu dibandingkan dengan RPJMD tetangganya yaitu RPJMD Kalimantan Timur dan RPJMD Kalimantan Tengah guna melihat keterhubungan ketiganya dalam mewujudkan pembangunan di Pulau Kalimantan. Berikut adalah tabelnya :

Tabel I-2 Keterkaitan antara RPJMD Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah

	RPJMD Kalimantan Selatan 2021-2026	RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023	RPJMD Kalimantan Tengah 2021-2026
VISI	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA	Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat	KALTENG MAKIN "BERKAH" (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)
MISI	<p>Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan Visi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur. 2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata. 3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian. 4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik. 5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas; 2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; 3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan; 4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; 5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif Dan Berwawasan Lingkungan 2. Memperkuat Ketahanan Daerah Dan Mengantisipasi Perubahan Global 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi 4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing 5. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Toleransi dan Nilai-nilai Keagamaan 2. Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 3. Meningkatnya perekonomian daerah 4. Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan 5. Menurunnya tingkat Pengangguran 6. Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Masyarakat yang berakhlak mulia dan berdaya saing 2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat 3. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan 4. Mewujudkan Kemandirian ekonomi yang berkelanjutan 5. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar 6. Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup 6. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing 2. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing 3. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing 4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing 5. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia

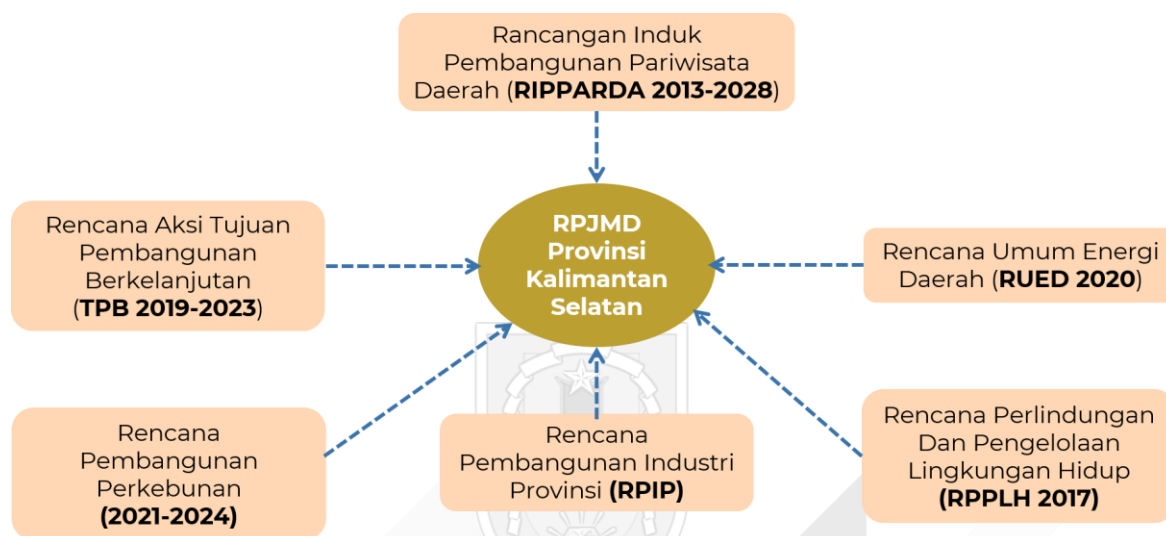
	RPJMD Kalimantan Selatan 2021-2026	RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023	RPJMD Kalimantan Tengah 2021-2026
	7. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing daerah 8. Menguatnya Kualitas Lingkungan Hidup 9. Meningkatnya Ketahanan Bencana		Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing 6. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing 7. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing 8. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, terlihat bahwa secara visi terdapat perbedaan bahasa dimana Kalimantan Selatan berfokus pada penyiapan untuk menjadi gerbang ibu kota negara baru. Sedangkan secara misi dan tujuan, ketiganya sudah berfokus pada kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi dan infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup.

1.3.7 RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain Rancangan Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA 2013-2028), Rencana Umum Energi Daerah (RUED 2020), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH 2017), Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP), Rencana Pembangunan Perkebunan dan RAD *Sustainable Development Goals* (SDGs), juga dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.



Gambar I-5 Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: RIPPARDA, RUED, RPPLH, RPIP dan TPB, diolah.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN Tahun 2020-2024.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program perangkat daerah yang disertai dengan anggaran yang bersifat indikatif.
2. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahun, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Menyediakan pedoman bagi penyusunan RPJMD kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dan dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi kondisi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan secara komprehensif sebagai basis atau dasar bagi perumusan perencanaan. Dalam bab ini memuat data dan informasi pembangunan daerah beberapa tahun terakhir yang terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu (i) geografi dan demografi, (ii) Kesejahteraan Masyarakat, (iii) Pelayanan Umum, dan (iv) Daya Saing Daerah. Selain itu, disajikan juga capaian kinerja pembangunan dalam RPJMD periode lalu, penerapan SPM, dan capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini berisi tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan daerah. Kerangka pendanaan daerah memberikan gambaran proyeksi kapasitas keuangan daerah dalam mendanai program pembangunan daerah. Selain itu, dimuat juga alternatif sumber pendanaan selain APBD Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung pembangunan daerah.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi tentang permasalahan daerah berdasarkan capaian atau kinerja pembangunan, dan isu strategis pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan ke tujuan dan sasaran disertai dengan indikator kinerja dan target per tahun.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu dalam bab ini juga memuat program pembangunan daerah dalam mendukung sasaran-sasaran pembangunan yang disertai pagu indikatif.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program perangkat daerah selama 5 (lima) tahun yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Program disajikan berdasarkan urusan



memuat program dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi, disertai dengan indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan perangkat daerah penanggung jawab.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini berisi tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan kepala daerah.

BAB IX PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD berakhir.

R P J M D
P r o v i n s i
K A L I M A N T A N
S E L A T A N
T a h u n
2 0 2 1 - 2 0 2 6



R P J M D



P r o v i n s i

K A L I M A N T A N

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

S E L A T A N

T a h u n

2 0 2 1 - 2 0 2 6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan tentang kondisi geografi, demografi, kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun hal ini memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi pada bagian ini membahas lingkup geografi dari aspek fisik wilayah yang mencakup topografi, geologi, hidrologi, iklim, dan tutupan lahan. Aspek fisik wilayah tersebut mengkaji fenomena alam yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan dimana fenomena tersebut terjadi secara alamiah.

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1950 sebagai bagian administrasi resmi dari Pulau Kalimantan berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1956. Provinsi Kalimantan Selatan terbagi menjadi 13 kabupaten/kota yang terdiri atas 11 kabupaten dan 2 kota dengan Ibu Kota Provinsi berada di Kota Banjarmasin dan pusat pemerintahan semenjak tahun 2015 sebagian besar aktivitasnya berpindah ke Kota Banjarbaru.

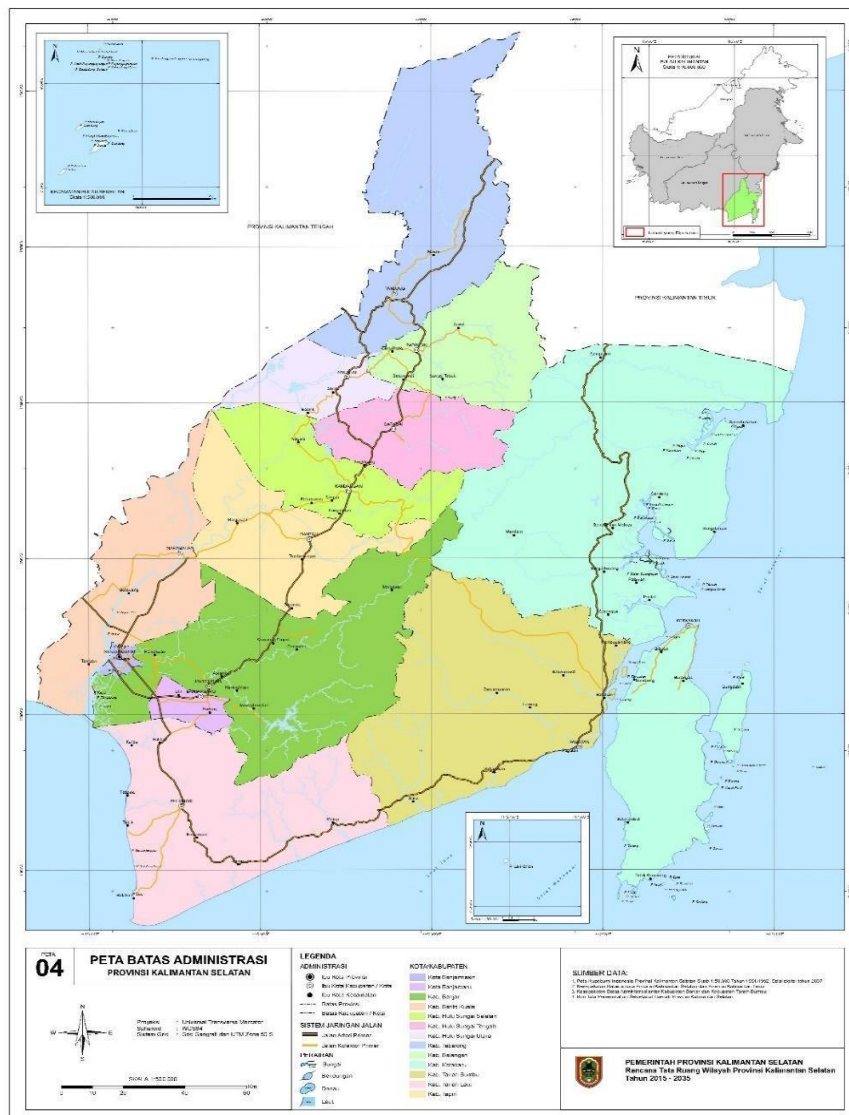
Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman hayati melimpah. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk asli maupun para perantau untuk mengembangkan wilayahnya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah Pulau Kalimantan bagian selatan. Sebagai tindak lanjut dalam pengembangan wilayah administrasi, maka dibentuk Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Agustus 1950 sebagai bagian administrasi resmi dari Pulau Kalimantan berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1956.

- 114°19' 13" hingga 116° 33' 28" Bujur Timur
- 1°21' 49" hingga 4°10'14" Lintang Selatan

Adapun wilayah Provinsi Kalimantan Selatan secara administratif berbatasan dengan :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 38.744,23 km² yang terbagi habis ke dalam 13 kabupaten/kota yang terdiri atas 11 Kabupaten dan 2 kota dengan pusat pemerintahan yang sekaligus merupakan ibu kota yakni Kota Banjarmasin. Adapun Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 156 kecamatan dan 1.943 desa/kelurahan dengan rincian sebagaimana pada Tabel II-1.



Gambar II-1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, 2018

Tabel II-1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021

Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Kecamatan	Desa	Kelurahan
Tanah Laut	3.631,35	11	135	5
Kotabaru	9.482,73	22	202	4
Banjar	4.668,00	20	290	13
Barito Kuala	2.996,46	17	201	6
Tapin	2.700,82	12	135	9
Hulu Sungai Selatan	1.804,94	11	148	4
Hulu Sungai Tengah	1.472,00	11	169	8
Hulu Sungai Utara	892,7	10	219	5
Tabalong	3.766,97	12	131	10
Tanah Bumbu	5.066,96	12	157	5
Balangan	1.878,30	8	156	3
Banjarmasin	72,00	5	-	52
Banjarbaru	371,00	5	-	20
Kalimantan Selatan	38.744,23	156	1.943	144

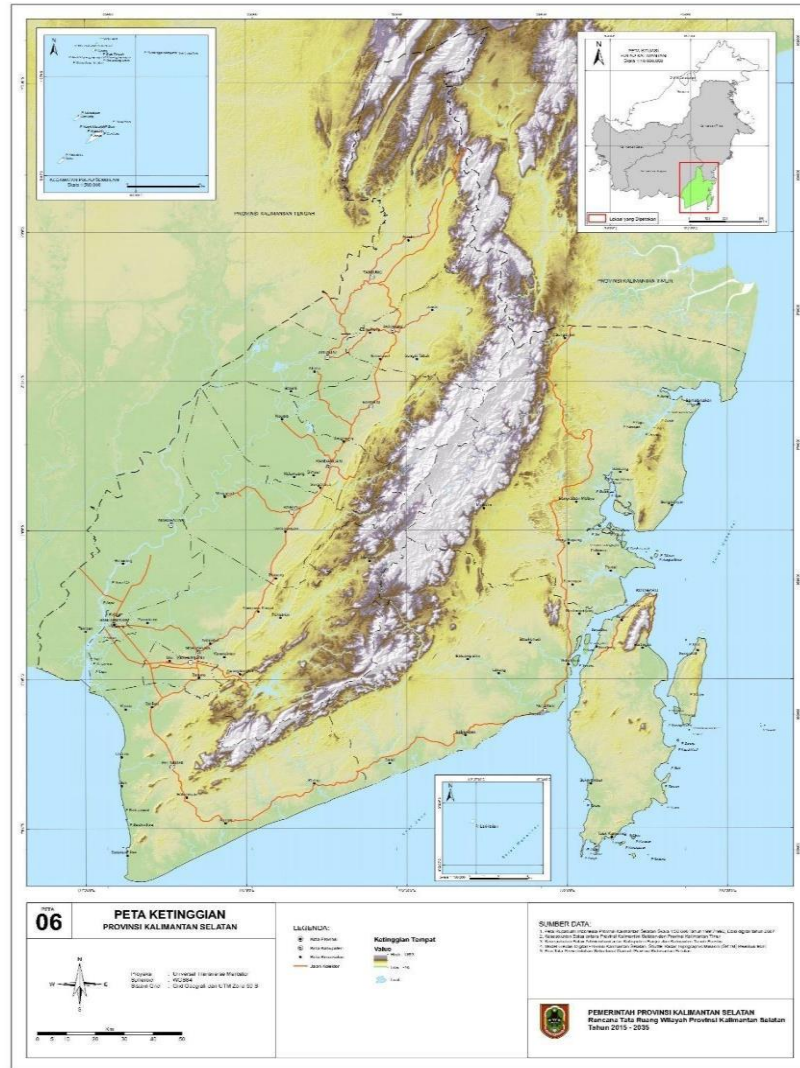
Sumber: Permendagri no. 72 tahun 2019, Pergub Kalsel Tahun 2021 dan BPS Prov Kalsel Tahun 2021

Berdasarkan letak wilayah, Provinsi Kalimantan Selatan berada pada posisi sentral dan dilalui oleh ALKI II yang merupakan alur pelayaran internasional hal ini merupakan berpotensi besar terhadap perkembangan perekonomian di Kalimantan Selatan khususnya.

Dibandingkan dengan wilayah provinsi lain di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai luas wilayah yang paling kecil, yakni hanya 6,98% dari luas pulau Kalimantan. Hal ini memudahkan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur sampai ke pelosok, sehingga memiliki peluang pengembangan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan.

2.1.2 Topografi

Kondisi topografi Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh kemiringan lahan yang landai (2-8%) pada bagian barat dan timurnya. Sementara kemiringan lahan yang terjal umumnya berada pada bagian tengah, yaitu disekitar Pegunungan Meratus dimana kemiringan lahan bisa >40%. Sedangkan jika dilihat dari sisi ketinggian wilayah, 27,33% wilayah berada pada ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut dan 23,57% wilayah berada pada ketinggian >100 meter di atas permukaan laut. Lebih jelasnya mengenai Klasifikasi topografi ini dapat dilihat pada Tabel II-2.



Gambar II-2 Peta Topografi Provinsi Kalimantan Selatan
Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, 2018

Tabel II-2 Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Lereng/Kemiringan dan Kelas Ketinggian dari Permukaan Laut, 2021.

KELERENGAN/KETINGGIAN	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
Kelas Lereng (%)	3.753.052	100,00
2	1.497.096	39,89
2-8	1.010.881	26,93
8-15	300.198	8,00
15-25	378.628	10,09
25-40	335.054	8,93
>40	231.195	6,16
Kelas Ketinggian (m)	3.753.052	100,00
0-7 m	888.171	23,66
> 7-25 m	954.322	25,43

KELERENGAN/KETINGGIAN	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
> 25-100 m	1.025.655	27,33
> 100-500 m	675.254	17,99
> 500-1.000 m	165.905	4,42
> 1.000 m	43.745	1,16

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2020)

Wilayah Kalimantan Selatan banyak dialiri sungai seperti Sungai Barito, Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa, Sungai Balangan, Sungai Batang Alai, Sungai Amandit, Sungai Tapin, Sungai Kintap, Sungai Batulicin, Sungai Sampanahan, dan sebagainya. Umumnya sungai-sungai tersebut berpangkal pada Pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makasar.

Berdasarkan kondisi topografi yang relatif datar ini memberikan keuntungan dalam pengembangan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Kalimantan Selatan yang banyak dialiri sungai ini menjadikan potensi besar terhadap pengembangan pertanian, pariwisata, dan perdagangan.

2.1.3 Geologi

Bentang alam pegunungan di daratan Provinsi Kalimantan Selatan ini, didominasi oleh Pegunungan Meratus dengan puncak tertinggi dicapai oleh Gunung Batu Besar (1.892 mdpl), membentang dengan arah barat daya – timur laut mulai dari Pelaihari (Kabupaten Tanah Laut) di bagian barat daya hingga ke daerah Kabupaten Tabalong di bagian utara.

Selain itu, di Pulau Laut bentang alam pegunungan ini menempati Gunung Sebatung di Kotabaru yang mencapai ketinggian 676 mdpl. Sementara itu bentang alam dataran luas yang mendominasi Provinsi Kalimantan Selatan tersebar di bagian barat (Dataran S. Barito) dan di bagian timur (Dataran Pagatan-Batulicin).

Dua dataran ini dipisahkan oleh jalur Pegunungan Meratus karena sungai-sungai beserta anak-anak sungai yang mengalir di kedua dataran tersebut berhulu di jalur Pegunungan Meratus.

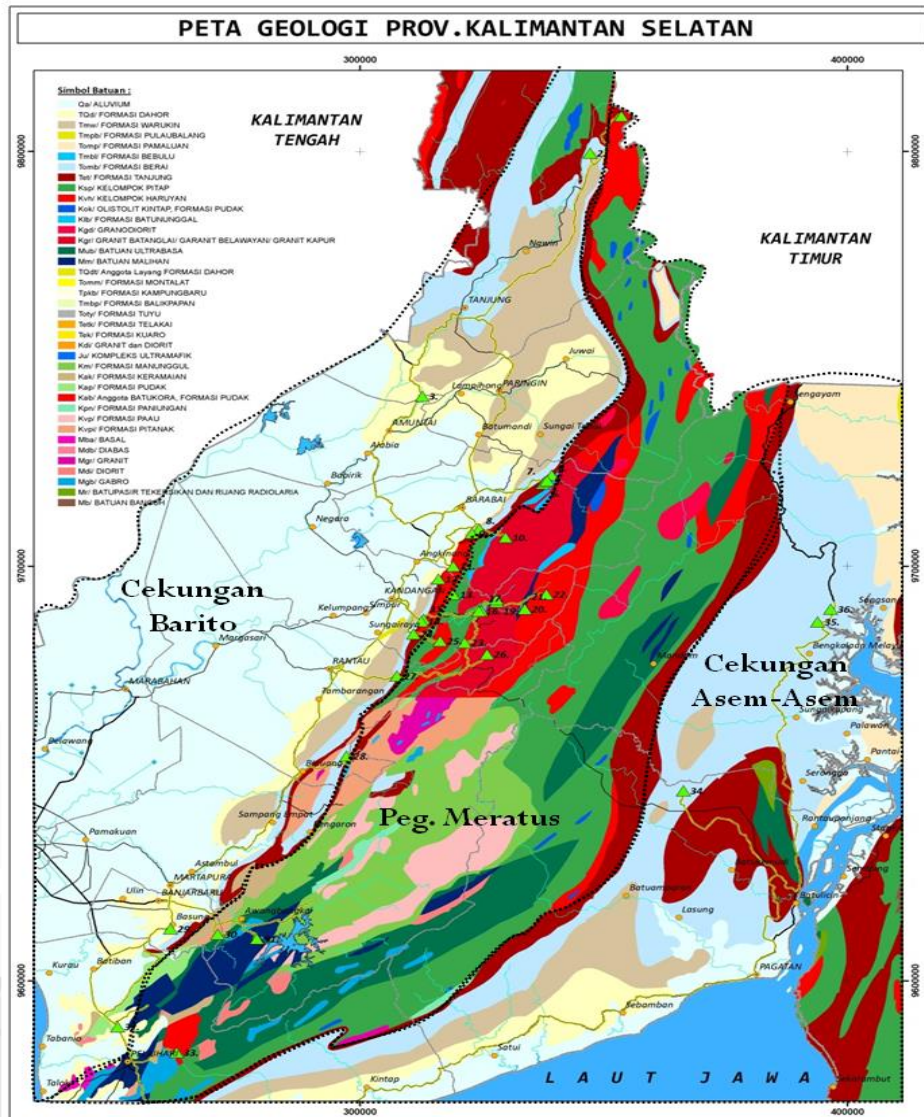
Berdasarkan Peta Geologi Bersistem Indonesia berskala 1 : 250.000, yang disusun dan diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung, diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 4 (empat) Lembar Peta Geologi, yaitu Peta Geologi Lembar Banjarmasin, Peta Geologi Lembar Amuntai, Peta Geologi Lembar Sampanahan, dan Peta Geologi Lembar Kotabaru, dengan daerah pemetaan disusun oleh berbagai jenis batuan berumur muda (Kuarter) hingga berumur tua (Yura).

Secara geologi, Provinsi Kalimantan Selatan tidak dilalui jalur lempeng tektonik baik luar maupun dalam sehingga relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan bencana gunung berapi vulkanik, hal ini memberikan keamanan dalam berinvestasi di Kalimantan Selatan. Namun, walaupun relatif aman dari bencana vulkanologi, akan tetapi Provinsi Kalimantan Selatan tetap memiliki potensi terhadap kebencanaan lainnya. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), tercatat 8 (delapan) jenis kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu bencana banjir, banjir bandang, kekeringan, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit serta cuaca ekstrem. sebagaimana disajikan pada Tabel II-3 berikut.

Tabel II-3 Potensi Bencana Di Provinsi Kalimantan Selatan

Jenis Bencana	Kategori			Persentase	
	Tinggi	Sedang	Rendah	Total	Wilayah (%)
Banjir	67.286,96	1.449.340,65	881.001,63	2.397.629,24	64,51
Banjir Bandang	18.729,81	18.793,03	885,94	38.408,78	1,03
Karhutla	694.336,45	1.052.473,81	5.609,30	1.752.419,55	47,15
Cuaca Ekstrim	741.013,96	2.057.261,47	33.850,22	2.832.125,65	76,20
Kekeringan	889.920,44	2.074.546,58	727.172,65	3.691.639,67	99,33
Tanah Longsor	429.627,27	195.001,47	2.713,04	627.341,78	16,88

Hal lain terkait dengan kondisi Geologi di Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah, bahwa daerah ini sebagian besar merupakan daerah subur dan sangat cocok untuk kegiatan bercocok tanam (pertanian dan perkebunan). Pada wilayah cekungan Barito dan cekungan asam-asam juga memiliki potensi kekayaan sumberdaya mineral sehingga bisa dijadikan wilayah eksplorasi seperti untuk pertambangan maupun penggalian. Fenomena geologi di Provinsi Kalimantan Selatan ini juga melahirkan batuan-batuan unik yang tersebar, sehingga memiliki potensi juga untuk dijadikan ekowisata atau geopark karena adanya keunikan akan batuan tersebut.

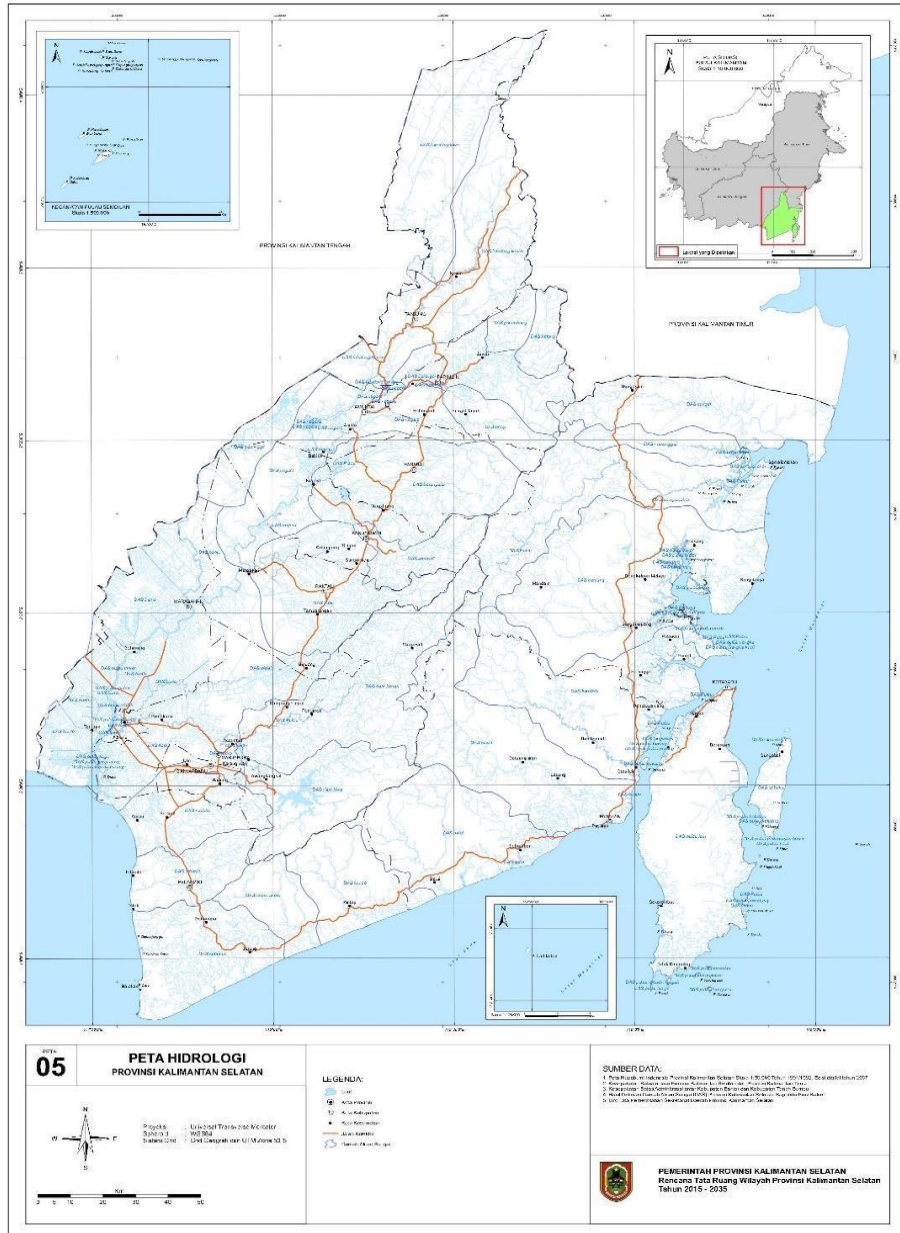


Gambar II-2 Topografi Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: Geopark Meratus (2020)

2.1.4 Hidrologi

Wilayah Kalimantan Selatan terbagi dalam 13 wilayah Daerah, Luas DAS Barito adalah ± 363.357.868 ha yang mencakup beberapa kabupaten/kota dan DAS terpanjang ada di Kabupaten Kotabaru sebesar 92,738,847 hadan di urutan kedua terpanjang adalah Kabupaten Tanah Bumbu 50,147,199 ha Tahun 2019 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan seluas ± 3.753.052 Ha. Sebagaimana terlihat pada Tabel II-4 dan Gambar II-3.



Gambar II-3 Peta Hidrologi Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, 2018

Tabel II-4 Pembagian Luas DAS Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Luas
Tanah Laut	38.050.887
Kotabaru	92.738.847
Banjarnegara	45.778.543
Barito Kuala	22.640.090
Tapin	21.662.117
Hulu Sungai Selatan	17.225.787

Kabupaten/Kota	Luas
Hulu Sungai Tengah	14.169.582
Hulu Sungai Utara	8.622.199
Tabalong	29.515.527
Tanah Bumbu	50.147.199
Balangan	18.519.277
Banjarmasin	995.388
Banjarbaru	3.292.425
Kalimantan Selatan	363.357.868

Sumber: BP DAS Barito (2020)

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Daya Dukung Air sebesar 2,61% atau kategori bersyarat atau sedang. Daerah Kabupaten/Kota yang masih memiliki Daya Dukung Air kategori buruk yaitu Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tapin.

Jasa lingkungan penyedia air bersih di Provinsi Kalimantan Selatan terbesar pada kategori sedang (37,26%), selanjutnya kategori tinggi (33,29%) dan dalam kategori kemampuan rendah hanya 25,95%. Untuk itu diperlukan Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Air yang sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

- a) Penyediaan sumber daya air yang dapat menjamin ketersediaan air baku untuk kepentingan pertanian, perikanan darat dan kebutuhan air minum secara regional.
- b) pengelolaan sumber daya air melalui kanalisasi, sodetan dan normalisasi sungai terutama pada musim penghujan;
- c) pengadaan sumur-sumur bor yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d) Mempertahankan dan menambah kawasan lindung;
- e) Mempertahankan tanaman spesifik daerah rawa dan fisik lahan rawa; dan
- f) Melarang kegiatan penambangan mineral dan batubara minimal dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari lokasi sarana dan prasarana sumber daya air terdekat.

Dengan Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Air tersebut maka penyediaan sumber daya air diharapkan dapat melimpah sebagai bahan baku air bersih, air irigasi, perikanan, pertanian dan pariwisata.

2.1.5 Meteorologi dan Klimatologi

Curah hujan tertinggi pada tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan (pada Stasiun Meteorologi Syamsuddin Noor Banjarbaru), terjadi pada bulan November dengan

jumlah intensitas curah hujan 430 mm dan terendah pada bulan Agustus dengan jumlah intensitas curah hujan 80,5 mm dan temperatur udara sekitar 24,0°C hingga 33,9°C. Rincian lengkap terkait kondisi iklim di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terlihat pada Tabel II-5 dan II-6.

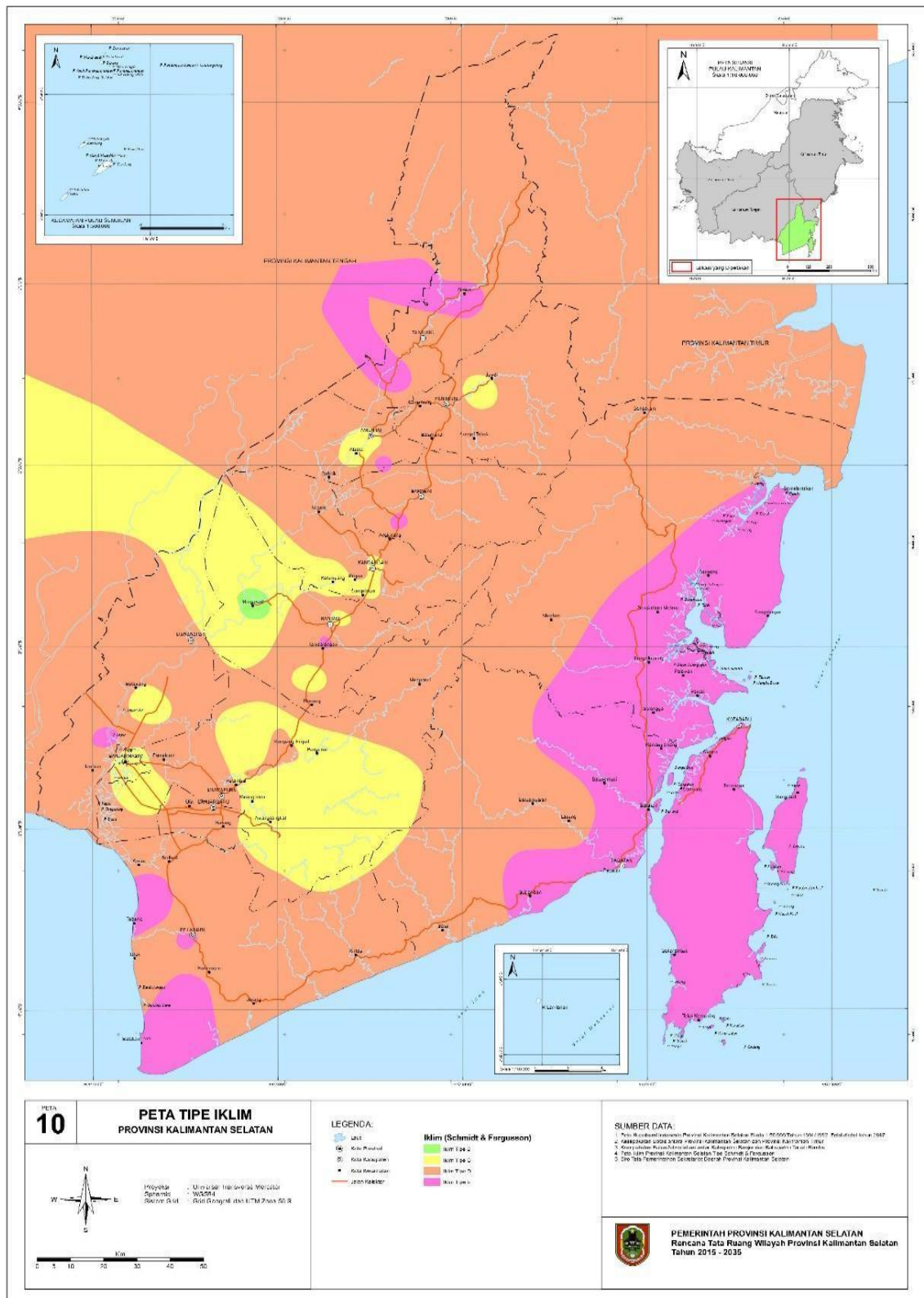
Tabel II-5 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, Rata-rata Tekanan Udara, dan Rata-rata Penyinaran Matahari, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019

Bulan	Jumlah Intensitas Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan	Rata-rata Tekanan Udara (mb)	Rata-rata Penyinaran Matahari
Januari	466,6	28	1.011,8	31,5 %
Februari	415,0	20	1.005,7	36,9 %
Maret	237,0	21	1.005,9	38,6 %
April	346,0	21	1.006,2	32,9 %
Mei	326,1	23	1.005,3	32,8 %
Juni	229,3	21	1.006,0	33,0 %
Juli	154,1	18	1.006,8	45,3 %
Agustus	103,8	12	1.006,0	39,4 %
September	90,5	13	1.006,1	48,0 %
Oktober	138,8	16	1.005,4	51,7 %
November	307,1	27	1.004,0	40,7 %
Desember	412,4	27	1.005,0	41,8 %

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2020

Secara umum Provinsi Kalimantan Selatan di dominasi tipe iklim C2 (Schmidt & Ferguson) yang meliputi wilayah hampir seluruh Kabupaten/kota kecuali Kabupaten Tabalong, sebagian Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Hal ini mengindikasikan bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh kelas tipe iklim yang agak basah, dipengaruhi oleh adanya vegetasi hutan rimba dan juga sedikit pengaruh dari angin laut. Menurut klasifikasi iklim oleh oldeman, maka tipe iklim C lebih cocok untuk tanaman padi sekali dan tanaman palawija dua kali setahun.

2021 - 2026



Gambar II-4 **Peta Klimatologi Provinsi Kalimantan Selatan**

Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, 2018

Tabel II-6 Kelembaban Udara (%) dan Temperatur (°C) Provinsi Kalimantan Selatan, 2020

Bulan	Kelembaban Udara (%)			Temperatur (°C)		
	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata
Januari	99	57	88	34,9	22,4	26,1
Februari	99	50	86	33,4	22,6	26,3
Maret	99	52	87	34,0	23,2	26,4
April	99	53	87	33,6	22,6	26,9
Mei	99	53	86	35,0	23,5	27,2
Juni	100	58	87	33,7	22,1	26,5
Juli	100	54	85	36,8	20,4	26,3
Agustus	100	52	83	34,0	21,6	26,4
September	99	44	80	35,8	20,4	27,2
Oktober	100	50	85	35,0	22,6	27,1
November	100	61	88	33,8	22,4	26,8
Desember	99	63	88	33,6	22,4	26,4

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2020)

2.1.6 Penggunaan dan Tutupan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 12 jenis. Dengan jenis penggunaan lahan terluas adalah hutan seluas 1.109.500,41 ha (29.62 %), dan yang terkecil sungai/danau/waduk/telaga seluas 38.809,01 ha (1,04%). Persentase penggunaan lahan yang produktif pada tahun 2020 sekitar 60,26 % dari seluruh luas lahan, meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 dengan luas lahan produktif sebesar 50,77%. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar lahan di Kalimantan Selatan sudah termanfaatkan, dengan demikian dibutuhkan optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mendukung pengembangan wilayah. Luas wilayah menurut jenis penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana pada Tabel II-7.

2021 - 2026

Tabel II-7 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 - 2020

Tahun	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
2019	Alang-Alang/Semak	244.398,79	7,47
	Hutan	1.131.895,16	34,58
	Kebun Campuran	389.158,00	11,89
	Perkebunan	589.961,80	18,02
	Pertambangan	54.245,87	1,66
	Perumahan	87.373,55	2,67
	Persawahan	412.107,08	12,59
	Rumput/Rawa	70.842,43	2,16
	Tambak	39.325,25	1,20
	Tegalan/Ladang	214.970,25	6,57
	Sungai/Danau/Waduk/Telaga	38.809,01	1,19
	Lain-lain	479.964,80	14,66
2020	Alang-Alang/Semak	216.873,07	5,79
	Hutan	1.109.500,41	29,62
	Kebun Campuran	391.651,64	10,46
	Perkebunan	645.218,36	17,22
	Pertambangan	58.162,82	1,55
	Perumahan	87.373,55	2,33
	Persawahan	417.681,25	11,15
	Rumput/Rawa	70.456,42	1,88
	Tambak	39.325,25	1,05
	Tegalan/Ladang	190.884,74	5,10
	Sungai/Danau/Waduk/Telaga	38.809,01	1,04
	Lain-lain	479.964,80	12,81

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2021

Tabel II-8 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

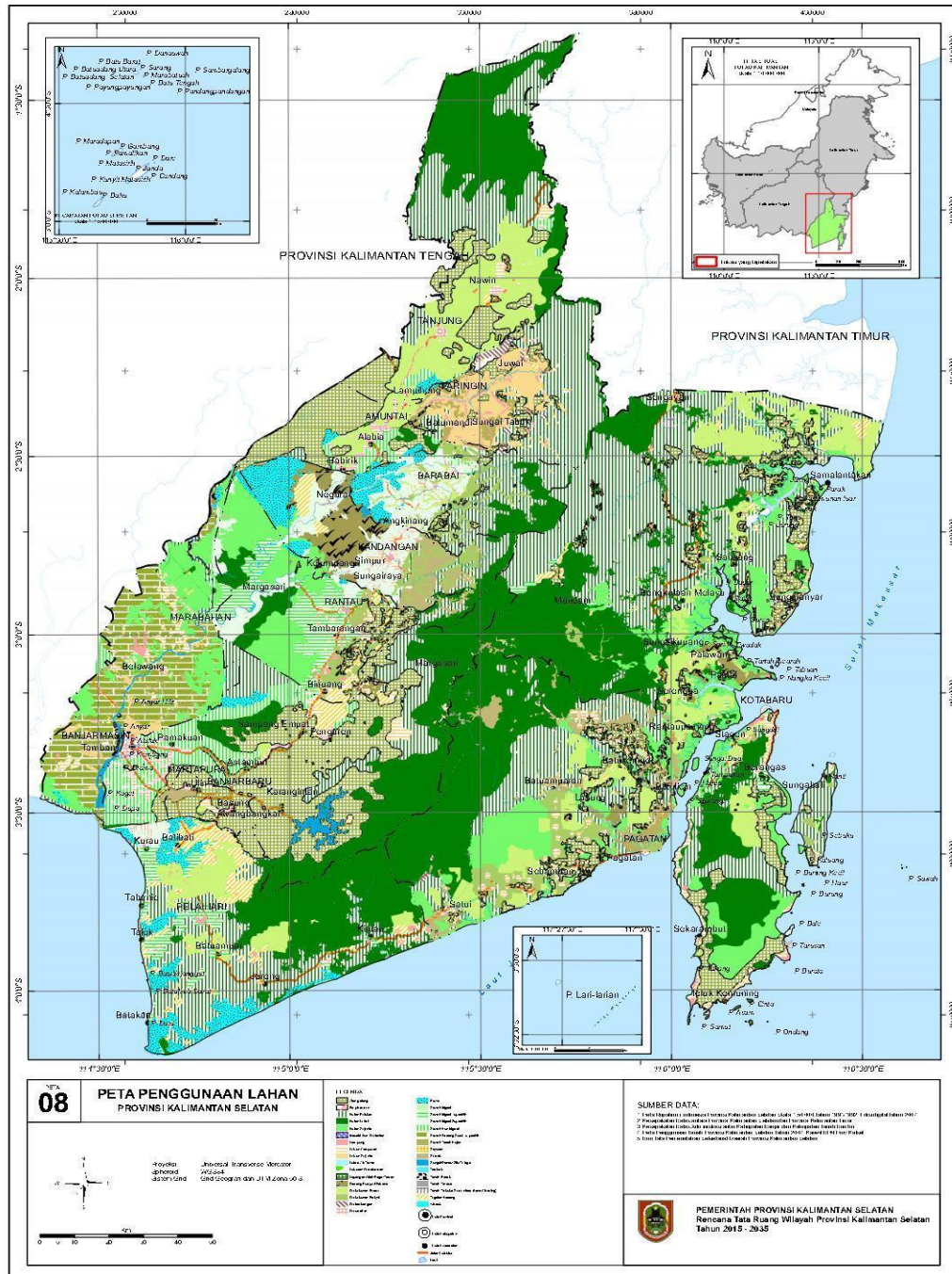
Kabupaten /Kota	Alang-Alang /Semak	Hutan	Kebun Campuran	Perkebunan	Pertambangan
Tanah Laut	2.087,94	99.808,93	55.709,99	113.115,65	12.256,92
Kotabaru	9.364,74	391.164,73	141.308,00	224.949,66	9.189,30
Banjar	56.755,29	118.337,04	51.504,41	38.896,30	3.227,74
Barito Kuala	4.048,60	8.010,62	23.038,23	21.390,55	0
Tapin	20.724,98	16.969,29	8.430,69	66.898,97	6.186,68
Hulu Sungai Selatan	53.829,44	52.317,96	1.744,24	10.896,60	0



Kabupaten /Kota	Alang-Alang /Semak	Hutan	Kebun Campuran	Perkebunan	Pertambang an
Hulu Sungai Tengah	5.956,00	49.397,00	5.597,00	24.327,00	0
Hulu Sungai Utara	1.689,37	16.712,26	1.017,13	6.817,04	0
Tabalong	20.022,04	33.728,37	47.826,71	10.355,83	2.656,94
Tanah Bumbu	17.941,49	246.076,54	13.033,37	126.267,12	17.064,45
Balangan	24.453,18	76.977,67	22.414,57	1.303,64	7.580,79
Kota Banjarmasin	0		543,01	0	0
Kota Banjarbaru	0		19.484,29	0	0
Kalimantan Selatan	216.873,07	1.109.500,41	391.651,64	645.218,36	58.162,82

Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan (2021)





Gambar II-5 Peta Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, 2018

Berdasarkan data tutupan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2019, diketahui bahwa tutupan lahan pada Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh Hutan Lahan Kering Sekunder (18,35%); Pertanian Lahan Kering Campuran (17,58%); Perkebunan (17,52%); dan Sawah (10,48%). Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyaknya potensi terhadap pengembangan untuk produktivitas pertanian dan perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel II-9 Luas Tutupan Lahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019

Tutupan Lahan	Luas (Ha)	%
Badan Air	29.529,82	0,79%
Bandara/Pelabuhan	694,44	0,02%
Belukar Rawa	162.558,82	4,37%
Hutan Lahan Kering Primer	48.558,85	1,31%
Hutan Lahan Kering Sekunder	681.782,89	18,35%
Hutan Mangrove Primer	11.028,54	0,30%
Hutan Mangrove Sekunder	46.480,94	1,25%
Hutan Rawa Sekunder	3.881,89	0,10%
Hutan Tanaman	124.759,66	3,36%
Pemukiman	70.588,91	1,90%
Perkebunan	651.077,16	17,52%
Pertambangan	105.562,36	2,84%
Pertanian Lahan Kering	249.274,55	6,71%
Pertanian Lahan Kering Campur	653.192,36	17,58%
Rawa	39.599,35	1,07%
Sawah	389.301,33	10,48%
Semak Belukar	353.928,24	9,52%
Tambak	34.353,13	0,92%
Tanah Terbuka	52.131,07	1,40%
Transmigrasi	7.934,67	0,21%
Grand Total	3.716.219,00	100,00%

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2019

2.1.7 Demografi

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

2.1.7.1 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan

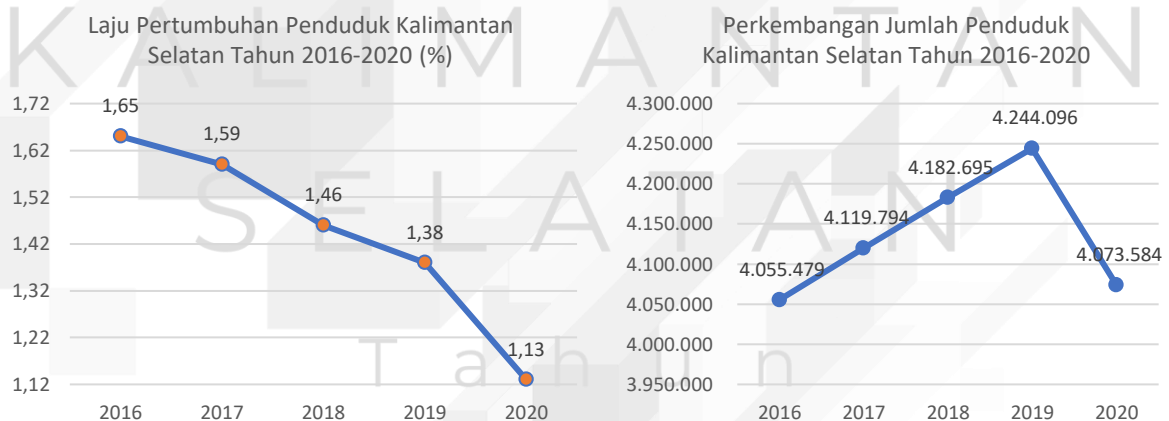
Penduduk Kalimantan Selatan selama kurun waktu antara tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan yang cukup variatif. Berdasarkan data BPS Hasil

Sensus Penduduk tahun 2020 Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020, penduduk Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 4.073.584 jiwa, sementara pada tahun 2016 berjumlah 4.055.479 jiwa yang diambil dari Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2010-2035 BPS RI (2014-2019). Adapun rincian persebaran jumlah penduduk terdapat pada Tabel II-10.

Tabel II-10 Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kab/Kota Tahun 2016-2020

Kabupaten /Kota	JUMLAH PENDUDUK				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Selatan	4.055.479	4.119.794	4.182.695	4.244.096	4.073.584
Tanah Laut	329.286	334.328	339.195	343.890	348.966
Kotabaru	325.827	331.326	336.719	342.217	325.622
Banjar	563.062	571.573	580.026	588.066	565.635
Barito kuala	302.304	306.195	310.016	313.595	313.021
Tapin	184.330	186.672	189.081	191.372	189.475
Hulu Sungai Selatan	229.889	232.587	235.217	237.702	228.006
Hulu Sungai Tengah	263.376	266.501	269.384	272.419	258.721
Hulu Sungai Utara	228.528	231.594	234.604	237.573	226.727
Tabalong	243.477	247.106	250.809	254.322	253.305
Tanah Bumbu	334.314	343.193	351.673	360.187	322.646
Balangan	125.534	127.503	129.505	131.428	130.355
Kota Banjarmasin	684.183	692.793	700.869	708.606	657.663
Kota Banjarbaru	241.369	248.423	255.597	262.719	253.442

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2021



Gambar II-6 Perkembangan Penduduk dan Laju pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

Jumlah penduduk pada tahun 2020 tertinggi berada di Kota Banjarmasin, yaitu 657,663 jiwa. dan terendah di Kabupaten Balangan yaitu 130.355 jiwa. Kepadatan penduduk di Kalimantan Selatan tahun 2020 mencapai 4.073.584 jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020. Kepadatan Penduduk di 13 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Banjarmasin dengan kepadatan sebesar 9.134.21/km² dan terendah di Kabupaten Kotabaru sebesar 34,34

jiwa/km². Rincian jumlah penduduk menurut wilayah, jenis kelamin dan kepadatan penduduk di Kalimantan Selatan seperti terlihat pada Tabel II-11.

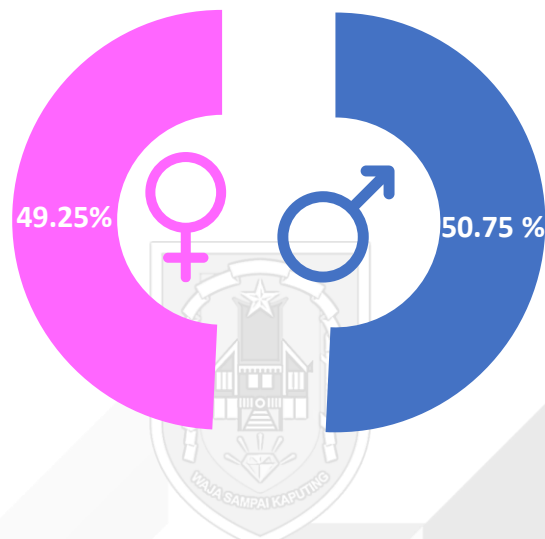
Tabel II-11 Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

Kabupaten/ Kota	Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
	Laki-Laki	Perempuan	Total			
Tanah Laut	179.012	169.954	348.966	105,33	3.631,35	96,10
Kotabaru	168.324	157.298	325.622	107,01	9.482,73	34,34
Banjar	285.885	279.750	565.635	102,19	4.668,00	121,17
Barito Kuala	158.593	154.428	313.021	102,70	2.996,46	104,46
Tapin	95.810	93.665	189.475	102,29	2.700,82	70,15
Hulu Sungai Selatan	114.426	113.580	228.006	100,74	1.804,94	126,32
Hulu Sungai Tengah	130.068	128.653	258.721	101,10	1.472,00	175,76
Hulu Sungai Utara	113.200	113.527	226.727	99,71	892,70	253,98
Tabalong	128.547	124.758	253.305	103,04	3.766,97	67,24
Tanah Bumbu	165.642	157.004	322.646	105,50	5.006,96	64,44
Balangan	65.905	64.450	130.355	102,26	1.878,30	69,40
Kota Banjarmasin	329.423	328.240	657.663	100,36	72,00	9.134,21
Kota Banjarbaru	127.548	125.894	253.442	101,31	371,00	683,13
Kalimantan Selatan	2.062.383	2.011.201	4.073.584	102,54	38.744,23	105,14

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2021)

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2020 hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 2.062.383 jiwa, sedangkan perempuan sebesar 2.011.201 jiwa. Angka tersebut menjadikan *sex ratio* penduduk mencapai 102,54 yang mengindikasikan bahwa di antara 100 penduduk berjenis kelamin perempuan, terdapat 102-105 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki. Hal ini disajikan pada Tabel II-11.

Jumlah penduduk Kalimantan Selatan pada tahun 2020 berdasarkan hasil proyeksi sekitar 4.073 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2020 sebesar 1,13 persen dimana laju pertumbuhan tertinggi berada pada Kota Banjarbaru (2,34%) dan terendah di Kabupaten Banjarmasin (0,49%).



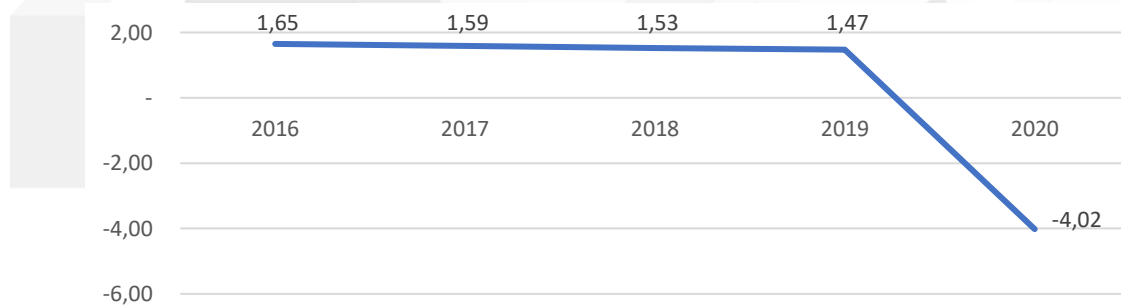
Gambar II-7 Perbandingan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Kalimantan Selatan Tahun 2020

Sumber: BPS Kalimantan Selatan (2021)

Penduduk Kalimantan Selatan tahun 2020 jika dilihat dari jenis kelamin, hampir berimbang antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yaitu 50,75% penduduk laki-laki dan 49,25% penduduk perempuan.

2.1.7.2 Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan

Pertumbuhan penduduk Kalimantan Selatan selama periode Tahun 2016-2020 mengalami penurunan dari 1,65% pada tahun 2016 menjadi -4,02% pada tahun 2020.



Gambar II-8 Laju pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kalimantan Selatan (2021)

Berdasarkan grafik di atas secara umum terlihat adanya penurunan pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 dari 1,47 menjadi -4,02. Hal ini sesungguhnya bukan dari perhitungan proyeksi pertumbuhan penduduk sebagaimana tahun 2016-2019 melainkan jumlah penduduk Kalimantan Selatan pada Tahun 2020 terkonfirmasi dengan hasil sensus penduduk Tahun 2020. Namun, secara kuantitatif selama periode 2010-2020 rata-rata pertumbuhan penduduk Kalimantan Selatan sebesar 1,13%.

Pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2016-2019 didominasi oleh Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Bumbu, sementara yang terendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan, namun secara spesifik pada tahun 2019 pertumbuhan terendah juga dicapai oleh Kota Banjarmasin dengan angka 1,10%. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-12 Laju pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten Kota Tahun 2016-2020

Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Tanah Laut	1,54	1,53	1,46	1,38	1,48
Kotabaru	1,75	1,69	1,63	1,63	- 4,85
Banjar	1,55	1,51	1,48	1,39	- 3,81
Barito Kuala	1,35	1,29	1,25	1,15	- 0,18
Tapin	1,40	1,27	1,29	1,21	- 0,99
Hulu Sungai Selatan	1,20	1,17	1,13	1,06	-4,08
Hulu Sungai Tengah	1,18	1,19	1,08	1,13	- 5,03
Hulu Sungai Utara	1,39	1,34	1,30	1,27	-4,57
Tabalong	1,62	1,49	1,50	1,40	-0,40
Tanah Bumbu	2,83	2,66	2,47	2,42	-10,42
Balangan	1,69	1,57	1,57	1,48	-0,82
Kota Banjarmasin	1,29	1,26	1,17	1,10	-7,19
Kota Banjarbaru	2,99	2,92	2,89	2,79	-3,53
Kalimantan Selatan	1,65	1,59	1,53	1,47	- 4,02

Sumber: BPS Kalimantan Selatan (2021)

Pada tahun 2020 pertumbuhan penduduk selama periode 2016-2019 di Kabupaten/ Kota terkoreksi berdasarkan hasil sensus Penduduk pada tahun 2020. Koreksi terbesar terjadi pada Kabupaten Tanah Bumbu dengan angka -10,42% dan Kota Banjarmasin -7,19%. Sementara koreksi terendah terjadi di Kabupaten Barito Kuala sebesar -0,18. Adapun Kabupaten Tanah Laut tidak terkoreksi oleh Sensus Penduduk.

2.1.7.3 Penduduk Menurut Pekerjaan

Tabel II-13 Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan menurut Jenis Pekerjaan/Lapangan Usaha

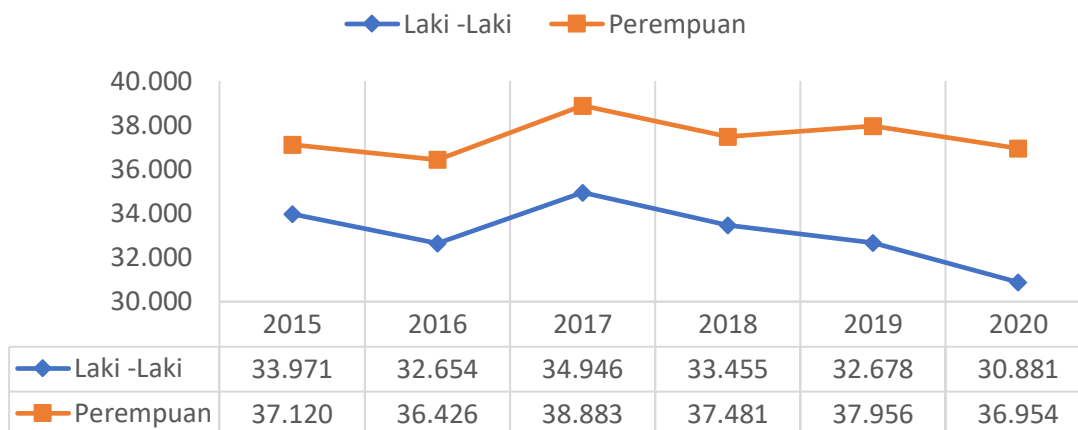
No	Jenis Lapangan Usaha	2020	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	694.450	33,33
B	Pertambangan dan Penggalian	70.700	3,39
C	Industri Pengolahan	183.041	8,79
D	Pengadaan Listrik, Gas	3.474	0,17
E	Pengadaan Air	6.398	0,31
F	Konstruksi	109.031	5,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	412.249	19,79

No	Jenis Lapangan Usaha	2020	%
H	Transportasi dan Pergudangan	82.390	3,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	142.985	6,86
J	Informasi dan Komunikasi	13.429	0,64
K	Jasa Keuangan	16.109	0,77
L	Real Estate	2.912	0,14
M.N	Jasa Perusahaan	20.150	0,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	81.334	3,90
P	Jasa Pendidikan	109.137	5,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32.014	1,54
R.S.T.U	Jasa lainnya	103.516	4,97
	Jumlah Penduduk Bekerja	2.083.319	51,14
	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	2.186.967	53,69
	Jumlah Penduduk Pencari Kerja	103.648	4,74
	Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja	1.886.617	46,31
	Jumlah Penduduk	4.073.584	100

Sumber: BPS Kalimantan Selatan (2021)

Jumlah PNS Daerah Se-Kalimantan Selatan dari Tahun 2015 sampai 2020 berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan di Tahun 2015 jumlah PNS berjumlah 71.091 orang, menurun di Tahun 2016 menjadi 69.080 orang dan tahun 2017 peningkatan menjadi 73.829 orang. Namun, di tahun 2018 jumlah PNS kembali mengalami penurunan menjadi 70.936 orang dan di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 70.460 dan di tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 67.835 yang terdiri dari laki-laki 30.881 dan perempuan 36.954. Adapun rinciannya sebagaimana pada Gambar II-9.

SEBARAN PNSD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERDASRKN JENIS KELAMIN TAHUN 2015-2020



Gambar II-9 Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020

Sumber: BKD Provinsi Kalimantan Selatan 2021

2.1.7.4 Penduduk Menurut Agama

Penduduk Kalimantan Selatan terdiri dari 6 Agama dan 1 Aliran Kepercayaan, dengan jumlah penganut agama terbanyak adalah Islam, dan terendah adalah Konghucu. Posisi ini selama terus berlanjut selama periode 2016-2020. Untuk lebih detail perkembangan sebaran penduduk menurut Agama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-14 Sebaran Penduduk Menurut Agama

No	Agama	2016	2017	2018	2019	2020
1	Islam	3.793.634	3.828.362	3.903.468	3.934.100	3.966.059
2	Kristen	53.339	54.035	53.501	54.051	54.382
3	Katolik	21.256	21.994	21.337	21.646	21.987
4	Hindu	23.057	23.437	22.993	23.529	23.798
5	Budha	12.503	12.644	12.458	12.433	12.337
6	Konghucu	374	358	266	233	222
7	Aliran Kepercayaan	10.184	10.005	9.026	9.414	9.109

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2021)

2.1.7.5 Penduduk Menurut Kepala Keluarga

Jumlah kepala keluarga di Kalimantan Selatan pada tahun 2020 1.343.451, jumlah ini meningkat dari tahun 2017 sebanyak 1.253.890 atau bertamabar sebanyak 89.561 kepala keluarga selama 4 Tahun terakhir, dengan rata-rata pertahun sebesar 22.390 kepala Keluarga. Perkembangan sebaran penduduk menurut kepala Keluarga sebagaimana tabel berikut.

Tabel II-15 Sebaran Penduduk Menurut Kepala Keluarga

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kepala Keluarga			
		2017	2018	2019	2020
1	Tanah Laut	113.734	106.696	113.258	117.832
2	Kotabaru	96.258	91.115	94.012	100.156
3	Banjar	173.794	174.460	174.341	185.766
4	Barito Kuala	98.970	97.467	100.238	107.583
5	Tapin	60.338	61.293	63.266	64.656
6	Hulu Sungai Selatan	76.625	77.623	79.631	81.609
7	Hulu Sungai Tengah	85.878	86.290	88.551	90.383
8	Hulu Sungai Utara	69.562	70.159	71.422	74.502
9	Tabalong	74.246	74.272	78.301	80.404
10	Tanah Bumbu	96.201	94.956	97.875	103.648



11	Balangan	39.543	40.717	41.629	43.424
12	Kota Banjarmasin	199.554	196.673	203.578	213.643
13	Kota Banjarbaru	69.187	71.373	74.735	79.845
14	Kalimantan Selatan	1.253.890	1.243.094	1.280.837	1.343.451

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2021)

2.1.7.6 Penduduk Menurut Usia Sekolah

Penduduk usia sekolah yang menerima layanan pendidikan di Kalimantan Selatan pada tahun 2020 mencapai 99,64% untuk usia 7-12 tahun, 92,43% untuk usia 13-15 tahun, 68,67% untuk usia 16-18 tahun, dan 23,82% untuk tingkat perguruan tinggi. Secara rinci Persentase penduduk menurut jenis kelamin yang menerima layanan pendidikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel II-16 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kalimantan Selatan Tahun 2020

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Tidak/ Belum Pernah Sekolah (%)	Masih Sekolah (%)	Tidak Sekolah lagi (%)
Laki-laki			
7-12	0	99,82	0,18
13-15	1,12	92,07	6,81
16-18	0,6	69,33	30,07
19-24	1,3	26,11	72,59
7-24	0,69	71,4	27,91
Perempuan			
7-12	0,1	99,46	0,44
13-15	2,29	92,84	4,87
16-18	0,1	67,94	31,96
19-24	0,96	21,48	77,56
7-24	0,72	69,28	30
Laki-laki dan Perempuan			
7-12	0,05	99,64	0,31
13-15	1,67	92,43	5,9
16-18	0,36	68,67	30,97
19-24	1,13	23,82	75,05
7-24	0,7	70,37	28,93

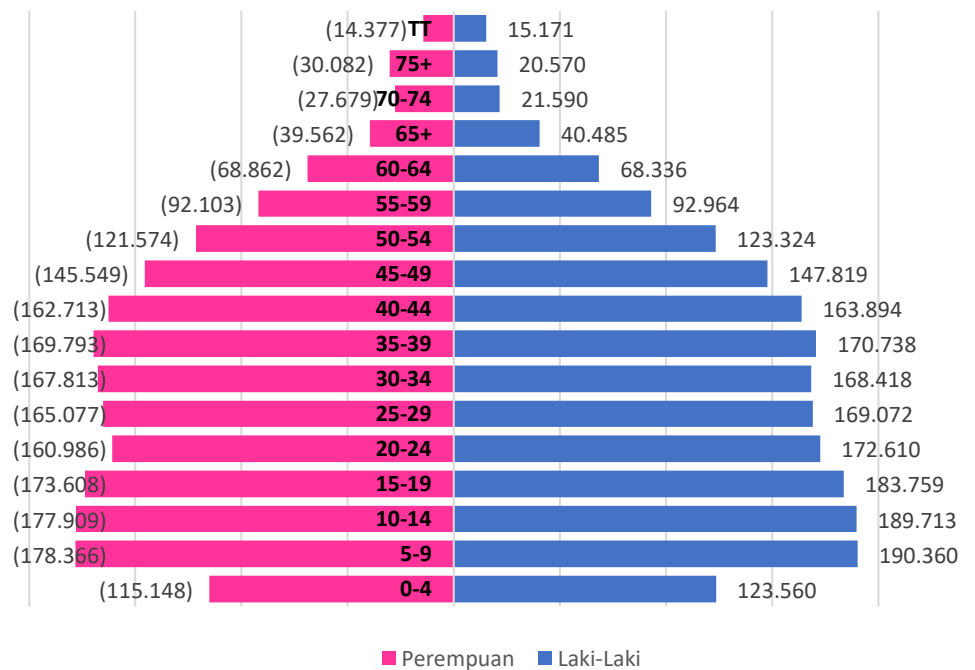
Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tingkat sekolah dasar (7-12 tahun) hampir tidak terjadi perbedaan partisipasi baik laki-laki maupun perempuan demikian juga pada usia menengah pertama (13-15 tahun). Namun, pada usia sekolah

menengah atas (16-18 tahun) terjadi disparitas antara laki-laki sebesar 69,33 dan perempuan sebesar 67,94, di mana persentase laki-laki yang sekolah lebih tinggi dari pada perempuan.

2.1.7.7 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan

Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran umum struktur umur penduduk. Piramida penduduk ini diantaranya berguna untuk menganalisis produktivitas penduduk dan bonus demografi. Piramida penduduk Kalimantan Selatan tahun 2020 memperlihatkan sebagian besar penduduk Kalimantan Selatan berada dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu sebesar 70,92%. sedangkan penduduk lanjut usia (65 ke atas) sebesar 5,14%. dan penduduk usia 0-14 tahun sebesar 23,94%.



Gambar II-10 Perbandingan Jumlah Penduduk berdasarkan Umur di Kalimantan Selatan Tahun 2020

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2021)

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa 1 orang usia non produktif ditanggung oleh 2 sampai 3 orang usia produktif. Hal ini menunjukkan bahwa potensi tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan akan mampu mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan jika bonus demografi ini dapat dimanfaatkan dengan baik. pada sisi lain jika tidak terkelola dengan baik akan menjadi beban.

Manfaat bagi perekonomian Kalimantan Selatan dengan usia produktif lebih banyak dari usia non produktif dalam bonus demografi yang dimanfaatkan dengan baik

akan membuat jumlah tabungan dari penduduk produktif semakin besar. sehingga perekonomian daerah semakin bertumbuh. Manfaat lainnya adalah terbentuknya generasi emas yang diartikan sebagai penerus yang kreatif dan mampu memikul tanggung jawab serta membangun daerah yang diperoleh melalui pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.

2.1.8 Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kajian ini mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Pengertian Daya Dukung dan Daya Tampung seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- Daya Dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- Daya Tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi, dan /atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Dalam peraturan tersebut terdapat tiga pendekatan dalam menghitung daya dukung lingkungan hidup, yaitu:

1. Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang,
2. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan, dan
3. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

Kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat dilakukan berdasarkan pendekatan: Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang dan Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan.

2.1.8.1 Daya Dukung Permukiman

Daya dukung lahan bangunan (pendekatan permukiman) dihitung untuk mengetahui daya dukung lahan untuk kawasan permukiman agar pemenuhan kebutuhan tempat tinggal layak huni dapat tercapai. Daya dukung lahan permukiman dihitung dengan formula yang menggunakan data luas lahan



bangunan (permukiman), luas lahan infrastruktur (jalan, drainase, dll), koefisien lahan terbangun (terbagi menjadi perkotaan dan pedesaan), serta jumlah penduduk. Berdasarkan Pedoman Penentuan DDDTLH (KLHK, 2014), penentuan daya dukung permukiman berdasarkan luas lahan permukiman terhadap jumlah penduduk dan koefisien luas kebutuhan ruang. Jika $DDP > 1$, mampu menampung penduduk untuk bermukim, $DDP = 1$, terjadikeseimbangan antara penduduk yang bermukim dengan luas wilayah yang ada dan $DDP < 1$, tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim dalam wilayah tersebut.

Dari hasil analisis berdasarkan ketentuan di atas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan daya dukung permukiman sebesar 1,6 atau dalam kategori mampu menampung penduduk untuk bermukim. Akan tetapi jika dilihat dari wilayah administrasi menunjukkan bahwa Kota Banjarmasin statusnya tidak seimbang/tidak mampu menampung karena nilai DDP sebesar 0,7. Hasil analisis ini memperlihatkan persebaran konsentrasi permukiman yang belum merata di Kalimantan Selatan atau masih terpusat di perkotaan Banjarmasin, sehingga perlu adanya pusat-pusat konsentrasi penduduk di wilayah lain agar pemenuhan tempat tinggal yang layak di Banjarmasin masih dapat terjaga.

2.1.8.1 Daya Dukung Lahan Pertanian

Daya dukung lahan pertanian dihitung dengan maksud untuk mengetahui ketersediaan lahan yang ada pada saat ini dan kebutuhan akan lahan pertanian pada akhir tahun perencanaan di suatu wilayah, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang. Hasil dari perhitungan analisis daya dukung lahan pertanian adalah untuk mengetahui apakah daya dukung lahan suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Kondisi daya dukung lahan yang defisit menunjukkan bahwa ketersediaan lahan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan akan produksi pangan di wilayah tersebut sedangkan kondisi daya dukung lahan pertanian surplus menunjukkan bahwa ketersediaan lahan di suatu wilayah masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi pangan.

Jumlah produksi padi dan jumlah penduduk dengan mengacu data dari BPS Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota dalam Angka 2020), untuk konversi gabah kering giling ke beras sebesar 58,86% (Kalimantan Selatan dalam angka 2020). Konsumsi beras mulai tahun 2017 berdasarkan hasil prognosa terkait konsumsi beras oleh Kementerian Pertanian sebesar 124 kg/orang/tahun. Asumsi konsumsi beras ini akan

dipergunakan untuk perhitungan indeks daya dukung lahan pertanian yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019.

Daya dukung lahan pertanian secara keseluruhan di provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 adalah 2,86 atau surplus sebesar 936.428 ton. Dari surplus beras ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar mampu bertahan atau memiliki stok selama 1,85 tahun. Akan tetapi berdasarkan administrasi terdapat dua wilayah yang telah mengalami defisit yakni Kota Banjarmasin (-78.992 ton) dan Kota Banjarbaru (-25.954 ton). Rendahnya stok pangan di wilayah ini karena secara eksisting wilayah ini merupakan daerah perkotaan dengan jumlah penduduk yang cukup besar dibandingkan dengan luas pertaniannya (lahan sawah). Selain itu untuk Kabupaten Kotabaru juga menunjukkan surplus pangan hanya 6.558 ton, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.34 dan Peta 3.8.

Beberapa Kabupaten yang memiliki produksi/surplus pangan terbesar seperti Barito Kuala (150.762 ton), Hulu Sungai Tengah (131.098 ton) dan Hulu Sungai Selatan (116.477 ton).

Tabel II-17 Perhitungan Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2019

Kabupaten	Jumlah Produksi Padi (ton)	Konversi Gabah Kering Giling/GKG ke Beras	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angka Konsumsi Beras(kg/ perkapita /pertahun)	Jumlah Beras Di Konsumsi (ton)	DDL (Daya Dukung Lahan untuk Pangan)	Surplus Beras (ton)
Balangan	170.233	100.204	131.234	124	16.273	6,16	83.931
Banjar	218.266	128.478	550.264	124	68.233	1,88	60.245
Banjarbaru	5.927	3.489	237.445	124	29.443	0,12	-25.954
Banjarmasin	6.949	4.090	670.015	124	83.082	0,05	-78.992
Barito Kuala	322.185	189.648	313.595	124	38.886	4,88	150.762
HSS	247.952	145.952	237.702	124	29.475	4,95	116.477
HST	280.104	164.878	272.419	124	33.780	4,88	131.098
HSU	143.403	84.411	230.410	124	28.571	2,95	55.841
Kotabaru	79.395	46.734	323.999	124	40.176	1,16	6.558
Tabalong	180.836	106.446	243.763	124	30.227	3,52	76.219
Tanah Bumbu	101.130	59.528	320.452	124	39.736	1,5	19.792
Tanah Laut	271.943	160.074	350.007	124	43.401	3,69	116.673
Tapin	419.823	247.121	188.262	124	23.344	10,59	223.776
Provinsi Kalimantan Selatan	2.448.146	1.441.054	4.069.567	124	504.626	2,86	936.428

Sumber: Hasil Analisis (2020)

Dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal ini OPD terkait harus menyediakan dan meningkatkan melalui pencetakan sawah baru, serta mengurangi konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Ini juga bisa menjadi konsentrasi perencanaan dalam perencanaan tata ruang maupun penyusunan RPJMD untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan, dengan cara membuat lahan sawah baru serta meningkatkan produktivitas sawah yang sudah ada berdasarkan hasil daya dukung ini.

Ini juga bisa menjadi konsentrasi perencanaan dalam perencanaan tata ruang maupun penyusunan RPJMD untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan, dengan cara membuat lahan sawah baru serta meningkatkan produktivitas sawah yang sudah ada.

2.1.8.2 Daya Dukung Air

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang, perhitungan daya dukung air bertujuan untuk mengetahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Hasil perhitungan daya dukung air dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan RPJMD atau revisi rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyediaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air (*water supply*) dan kebutuhan air (*water demand*) terdapat perhitungan melalui ketersediaan air dengan pendekatan limpasan air dan kebutuhan air dari total kebutuhan air domestik dan non domestik.

Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA) (Permen LH No. 17/2009).

- Bila $SA > DA$, daya dukung air dinyatakan surplus.
- Bila $SA < DA$, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui.

Sedangkan menurut Dr. Ing. Ir. Widodo Brontowiyono, M.Sc (2016),

membagi menjadi:

- DDA < 1 : Daya dukung air terlampaui atau buruk
- DDA 1-3 : Daya dukung air bersyarat atau sedang
- DDA > 3 : Daya dukung air aman atau baik

Jika mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan masih dominan belum terlampaui yakni sebesar 3.316.423,81 Ha atau 88,73% dibandingkan yang terlampaui hanya sebesar 421.277,86 Ha atau 11,27%, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.35 dan Peta 3.9.

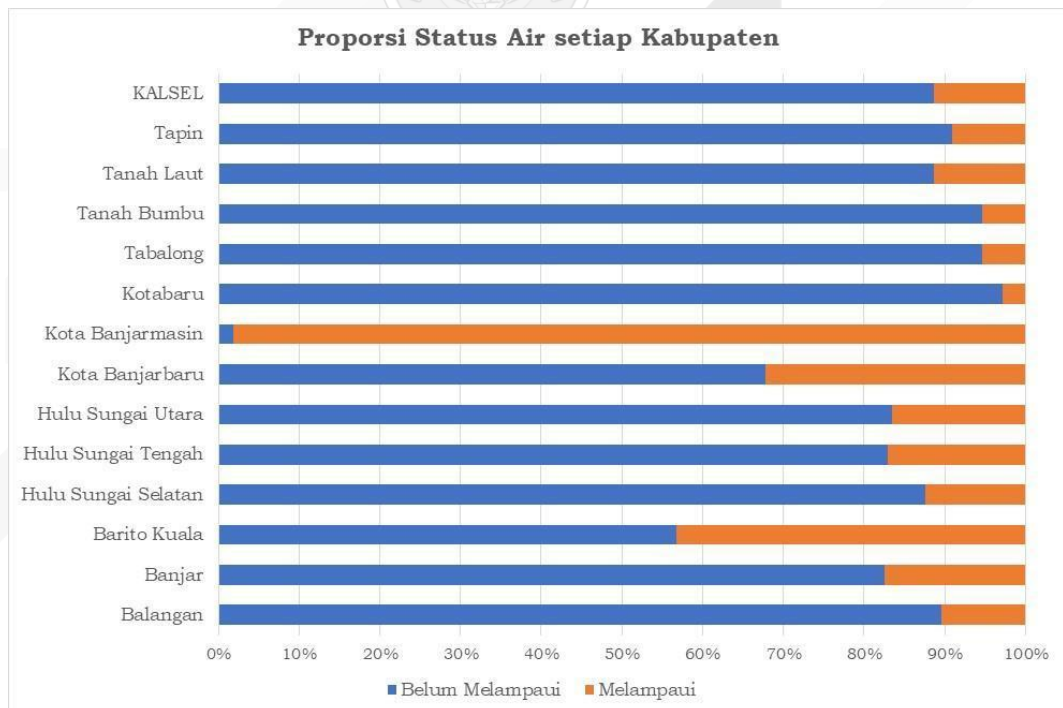
Tabel II-18 Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Air Setiap Kabupaten/Kota Berdasarkan Kepmen LHK

Kabupaten/Kota	Status Air (Ha)	
	Belum Melampaui	Melampaui
Balangan	170.402,98	19.768,37
Banjar	387.831,60	81.757,61
Barito Kuala	131.316,56	99.944,77
Hulu Sungai Selatan	148.814,78	21.047,17
Hulu Sungai Tengah	138.878,15	28.592,42
Hulu Sungai Utara	77.445,08	15.320,22
Kota Banjarbaru	22.004,96	10.449,64
Kota Banjarmasin	171,93	9.270,02
Kotabaru	896.465,56	26.324,66
Tabalong	350.399,74	19.762,32
Tanah Bumbu	450.442,59	25.546,36
Tanah Laut	342.468,64	43.630,44
Tapin	199.781,25	19.863,86
KALSEL	3.316.423,81	421.277,86
Persentase (%)	88,73	11,27

Jika melihat distribusi secara administrasi menunjukkan bahwa terdapat dua wilayah yang melampaui cukup besar yakni Kota Banjarmasin (98,18%), selanjutnya Kabupaten Barito Kuala (43,22%) dan Kota Banjarbaru (32,20%). Untuk wilayah yang

memiliki persentase terbesar yang belum melampaui adalah Kabupaten Kotabaru (97,15%), selanjutnya Kabupaten Tabalong (94,66%) dan Kabupaten Tanah Bumbu (94,63%), sebagaimana disajikan pada Gambar 3.28.

Selain berdasarkan Keputusan Menteri Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 juga dilakukan analisis berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan air dari data curah hujan Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) tahun 1998-2017 dan koefisien limpasan masing-masing tutupan lahan di Kalimantan Selatan mengacu peta RBI 2018-2019. Dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa yang melampaui sebesar 26,37% dan yang Belum Melampaui sebesar 73,67%, sebagaimana disajikan pada Tabel II-19 dan Gambar II-11.



Gambar II-11 Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Kepmen LHK 2019 Secara Administrasi

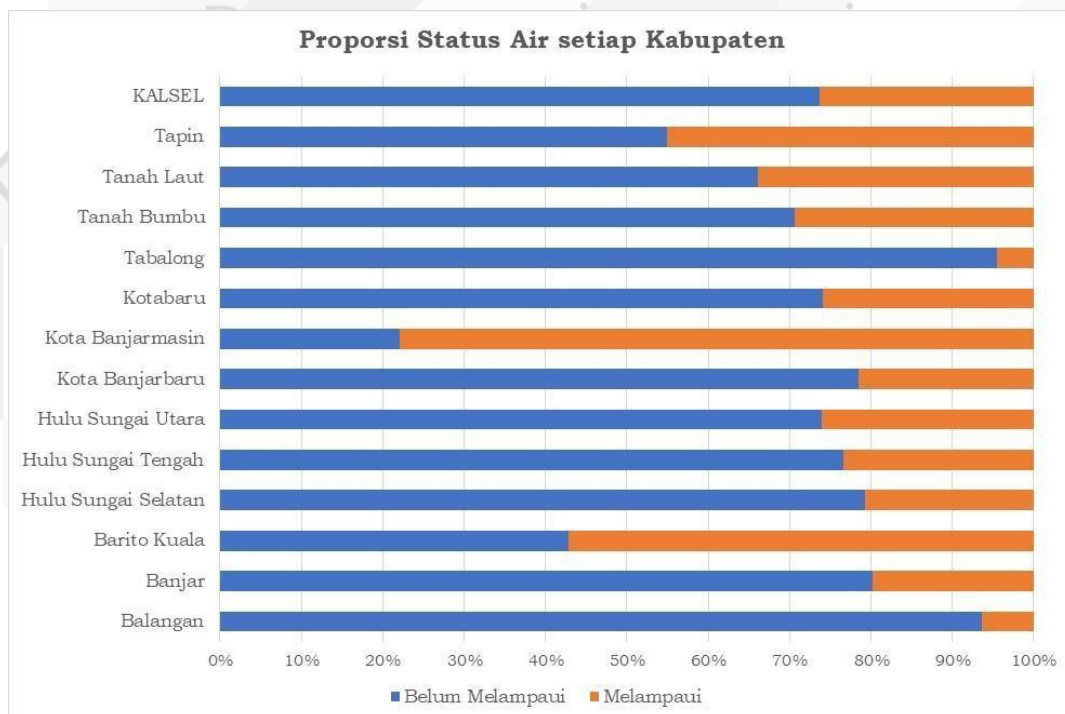
Tabel II-19 Hasil Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air Setiap Kabupaten/Kota Berdasarkan Analisis

Kabupaten/Kota	Status Air (Ha)	
	Belum Melampaui	Melampaui
Balangan	171.132,47	11.706,31
Banjar	367.262,34	90.692,07
Barito Kuala	108.218,73	144.510,57
Hulu Sungai Selatan	136.706,67	35.634,33
Hulu Sungai Tengah	111.604,87	34.027,10
Hulu Sungai Utara	68.305,81	24.045,24
Kota Banjarbaru	25.828,65	7.095,60
Kota Banjarmasin	2.176,57	7.671,06

Kotabaru	703.900,93	246.401,37
Tabalong	331.881,88	15.852,60
Tanah Bumbu	343.142,10	142.368,38
Tanah Laut	251.420,34	129.175,79
Tapin	118.979,71	97.637,31
KALSEL	2.744.452,71	982.926,09
Persentase (%)	73,67	26,37

Sumber: Hasil Analisis 2020.

Jika melihat distribusi secara administrasi menunjukkan bahwa terdapat dua wilayah yang melampaui cukup besar yakni Kota Banjarmasin (77,90%), selanjutnya Kabupaten Barito Kuala (57,18%) dan Kabupaten Tapin (45,07%). Untuk wilayah yang memiliki persentase terbesar yang belum melampaui adalah Kabupaten Tabalong (95,44%), selanjutnya Kabupaten Balangan (93,60%) dan Kabupaten Banjar (80,20%), sebagaimana disajikan pada Gambar II-12.



Gambar II-12 Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Hasil Analisis Secara Administrasi

Untuk mengetahui tingkat ketersediaan dan kebutuhan berdasarkan volume air, maka hasil tersebut disajikan dalam bentuk tabulasi dan Gambar II-12. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan air di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar



57.054.478.190 m³/tahun. Kebutuhan air total sebesar 21.850.342.888 m³/tahun yang terdiri atas domestik sebesar 118.831.356 m³/tahun dan 21.731.511.531 m³/tahun, sehingga diperoleh selisih 35.204.135.302 m³/tahun.

Dengan membandingkan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA) menunjukkan bahwa masih dalam posisi surplus, akan tetapi jika mengacu pendapat Dr. Ing. Ir. Widodo Brontowiyono, M.Sc (2016), menunjukkan bahwa status air di Kalimantan Selatan hanya sebesar 2,61 atau berada pada interval DDA 1-3 atau termasuk daya dukung air bersyarat atau sedang.

Secara administrasi 3 wilayah yang telah melewati daya dukung atau status defisit Kabupaten Barito Kuala (-2.032.973.657 m³/tahun), Kabupaten Tapin (-452.872.271 m³/tahun) dan Kota Banjarmasin (-16.497.858 m³/tahun), sebagaimana disajikan pada Tabel 3.37. Dari tabel tersebut juga, menunjukkan bahwa terdapat 6 kabupaten/kota dalam kategori bersyarat atau sedang dan 4 kabupaten dalam kategori aman atau baik. Jika dikaitkan dengan kejadian bencana banjir tahun 2021 di DAS Barito dimana limpasan air sangat tinggi dan tidak dapat dimanfaatkan, maka kedepan perlu penambahan area resapan untuk me-recharge (mengisi kembali) air tanah dangkal dan penyediaan infrastruktur air untuk menampung limpasan air dan dimanfaatkan sebagai sumber air baku baru sekaligus mengurangi risiko bencana banjir. Hal tersebut dapat dilihat terutama pada beberapa kabupaten (tujuh kabupaten/kota) yang berada di bagian tengah dan hilir DAS Barito yang memiliki status daya dukung air bersyarat dan terlampaui.

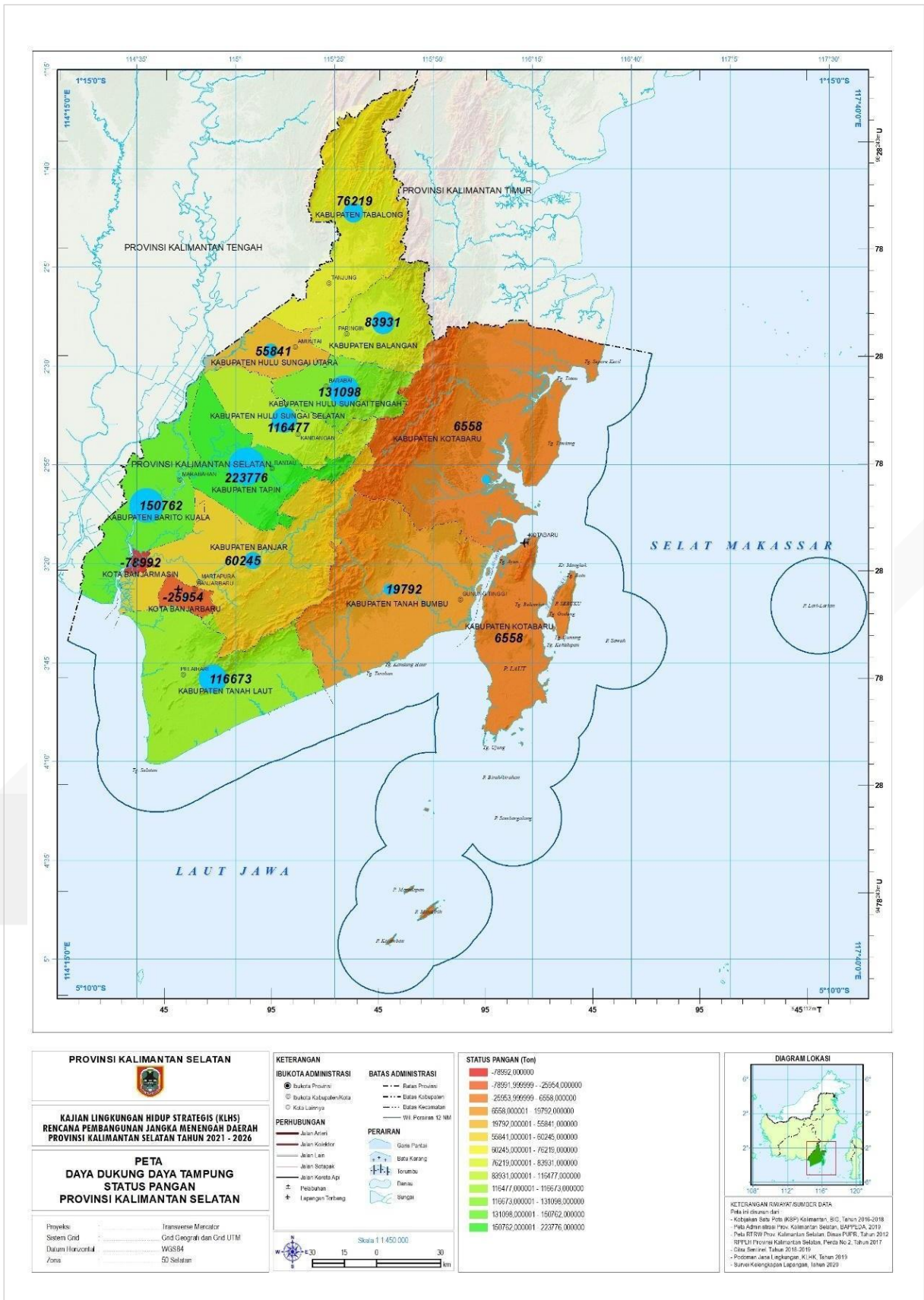
T a h u n
2 0 2 1 - 2 0 2 6

Tabel II-20 Perhitungan Daya Dukung Air Berdasarkan Administrasi Tahun 2019

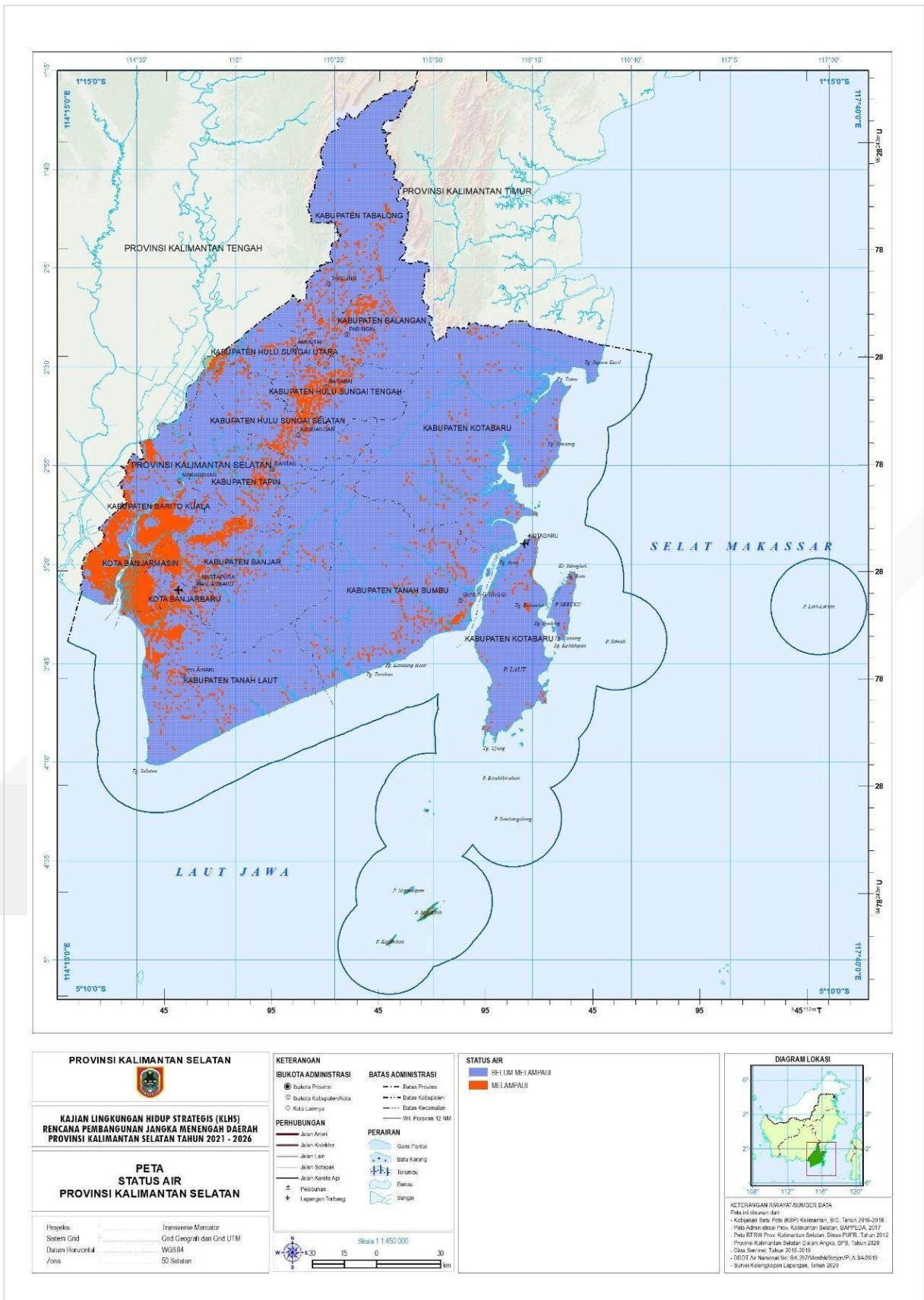
Kabupaten/Kota	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)		Total	Selisih (m ³ /tahun)	DDA	Status
		Domestik	Non Domestik				
Balangan	2.488.622.632	3.832.033	201.110.663	204.942.696	2.283.679.936	12,14	Aman atau Baik
Banjar	6.403.353.583	16.067.709	2.618.607.329	2.634.675.038	3.768.678.545	2,43	Bersyarat atau Sedang
Banjarbaru	267.034.708	6.933.394	122.034.057	128.967.451	138.067.257	2,07	Bersyarat atau Sedang
Banjarmasin	62.984.689	19.564.438	59.918.108	79.482.546	-16.497.858	0,79	Terlampau atau Buruk
Barito Kuala	2.254.090.692	9.156.974	4.277.907.375	4.287.064.349	-2.032.973.657	0,53	Terlampau atau Buruk
Hulu Sungai Selatan	1.838.948.146	6.940.898	812.337.904	819.278.803	1.019.669.343	2,24	Bersyarat atau Sedang
Hulu Sungai Tengah	2.321.514.402	7.954.635	408.652.369	416.607.004	1.904.907.398	5,57	Aman atau Baik
Hulu Sungai Utara	781.135.157	6.727.972	443.209.116	449.937.088	331.198.069	1,74	Bersyarat atau Sedang
Kotabaru	24.281.980.291	9.460.771	4.793.274.889	4.802.735.660	19.479.244.631	5,06	Aman atau Baik
Tabalong	4.608.696.906	7.117.880	440.811.834	447.929.713	4.160.767.192	10,29	Aman atau Baik
Tanah Bumbu	6.118.251.680	9.357.198	2.671.111.647	2.680.468.845	3.437.782.835	2,28	Bersyarat atau Sedang
Tanah Laut	3.904.895.902	10.220.204	2.712.191.816	2.722.412.020	1.182.483.882	1,43	Bersyarat atau Sedang
Tapin	1.722.969.404	5.497.250	2.170.344.425	2.175.841.675	-452.872.271	0,79	Terlampau atau Buruk
KALSEL	57.054.478.190	118.831.356	21.731.511.531	21.850.342.888	35.204.135.302	2,61	Bersyarat atau Sedang

Sumber: Hasil Analisis 2020.

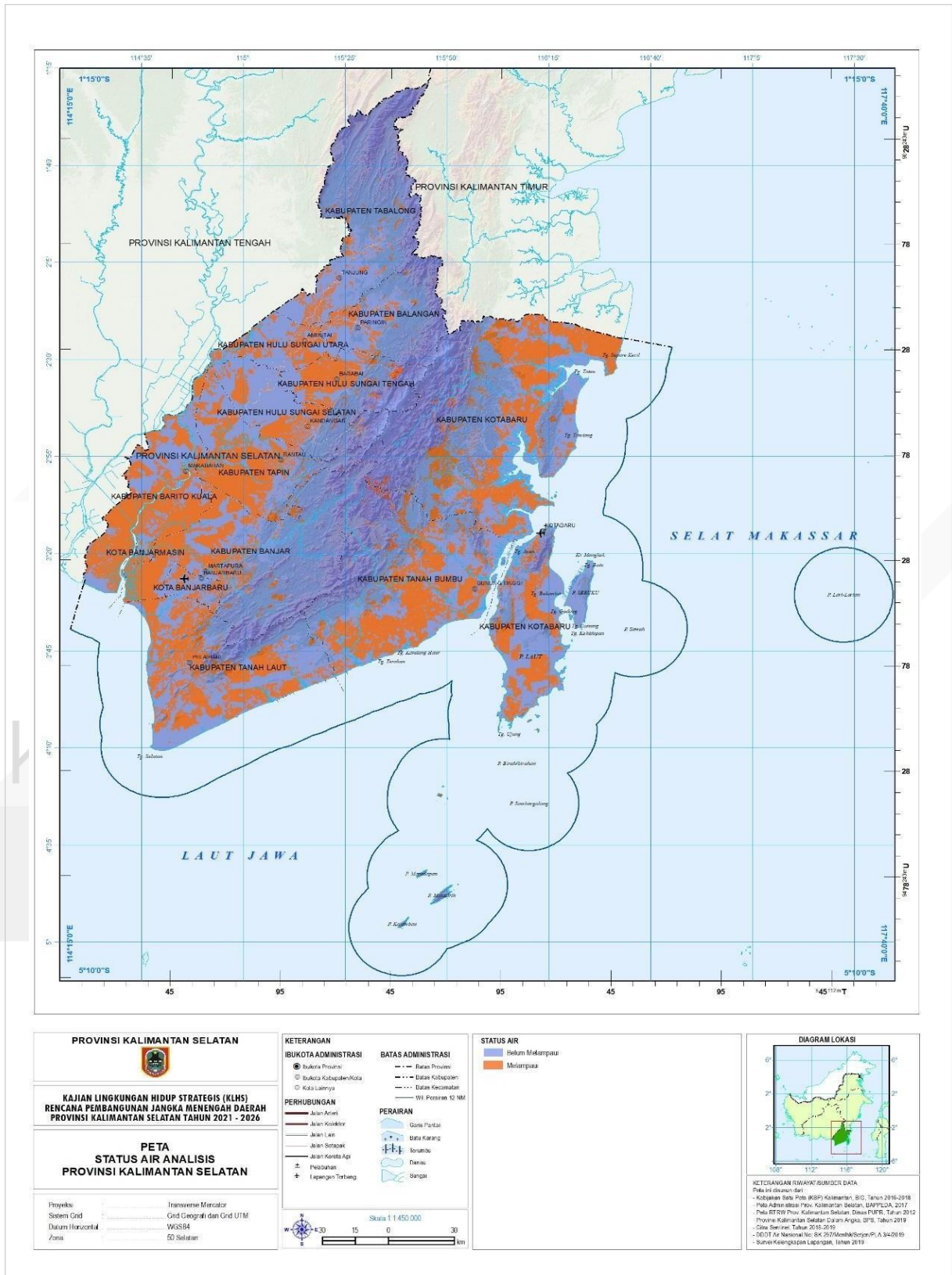
T a h u n
2 0 2 1 - 2 0 2 6



Gambar II-13 Status Pangan



Gambar II-14 Status Air



Gambar II-15 Status Air Analisis

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sub Bab Aspek Kesejahteraan Masyarakat memberikan gambaran perkembangan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Sub bab ini menjelaskan perkembangan kesejahteraan masyarakat dalam dua fokus, yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Sub bab fokus kesejahteraan dan pemerataan menyajikan data yang memuat indikator-indikator perekonomian. Tujuan sajian data tersebut adalah untuk menggambarkan secara makro kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta kondisi pemerataan-ketimpangan perekonomian daerah.

2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur besarnya produksi atau output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah selama periode waktu tertentu, yang dalam hal ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam data PDRB dapat tergambar ukuran ekonomi dan pasar suatu wilayah serta potensi dan kesehatan ekonomi. Data PDRB kemudian dapat diturunkan untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan pasar di suatu wilayah serta menggambarkan ukuran relatif dengan wilayah lain.

Informasi yang didapat dari sajian data PDRB dapat digunakan sebagai dasar penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi serta kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat mengendalikan dan mengarahkan pembangunan ekonomi melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Secara sekuensial, sajian data PDRB kemudian juga dapat menjadi dasar untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengendalikan dan mengarahkan pembangunan ekonomi.

Tabel II-21 dan Tabel II-22 menyajikan data PDRB dengan rincian sektoral dalam 5 tahun terakhir, dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020. Pada Tahun 2016-2019 perekonomian Kalimantan Selatan terus mengalami pertumbuhan. Berdasarkan data nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kalimantan Selatan pada tahun 2016 hanya tercatat senilai Rp. 115.74 Triliun, kemudian pada tahun 2019 nilai tersebut naik hingga Rp. 133.32 Triliun.

Namun demikian, seiring dengan hantaman Pandemi COVID-19, perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2020 mengalami penyusutan. Nilai PDRB Kalimantan

Selatan pada Tahun 2020 hanya Rp 130.87 Triliun (Atas Dasar Harga Konstan 2010). Lebih kecil Rp 2.45 Triliun jika dibandingkan tahun 2019.

Tabel II-21 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Selatan 2017-2021 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17.280.423,11	17.925.111,06	18.568.350,40	18.390.799,75	18.606.671,67
Pertambangan dan Penggalian	31.641.061,04	32.940.944,71	33.412.746,09	31.920.344,87	33.295.012,43
Industri Pengolahan	15.936.387,11	16.627.550,28	16.868.962,35	16.298.968,71	17.314.000,46
Pengadaan Listrik dan Gas	138.778,16	149.293,39	156.342,18	163.758,05	171.396,94
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	479.849,66	512.638,14	541.310,42	572.856,46	601.689,42
Konstruksi	9.086.567,33	9.621.524,89	10.206.761,40	10.075.347,02	10.364.042,16
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.726.031,89	11.534.598,52	12.390.882,70	11.972.118,93	12.235.516,97
Transportasi dan Pergudangan	7.246.427,21	7.751.309,67	8.210.077,15	7.773.286,96	7.913.714,05
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.333.899,28	2.497.506,12	2.682.547,57	2.628.485,40	2.688.918,48
Informasi dan Komunikasi	4.474.496,43	4.782.740,28	5.133.111,39	5.510.897,83	5.908.863,68
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.018.163,31	4.188.555,39	4.258.124,99	4.316.334,66	4.367.684,62
Real Estate	2.720.392,59	2.856.690,92	3.026.703,54	3.144.114,02	3.310.575,97
Jasa Perusahaan	712.080,99	766.722,50	822.583,45	806.228,01	835.413,13
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.315.380,91	6.553.664,37	6.989.221,96	7.045.528,54	7.138.270,02
Jasa Pendidikan	5.230.245,23	5.597.185,79	6.019.490,93	6.117.205,36	6.211.319,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.180.392,36	2.309.803,15	2.445.832,58	2.613.229,33	2.916.029,55
Jasa lainnya	1.337.946,79	1.436.738,77	1.538.502,49	1.516.091,10	1.533.732,06
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	121.858.523,39	128.052.577,95	133.271.551,61	130.865.594,99	135.412.851,11

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2021



Tabel II-22 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Selatan 2017-2021 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23.171.075,68	24.458.195,87	25.837.804,20	25.786.221,51	26.827.758,81
Pertambangan dan Penggalian	33.121.191,74	35.461.568,39	34.453.278,87	32.759.686,03	37.308.542,70
Industri Pengolahan	22.951.175,97	24.081.103,07	24.635.649,84	24.215.498,24	26.862.852,21
Pengadaan Listrik dan Gas	206.862,36	237.105,73	255.041,40	274.729,38	294.965,21
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	645.162,44	709.004,04	754.901,68	805.799,91	855.212,11
Konstruksi	12.393.793,73	13.675.860,55	14.910.490,27	14.803.229,09	15.742.374,26
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.483.032,37	17.220.840,88	19.031.697,30	18.731.969,68	19.798.253,90
Transportasi dan Pergudangan	10.345.465,56	11.387.097,79	12.469.229,87	11.796.543,93	12.116.837,98
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.143.536,27	3.463.666,12	3.834.598,98	3.846.302,13	4.006.240,17
Informasi dan Komunikasi	5.535.375,12	6.065.457,61	6.570.311,90	7.032.160,26	7.586.349,56
Jasa Keuangan dan Asuransi	5.738.713,61	6.207.185,67	6.450.604,51	6.569.432,47	6.933.859,50
Real Estate	3.531.104,38	3.795.365,92	4.118.667,03	4.352.929,63	4.676.170,96
Jasa Perusahaan	1.053.373,87	1.175.720,32	1.305.731,84	1.309.540,08	1.379.195,31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.485.821,33	10.222.282,09	11.103.082,37	11.416.985,01	11.722.823,68
Jasa Pendidikan	7.278.689,44	8.008.698,52	8.816.478,94	9.093.591,09	9.464.282,02
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.078.924,32	3.364.770,60	3.628.089,76	3.959.497,72	4.543.250,64
Jasa lainnya	1.941.256,78	2.150.132,72	2.384.995,97	2.396.997,57	2.457.612,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	159.104.554,99	171.684.055,90	180.560.654,72	179.151.113,73	192.576.581,16

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2021

Tabel II-23 PDRB Provinsi Kalimantan Selatan 2017–2021 (Triliun Rupiah) Menurut Pengeluaran

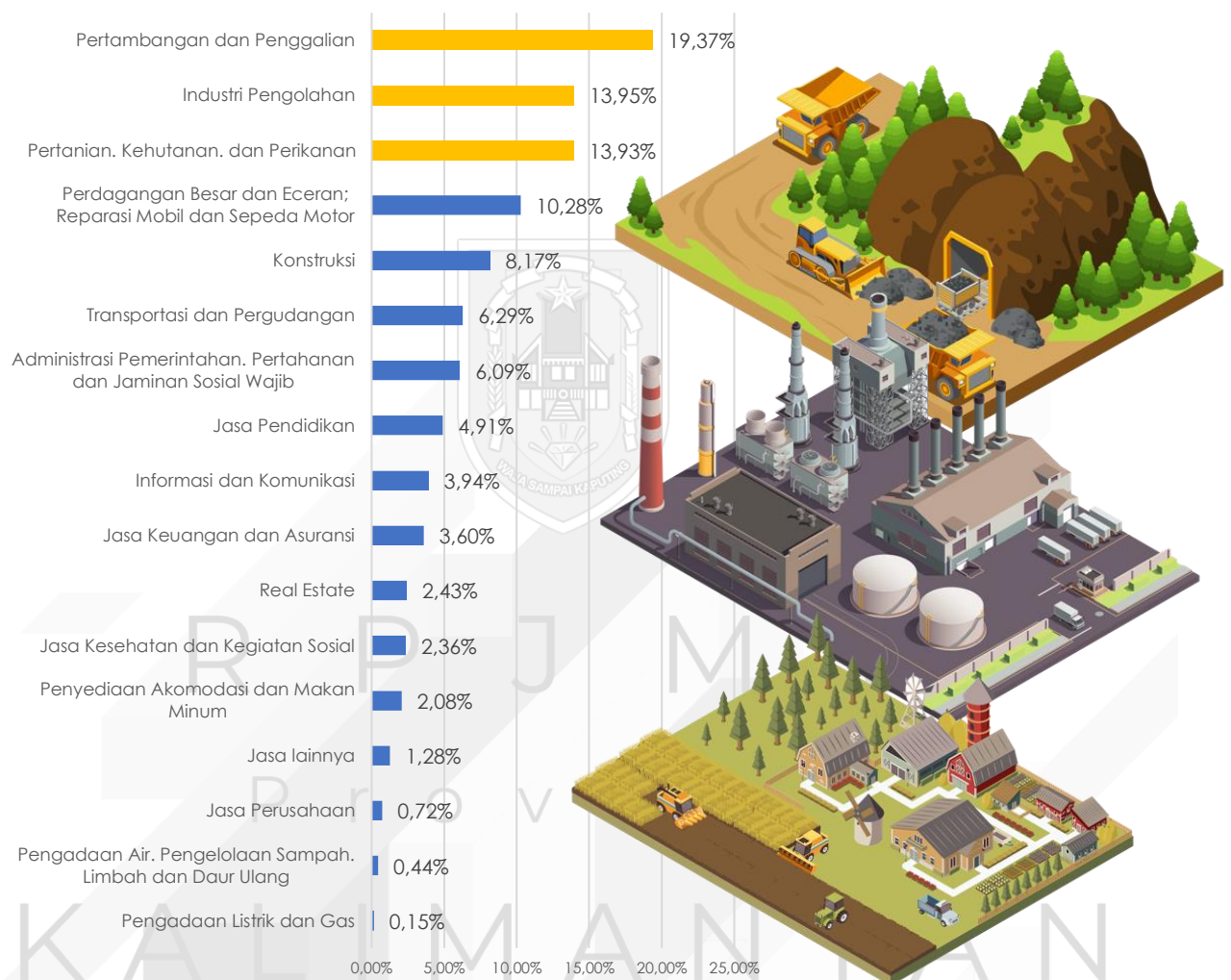
Komponen	ADHK Tahun 2010					ADHB				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1 Konsumsi Rumah tangga	56,82	59,68	62,07	61,91	62,40	74,55	80,47	86,96	87,61	90,01
2 Konsumsi LNPRT	1,09	1,18	1,28	1,25	1,26	1,57	1,75	1,96	1,94	2,01
3 Konsumsi Pemerintah	13,03	13,36	13,74	13,38	13,87	19,76	21,25	22,16	21,95	23,14
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	26,55	28,68	30,5	30,07	30,30	36,56	40,8	44,99	44,86	46,34
5 Perubahan Inventori	0,29	0,92	0,49	0,05	0,07	0,36	1,21	0,68	00,07	0,10
6 Ekspor Barang dan Jasa	92,46	97,98	100,06	89,24	106,23	113,41	139,67	124,74	100,65	147,96
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	68,38	73,75	74,87	65,04	78,72	87,11	113,46	100,95	77,94	116,98
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	121,86	128,05	133,27	130,87	135,41	159,1	171,68	180,56	179,15	192,58

Sumber: BPS (2021)

Pada sisi pengeluaran, PDRB Kalimantan Selatan masih ditopang dari sektor Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), baik untuk ADHB maupun ADHK. Pada tahun 2021, komposisi PDRB ADHB yakni konsumsi rumah tangga 46,74 %, konsumsi non rumah tangga 1,04 %, konsumsi pemerintah 12,02 %, PMTB 24,06 % dan Nett Ekspor-Impor 16,09 %. Sedangkan komposisi PDRB ADHK yakni konsumsi rumah tangga 46,08 %, konsumsi non rumah tangga 0,93%, konsumsi pemerintah 10,24 %, PMTB 22,38 % dan Nett Ekspor-Impor 20,32 %.

2.2.1.2 Struktur Perekonomian Wilayah

Gambar II-16 di bawah memperlihatkan struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan. Struktur perekonomian yang dimaksud kemudian dapat menggambarkan kontribusi sektor-sektor tertentu dalam membentuk keseluruhan nilai produk yang dihasilkan di Kalimantan Selatan.



Gambar II-16 Struktur PDRB ADHB Per Sektor Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

Sementara itu, ada dua sektor yang mencatatkan nilai produk di atas Rp. 10 Triliun pada Tahun 2016, yaitu sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor yang mencatatkan nilai produk di atas Rp. 10 Triliun kemudian bertambah menjadi empat sektor di Tahun 2021. Dua sektor tambahan tersebut adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan wajib sosial, serta sektor transportasi dan pergudangan.

Jika diperhatikan lebih dalam, data pada tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak ada perubahan struktur perekonomian yang signifikan. Tidak adanya perubahan struktur ekonomi yang dimaksud dapat diartikan bahwa urutan kontribusi sektoral tidak berubah, kecuali yang dicatatkan oleh sektor informasi dan komunikasi

yang nilai produknya dapat mengungguli sektor jasa keuangan dan asuransi sejak Tahun 2019.

Selain itu, analisis terhadap kontribusi sektoral pada tahun pengamatan 2016-2021 memperlihatkan bahwa tiga sektor dominan mengalami kecenderungan penurunan kontribusi. Tiga sektor yang dimaksud adalah sektor pertambangan dan galian, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor industri pengolahan.

Empat sektor lain yang nilainya di atas Rp. 10 Triliun menunjukkan kecenderungan berbeda-beda. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor konstruksi selalu mengalami peningkatan kontribusi. Sektor transportasi dan pergudangan juga selalu mengalami peningkatan kontribusi pada tahun 2016-2021. Namun sektor ini mengalami penurunan nilai produksi pada tahun 2021. Sementara itu, kontribusi sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib cenderung berfluktuasi. Pengamatan ini dilakukan terhadap nilai produk sektoral atas dasar harga berlaku yang disajikan pada Tabel II-24 berikut.

Tabel II-24 Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 - 2021

Lapangan Usaha	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,56%	14,25%	14,36%	14,39%	13,93%
Pertambangan dan Penggalian	20,82%	20,65%	18,71%	18,29%	19,37%
Industri Pengolahan	14,43%	14,03%	13,63%	13,52%	13,95%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,13%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,41%	0,41%	0,42%	0,45%	0,44%
Konstruksi	7,79%	7,97%	8,25%	8,26%	8,17%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,73%	10,03%	10,60%	10,46%	10,28%
Transportasi dan Pergudangan	6,50%	6,63%	6,92%	6,58%	6,29%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,98%	2,02%	2,12%	2,15%	2,08%
Informasi dan Komunikasi	3,48%	3,53%	3,68%	3,93%	3,94%
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,61%	3,62%	3,57%	3,67%	3,60%
Real Estate	2,22%	2,21%	2,28%	2,43%	2,43%
Jasa Perusahaan	0,66%	0,68%	0,72%	0,73%	0,72%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,96%	5,96%	6,30%	6,37%	6,09%



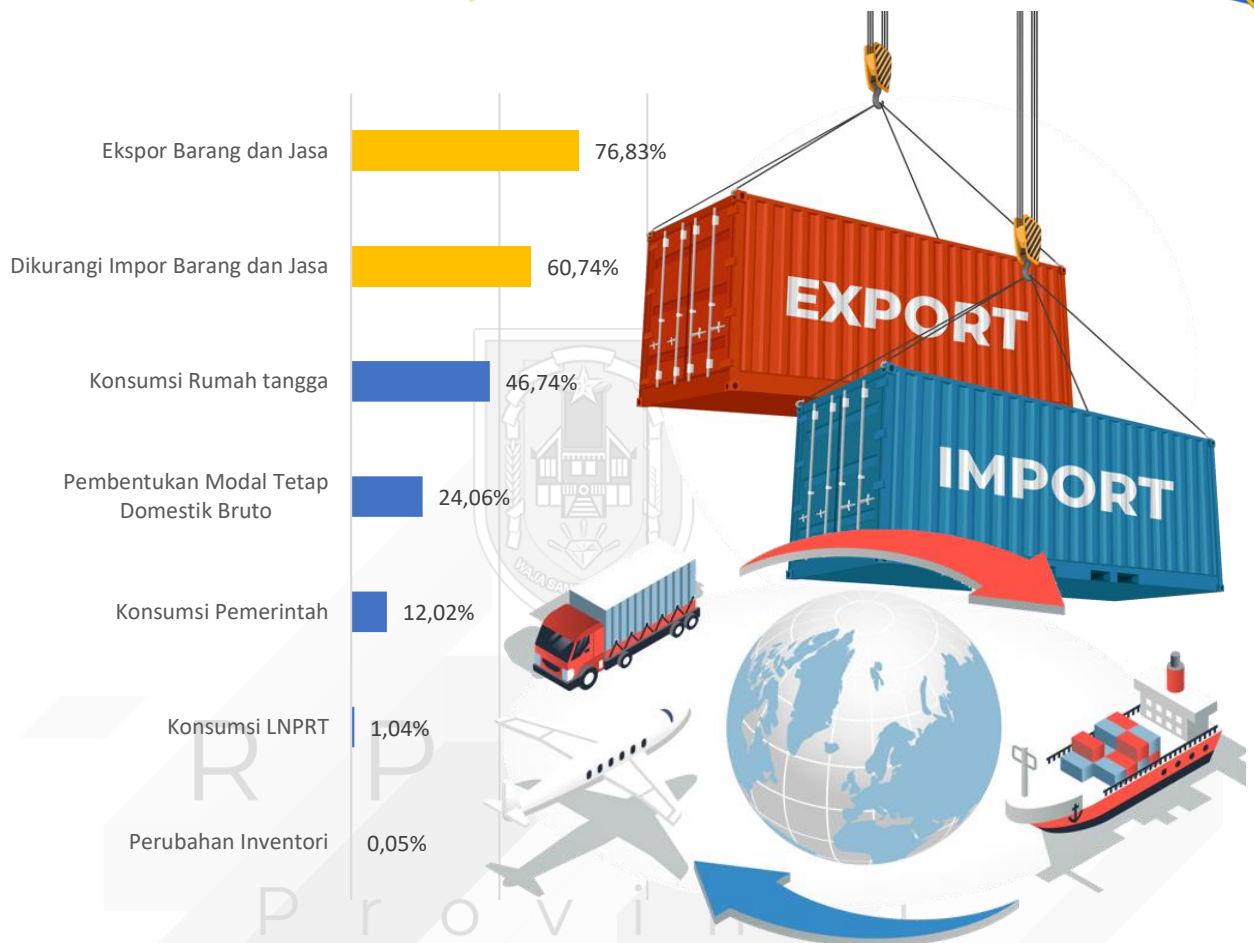
Lapangan Usaha	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jasa Pendidikan	4,57%	4,66%	4,92%	5,08%	4,91%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,94%	1,96%	2,06%	2,21%	2,36%
Jasa lainnya	1,22%	1,25%	1,32%	1,34%	1,28%
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2021

Dari uraian sebelumnya, maka dapat diambil poin-poin penting mengenai deskripsi struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan. Poin-poin tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Sektor dominan dengan nilai lebih dari Rp. 20 Triliun Atas Dasar Harga Berlaku adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor industri pengolahan.
- 2) Sektor yang mempunyai nilai lebih dari Rp. 10 Triliun Atas Dasar Harga Berlaku adalah sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta sektor transportasi dan pergudangan.
- 3) Tidak ada perubahan urutan kontribusi sektoral yang signifikan selama Tahun 2016-2020.
- 4) Terjadi penurunan kontribusi pada tiga sektor dominan.
- 5) Terjadi kecenderungan peningkatan kontribusi pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, dan sektor transportasi dan pergudangan. Sementara itu sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami fluktuasi kontribusi.

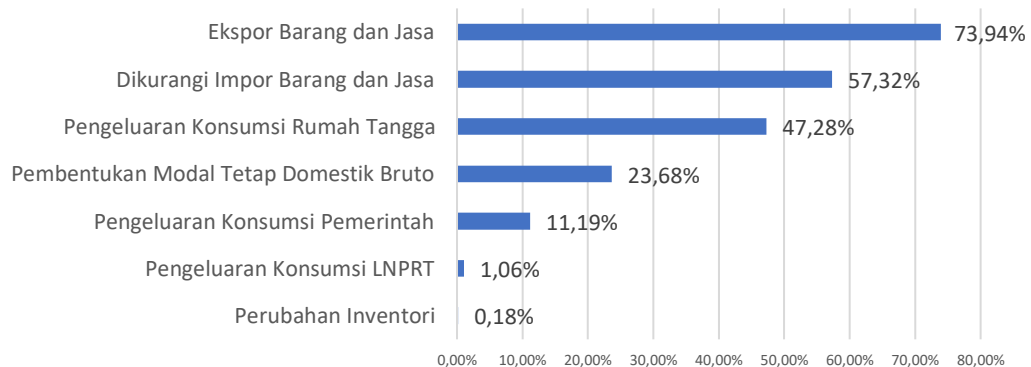
Pada posisi data terakhir yaitu PDRB ADHB menurut lapangan usaha TW 1 sampai 3 Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Selatan, struktur PDRB Kalimantan Selatan yang terbesar masih sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 18,91 % dan yang terendah adalah sektor Pengadaan Listrik, Gas sebesar 0,15 %.



Gambar II-17 Struktur PDRB ADHB Per Sektor Menurut Pengeluaran Tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

Pada posisi data terakhir yaitu PDRB ADHB menurut pengeluaran TW 1 sampai 3 Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Selatan, struktur PDRB Kalimantan Selatan yang terbesar adalah sektor Ekspor Barang dan Jasa sebesar 73,94 % dan yang terendah adalah sektor Perubahan Inventori sebesar 0,18 %.



Gambar II-18 Struktur PDRB ADHB Per Sektor Menurut Pengeluaran Tw 1 – Tw 3 (C-to-C) Tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2021

2.2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan barang dan jasa (produk) yang dihasilkan pada suatu waktu tertentu di wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan peningkatan ukuran ekonomi, peningkatan ukuran pasar serta secara tidak langsung menggambarkan peningkatan kapasitas produksi. Pertumbuhan ekonomi lazimnya diikuti dengan beberapa manfaat pembangunan sebagai berikut.

- 1) Peningkatan kesejahteraan ekonomi karena pada dasarnya terjadi peningkatan pendapatan per kapita.
- 2) Penurunan pengangguran karena terjadi peningkatan kapasitas produksi.
- 3) Peningkatan basis pendapatan asli daerah karena terjadi peningkatan pendapatan per kapita yang mengikuti peningkatan konsumsi.

Adapun data pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan disajikan dalam Tabel II-25 berikut.

Tabel II-25 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Konstan 2010

Lapangan Usaha	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,67	4,09	3,76	3,78	-0,96
B. Pertambangan dan Penggalian	0,36	4,09	4,21	1,34	-4,47
C. Industri Pengolahan	6,46	5,69	4,34	1,45	-3,38
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,93	3,6	7,58	4,72	4,74
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,66	7,74	6,83	5,59	5,83
F. Konstruksi	5,22	5,78	5,89	6,08	-1,29
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,51	7,8	7,55	7,33	-3,38
H. Transportasi dan Pergudangan	7,12	6,86	6,97	5,92	-5,32
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,74	6,84	7,01	7,41	-2,02
J. Informasi dan Komunikasi	8,78	7,94	6,89	7,25	7,36
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,73	6	4,24	1,66	1,37
L. Real Estate	6,57	5,14	5,01	5,95	3,88
M.N. Jasa Perusahaan	8,19	7,14	7,67	7,29	-1,99
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,04	2,39	3,84	6,88	0,81
P. Jasa Pendidikan	6,87	6,61	7,02	7,54	1,62
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,09	5,56	5,94	5,89	6,84
R.S.T.U. Jasa lainnya	7,97	6,59	7,38	7,08	-1,46
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,4	5,28	5,12	4,08	-1,81

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2021

Pada periode 2016-2020, perekonomian Kalimantan Selatan cenderung mengalami penurunan pertumbuhan. Pada periode tersebut hanya terjadi satu kali peningkatan pertumbuhan ekonomi, yaitu pada tahun 2017. Pada tahun tersebut, ekonomi dapat tumbuh dengan nilai 5,28%. Lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yang hanya tumbuh di tingkat 4,4%.

Selanjutnya, tahun 2018 pertumbuhan ekonomi tercatat lebih rendah dari pada tahun 2017. Pada tahun 2018 tersebut ekonomi hanya tumbuh 5,12%. Sementara itu, tahun 2019 hanya tercatat 4,08%.

Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi bahkan menunjukkan nilai negatif, sebesar -1,81%. Pertumbuhan negatif ini tidak lepas dari faktor hantaman Pandemi COVID-19 yang mempunyai dampak global. Salah satu dampak global ini membuat terbatasnya potensi pasar untuk komoditas ekspor Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga terjadi penurunan ekspor. Disamping itu, terjadi penurunan kapasitas produksi karena adanya pembatasan-pembatasan mobilitas masyarakat.

Jika diperhatikan lebih dalam, Tabel II-25 menunjukkan bahwa tiga sektor dominan Provinsi Kalimantan Selatan cenderung mengalami penurunan pertumbuhan. Sementara itu, empat sektor besar lainnya mengalami pertumbuhan yang variatif dengan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta sektor konstruksi mengalami tren pertumbuhan meningkat.

Adapun poin-poin penting yang didapat dari pembahasan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

- 1) Pertumbuhan ekonomi pada 2 (dua) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan tingkat pertumbuhan
- 2) Pada Tahun 2020, ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan negatif. Kondisi ini tidak lepas dari faktor hantaman Pandemi COVID-19 yang mempunyai dampak secara global
- 3) Tiga sektor dominan, termasuk sektor pertambangan dan penggalian cenderung mengalami penurunan tingkat pertumbuhan.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 pada sisi pengeluaran dan lapangan usaha, bersumber dari sektor-sektor utama. Sebagaimana disajikan pada Tabel II-25, di sisi pengeluaran sumber kontraksi terjadi pada komponen ekspor-impor, PMTB, serta konsumsi pemerintah. Sedangkan kontraksi pada konsumsi rumah tangga dapat tertahan seiring dengan kebijakan pemberian stimulus bantuan sosial kepada masyarakat akibat pandemi Covid-19. Di

sisi penawaran (lapangan usaha), sebagaimana disajikan pada Tabel II-25, sumber kontraksi terbesar adalah di sektor pertambangan, Industri pengolahan, transportasi pergudangan, dan perdagangan. dimana sektor lapangan usaha tersebut menyumbang kontraksi terhadap LPE tahun 2020 masing-masing sebesar 1,12%, 0,43%, 0,33%, dan 0,31%.

Tabel II-26 LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2016–2020 Menurut Pengeluaran

Komponen pengeluaran		LPE (%)/ Growth (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Konsumsi Rumah tangga	4,79	4,82	5,03	4,01	(0.26)
2	Konsumsi LNPRT	5,77	5,58	8,74	7,97	(2.40)
3	Konsumsi Pemerintah	0,09	1,02	2,53	2,91	(2.63)
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3,38	4,30	8,01	6,37	(1.42)
5	Perubahan Inventori	(1.057,14)	(145,44)	215,36	(47,04)	(89.30)
6	Ekspor Barang dan Jasa	0,37	8,96	5,97	2,12	(10.81)
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	(2,97)	10,18	7,84	1,52	(13.13)
PDRB ADHK		4.40	5,28	5,08	4,08	(1,81)

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2021)

2.2.1.4 Gini Rasio

Koefisien Gini menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran. Semakin tinggi nilai koefisien, maka semakin tinggi tingkat ketimpangan, dan semakin tidak merata tingkat pengeluaran antar penduduk di suatu wilayah pengamatan. Sebaliknya, semakin rendah nilai koefisien, maka semakin rendah tingkat ketimpangan dan semakin merata tingkat pengeluaran penduduk. Nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna, sementara nilai 0 menunjukkan pemerataan pengeluaran sempurna.

Perkembangan tingkat ketimpangan di Kalimantan Selatan periode Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel II-27 berikut.

Tabel II-27 Gini Ratio Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. 2017-2021

Kabupaten/Kota	Gini Ratio				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah Laut	0,259	0,234	0,271	0,250	0.232
Kotabaru	0,326	0,337	0,335	0,287	0.306
Banjarnegara	0,348	0,327	0,330	0,322	0.344
Barito Kuala	0,308	0,338	0,285	0,277	0.284
Tapin	0,331	0,281	0,268	0,274	0.289
Hulu Sungai Selatan	0,336	0,317	0,288	0,300	0.275
Hulu Sungai Tengah	0,302	0,320	0,288	0,285	0.331
Hulu Sungai Utara	0,309	0,325	0,327	0,319	0.378

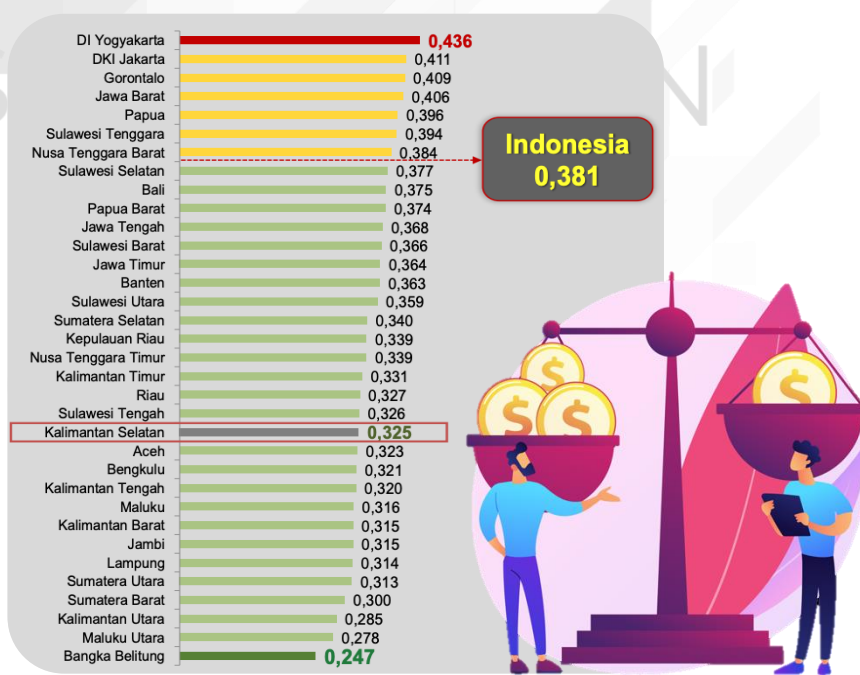
Kabupaten/Kota	Gini Ratio				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tabalong	0,328	0,305	0,306	0,346	0,288
Tanah Bumbu	0,295	0,332	0,346	0,300	0,281
Balangan	0,411	0,310	0,273	0,298	0,277
Kota Banjarmasin	0,333	0,377	0,326	0,342	0,350
Kota Banjarbaru	0,365	0,364	0,357	0,381	0,361
Kalimantan Selatan	0,347	0,344	0,334	0,332	0,325
Indonesia	0,393	0,389	0,380	0,385	0,381

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2021

Tabel II-27 ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan Provinsi Kalimantan Selatan lebih rendah daripada tingkat ketimpangan Indonesia. Dengan kata lain, fakta ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan cenderung lebih merata daripada pengeluaran penduduk secara nasional.

Tabel II-27 juga menunjukkan nilai *gini ratio* di Provinsi Kalimantan Selatan yang cenderung stabil. titik tertinggi pada di tingkat 0,347 pada tahun 2017, *gini ratio* Provinsi Kalimantan Selatan pada tiga tahun selanjutnya ada di kisaran 0,332 di tahun 2020 dan 0,325 pada tahun 2021. *Gini Ratio* tidak mengalami naik turun dari tahun 2017 s/d 2021.

Berdasarkan data terakhir per September tahun 2021, posisi Kalimantan selatan masih lebih baik di dibandingkan Provinsi Sulawesi Tengah dan berada sedikit dibawah Provinsi Aceh. Hal ini dapat terlihat pada Gambar II - 19.



Gambar II-19 Gini Ratio Indonesia Per Provinsi per September Tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

Tabel II-27 juga menunjukkan nilai gini ratio di Provinsi Kalimantan Selatan yang cenderung stabil. titik tertinggi pada di tingkat 0,347 pada tahun 2017, gini ratio Provinsi Kalimantan Selatan pada tiga tahun selanjutnya ada di kisaran 0,332 di tahun 2020 dan 0,325 pada tahun 2021. Gini Ratio tidak mengalami naik turun dari tahun 2017 s/d 2021. Pada posisi gini ratio per September 2021 memperlihatkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di Kalimantan Selatan dalam kategori Ketimpangan Rendah.



Hal ini dikarenakan berdasarkan Ukuran Bank Dunia yang mana salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat yang rendah ketimpangan rendah. Hal ini dapat terlihat pada Gambar II-20 untuk provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan data terakhir per September tahun 2021.



Gambar II-20 Distribusi Pengeluaran Penduduk Kalimantan Selatan per September 2021

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

2.2.1.5 Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Wilayah)

Selain Gini Ratio, keadaan ketimpangan juga dapat ditunjukkan oleh Indeks Williamson. Jika Gini Ratio menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk, maka Indeks Williamson dapat menyajikan tingkat ketimpangan regional. Dalam hal ini, Indeks Williamson menyajikan ketimpangan tingkat produksi antar wilayah.

sehingga Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan ketimpangan PDRB antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk melihat tingkat kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, digunakan Indeks Williamson. Perhitungan Indeks Williamson Kalimantan Selatan didasarkan pada data PDRB per kapita dan jumlah penduduk di kabupaten/kota. Semakin Indeks Williamson mendekati angka 0, maka ketimpangan pembangunan ekonomi semakin kecil, sedangkan semakin mendekati angka 1 maka ketimpangan pembangunan ekonomi semakin besar. Hasil pengukuran dari Indeks Williamson dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu :

- a. Indeks Williamson < 0,4 = tingkat ketimpangan rendah
- b. $0,4 < \text{Indeks Williamson} < 0,5$ = tingkat ketimpangan sedang (moderat)
- c. Indeks Williamson > 0,5 = tingkat ketimpangan tinggi

Nilai Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah. Pada kurun waktu tahun 2016 – 2020, Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan semakin menurun yaitu dari 0,423 menjadi 0,391. Pertumbuhan rata-rata Indeks Williamson dalam kurun waktu 2016-2020 adalah -1,95%. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang semakin menurun. Kecenderungan penurunan Indeks Williamson diharapkan dapat menjadi indikator pemerataan wilayah yang semakin baik.

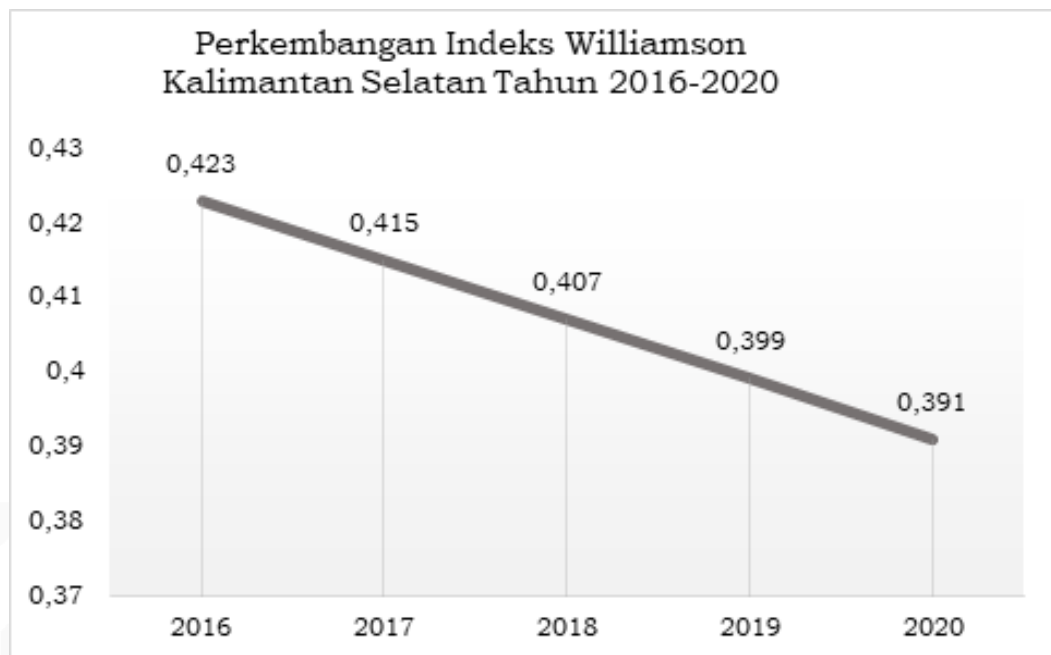
Tabel II-28 Indeks Williamson Kalimantan Selatan (2016-2020)

Indikator	Indeks Williamson (%)					Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Indeks Williamson	0,423	0,415	0,407	0,399	0,391	-1,95
Kategori Ketimpangan	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	

Sumber : BPS, Data diolah (2021)

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan upaya-upaya tepat sasaran pada lokasi dengan ketimpangan ekonomi cukup tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian karena meskipun ada daerah-daerah di Kalimantan Selatan yang maju secara ekonomi tetapi masih terdapat daerah-daerah yang relative tertinggal yang memerlukan pemberdayaan ekonomi dan dukungan sarana dan prasarana wilayah, sehingga ketimpangan antar wilayah tidak semakin tidak melebar. Grafik

perkembangan indeks Williamson Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 pada Gambar II-21.



Gambar II-21 Perkembangan Indeks Williamson Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

Sumber : BPS, Data diolah (2021)

2.2.1.6 Angka Kemiskinan. Tingkat Kemiskinan. dan Garis Kemiskinan

Jika dilihat dari Indikator kemiskinan, maka Kalimantan Selatan termasuk provinsi yang mempunyai indikator kemiskinan terendah jika dibandingkan provinsi lain di seluruh Indonesia. Secara kuantitas, penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada Semester II Tahun 2021 hanya berjumlah 197.760 jiwa atau setara dengan 4.56% dari seluruh penduduk Kalimantan Selatan. Persentase penduduk miskin nasional pada Tahun 2021 mencapai 9,71%.

Adapun jumlah dan persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II-29 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021

TAHUN	KALIMANTAN SELATAN		TAHUN	INDONESIA	
	Semester I			Semester I	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase		Jumlah (Jiwa)	Persentase
2021	208.110	4.83	2021	27.542.770	10.14
2020	187.870	4.38	2020	26.424.020	9.78
2019	192.480	4.55	2019	25.144.720	9.41
2018	189.030	4.54	2018	25.949.800	9.82

TAHUN	KALIMANTAN SELATAN		TAHUN	INDONESIA	
	Semester I			Semester I	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase		Jumlah (Jiwa)	Persentase
2017	193.920	4.73	2017	27.771.220	10.64
	Semester II			Semester II	
2021	197.760	4.56	2021	26.503.650	9.71
2020	206.920	4.83	2020	27.549.690	10.19
2019	190.290	4.47	2019	24.785.870	9.22
2018	195.010	4.65	2018	25.674.580	9.66
2017	194.560	4.70	2017	26.582.990	10.12

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

Tabel II-30 tersebut juga menunjukkan bahwa ada kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin. Walaupun Tahun 2021 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, namun ada penurunan jumlah penduduk miskin Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2017-2021.

Sementara itu, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada Tahun 2020 berdasarkan Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel II-30 berikut.

Tabel II-30 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Semester I di Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2020-2021

Kabupaten/Kota	2020		2021	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase	Jumlah (Jiwa)	Persentase
Tanah Laut	14.790	4,26	15.860	4,57
Kotabaru	14.600	4,22	16.830	4,86
Banjar	15.120	2,55	18.070	3,04
Barito Kuala	14.250	4,51	16.100	5,11
Tapin	5.900	3,06	6.930	3,60
Hulu Sungai Selatan	12.390	5,17	11.470	4,84
Hulu Sungai Tengah	15.470	5,64	16.770	6,18
Hulu Sungai Utara	14.720	6,14	16.190	6,83
Tabalong	14.700	5,72	16.130	6,27
Tanah Bumbu	16.830	4,60	18.920	4,82
Balangan	7.060	5,32	8.060	6,07
Kota Banjarmasin	31.310	4,39	34.840	4,89
Kota Banjarbaru	10.750	4,01	11.950	4,40
Kalimantan Selatan	187.890	4,38	208.110	4,83

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2021

Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin terbanyak ada di wilayah Kota Banjarmasin sebanyak 34.840 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk miskin paling sedikit ada di wilayah Kabupaten Tapin sebanyak 6.930 jiwa.

Walaupun jumlah penduduk miskin di Kota Banjarmasin adalah yang paling banyak, namun secara persentase, Kota Banjarmasin bukan wilayah yang persentase penduduk miskinnya terbesar. Persentase penduduk miskin di Kota Banjarmasin hanya 4.89 persen, jauh lebih rendah dibanding Kabupaten Hulu Sungai Utara yang persentase penduduk miskinnya mencapai 6.83%. Adapun persentase penduduk miskin terkecil ada di Kabupaten Banjar dengan nilai 3.04%.

Jika membandingkan dengan persentase penduduk miskin secara provinsi yang mempunyai nilai 4.83 persen, maka hanya ada enam Kabupaten/Kota yang persentase penduduk miskinnya lebih kecil dari nilai Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten/Kota yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Kabupaten Tanah Laut (4.57 %)
- 2) Kabupaten Kotabaru (4.86 %)
- 3) Kabupaten Banjar (3.04 %)
- 4) Kabupaten Tapin (3.60 %)
- 5) Kota Banjarmasin (4.89 %)
- 6) Kota Banjarbaru (4.40 %)

Berdasarkan Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRUSA) BPS, Garis Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Berdasarkan definisi tersebut, maka penduduk yang pengeluaran konsumsi per bulannya di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Adapun perkembangan Garis Kemiskinan di Kalimantan Selatan serta Garis Kemiskinan Berdasarkan Tempat Tinggal Penduduk disajikan pada Tabel II-31 dan Tabel II-33 berikut.

Tabel II-31 Garis Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2014 s.d. 2021 (Rupiah)

Tahun	Kalimantan Selatan	
	Garis Kemiskinan	Perubahan
2014	308.512	24.997
2015	341.350	32.838
2016	377.480	36.130
2017	402.424	24.944
2018	427.774	25.350
2019	457.222	29.448
2020	497.262	40.040
2021	519.150	21.888

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Tabel Dinamis)

Tabel II-32 Garis Kemiskinan Menurut Tempat Tinggal Tahun 2014 s.d. 2021 (Rupiah)

Tahun	Kalimantan Selatan		Indonesia	
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
2014	322.006	298.656	318.514	286.097
2015	354.103	331.966	342.541	317.881
2016	386.462	370.612	364.527	343.647
2017	412.452	393.097	385.621	361.496
2018	441.218	414.494	415.614	383.908
2019	470.293	443.928	442.062	404.398
2020	490.254	503.748	471.822	433.281
2021	536.041	517.293	502.730	464.474

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Tabel Dinamis)

Tabel II-33 Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota 2017 s.d. 2021 (Rupiah)

Kabupaten/Kota	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah Laut	425.152	447.212	480.010	522.845	537.854
Kotabaru	384.977	401.300	416.388	466.121	481.452
Banjarnegara	381.862	400.081	429.422	462.375	482.867
Barito Kuala	291.285	297.199	318.995	340.526	355.160
Tapin	390.488	405.591	406.367	446.577	459.160
Hulu Sungai Selatan	431.296	444.455	461.581	528.622	494.203
Hulu Sungai Tengah	341.024	354.214	365.008	417.778	425.438
Hulu Sungai Utara	407.608	420.783	436.997	488.237	501.994
Tabalong	430.129	446.765	463.980	531.180	542.800
Tanah Bumbu	427.852	451.714	475.763	513.803	530.568
Balangan	368.580	382.835	396.532	441.488	453.928
Kota Banjarmasin	445.428	477.210	509.773	543.546	606.330
Kota Banjarbaru	539.608	572.195	614.757	652.030	653.556
Kalimantan Selatan	457.222	427.774	419.974	389.273	519.150

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Tabel Dinamis)

Tabel II-33 menunjukkan bahwa garis kemiskinan kabupaten/kota yang lebih besar adalah tahun 2020 Kota Banjarbaru 652.030 sedangkan Garis Kemiskinan yang paling rendah yaitu Kabupaten Barito Kuala sebesar 340.526 pada tahun 2020.

2.2.1.7 Indeks Kedalaman Dan Keparahan Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (Suhariyanto dalam MediaIndonesia.com, 2020).

Dengan kata lain. Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan jarak pengeluaran penduduk untuk melepas kategorinya sebagai penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks. semakin jauh jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan dan semakin jauh juga pengeluaran yang harus ditambah agar penduduk tersebut mampu melepas kategori penduduk miskin.

Sementara itu. Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan terjadinya ketimpangan atau perbedaan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks. semakin timpang pengeluaran di antara penduduk miskin. dan semakin besar jurang perbedaan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Data mengenai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan ditampilkan pada Tabel II-34 berikut;

Tabel II-34 Persentase Penduduk Miskin (P0). Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1). dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2021

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)
2015	4,99	0,74	0,30
2016	4,85	0,71	0,16
2017	4,73	0,72	0,17
2018	4,54	0,69	0,18
2019	4,47	0,64	0,16
2020	4,83	0,76	0,18
2021	4,56	0,47	0,10

Sumber: BPS Indonesia 2022 (Semester II)

Secara sederhana. Tabel II-34 menggambarkan indikator kemiskinan di Kalimantan Selatan yang semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dari kecenderungan menurunnya tiga indikator kemiskinan dari Tahun 2015-2020.

Persentase penduduk miskin di Tahun 2015 yang mencapai 4,99 persen dapat turun sampai menjadi 4,47 persen di Tahun 2019 dan mengalami kenaikan menjadi 4,56 persen pada tahun 2021. Demikian pula Tingkat Kedalaman Kemiskinan yang pada Tahun 2015 tercatat mencapai 0,74 dapat turun sampai 0,47 di Tahun 2021. Hal yang sama juga tercatat di indikator Tingkat Keparahan Kemiskinan yang sebelumnya mencapai 0,30 di Tahun 2015. namun dapat turun menjadi 0,10 di Tahun 2021.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Sub Bab Fokus Kesejahteraan Sosial menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan ditinjau dari faktor-faktor kesejahteraan non-

ekonomi. Salah satu indikator yang dapat mewakili kondisi kesejahteraan ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan seluruh komponen-komponen penyusunnya. Dalam pembahasan IPM akan tergambar kondisi pendidikan, kondisi kesehatan serta kondisi daya beli yang secara kumulatif dapat mewakili kualitas sumber daya manusia. Namun demikian.. sub bab ini akan lebih fokus menggambarkan kondisi pendidikan dan kondisi kesehatan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai tambahan. Sub Bab Fokus Kesejahteraan Sosial juga menguraikan kondisi ketenagakerjaan.

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator pembangunan yang mempunyai cakupan yang sangat luas dalam menunjukkan pencapaian pembangunan manusia serta kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, IPM menjadi salah satu indikator yang cukup mewakili kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah.

IPM Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Nilai IPM selalu meningkat dari tahun 2017 yaitu 69,65 dan mencapai kategori tertinggi 70,91 di tahun 2020. saat nilai IPM Nasional tahun 2021 yaitu 71,28. Adapun perkembangan nilai IPM Kalimantan Selatan dan Indonesia disajikan pada Tabel II-35 berikut.

Tabel II-35 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional Kalimantan dan dan Nasional Tahun 2017-2021

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
Kalimantan Barat	66,26	66,98	67,65	67,66	67,90
Kalimantan Tengah	69,79	70,42	70,91	71,05	71,25
Kalimantan Selatan	69,65	70,17	70,72	70,91	71,28
Kalimantan Timur	75,12	75,83	76,61	76,24	76,88
Kalimantan Utara	69,84	70,56	71,15	70,63	71,19
Indonesia	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

Meskipun sudah ada di kategori tinggi, nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan masih berada di bawah rata-rata nasional. Dengan kata lain, kondisi pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan masih di bawah rata-rata masyarakat Indonesia pada umumnya.

Jika memperhatikan IPM berdasarkan wilayah, maka dapat dilihat bahwa di Tahun 2021 nilai IPM kedua kota di Provinsi Kalimantan Selatan lebih baik jika

dibandingkan dengan nilai IPM kabupaten. Nilai IPM Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin adalah 79,26 dan 77,57. Sementara itu, hanya tiga kabupaten yang memiliki nilai IPM kategori tinggi yaitu Tapin (70,31), Tabalong (72,60) dan Tanah Bumbu (70,00) sedangkan delapan kabupaten lainnya masih di kategori sedang dan belum mencapai nilai 70. Adapun nilai IPM terendah ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai 65,49. Adapun rincian nilai IPM berdasarkan wilayah disajikan pada Tabel II-36 berikut.

Tabel II-36 Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. 2021

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)	IPM
Tanah Laut	69,59	12,31	7,89	11.310	69,87
Kotabaru	69,32	11,95	7,46	11.720	69,13
Banjar	67,41	12,73	7,52	12.707	69,89
Barito Kuala	66,27	12,40	7,55	9.868	66,64
Tapin	70,57	11,95	7,77	11.952	70,31
Hulu Sungai Selatan	66,12	12,38	7,76	12.736	69,21
Hulu Sungai Tengah	66,20	12,21	8,01	12.280	69,05
Hulu Sungai Utara	64,10	12,92	7,75	9.644	66,12
Tabalong	70,57	12,89	9,11	11.470	72,60
Tanah Bumbu	70,45	12,48	7,97	11.844	71,00
Balangan	67,85	12,47	7,69	11.500	69,11
Kota Banjarmasin	71,29	13,94	10,20	14.432	77,57
Kota Banjarbaru	72,10	14,82	10,96	13.789	79,26
Kalimantan Selatan	68,83	12,81	8,34	12.143	71,28

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

2.2.2.1.1 Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

Salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia adalah dimensi pendidikan. Ada berbagai indikator yang dapat mengukur kualitas sumber daya manusia dari segi dimensi pendidikan. salah satunya adalah Angka Rata-rata Lama Sekolah (Angka RLS). Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Adapun objek pengukuran indikator ini adalah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Maka dari itu, Angka RLS dapat menunjukkan rata-rata lama sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.

Seperti halnya nilai IPM. Angka RLS Kalimantan Selatan selalu menunjukkan peningkatan. Pun demikian jika memperhatikan wilayah. Angka RLS lebih tinggi di dua kota dibanding di kabupaten. Dengan Angka RLS Tahun 2021 Kota Banjarbaru di 10,96

tahun dan Banjarmasin di 10,20 tahun. maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas di kedua kota tersebut sudah menamatkan sekolah tingkat SMP. Sementara itu, belum ada kabupaten yang mampu mencapai Angka RLS di atas 9 tahun. Dengan kata lain, rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas di kesebelas kabupaten di Kalimantan Selatan belum mampu menamatkan SMP. Data perkembangan Angka RLS di Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel II-37 berikut.

Tabel II-37 Angka Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah Laut	7,37	7,38	7,64	7,88	7,89
Kotabaru	7,18	7,19	7,42	7,43	7,46
Banjar	7,28	7,29	7,34	7,35	7,52
Barito Kuala	7,08	7,32	7,33	7,34	7,55
Tapin	7,53	7,54	7,75	7,76	7,77
Hulu Sungai Selatan	7,71	7,72	7,74	7,75	7,76
Hulu Sungai Tengah	7,79	7,80	7,99	8,00	8,01
Hulu Sungai Utara	7,19	7,36	7,37	7,53	7,75
Tabalong	8,56	8,57	8,78	9,10	9,11
Tanah Bumbu	7,67	7,70	7,71	7,96	7,97
Balangan	7,03	7,04	7,27	7,55	7,69
Kota Banjarmasin	9,92	9,93	9,94	9,95	10,20
Kota Banjarbaru	10,77	10,93	10,94	10,95	10,96
Kalimantan Selatan	7,99	8,00	8,20	8,29	8,34

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

2.2.2.1.2 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

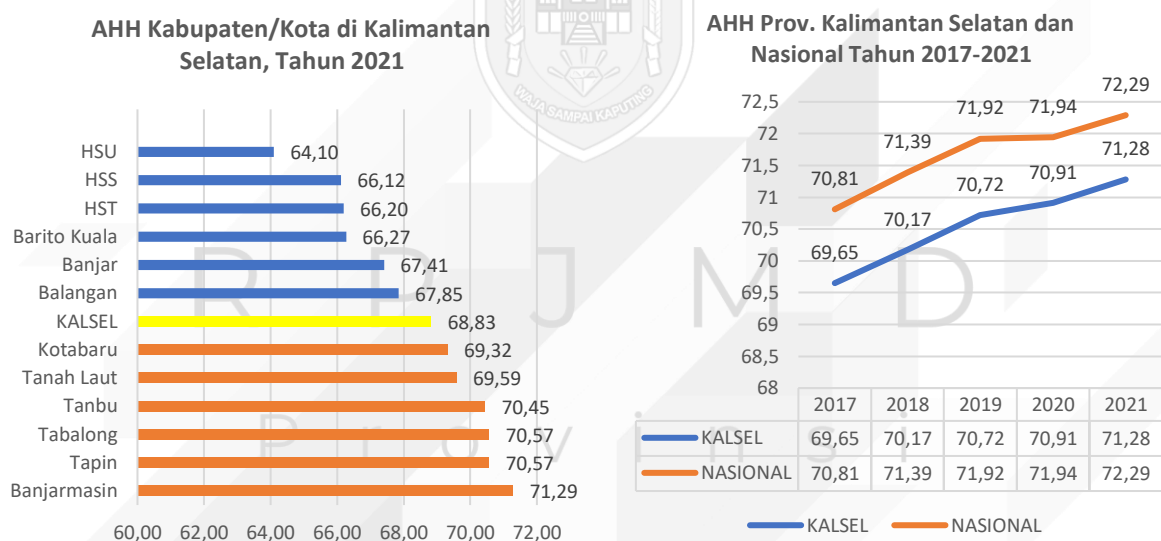
Tabel II-38 Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah Laut	11,82	11,95	11,96	12,01	12,31
Kotabaru	11,82	11,83	11,92	11,93	11,95
Banjar	11,76	11,99	12,28	12,44	12,73
Barito Kuala	12,08	12,37	12,38	12,39	12,40
Tapin	11,52	11,85	11,86	11,94	11,95
Hulu Sungai Selatan	12,05	12,07	12,10	12,17	12,38
Hulu Sungai Tengah	12,17	12,18	12,19	12,20	12,21
Hulu Sungai Utara	12,82	12,83	12,88	12,91	12,92
Tabalong	12,47	12,53	12,59	12,72	12,89
Tanah Bumbu	12,00	12,33	12,36	12,37	12,48
Balangan	12,07	12,36	12,37	12,46	12,47
Kota Banjarmasin	13,90	13,91	13,92	13,93	13,94
Kota Banjarbaru	14,78	14,79	14,80	14,81	14,82
Kalimantan Selatan	12,46	12,50	12,52	12,52	12,81

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

2.2.2.1.3 Angka Harapan Hidup (AHH)

Dimensi kesehatan yang menjadi Indikator pembangunan manusia adalah Angka Harapan Hidup (AHH). SIRUSA BPS menyebutkan bahwa AHH dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. Adapun perkembangan AHH di Kalimantan Selatan dapat terlihat pada Gambar II-22.



Gambar II-22 Angka Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021. Serta AHH Kabupaten/Kota Tahun 2021

Sumber BPS Kalimantan Selatan 2022

Gambar II-22 menunjukkan bahwa AHH Kalimantan Selatan selalu mengalami peningkatan. Dengan kata lain, terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan selama periode Tahun 2017-2021. AHH Kalimantan Selatan dengan nilai 68,83 tahun ini menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada Tahun 2021 diharapkan dapat mempunyai peluang hidup hingga usia 68,83 tahun.

Namun demikian, Gambar II-22 juga menunjukkan bahwa AHH Kalimantan Selatan masih berada di bawah AHH nasional. Dengan kata lain, derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan masih berada di bawah rata-rata seluruh penduduk Indonesia.

Gambar II-22 juga menyajikan data AHH berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa masyarakat di wilayah kota di Kalimantan Selatan memiliki derajat kesehatan yang lebih baik daripada

masyarakat di kabupaten. Namun, perbedaan derajat kesehatan di wilayah kota dengan kabupaten tidak mencolok seperti perbedaan indikator pendidikan.

Kedua kota di Kalimantan Selatan memiliki nilai AHH lebih baik dibanding 11 kabupaten lain. Nilai AHH di Banjarbaru dan Banjarmasin adalah 72,10 tahun dan 71,29 tahun. Nilai tersebut tidak terlalu berjarak dibanding Kabupaten Tabalong dan Tapin yang memiliki AHH dengan nilai yang sama yaitu 70,57 dan 70,57. Adapun kabupaten yang memiliki nilai AHH paling rendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai 64,10.

Adapun perkembangan nilai AHH menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel II-39 berikut.

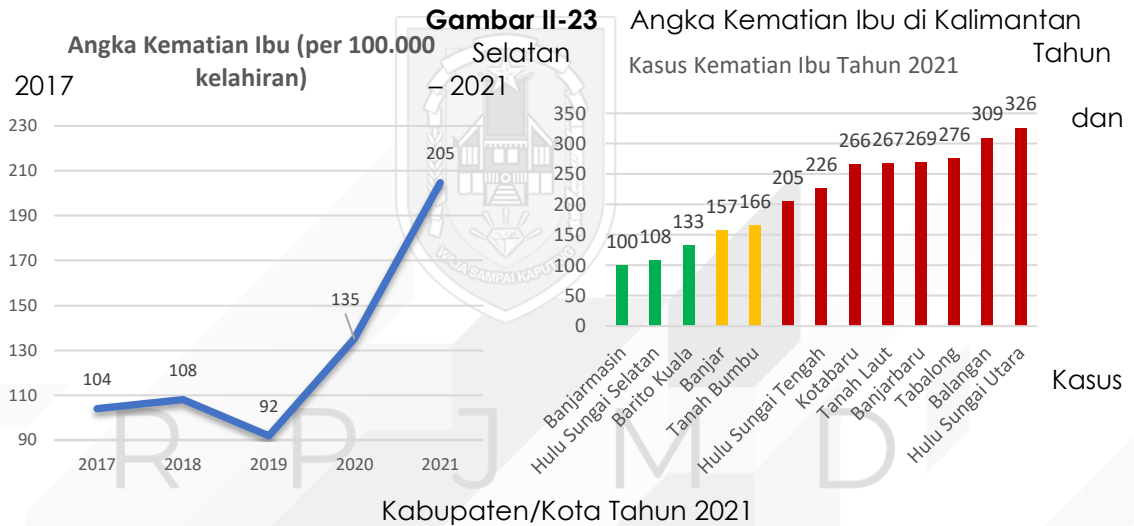
Tabel II-39 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) Provinsi Kalimantan Selatan. 2015-2021

Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah Laut	68,62	68,76	68,89	69,08	69,31	69,45	69,59
Kota Baru	68,49	68,61	68,72	68,89	69,10	69,21	69,32
Banjar	65,97	66,17	66,38	66,66	66,97	67,21	67,41
Barito Kuala	64,94	65,14	65,33	65,59	65,88	66,09	66,27
Tapin	69,47	69,62	69,77	69,98	70,23	70,40	70,57
Hulu Sungai Selatan	64,14	65,38	65,39	65,59	65,82	65,97	66,12
Hulu Sungai Tengah	64,83	65,06	65,30	65,54	65,82	66,01	66,20
Hulu Sungai Utara	62,49	62,71	62,94	63,24	63,58	63,83	64,10
Tabalong	69,74	69,84	69,95	70,12	70,33	70,44	70,57
Tanah Bumbu	69,19	69,19	69,44	69,74	70,08	70,34	70,45
Balangan	66,95	67,07	67,19	67,37	67,59	67,72	67,85
Kota Banjarmasin	70,32	70,44	70,55	70,75	70,98	71,13	71,29
Kota Banjarbaru	71,36	71,43	71,50	71,67	71,87	71,99	72,10
Kalimantan Selatan	67,80	67,92	68,02	68,23	68,49	68,66	68,83

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2022

i. Angka Kematian Ibu (AKI)

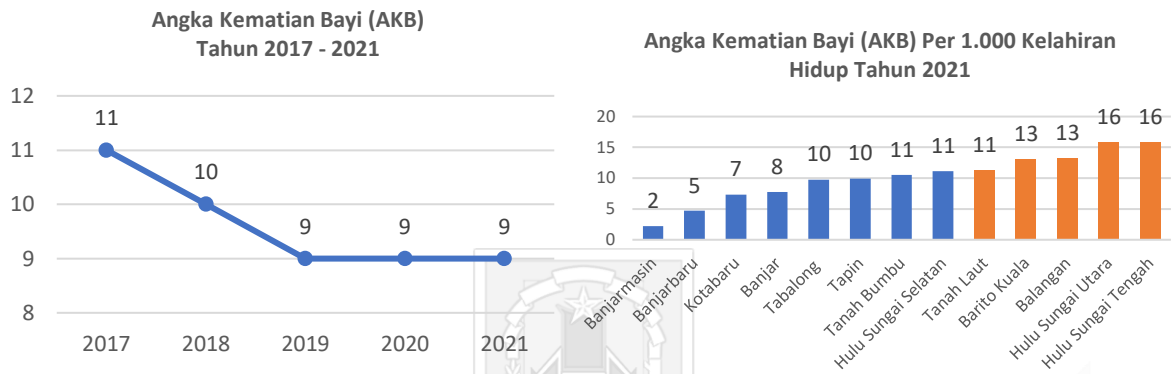
Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan derajat kesehatan reproduksi masyarakat di suatu wilayah. Informasi yang didapat dari AKI dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi. Adapun data mengenai AKI di Kalimantan Selatan dapat terlihat pada Gambar II-23 berikut.



Gambar II-23 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi AKI di Kalimantan Selatan. Kondisi menguatirkan dengan AKI tertinggi dialami pada Tahun 2017 dengan nilai 104, artinya terdapat 104 kematian ibu dalam 100.000 kelahiran. Kondisi sempat membaik pada Tahun 2019, karena nilai AKI menurun sampai di tingkat 92. Setelah itu, AKI kembali meningkat pada Tahun 2021 saat nilainya mencapai 205. Indikator derajat kesehatan reproduksi masyarakat juga dilengkapi dengan informasi mengenai kasus kematian ibu yang juga tergambar pada Gambar II-23. Dari gambar tersebut terlihat bahwa kasus kematian ibu tertinggi pada Tahun 2021 yaitu kabupaten Hulu Sungai Utama yakni sebesar 326 Orang dan Kasus kematian paling rendah tercatat di Banjarmasin dan Hulu Sungai Selatan dengan nilai 100 dan 108.

ii. Angka Kematian Bayi dan Balita

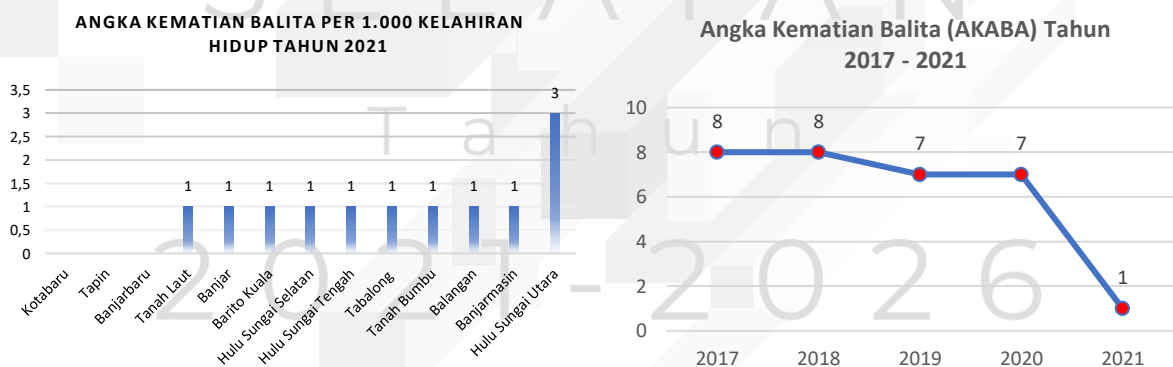
Perkembangan AKB di Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2017-2021 menunjukkan tren menurun dari 11 per 1.000 kelahiran pada tahun 2017 menjadi 9 per 1.000 kelahiran pada tahun 2021. Beberapa penyebab kematian bayi di samping penyakit seperti ISPA (infeksi saluran pernapasan akut), panas tinggi hingga diare antara lain disebabkan keracunan kehamilan, pendarahan saat persalinan, berat badan lahir rendah serta faktor lainnya. Pendampingan kelas ibu hamil di puskesmas dan rumah sakit, meningkatnya kunjungan pemeriksaan ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan serta optimalisasi peran Posyandu berkontribusi dalam penurunan kasus kematian bayi di Kalimantan Selatan.



Gambar II-24 Angka Kematian Bayi di Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2021 dan Kasus Kabupaten/Kota Tahun 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan. 2022

Perkembangan AKABA di Kalimantan Selatan selama tahun 2017-2021 mengalami tren penurunan. Pada tahun 2017, AKABA sebesar 8 per 1.000 kelahiran, kemudian terus turun ditahun 2018 menjadi 8 per 1.000 kelahiran dan secara konsisten sampai tahun 2019 menurun dan menurun lagi menjadi 7 per 1.000 kelahiran ada tahun 2020 masih tetap 7 per 1.000 kelahiran pada Tahun 2021 turun menjadi 1 per 1.000 kelahiran. Beberapa penyebab kematian pada balita antara lain penyakit infeksi, ISPA dan diare pada balita, kurangnya pemahaman orang tua terkait pentingnya deteksi dini penyakit menular dan tidak menular pada balita, serta rendahnya pemberian imunisasi pada balita. Selain itu kondisi pandemic covid 19 menyebabkan pelayanan posyandu yang kurang optimal pemantauan aki dan akaba ada kenaikan. Bisa dilihat pada gambar II-25 di bawah.



Gambar II-25 Angka Kematian Balita di Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2020 dan Kasus Kabupaten/Kota Tahun 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan. 2021

iii. Tingkat Kesakitan

Tingkat kesakitan terdiri dari akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular adalah infeksi yang disebabkan mikroorganisme virus, bakteri, jamur, dan parasit. Ciri penyakit menular adalah dapat berpindah ke orang lain yang sehat sehingga menyebabkan orang yang tadinya sehat menjadi sakit. Sedangkan Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyakit bukan disebabkan oleh penularan vektor, virus atau bakteri, namun lebih banyak disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup. Yang termasuk kategori PTM ini diantaranya adalah stroke, penyakit jantung koroner, kanker, diabetes melitus, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan.

Berikut perkembangan penyakit menular di Kalimantan Selatan dari tahun 2016-2020.

Tabel II-40 Perkembangan Penyakit menular di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Case Detection Rate (CDR) TB	%	39	41	50	42	17
2	Succes Rate TB	%	92	91	98,8	86,3	64
3	Prevalensi HIV-Aids Kelompok Resiko Tinggi	angka	0,04	0,05	<1	0,07	0,04
4	Annual Paracite Incidence (API) Malaria < 1	angka	0,53	0,29	0,15	0,19	0,13
5	Prevalensi Kusta	angka	0	0,32	0,4	0,44	0,3
6	Persentase Kab/Kota yang eliminasi Rabies	%	85	92	92	30,8	15,4
7	Persentase cakupan pengobatan massal Filariasis terhadap jumlah penduduk endemis	%	91	93,1	96,3	92,5	96,9
8	Persentase Pasien Covid-19 Sembuh	%	0	0	0	0	0,90

Berbagai penyakit tidak menular (PTM) turut mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, termasuk masyarakat Kalimantan Selatan. Ada 16 penyakit tidak menular yang tercatat diidap oleh masyarakat dalam Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat meningkatkan risiko kematian akibat PTM. Adapun rincian PTM yang diidap oleh masyarakat Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel II-41 berikut:

Tabel II-41 Penyakit Tidak Menular Tahun 2020

KABUPATEN	JUMLAH PENYAKIT TIDAK MENULAR				
	HIPERTENSI	STROKE	JANTUNG KORONER	GAGAL GINJAL KRONIK	DIABETES
Tanah Laut	7.436	296	364	26	4.170



KABUPATEN	JUMLAH PENYAKIT TIDAK MENULAR				
	HIPERTENSI	STROKE	JANTUNG KORONER	GAGAL GINJAL KRONIK	DIABETES
Kotabaru	2.057	30	-	1	455
Banjarmasin	43.423	1.226	1.239	357	15.054
Barito Kuala	388	5.765	273	681	5
Tapin	12.430	91	241	23	4.436
HSS	20.352	291	270	14	3.553
HST	19.029	136	580	30	6.643
HSU	9.633	610	3.893	62	3.962
Tabalong	11.089	512	846	32	6.276
Tanah Bumbu	4.775	104	36	8	1.166
Balangan	14.325	199	200	10	6.861
Banjarmasin	120.117	3.376	5.218	661	45.560
Banjarbaru	5.182	154	220	28	1.212
Kalimantan Selatan	270.236	12.790	13.380	1.933	99.353

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2021

iv. Status gizi Masyarakat

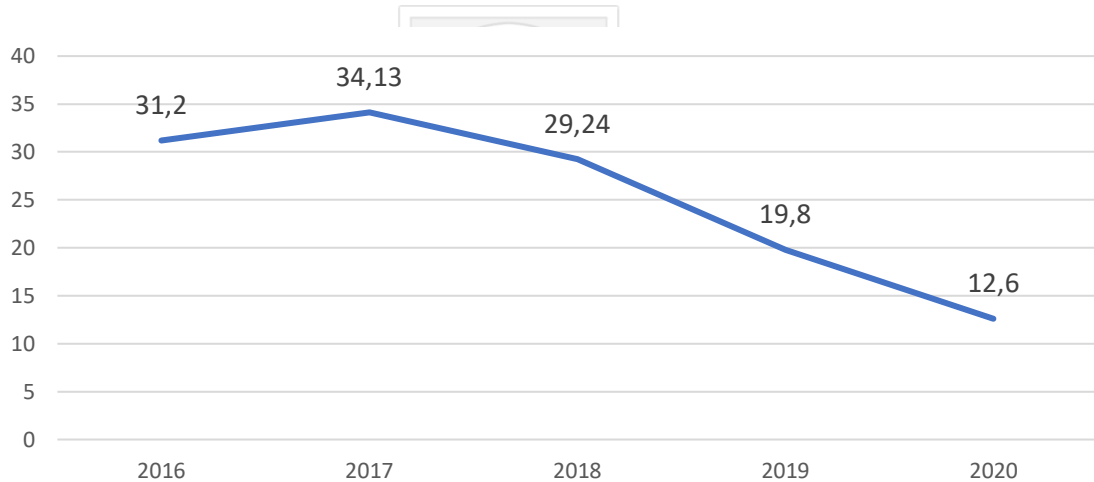
Status gizi masyarakat Kalimantan Selatan yang perlu mendapat perhatian mencapai 32,03 % dari jumlah penduduk Kalimantan Selatan. Angka ini terdistribusi dari anemia gizi, gizi kurang dan gizi buruk. Jika kondisi ini terjadi terus menerus dan terakumulasi maka akan meningkatkan prevalensi stunting. Anemia Gizi meskipun sudah mengalami penurunan namun masih menjadi masalah terbesar bagi perempuan khususnya remaja putri dan Ibu hamil. Sementara gizi kurang pada balita saja masih 10,45% pada tahun 2020, demikian juga gizi buruk pada balita masih 1,45% pada tahun 2020. Sementara gizi kurang dan buruk tidak hanya terjadi pada balita saja, tetapi juga terjadi pada anak dan usia di atas 5 tahun dan dewasa yang memiliki riwayat penyakit kronis. Tabel berikut menggambarkan status gizi masyarakat Kalimantan Selatan khususnya berkaitan dengan remaja putri, ibu hamil dan balita.

Tabel II-42 Perkembangan Status Gizi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Prevalensi anemia gizi	%	27,43	21,13	22,41	15,97	20,13
2	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	21,8	21	14,1	15,8	10,45
3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	2,6	2,9	2,6	2,5	1,45
4	Prevalensi Stunting	%	31,12	34,13	29,24	19,8	12,6

Tumbuh kembang jasmani anak-anak dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu masalah yang berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang jasmani anak-anak adalah stunting, yaitu masalah nutrisi yang dialami sejak bayi.

Permasalahan stunting juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan berbagai program bidang kesehatan, prevalensi stunting di Kalimantan Selatan dapat menunjukkan grafik yang membaik. Ini tercermin dari tingkat prevalensi balita di Kalimantan Selatan yang nilainya menurun, bisa dilihat angka Stunting pada grafik berikut.



Gambar II-26 Perkembangan Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2020

Perkembangan nilai stunting berdasarkan Riskesdas dan e-PPBGM serta rinciannya berdasarkan Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel II-43 berikut.

Tabel II-43 Jumlah Stunting di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

Kabupaten/Kota	TB/U								Total	Stunting	%
	Sangat Pendek		Pendek		Normal		Tinggi				
	0-23 Bln	0-59 Bln	0-23 Bln	0-59 Bln	0-23 Bln	0-59 Bln	0-23 Bln	0-59 Bln			
Kab Tanah Laut	162	386	447	1.124	5.890	14.431	124	147	16.088	1.510	9
Kab Kota Baru	194	500	426	1.257	3.226	9.144	70	188	11.089	1.757	16
Kab Banjar	719	1.509	1.241	3.296	7.178	18.815	119	186	23.806	4.805	20
Kab Barito Kuala	280	762	753	2.301	6.490	16.424	164	208	19.695	3.063	16
Kab Tapin	132	331	333	1.044	3.108	8.535	62	74	9.984	1.375	14
Kab Hulu Sungai Selatan	68	204	230	771	4.054	11.808	26	34	12.817	975	8
Kab Hulu Sungai Tengah	214	358	465	1.345	4.658	13.817	37	52	15.572	1.703	11
Kab Hulu Sungai Utara	262	656	776	2.529	4.662	11.725	29	37	14.947	3.185	21
Kab Tabalong	183	411	650	1.737	6.314	16.236	56	69	18.453	2.148	12
Kab Tanah Bumbu	125	307	455	1.281	9.165	23.293	77	100	24.981	1.588	6
Kab Balangan	307	643	525	1.653	2.452	6.440	12	20	8.756	2.296	26



Kabupaten/Kota	TB/U										
	Sangat Pendek		Pendek		Normal		Tinggi		Total	Stunting	%
	0-23 Bln	0-59 Bln	0-23 Bln	0-59 Bln	0-23 Bln	0-59 Bln	0-23 Bln	0-59 Bln			
Kota Banjarmasin	228	570	600	1.914	15.020	40.228	83	170	42.882	2.484	6
Kota Banjarbaru	136	257	290	622	1.924	4.129	38	62	5.070	879	17
Kalimantan Selatan	3.010	6.894	7.191	20.874	74.141	195.025	897	1.347	224.140	27.768	12

2.2.2.1.4 Rata rata Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita masyarakat di suatu daerah menentukan tingkat/kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada akhirnya akan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun pada dasarnya angka pengeluaran tersebut bukan satu-satunya variabel penentu kesejahteraan, masih ada variabel lain seperti tingkat inflasi, ketersediaan produksi lokal dan ketersediaan komponen produksi lokal. Selama periode 2017-2021 pengeluaran perkapita Kalimantan Selatan menunjukkan tren yang meningkat dari Rp. 11.600.000 menjadi Rp. 12.143.000, mengalami peningkatan 4,47% atau sebesar Rp. 534.000. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-44 Perkembangan pengeluaran perkapita di Provinsi Pulau Kalimantan Tahun 2017-2021

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
Kalimantan Barat	8.472	8.860	9.055	8.930	8.974
Kalimantan Tengah	10.492	10.931	11.236	11.154	11.182
Kalimantan Selatan	11.600	12.062	12.253	12.032	12.143
Kalimantan Timur	11.612	11.917	12.359	11.728	12.116
Kalimantan Utara	8.643	8.943	9.343	8.756	9.075
Indonesia	10.664	11.059	11.299	11.013	11.156

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas bahwa rata-rata pengeluaran perkapita tertinggi selama kurun waktu 2017-2021 di Pulau Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Selatan disusul Kalimantan Timur, masing-masing Rp.12.143.000 dan Rp. 12.116.000. Sedangkan rata-rata pengeluaran perkapita terendah adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, dengan angka masing-masing adalah Rp. 9.075.000 dan Rp. 8.974.000. Meskipun angka ini menunjukkan disparitas wilayah, namun belum tentu tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat lebih rendah dari pada Kalimantan Selatan, atau sebaliknya.

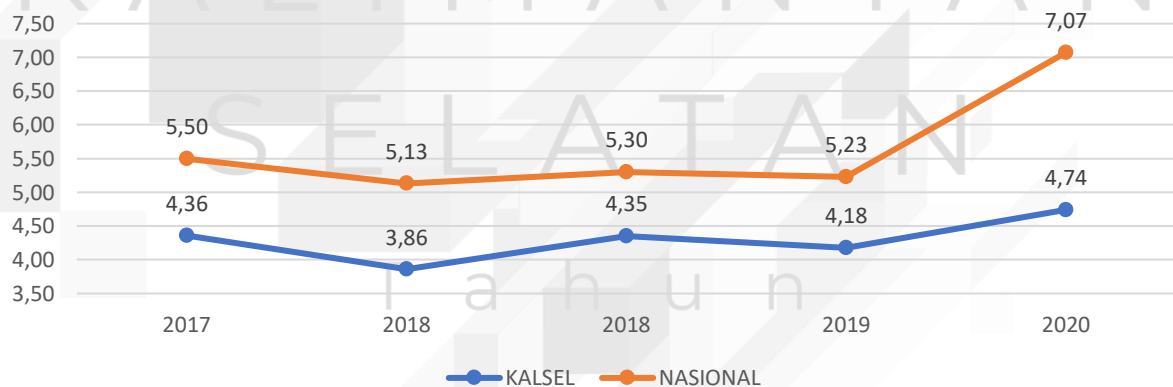
2.2.2.2 Ketenagakerjaan

2.2.2.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu isu yang mengemuka dalam ketenagakerjaan adalah pengangguran. Di satu sisi pengangguran dapat terkait dengan masalah kualitas sumber daya manusia. di sisi lain pengangguran juga dapat menggambarkan ketidakcocokan keterampilan dan kebutuhan industri. Selain itu, masalah pengangguran kemudian dapat mendorong ekspansi ekonomi. masalah ini menjadi krusial untuk dituntaskan karena berpotensi menimbulkan masalah sosial dan meningkatkan tingkat kriminalitas.

Tingkat pengangguran Kalimantan Selatan yang tergambar melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) relatif cukup baik. TPT Kalimantan Selatan selalu mengalami penurunan sejak Tahun 2017 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021. Selain itu, indikator utama pengangguran ini pun berada di bawah TPT nasional. Dengan kata lain, proporsi penduduk yang tercatat sebagai pengangguran terbuka di Indonesia secara keseluruhan lebih banyak daripada proporsi yang sama di Kalimantan Selatan.

Grafik perkembangan TPT Kalimantan Selatan serta perbandingannya dengan TPT Nasional disajikan pada Gambar II-27 berikut.



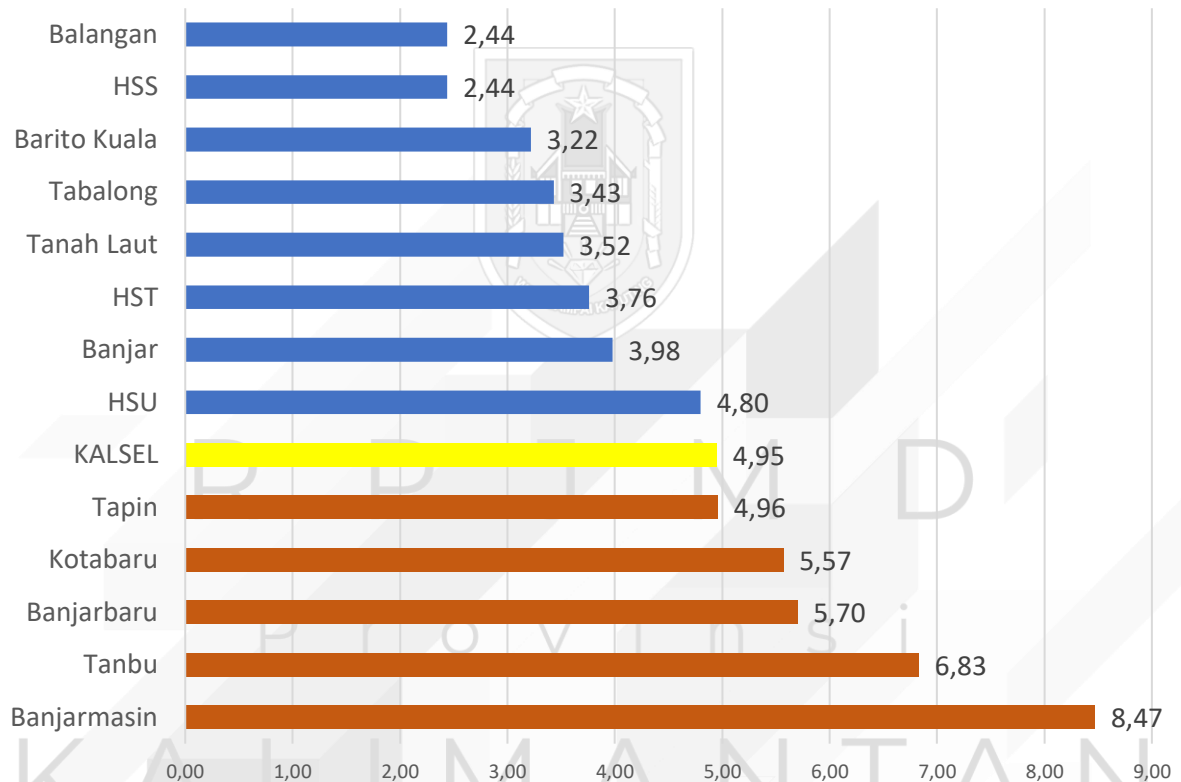
Gambar II-27 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017–2021

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2022

Pada Tahun 2021, indikator ketenagakerjaan memperlihatkan bahwa kedua kota di Kalimantan Selatan mempunyai TPT yang lebih buruk dibandingkan kabupaten-kabupaten di Kalimantan Selatan. Tiga daerah yang memiliki pengangguran terbesar diisi oleh Banjarmasin (berada di posisi teratas) dan Banjarbaru (di posisi ketiga). Sementara itu, Kabupaten Tanah Bumbu berada di posisi kedua. Secara berurutan, nilai TPT Banjarmasin, Tanah Bumbu dan

Banjarbaru adalah 8,47, 6,83, dan 5,70. Adapun daerah yang memiliki TPT terendah di wilayah Kalimantan Selatan adalah Balangan dengan nilai 2,44, keterangan lebih lanjut bisa di lihat di Gambar II-28 dibawah.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021



Gambar II-28 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2021

Pada Tahun 2020 Angkatan Kerja di Kalimantan Selatan yang tercatat bekerja ada di tingkat 66,04%. Adapun tingkat pengangguran pada kelompok angkatan kerja ada di tingkat 3,29%. Sementara itu, penduduk yang dikategorikan sebagai Bukan Angkatan Kerja tercatat sebanyak 30,67%.

Jika dirinci berdasarkan Kabupaten/Kotanya, maka Banjarmasin dan Banjarbaru kembali tercatat sebagai daerah dengan indikator tenaga kerja yang relatif lebih buruk, yaitu hanya 56,91% untuk Banjarmasin dan 63,12% untuk Banjarbaru yang tercatat bekerja.

Sementara itu, angkatan kerja yang tercatat bekerja Barito Kuala dan Balangan terbilang paling banyak di antara Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Selatan. Di Barito Kuala, ada 72,42% angkatan kerja yang tercatat bekerja, sementara di Balangan mencapai 74,62%.

Data rinci mengenai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan pada Tahun 2020 disajikan pada Tabel II-45 berikut.

Tabel II-45 Persentase Penduduk Bekerja, Pengangguran, dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2020

Kabupaten/kota	Tahun 2020		
	Angkatan Kerja (%)		Bukan Angkatan Kerja (%)
	Bekerja	Pengangguran	
Tanah Laut	69,46	2,57	27,97
Kotabaru	61,47	3,21	35,32
Banjarnegara	69,74	2,81	27,45
Barito Kuala	72,42	2,19	25,39
Tapin	67,55	2,62	29,83
Hulu Sungai Selatan	71,52	1,64	26,85
Hulu Sungai Tengah	68,37	2,77	28,85
Hulu Sungai Utara	66,93	3,15	29,92
Tabalong	67,14	2,13	30,73
Tanah Bumbu	65,28	4,88	29,84
Balangan	74,62	1,88	23,50
Banjarmasin	56,91	5,17	37,93
Banjarnegara	63,12	3,70	33,18
Kalimantan Selatan	66,04	3,29	30,67

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2022

2.2.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistik, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Tingginya TPAK menunjukkan tingginya pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Pada periode 2017-2021, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kalimantan Selatan tercatat berfluktuasi. TPAK tertinggi tercatat pada Tahun 2017 dengan nilai 71,57 persen. TPAK kemudian turun-naik hingga tercatat di tingkat 69,33 pada Tahun 2020.

TPAK di tingkat Kabupaten/Kota pun mengalami fluktuasi. TPAK tertinggi tercatat di Balangan pada Tahun 2020 dengan nilai 76,50 persen. Sementara itu TPAK terendah tercatat di Banjarmasin pada Tahun 2020 dengan nilai 62,07 persen.

Adapun rincian TPAK Kalimantan Selatan berdasarkan Kabupaten/Kota pada periode 2017-2021 ditunjukkan pada Tabel II-46 berikut.

Tabel II-46 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Selama Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah Laut	67,27	67,08	69,68	72,03	72,27
Kotabaru	68,90	70,25	68,03	64,68	67,50
Banjar	71,90	71,79	72,55	72,55	70,84
Barito Kuala	76,88	79,34	74,75	74,61	75,48
Tapin	71,92	70,05	69,83	70,17	70,31
HSS	71,38	72,15	71,49	73,15	69,25
HST	74,58	74,85	70,47	71,15	70,20
HSU	71,58	70,55	68,94	70,08	71,41
Tabalong	74,64	75,63	71,02	69,27	71,49
Tanah Bumbu	67,29	66,62	67,31	70,16	68,29
Balangan	79,03	77,54	71,99	76,50	75,38
Banjarmasin	65,68	65,28	66,15	62,07	63,19
Banjarbaru	60,98	63,51	63,46	66,82	65,95
Kalimantan Selatan	70,06	70,27	69,41	69,33	69,26

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2022

Rendahnya TPAK salah satunya disebabkan oleh ketidaksesuaian pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja dunia usaha. Tenaga kerja di Kalimantan Selatan dominan berada pada lapangan usaha pertanian kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, masing-masing mencapai 694.450 (33,33%) dan 412.249 (19,79%) pada tahun 2020. Sementara lapangan usaha industri hanya 183.041 atau sebesar 8,79% dari total angkatan kerja yang bekerja. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-47 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020

No	Jenis Lapangan Usaha	Tidak Tamat / Tamat SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	Jumlah
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	459.994	130.608	96.003	7.845	694.450
B	Pertambangan dan Penggalian	20.402	10.261	33.599	6.438	70.700
C	Industri Pengolahan	76.685	39.600	57.783	8.973	183.041
D	Pengadaan Listrik, Gas		171	3.303		3.474
E	Pengadaan Air	2.687	705	2.232	774	6.398
F	Konstruksi	51.600	28.658	23.763	5.010	109.031
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	152.154	90.979	141.546	27.570	412.249
H	Transportasi dan Pergudangan	30.792	15.803	31.068	4.727	82.390



No	Jenis Lapangan Usaha	Tidak Tamat / Tamat SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	Jumlah
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58.651	35.331	42.557	6.446	142.985
J	Informasi dan Komunikasi	1.091	1.152	7.214	3.972	13.429
K	Jasa Keuangan		438	7.363	8.308	16.109
L	Real Estate	1.057		1.330	525	2.912
M,N	Jasa Perusahaan	4.194	3.760	8.192	4.004	20.150
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.891	2.597	35.912	39.934	81.334
P	Jasa Pendidikan	2.843	4.368	19.050	82.876	109.137
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.822	931	6.907	22.354	32.014
R,S,T,U	Jasa lainnya	47.135	18.159	34.634	3.588	103.516
Jumlah		913.998	383.521	552.456	233.344	2.083.319

Terkait lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang masuk dalam dunia kerja masih relatif kecil. Pada tahun 2020 lulusan SMK yang terserap dalam dunia kerja hanya sebesar 32,59% dan 22,89% pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan data lulusan SMA sederajat yang bekerja di sektor industri mencapai 57.783 orang pada tahun 2020, maka lulusan SMK yang berkeja di sektor industri maksimal mencapai 10,89%. Selanjutnya lulusan SMK yang bekerja dapat dilihat pada Tabel II-48 berikut.

Tabel II-48 Lulusan SMK Kalimantan Selatan yang diterima Bekerja pada Tahun 2020-2021

No	Kab/Kota	Siswa Lulus			Lulus dan Bekerja		
		2020		2021	2020		2021
		Orang	Orang	Orang	Persen	Orang	Persen
1	Balangan	533	376	217	40,71	193	51,33
2	Banjara	1912	1807	551	28,82	209	11,57
3	Barito Kuala	584	551	157	26,88	96	17,42
4	Hulu Sungai Selatan	781	663	205	26,25	180	27,15
5	Hulu Sungai Tengah	867	674	324	37,37	221	32,79
6	Hulu Sungai Utara	1107	1037	241	21,77	173	16,68
7	Kotabaru	982	951	251	25,56	213	22,40
8	Tabalong	1868	1928	542	29,01	195	10,11
9	Tanah Bumbu	2552	2410	877	34,37	693	28,76
10	Tanah Laut	1401	1396	516	36,83	258	18,48
11	Tapin	777	725	127	16,34	71	9,79
12	Bajarbaru	1972	1853	694	35,19	575	31,03
13	Banjarmasin	3975	3763	1591	40,03	1073	28,51
Jumlah		19311	18134	6293	32,59	4150	22,89

Selain itu serapan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki setiap tenaga kerja. Kompetensi ini diukur berdasarkan sertifikasi dengan menggunakan empat kategori, yaitu 1) sertifikasi sekolah, 2) Sertifikasi yang diberikan

oleh lembaga diklat (LSP-P1), 3) sertifikasi yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kementerian (LSP-P2), dan 4) sertifikasi yang diberikan oleh asosiasi ahli (LSP-P3). Lebih lanjut dapat dilihat Tabel II-49 berikut.

Tabel II-49 Sertifikasi Lulusan SMK Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	Sertifikasi			
		Sekolah	LSP-P1 (Lembaga Diklat)	LSP-P2 (Departemen terkait)	LSP-P3 (Asosiasi Ahli)
1	Balangan	433			58
2	Banjar	695	698		347
3	Barito Kuala	478	90		
4	Hulu Sungai Selatan	698			35
5	Hulu Sungai Tengah	696	162		
6	Hulun Sungai Utara	651	358		
7	Kotabaru	792			
8	Tabalong	1659	217		
9	Tanah Bumbu	2113	264		
10	Tanah Laut	992	296		
11	Tapin	681			
12	Banjarbaru	890	595	112	212
13	Banjarmasin	2952	1714		52
Jumlah Siswa		13730	4394	112	704

Tabel di atas menunjukkan bahwa kompetensi tenaga kerja lulusan SMK masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada sertifikasi yang dimiliki didominasi oleh sekolah sebesar 72,49%, dan 23,20% oleh lembaga profesi penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Sementara, sertifikasi yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kementerian dan asosiasi profesi masing-masing sebesar 0,59% dan 3,72%.

2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

Seni dan budaya turut menghiasi kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. Dari seni dan budaya tersebut berkembang nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat ikut menangkal pengaruh buruk bebas dan pesatnya arus informasi serta globalisasi. Pelestarian seni dan budaya serta nilai-nilai luhur di dalam kandungannya diharapkan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia Kalimantan Selatan. Beberapa lembaga berperan dalam melestarikan nilai-nilai yang lahir dari seni dan budaya masyarakat Kalimantan Selatan. Jenis Seni Budaya Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel II-50 Berbagai Seni Budaya di Kalimantan Selatan

Jenis Seni Budaya	Seni Budaya di Kalimantan Selatan
Teater Tradisi/Teater Rakyat	Mamanda, Madihin, Wayang Gung, Abdul Mulk Loba, Kuda Gepang, Cerita Damarwulan, Tantayungan, Wayang Kulit, Teater Tuter.
Seni Musik	Kuriding, Karung-karung, Panting, Kintunglit, Bumbung, Suling Bambu, Musik Tiup, Salung Ulin, Kateng Kupak
Sinoman Hadrah dan Rudat	Sinoman Hadrah dan Rudat bersumber dari budaya yang dibawa oleh pedagang dan penda'wah Islam dari Arab dan Persia dan berkembang campur menjadi kebudayaan pada masyarakat pantai pesisir Kalimantan Selatan hingga timur
Seni Tari	Tari Tradisi : Balian, Gantar, Bakanjar, Babangai Tari Klasik : Baksa Kambang, Topeng, Radap Rahayu Tari Rakyat : Japin Sisit, Tirik Lalan, Gambut, Kuda Gepang, Rudat dll
Seni Sastra	Kuriding, Karung-karung Panting, Kintunglit, Bumbung, Suling Bambu, Musik Tiup, Salung Ulin, Kateng Kupak. Syair : Hikayat, Sejarah, Keagamaan Pantun : Biasa, Kilat, Bakait
Seni Rupa	Ornamen, Topeng dan Patung
Keterampilan	Maayam dinding palupuh, maulah atap, wantilan, maulah gula habang, maulah dodol kandungan, maulah apam barabai, maulah sasapu ijuk, manggangan, maulah wadai, maulah urung katupat, maayam janur banjar, dll

Sumber: Dari Berbagai Sumber

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen yang disusun bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenas dan BPS. IPK ini diperlukan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan ditingkat nasional dan daerah sesuai dengan amanat UU no 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2019 IPK Kalimantan Selatan dengan IPK 53,79 % berada di urutan 13 dari 34 Provinsi, melampaui target IPK nasional yaitu 53,74 %. Namun ada beberapa indikator ada yang masih rendah atau belum mencapai target.

Dimensi Ekonomi Budaya Nilai Dimensi Ekonomi Budaya Kalimantan Selatan adalah 22,24 pada urutan ke 22 dari 34 provinsi, masih di bawah target nasional sebesar 30,55.

Dimensi Warisan Budaya Nilai Dimensi Warisan Budaya Kalimantan Selatan adalah 43,06 pada urutan ke 15 dari 34 provinsi di atas target nasional sebesar 41,11.

Dimensi Ekspresi Budaya Nilai Dimensi Ekspresi Budaya Kalimantan Selatan adalah 32,16 pada urutan ke 19 dari 34 provinsi di bawah target nasional sebesar 36,57.

Dimensi Budaya Literasi Nilai Dimensi Budaya Literasi Kalimantan Selatan adalah 60,28 pada urutan ke 7 dari 34 provinsi di atas target nasional sebesar 55,03.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum mencakup fokus pelayanan urusan wajib dan fokus pelayanan urusan pilihan. Kondisi pelayanan wajib dapat dilihat dari pelayanan umum pada berbagai aspek sesuai dengan klasifikasi urusan yang tertera dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2.3.1 Layanan Urusan Wajib

Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Provinsi Kalimantan Selatan memang sudah menunjukkan adanya perbaikan di setiap periodenya, namun masih perlu adanya peningkatan terutama sarana prasarana penunjang pendidikan. Sementara pelayanan non dasar sebagian besar belum menunjukkan kinerja yang membanggakan karena dalam beberapa urusan wajib non dasar ini belum memiliki NSPK.

2.3.1.1 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

2.3.1.1.1 Pendidikan

Capaian keberhasilan pendidikan di Kalimantan Selatan yang diukur berdasarkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kalimantan Selatan diukur berdasarkan capaian sebagai berikut:

A. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kalimantan Selatan secara umum menunjukkan perkembangan meningkat selama periode Tahun 2014-2020. APS untuk jenjang SD/MI/Paket A sudah hampir mencapai 100%, artinya hampir seluruh penduduk Kalimantan Selatan yang masuk dalam kelompok usia SD/MI/Paket A masih bersekolah atau tercatat sebagai peserta didik. Sementara APS untuk jenjang SMP/MTs/Paket B sudah lebih 90%. Yang paling rendah adalah APS jenjang SMA/SMK/MA/Paket C yang masih di bawah 70%.

APS pada jenjang SMP/MTs/Paket B dan jenjang SMA/SMK/MA/Paket C belum sebaik APS pada jenjang SD/MI/Paket A. Namun demikian, APS pada kedua jenjang tersebut mengalami peningkatan nilai secara terus menerus pada periode Tahun 2014-2020. Adapun data rinci mengenai APS di Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel II-51 berikut.

Tabel II-51 Pencapaian APS pada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan Di Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI/Paket A	99,24	99,43	99,48	99,55	99,64	99,53	99,48
SMP/MTs/Paket B	91,83	91,91	92,21	92,33	92,43	92,83	93,04
SMU/SMK/MA/ Paket C	67,19	67,49	67,91	68,30	68,66	69,19	69,38

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Selatan 2021

B. Angka Partisipasi Kasar

Secara umum. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kalimantan Selatan cukup baik dan terus mengalami peningkatan. Namun, nilai APK di jenjang SD/MI/Paket A yang menurun bukan mengindikasikan bahwa terjadi kemunduran kualitas sumber daya dan partisipasi penduduk usia SD/MI/Paket A. Penurunan nilai APK tersebut berpotensi terjadi karena semakin sesuainya usia penduduk saat menempuh pendidikan jenjang SD/MI/Paket A. Secara sederhana, bisa saja terjadi pengurangan anak-anak usia dini yang bersekolah di jenjang SD/MI/Paket A atau terjadi pengurangan anak-anak yang mengalami pengulangan kelas. Adapun data APK Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2014-2020 disajikan pada Tabel II-52 berikut.

Tabel II-52 Pencapaian APK ada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan di Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI/Paket A	105,38	103,80	106,37	105,72	104,25	104,29	107,28
SMP/MTs/Paket B	97,68	96,38	97,1	98,41	96,13	97,40	86,31
SMU/SMK/MA/Paket C	66,01	68,10	74,51	83,54	88,18	91,05	79,10

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Selatan 2021

C. Angka Partisipasi Murni

Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistika (SIRUSA) BPS. Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan persentase penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Walaupun secara umum nilai APM Kalimantan Selatan berfluktuasi, namun nilai APM di jenjang SMU/SMK/MA/Paket C cukup menggembirakan karena selalu mengalami peningkatan cukup drastis. Adapun data APM Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2013-2019 disajikan pada Tabel II-53 berikut.

Tabel II-53 Pencapaian APM ada Semua Jenjang Dan Jenis Pendidikan Di Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI/Paket A	97,44	97,75	98,05	98,45	91,96	92,42	98,75
SMP/MTs/Paket B	72,40	72,51	72,70	73,37	71,03	69,56	75,51
SMU/SMK/MA/Paket C	55,04	55,58	55,91	57,15	63,92	65,17	58,25

Fasilitas dasar pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikatakan lebih dari cukup dengan ketersediaan sekolah maupun kuantitas tenaga pengajar yang dapat dilihat pada Tabel II-54.

Tabel II-54 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru, serta Indikatornya di Provinsi Kalimantan Selatan 2013-2020

Taman Kanak Kanak					
Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)	Rasio Murid terhadap Guru	Rasio Murid terhadap Sekolah
2013	2.637	96.104	9.819	10	36
2014	2.124	84.517	8.809	10	40
2015	2.124	84.517	8.809	10	40
2016	na	na	na	na	na
2017	2.225	105.535	9.251	11	47
2018	2.447	105.717	9.749	11	43
2019	2.448	101.777	10.641	10	42
2020	2435	96206	10525	9	40
Sekolah Dasar					
Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)	Rasio Murid terhadap Guru	Rasio Murid terhadap Sekolah
2013	3.220	456.268	32.720	14	142
2014	3.385	426.090	37.097	11	126
2015	2.902	392.385	30.761	13	135
2016	2.902	383.860	30.811	12	132
2017	2.913	403.753	29.753	14	139
2018	2.911	381.207	27.806	14	131
2019	2.914	377.968	27.391	14	130
2020	2.929	376.084	30.685	12	128
Sekolah Menengah Pertama					
Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)	Rasio Murid terhadap Guru	Rasio Murid terhadap Sekolah
2013	884	166.240	16.343	10	188
2014	925	174.060	15.975	11	188
2015	583	119.426	9.386	13	205
2016	583	119.436	9.392	13	205
2017	602	137.884	9.186	15	229
2018	598	120.803	8.859	14	202
2019	601	118.052	8.830	13	196
2020	615	112.479	9.724	12	183

Sekolah Menengah Atas					
Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)	Rasio Murid terhadap Guru	Rasio Murid terhadap Sekolah
2013	318	76.052	10.157	7	239
2014	322	74.965	7.135	11	233
2015	185	57.853	4.336	13	313
2016	185	57.615	4.342	13	311
2017	192	67.068	4.404	15	349
2018	186	65.819	4.439	15	354
2019	190	67.588	4.529	15	356
2020	195	67.723	4.833	14	347
Sekolah Menengah Kejuruan					
Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)	Rasio Murid terhadap Guru	Rasio Murid terhadap Sekolah
2013	105	41.188	3.271	13	392
2014	105	41.081	2.971	14	391
2015	120	49.452	2.971	17	412
2016	120	49.383	3.547	14	412
2017	122	55.851	3.515	16	458
2018	123	55.793	3.660	15	454
2019	122	57.485	3.706	16	471
2020	126	59.717	3.943	15	474

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2021

Jika melihat analisis berikutnya berupa rasio murid terhadap guru, maka angka ini akan menggambarkan tingkat perbandingan murid terhadap guru sebagai asumsi dasar kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang mengenyam pendidikan. Semakin tinggi rasio murid terhadap guru maka beban mengajar guru semakin berat, sehingga memungkinkan kualitas mengajar menurun, begitu juga sebaliknya. Namun analisis awal ini harus juga diperhatikan terkait distribusi penempatan hingga kualitas guru yang mengajar apakah sudah memenuhi standar kualifikasi atau belum.

Jika dilihat dari rasio murid terhadap guru secara umum, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tenaga pengajar yang lebih dari cukup seperti yang terlihat pada Tabel II-54. Namun dalam persebarannya perlu diperhatikan kualitas tenaga pendidik dan kependidikannya agar kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas dapat terealisasi.

Pada jenjang yang lebih tinggi. di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat perguruan tinggi negeri yakni Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari. Politeknik Kesehatan (Poltekkes Banjarmasin). dan Politeknik Negeri Banjarmasin. Selain itu. terdapat juga perguruan tinggi swasta sebanyak 23 unit dan akademi swasta sebanyak 22.

Tabel II-55 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,89	7,99	8	8,2	8,29
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,29	12,46	12,5	12,52	12,68
3	Angka Putus Sekolah Pendidikan SMA	%	0	0	0	0,0043	0,0005
4	Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi	%	0	0	0	50,00	25,00
5	% Peserta Didik SMA khatam qur'an	%	0	0	0	40,00	40,00
6	% SMA dengan sarpras yang memenuhi standar	%	0	0	0	60,00	62,28
7	Angka Putus Sekolah Pendidikan SMK	%	0	0	0	0,92	86
8	%Lulusan SMK yang diterima di Dunia Kerja	%	0	0	0	25,00	50,00
9	% Peserta Didik SMK khatam qur'an	%	0	0	0	32,00	50,00
10	% SMK dengan sarpras yang memenuhi standar	%	0	0	0	55,00	42,00
11	%GTK bersertifikat Pendidik	%	0	0	0	78,65	80,00
12	% Tenaga Kebudayaan yang bersertifikat Pendidik	%	0	0	0	100,00	100,00
13	Angka Putus Sekolah Pendidikan Khusus	%	0	0	0	0,4	0,0
14	% peserta didik Pendidikan Khusus yang mandiri	%	0	0	0	34,00	35,00
15	% sekolah penyelenggara pendidikan inklusi	%	0	0	0	156 Sekolah	156 Sekolah
16	% Siswa Pendidikan Khusus khatam qur'an	%	0	0	0	10	40,00
17	% Pendidikan Khusus dengan sarpras yang memenuhi standar	%	0	0	0	55,00	50,00
18	Persentase Guru SMA setingkat Guru S2	%	7,24	9,90	6,65	0	0
19	Persentase Sekolah yang memiliki Sarpras memenuhi standar	%	48,32	49,81	51,00	0	0
20	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				100	100
21	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur	%				100	100
22	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur	%				100	100

Sumber : Disdikbud Prov. Kalimantan Selatan. 2021

2.3.1.1.2 Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan sedang dalam masa pengembangan dimana tahun 2021 telah ada 51 unit rumah sakit (dengan

tempat tidur sebanyak 3.820 tempat tidur), 6 rumah sakit bersalin, 237 puskesmas, 3.076 Posyandu, 55 klinik kesehatan, 595 Polindes, dan 900 Posbindu. Meskipun begitu, kendala infrastruktur dan sarana prasarana penunjang pembangunan kesehatan tersebut masih belum maksimal, sehingga terjadi disparitas derajat kesehatan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun kondisi prasarana kesehatan sebagaimana pada Tabel II-56.

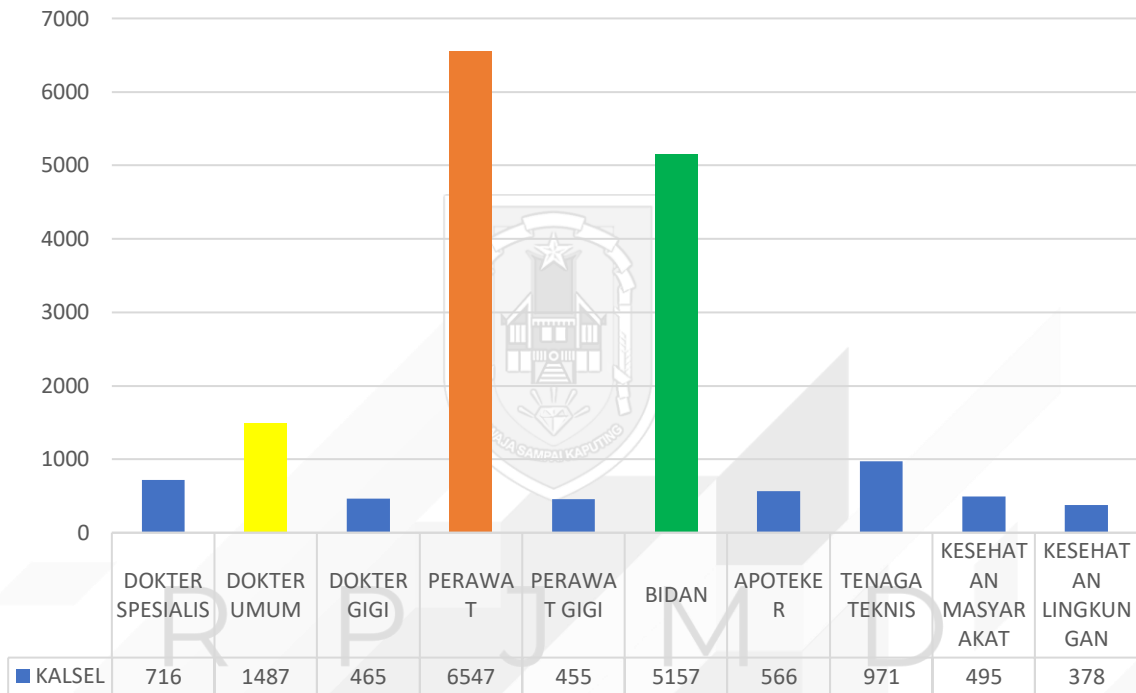
Tabel II-56 Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

Kabupaten/ Kota	Rumah Sakit	Tempat Tidur di RS	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik Kesehatan	Polindes	Posbindu
Tanah Laut	5	189	2	19	271	6	84	88
Kotabaru	1	111	0	28	293	1	46	150
Banjari	7	798	1	25	562	4	111	235
Barito Kuala	1	135	0	19	386	1	135	21
Tapin	2	146	0	13	222	2	66	51
Hulu Sungai Selatan	5	239	0	21	301	1	113	49
Hulu Sungai Tengah	1	150	0	19	367	3	113	48
Hulu Sungai Utara	2	238	0	13	330	2	32	45
Tabalong	2	126	0	18	282	1	71	67
Tanah Bumbu	3	208	1	14	205	8	56	132
Balangan	1	138	0	12	196	1	55	42
Banjarmasin	12	1.060	1	26	395	18	-	52
Banjarnbaru	9	282	1	10	166	7	18	15
Kalimantan Selatan	51	3.820	6	237	3.976	55	900	995

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2020

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu adanya tenaga kesehatan yang mendukung sarana dan prasarana kesehatan yang dapat membantu pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pada tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 446 dokter spesialis, 792 dokter umum, 233 dokter gigi, 871 tenaga medis, 6.843 tenaga keperawatan, 4.535 tenaga kebidanan, 922 tenaga kefarmasian, dan 925 tenaga kesehatan lainnya yang sebarannya dapat dilihat pada Gambar II-29 sampai Gambar II-32.

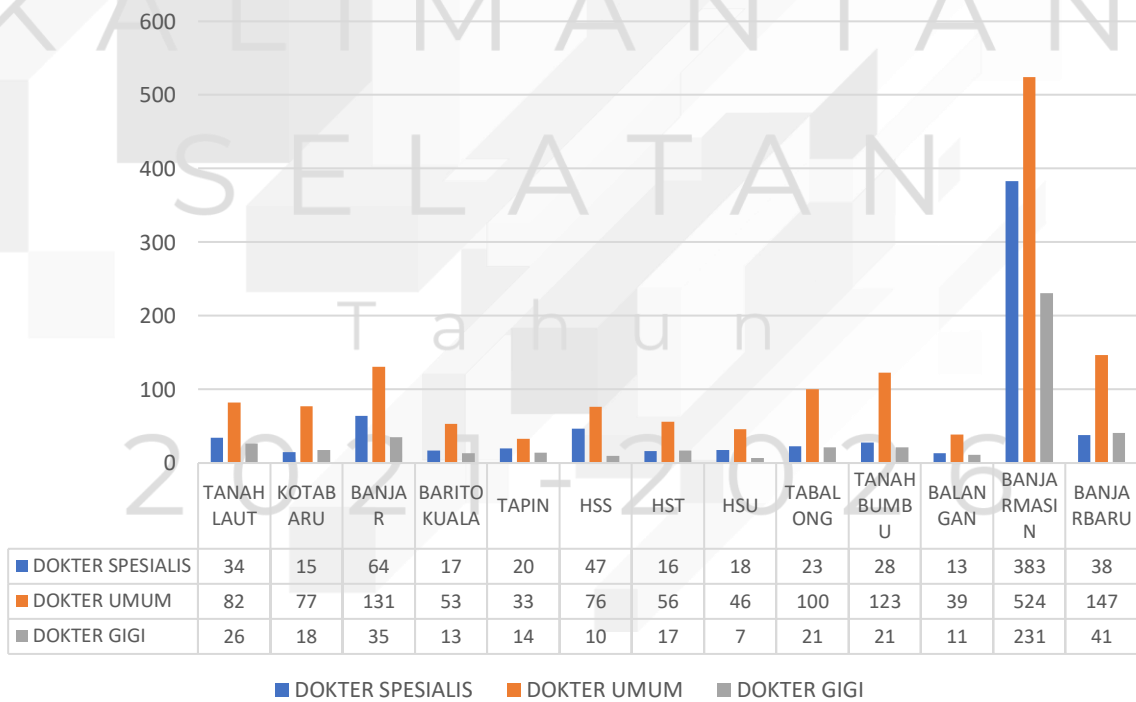
JUMLAH TENAGA KESEHATAN (JIWA) TAHUN 2021



Gambar II-29 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2022

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2022

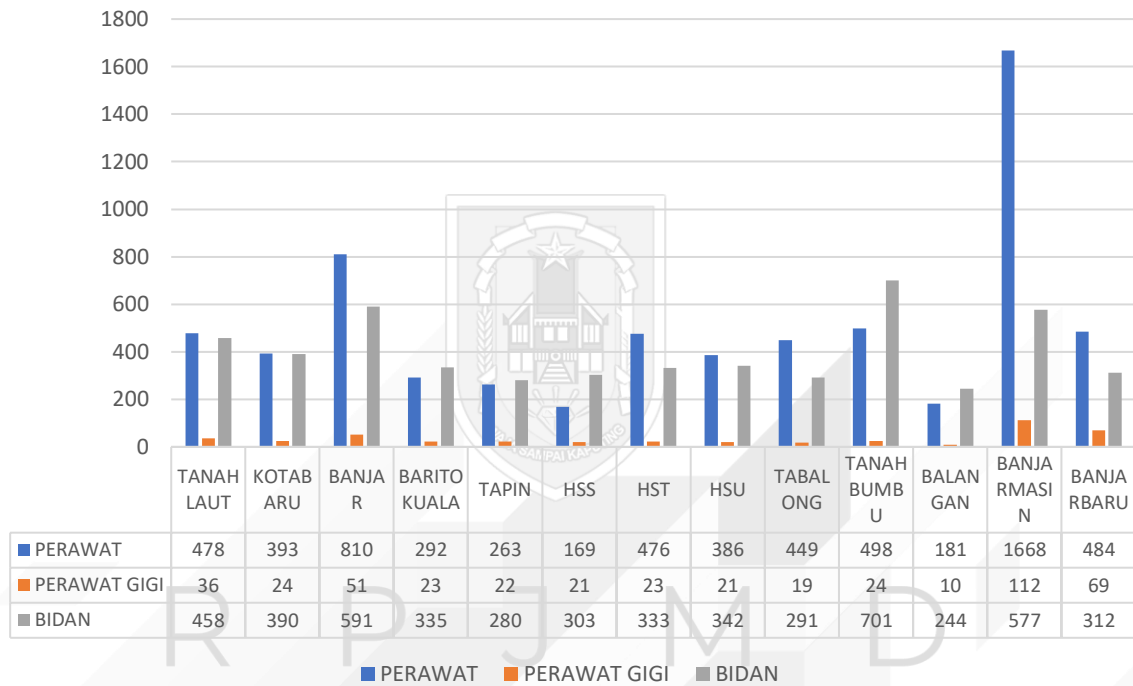
TENAGA DOKTER TAHUN 2021



Gambar II-30 Jumlah Tenaga Dokter di Kabupaten/Kota Tahun 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2022

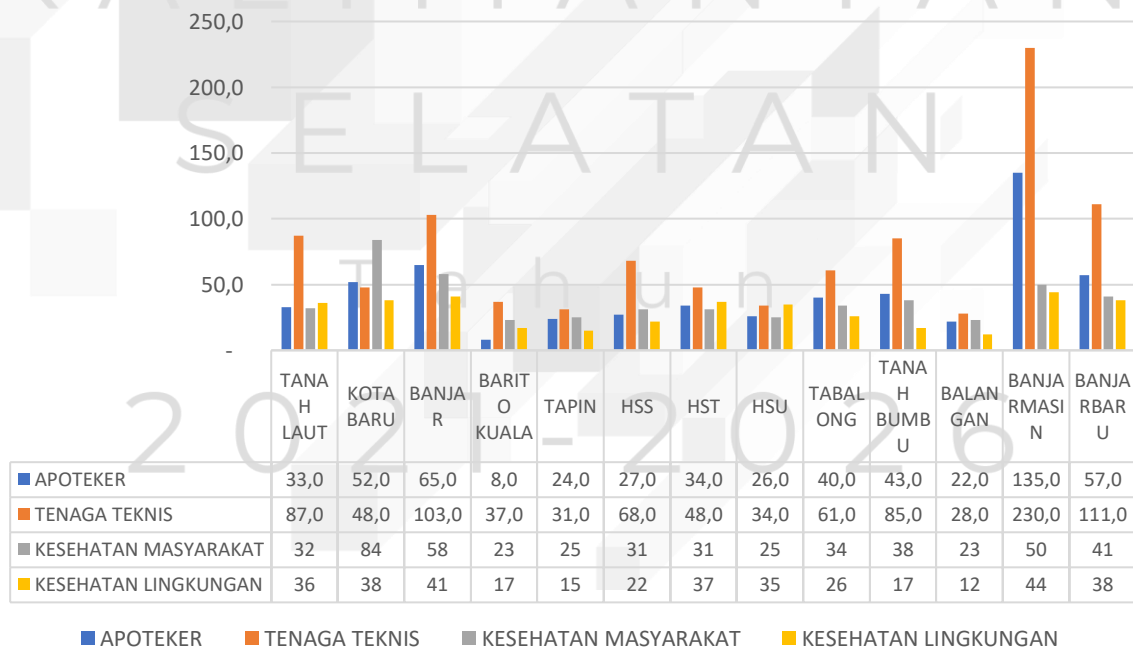
TENAGA KEPERAWATAN DAN BIDAN TAHUN 2021



Gambar II-31 Jumlah Tenaga Keperawatan dan Bidan di Kabupaten/Kota Tahun 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2022

TENAGA KEFARMASIAN DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA TAHUN 2021



Gambar II-32 Jumlah Kefarmasian Dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2022

Tabel II-57 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	128	103,9	112	92	135
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	11	10	10	8,9	9
3	Prevalensi Stunting						
	e-PPGBM	%	N/A	N/A	N/A	18,98	12,2
	SSGI	%	31,12	34,13	33,08	31,75	12,2
4	Konsistensi Kebijakan Perencanaan dan Anggaran Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100
5	Prevalensi anemia gizi	%	27,43	21,13	25,28	23,67	20,13
6	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	21,8	21	14,2	15,8	10,45
7	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	2,6	2,9	2,57	3,4	1,45
8	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	%	58	73	62	75	81
9	Cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	52	69,1	73,1	79,8	88,6
10	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	%	55,5	66,1	77,2	89,4	90,1
11	Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	%	59,9	58,3	73,8	69	69
12	Persentase Tempat Pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat Kesehatan	%	54,2	58,3	73,8	69	69
13	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan Kawasan Sehat	Kab/Kota	2	8	10	10	10
14	Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar	%	11,2	32,4	24,3	28,88	28,8
15	Persentase puskesmas/institusi yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan olahraga	%	26,58	63,83	67,23	75,24	79,57
16	Persentase Puskesmas/institusi yang melaksanakan Kesehatan Olahraga di wilayah kerjanya	%	65,35	74,47	70,64	74,89	76,6
17	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM	%	3,71	31	35	70,5	100
18	Persentase Posyandu Aktif	%	26,95	28,59	30,27	35,37	57,8
19	Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS	%	21,89	23,64	40,77	72	100
20	Case Detection Rate (CDR) TB	%	39	42	50	54	17
21	Succes Rate TB	%	92	91	89	90	64
22	Prevalensi HIV-Aids Kelompok Resiko Tinggi	angka	0,042	0,051	0,062	0,065	0,043



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
23	Annual Paracite Incidence (API) Malaria < 1	angka	0,53	0,29	0,17	0,2	0,13
24	Persentase Kab/Kota dengan IR DBD <49/100.000 Penduduk	Per 100.000 pddk	106,6	13,49	53,8	51,9	84,61
25	Prevalensi Kusta	angka	0	0,32	0,40	0,41	0,3
26	Persentase Kab/Kota yang eliminasi Rabies	%	85	92	30,77	30,76	15,4
27	Persentase cakupan pengobatan massal Filariasis terhadap jumlah penduduk endemis	%	91	93,12	96,28	92,5	96,9
28	Persentase Kabupaten/kota yang 50% Puskesmasnya melakukan Pemeriksaan dan Tatalaksana Pneumonia sesuai Standar melalui Program ISPA/Pendekatan MTBS	%	20,33	61,21	61,54	54,58	30,77
29	Persentase Kabupaten/Kota dengan layanan rehidrasi oral aktif (LROA)	%	7,7	7,7	7,7	15	23
30	Persentase Puskesmas yang melaksanakan PTM terpadu	%	15,38	29,91	38,89	40	55
31	Persentase perempuan usia 30 sampai dengan 50 tahun yang di deteksi dini kanker serviks dan payudara	%	2,84	9,57	15,07	20,15	21,3
32	Persentase Kabupaten/Kota dengan pelayanan keswa	%	15,38	30,77	46,15	69,36	77,45
33	Persentase penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) tingkat Provinsi	%	100	100	100	100	100
34	Persentase Penanganan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	%	100	100	100	100	100
35	Persentase Kab / Kota yang melaksanakan Respon Dini Pada Penyakit yang bisa menimbulkan Wabah	%	45,01	42,01	47,98	69,23	76,2
36	Cakupan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	%	85,1	85	63,7	86,1	60
37	Persentase Puskesmas yang terakreditasi (Minimal Madya)	%	6	20	34	65	72
38	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	angka	0	0	0,176	0,187	0,187
39	Persentase Ketersediaan Jenis Layanan Laboratorium Kesehatan sesuai Standar	%	35	48	100	100	100
40	Persentase masyarakat miskin dan tidak mampu dan kriteria lainnya yang terpenuhi layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100
41	Persentase Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah dengan akreditasi Paripurna (17 RSUD)	%	10	20	27,9	42,5	49

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
42	Persentase faskes yang melaksanakan kesehatan tradisional	%	0	89,74	52,6	49	55
43	Persentase SDM Kesehatan Dengan Sertifikasi dan Kompetensi Sesuai Standar/Akreditasi Kedokteran	%	100	100	96	86	105
44	Persentase Fasyankes dengan PemenuhanSDMK Sesuai Standar	%	15	20	24	43	54
45	Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas	%	90	92	93	99	98
46	Persentase fasyankes dengan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	31	35	40	70	63
47	Persentase Instalasi Farmasi yang melakukan Pengelolaan obat. BMHP dan Vaksin sesuai standar	%	75	82	93	93	94
48	Persentase Fasyankes dengan ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	%	23	25	27	38	52
49	Persentase PAK, PKRT dan Produk PIRT yang mempunyai ijin	%	N/A	50	65	85	85

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2021

Indikator AKI mengalami kenaikan akibat Pandemi Covid-19, dimana setiap fasilitas pelayanan kesehatan mengharuskan uji tes covid sebelum ibu hamil memasuki proses persalinan, dan ada beberapa kasus karena hasil uji belum keluar sementara kondisi ibu hamil yang sudah lemah masih menunggu hasil uji tes covid dan baru bisa dioperasi. selain itu pelaksanaan Pembatasan kegiatan menyebabkan layanan pemantauan ibu hamil tidak berjalan optimal dan menyebabkan kematian Ibu Hamil. Data Angka prevalensi stunting yang digunakan adalah data dari EPPGBM yang diakui oleh kementerian kesehatan dengan data akurat by name by adres yang diinput oleh puskesmas, data ini digunakan karena merupakan data real lapangan dan proses input data dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang sudah dilatih oleh Kemenkes melalui Dinas Kesehatan Provinsi.

Tabel II-58 Capaian Kinerja Urusan RS Ulin Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	AHH (Angka Harapan Hidup)	Tahun	10,76	10,76	10,93	10,94	10,95
2	Persentasi Pelayanan BLUD	%	100	100	100	100	100

Sumber: RS Ulin Prov. Kalimantan Selatan 2021

Tabel II-59 Capaian Kinerja Urusan RS Ansari Saleh Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Program Pelayanan BLUD	%	100	100	100	100	100

Sumber: RS Ansari Saleh Prov. Kalimantan Selatan 2021

Tabel II-60 Capaian Kinerja Urusan RSJ Sambang Lihum Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pemenuhan Kebutuhan Obat	%	100	100	100	100	100
2	Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Kesehatan	%	100	100	100	100	100
3	Pemulangan Pasien dengan Remisi Sempurna	%	10	13	19	25	20
4	Pemulangan Pasien dengan Remisi Parsial	%	50	55	60	60	60
5	Masyarakat Miskin yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan	%	100	100	100	100	100
6	Tingkat Penilaian Proper lingkungan	%	Merah	Merah	Merah	Biru	Biru
7	Jumlah Pemenuhan perlengkapan Rumah Sakit (%)		40	50	70	80	90
8	Jumlah Pembangunan gedung Rumah Sakit (%)	Orang	40	50	70	80	90
9	Jumlah Rehabilitasi gedung Rumah Sakit (%)		40	50	70	80	90
10	Jumlah SDM Kesehatan RS yang ditinggalkan kapasitasnya	Nilai	4	5	11	14	6
11	Status Akreditasi RSJ Sambang Lihum	Dokumen	-	P	P	P	P
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dokumen	73,35	90,88	90,28	90,56	92,87
13	Jumlah dokumen Perencanaan Tahunan yang disusun	Nilai	2	2	2	2	2
14	Jumlah dokumen Laporan yang disusun setiap tahun	Orang	3	3	3	3	3
15	Skor SAKIP RSJ Sambang Lihum		0	0	80,03	80,24	
16	Pemenuhan Kebutuhan Media untuk Promosi Kesehatan RS	%	100	100	100	100	100
17	Jumlah Pemenuhan Kendaraan Operasional RS (%)	%	45	45	65	90	100

Sumber: RSJ Sambang Lihum Prov. Kalimantan Selatan 2021

2.3.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi pelaksanaan kegiatan pada bidang jalan, jembatan, irigasi, pengelolaan sumberdaya air, air minum, sanitasi, bangunan gedung, bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, pertanahan, dan jasa konstruksi.

A. Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

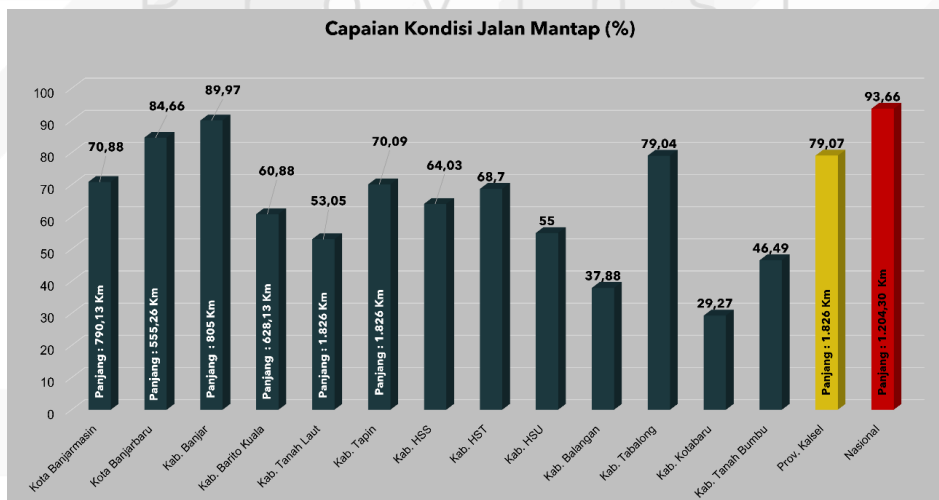
Konektivitas merupakan hal penting yang mendukung daya tahan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Konektivitas mencakup pada beberapa elemen yang salah satunya merupakan aksesibilitas. Ketersediaan infrastruktur konektivitas yang memadai memberikan implikasi dalam peningkatan mobilitas manusia dan barang, dimana aktivitas ini berpengaruh besar terhadap kelancaran pergerakan logistik. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung, pergerakan ini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, serta mempersempit ketimpangan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Penyediaan infrastruktur konektivitas pada sektor pekerjaan umum adalah penyelenggaraan jalan dan jembatan. Salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan tersebut adalah terkait proporsi kemantapan jalan yang memenuhi kualitas jalan baik dan sedang. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, yang dimaksud dengan jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Kategori jalan dalam kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka Roughness Indeks IRI, di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan satuan Internasional Roughness Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km).

Penyelenggaraan jalan dan jembatan di Provinsi Kalimantan Selatan mencakup kewenangan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248.KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1), jalan nasional di Kalimantan Selatan memiliki total sepanjang 1.204,3 Km dengan kondisi mantap sebesar 93,66% pada tahun 2020. Jalan nasional ini terdiri dari Jalan Lintas Selatan sepanjang 474,75 Km, Jalan Penghubung Lintas sepanjang 283,97 Km, dan Bukan Jalan Lintas sepanjang 445,57 Km.

Adapun panjang jalan provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/030/KUM/2018 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0321/KUM/2012 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 – 2032, dimana total jalan provinsi sepanjang 1.826 Km dengan kondisi mantap 79,07% pada Tahun 2020. Adapun capaian ini masih berada di bawah kondisi mantap jalan nasional.



Gambar II-33 Capaian Kondisi Jalan Mantap Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

Sumber Data :

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248.KPTS/M/2015
- Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/030/KUM/2018 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0321/KUM/2012 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 – 2032
- Perkada jaringan jalan kabupaten/kota

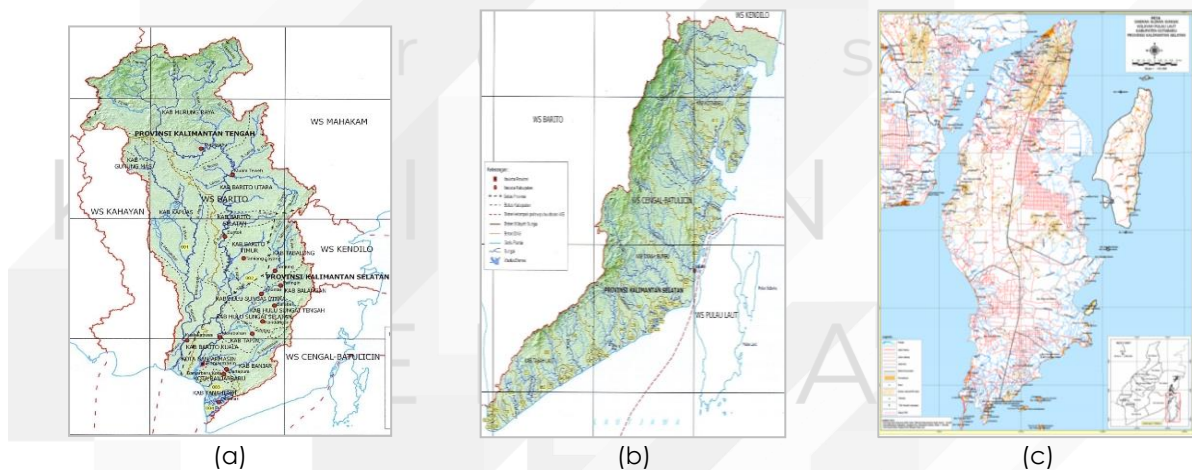
Jalan kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan masing masing ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dengan panjang total jalan kabupaten/kota adalah ±1.174,59 Km. Kondisi kemantapan jalan kabupaten/kota

tahun 2020 seperti pada Gambar II-33, menunjukkan bahwa masih terdapat 7 kabupaten dengan capaian kemantapan jalan di bawah target nasional.

B. Sumber Daya Air

Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2015, terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah sungai yaitu :

1. WS Barito, merupakan wilayah sungai kewenangan nasional yang dengan luas wilayah 80.370,98 Km², terdiri dari DAS Kapuas, DAS Barito, DAS Maluka, dan DAS Tabanio.
2. WS Cengal – Batulicin, merupakan wilayah sungai kewenangan provinsi dengan luas wilayah 14.546,47 Km², terdiri dari 62 Sub DAS dengan luas DAS terbesar adalah DAS Sampanahan.
3. WS Pulau Laut, merupakan wilayah sungai kewenangan kabupaten, dengan luas wilayah 2.023,76 Km², terdiri dari 71 Sub DAS.



Gambar II-34 Wilayah Sungai di Kalimantan Selatan, a) WS Barito, b) WS Cengal – Batulicin, c) WS Pulau Laut

Pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Selatan dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas menjadi salah satu hal penting untuk menjaga kondisi kestabilan pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk memberikan optimalisasi dalam pemenuhan infrastruktur dasar. Salah satu upaya pengelolaan adalah melalui pembangunan infrastruktur ketahanan kebencanaan yaitu pengelolaan pengendali daya rusak air sebagai salah satu upaya meminimalkan dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya bencana yang disebabkan oleh daya rusak air.

DAS Barito merupakan DAS terbesar di Kalimantan Selatan dengan luas sebesar 1.866.785 Ha atau 49,61% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. DAS ini terdiri dari 25 Sub DAS, dengan Sub DAS utama yaitu Sub DAS Barito Hilir Sub DAS Alalak Sub DAS Martapura Sub DAS Negara, Sub DAS Balangan Sub DAS Tabalong dan Sub DAS Batang Alai. Pada awal Tahun 2020, intensitas hujan yang tinggi sampai pada kategori ekstrim terjadi pada wilayah DAS Barito yang menyebabkan kenaikan genangan air dan kenaikan debit air sungai yang drastis, sehingga berdampak pada terjadinya banjir besar di 11 kabupaten/kota .

Pada DAS Cengal – Batulicin yang merupakan bagian dari WS kewenangan provinsi memiliki permasalahan dominan setiap tahunnya berupa kejadian banjir/genangan dengan ketinggian bervariasi pada wilayah hilir aliran sungai. Adapun pada tahun 2019 kondisi banjir terparah terjadi di daerah Kecamatan Kusan Hulu yang mengalami genangan seluas 10.097 Ha, seperti yang terlihat pada Tabel II-61.

Tabel II-61 Luasan Banjir/Genangan di DAS kewenangan Provinsi Tahun 2019

Nama DAS	Luas DAS (Ha)	Genangan	
		Luas (Ha)	Kecamatan
DAS Swarangan	375,32	31,23	Jorong
DAS Asam-asam	512,83	1.371,08	Jorong, Batu Ampar
DAS Kintap	670,16	8.189,81	Jorong, Kintap
DAS Cuka	17,59	693,60	Satui
DAS Sebamban	337,96	3.760,37	Sungai Loban, Kuranji, Satui, Angsana
DAS Kusan	1.735,52	21.951,25	Sungai Loban, Kuranji, Kusan Hilir, Kusan Hulu, Batulicin
DAS Batulicin	1.381,42	0,00	Mentewe, Batulicin, Simpang Empat, Karang Bintang
DAS Cantung	1.465,45	0,00	Kelumpang Hulu
DAS Sampanahan	1.791,97	0,00	Sungai Durian
DAS Cengal	1.177,74	0,00	Pamukan Utara, Pamukan Selatan
TOTAL	9.465,96	35.997,34	

Sumber: Kementerian PUPR, 2020

Adapun bentuk pengelolaan sumber daya air lainnya adalah terkait dengan pengelolaan irigasi dan daerah irigasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan

irigasi tambak. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Sedangkan, daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Jaringan irigasi dalam hal ini meliputi saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Adapun luas Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa (DI/DIR) di Provinsi Kalimantan Selatan sejumlah 995 DI/DIR dan luas total \pm 359.595 Ha, dengan persentase 18,53% merupakan kewenangan pusat, 15,85% kewenangan provinsi, dan 55,62% merupakan kewenangan kabupaten/kota.

Tabel II-62 Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI di Kalimantan Selatan Tahun 2019

Kewenangan	Luas Area (Ha)	Persentase	Jumlah DI/DR
Pusat	102.598	28,53%	23
Provinsi	57.003	15,85%	40
Kabupaten/Kota	199.989	55,62%	932
Total	359.595	100,00%	995

Sumber: Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015

Pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III melaksanakan kegiatan *One Map* irigasi untuk mengidentifikasi kembali luas pengelolaan DI/DIR di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun luas DI/DIR berdasarkan hasil *One Map* irigasi sebesar \pm 357.568 Ha. Adapun luas pembagian kewenangan DI/DIR disajikan pada Tabel II-63 berikut.

Tabel II-63 Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI/DIR di Kalimantan Selatan berdasarkan *One Map* Irigasi pada Tahun 2019

Kewenangan	Luas Area (Ha)	Persentase	Jumlah DI/DR
Pusat	106.039	29,65%	22
Provinsi	56.295	15,74%	24
Kabupaten/Kota	195.234	54,60%	633
Total	357.568	100,00%	679

Untuk melihat kinerja sistem irigasi masing-masing DI/DIR pada setiap kewenangan maka dilakukan penilaian kinerja jaringan irigasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan irigasi yang diterjemahkan kedalam Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI). Berdasarkan IKSI dapat disimpulkan bahwa kondisi irigasi di

Provinsi Kalimantan Selatan rata-rata masih berada di bawah 50% yang menunjukkan bahwa kinerja sistem irigasi masih di bawah potensi yang dimilikinya karena adanya kerusakan. Kerusakan irigasi ini antara lain disebabkan oleh usia infrastruktur irigasi, gangguan alam, maupun pengelolaan irigasi yang kurang optimal. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus karena akan berdampak pada produksi pangan di Kalimantan Selatan.

Tabel II-64 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Provinsi Kalimantan Selatan

Kewenangan	Utama	Tersier	Gabungan
Pusat	56,92	61,25	57,78
Provinsi	52,78	48,94	52,08

Sumber : ePAKSI, 2020

Sebagai upaya penyediaan sumber air baku di kabupaten/kota untuk menjaga keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan penyediaan air bersih, diperlukan alternatif-alternatif penyediaan air baku, antara lain melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air antara lain bendungan/bendung, embung, dan tampungan-tampungan air lainnya.

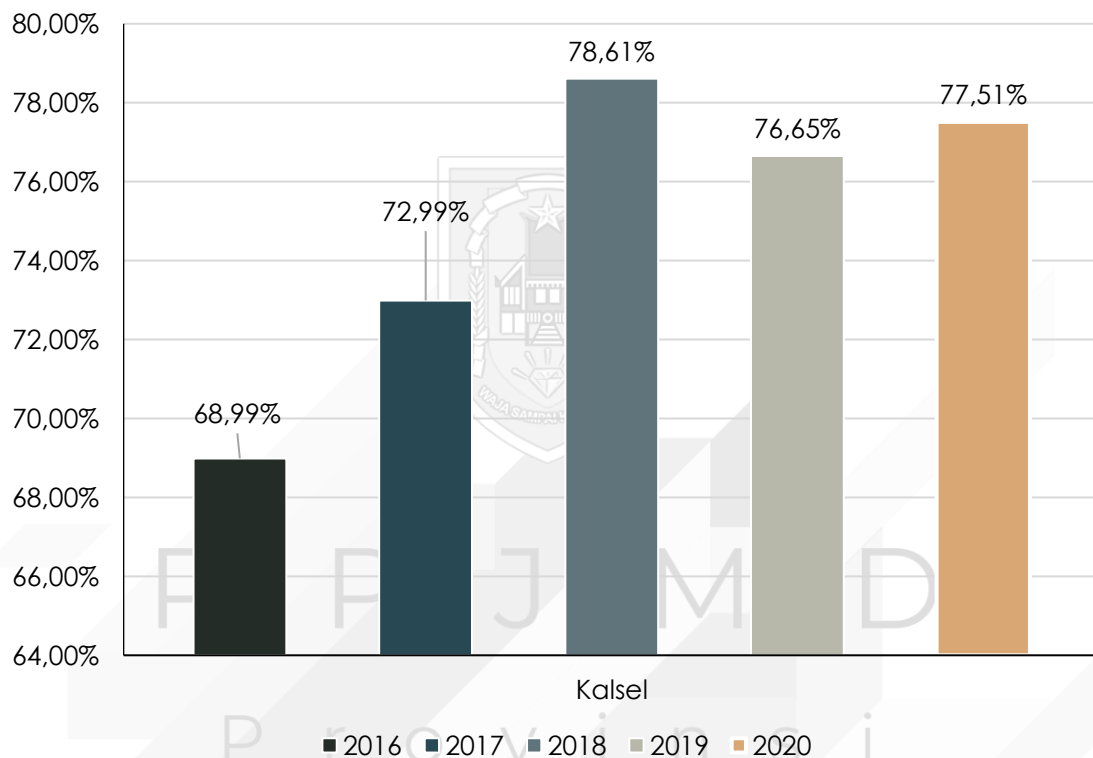
C. Air Minum, Sanitasi dan Persampahan

Penyediaan air minum, sanitasi, dan persampahan di Kalimantan Selatan mencakup pengelolaan pada skala provinsi dan skala kabupaten/kota. Adapun kondisi dan capaian pada masing-masing sektor ini adalah sebagai berikut:

- Pencapaian Akses Air Minum

Dalam rangka pencapaian *universal access* air minum, pemerintah pusat melalui RPJMN Tahun 2020 – 2024 telah menargetkan pencapaian air minum 100% pada Tahun 2024 untuk seluruh provinsi di Indonesia.

CAPAIAN AIR MINUM KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016 – 2020 (%)



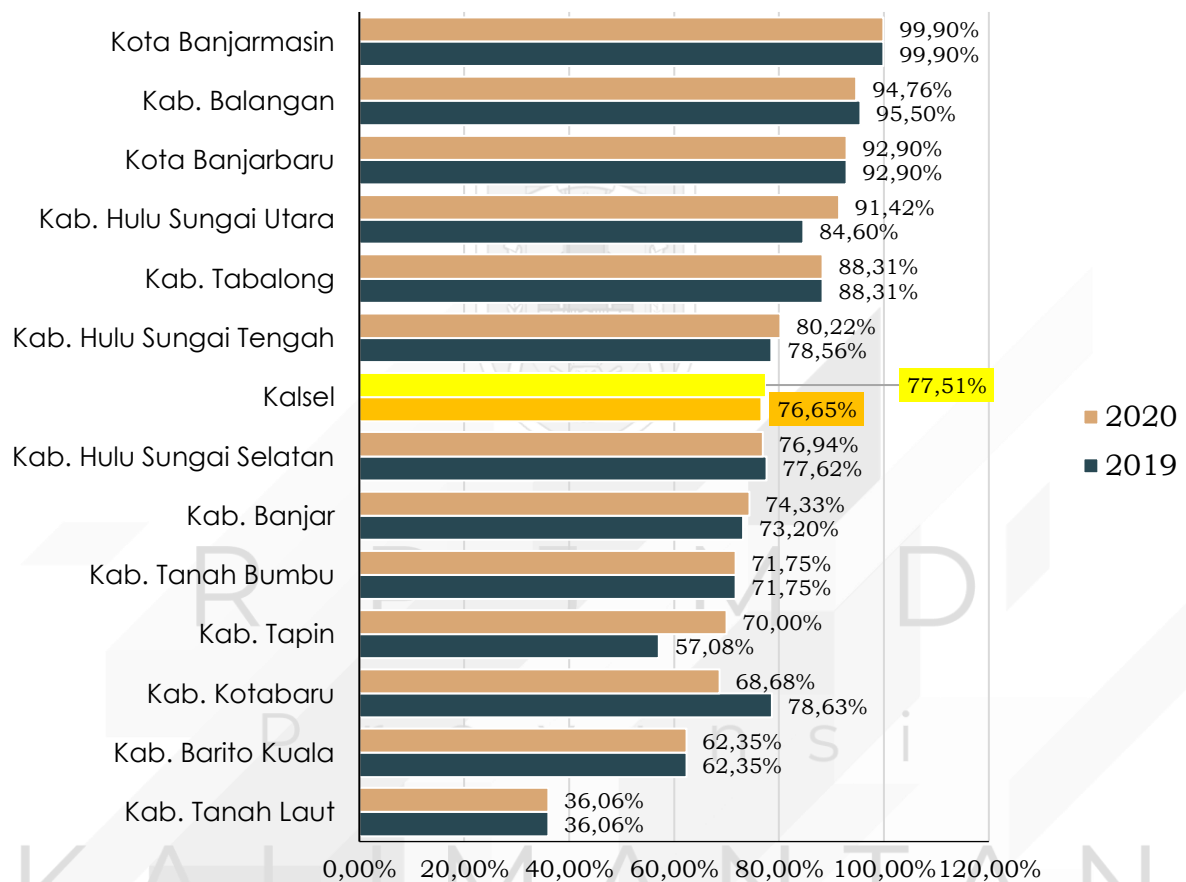
Gambar II-35 Capaian Air Minum Kalimantan Selatan 2016 – 2020

Sumber Data: Pamsimas dan Satu Wasaka Award, 2020

Berdasarkan Gambar II-35, capaian akses air minum Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 sebesar 76,65% dan tahun 2020 sebesar 77,51%, dimana capaian ini masih berada di bawah capaian nasional. Dari grafik dapat dilihat bahwa trend pencapaian akses air minum di Kalimantan Selatan menunjukkan perbaikan setiap tahunnya, meskipun trend tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019.

Adapun capaian air minum kabupaten/kota pada tahun 2020 seperti disajikan pada Gambar II-36. Kota Banjarmasin sudah hampir mencapai 99,9% untuk akses air minum, diikuti Kabupaten Balangan dan Kota Banjarbaru. Namun, masih ada 7 kabupaten yang capaiannya berada di bawah rata-rata provinsi yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Banjar, Tanah Bumbu, Tapin, Kotabaru, Barito Kuala, dan Tanah Laut.

CAPAIAN AIR MINUM KAB/KOTA SE-KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019 dan 2020 (%)



Gambar II-36 Capaian Air Minum Kab/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2019-2020

Sumber Data : Pamsimas dan Satu Wasaka Award, 2020

Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengelola SPAM skala Regional pada kawasan metropolitan Banjarbakula. Dalam pelaksanaannya SPAM Banjarbakula telah membangun infrastruktur untuk kebutuhan air curah skala regional. Adapun infrastruktur yang terbangun sampai dengan saat ini dapat dilihat pada Tabel II-65 berikut.

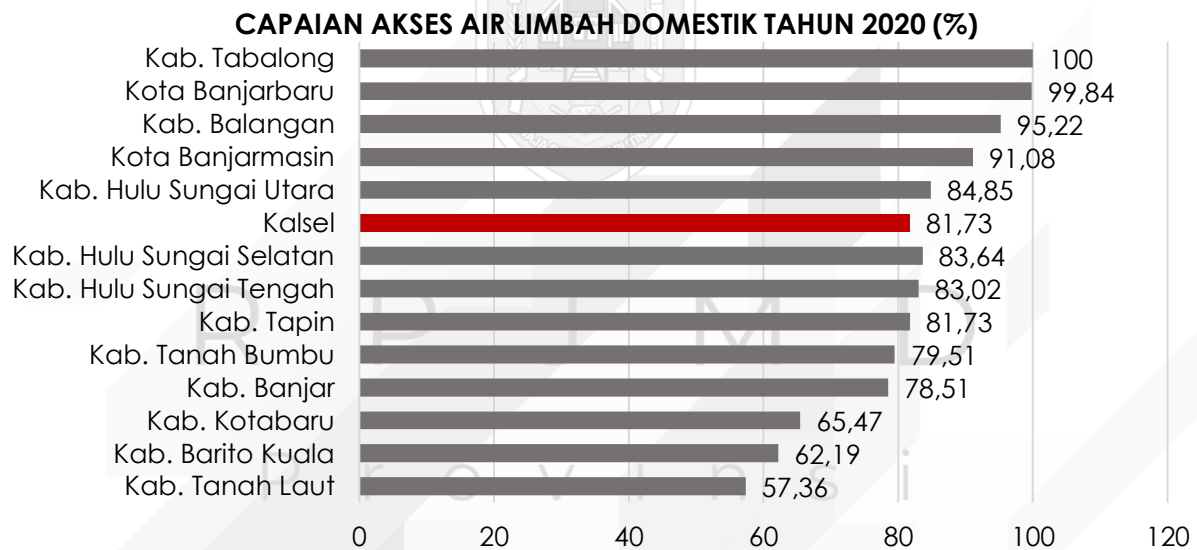
Tabel II-65 Infrastruktur Penyediaan Air Minum di Provinsi Kalimantan Selatan

No	INFRASTRUKTUR	KAPASITAS
1	Intake Bendung Mandi Kapau	<ul style="list-style-type: none"> • 1200 L/detik
2	Pipa Transmisi	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang 16,4 Km • Pipa Jenis HDPE Diameter 1206 mm
3	IPA II Pinus	<ul style="list-style-type: none"> • Tahap I : 250 L/detik • Tahap II : 500 L/detik
4	Reservoir di IPA II Pinus	<ul style="list-style-type: none"> • 2000 m³

Sumber: Balai SPAM Banjarbakula, 2021

▪ Pencapaian Akses Sanitasi

Ruang lingkup sanitasi pada sektor pekerjaan umum meliputi pengelolaan limbah rumah tangga, sistem jaringan pengelolaan IPAL komunal, dan seterusnya. Pada sisi lingkungan, sanitasi juga terkait dengan persampahan mulai dari rumah tangga hingga TPST, dan lain-lain.



Gambar II-37 Capaian Air Minum Kab/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2019-2020

Sumber Data : Pamsimas dan Satu Wasaka Award, 2020

Berdasarkan Gambar II-37, capaian akses air limbah domestik Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 sebesar 81,73% dimana target , dimana capaian ini masih berada di bawah capaian nasional. Dari grafik dapat dilihat bahwa trend pencapaian akses air minum di Kalimantan Selatan menunjukkan perbaikan setiap tahunnya, meskipun trend tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019.

Adapun capaian air minum kabupaten/kota pada tahun 2020 seperti disajikan pada Gambar II-37. Kota Banjarmasin sudah hampir mencapai 99,9% untuk akses air minum, diikuti Kabupaten Balangan dan Kota Banjarbaru. Namun, masih ada 7 kabupaten yang capaiannya berada di bawah rata-rata provinsi yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Banjar, Tanah Bumbu, Tapin, Kotabaru, Barito Kuala, dan Tanah Laut.

Khusus pada pencapaian cakupan air limbah domestic yang aman Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2021 sudah mendekati pencapaian target

dari Nasional pada tahun 2024 sebesar 13%. Adapun kondisi pencapaian Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel II-66 Kondisi Pencapaian Cakupan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

NO	KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE AKSES AMAN 2020 (%)
1	Banjarmasin	22,23
2	Banjar	6,13
3	Banjarbaru	6,41
4	Barito Kuala	2,4
5	Tanah Laut	1,23
6	Kotabaru	59,23
7	Balangan	1,23
8	Hulu Sungai Selatan	6,01
9	Hulu Sungai Utara	9,5
10	Hulu Sungai Tengah	8,92
11	Tapin	6,34
12	Tanah Bumbu	1,23
13	Tabalong	1,23
JUMLAH		10,16

Sumber: Data Capaian Akses Air Minum dan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

▪ **Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan**

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat. Sistem pengelolaan sampah yang dominan masih tradisional, antara lain adanya praktek pembuangan sampah secara sembarangan. Sehingga untuk melakukan pengelolaannya perlu didukung dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai, seperti penyediaan TPA, TPS, TPST, atau TPS3R.

Tabel II-67 Realisasi Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	PENGELOLAAN		TIDAK TERKELOLA
		TARGET	REALISASI	
1	Banjarmasin	97%	130%	0%
2	Banjarbaru	97%	98,96%	0,00%
3	Banjar	97%	97,44%	0,00%
4	Hulu Sungai Utara	97%	95,53%	1,47%
5	Tanah Bumbu	97%	97,46%	2,54%
6	Tabalong	97%	85,28%	14,72%
7	Hulu Sungai Tengah	97%	78,87%	18,13%
8	Balangan	97%	75,74%	24,26%



NO	KABUPATEN/KOTA	PENGELOLAAN		TIDAK TERKELOLA
		TARGET	REALISASI	
9	Barito Kuala	97%	73,35%	26,65%
10	Tapin	97%	70,35%	26,65%
11	Hulu Sungai Selatan	97%	69,46%	27,54%
12	Tanah Laut	97%	70,59%	29,41%
13	Kotabaru	97%	42,68%	57,32%
	Prov. Kalimantan Selatan	97%	80,18%	16,82%

Sumber : Pokja AMPL, 2020

Salah satu infrastruktur yang telah dibangun untuk mendukung akses persampahan adalah melalui pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula yang merupakan pelayanan persampahan dengan sistem Sanitary Landfill yang melayani 2 Kota dan 3 Kabupaten yang tercakup di dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Metropolitan Banjarbakula. TPA Regional Banjarbakula memiliki total luas area 32 Ha dan telah dikembangkan seluas 11 Ha. Kapasitas yang mampu ditampung oleh TPA ini sebesar 275 ton/hari. Untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan persampahan terutama pada kawasan perkotaan Banjarbakula, direncanakan pembangunan incinerator.

D. Penataan Bangunan dan Lingkungan

Penataan bangunan dan lingkungan adalah serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan, baik di perkotaan maupun di perkampungan, khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya. Data tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Jumlah bangunan gedung baik pemerintahan maupun yang non pemerintahan yang telah terbangun sampai saat ini berjumlah 32 bangunan.

Dan untuk memertahankan bangunan gedung termasuk sarana prasaranya dalam kondisi baik Dinas PUPR telah melaksanakan pemeliharaan , rehabilitasi serta peningkatan sebanyak 67 bangunan.

Tabel II-68 Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2018 sampai 2021

	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Pembangunan Baru	11	11	7	3
Rehabilitasi	9	18	6	34
Perencanaan	6	8	11	53

Sumber : Dinas PUPR, 2021

E. Penataan Ruang

Sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kondisi ruang tersebut dapat dipenuhi melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar di dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia di wilayahnya dengan tetap memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk di dalamnya mengenai penataan ruang. Wewenang pemerintah daerah dalam hal penataan ruang adalah menyelenggarakan penataan ruang daerahnya yang didalamnya terdapat unsur perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 telah dilegalisasi dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 tanggal 25 September 2015. Pemerintah provinsi juga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota di wilayahnya, Pada Tahun 2020, RTRWP Kalimantan Selatan memasuki masa revisi dan pada Tahun 2021 masih dalam proses revisi, karena harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang mengacu sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya.

Pada Tahun 2020, RTRWP Kalimantan Selatan memasuki masa revisi dan pada Tahun 2021 masih dalam proses revisi, karena harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang mengacu sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya.

Tabel II-69 Status RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan

No.	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Perda	Status
1.	Provinsi Kalimantan Selatan	Perda Nomor 9 Tahun 2015	Persiapan
2.	Kota Banjarmasin	Perda Nomor 15 Tahun 2013	Proses Revisi
3.	Kota Banjarbaru	Perda Nomor 13 Tahun 2014	Proses Revisi
4.	Kabupaten Banjar	Perda Nomor 4 Tahun 2021	Perda
5.	Kabupaten Barito Kuala	Perda Nomor 6 Tahun 2012	Persiapan
6.	Kabupaten Tanah Laut	Perda Nomor 3 Tahun 2016	Perda
7.	Kabupaten Tanah Bumbu	Perda Nomor 5 Tahun 2017	Perda
8.	Kabupaten Kotabaru	Perda Nomor 11 Tahun 2011	Proses Revisi
9.	Kabupaten Tabalong	Perda Nomor 19 Tahun 2014	Proses Rekomendasi Gubernur
10.	Kabupaten Balangan	Perda Nomor 24 Tahun 2013	Persiapan

No.	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Perda	Status
11.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Perda Nomor 12 Tahun 2012	Proses Revisi
12.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Perda Nomor 13 Tahun 2016	Perda
13.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Perda Nomor 3 Tahun 2014	Persiapan
14.	Kabupaten Tapin	Perda Nomor 10 Tahun 2014	Proses Revisi

Sumber : Dinas PUPR, 2021

Di samping penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah baik RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten/Kota, pada skala nasional juga telah dilaksanakan proses penyusunan Peraturan Presiden terkait Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Perkotaan Metropolitan Banjarmasin (Banjar Bakula) yang merupakan proyek prioritas strategis (major project) pada RPJMN Tahun 2020 – 2024. Pada skala lebih detail juga telah dilaksanakan proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penerbitan izin pemanfaatan ruang yang lebih rinci, serta acuan dalam penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL). Penyusunan RTR dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN, sedangkan penyusunan RDTR terutama yang bernilai strategis nasional dilaksanakan oleh kabupaten/kota dengan pendampingan atau pemberian bantuan teknis dari pemerintah pusat.

Adapun progress penyusunan RTR dan RDTR kawasan bernilai strategis nasional di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-70 Status RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan

No.	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Perda	Status
1.	Provinsi Kalimantan Selatan	Perda Nomor 9 Tahun 2015	Persiapan
2.	Kota Banjarmasin	Perda Nomor 15 Tahun 2013	Proses Revisi
3.	Kota Banjarbaru	Perda Nomor 13 Tahun 2014	Proses Revisi
4.	Kabupaten Banjar	Perda Nomor 4 Tahun 2021	Perda
5.	Kabupaten Barito Kuala	Perda Nomor 6 Tahun 2012	Persiapan
6.	Kabupaten Tanah Laut	Perda Nomor 3 Tahun 2016	Perda
7.	Kabupaten Tanah Bumbu	Perda Nomor 5 Tahun 2017	Perda
8.	Kabupaten Kotabaru	Perda Nomor 11 Tahun 2011	Proses Revisi
9.	Kabupaten Tabalong	Perda Nomor 19 Tahun 2014	Proses Rekomendasi Gubernur
10.	Kabupaten Balangan	Perda Nomor 24 Tahun 2013	Persiapan
11.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Perda Nomor 12 Tahun 2012	Proses Revisi
12.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Perda Nomor 13 Tahun 2016	Perda
13.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Perda Nomor 3 Tahun 2014	Persiapan
14.	Kabupaten Tapin	Perda Nomor 10 Tahun 2014	Proses Revisi

Sumber : Berbagai Sumber, 2021

F. Bina Konstruksi

Tantangan dunia jasa konstruksi adalah mewujudkan infrastruktur yang handal dan berkualitas, sehingga diperlukan pengaturan, pemberdayaan serta pengawasan yang ketat dalam pelaku jasa konstruksi.

Pembinaan Jasa konstruksi memiliki peran strategis dalam pelaksanaan infrastruktur untuk meningkatkan mutu, standar dan fungsi serta meningkatkan Daya saing Tenaga Kerja Konstruksi terutama di Kalimantan Selatan.

Jumlah rata-rata paket pekerjaan konstruksi di pemerintahan se Kalimantan selatan 5.767 paket kegiatan, bila diasumsikan 1 pekerjaan konstruksi memerlukan 3 orang tenaga dengan lama pekerjaan 6 bulan maka diasumsikan dibutuhkan tenaga ahli sebanyak 8.651 orang, berdasarkan data LPJK (tahun 2020) Jumlah tenaga Ahli 1.158 Orang baik madya maupun muda yang terbagi dalam berbagai bidang keahlian, sedangkan tenaga terampil sebanyak 8.133 orang. Data terakhir yang terhimpun jumlah tenaga ahli jasa konstruksi di Kalimantan selatan sebanyak 879 orang pada tahun 2021.

2.3.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Tabel II-71 Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Kewenangan Penanganan

NO.	KABUPATEN/KOTA	LUASAN KUMUH (HA)			SUMBER DATA
		Kewenangan Kab./Kota (< 10 Ha)	Kewenangan Provinsi (10 - 15 Ha)	Kewenangan Pusat (> 15 Ha)	
1	Barito Kuala	23,8	186,64	19,21	SK Kumuh Tahun 2017
2	Banjarmasin	153,42	73,55	322,73	SK Kumuh Tahun 2015
3	Banjarbaru	26,7	59,01	147,01	SK Kumuh Tahun 2018
4	Banjar	115,76	60,08	430,6	SK Kumuh Tahun 2013
5	Tapin	14,62	12	-	SK Kumuh Tahun 2016
6	Hulu Sungai Selatan	7,266	54	31,72	SK Kumuh Tahun 2014
7	Hulu Sungai Tengah	13,72	47,82	20,91	SK Kumuh Tahun 2018
8	Hulu Sungai Utara	27,33	55,53	40,59	SK Kumuh Tahun 2017
9	Balangan	8,71	27,11	-	SK Kumuh Tahun 2014
10	Tabalong	120,63	129,4	49,041	SK Kumuh Tahun 2018
11	Tanah Laut	64,73	141,2	-	SK Kumuh Tahun 2018

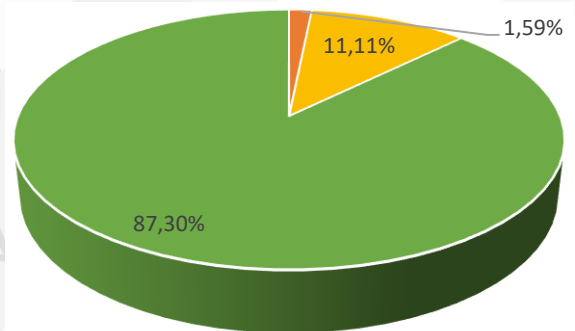
NO.	KABUPATEN/KOTA	LUASAN KUMUH (HA)			SUMBER DATA
		Kewenangan Kab./Kota (< 10 Ha)	Kewenangan Provinsi (10 - 15 Ha)	Kewenangan Pusat (> 15 Ha)	
12	Tanah Bumbu	34,11	68,88	119,05	SK Kumuh Tahun 2014
13	Kotabaru	18,49	48,99	-	SK Kumuh Tahun 2018
JUMLAH TOTAL : 2.774,36		629,29	964,21	1.180,86	

Sumber Data : SK Kumuh Kab./Kota dan Dinas PRKP Prov. Kalimantan Selatan

Dalam pelaksanaannya dilakukan review terhadap kondisi kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi seluas 10-15 Ha. Terjadi pengurangan luasan kumuh sampai dengan tahun 2021 sebagai baseline dalam pelaksanaan tahun – tahun berikutnya. Adapun data Kawasan kumuh kewenangan Provinsi sebagai berikut :

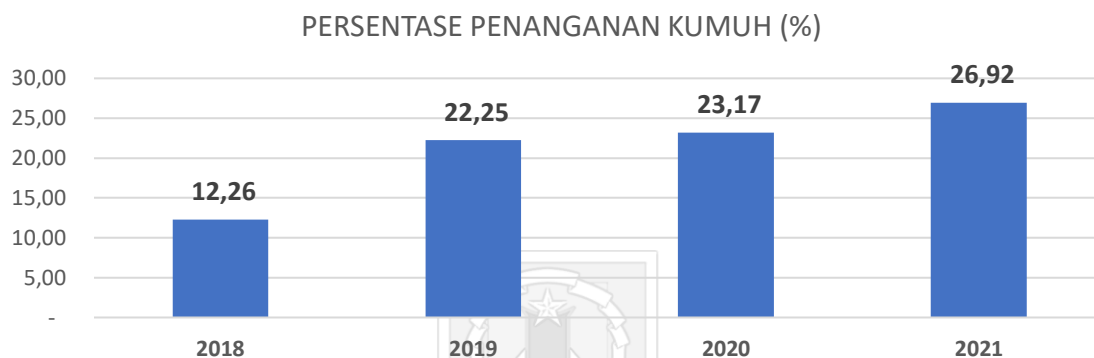
Tabel II-72 Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH LOKASI	LUAS TOTAL
1	Banjarbaru	3	35,44
2	Banjarmasin	3	41,46
3	Barito Kuala	5	60,77
4	Tanah Laut	3	33,93
5	Banjar	7	92,67
6	Tapin	2	23,11
7	Hulu Sungai Selatan	5	64,50
8	Hulu Sungai Tengah	7	80,28
9	Hulu Sungai Utara	5	66,11
10	Balangan	1	14,85
11	Tabalong	12	148,69
12	Tanah Bumbu	7	94,16
13	Kotabaru	3	35,54
		63	791,51



Dari total luasan kumuh tersebut Sebagian besar memiliki tingkat kekumuhan ringan sebanyak 55 lokasi. Selebihnya merupakan tingkat kumuh sedang sebanyak 7 lokasi dan tinggi satu lokasi.

Secara keseluruhan total penanganan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah untuk tahun 2021 yakni 3,75% Hal itu disebabkan masih minimnya penanganan pengurangan kumuh di tiap-tiap kab/kota, Data kawasan kumuh tersaji pada Gambar II-38.



Gambar II-38 Persentase Penganganan Kumuh Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018-2021

Rumah tidak layak huni atau yang biasa disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni. Biasanya, RTLH memiliki konstruksi bangunannya tidak handal, luasnya tidak sesuai standar hunian per orang, serta tidak menyehatkan dan/atau membahayakan bagi penghuninya. Dari data TNP2K sebagai acuan dalam penangan Rumah Tidak layak Huni (RTLH) Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2020 telah menangani sebanyak 32.102 unit dari total RTLH yang terdata sebanyak 76.023 unit. Data tersaji sebagai berikut :

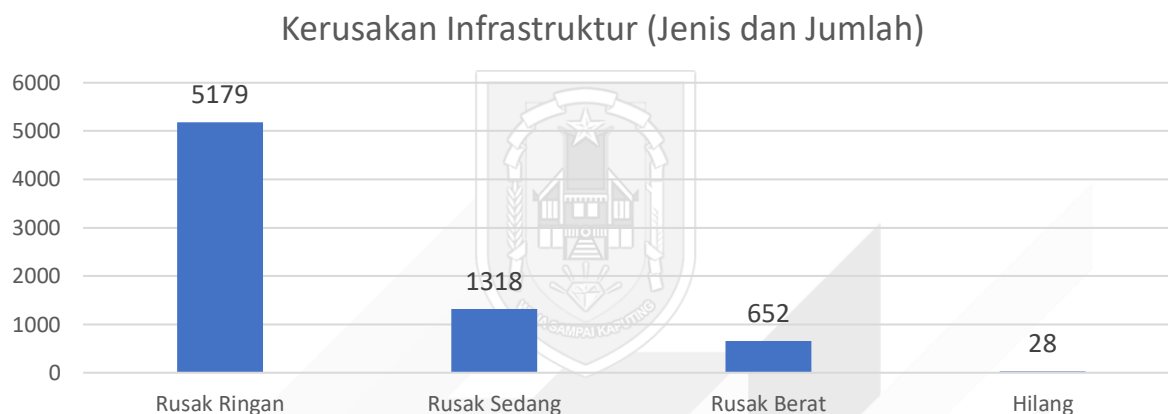
Tabel II-73 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Data base	Total Penanganan 2015-2020	Sisa Penanganan
1	Barito Kuala	12.035	3.207	8.828
2	Banjarmasin	6.352	1.675	4.677
3	Banjarbaru	1.212	701	511
4	Banjar	7.861	4.089	3.772
5	Tapin	1.725	1.131	594
6	Hulu Sungai Selatan	12.816	5.918	6.898
7	Hulu Sungai Tengah	9.523	5.391	4.132
8	Hulu Sungai Utara	3.621	979	2.642
9	Balangan	6.099	2.497	3.602
10	Tabalong	3.770	1.869	1.901
11	Tanah Laut	2.406	1.953	453
12	Tanah Bumbu	4.385	983	3.402
13	Kotabaru	4.218	1.709	2.509
	Kalsel	76.023	32.102	43.921

Sumber Data : Dinas PRKP Prov. Kalimantan Selatan

Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) terkait urusan perumahan menangani perumahan terdampak bencana atau relokasi akibat program Pemerintah. Provinsi Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021 mengalami bencana

banjir skala Provinsi yaitu bencana banjir yang mengakibatkan perumahan mengalami kerusakan. Data yang terekam terkait SPM adalah sebesar 7.177 unit rumah. Adapun pembagian kerusakan tersaji dalam Gambar II-39 berikut:



Gambar II-39 Kerusakan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber Data : Dinas PRKP Prov. Kalimantan Selatan

Penanganan kerusakan perumahan terdampak banjir dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber pendanaan.

Selain penanganan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh juga dilaksanakan penangan Prasaran Sarana Umum di Kawasan permukiman diluar Kawasan kumuh. Sampai dengan tahun 2021 telah dilaksanakan penanganan PSU yang rata-rata adalah penangan jalan lingkungan. Data pelaksanaan sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel II-74 berikut :

Tabel II-74 Penangan PSU di Kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Selatan

No	KABUPATEN/KOTA	JENIS KOMPONEN	SATUAN (Meter)	JUMLAH PERMUKIMAN YANG DITANGANI (Unit)
1	Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota Tahun 2018 s.d. 2019	Jalan	15.221,5	3.050
2	Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota Tahun 2020	Jalan dan PSU	2.053,4	433
3	Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota Tahun 2021	Jalan	3.908,52	867
TOTAL			21.183,42	4.350

Sumber: Disperkim Prov. Kalimantan Selatan 2021

2.3.1.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan dan tertib masyarakat, telah menunjukkan kemajuan, meskipun masih mengandung berbagai kelemahan. Berbagai permasalahan keamanan dan tertib yang dihadapi saat ini sudah dapat diatasi secara cepat dan tepat oleh pemerintah, seperti yang terlihat pada Tabel II-75.

Tabel II-75 Kondisi Keamanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2019

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah tindak pidana	8.009	3,58	7.632	7.491	7.336	8.036	7.021
Jumlah tindak pidana yang diselesaikan	5.441	2.463	6.131	6.139	6.011	6.350	5.250
Persentase tindak pidana diselesaikan	67,94	68,80	80,33	81,95	81,94	1.686	1.771
Jumlah resiko terkena tindak pidana	192	223	195	191	179	251	301
Selang waktu terjadi tindak pidana	1 Jam 5'24"	7 jam 10'12"	1 jam 8'24"	1 jam 10'12"	-	-	-

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalimantan Selatan 2020

Tabel II-76 Capaian Kinerja Urusan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100	100	100
2	Menurunnya ancaman kriminal di prov. Kalimantan Selatan	%	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya peran Satlinmas dan Damkar	%	100	100	100	100	100
4	Prosentase Peningkatan jumlah desa/kelurahan rawan bencana yang memperoleh	%	0	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalimantan Selatan 2021

Tabel II-77 Perkembangan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Kelas Risiko
1	Tanah Laut	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	Tinggi
2	Banjar	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	Tinggi
3	Kotabaru	205,20	158,79	158,79	158,79	158,79	158,79	Tinggi
4	Tanah Bumbu	155,60	155,60	155,60	155,60	155,60	155,60	Tinggi
5	Barito Kuala	190,00	179,68	179,68	155,45	155,45	155,45	Tinggi
6	Hulu Sungai Selatan	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	Tinggi
7	Tabalong	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	Tinggi

No	Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Kelas Risiko
8	Tapin	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	Sedang
9	Hulu Sungai Tengah	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	Sedang
10	Balangan	147,20	147,20	147,20	147,20	147,20	139,89	Sedang
11	Hulu Sungai Utara	128,40	128,40	128,40	128,40	128,40	128,40	Sedang
12	Banjarbaru	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	Sedang
13	Banjarmasin	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	Sedang
	Kalimantan Selatan	151,60	147,31	147,31	145,37	145,37	144,81	Tinggi

Sumber: BNPB (publish buku IRBI)

Tabel II-78 Capaian Kinerja Urusan BPBD Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah kejadian bencana	%	0	0	82,61	82,61	100
2	Prosentase Peningkatan jumlah desa/kelurahan rawan bencana yang memperoleh informasi peringatan dinibencana	%	100	100	100	100	97,78
3	Persentase rencana Pemulihan Pasca Bencana yang berhasil direalisasikan	%	0	100	98,04	95	96,30
4	Prosentase peningkatan informasi kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap bencana kebakaran	%	100	0	0	0	0

Sumber: BPBD Prov. Kalimantan Selatan 2021

2.3.1.1.6 Sosial

Pembangunan pelayanan kesejahteraan sosial di Kalimantan Selatan telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kondisi ini dapat dilihat pada berbagai program yang dikembangkan seperti peningkatan kapasitas pelayanan sosial dalam panti maupun di luar panti, pengembangan program Pembangunan Keluarga Harapan, pengembangan keberdayaan kesejahteraan sosial dan penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Perkembangan penyelesaian permasalahan sosial di masyarakat baik itu terkait anak/orang tua terlantar hingga tunawisma dapat dilihat dari perkembangan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terlihat pada Tabel II-80 di mana terjadi peningkatan jumlah korban penyalahgunaan NAPZA, jumlah penderita HIV/AIDS, korban tindak kekerasan, korban bencana alam, fakir miskin dan jumlah keluarga bermasalah psikologis.

Tabel II-79 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2016-2020

Bentuk Partisipasi Masyarakat	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Anak Balita Terlantar	1.071	1.071	749	749	471
Anak Terlantar	9.039	9.039	6.882	6.882	8.822
Anak yang berhadapan dengan hukum	325	325	138	138	135
Anak Jalanan	134	134	121	121	163
Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	838	838	1.568	1.568	1.533
Anak yang menjadi Korban tindak kekerasan	57	57	22	22	30
Anak yang memerlukan perlindungan khusus	20	20	47	47	32
Lanjut Usia Terlantar	29.048	29.048	25.731	25.731	67.740
Penyandang Disabilitas	14.986	14.986	15.678	15.678	14.097
Tuna Susila	654	654	162	162	68
Gelandangan	169	169	87	87	145
Pengemis	439	439	170	170	159
Pemulung	510	510	126	126	667
Kelompok Minoritas	12	12	22	22	30
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan	1.408	1.408	1.094	1.094	731
Orang dengan HIV/AIDS	13	13	816	816	378
Korban Penyalahgunaan NAPZA	936	936	891	891	578
Korban Trafficking	1	1	-	-	-
Korban Tindak Kekerasan	133	133	97	97	38
Pekerjaan Migran Bermasalah Sosial	4	4	-	-	-
Korban Bencana Alam	19.119	19.119	17.123	17.123	23.187
Korban Bencana Sosial	1.383	1.383	122	122	949
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	16.296	16.296	23.187	23.187	12.971
Fakir Miskin	84.787	84.787	84.765	84.765	418.734
Keluarga bermasalah Sosial Psikologis	7.832	7.832	1.143	1.143	187
Komunitas Adat Terpencil	5.409	5.409	659	659	8.546
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan	990	66.581	5.403	56.757	124.902
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	58.105	114.890	105.566	95.816	92.509
Jumlah	253.718	376.094	292.369	333.973	777.802

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan 2021

Jika melihat tabel diatas. terjadi peningkatan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Pada tahun 2016. terdapat sebanyak 194.623 jiwa meningkat menjadi 295.000 jiwa pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di mana sebagian besar permasalahan merupakan permasalahan keluarga fakir miskin sebanyak 188.954 jiwa dan diikuti oleh permasalahan penduduk lanjut usia yang terlantar sebanyak 29.001 jiwa dan korban bencana alam sebanyak 25.507 jiwa.

Tabel II-80 Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Fakir Miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	4,25	35,79	30,39	29,40	6,36
2	Persentase Keluarga KAT yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial	%	2,49	4,12	6,23	1,99	0,00
3	Cakupan Program PKH	%	1,29	1,46	1,63	17,46	8,03
4	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial	%	0	33,75	73,12	102,88	744,88
5	Persentase jumlah PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial	%	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
6	Persentase jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan berfungsi sosial melalui LKS	%	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
7	Indeks Kepuasan pelayanan Panti Sosial	Indeks	80,11	80,08	81,78	81,63	83,66
8	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial	%	15,31	9,06	10,60	11,17	3,99
9	Jumlah Klien Lanjut Usia Terlantar yang ditangani	Orang	170	23935	300	300	240
10	Jumlah Anak Terlantar yang ditangani	Orang	20	30	30	40	50
11	Persentase penyandang Cacat yang dibina	%	1,19	2,19	2,19	0,89	1,70
12	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang ditangani	%	3,28	2,25	2,25	2,89	0,00

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan 2021

Tabel II-81 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

No.	PPKS	KABUPATEN/KOTA													
		TALA	KTB	BANJAR	BATOLA	TAPIN	HSS	HST	HSU	TBLG	TANBU	BLGN	BJM	BJB	KALSEL
1	Anak Balita Terlantar	0	-	34	63	0	32	0	33	311	2	0	0	16	491
2	Anak Terlantar	116	194	494	102	16	914	741	113	1,452	40	177	21	39	4,419
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	35	29	4	2	16	11	2	2	0	12	14	0	1	128
4	Anak Jalanan	0	-	13	0	0	0	0	4	0	-	0	143	3	163
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	194	71	288	101	0	191	65	220	60	191	0	344	98	1,823
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	14	-	5	13	0	8	0	2	0	26	0	0	2	70
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	0	-	3,145	0	0	4	4	16	0	2	0	0	-	3,171
8	Lanjut Usia Terlantar	1,333	1,407	1,397	1,654	2,609	5,656	5,346	1,191	423	201	3,325	19,453	289	44,284
9	Penyandang Disabilitas	1,488	366	-	64	1,172	726	1,512	823	587	833	951	2,475	395	11,392
10	Tuna Susila	0	-	70	0	0	1	0	1	0	13	0	0	3	88
11	Gelandangan	0	4	8	0	0	0	0	9	72	-	0	0	-	93
12	Pengemis	0	1	23	0	0	18	13	26	72	7	0	76	5	241
13	Pemulung	0	2	0	3	0	0	0	17	0	-	0	579	36	637
14	Kelompok Minoritas	0	-	74	0	19	0	0	27	0	-	0	0	3	123
15	Bekas Warga binaan Lembaga	348	-	0	18	0	33	161	77	0	-	0	0	30	667



No.	PPKS	KABUPATEN/KOTA													
		TALA	KTB	BANJAR	BATOLA	TAPIN	HSS	HST	HSU	TBLG	TANBU	BLGN	BJM	BJB	KALSEL
	Pemasyarakatan (BWLK)														
16	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	-	32	0	0	0	0	0	0	-	0	228	-	260
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	0	-	0	0	0	196	20	66	0	1	0	30	30	343
18	Korban Trafficking	0	-	6	0	0	0	0	0	0	-	0	0	1	7
19	Korban Tindak Kekerasan	0	-	0	0	0	7	72	0	0	-	0	0	1	80
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0	-	74	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	74
21	Korban Bencana Alam	31,380	160	307,107	54,036	17,062	4,951	115,896	26,411	14,539	33,352	30,604	145,771	8,338	789,607
22	Korban Bencana Sosial	35	498	2,812	168	76	0	95	20	0	112	50	1,723	3	5,592
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	940	167	14,613	40	15	2,194	135	2,040	784	3	1,079	11,052	520	33,582
24	Fakir Miskin (FM)	3,135	22,865	578	8,600	13,786	7,438	14,026	27,908	19,225	50,561	36,841	145,150	8,953	359,066
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0	-	2,777	15	10	1	17	97	0	-	0	0	11	2,928
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0	482	336	0	0	0	620	0	0	207	6,549	0	-	8,194
JUMLAH		39,016	26,246	333,890	64,879	34,781	22,381	138,725	59,103	37,525	85,563	79,590	327,045	18,777	1,267,523

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan 2021

T a h u n
2 0 2 1 - 2 0 2 6

Tabel II-82 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

No.	Kab/Kota	Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)																			
		Pekerja Sosial Profesional	Klasifikasi PSM			Jumlah	Tagana	LKS	Klasifikasi Karang Taruna				Jumlah	LK3	Keluarga Pioner	WKSBM	WPKS	Penyuluh Sosial	TKSK	Dunia Usaha	Jumlah
			Pratama	Madya	Utama				Tumbuh	Berkembang	Maju	Percontohan									
1	Kota Bjm	3	0	0	0	138	143	67	0	0	0	0	82	1	0	0	0	21	5	201	661
2	Kota Bjb	0	0	0	0	83	60	95	0	0	0	0	44	8	4	126	7	9	20	105	561
3	Kab. Banjar	1	0	0	0	36	119	8	0	0	0	0	18	1	0	0	8	0	20	0	211
4	Kab. Tapin	1	0	0	0	33	40	7	0	0	0	0	40	1	0	5	2	12	12	6	159
5	Kab. HSS	1	0	0	0	124	76	17	0	0	0	0	122	1	0	12	4	9	11	4	381
6	Kab. HST	0	0	0	0	47	50	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0	11	0	277
7	Kab. HSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kab. Tblg	0	0	0	0	123	40	11	0	0	0	0	12	1	0	0	0	0	12	0	199
9	Kab. Batola	0	0	0	0	70	36	4	0	0	0	0	143	3	5	1	0	30	17	54	363
10	Kab. Tala	40	0	0	0	57	22	3	0	0	0	0	135	0	0	0	1	7	11	1	277
11	Kab. Ktb	3	0	0	0	22	0	4	0	0	0	0	45	1	0	0	0	0	22	0	97
12	Kab. Blgn	1	0	0	0	56	56	7	0	0	0	0	164	1	0	3	0	6	8	32	334
13	Kab. Tanbu	3	0	0	0	41	10	5	0	0	0	0	32	10	0	0	0	2	10	2	115
Jumlah		53	-	-	-	830	652	228	-	-	-	-	1,006	28	9	147	22	96	159	405	3,635

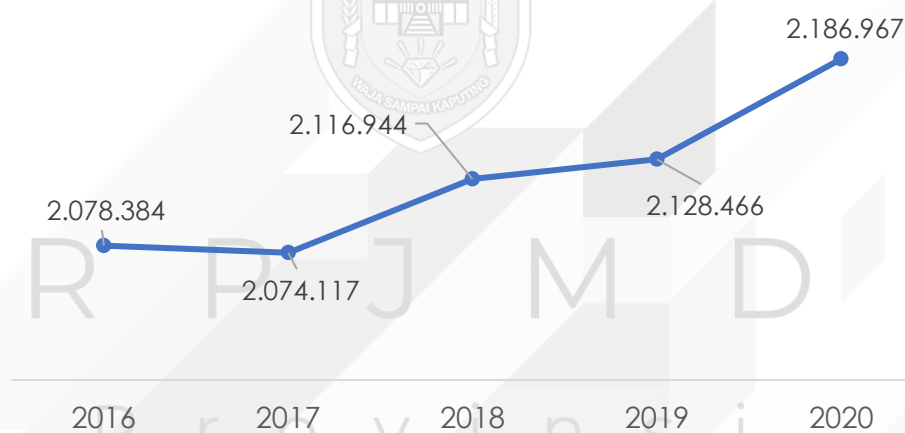
Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan 2021

2021 - 2026

2.3.1.2 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Non-Dasar

2.3.1.2.1 Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan fokus pada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja. Berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (PAK), dan menekan usia penduduk usia 15 tahun hingga 24 tahun masuk dalam angkatan kerja. Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Gambar II-40 dan Tabel II-83.



Gambar II-40 Jumlah angkatan kerja (Jiwa) Provinsi Kalimantan Selatan, 2016-2020

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa secara konsisten dari tahun 2014-2020 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja sebanyak 2.074.117 jiwa meningkat pada tahun 2020 menjadi sebanyak 2.186.967 jiwa. Terjadi peningkatan sebanyak 108.583 jiwa selama kurun waktu tahun 2016-2020, atau tumbuh rata-rata sebesar 28.213 jiwa per tahunnya. Meskipun demikian pada periode tahun 2014-2020 terjadi kenaikan dari 1.941.229 jiwa menjadi 2.186.967 jiwa dan pertumbuhan cukup besar pada periode 2019-2020 sebesar 58.501 jiwa.

Jika dilihat perkembangan kabupaten/kota, maka angkatan kerja terbanyak ada di Kota Banjarmasin yang mencapai 334.296 jiwa pada tahun 2017, kemudian Kabupaten Banjar dengan 296.654 jiwa dan Kabupaten Barito Kuala dengan 169.242 jiwa, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Balangan dengan 70.841 jiwa, kemudian Kabupaten Tapin dengan jumlah 98.027 jiwa, dan Kota Banjarbaru dengan 110.483 jiwa. Lebih lanjut gambaran berikut ini adalah perkembangan angkatan kerja Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020.

Tabel II-83 Perkembangan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)					
	2014	2015	2017	2018	2019	2020
Tanah Laut	163.093	157.649	160.165	162.348	171.565	181.827
Kota Baru	141.568	146.621	157.340	163.498	161.409	157.363
Banjarmasin	303.438	280.643	296.654	301.194	309.609	318.377
Barito Kuala	155.603	159.337	169.242	177.257	169.540	172.056
Tapin	92.425	94.619	98.027	96.890	98.115	100.696
HSS	15.682	114.473	120.898	123.949	124.906	129.734
HST	128.481	139.214	144.426	146.855	140.332	144.168
HSU	117.585	113.125	117.988	118.105	117.284	121.288
Tabalong	121.965	126.403	131.890	136.373	129.924	129.928
Tanah Bumbu	134.199	152.022	161.867	164.725	170.814	194.029
Balangan	66.110	64.993	70.841	70.364	66.621	72.717
Banjarmasin	311.951	327.864	334.296	336.792	346.184	331.562
Banjarmasin	99.129	110.287	110.483	118.594	122.163	133.222
Kalimantan Selatan	1.941.229	1.987.250	2.074.117	2.116.944	2.128.466	2.186.967

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2021

2.3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan pemberdayaan perempuan sangat terkait dengan peningkatan kualitas generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu penyeteraan gender merupakan bentuk kebijakan yang berupaya untuk diterapkan. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa permasalahan gender yang masih dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Selatan adalah terjadinya gap yang besar antara laki-laki dan perempuan dalam tingkat upah yang diukur dengan pengeluaran riil. di mana rata-rata penghasilan perempuan masih sekitar 50% nya dari rata-rata penghasilan laki-laki. Kondisi ini konsisten terjadi dari tahun 2011 hingga tahun 2020 dan bahkan cenderung makin melebar selisihnya. sebagaimana yang terlihat pada Tabel II-84.

Tabel II-84 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kalimantan Selatan 2011-2020

Tahun	Uraian	AHH	AHLS (th)	RRLS	Peng Riil%	Nilai IPG
2011	Perempuan	65,48	-	7,1	3,447	88,09
	Laki-Laki	69,34	-	8,1	6,553	
2012	Perempuan	65,58	-	7,2	3,448	88,33
	Laki-Laki	69,45	-	8,16	6,552	
2013	Perempuan	65,76	-	7,3	5,886	88,33
	Laki-Laki	61,96	-	8,27	12,979	
2014	Perempuan	73,31	12,12	7,5	7,888	88,46



Tahun	Uraian	AHH	AHLS (th)	RRLS	Peng Riil%	Nilai IPG
2015	Laki-Laki	69,40	11,81	8,38	16,311	88,55
	Perempuan	73,55	12,10	7,65	8,668	
	Laki-Laki	69,60	11,90	8,53	16,544	
2016	Perempuan	69,84	12,41	7,40	8,403	88,86
	Laki-Laki	65,92	12,16	8,38	17,107	
2017	Perempuan	69,95	12,42	7,52	8,564	88,60
	Laki-Laki	65,98	12,53	8,45	17,402	
2018	Perempuan	70,19	12,43	7,53	8,867	88,61
	Laki-Laki	66,16	12,69	8,46	17,938	
2019	Perempuan	70,45	12,51	7,70	8,986	88,61
	Laki-Laki	66,55	12,70	8,68	18,204	
2020	Perempuan	70,62	12,67	7,88	8,777	88,86
	Laki-Laki	66,76	12,71	8,7	17,969	

Sumber: DPPPA Anak Prov. Kalimantan Selatan 2020

Sementara dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2012-2020 mengalami kecenderungan yang meningkat. meskipun pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan dengan angka 71,31 menjadi 74,60. namun masih jauh berada dari kondisi tahun 2016 yang sebesar 67,56. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II-85.

Tabel II-85 Pemberdayaan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2020

IDG	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perempuan di parlemen (%)	13,13	16,36	14,55	15,10	-	16,36	18,18	20,00	19,59
Perempuan Pekerja Profesional/Teknisi/ Kepemimpinan/ Ketatalaksanaan (%)	43,23	42,16	44,32	44,95	-	67,00			
Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan kerja (%)	35,43	36,35	34,90	35,25	-	64,36			62,06
IDG	68,40	65,60	68,22	70,05	67,40	67,56	71,31	74,60	

Sumber: DPPPA Prov. Kalimantan Selatan 2020

Perkembangan angka indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender yang terus meningkat disebabkan dengan adanya ketersediaan layanan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri atas berbagai bentuk lembaga sesuai dengan Tabel II-86.

Tabel II-86 Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 - 2020

Lembaga Penyedia Layanan PPPA	2016	2017	2018	2019	2020
UPPA	-	-	-	14	3
P2TP2A	14	14	14	14	9
WCC	-	-	-	1	-
LBH	-	-	9	11	11
Puskesmas	-	-	-	230	-
RPSA	-	-	-	16	-
Kejaksanaan	14	14	14	14	14
Pengendalian	14	14	14	14	14
BP4	-	-	-	153	-
PIK Keluarga	-	-	-	217	-
RS	-	-	-	17	-
RPTC	-	-	-	1	1
LPA	2	2	5	5	5
Ruman Aman	-	-	-	2	2

Sumber: DPPPA Prov. Kalimantan Selatan 2021

Tabel II-87 Capaian Kinerja Urusan DPPPA Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88,86	88,6	88,61	88,61	88,86
2	IDG	Indeks	67,40	67,56	71,31	74,6	74,48
3	Persentase Pernikahan Anak	%	22,26	23,12	17,63	21,18	16,24
4	Persentase Anggaran Responsif Gender di Provinsi Kalimantan Selatan	%	N/A	N/A	N/A	3	4
5	Persentase perempuan yang duduk di lembaga legislatif	%	N/A	12,73	16,36	20	20
6	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) Perempuan	%	N/A	N/A	N/A	55	62,06
7	Persentase Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	%	20		30	N/A	N/A
8	Persentase Kelembagaan Gender dan Anak	%			50	N/A	N/A
9	Persentase Perempuan yang Duduk di Lembaga Legislatif	%			69	N/A	N/A
10	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat) tentang Lembaga Pelayanan P2TP2A	%	76	80	72,09	N/A	N/A
11	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%					70

Sumber: DPPPA Prov. Kalimantan Selatan 2021

2.3.1.2.3 Pangan

Berdasarkan data dari tahun 2012 sampai dengan 2017 dapat dilihat bahwa untuk produksi pangan secara keseluruhan mengalami peningkatan. Produksi tanaman pangan meningkat menjadi 2.452.366 ton. produksi daging dari tahun 2012

sampai 2019 meningkat menjadi 84.422,01 ton. produksi telur menurun dibanding 2018 menjadi 102.269,52ton. Produksi susu menurun dibanding 2018 sebesar 202.271,00ton. Lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel II-88.

Tabel II-88 Produksi Pangan Utama di Kalimantan Selatan Tahun 2012-2019

Peningkatan produksi	Satuan	Tahun							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tanaman Pangan	Ton	2.056.532	2.031.029	2.107.028	2.140.276	-	2.452.366		
Daging	Ton/Th	64.748,83	75.989,82	66.772,06	78.286,90	89.633,23	92.481,40	98.931,80	84.422,01
Telur	Ton/Th	71.112,93	72.244,87	84.525,66	97.028,38	99.639,15	113.376,62	122.231,82	102.269,52
Susu	Liter/Th	163.221	135.079	281.415	56.283	126.074,00	112.411,80	252.009,00	202.271,00
Ikan Lokal	Ton/Th	9.269,5	10.109,3	13.231,3	13.404	51.325,00	155.054,00	3.990,69	349,94
Ikan Nila	Ton/Th	32.700.	32.222	32.009,7	32.327	48.892,10	239.277,50	24.489,60	407,24
Ikan Tangkap	Ton	52.012	45.441,7	52.729,7	53.341	247,73	253,90	262,15	212.649,43

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Selatan 2020 (diolah)

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. melalui program kemandirian pangan. peningkatan ketahanan pangan dapat dilihat dari jumlah lumbung pangan yang tersebar di 11 Kabupaten di Kalimantan Selatan adalah sebanyak 129 lumbung pangan. desa yang sudah mandiri pangan di Kalimantan Selatan sebanyak 194 desa. dan jumlah cadangan pangan sebanyak 173.190 kg.

Tabel II-89 Capaian Kinerja Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Peningkatan desa rawan pangan yang menjadi desa mandiri pangan	%	-	1,57	5,15	3,77	4,19
2	Persentase Peningkatan lumbung pangan masyarakat	%	-	2,86	4,76	3,05	4,09
3	Koefisien variasi (CV) harga beras di tingkat konsumen	< ... %	-	8	1,81	5,72	7,94
4	Penurunan konsumsi beras	kg/kap/thn	-	97	93,8	94,66	96,1
5	Peningkatan konsumsi pangan lokal	kg/kap/thn	-	9,6	13,1	11,7	19,25
6	Persentase komoditas pangan yang aman dikonsumsi	%	-	86,59	94,29	80	81,36
7	Persentase Peningkatan Desa Mandiri Pangan	%	-	1,57	5,15	3,77	4,19
8	Persentase Peningkatan lumbung pangan masyarakat	%	-	2,86	4,76	3,05	4,09
9	Peningkatan skor PPH Ketersediaan	Skor	-	81,28	86,5	85,1	86,3



N O	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
10	Penurunan Konsumsi Beras	kg/kap/ thn	-	97	93,8	94,66	96,1
11	Peningkatan Konsumsi Pangan Lokal	kg/kap/ thn	-	9,6	13,1	11,7	19,25
12	Persentase Komoditas Pangan Yang Aman Dikonsumsi	%	-	86,59	94,29	80	81,36

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Selatan 2021

2.3.1.2.4 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Manusia dan lingkungan merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling pengaruh mempengaruhi. Pengaruh alam terhadap manusia lebih bersifat pasif, sedangkan pengaruh manusia terhadap alam lebih bersifat aktif. Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, aktifitas yang dilakukan manusia terhadap alam selalu menimbulkan dampak terhadap lingkungan itu sendiri. Tingginya laju pertumbuhan penduduk, membuat kebutuhan akan penyokong kehidupan semakin tinggi, sebagai contoh adalah kebutuhan akan ruang. Hal ini menimbulkan terjadinya perubahan atau dampak terhadap kondisi lingkungan hidup.

Menurunnya kualitas lingkungan hidup provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu isu yang sangat penting sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan tekanan jumlah penduduk. Hal yang sering sulit untuk dijawab adalah apakah kualitas lingkungan hidup provinsi Kalimantan Selatan berada dalam kondisi baik, sedang, atau buruk. Sejak tahun 2009, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan suatu indeks lingkungan berbasis provinsi yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Indeks ini diterjemahkan dalam angka yang menerangkan apakah kualitas lingkungan berada pada kondisi baik, atau sebaliknya. Berikut ini klasifikasi penjelasan kualitatif dari angka indeks lingkungan hidup.

Tabel II-90 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
SANGAT BAIK	$90 \leq x < 100$
BAIK	$70 \leq x < 90$
SEDANG	$50 \leq x < 70$
KURANG	$25 \leq x < 50$
SANGAT KURANG	$0 \leq x < 25$

Pembagian kategori penjelasan kualitatif ini didasarkan pada sebaran angka dalam perhitungan indeks. Kategori penjelasan kualitatif ini dijadikan dasar pembuatan kebijakan dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami bagi publik. Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, indeks dapat membantu penentuan skala prioritas yang disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan hidup.

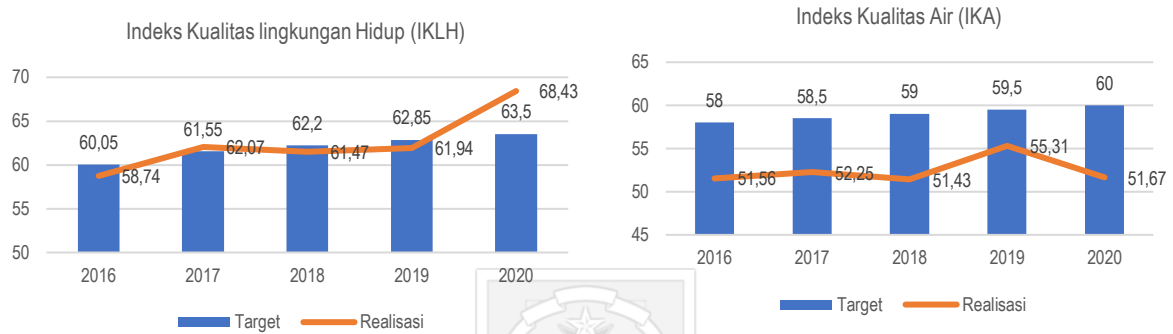
Indeks kualitas lingkungan hidup provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel II-91 di bawah ini:

Tabel II-91 Kondisi Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

Jenis	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas LH	58,74	62,07	61,47	61,94	68,43
Tutupan Lahan	44	49,21	49,29	46,78	48,48
Kualitas Air	51,56	52,25	51,43	55,31	51,67
Kualitas Udara	85,60	89,02	87,75	88,78	88,93

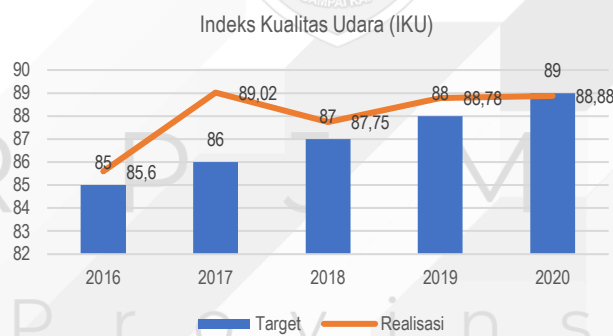
Sumber:DLH Kalimantan Selatan 2021

Berdasarkan data pada Tabel II-88, kondisi lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan mengalami tingkat kenaikan yang rendah, bahkan cenderung mengalami penurunan pada tahun 2020. Kualitas lingkungan hidup digambarkan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada Tahun 2020 IKLH Provinsi Kalimantan Selatan adalah 68,43 atau predikat sedang. Nilai IKLH ini meningkat 6,49 Poin dari nilai IKLH Tahun 2019 yaitu 61,94 poin. Nilai IKLH ini di atas target RPJMN yaitu 63,5. Namun, Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu komponen penyusun IKLH masih rendah, yaitu 51,67 dan masih berada di bawah target RPJMN yaitu 60. Sedangkan komponen penyusun IKLH yang lain yaitu Indeks Kualitas Udara yaitu 88,93 atau predikat baik, dan IKL 48,48 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yaitu 51,67 atau predikat sedang.



*Target yang digunakan adalah target RPJMD 2016 – 2020.

Gambar II-41 Gambar Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Kualitas Air (IKA) di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020



*Target yang digunakan adalah target RPJMD 2016 – 2020.

Gambar II-42 Grafik Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

Secara umum nilai indikator kualitas udara Kalimantan Selatan masih dalam kategori baik, namun seiring dengan perkembangan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka lingkungan udara semakin bertambah beban polutan pencemarnya. Adanya polutan pencemaran udara berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan termasuk emisi gas rumah kaca.

Pada tahun 2019 terjadi kabut asap di Kalimantan Selatan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan, dari data pengukuran ISPU tahun 2019 di Kota Banjarmasin dan Kab. Banjar untuk Status ISPU masuk dalam kategori sedang dan Tidak Sehat. Sedangkan dari data hasil pemantauan dengan metode manual aktif 1 jam di beberapa Kab/Kota jika untuk hasil pemantauan parameter SO₂ dan NO₂ tahun 2021, 2020 dan 2019 berfluktuatif naik dan turun namun tetap memenuhi Baku Mutu/Ambang Batas Sesuai peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara Ambien atau PP RI No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengukuran ISPU pada tahun 2020 mengacu pada peraturan terbaru yaitu Permen LH Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 tentang Standar Pencemar

Udara dengan Kategori sebagai berikut:

Tabel II-92 Parameter Status Pencemar Udara

Kategori	Angka Rentang
Baik	1 – 50
Sedang	52 – 100
Tidak Sehat	101 – 200
Sangat Tidak Sehat	201 – 300
Berbahaya	≥ 300

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Menurut Laporan Inventarisasi GRK Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018, analisis kategori kunci yang mempengaruhi emisi GRK di Kalimantan Selatan pada total agregat terdiri dari 13 sub-sektor, yaitu:

- a. Sisa hutan (FLRemaining)
- b. Pembangkit listrik,
- c. Produksi kapur (Lime Production),
- d. Dekomposisi gambut,
- e. Transportasi,
- f. Lahan dikonversi ke lahan pertanian (Land Converted to CL),
- g. Produksi semen (Cement Production),
- h. Lahan dikonversi ke lainnya (Land Converted to OL Mineral),
- i. Emisi N₂O langsung dari tanah yang dikelola (Direct N₂O Emissions from Managed Soils),
- j. Penambangan dan penanganan batubara bawah tanah dan permukaan (Underground and surface coal mining and handling),
- k. Sisa lahan pertanian (CL Remaining CL Mineral),
- l. Budidaya padi emisi CH₄ dari padi (Rice Cultivation CH₄ Emission from Rice), dan
- m. Emisi N₂O tidak langsung dari tanah yang dikelola (Indirect N₂O Emissions from Managed Soils).

Data perubahan emisi GRK yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu 2016 s.d 2020 terlampir di dalam Tabel II-93.

Tabel II-93 Perubahan Emisi GRK Tahun 2016-2020 di Kalimantan Selatan

	2016	2017	2018	2019	2020
Historis (Gg CO ₂ -eq)	16.429	17.168	16.983	15.564	-
BAU (Gg CO ₂ -eq)	18.238	19.250	20.317	21.571	22.971
Mitigasi (Gg CO ₂ -eq)	17.003	17.476	17.984	18.583	19.182



	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi penurunan dari masing-masing sektor					
Energi	-4,0%	-4,0%	-5,7%	-7,6%	-
Pertanian	-19,0%	-19,3%	-32,4%	-34,2%	-
Kehutanan	-18,6%	-24,7%	-31,6%	-118,3%	-
Limbah	-14,0%	-16,9%	-23,8%	-26,5%	-
Agregat	-9,9%	-10,8%	-16,4%	-27,8%	-

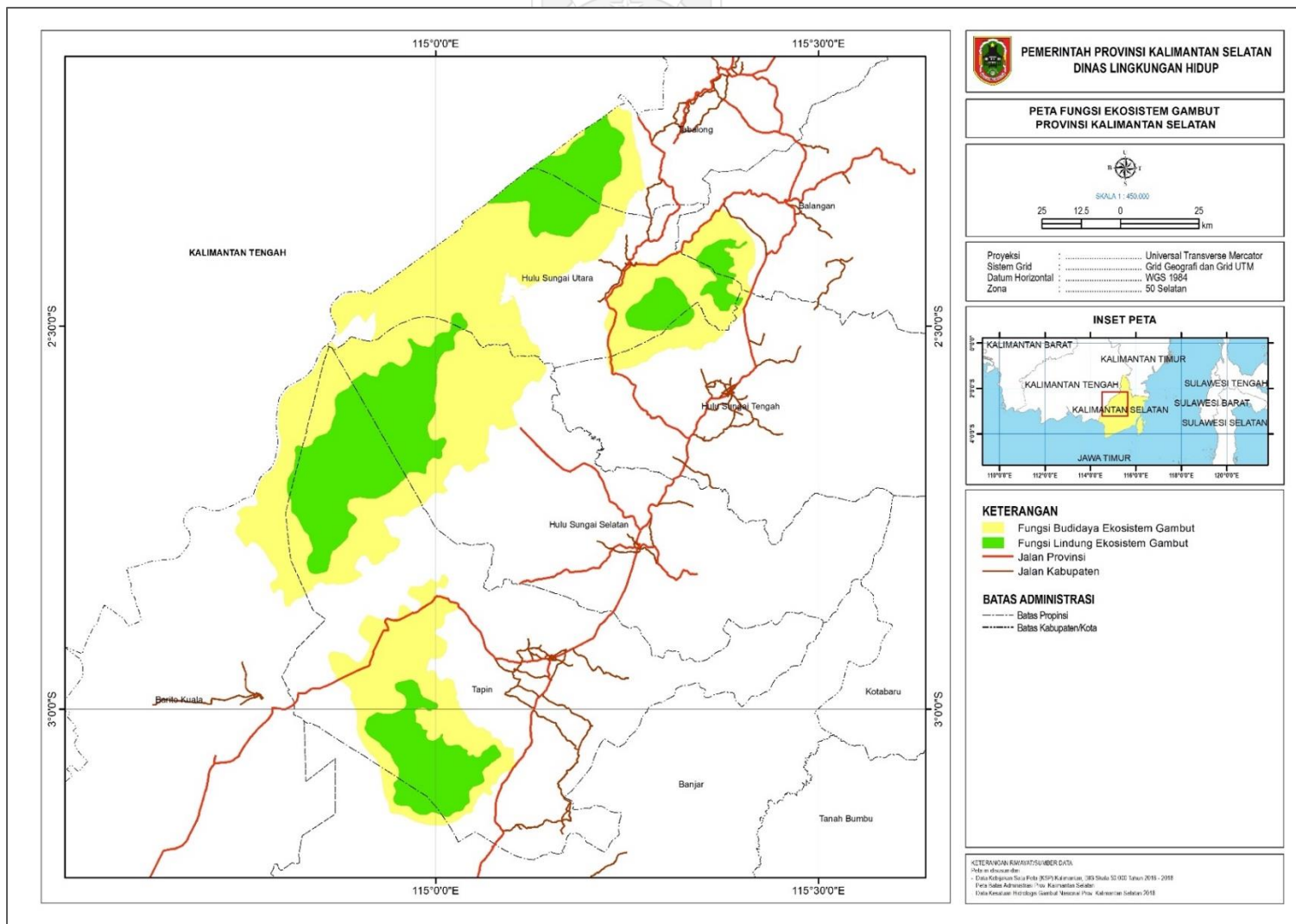
Sumber: Laporan Inventarisasi GRK Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2019

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa peningkatan emisi GRK terutama pada tahun 2019, dipicu oleh perubahan tutupan lahan. Perubahan tutupan lahan di masa mendatang berkontribusi sangat penting dalam hal penurunan emisi GRK agregat di Kalimantan Selatan.

Ekosistem gambut menjadi isu penting dalam permasalahan Perubahan tutupan lahan, sehubungan nilai dan fungsi lingkungannya antara lain sebagai pengendali perubahan iklim global karena kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon. Gambut Indonesia menyimpan karbon sebesar 46 GT (atau 46×10^9 ton), sehingga memiliki peran yang cukup besar sebagai penjaga iklim global. Ekosistem gambut merupakan sumber emisi gas rumah kaca (GRK) apabila gambut terekspose atau terbakar menghasilkan gas CO₂, N₂O, dan CH₄ yang sangat kuat menyumbang terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Indonesia termasuk negara yang berkomitmen untuk melakukan penurunan tingkat emisi GRK 29% dengan sukarela atau 41% dengan kerjasama bilateral, di antaranya dari gambut antara 9,5-13,0% (Noor, 2010).

Secara spasial sebaran fungsi ekosistem gambut berdasarkan fungsi lindung dan fungsi budidaya di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Gambar II-43.

2021 - 2026



Gambar II-43 Peta Fungsi ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Selatan

Kawasan ekosistem gambut ditentukan berdasar pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.129/MENLHK/ SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut. Kawasan ini memiliki fungsi lindung dan fungsi budidaya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Gambut.

KHG di Provinsi Kalimantan Selatan meliputi luas 238.609 hektar. Keseluruhan KHG, yang masuk ke dalam fungsi lindung sekitar 80.691 hektar (34%) dan fungsi budidaya sekitar 157.918 hektar (66%). Dengan demikian, maka seluruh ekosistem gambut yang masuk ke dalam kawasan KHG selain berupa tanah gambut, bergambut, dan juga tanah mineral masuk dalam areal KHG.

Tabel II-94 Luas dan Sebaran Indikator Fungsi Ekosistem Gambut per Kabupaten

Kabupaten	Fungsi Ekosistem Gambut		Jumlah (ha)
	Fungsi Budidaya	Fungsi Lindung	
Balangan	5.090	1.999	7.089
Banjarnegara	1.997	1.810	3.808
Barito Kuala	14.325	467	14.792
Hulu Sungai Selatan	29.266	15.335	44.601
Hulu Sungai Tengah	5.541	633	6.174
Hulu Sungai Utara	51.385	14.909	66.294
Tabalong	5.172	8.074	13.246
Tapin	45.140	37.464	82.604
Jumlah	157.918	80.691	238.609

Sumber: KLHK, 2020

Reduksi emisi karbon menjadi isu utama dalam pengendalian perubahan iklim, khususnya dalam bidang mitigasi yang memiliki target total reduksi emisi pada tahun 2030 sebesar 29%-41%. Ekosistem Gambut menjadi penting dalam mitigasi emisi gas rumah kaca, khususnya karbon karena diperkirakan lahan gambut dapat menyimpan 550 giga ton karbon, atau setara dengan dua kali jumlah simpanan karbon di berbagai jenis hutan non-gambut. Juga diperkirakan 25% karbon terestrial tersimpan di lahan gambut, dan jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan ekosistem hutan hujan tropis, bahkan untuk kondisi ekosistem yang masih berupa hutan alam.

Sebaran indikasi status kerusakan Ekosistem Gambut di tiap provinsi, baik pada fungsi lindung maupun fungsi budidaya dapat dilihat pada Gambar II-43 serta Tabel II-95 dan Tabel II-96.

Tabel II-95 Sebaran Status Kerusakan Pada Fungsi Lindung Ekosistem Gambut

Kabupaten	Fungsi Budaya					Jumlah
	Tidak Rusak	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Sangat Berat	
Balangan	-	3.911,67	983,76	194,81	-	5.090,24
Banjar	-	194,94	478,45	959,11	364,94	1.997,43
Barito Kuala	44,60	12.209,50	1.895,02	176,02	-	14.325,14
Hulu Sungai Selatan	148,84	19.586,70	8.035,94	1.495,01	-	29.266,49
Hulu Sungai Tengah		4.026,90	1.514,59	-	-	5.541,49
Hulu Sungai Utara	225,31	48.149,85	2.656,10	346,99	7,05	51.385,31
Tabalong	1,57	5.114,62	55,49	-	-	5.171,68
Tapin	226,85	24.900,59	14.643,71	5.205,38	163,57	45.140,10
Jumlah	647,17	118.094,77	30.263,06	8.377,32	535,57	157.917,89

Sumber : KLHK, 2021

Tabel II-96 Sebaran Status Kerusakan Pada Fungsi Budaya Ekosistem Gambut

Kabupaten	Fungsi Lindung				Jumlah
	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Sangat Berat	
Balangan	775,10	726,61	489,67	7,71	1.999,09
Banjar	292,40	483,08	885,35	149,33	1.810,15
Barito Kuala	237,30	56,61	173,30	-	467,22
Hulu Sungai Selatan	8.821,26	5.069,19	1.444,53	-	15.334,98
Hulu Sungai Tengah	399,80	233,18	-	-	632,98
Hulu Sungai Utara	11.069,28	3.678,03	161,35	-	14.908,66
Tabalong	7.591,96	481,90	-	-	8.073,86
Tapin	17.503,06	14.476,34	5.435,48	49,21	37.464,08
Jumlah	46.690,17	25.204,93	8.589,68	206,25	80.691,02

Sumber : KLHK, 2021

Kebakaran menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan ekosistem gambut di Kalimantan Selatan. Luas lahan gambut yang terbakar pada 2015 > 18.000 ha. Kebakaran menurun tajam pada tahun 2016- 2018 karena faktor kemarau basah. Akibat pengaruh kemarau panjang tahun 2019 terjadi peningkatan. Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan menyebutkan luas kebakaran hutan dan lahan pada 2019 mencapai 7.800 ha (2.400 hektare diantaranya adalah lahan gambut). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebut luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan tahun 2019 lebih dari 10.000 ha.

Ekosistem Gambut memiliki beberapa isu pokok yang menjadi perhatian para pihak baik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Isu pokok lingkungan untuk Ekosistem Gambut yaitu penyimpan stok karbon, penyangga sistem hidrologi,



keanekaragaman hayati. Isu strategis tambahan dari ekosistem gambut khususnya di Kalimantan Selatan adalah sebagai Kawasan penopang kehidupan sosial ekonomi masyarakat

1. Penyimpan Stok Karbon

Reduksi emisi karbon menjadi isu utama dalam pengendalian perubahan iklim, khususnya dalam bidang mitigasi yang memiliki target total reduksi emisi pada tahun 2030 sebesar 29%-41%. Ekosistem Gambut menjadi penting dalam mitigasi emisi gas rumah kaca, khususnya karbon karena diperkirakan lahan gambut dapat menyimpan 550 giga ton karbon, atau setara dengan dua kali jumlah simpanan karbon di berbagai jenis hutan non-gambut. Juga diperkirakan 25% karbon terestrial tersimpan di lahan gambut, dan jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan ekosistem hutan hujan tropis, bahkan untuk kondisi ekosistem yang masih berupa hutan alam.

2. Penyangga Sistem Hidrologis

Keberadaan dan kondisi Ekosistem Gambut memiliki keterkaitan dengan keseimbangan sistem hidrologi keseluruhan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun sistem hidrologi terestrial. Ekosistem Gambut terbentuk di daerah rawa yang pada umumnya merupakan posisi peralihan antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Di Indonesia keberadaan Ekosistem Gambut sebagian besar terdapat di lahan rawa dataran rendah di sepanjang pantai, sehingga gangguan yang terjadi pada Ekosistem Gambut akan berpengaruh terhadap sistem hidrologi sungai, rawa, dan pantai antara lain dalam menyimpan air. Selain itu tentu saja sistem hidrologis Ekosistem Gambut menjadi penyangga flora dan fauna beserta habitatnya.

3. Keanekaragaman Hayati

Tidak kurang dari 50 jenis pohon sudah teridentifikasi di hutan alam Ekosistem Gambut, dan beberapa diantaranya mulai dilindungi karena hampir habis karena penebangan hutan untuk berbagai kepentingan. Ekosistem Gambut juga menyediakan berbagai hasil hutan non-kayu seperti getah, rotan, madu, buah-buahan hutan, tanaman hias, serta bahan baku obat-obatan. Berbagai pohon dan tumbuhan bawah juga menyediakan berbagai sumber pangan bagi satwa liar. Berbagai jenis fauna juga terdapat di Ekosistem Gambut, tercatat 35 jenis mamalia, 150 jenis burung, dan 35 spesies ikan ditemukan di Ekosistem Gambut.

Ditemukan kelimpahan amfibi dan reptile serta biota perairan seperti plankton dan benthos yang merupakan indikator pencemaran perairan. Secara khusus, juga

terdapat sejumlah spesies endemik yang hanya dapat tumbuh di Ekosistem Gambut. Beberapa fauna di Kawasan ekosistem gambut Kalimantan Selatan termasuk dalam spesies yang dilindungi, seperti orangutan, bekantan, berang-berang, elang, musang air dan beruang madu.

Kualitas tutupan lahan Provinsi Kalimantan Selatan pada kategori sedang, hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks kualitas tutupan lahan dengan nilai 48,48. dengan trend nilai sebagai berikut.

Tabel II-97 Kondisi Tutupan Lahan di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

Jenis	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tutupan Lahan	44	49,21	49,29	46,78	48,48

Sumber:DLH Kalimantan Selatan 2021

Berdasarkan laporan dari KLHK Tahun 2018, Lahan kritis di Kalimantan Selatan mencapai 511.495 Hektar dan dalam kurun waktu tiga tahun (Tahun 2020) luas lahan kritis di Kalimantan Selatan sudah turun menjadi sekitar 500 ribu hektar. Penurunan luas lahan kritis ini berpengaruh pada peningkatan nilai IKL Kalsel yang naik dari 46.78 poin menjadi 48.48 pada tahun 2020. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama Tahun 2018 – 2020 dalam mengelola dan menghidupkan Kembali lahan-lahan kritis, terutama dengan Gerakan Revolusi Hijau yang di gaungkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Selain itu banyak juga upaya-upaya sinergis yang turut dilakukan oleh SKPD lain dalam rangka pengelolaan lahan terganggu, termasuk lahan gambut yang juga banyak tersebar pada lahan basah di Kalimantan Selatan.

Isu prioritas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan adalah Pengelolaan persampahan dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) , Kualitas Air Sungai yang Rendah, Luas Lahan Kritis yang berpotensi terus meningkat, potensi keanekaragaman hayati belum terkelola secara optimal, Potensi Kerusakan Ekosistem Mangrove dan terumbu karang diwilayah pesisir serta Perubahan Iklim

A. Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Permasalahan sampah di provinsi kalimantan selatan sudah dilaksanakan sesuai Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kalimantan Selatan (JAKSTRADA) namun demikian upaya - upaya yang berkenaan dengan pengelolaan sampah yang terdiri dari pengurangan dan penanganan masih belum optimal, berdasarkan data SIPSN pada tahun 2021 target pengelolaan sampah kalimantan selatan 97% dengan realisasi



78,31%.

Target Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tahun 2021 sebesar 24% dengan realisasi 14,57%. kondisi ini dapat terlihat di lapangan sampah masih berserakan pada wilayah tertentu yang ini memerlukan peran serta masyarakat didalam pengelolaan sampah. Sedangkan target Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis Rumah Tangga sebesar 74% dengan realisasi 63,74%, perlu komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah.

Sebagaimana data SIPSN Potensi timbulan sampah tahun 2021 di Provinsi Kalimantan selatan sebanyak 320.220,74Ton/Tahun,dengan Jumlah pengurangan sampah sebanyak 46.666,46 Ton/Tahun melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, sampah termanfaatkan di sumber sampah dan sampah didaur ulang di sumber.

Kegiatan Pengurangan dan penanganan sampah yaitu presentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terealisasi 14,57%, indikator ini baru dibuat kebijakannya berdasarkan peraturan presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Indikator kedua pada kinerja kedua mengembangkan program dan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yaitu presentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terealisasi 63,74 %, indikator ini baru dibuat kebijakannya berdasarkan peraturan presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Masalah persampahan di Kalimantan Selatan setiap tahun selalu mendapat perhatian penting mengingat perkembangan pembangunan dan ekonomi Kalimantan Selatan yang cenderung meningkat sehingga memberikan daya tarik bagi masyarakat untuk tinggal dan berusaha di Kalimantan Selatan. Adanya urbanisasi dan peningkatan penduduk pada akhirnya akan menimbulkan masalah sampah. Berbagai upaya dan inovasi telah dilakukan selama Tahun 2020 meskipun kondisi pandemi Covid-19 menjadikan tekanan terhadap kinerja pengelolaan persampahan.

Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme pathogen dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia. Limbah infeksius dari penanganan Covid-19 harus dikelola dan dilaporkan sesuai diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri LHK Tanggal 12 Maret 2021 revisi dari SE.2/MENLHK/PSLB3 /PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Covid-19. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah infeksius dari penanganan



pasien dengan penyakit menular dikhawatirkan menjadi sumber penularan penyakit bagi pasien, petugas, dan masyarakat sekitar.

Menghadapi kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada permasalahan limbah B3 medis dan limbah infeksius seperti berupa masker, sarung tangan, perban, alat suntik, set infus bekas dan lainlain, tercatat timbulan limbah B3 medis pada tahun 2021 sejumlah 287.526,26 kg. Hal ini mengharuskan adanya penanganan khusus limbah B3 medis. Penanganan terhadap limbah infeksius telah dilakukan oleh berbagai rumah sakit, puskesmas, dan tempat karantina dibawah pengawasan dari DLH Provinsi Kalimantan Selatan untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan di insenerator dan Sebagian dikirim kepada pihak ketiga yang telah memiliki izin mengelola LB3, yaitu PT Balikpapan Environmental Services (PT BES). Untuk penanganan limbah B3 covid-19 sendiri dikelola melalui fasyakes yang memiliki izin operasional insenerator yang ada pada RSUD Ulin, Ansyari Saleh, RSUD Balangan, RSUD Tanah Bumbu dan RS Ciputra.

Kalimantan Selatan belum memiliki usaha jasa pengolahan Limbah B3 yg memiliki perizinan berusaha untuk pengolahan Limbah B3, sehingga diluar dari keberadaan insenerator di RSUD maka untuk limbah B3 non medis dikelola dengan mengirim LB3 ke penyedia jasa yang ada di pulau Jawa dan Balikpapan. Kondisi ini tentu menyedot keuangan daerah, Selain itu tentu beresiko berdampak pencemaran lingkungan dari proses pengangkutan atau telatnya Limbah B3 utk di kelola. Dalam hal penanganan Limbah B3 medis, kab/ kota di Kalimantan Selatan belum memiliki sarana depo penyimpanan untuk menyimpan Limbah B3 dari berbagai fasyankes, padahal depo ini sangat penting untuk bisa menekan biaya pengangkutan LB3.

2021 - 2026

Tabel II-98 Timbulan Limbah Covid 19 Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

NO	KABUPATEN /KOTA	TIMBULAN LIMBAH COVID - 19 (Kg)												TOTAL
		Jan	Feb	Mar	Ap	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
1	HST				111	1055	1242	820	1097	1748	1475			7548
2	Barito Kuala			24,7	23	917	3021	1000	1193,5	788	397,1	766		8130.3
3	Tanah Bumbu				1580,3		3549	1547,3	1364	1211	1211			10462.6
4	Balangan			30	40		238	622,92						930.92
5	Kotabaru				144									144
6	HSS				195,5		853	2265	4618	6339	4010	2791		21071.5
7	Tanah Laut				10	935								945
8	Banjarmasin	54634	14210,6	16236,4										85081
9	HSU													0
10	Banjarbaru				25									25
11	Tapin	1905	1722	1978			2006	1531	671	440,4	511	427	199,9	11391.3
12	Tabalong	4256	4256	4259	22,5	746,5	1360	1735		1296	1165	0,782	1713	20.809.782
13	Banjar	5733,9	5342,9	4605,4	213	381,7	2	1,5	1,5					16281.9
JUMLAH		66528,9	25531,5	27133,5	2364,3	4035,2	12271	9522,72	8945	11822,4	8769,1	3,984,782	1912,9	182821,3
TOTAL		182821,3												

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel II-99 Timbulan Limbah Covid 19 Provinsi Kalimantan Selatan s.d Bulan Oktober 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	TIMBULAN LIMBAH COVID - 19 (Kg)										
		Jan	Feb	Mar	Ap	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	
1	HST	277	242,5	760	699	306,5	207,51		2922	3118		
2	Barito Kuala	420,3	787,6	801,7	262,2	335,2	340,1	596	586,7	337,6		
3	Tanah Bumbu	755,35	709	790	547,85				1470	786		
4	Balangan	972,04	917,44	1546,15	1068,12	627,46	940,91	1947	2345	2133		
5	Kotabaru	5118,82	5725,28	7063,11								
6	HSS	6131	3978	4769						2463,7	948	
7	Tanah Laut	5088	4427	5033,5	6449,5		1525	6355				
8	Banjarmasin	18664	20078	18130	16184	10542	544,85	1535	6537	12309,7	3113,2	
9	HSU	1085,4					5477					
10	Banjarbaru	12,612							43490	1236		
11	Tapin	2492,8	13,2	141,1	45,5	171,4	114,8	68	303,6	99,7		
12	Tabalong	1172	0,91						2943	381	97	
13	Banjar	2363,5	2167	3399,5	3153	2350	1859	5115	4498	8,35		
JUMLAH		44.552.822	39045,93	42434,06	28409,17	14332,56	11009,17	15616	65095,3	22873,05	4158,2	
TOTAL		287.526.26										

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

T a h u n
2 0 2 1 - 2 0 2 6



B. Kualitas Air Sungai Yang Rendah

Hasil pemantauan kualitas air sungai provinsi Kalimantan Selatan tahap pertama pada bulan Maret-April Tahun 2021 pada 38 titik pantau, ditemukan parameter-parameter yang dominan tidak memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan pemerintah RI No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI untuk Kelas I antara lain BOD, Fecal coli, Total coliform, DO, COD, TSS, CI bebas, dan Besi (Fe). Parameter lain yang tidak memenuhi baku mutu antara lain : H₂S, Fenol, Sianida (CN), pH, Mangan (Mn). Jika dibandingkan dengan baku mutu Kelas I, maka 63,16 % kualitas air sungai di Provinsi Kalimantan Selatan tergolong dalam cemar sedang dan 36,84% dalam status cemar ringan.

R P J M D
P r o v i n s i
K A L I M A N T A N
S E L A T A N
T a h u n
2 0 2 1 - 2 0 2 6

Tabel II-100 Tabel Status Mutu Air Sungai Provinsi Kalsel Tahun 2021

No	Nama Sungai	Kab/Kota	Lokasi sampel	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Tahap I	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Tahap II	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Rata-rata
1	Martapura	Kab. Banjar	1. Desa Tambak Anyar Ilir	Cemar Ringan (4,62)	Cemar Ringan (4,15)	Cemar Ringan (4,39)
			2. Desa Sungai Rangas	Cemar Ringan (4,05)	Cemar Ringan (2,95)	Cemar Ringan (3,50)
			3. Desa Sungai Lulut	Cemar Ringan (4,18)	Cemar Ringan (2,09)	Cemar Ringan (3,14)
		Kota Banjarmasin	4. Desa Basirih	Cemar Ringan (4,58)	Cemar Ringan (3,67)	Cemar Ringan (4,13)
2	Irigasi	Kab. Banjar	1. Desa Sungai Landas	Cemar Ringan (4,54)	Cemar Ringan (2,06)	Cemar Ringan (3,30)
		Kota Banjarbaru	2. Intake PDAM	Cemar Ringan (4,57)	Cemar Ringan (3,39)	Cemar Ringan (3,98)
		Kab. Banjar	3. Desa Sungai Tabuk Keramat	Cemar Ringan (4,36)	Cemar Ringan (3,26)	Cemar Ringan (3,81)
3	Riam Kanan	Kab. Banjar	1. Desa Pingaran Ulu	Cemar Ringan (4,41)	Cemar Ringan (4,59)	Cemar Ringan (4,50)
4	Riam Kiwa	Kab. Banjar	1. Desa Astambul Kota	Cemar Ringan (4,56)	Cemar Ringan (3,15)	Cemar Ringan (3,86)
5	Negara	Kab. H.S.Utara	1. Desa Jarang Kuantan	Cemar Ringan (3,19)	Cemar Ringan (3,56)	Cemar Ringan (3,38)
			2. Desa Teluk Mesjid	Cemar Ringan (3,58)	Cemar Ringan (3,59)	Cemar Ringan (3,59)
		Kab. H. S.Selatan	1. Desa Hakurung	Cemar Ringan (3,18)	Cemar Ringan (2,92)	Cemar Ringan (3,05)
			2. Desa Tumbukan Banyu	Cemar Ringan (2,98)	Cemar Ringan (4,27)	Cemar Ringan (3,63)
			3. Desa Bajayau-Daha	Memenuhi (0,76)	Cemar Ringan (3,36)	Cemar Ringan (2,06)
		Kab. Tapin	1. Desa Margasari	Cemar Ringan (2,43)	Cemar Ringan (2,45)	Cemar Ringan (2,44)
			2. Desa Sei. Puting	Cemar Ringan (3,89)	Cemar Ringan (0,78)	Cemar Ringan (2,34)
3. Desa Keladan	Cemar Ringan (3,10)		Cemar Ringan (1,20)	Cemar Ringan (2,15)		
6	Tapin	Kab. Tapin	1. Desa Baringin A	Cemar Ringan (3,19)	Cemar Ringan (1,82)	Cemar Ringan (2,51)
7	Barabai	Kab. H.S.Tengah	1. Desa Bulayak	Cemar Ringan (4,82)	Cemar Ringan (4,67)	Cemar Ringan (4,75)
			2. Desa Pajukungan	Cemar Ringan (3,20)	Cemar Ringan (4,48)	Cemar Ringan (3,84)
			3. Desa Kasarangan	Cemar Ringan (3,29)	Cemar Ringan (4,36)	Cemar Ringan (3,83)
			4. Desa Tabat	Cemar Ringan (2,70)	Cemar Ringan (4,00)	Cemar Ringan (3,35)
8	Amandit	Kab. H.S. Selatan	1. Desa Muning Baru	Cemar Ringan (3,65)	Cemar Ringan (3,18)	Cemar Ringan (3,42)



No	Nama Sungai	Kab/Kota	Lokasi sampel	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Tahap I	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Tahap II	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Rata-rata
9	Tabanio	Kab. Tanah Laut	1.Intake PDAM Desa Bajuin	Cemar Ringan (4,84)	Cemar Ringan (4,57)	Cemar Ringan (4,71)
			2.Desas Angsau	Cemar Ringan (3,72)	Cemar Ringan (4,83)	Cemar Ringan (4,28)
			3.Desas Panjaratan	Cemar Ringan (4,87)	Cemar Ringan (3,79)	Cemar Ringan (4,33)
10	Balangan	Kab. Balangan	1.Desas Tabuan	Cemar Ringan (2,88)	Cemar Ringan (3,60)	Cemar Ringan (3,24)
			2.Desas Kapul	Cemar Ringan (4,00)	Cemar Ringan (4,02)	Cemar Ringan (4,01)
			3.Desas Paringin Kota	Cemar Ringan (3,48)	Cemar Ringan (3,67)	Cemar Ringan (3,58)
11	Tabalong	Kab. Tabalong	1.Desas Suput	Cemar Ringan (2,89)	Cemar Ringan (2,28)	Cemar Ringan (2,59)
			2.Desas Pamarangan Kiwa	Cemar Ringan (2,76)	Cemar Ringan (2,58)	Cemar Ringan (2,67)
			3.Desas Halangan	Cemar Ringan (2,25)	Cemar Ringan (3,62)	Cemar Ringan (2,94)
12	Batulicin	Kab. Tanah Bumbu	1.Desas Sela Selilau	Cemar Ringan (4,21)	Cemar Ringan (1,83)	Cemar Ringan (3,02)
			2. Desas Karang Bintang	Cemar Ringan (3,64)	Cemar Ringan (2,13)	Cemar Ringan (2,89)
			3. Desas Maju Makmur	Cemar Ringan (3,85)	Cemar Ringan (1,93)	Cemar Ringan (2,89)
13	Cantung	Kab. Kotabaru	1. Desas Banua Lawas	Cemar Ringan (3,51)	Cemar Ringan (3,69)	Cemar Ringan (3,60)
			2.Desas Sungai Kupang	Cemar Ringan (2,80)	Memenuhi (0,997)	Cemar Ringan (1,90)
			3. Desas Karang Payau	Cemar Ringan (3,00)	Cemar Ringan (3,72)	Cemar Ringan (3,36)

SEKOLAH
T A H U N
2 0 2 1 - 2 0 2 6

Berdasarkan tabel diatas, dapat disajikan gambaran persentase titik pantau yang tidak memenuhi baku mutu beserta indikasi sumber pencemarnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II-101 Parameter Indeks Kualitas Air (IKA)

No.	Parameter	Peruntukan	Persentase (%)		Indikasi Sumber Pencemar
			Tahap I	Tahap II	
1	Fecal coli *	Kelas I	94,74	100	Bakteri yang berasal dari dari kotoran manusia dan kotoran hewan mamalia
		Kelas II	42,11	81,58	
2	Total coliform	Kelas I	94,74	100	Bakteri yang berasal dari dari kotoran manusia dan kotoran hewan mamalia, kotoran hewan ternak lainnya, jasad makhluk hidup seperti burung mati, serta bakteri dari limbah rumah tangga
		Kelas II	73,68	89,47	
3	BOD *	Kelas I	100	92,1	Limbah organik dari aktivitas rumah tangga seperti limbah makanan dan minuman, detergen (sabun), aplikasi pupuk pada kegiatan pertanian, limbah peternakan, sisa pakan ikan
		Kelas II	89,5	81,6	
4	DO *	Kelas I	89,47	76,32	BOD dan COD tinggi maka DO menjadi rendah
		Kelas II	31,6	23,7	
5	Cl Bebas	Kelas I	63,16	71,05	Klor dari proses klorinasi. Air bersih yang digunakan masyarakat melalui proses klorinasi oleh PDAM
		Kelas II	60,53	68,42	
6	COD *	Kelas I	68,42	60,53	Limbah organik baik dari aktivitas rumah tangga maupun industri, aplikasi pupuk pada kegiatan pertanian, limbah peternakan
		Kelas II	42,11	26,32	
7	H ₂ S	Kelas I	36,84	57,89	Sampah, limbah cair domestik
		Kelas II	36,84	57,89	
8	TSS *	Kelas I	63,16	42,11	Kikisan atau erosi tanah dipengaruhi musim hujan, aktivitas galian C, pertambangan batubara, perkebunan sawit
		Kelas II	55,26	36,84	
9	Besi (Fe)	Kelas I	60,53	21,05	Karakteristik alami, Pertambangan galian C dan batubara
		Kelas II	-	-	
10	Mangan (Mn)	Kelas I	5,26	10,53	Pertambangan galian C dan batubara
		Kelas II			
11	Amoniak	Kelas I		10,53	Air seni dan tinja, oksidasi zat organik secara mikrobiologis serta dari air buangan industri dan aktivitas masyarakat, limbah domestik, industri, dan limpasan pupuk pertanian.
		Kelas II		2,63	
12	Detergen	Kelas I	5,26	5,26	Kegiatan mencuci menggunakan detergen
		Kelas II	5,26	5,26	
13	Fenol	Kelas I	13,16		Limbah cair industri tekstil (kayu), bisa juga dari limbah domestik
		Kelas II	7,89		



No.	Parameter	Peruntukan	Persentase (%)		Indikasi Sumber Pencemar
			Tahap I	Tahap II	
14	Sianida (CN)	Kelas I	7,89		Limbah pertambangan emas
		Kelas II	7,89		
15	pH *	Kelas I	5,26		Air hujan, limbah industri pertambangan batubara
		Kelas II	5,26		

Keterangan = (*) parameter IKA

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan kompleksitas persoalan tersebut bahwa sumber pencemar yang terindikasi dari berbagai sector yakni dari sector pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, dan domestik, maka diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan serta pemulihan Sungai di Provinsi Kalimantan Selatan harus melalui pendekatan pengelolaan yang komprehensif dan terintegrasi dari hulu hingga hilir oleh seluruh pemangku kepentingan.

KALIMANTAN
SELATAN
T a h u n
2 0 2 1 - 2 0 2 6

C. Luas Lahan Kritis yang Berpotensi Terus Meningkat

Secara teori banjir dan bencana akibat banjir dapat terjadi karena faktor alamiah maupun pengaruh aktivitas manusia terhadap alam dan lingkungannya. Faktor alamiah yang utama yaitu elemen meteorologi, topografi, hidrologi, perubahan penggunaan lahan dan areal konservasi juga dapat memperbesar peluang terjadinya aliran permukaan (Afdhalia & Oktariza, 2019). Banjir secara umum juga terbagi menjadi dua dari faktor penyebabnya, yaitu banjir fluvial yang disebabkan karena limpahan air dari sungai (kadang disebut juga dengan banjir bandang) dan banjir pluvial yang disebabkan karena tingginya run-off (aliran permukaan) dan curah hujan ekstrim pada suatu lokasi.

Identifikasi Faktor Penyebab:

a. Anomali Curah Hujan

Berdasarkan klasifikasi curah hujan bulanan, Bulan Januari di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu bulan paling basah pada bagian barat pegunungan Meratus, sehingga potensi air limpasan di daratan cukup tinggi.

b. Morfologi Daratan

Pada daratan landai genangannya akan lama surut tetapi dayarusaknya kecil, sedangkan daratan yang terjal daya rusak tingginya akan cepat surut dikarenakan mengikuti aliran gravitasi dari hulu.

c. Pasang Laut

Terjadi pasang laut maksimum yang menambah lamanya durasi rendaman banjir di dataran karena air tidak bisa mengalir ke laut. Kondisi topografi di wilayah yang terendam banjir Januari 2021 ini umumnya berada di bagian hilir dengan ketinggian dibawah 12,5 mdpl. Wilayah pesisir di Kalimantan Selatan yang memiliki ketinggian 1 mdpl berpotensi mengalami banjir rob.

d. Sedimentasi Sungai

Dampak dari sedimentasi adalah kapasitas daya tampung sungai yang semakin menurun seiring dengan bertambahnya sedimen di dalam sungai, sehingga ketika air limpasan (runoff) tinggi dan akan dibuang ke outlet berupa sungai akan tidak tertampung lagi. Hal inilah yang mengakibatkan meluapnya air sungai dan menggenangi kawasan permukiman, persawahan atau sekitarnya.

e. Alih Fungsi Lahan

Berdasarkan peta perubahan guna lahan antara 2011 dan 2020 terlihat jelas



adanya perubahan guna lahan dari kawasanberhutan (hutan lindung, hutan produksi, hutan rawa/gambut)serta kawasan pertanian lahan kering menjadi kawasanperkebunan dan permukiman. Hal ini terjadi di DAS Barito,khususnya DTA pada Kajian ini. Alih fungsi lahan khususnya menjadi pertanian lahan kering, perkebunan sawit danpertambangan yang berakibat infiltrsi rendah, sehingga airlimpasan di permukaan semakin banyak berpotensi terjadibanjir.

Dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati, arah kebijakan konservasi kehati yaitu :

- Meningkatkan kepedulian upaya pelestarian Kehati sosialisasi/ pencerahan);
- Memperlambat, mengurangi/menghentikan laju kerusakan/degradasi dan kepunahan Kehati, diiringi upaya rehabilitasi serta implementasi prinsip pemanfaatan berkelanjutan;
- Meningkatkan keberdayaan pranata kelembagaan, kebijakan, dan penegakan hukum;
- Mengembangkan pemanfaatan berkelanjutan, IPTEK dan melestarikan kearifan lokal;
- Implementation of 3 Goals of the Convention on Biological Diversity (conservation, sustainable use, and benefit sharing). Indonesia has ratified CBD in 1994 (Act No. 5/1994);
- Implementation of Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plans (IBSAP), 2003 – 2020;
- Mewujudkan keadilan, keseimbangan peran/kepentingan dan memperkecil potensi konflik;.

Perencanaan Konservasi Kehati skala Provinsi

- Pengumpulan data flora dan fauna in-situ terkait konservasi sumber daya alam
- Pengumpulan data flora dan fauna ex-situ terkait konservasi sumber daya alam
- Pengumpulan data terkait lekat-lahan yaitu konservasi sumber daya alam yang ditanam dalam pekarangan Pengumpulan data ekosistem penopang keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan terkait konservasi sumber daya alam.

Jasa lingkungan pada habitat bumi ditentukan oleh keberadaan faktor endogen dan dinamika faktor eksogen yang dicerminkan dengan dua komponen yaitu kondisi ekoregion dan penutup lahan (landcover/ landuse) sebagai penaksir atau proxy. Oleh karena itu diperlukan proses transformasi data dari ekoregion dan penutup lahan menjadi nilai jasa lingkungan.



Menurut sistem klasifikasi jasa lingkungan dari Millenium Ecosystem Assessment (2005), jasa lingkungan dikelompokkan menjadi empat fungsi layanan, yaitu jasa penyediaan (provisioning), jasa pendukung (supporting) dan jasa kultural (cultural) serta jasa pengaturan (regulating).

Berdasarkan hasil analisis jasa lingkungan dari Dinas Lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 terdapat 20 jasa lingkungan yang disajikan sebagai berikut:

- Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan
- Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih
- Jasa Lingkungan Penyedia Serat
- Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik
- Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara
- Jasa Lingkungan Pengatur Iklim
- Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Alam
- Jasa Lingkungan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah
- Jasa Lingkungan Pengaturan Aliran Air dan Banjir
- Jasa Lingkungan Penyerbukan Alami
- Jasa Lingkungan Pengendalian Hama
- Jasa Lingkungan Estetika
- Jasa Lingkungan rekreasi
- Jasa Lingkungan Warisan Budaya
- Jasa Lingkungan Warisan geologi
- Jasa Lingkungan Regenerasi Tanah dan Pemeliharaan
- Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara
- Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer
- Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman

Keanekaragaman hayati di Provinsi Kalimantan Selatan beragam jenis, dikarenakan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan banyak dijadikan cagar alam dan kawasan konservasi sehingga masih terjaga ekosistemnya. Flora Vegetasi yang terdapat di kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan cukup banyak jenisnya, baik di kawasan taman nasional, wisata, hutan lindung maupun hutan produksi. diketahui bahwa setidaknya terdapat ratusan jenis tumbuhan, mulai dari pohon, liana, vegetasi bawah, dan lain-lain. Adapun beberapa contoh tanaman khas Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Durian, Tebu, Kasturi, Rambutan, Langsung dll. Selain



itu Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki fauna khas yang dilindungi.

Fauna/satwa liar yang terdapat di kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan tersebar di berbagai habitat di berbagai wilayah, hutan lindung di Pegunungan Meratus. Jenis fauna khas Kalimantan Selatan yang dapat dipetakan sebarannya yaitu Bekantan, Burung, Orang Utan.

Dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk dan intensifnya kegiatan pembangunan dari beragam sektor di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain pertambangan, industri, pelabuhan, perkebunan, pertanian, pemukiman, perikanan, pariwisata berkonsekuensi terhadap peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kompleksitas pembangunan di wilayah pesisir jika tidak diantisipasi secara hati-hati, dikhawatirkan mengganggu dan mengancam kelangsungan pemanfaatan sumber daya dan keberlanjutan ekosistem yang dapat menyangga kehidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Beberapa contoh ancaman nyata, misalnya perubahan ekosistem pesisir akibat reklamasi pantai, konversi lahan, penebangan hutan *mangrove*, tumpahan minyak (*oil spill*) dari pelabuhan, maupun pencemaran limbah dari berbagai kegiatan pembangunan dan rumah tangga penduduk.

Terkait dengan jenis pemanfaatan lahan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kalimantan Selatan dan pengaruhnya terhadap lingkungan pesisir dan perairan, maka isu dan permasalahan pokok yang teridentifikasi adalah terkait dengan ekologi, berupa potensi ancaman kerusakan ekosistem pesisir dan kehidupan biota laut yang hidup di sekitarnya.

Hal ini disebabkan karena secara ekologi laut merupakan tempat bermuaranya semua yang ada di darat baik melalui rembesan air hujan maupun mengalir melalui sungai-sungai yang cukup banyak bermuara di Selat Laut, Selat Sebuku maupun daratan Kalimantan. Akibatnya wilayah ini menjadi tempat terakumulasinya segala sesuatu baik limbah industri dan domestik, penambangan, perkebunan, sedimen tersuspensi dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dengan kondisi perairan di lokasi studi yang memiliki tingkat kecerahan yang cukup rendah (dominan <50%) dan kekeruhan akibat sedimen tersuspensi sampai pada jarak 10-15 km dari garis pantai, baik di wilayah muara Sungai Barito (pesisir Kabupaten Banjar dan Barito Kuala) yang dampaknya sampai di wilayah Tanjung Selatan Kabupaten Tanah Laut, perairan Selat Laut (Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru), Selat Sebuku maupun wilayah utara Kabupaten Kotabaru (daratan utama Kalimantan).

Pertambangan batu bara yang dilakukan secara terbuka menyebabkan perubahan bentang lahan yang ekstrem. Penggalan lapisan batu bara yang terletak



di bawah lapisan tanah dan lapisan lain menghasilkan lubang-lubang galian yang tidak dapat sepenuhnya ditutup kembali. Selain itu penimbunan lubang galian walaupun telah diupayakan menggunakan prinsip pengembalian lapisan tanah sebagai penutup terakhir pada waktu penataan lahan namun tetap saja menghasilkan kondisi lahan dengan material yang berbeda dibanding aslinya. Lapisan tanah yang dikembalikan sebagai lapisan penutup sudah tercampur aduk antara lapisan tanah atas dan bawah atau lapisan dari horizon A, B bahkan C, sehingga secara kimia terjadi pencampuran sifat-sifat yang dimiliki oleh masing-masing horizon tersebut. Secara fisik jelas sangat berbeda dari kondisi awalnya karena terjadi perusakan struktur. Dengan kata lain tanah hasil penutupan kembali pada lokasi pertambangan batu bara memiliki Bobot Isi (BI) yang rendah. Dalam hal ini maka porositas lapisan tanah hasil penutupan kembali menjadi sangat kecil dengan akibat permeabilitas dan aerasi menjadi sangat buruk.

Potensi kerusakan lahan lain yang mungkin terjadi di areal pertambangan batu bara ialah terpotongnya drainase alamiah akibat perubahan bentang lahan. Dalam penataan kembali maka hal ini perlu dipertimbangkan. Kerusakan lahan lainnya ialah berupa erosi dan kemungkinan longsor. Untuk itu maka stabilisasi lereng dan recontouring merupakan bagian dari perencanaan penutupan tambang.

Sebagian besar masyarakat nelayan dan petambak menduga bahwa kegagalan usaha mereka tidak terlepas dari dampak kegiatan penambangan di wilayah hulu dan transportasi di sepanjang daerah aliran sungai maupun perubahan iklim global.

Dari kegiatan pertanian dan perkebunan di daratan, kelebihan unsur hara dari sisa-sisa pupuk bisa menyebabkan suburnya alga di lepas pantai dan mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir, pada gilirannya bisa menyebabkan kematian biota laut secara massal. Sedangkan buangan residu pestisida dari pertanian dan perkebunan melalui aliran sungai dapat menyebabkan keracunan dan kematian biota laut.

Badan Informasi Geospasial mencatat bahwa luas Hutan Mangrove di Indonesia adalah 3,2 juta hektar (Ha). Jumlah itu merupakan 19% (2005) dari seluruh ekosistem sejenis di dunia, dan diperkirakan pada tahun 2013 luas Hutan Mangrove di Indonesia sudah jauh berkurang. Namun walau bagaimanapun, luasan hutan mangrove Indonesia relatif masih dianggap yang paling luas di dunia, sehingga meletakkan Indonesia sebagai penyangga ekosistem mangrove terpenting di dunia.

Kerusakan mangrove di sebagian wilayah pesisir Kalimantan Selatan dominan diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan untuk industri, pelabuhan,

perikanan, perkebunan, pertambangan. Selain itu diakibatkan oleh pengaruh alam terutama gelombang.

Hasil analisis terhadap tekanan ekosistem mangrove di pesisir Kalimantan Selatan menunjukkan dalam kategori tekanan sangat tinggi mencapai 6596,56 Ha atau 9,84%, kategori tinggi 137.34,87 Ha (20,50%), sedangkan kategori rendah masih yang terbesar yakni 24.692,24 Ha (36,85%). Secara wilayah kecamatan, Batulicin semua dalam kategori sangat tinggi, untuk semua kategori tinggi terdapat di Kecamatan Bumi Makmur, Pulau Laut Barat dan Pulau Laut Tanjung Selayar. Beberapa wilayah yang memiliki tekanan tinggi >50% terdapat di Kecamatan Takisung, Kurau, Satui dan Pulau Laut Kepulauan. Wilayah ini disebabkan karena semakin tingginya aktivitas konversi lahan di sekitarnya terutama, pelabuhan, perkebunan, perikanan tambak dan permukiman.

Berdasarkan data pada Tabel II-90 kondisi lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan mengalami tingkat kenaikan yang rendah. Kondisi terakhir Kalimantan Selatan secara peringkat naik ke peringkat 26 dari 34 provinsi di Indonesia. Pengaruh terbesar pada masih rendahnya indeks tutupan lahan akibat dari eksploitasi usaha yang membuka kawasan hutan dan akibat bencana kebakaran hutan.

Kondisi kualitas air yang juga masih rendah berpengaruh besar terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian Kinerja Urusan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan disajikan dalam Tabel II-102 berikut:

Tabel II-102 Capaian Kinerja Urusan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	58,75	62,07	61,47	61,94	68,43
2.	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	44,00	49,21	49,29	46,78	48,48
3.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,60	89,02	87,75	88,78	88,93
4.	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,56	52,25	51,43	55,31	51,67
5.	Persentase Pengelolaan Sampah di Kalimantan Selatan	%	42	55	72,57	82,78	84,97
6.	Persentase parameter kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	%	60	65,44	66,27	71,59	76,57
7.	Persentase parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu	%	80	98	95,19	93,27	100
8.	Persentase Penurunan emisi GRK dari Bussines as usual	%	3,96	4,2	2,8	11,47	13,11
9.	Persentase ketaatan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan	%	65	68	67	81	100



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
10.	Persentase perusahaan yang menerapkan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	%	78	100	100	100	100
11.	Persentase dokumen KRP yang mendapat rekomendasi lingkungan	%	100	100	100	100	100
12.	Luasan lahan terdegradasi yang dikelola	%	N/A	N/A	10.000	10.000	2000
13.	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang dihasilkan	%	N/A	1	1	1	2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Selatan 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 s/d 2021 tercatat ada berbagai pengembangan kegiatan yang berlangsung di Provinsi Kalimantan Selatan baik pengembangan sektor ekonomi seperti pembukaan Lahan untuk industri perkebunan, pertambangan, pertanian dan peternakan maupun pembukaan lahan untuk berbagai pemenuhan penyokong kehidupan lainnya yang tentu saja memiliki andil cukup besar terhadap perubahan kondisi lingkungan, diluar perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas domestik manusia. berkenaan dengan hal tersebut Gubernur Kalimantan Selatan sesuai kewenangannya menerbitkan izin lingkungan sebagai pengendalian atas pengelolaan lingkungan.

2.3.1.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembinaan kependudukan dan catatan sipil yang dilaksanakan pada tingkat Provinsi Kalimantan Selatan adalah dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka menuju identitas tunggal. kegiatan yang dilakukan hanya terkait dengan upaya sosialisasi standarisasi pemenuhan hak-hak sipil masyarakat seperti KTP, KK, dan lain sebagainya. Upaya pembinaan ini diarahkan pada upaya percepatan bagi kabupaten/kota mencapai identitas tunggal tersebut. Dalam mendukung pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil. Kabupaten Kota juga menetapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Inventarisasi peraturan terkait penyelenggaraan urusan tersebut dapat dilihat dalam Tabel II-103 berikut.

Tabel II-103 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Usia ≥ 17 Tahun atau Sudah Kawin yang Mempunyai KTP	%	0	0	0	83,00	92,00
2	Persentase Ketersediaan Data Informasi Kependudukan Skala Provinsi	%	0	0	100	100	100



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase Kabupaten yang melaporkan data-data kependudukan	%	0	0	94,48	0	0

Sumber: Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Prov. Kalimantan Selatan 2021

Tabel II-104 Inventarisasi Peraturan Perundangan terkait Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil di Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Nomor dan Judul Peraturan
1	Balangan	Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil
2	Banjar	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Perbup No. 17 tahun 2014 tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil
3	Batola	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	HSS	Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5	HST	Peraturan Daerah Nomor : Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Dan Akta Catatan Sipil
6	HSU	Peraturan Daerah Nomor : 20-Tahun 2015 tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah 17 2011 ttg Retribusi KTP dan Akta Catatan Sipil
7	Kotabaru	Surat Perintah Bupati Kotabaru Nomor 180.1/143/Setda
8	Tabalong	Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 Tanggal 15 Desember 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Perbup Nomor 06 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2016
9	Tanah Bumbu	Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Penerbitan KTP
10	Tanah Laut	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
11	Tapn	Peraturan Daerah Kab. Tapin No. 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil Di Kab. Tapin
12	Kota Banjarbaru	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kota Banjarbaru
13	Kota Banjarmasin	Peraturan Daerah Nomor : 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Sumber : LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2019

Pada tingkat kabupaten/kota telah dikembangkan sistem pelayanan terpusat pada kantor/lembaga yang menangani catatan sipil. sementara untuk beberapa kabupaten telah membagi kewenangannya kepada kantor kecamatan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan kewenangan ini hanya berlaku untuk pembuatan KTP. sedangkan untuk KK, akte kelahiran dan lain sebagainya masih di kantor catatan sipil.



Secara kelembagaan semua kabupaten/kota sudah memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Namun secara kualitas perlu adanya peningkatan dari berbagai sisi seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang lebih memadai baik secara kuantitas dan secara kualitas. Hal ini mengingat tantangan yang masih cukup besar terutama terkait dengan upaya sosialisasi dan penyadaran masyarakat akan pentingnya identitas pada umumnya dan identitas tunggal pada khususnya.

2.3.1.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu Upaya pembangunan Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah memberikan peran nyata untuk meningkatkan pendapatan keluarga yaitu dalam bentuk pelatihan kewirausahaan bagi kader-kader PKK.

Dalam rangka peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) telah dilaksanakan penguatan masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber Ekonomimelalui simpan pinjam kelompok perempuan, pengembanganBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa melalui pemberian bantuan stimulan dan pelatihan bagi pengurus. Jumlah kelompok simpan pinjam bagi perempuan dan Badan Usaha Milik Desa sudah dikembangkan di 11 kabupaten dengan hasil 1426 kelompok pada desa yang setiap tahunnya meningkat bisa di lihat peningkatan dari tahun 2015 ke 2020 pada Tabel II-105.

Tabel II-105 Pertumbuhan Jumlah Badan Usaha Milik Desa Kalimantan Selatan dari Tahun 2015 - 2020

TAHUN	JUMLAH BUMDES
2015	296
2016	627
2017	1069
2018	1246
2019	1268
2020	1426

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kalimantan Selatan 2021

Di bidang pemerintahan desa telah pula dilaksanakan pembinaan pembangunan desa seperti perencanaan desa dalam rangka menyusun RPJM desa. peningkatan kapasitas pelayanan desa dan kualitas aparatur dan kepala desa. agar memiliki kemampuan dalam mengelola sistem manajemen desa baik pemerintahan maupun keuangan desa. Berkaitan dengan hal ini telah dibina seluruh desa dengan pola pembinaan melalui percontohan yang kemudian dikembangkan oleh kabupaten sesuai kondisi dan potensi yang ada pada desa yang bersangkutan.

Di bidang teknologi. telah dilakukan berbagai upaya bersama-sama dengan kabupaten/kota. Upaya-upaya yang dilakukan adalah dalam rangka mengembangkan pelayanan melalui Pos pelayanan teknologi yang tepat guna. tepat kapasitas dan tepat pembiayaan. Seluruh kabupaten/kota secara formal sudah terbentuk kelembagaan ini namun secara kualitas masih memerlukan peningkatan dan pembinaan lebih lanjut. Keberhasilan program ini memerlukan dukungan dari berbagai organisasi lain baik pemerintah maupun non pemerintah seperti pengembangan energi baru terbarukan pada skala desa. peralatan produksi dan lain sebagainya. Lebih detailnya bisa di lihat pada Tabel II-106.

Tabel II-106 Data Registrasi Bumdes Tahun 2020

KABUPATEN	JUMLAH DESA	JUMLAH BUMDES	PERSENTASE
Kotabaru	198	151	76,26%
Banjar	277	183	66,06%
Tanah Bumbu	144	141	97,92%
Tanah Laut	130	84	64,62%
Barito Kuala	195	130	66,67%
Hulu Sungai Tengah	161	132	81,99%
Tapin	126	126	100,00%
Hulu Sungai Selatan	144	144	100,00%
Hulu Sungai Utara	214	137	64,02%
Balangan	154	94	61,04%
Tabalong	121	104	85,95%
	1864	1426	76,50%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kalimantan Selatan 2021

Tabel II-107 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif	%	0	0	0	2,68	2,68
2	Persentase pemerintahan desa dengan administrasi yang baik	%	0	0	0	2,68	2,68
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	0	0	0	14	14
4	Persentase sarana prasarana kawasan perdesaan yang terbentuk/berkembang	%	0	0	0	2	2
5	Persentase pengembangan kelembagaan desa	%	20	20	30	0	0
6	Persentase swadaya masyarakat untuk pembiayaan pembangunan desa	%	5	15	1	0	0
7	Persentase aparaturn pemerintahan desa yang meningkat kapasitasnya	%	7	0	0	0	0
8	Persentase usaha ekonomi masyarakat yang telah berkembang	%	7	0	0	0	0
9	Persentase swadaya masyarakat untuk pembiayaan pembangunan	%	0	6	6	0	0
10	Jumlah organisasi masyarakat yang dibina	unit	0	20	40	0	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kalimantan Selatan 2021

Optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah, yaitu KEK, KI, KPBPB, Destinasi Pariwisata Prioritas, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, khususnya hasilhasil perkebunan, pertambangan, dan perikanan antara lain melalui:

- (i) Penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
- (ii) Pembangunan smelter pada kawasan potensial dalam mendukung hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA);
- (iii) Penyediaan jaringan infrastruktur secara terpadu yang meliputi jaringan transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lainnya), sistem energi (listrik, gas, surya, batubara dan lainnya), fasilitas air baku dan air bersih, dan sistem pengolahan limbah;
- (iv) Pelayanan perijinan dan investasi yang cepat;
- (v) Penguatan konektivitas dengan pusat-pusat produksi bahan baku di kawasan perdesaan dan transmigrasi, kota-kota kecil, dan kota-kota menengah dalam pengadaan bahan baku dan pendukung;

- (vi) Pengembangan kerjasama dan kemitraan pembiayaan pemerintah dan badan usaha;
- (vii) Penguatan kerjasama Pemerintah Daerah, badan pengelola, masyarakat, perguruan tinggi dan media dalam promosi dan pengembangan kawasan strategis; serta
- (viii) Perluasan kerjasama dan kemitraan dalam kerjasama mata rantai produksi global.

Adapun daftar lokus prioritas kawasan Perdesaan Proritas Nasional (KPPN) di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Barito Kuala sebagai kawasan perdesaan pertanian tanaman pangan, Kabupaten Barito Kuala sebagai kawasan perdesaan agro minapolitan, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai kawasan perdesaan wisata padang batung.

2.3.1.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dilihat dari cakupan kepesertaan KB di Kalimantan Selatan. masih memerlukan upaya keras. demi menuju masyarakat yang sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari kondisi kepesertaannya pada tahun 2020. Kondisi Kepesertaan KB di Kalimantan Selatanyang Ber-KB Aktif 2020 dapat dilihat pada Tabel II-108.

Tabel II-108 Perkembangan Kepesertaan KB di Kalimantan Selatan Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Peserta KB Aktif					Jumlah
	Implan	Suntikan	Pil	Kondom	IUD/MOW/MOP	
Tanah Laut	3.787	28.936	17.492	454	2.312	52.981
Kotabaru	4.382	20.373	21.338	924	1.329	48.346
Banjar	4.208	45.802	35.503	1.135	2.100	88.748
Barito Kuala	2.774	22.825	17.719	693	1.374	45.385
Tapin	3.956	15.955	12.665	500	1.021	34.097
Hulu Sungai Selatan	1.344	13.468	15.349	193	911	31.265
Hulu Sungai Tengah	2.564	16.763	18.581	628	1.023	39.559
Hulu Sungai Utara	1.515	19.069	14.316	458	1.194	36.552
Tabalong	3.698	18.356	14.567	418	1.637	38.676
Tanah Bumbu	5.403	24.214	18.193	1.124	1.341	50.275
Balangan	1.248	8.755	9.130	264	628	20.025
Banjarmasin	4.265	37.952	33.472	1.299	5.315	82.303
Banjarbaru	2.525	14.730	12.690	1.121	2.503	33.569
Kalimantan Selatan	41.669	287.198	241.015	9.211	22.688	601.781

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan. 2021

Tabel II-109 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0	0	0	35	1,5
2	Usia Kawin Pertama	%	0	0	35	1,7	0
3	Persentase Kader GSI Aktif. (indikator kinerja yang dimaksud tidak ada)	%	0	0	67,51	0	0
4	Persentase BKB Aktif	%	0	0	0	90	97
5	Persentase Sub PPKBD Aktif	%	0	0	0	80	75

Sumber: Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Prov. Kalimantan Selatan 2021

Grand Design Pembangunan Kependudukan sebenarnya sudah terbentuk di hampir 13 kab/kota pada Prov. Kalimantan Selatan, namun alasan belum maksimalnya pelaksanaan penyusunan GDPK dikarenakan terkendala dengan regulasi dan perlu adanya penyesuaian dengan visi dan misi bupati terpilih dalam pilkada dan GDPK belum menjadi prioritas bagi kab/kota.

Berdasarkan data *Unmed Need* di Kalimantan Selatan sebesar 10,8% menunjukkan bahwa memang masih banyak PUS yang ingin berKB namun belum terlayani. Hal ini disebabkan oleh banyak factor, antara lain karakteristik demografi, social ekonomi, akses dan kualitas pelayanan. Hal ini diperparah dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai informasi KB.

Berdasarkan hasil Laporan Indeks Kinerja Utama BKKBN tahun 2020, dapat dilihat bahwa capaian mCPR di Kalimantan Selatan sebesar 67,32%. Angka ini menunjukkan bahwa kesertaan berKB PUS di Kalimantan Selatan sudah cukup tinggi, hanya memang pilihan yang kontrasepsi yang digunakan masih yang non MKJP.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan menjalin kerja sama dengan mitra kerja yaitu IBI dan TNI serta BKKBN juga menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi selalu ada.

Masih tinggi PUS yang putus ber KB disebabkan karena :

- a. Selama adanya Pandemi Covid 19 terdapat perubahan akses pelayanan KB. Akses pelayanan KB ada pembatasan pelayanan KB di



- Puskesmas maupun RS. Selain itu pada beberapa daerah masih terdapat kekurangan akses kesehatan.
- b. Masyarakat merasa takut untuk datang ke Puskesmas atau Klinik PMB maupun RS selama adanya Pandemi Covid-19
 - c. Tingginya minat PUS untuk menggunakan KB Non MKJB. Capaian KB MKJP di Kalimantan Selatan masih rendah berkisar 11,02% berdasarkan data Laporan Statistik Rutin BKKBN, sampai dengan bulan September 2021
 - d. Kurangnya KIE dari Pengelola Program KB
 - e. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang KB MKJP

2.3.1.2.8 Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), sasaran dalam sistranas yaitu terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif atau dapat diartikan memiliki aksesibilitas yang tinggi. Jaringan pelayanan transportasi dapat menjangkau seluas mungkin wilayah nasional dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Pelayanan umum pada urusan perhubungan meliputi perhubungan darat (angkutan darat dan ASDP), perhubungan laut, perhubungan udara, dan perkeretaapian. Pelayanan urusan perhubungan dapat dilihat dari jumlah penumpang dan barang yang dapat terangkut oleh angkutan baik darat, laut, maupun udara.

Pemerintah dalam membuat peraturan yang mengatur tentang transportasi umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Suatu kebijakan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan publik. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pemerintah membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan. Dinas Perhubungan sendiri mengatur tentang peraturan lalu lintas dan sistem transportasi, pemberian ijin trayek, uji kir angkutan yang layak jalan, pemberian marka jalan, penyediaan halte dan jaringan sarana dan prasarana lainnya. Ditemuinya di lapangan bahwa kualitas fasilitas angkutan umum yang tersedia masih rendah dikarenakan kurang tegasnya penegakan hukum terhadap penyelenggara jasa angkutan



umum untuk melakukan peremajaan terhadap usia angkutan lebih dari 10 tahun. Hal ini lah yang menjadi salah satu pemicu banyaknya moda angkutan umum mengalami penurunan performance dan pada akhirnya penumpang beralih kepada penggunaan kendaraan pribadi.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 131.281 unit dan pertumbuhannya setara dengan 7,5% pertahun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan perhitungan rata-rata, maka pertumbuhan perbulan mencapai kurang lebih 11.000 unit. Hal ini menyebabkan kemacetan dan penundanaan arus lalu lintas yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan dan menambah kesemrawutan kota. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, gas buang kendaraan bermotor sebagai sumber polusi udara pada kota-kota besar juga mengalami peningkatan dimana kontribusinya telah mencapai 60-70%.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2009 telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapatkan bantuan internasional dari kondisi tanpa adanya intervensi aksi mitigasi (*business as usual/BAU*). Kemudian pada COP 21 di Paris Perancis, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan komitmen baru Indonesia tahun 2030 yang akan menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan skenario *fair* (mengggunakan kemampuan sendiri) dan menjadi 41% dengan skenario ambisius (jika mendapat dukungan Internasional)

Melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Peraturan gubernur No 14 Tahun 2013 tentang rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca.

A. Angkutan Darat

1. Terminal Penumpang

Terminal penumpang di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 2 tipe yaitu tipe A (kewenangan pusat) sebanyak 1 terminal dan tipe B (kewenangan provinsi) sebanyak 5 terminal. Berikut merupakan sejumlah terminal yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel II-110 Data Terminal Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

No.	Tipe Terminal	Nama Terminal	Lokasi	Aksesibilitas
1	Terminal Tipe A	Gambut Barakat	Kab. Banjar	Sebagai titik simpul transportasi keluar masuk Wilayah Regional Kalimantan yang berfungsi melayani kendaraan umum antar kota antar provinsi (AKAP)
2	Terminal Tipe B	Terminal Km 6 Kayuh Baimbai	Kota Banjarmasin	Sebagai titik simpul akses menuju Pelabuhan Trisakti, Bandara Syamsudin Noor serta menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan
3	Terminal Tipe B	Terminal Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu	Sebagai titik simpul akses menuju Pelabuhan Laut Batulicin, Pelabuhan Penyeberangan ke Kotabaru menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan
4	Terminal Tipe B	Terminal Kotabaru	Kabupaten Kotabaru	Sebagai titik simpul akses menuju Tanah Bumbu- Tanah Laut- Banjarmasin dan menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan
5	Terminal Tipe B	Terminal Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sebagai titik simpul akses menuju Tanjung – Barabai-Kandangan – Rantau – Martapura-Banjarmasin dan menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan
6	Terminal Tipe B	Terminal Tabalong	Kabupaten Tabalong	Sebagai titik simpul akses menuju Paringin- Barabai- Kandangan- Rantau- Martapura- Banjarmasin dan menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan

Sumber Data : Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Selatan, Tahun 2021

2. Bus Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) merupakan layanan bus antar kota yang menghubungkan dua kota pada provinsi yang berbeda dengan menggunakan kendaraan bus umum dan terikat dengan trayek angkutan. Bus AKAP memiliki jadwal yang tetap, pelayanan yang cepat, dilayani oleh bus umum, tersedia terminal tipe A pada awal pemberangkatan, persinggahan dan terminal tujuan.



Gambar II-44 Bus AKAP Prov. Kalimantan Selatan

Sumber: BPTD XV Kalimantan Selatan, 2021

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Bus Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebanyak 10 unit dimana yang sampai sekarang masih aktif beroperasi yaitu sebanyak 8 unit dengan jenis kendaraan bus sedang. Trayek yang dilalui Bus AKAP sebagaimana tercantum pada Tabel II-111 berikut.

Tabel II-111 Trayek dan Tarif Bus AKAP

No.	Trayek / Jurusan
1.	Banjarmasin - Batulicin
2.	Banjarmasin - Sengayam
3.	Banjarmasin - Kerang
4.	Banjarmasin - T. Grogot
5.	Banjarmasin - Penajam
6.	Banjarmasin - Kuaro
7.	Banjarmasin - Balikpapan
8.	Banjarmasin - Samarinda
9.	Batulicin - Kerang
10.	Batulicin - T. Grogot
11.	Batulicin - Balikpapan
12.	Batulicin - Samarinda
13.	Sengayam - T. Grogot
14.	Sengayam - Balikpapan
15.	Sengayam - Samarinda
16.	T. Grogot - Balikpapan
17.	T. Grogot - Samarinda
18.	T. Grogot - Batulicin
19.	T. Grogot - Banjarmasin

Sumber: BPTD XV Kalimantan Selatan, 2021

3. Bus Rapid Transit Banjarbakula

Bus Rapid Transit (BRT) merupakan sistem transit massal berbasis bus yang memberikan mobilitas cepat, nyaman dan berbiaya rendah dalam pelayanannya sebagai angkutan dalam perkotaan. BRT menggunakan jalur

husus dan pelayanan prima terhadap pengguna yang pada dasarnya adalah mengadaptasi karakteristik kinerja dan keandalan pelayanan dari sistem transit modern berbasis dengan biaya yang lebih rendah.

Tabel II-112 Koridor Pelayanan BRT Banjarbakula

No.	Koridor	Rute Koridor
1.	Koridor I	Km.0 Banjarmasin – Lambung Mangkurat – Jl. A. Yani – Terminal Km 6 Banjarmasin – Terminal Km 17 Gambut Barakat (Pulang Pergi)
2.	Koridor II	Terminal Km 17 Gambut Barakat – Jl. A. Yani – Terminal Banjarbaru (Pulang Pergi)
3.	Koridor III	Terminal Km 17 Gambut Barakat – Liang Anggang – Simpang 3 Trikora/A. Yani – Jl. Trikora – Simpang 3 Cempaka – Jl. Cempaka – Terminal Banjarbaru – Martapura (Pulang Pergi)
4.	Koridor IV	Handil Bakti Barito Kuala – Jl. Hasan Basri – Jl. Sultan Adam – Jl. Syarif Hidayatullah – Jl. Veteran – Jl. Pramuka – Terminal Km 6 Banjarmasin (Pulang Pergi)
5.	Koridor V	Terminal Km 17 Gambut Barakat – Liang Anggang – Jl. Gubernur Soebarjo – Pelabuhan Trisakti (Pulang Pergi)
6.	Koridor VI	Handil Bakti – Jl. Trans Kalimantan – Jl. (Banjarmasin – Marabahan) – Terminal Marabahan (Pulang Pergi)
7.	Koridor VII	Terminal Km. 17 Gambut Barakat – Liang Anggang – Jl. A. Yani – Bentok (Pulang Pergi)
8.	Koridor VIII	Bentok – Bati-Bati – Tambang Ulang – Pelaihari (Pulang Pergi)
9.	Koridor IX	Terminal Km. 17 Gambut Barakat – Bandara Syamsudin Noor (Pulang Pergi)

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Selatan, 2021

4. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Berdasarkan data jumlah kecelakaan lalu lintas dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, total pada Tahun 2020 terdapat 632 kasus kecelakaan lalu lintas dan pada Tahun 2021 terdapat peningkatan menjadi 680.

Tabel II-113 Data Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi Kalimantan Selatan

NO	KAB/KOTA	JUMLAH LAKA			
		2018	2019	2020	2021
1	Kota Banjarmasin	18	31	19	23
2	Kota Banjarbaru	63	109	74	73
3	Kabupaten Banjar	68	110	88	76
4	Kabupaten Tapin	24	52	44	34
5	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	35	57	42	53



NO	KAB/KOTA	JUMLAH LAKA			
		2018	2019	2020	2021
6	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	44	60	56	63
7	Kabupaten Hulu Sungai Utara	11	40	35	39
8	Kabupaten Tabalong	29	63	31	36
9	Kabupaten Balangan	8	18	30	23
10	Kabupaten Kotabaru	42	86	83	75
11	Kabupaten Tanah Bumbu	62	86	52	60
12	Kabupaten Tanah Laut	52	49	38	84
13	Kabupaten Barito Kuala	29	45	40	41
KALIMANTAN SELATAN		485	806	632	680

Sumber: Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021

B. Angkutan Sungai dan Laut

Provinsi Kalimantan Selatan yang terkenal sebagai provinsi yang memiliki jumlah sungai yang banyak dan digunakan sebagai jalur transportasi sejak zaman dahulu hingga sekarang akan sangat memiliki kerawanan akan terjadinya kecelakaan di sungai. Pengawasan lalu lintas sungai dilakukan dalam rangka menciptakan kenyamanan dan kelancaran pengguna lalu transportasi sungai. Sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang meliputi : keselamatan kapal, pengawakan kapal, manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal; pemuatan, dan status hukum kapal. Tetapi pada kenyataannya penegakan hukum terhadap pengawasan dan pengendalian lalulintas perairan sungai belum secara maksimal dilaksanakan, karena luasnya cakupan wilayah pengawasan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 7 pelabuhan yang beroperasi dengan 2 jenis pelabuhan yaitu pelabuhan sungai dan danau serta pelabuhan penyeberangan yang memiliki hirarki pelabuhan yaitu pengumpan. Lokasi pelabuhan tersebar di beberapa kabupaten/kota diantaranya Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berikut merupakan data eksisting pelabuhan yang status kepemilikan dan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel II-114 Data Eksisting Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Nama Pelabuhan	Lokasi Pelabuhan	Status Aset/ Kepemilikan	Operator	Kondisi Pelabuhan	Aktivitas di Pelabuhan
1	Negara	Kab. HSS	Kab. HSS	UPTD	Baik	Penumpang&Barang
2	Dermaga Sungai di Lok Baintan	Kab. Banjar	Kab. Banjar	-	NA	NA
3	Dermaga Alalak	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	UPTD	Baik	Penumpang&Barang
4	Dermaga Jelapat	Kab. Batola	Kab. Batola	UPTD	Baik	Penumpang&Barang
5	Dermaga Banjarraya	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	UPTD	Baik	Penumpang&Barang
6	Dermaga Saka Kajang	Kab. Batola	Kab. Batola	UPTD	Baik	Penumpang&Barang
7	Pasar Baru	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	-	Baik	Penumpang&Barang

Sumber Data : Dinas Perhubungan Prov/Kab/Kota, Tahun 2021

Selama tahun 2021 jumlah barang yang terbongkar di seluruh pelabuhan mencapai (152.071.896 ton) meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (75.892.854 ton) tahun 2020. Tahun 2021 Barang yang dimuat sebanyak (301.101.062 ton), meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (284.064.892 ton). Arus kapal dalam negeri mengalami fluktuasi, dimana dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, meski tahun 2020 mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 meningkat menjadi 71.835 unit dari 22.261 unit pada tahun 2017. Berikut merupakan aktivitas pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017-2021.

Tabel II-115 Aktivitas Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017-2021

Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021
Bongkar Barang Ton	108.334.931	112.076.221	93.634.708	75.892.854	152.071.896
Muat Barang Ton	272.879.150	317.525.112	262.500.114	284.064.892	301.101.062
Arus Kapal Dalam Negeri Unit	22.261	70.034	79.413	65.623	71.835
Arus Kapal Luar Negeri Unit	63	2.552	14.097	4.275	4.058
Penumpang Turun Jiwa	51.618	91.642	184.380	58.208	82.099
Penumpang Naik Jiwa	38.233	57.010	121.770	36.097	51.202

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Selatan 2021

C. Angkutan Udara

Jumlah pesawat yang datang di bandara pada tahun 2018 mencapai 15.956 unit dan menurun menjadi 13.760 unit pada tahun 2019. Demikian pula kondisi yang sama terjadi pada pesawat yang berangkat pada tahun 2018 sebanyak 15.946 unit dan menurun menjadi 13.735 unit pada tahun 2019. Dengan adanya penurunan jumlah pesawat yang datang dan berangkat, maka terjadi pula penurunan pada arus penumpang yang datang dan berangkat.

Arus penumpang saat datang pada tahun 2018 mencapai 1.964.788 orang dan menurun menjadi 1.640.407 orang pada tahun 2019, sedangkan arus penumpang saat berangkat pada tahun 2018 mencapai 1.885.170 orang dan menurun menjadi 1.576.199 orang pada tahun 2019. Adapun jumlah penumpang yang transit pada tahun 2018 sebanyak 78.117 orang dan menurun pula menjadi 75.691 orang pada tahun 2019. Berikut merupakan aktivitas bandara di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2013-2019.

Tabel II-116 Aktivitas Bandara di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2019

Aktivitas Di Bandara Kalimantan Selatan		Jumlah	
Pesawat Terbang (unit)	Datang	2013	19.869
		2014	18.359
		2015	16.391
		2016	16.662
		2017	16.877
		2018	15.956
		2019	13.760
	Berangkat	2013	19.881
		2014	18.349
		2015	16.393
		2016	16.684
		2017	16.887
		2018	15.946
		2019	13.735
Arus Penumpang (orang)	Datang	2013	1.993.287
		2014	1.904.335
		2015	1.739.587
		2016	1.844.196
		2017	1.909.536
		2018	1.964.788
		2019	1.640.407
	Berangkat	2013	2.006.783
		2014	1.912.858
		2015	1.731.874
		2016	1.843.559
		2017	1.889.999
		2018	1.885.170
		2019	1.576.199
Transit	2013	57.701	
	2014	95.945	
	2015	66.815	
	2016	77.27	
	2017	74.549	
	2018	78.117	
	2019	75.691	

Sumber: Statistik Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, 2020

Tabel II-117 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016-2021 Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Moda Transportasi Angkutan Umum Terhadap Frekuensi Perjalanan	%	65	65	65	68	75	
Ruas Jalan Persentase Provinsi yang Terpasang Fasilitas Keselamatan Jalan	%	16,78	18,57	20,35	23,84	32,85	
Persentase panjang alur pelayaran sungai yang memenuhi standar	%	57	57	57	60	65	
Rasio konektivitas provinsi							0.5987
On time performance layanan transportasi	%						34
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	%						77.5
Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 100.000 keberangkatan							2.73
V/C ratio jalan provinsi							0.265

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

2.3.1.2.9 Komunikasi dan Informatika

Blank spot merupakan kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tidak terlingkupi oleh sinyal komunikasi, baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet. Bila suatu tempat terjadi *blank spot*, maka komunikasi dua arah menjadi terhambat.

Berdasarkan data sebaran desa bebas *blank spot* dan desa *blank spot* sebagaimana tercantum pada Tabel II-106, ada 12 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang masih memiliki desa *blank spot*. Area *blank spot* terbesar berada di Kabupaten Barito Kuala dengan jumlah desa *blank spot* mencapai 72 desa. Untuk Kota Banjarmasin secara keseluruhan sudah bebas *blank spot*.

Tabel II-118 Persebaran Desa Bebas *Blank Spot* dan Desa *Blank Spot*

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Keseluruhan	Jumlah Desa Bebas Blankspot	Jumlah Desa Blankspot
Kabupaten Tanah Laut	130	90	40
Kabupaten Kotabaru	198	171	27
Kabupaten Banjar	277	231	46
Kabupaten Barito Kuala	195	123	72
Kabupaten Tapin	126	120	6
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	144	124	20
Kabupaten Hulu Sungai Tengah	161	128	33



Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Keseluruhan	Jumlah Desa Bebas Blankspot	Jumlah Desa Blankspot
Kabupaten Hulu Sungai Utara	214	205	9
Kabupaten Tabalong	121	103	18
Kabupaten Tanah Bumbu	144	127	17
Kabupaten Balangan	152	137	15
Kota Banjarmasin	52	52	-
Kota Banjarbaru	20	18	2
Total	1934	1629	305

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Peningkatan teknologi sistem telekomunikasi seluler melalui penempatan *Base Transceiver Station (BTS)* merupakan upaya dalam mengurangi *blank spot area* dan memaksimalkan cakupan area terlayani pada suatu wilayah. Jumlah BTS di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum pada Tabel II-106, pada tahun 2017 terdapat sebanyak 1.423 unit BTS, meningkat pada tahun 2018 menjadi 1.595 unit BTS, dan pada tahun 2019 menjadi 1.725 unit BTS. Pada Tahun 2019 dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, jumlah unit BTS terbanyak tersebar di Kabupaten Banjar sebanyak 254 unit, sedangkan jumlah yang terkecil berada di Kabupaten Hulu Sungai dengan jumlah BTS sebanyak 52 unit.

Tabel II-119 Jumlah BTS di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 - 2019

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah (Unit)		
		2017	2018	2019
1.	Kabupaten Balangan	49	52	60
2.	Kabupaten Banjar	209	254	254
3.	Kabupaten Barito Kuala	85	95	116
4.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	85	89	98
5.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	69	78	78
6.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	52	52	52
7.	Kabupaten Kotabaru	165	133	143
8.	Kabupaten Tabalong	N/A	113	140
9.	Kabupaten Tanah Bumbu	160	163	177
10.	Kabupaten Tanah Laut	168	187	214
11.	Kabupaten Tapin	75	85	85
12.	Kota Banjarbaru	124	105	129
13.	Kota Banjarmasin	182	179	179
	Kalimantan Selatan	1.423	1.585	1.725

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Berdasarkan data kepemilikan akses internet di masyarakat, jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas internet dan pelanggan telepon kabel semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini merupakan dampak dari tingginya jumlah



pengguna internet di masa sekarang dan adanya dampak Covid-19 yang menyebabkan peningkatan usaha yang menggunakan jasa online. Adapun jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas internet di kantor desa/lurah dan jumlah desa/kelurahan yang memiliki keluarga pelanggan telepon tetap kabel dapat dilihat pada Tabel II-120 dan Tabel II-121.

Tabel II-120 Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Internet di Kantor Desa/Lurah menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah (Desa)

Provinsi	TAHUN								
	Perkotaan+Perdesaan			Perdesaan			Perkotaan		
	2014	2018	2019	2014	2018	2019	2014	2018	2019
Kalimantan Selatan	139	985	1,037	75	767	798	64	218	239
Indonesia	9.279	38.646	42.118	4.254	25.802	28.560	5.025	12.844	13.558

Sumber : BPS RI Tahun 2021

Tabel II-121 Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Keluarga Pelanggan Telepon Tetap Kabel Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah (Desa)

Provinsi	TAHUN								
	Perkotaan+Perdesaan			Perdesaan			Perkotaan		
	2014	2018	2019	2014	2018	2019	2014	2018	2019
Kalimantan Selatan	290	204	178	85	51	46	205	153	132
Indonesia	16.485	11.701	10.395	5.093	3.297	2.899	11.392	8.404	7.496

Sumber : BPS RI Tahun 2021

Tabel II-122 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase layanan informasi publik berbasis IT	%	40	40	37	60	70
2	Persentase peningkatan pengelolaan sumberdaya komunikasi publik	%	18	18	18	30	40
3	Persentase peningkatan pengelolaan sumberdaya komunikasi publik	%	20	20	20	90	90
4	Persentase peningkatan pengelolaan sumberdaya komunikasi publik	%	15	15	15	30	45

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Beberapa urusan yang menjadi tugas dan wewenang bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah dimulai dari penyediaan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan hubungan komunikasi Pemerintah Daerah dan publik serta pemberian dukungan pengelolaan Komisi Informasi Daerah termasuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.



Dalam hal penyediaan informasi penyelenggaraan daerah telah dilakukan monitoring opini dan aspirasi publik serta monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah. Khusus untuk monitoring Opini telah dilakukan pengelolaan aduan masyarakat melalui sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) yang di Kalimantan Selatan lebih dikenal dengan istilah LAPORPAMAN. Tercatat dari tahun 2017 s/d tahun 2021 sebanyak 2.021 aduan masyarakat yang masuk melalui SP4N-LAPOR dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II-123 Rekapitulasi Data Aduan Masyarakat yang Masuk Melalui SP4N-LAPOR (LAPORPAMAN) Tahun 2017 - 2021

NO	Tahun	Trending Topik	Jumlah	Aduan yang Ditindaklanjuti	Aduan yang Diarsipkan
1.	2017	1. Kesehatan 2. Administrasi 3. Ruang publik	8	8	0
2.	2018	1. Perhubungan 2. Usulan Perbaikan 3. Kepegawaian	85	84	1
3.	2019	1. Infrastruktur 2. Lingkungan Hidup dan Kepegawaian 3. Pajak dan Retribusi	367	314	53
4.	2020	1. Pendidikan Dasar dan Menengah 2. Transportasi Darat 3. Infrastruktur	679	583	96
5.	2021	1. Infrastruktur 2. Infrastruktur Pendukung 3. Hak Pekerja	882	776	106
TOTAL ADUAN : 2.021					

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Adapun monitoring/ pemantauan terhadap isu publik tercatat sebanyak 2.768 isu publik yang beredar sepanjang periode tahun 2017 sd 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II-124 Rekapitulasi Top Isu Publik yang Beredar di Masyarakat Tahun 2017 - 2021

No	Top Issue	Tahun	Jumlah
1.	Ekonomi	2017	288
2.	Lingkungan dan Satwa	2018	432
3.	Kebencanaan	2019	540
4.	Sosial dan Kesehatan	2020	684
5.	Sosial dan Kesehatan	2021	756
Total Isu : 2.768			



Sedangkan dalam hal penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan melalui media komunikasi publik dan media layanan informasi publik yang tersedia antara lain: melalui Radio LPPL Abdi Persada FM , portal berita Media Center dan layanan PPID serta melalui media komunikasi luar ruang Videotron sebanyak 2 (dua) unit.

Adapun jumlah informasi yang telah di sebarluaskan hingga saat ini selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah berjumlah sebanyak **40.672** Informasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II-125 Tabel Jumlah Informasi Publik Yang Disebarluaskan

No	Jenis Layanan Publik	Jenis Informasi Per Tahun					Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Radio LPPL Abdi Persada FM	720	900	1.000	2.050	2.200	6.900
2	Media Center	4.786	3.321	5.109	3.075	5.054	21.327
3	PPID	0	0	40	100	306	446
4	Videotron	0	0	226	447	526	1.199
TOTAL							40.672

Informasi yang disebarluaskan terdiri dari informasi pembangunan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten/kota yang terkait dengan pemerintah provinsi, baik itu menyangkut pendidikan, sosial dan budaya, hukum, kriminalitas, ekonomi, pariwisata, olahraga dan kesehatan. Khusus untuk layanan PPID Informasi yang dikecualikan, informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat. Layanan PPID baru beroperasi pada tahun 2019 dikarenakan sebelumnya PPID melekat pada Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga data informasi yang dihimpun dimulai sejak tahun 2019. Adapun media informasi Videotron baru dioperasikan dari tahun 2019 sedangkan tahun sebelumnya masih dalam tahap pemasangan dan penyesuaian, sehingga data informasi yang dihimpun dimulai sejak tahun 2019.

2.3.1.2.10 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam mengembangkan dan memberdayakan perekonomian rakyat. Pada tahun 2019, jumlah koperasi di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2.606 unit yang sebagian besar merupakan jenis koperasi pegawai negeri (437 unit), koperasi serba usaha (503 unit), dan koperasi unit



desa (398 unit). Jumlah koperasi mengalami peningkatan dari tahun 2016 – 2019 sebagaimana yang terlihat pada Tabel II-126.

Tabel II-126 Jumlah Unit Koperasi Menurut Jenis Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

Jenis Koperasi	2016	2017	2018	2019
Koperasi Unit Desa	383	385	385	384
Koperasi Pegawai Negeri	451	444	451	437
Koperasi Karyawan	213	214	212	207
Koperasi Industri Kerajinan	14	14	13	13
Koperasi Angkutan/ Darat/ Laut/Sungai	22	23	24	23
Koperasi Serba Usaha	482	489	497	503
Koperasi Generasi Muda/ Mahasiswa	30	27	30	28
Koperasi Veteran	12	11	10	10
Koperasi Wredatama	19	13	15	14
Koperasi Wanita	86	88	88	88
Koperasi Simpan Pinjam	66	70	73	75
Koperasi Jasa/Profesi	17	28	33	46
Koperasi Pasar	32	33	32	31
Koperasi Pondok Pesantren	69	68	68	67
Koperasi Pertanian	146	145	139	140
Koperasi Perikanan/Nelayan	14	15	19	21
Koperasi Perkebunan	58	58	62	62
Koperasi Peternakan	9	9	11	11
Koperasi Kehutanan	2	3	3	3
Koperasi Angkatan Darat	26	28	25	26
Koperasi Angkatan Laut	3	1	3	3
Koperasi Angkatan Udara	1	1	1	1
Koperasi Kepolisian	18	18	18	18
Koperasi Jamu Gendong	-	-	-	-
Koperasi PEPABRI	8	10	7	6
Koperasi Pertambangan	3	3	3	3
KJKS	59	59	58	62
Koperasi Produsen	2	28	29	30
Koperasi Konsumen	-	1	2	2
Koperasi Sekunder	25	25	25	25
Koperasi Lain-Lain	289	276	284	267
Jumlah	2.559	2.587	2.620	2.606

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2021

Usaha mikro dan menengah di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 yang tersebar di kabupaten/kota se Kalimantan Selatan meliputi Usaha Mikro sebanyak 376.233 Unit. Usaha Menengah sebanyak 3.140 Unit. dan Usaha Kecil sebanyak 32.533 Unit. Jenis usaha untuk usaha kecil dan mikro terbanyak adalah jenis usaha agribisnis yaitu 1.122 unit usaha. sedangkan untuk usaha menengah terbanyak

adalah jenis usaha bidang lainnya sebanyak 267 unit usaha menengah di Kalimantan Selatan. Lebih lengkapnya diuraikan pada Tabel II-127 dibawah Berikut;

Tabel II-127 Jumlah Jenis Usaha Mikro Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

NO	KABUPATEN / KOTA	KULINER	FASION	PENDDIDIKAN	OTOMOTIF	AGRIBISNIS	TEKNIK	BIDANG	JUMLAH
							INTERNET	LAINYA	
1	Tanah Laut	22.943	96	-	69	231	-	364	23.703
2	Kotabaru	625	586	15	118	1.305	-	5.543	8.192
3	Banjar	35.105	342	-	304	26.980	-	4.527	67.258
4	Barito Kuala	414	33	-	85	33.868	-	1.090	35.490
5	Tapin	317	60	-	51	44	18	706	1.196
6	H.S. Selatan	6.131	-	-	-	322	84	20.705	27.242
7	H.S. Tengah	3.930	892	44	105	854	3	19.821	25.649
8	H.S Utara	4.119	1.701	134	326	78.458	5	23.378	108.121
9	Tabalong	4.871	658	-	383	455	-	12.403	18.770
10	Tanah Bumbu	2.124	35	-	126	25	-	1.814	4.124
11	Balangan	4.879	-	-	162	-	144	6.032	11.217
12	Banjarmasin	7.984	2.985	1.099	1.884	3.456	1.885	15.928	35.221
13	Banjarbaru	3.127	1.743	133	1.513	714	97	2.723	10.050
	Jumlah	96.569	9.131	1.425	5.126	146.712	2.236	115.034	376.233

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2020

Tabel II-128 Jumlah Jenis Usaha Menengah Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

N o	Kabupaten Kota	Kuliner	Fashion	Pendidikan	Otomotif	Agribisnis	Teknik Internet	Bidang Lainnya	Jumlah
1	Tanah Laut	0	0	0	0	0	0	301	301
2	Kotabaru	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Banjar	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Barito Kuala	1	2	0	7	10	0	50	70
5	Tapin	0	0	0	0	0	0	0	0
6	H.S. Selatan	0	0	0	0	0	0	60	60
7	H.S. Tengah	0	104	0	0	0	0	44	148
8	H.S Utara	0	63	0	112	0	0	725	900
9	Tabalong	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tanah Bumbu	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Balangan	0	0	0	0	10	0	8	18
12	Banjarmasin	98	148	49	99	279	48	922	1643
13	Banjarbaru	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	99	317	49	218	299	48	2.110	3.140

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2021

Tabel II-129 Jumlah Jenis Usaha Kecil Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

No	Kabupaten / Kota	Kuliner	Fashion	Pendidikan	Otomotif	Agribisnis	Teknik Internet	Bidang Lainnya	Jumlah
1	Tanah Laut	-	-	-	30	-	-	1.000	1.030
2	Kotabaru	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Banjar	10	5	-	3	69	1	120	208
4	Barito Kuala	15	20	-	35	200	-	222	492
5	Tapin	-	-	-	-	-	-	-	-



No	Kabupaten / Kota	Kuliner	Fashion	Pendidikan	Otomotif	Agribisnis	Teknik Internet	Bidang Lainnya	Jumlah
6	H.S. Selatan	118	45	2	70	-	-	17.926	18.161
7	H.S. Tengah	54	885		109	373	-	1.723	3.144
8	H.S. Utara	452	576	-	385	-	-	3.030	4.443
9	Tabalong	731	-	-	-	-	-	-	731
10	Tanah Bumbu	13	30	2	32	10	2	100	189
11	Balangan	60	6	2	17	12	3		100
12	Banjarmasin	819	260	74	409	373	223	1.572	3.730
13	Banjarnbaru	45	21	27	79	85	18	30	305
	Jumlah	2.317	1.848	107	1.169	1.122	247	25.723	32.533

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2021

Tabel II-130 Rekap Data UMKM Provinsi Kalimantan Selatan

No	Klasifikasi	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Usaha Mikro	147.070	157.096	290.335	320.557	333.919	376.233
2	Usaha Kecil	10.304	11.437	12.900	13.524	20.090	32.533
3	Usaha Menengah	2.438	2.676	2.778	2.994	3.308	3.140
	Total	159.812	171.209	306.013	337.075	357.317	411.906

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2021

Tabel II-131 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Koperasi Aktif Per Tahun		-	-	66	66,81	57,81
2	Persentase Koperasi yang menyelenggarakan RAT		-	-	84	34,85	37,84
3	Persentase Penumbuhan Koperasi Baru		-	-	3	3,28	10,81
4	Persentase Peningkatan Nilai Bisnis Koperasi dan UK		-	-	6,93	3,56	4,91
5	Persentase Peningkatan Kemandirian (struktur) Permodalan Koperasi dan UK		-	-	93,63	72,97	88,74
6	Jumlah Koperasi dan UK yang memiliki Legalitas Usahanya	Unit	-	-	30	35	35
7	Jumlah Nilai Transaksi Promosi	Juta	-	-	360	750	0
8	Jumlah Usaha Kecil yang mampu mengakses Pasar Modern	Unit	-	-	20	25	20
9	Jumlah Jenis Produk Unggulan Koperasi dan UK yang mampu masuk ke Pasar Luar Daerah	Item	-	-	3	3	5
10	Persentase Koperasi yang Patuh pada Penerapan Perangkat Peraturan Perundangan		-	-	30	33	35
11	Persentase Koperasi Usaha Simpan Pinjam yang sehat		-	-	25	20	19
12	Persentase SDM yang memiliki Pengetahuan dan Pengalaman tentang Perkoperasian dan UK		-	-	70	70	70
13	Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal dan Non Formal		69,15	72,77	56,54	50,64	94,52
14	Rerata Hasil Post Test PKB PAUD		67	68	69	0	0

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2021

2.3.1.2.11 Penanaman Modal

Investasi dalam pengembangan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan masih sangat dibutuhkan dalam memberdayakan setiap sumber daya baik manusia maupun alam. Investasi berupa penanaman modal usaha di Provinsi Kalimantan Selatan sudah mulai merata di setiap kabupaten/kota meskipun masih terdapat beberapa kabupaten yang belum diminati investor secara umum. Berikut ini adalah data investasi daerah menurut kabupaten dan kota tahun 2017.

Tabel II-132 Jumlah Proyek, Rencana, dan Realisasi Investasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2020 PMA dan PMDN

Kab/Kota	PMA			PMDN		Total	
	Proyek	US\$ Ribu	Rp. Juta	Proyek	Rp. Juta	Proyek	Rp. Juta
KAB.TABALONG	22	102.477,70	1.475.678,88	118	334.935,00	140	1.810.613,88
KAB. BALANGAN	15	52.084,20	750.012,48	71	212.015,20	86	962.027,68
KAB. BARITO KUALA	28	7.348,00	105.811,20	37	189.990,20	65	295.801,40
KAB. BANJAR	16	9.879,20	142.260,48	227	434.744,60	243	577.005,08
KAB.TANAH LAUT	48	13.262,70	192.818,88	143	1.421.944,30	191	1.614.763,18
KAB.HULU SUNGAI SELATAN	0	0	0	27	119.081,30	27	119.081,30
KOTA BANJARMASIN	61	2.846,30	41.077,86	309	497.985,10	370	539.062,96
KAB.TANAH BUMBU	42	19.303,60	278.234,70	321	724.410,60	363	1.002.645,30
KAB. TAPIN	12	3.010,30	43.484,40	52	125.574,50	64	169.058,90
KOTA BANJARBARU	30	7,6	111,48	214	88.605,00	244	88.716,48
KAB.KOTABARU	50	30.244,70	435.771,96	111	108.015,20	161	543.787,16
KAB.HULU SUNGAI TENGAH	3	328,5	4.730,40	35	28.359,40	38	33.089,80
KAB. HULU SUNGAI UTARA	0	0	0	7	654,2	7	654,2
TOTAL	327	240.792,80	3.469.992,72	1672	4.286.314,60	1999	7.756.307,32

Sumber: BPS. Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka. 2020

Tabel II-133 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun	9,50T	6,25T	11,70T	15,65T	7,75T
2	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	9,50T	6,25T	11,70T	15,65T	7,75T
3	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	B	B	B (82,61)	B (86,79)	A (88,35)

Sumber: Dinas Penanaman Modal Prov. Kalimantan Selatan 2021

2.3.1.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

Kalimantan Selatan Terus Mantapkan Persiapan Atlet Menuju PON Papua Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga

(Dispora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat terus memantapkan persiapan para atlet yang akan dikirim untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua.

Selain terus menggenjot latihan para atlet dari berbagai cabang olahraga. Pemprov Kalimantan Selatan juga tengah menyiapkan alat-alat pertandingan yang akan digunakan atlet saat melakoni ajang olahraga bergengsi nasional tersebut. dan diharapkan agar Kalimantan Selatan Bisa meraih banyak gelar untuk mengharumkan nama baik Kalimantan Selatan di kanca level Nasional nantinya. berikut Data Tabel jumlah peserta yang ikut dalam PON nantinya bisa dilihat pada Tabel II-134 di bawah:

Tabel II-134 Atlet Dan Pelatih Tahun 2021

No	Cabor	Atlet	Pelatih	Jumlah
1	Wushu	3	2	5
2	Billiar	4	2	6
3	Tinju	7	2	9
4	Pencak Silat	3	2	5
5	Kempo	1	1	2
6	Gulat	9	6	15
7	Karate	2	2	4
8	Dayung	28	8	36
9	Atletik	2	2	4
10	Menembak	12	4	16
Total		71	31	102

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kalimantan Selatan

Tabel II-135 Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	0,00	0,00	0,00	47,33	47,43
2	Persentase Pemuda Yang Berperan Aktif di Masyarakat		0,00	0,00	0,02	0,04	0,02
3	Persentase Pemuda Yang Mempunyai Kapasitas Kepemimpinan		0,00	0,00	0,07	0,07	0,13
4	Persentase Pemuda Yang Berwirausaha		0,00	0,00	23,46	23,04	22,13
5	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif		0,00	0,00	16,46	18,99	37,97
6	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga		0,00	10,77	28	35,31	35,31
7	Jumlah Medali Yang Diraih di PON		0,00	15	-	37	-
8	Persentase Peningkatan Tenaga Keolahragaan Berprestasi		0,00	0,00	8,68	13,09	16,07
9	Persentase Atlet Binaan PPLP dan Sentra Olahraga		0,00	0,00	25,78	33,33	0,00
10	Persentase Organisasi Cabang Olahraga Rekreasi Yang Aktif		0,00	0,00	66,67	57,00	57,00
11	Persentase Pelaku Olahraga Mendapat Penghargaan		0,00	0,00	199,00	33,62	20,00



12	Persentase Kemitraan Dengan Pelaku Olahraga		0,00	0,00	111,60	89,80	88,94
13	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga-----delete		0,00	0,00	-	-	-
14	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Berstandar		0,00	72,77	73,75	75,00	76,25

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kalimantan Selatan 2021

2.3.1.2.13 Statistik

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menggambarkan bahwa peran statistik sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Data yang tepat akan sangat membantu dalam proses perencanaan pembangunan. Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik. Adapun statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data dengan cara sensus, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan, statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendelegasikan data statistik kepada pemerintah daerah, khususnya data sektoral. Data sektoral dalam hal ini merupakan data yang diproduksi oleh pengampu urusan dan akan dimanfaatkan secara sektoral pula. Sedangkan data dasar selain bersifat sektoral juga bersifat non sektoral, sehingga dengan demikian pemerintah daerah berkewajiban membangun data sektoral sesuai dengan kewenangan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014.



Sebagai upaya penguatan penyediaan data di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya data statistik sektoral, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 078 Tahun 2021 tentang Satu Data sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan sebagai walidata memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyebarluaskan data tersebut. Dalam proses pengembangan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dibantu oleh Badan Pusat Statistik sebagai pembina data yang akan mengarahkan walidata untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, peran BPS di dalam statistik sektoral adalah memberikan asistensi kepada UPD/SKPD produsen data sektoral, hal ini sesuai dengan peraturan:

Sampai dengan tahun 2020, Provinsi Kalimantan Selatan telah banyak melakukan upaya-upaya pengembangan Satu Data Banua antarlain:

1. Telah Tersedianya Buku Data Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020
2. Jumlah Survey Statistik Sektoral yang telah dilakukan adalah sebanyak 59 Survey
3. Jumlah Kompilasi statistik sektoral yang telah dilakukan adalah sebanyak 200 Kompilasi
4. Jumlah Survey statistik sektoral yang telah mendapat rekomendasi Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 2 Survey
5. Jumlah Kompilasi statistik sektoral yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 2 kompilasi
6. Persentase Capaian Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik Sektoral adalah 27,08%
7. Persentase Capaian Kelengkapan Metadata Indikator Statistik Sektoral adalah 27,08%

2.3.1.2.14 Persandian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan persandian merupakan urusan pemerintah daerah wajib non pelayanan dasar. Artinya pemerintah provinsi memiliki kewajiban menyelenggarakan urusan ini sesuai dengan kewenangan. Salah satu kewenangan adalah pengamanan informasi pemerintah daerah. terlebih pada saat ini sistem informasi pemerintah daerah sudah bersifat paperless atau digital dan online yang dengan mudah diakses oleh siapa saja yang menguasai teknologi informasi.



Berdasarkan arahan Kepala Lembaga Sandi Negara (LSN) yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017, bahwa penyelenggaraan persandian merupakan penjabaran atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang persandian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan, pembiayaan dan pembinaan serta pengawasan. Kalimantan Selatan dalam melaksanakan urusan persandian dikaitkan dengan penyelenggaraan komunikasi dan informasi daerah yang berkaitan dengan aplikasi informasi yang dikembangkan.

2.3.1.2.15 Kebudayaan

Dalam rangka mengangkat harkat dan martabat, kelembagaan sebagai pilar kebudayaan harus dikembangkan. Kelembagaan ini terkait dengan keberadaan unsur budaya yang ingin dikembangkan di Kalimantan Selatan melalui pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan kebudayaan lokal. Tujuan dari pembinaan ini adalah dalam rangka mengawal kebudayaan lokal dalam konstelasi kebudayaan nasional yang berakar pada kebudayaan daerah. Seni dan budaya turut menghiasi kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. Dari seni dan budaya tersebut, kemudian berkembang nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat menangkal pengaruh buruk dari kebebasan yang pesat arus informasi yang global. Oleh karena itu, pelestarian budaya serta nilai-nilai luhur yang tercantum di dalamnya dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia Kalimantan Selatan. Beberapa deskripsi nilai-nilai luhur seni budaya sebagai berikut:

A. Deskripsi Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

Kalimantan Selatan adalah provinsi yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, karena kekayaan budaya Kalimantan Selatan sudah banyak ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia. Warisan Budaya Takbenda (WBTb) ini pada umumnya terdiri dari produk dan proses budaya yang dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa warisan itu mengambil bentuk kekayaan budaya dan dibentuk oleh artefak berwujud seperti bangunan atau karya seni. Namun, banyak bagian budaya tidak berwujud termasuk lagu, musik, tarian, drama, keterampilan, masakan, kerajinan tangan dan festival. Budaya tersebut dapat direkam tetapi tidak dapat disentuh atau disimpan dalam bentuk fisik seperti di museum, tetapi hanya dialami melalui kendaraan yang mengekspresikannya.

Dalam hal ini, Kalimantan Selatan khususnya di Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan sampai saat ini terdapat 33



Karya Budaya yang sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia dari tahun 2013 sampai 2020 sebagai berikut.

Tabel II-136 Daftar Penetapan Warisan Budaya Takbenda Kalimantan Selatan Tahun 2013 - 2020

No	Kode Tetap	Tahun	No. Penetapan	Nama Karya Budaya	Provinsi
1	39	2013	201300039	Sasirangan	Kalimantan Selatan
2	146	2014	201400146	Madihin	Kalimantan Selatan
3	147	2014	201400147	Aruh Baharin	Kalimantan Selatan
4	261	2015	201500261	Pasar Terapung	Kalimantan Selatan
5	262	2015	201500262	Lamut	Kalimantan Selatan
6	263	2015	201500263	Kuriding/ Guriding	Kalimantan Selatan
7	264	2015	201500264	Bubungan Tinggi	Kalimantan Selatan
8	265	2015	201500265	Ba'ayun Mulud/Maulid	Kalimantan Selatan
9	395	2016	201600395	Batatamba	Kalimantan Selatan
10	396	2016	201600396	Mamanda	Kalimantan Selatan
11	397	2016	201600397	Tari Baksa Kambang	Kalimantan Selatan
12	398	2016	201600398	Wayang Kulit Banjar	Kalimantan Selatan
13	399	2016	201600399	Air Guci	Kalimantan Selatan
14	542	2017	201700542	Tari Topeng Banjar	Kalimantan Selatan
15	543	2017	201700543	Kuda Gipang	Kalimantan Selatan
16	544	2017	201700544	Sinoman Hadrah	Kalimantan Selatan
17	545	2017	201700545	Wayang Gung	Kalimantan Selatan
18	546	2017	201700546	Balogo	Kalimantan Selatan
19	765	2018	201800765	Mappanretasi Pagatan	Kalimantan Selatan
20	766	2018	201800766	Tenun Pagatan	Kalimantan Selatan
21	767	2018	201800767	Damarulan/Damarwulan Banjarmasin	Kalimantan Selatan
22	1043	2019	201901043	Nasi Astakona	Kalimantan Selatan
23	1044	2019	201901044	Arsitektur Rumah Lanting	Kalimantan Selatan
24	1045	2019	201901045	Bagasing Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan



No	Kode Tetap	Tahun	No. Penetapan	Nama Karya Budaya	Provinsi
25	1046	2019	201901046	Anyaman Purun Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan
26	1047	2019	201901047	Kurung-kurung	Kalimantan Selatan
27	1048	2019	201901048	Bawanang	Kalimantan Selatan
28	1049	2019	201901049	Itatamba Banua	Kalimantan Selatan
29	1050	2019	201901050	Ma'iwuu	Kalimantan Selatan
30	1051	2019	201901051	Nimbuk	Kalimantan Selatan
31	1205	2020	202001205	Lampit Amuntai	Kalimantan Selatan
32	1204	2020	202001204	Bagandut	Kalimantan Selatan
33	1206	2020	202001206	Tihang Bakambang	Kalimantan Selatan

Sumber: Dinas Kebudayaan Prov. Kalimantan Selatan

B. Jenis-Jenis Kesenian

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekhasan tersendiri dengan suku terbesar yaitu Suku Banjar dengan berbagai jenis kebudayaan yang ada. Jenis kebudayaan tersebut meliputi rumah adat, upacara adat, tarian kesenian, kerajinan tangan khas, dan makanan khas. Berikut merupakan jenis-jenis kebudayaan yang terdapat di Kalimantan Selatan.

Tabel II-137 Jenis Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Kebudayaan	Jenis	
1.	Rumah Adat	Rumah Bubungan Tinggi	Rumah Balai Laki
		Rumah Gajah Baliku	Rumah Palimbangan
		Rumah Palimasan/Rumah Gajah	Rumah Cacak Burung/Rumah Anjung Surung
		Rumah Balai Bini	Rumah Lanting
		Rumah Tadah Alas	Rumah Joglo Gudang/Rumah Bulat
		Rumah Gajah Manyusu	Rumah Bangun Gudang
2.	Upacara Adat	Aruh Ganal	Mandi-mandi
		Bamulud	Baayun Mulud
		Bafimung	Bapukung
		Badudus	Kuntau
		Tradisi Baatar Jujuran	Batapung Tawar
		Tradisi Bausung	Bapupur Basah
		Mappanretasi	
3.	Tarian Kesenian	Tari Baksa Kembang	Tari Piluntang
		Tari Radap Rahayu	Tari Maitik
		Tari Tandik Padalaman	Tari Waris Sumangat
		Tari Persembahan Nuansa	Tari Benteng Carucuk
		Tari Tampurung	Tari Lalakun Amban
		Tari Maragap Humbayang	Tari Amban Pangina
		Tari Giring-Glring	Tari Limpuar
		Tari Manangguk	Tari Lengguk Parimata
		Tari Tantayungan	
4.	Kerajinan Tangan Khas	Lampit	Sulam Air Guci
		Tikar Purun	Pengrajin Batu Intan



No.	Kebudayaan	Jenis	
		Kain Sasirangan	Kopiah Jangang
		Sapu Ijuk	Arguci
		Bakul Purun	Tajau
		Topi Purun	Truk Kayu
		Tanggung	Celengan Gerabah
		Batu Akik	
5.	Masakan Khas	Soto Banjar	Saluang Pais
		Nasi Sop Banjar	Dendeng Itik
		Katupat Kandangan	Mandai
		Gangan Paliat	Apam Barabai
		Iwak Haruan Babanam	Apam Batil
		Haruan Masak Habang	Amparan Tatak
		Pais Patin	Bingka Barandam
		Papuyu Ba Ubar	Amplang
		Saluang Goreng	Kakicak
		Kalalapon	Pepare
		Bingka Kentang	Kue Ipau
		Kue Lam	Kue Rangai
		Cingkaruk	Rabuk Ikan
		Dodol Kandangan	Keripik Kelakai
		Kue Roko	Wadai Untuk
		Wadai Cincin	Gagodoh
		Lempeng	Gangan Asam Banjar
		Iwak Pakasam	Gangan Humbut
		Sayur Kambang Tigarun	Cacapan Asam
		Bubur Baayak	Bubur Gunting
		Bubur Hintalu Karuang	Hampap
		Kue Pengkang	Juhu Umbut Sawi
		Mie Bancir	Laksa
		Puracit	Babongko
		Papudak / Wadaj Sasunduk Lawang	Petah
		Kokoleh	Pakasam
		Haliling Masak Santan	Kalangkala
		Rambai	Kapul
Kasturi	Pundut Nasi		
Garih Batanak	Ikan Asin Sapat Balado		
Nasi Itik Gambut	Lamang Kandangan		
Lontong Orari	Katupat Batumis		
Kacang Bagula			

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalsel. 2021

2.3.1.2.16 Perpustakaan dan Kearsipan

A. Perpustakaan

Masih rendahnya minat baca masyarakat Kalimantan Selatan memerlukan upaya keras agar masyarakat memiliki daya saing sebagai tenaga kerja. Untuk mendorong minat baca diperlukan berbagai fasilitasi baik secara persuasif maupun atraktif kepada semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menginisiasi pembuatan aplikasi iKalsel pada tahun 2018 yang bertujuan untuk mendukung transformasi digital perpustakaan.

Pada tahun 2020 terdapat pandemic Covid-19 yang menyebabkan layanan perpustakaan sempat ditutup sementara, namun para pemustaka dimudahkan apabila ingin meminjam dan membaca buku dengan layanan iKalsel. Aplikasi iKalsel memiliki koleksi sebanyak 4.036 judul. Perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami fluktuasi selama kurun waktu



tahun 2016-2020. Lebih lanjut mengenai perkembangan perpustakaan di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel II-138 di bawah ini.

Tabel II-138 Perkembangan Indikator Perpustakaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Perpustakaan Umum Provinsi	2	2	2	2	2
Perpustakaan Umum Kab/Kota	13	13	13	13	13
Perpustakaan Desa	42	42	42	42	42
Jumlah Koleksi Buku	479.571	497.989	506.387	533.687	581.187
Jumlah Pengunjung Perpustakaan	571.166	1.152.319	1.037.702	1.252.433	441.038

Sumber: Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan. 2020

B. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di Kalimantan Selatan dikembangkan berdasarkan klasifikasi arsip. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan pengelolaan kearsipan, baik dari segi tenaga maupun teknologi peralatannya. Cakupan pelayanan kearsipan di lingkup instansi pemerintah dari tahun 2016 ke 2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Berikut merupakan capaian cakupan pelayanan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2016-2020.

Tabel II-139 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Rasio
		Mengelola Arsip Secara Baku	
2016	48	5	9,62
2017	52	8	15,38
2018	52	13	25
2019	52	7	13,46
2020	52	9	17,31

Sumber: Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan. 2020

Tabel II-140 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Peningkatan Buku yang dipinjam		44,46	40,89	50,10	51,49	48,04
2	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan		8,26	16,28	24,81	29,51	10,25
3	Persentase SKPD yang mengelola Arsip berbasis TIK		9,62	25	50	63,46	80,77

Sumber: Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan. 2021

2.3.2 Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Pertanian

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi pertanian yang sangat besar sebagai modal dasar pergerakan roda perekonomian daerah. Potensi inilah yang menjadikan pertanian menjadi salah satu sektor dominan dalam pembentukan struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan dengan kontribusi PDRB tahun 2018 sebesar 14.39 terhadap perekonomian daerah.

Perlu digaris bawahi bahwa sektor pertanian memiliki keunggulan dalam mewujudkan sustainability development karena sektor tersebut merupakan sektor yang menggali potensi sumber daya alam terbarukan. Meskipun sekarang pertambangan dan penggalian mendominasi struktur perekonomian. namun sektor pertanian juga memiliki kekuatan yang tidak kalah besarnya dengan sektor pertambangan dan penggalian sehingga pergeseran sektor ekonomi dapat dilaksanakan dengan berkelanjutan.

Kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi terus meningkat seiring waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bidang pertanian mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor Pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar kedua terhadap PDRB Kalimantan Selatan yaitu 14,39% untuk Tahun 2020. Namun kondisi ini bebanding terbalik dengan kondisi kesejahteraan petani.

Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai Luas Baku Sawah untuk Tahun 2019 seluas 291.145 hektar. Namun dalam pengelolaannya, petani memiliki tantangan dan hambatan tersendiri. Hal ini menjadi fokus utama dan terminologi melalui bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan kelembagaan pada skala ekonomi, efesensi usaha dan meningkatkan posisi tawar petani dari sub sektor hulu ke hilir.

Salah satu konsep dan model pengembangan sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu pengembangan *Food Estate* berbasis korporasi petani yang merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi melalui kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum baik itu berbentuk koperasi atau badan hukum lainnya dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. *Food Estate* sendiri menjadi salah satu program strategis pembangunan pertanian nasional yang merupakan solusi atau upaya menuju kedaulatan dan kemandirian pangan, hal tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan impor sehingga ekonomi dapat tumbuh berkualitas dan masyarakat pertanian meningkat kesejahteraannya. Sejalan hal tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai provinsi penyangga pangan dan pertanian Ibu Kota Negara baru melalui pengembangan *food estate* berbasis korporasi petani sesuai model karakteristik daerahnya dengan mengangkat potensi sumber daya lokal dan unggul dalam rangka transformasi ekonomi melalui hilirisasi sektor pertanian.

A. Pertanian Tanaman Pangan

Pertanian tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh tanaman padi baik ladang maupun sawah yang memiliki produksi mencapai 553.143 ton dengan produktivitas 39,69 kuintal/ha untuk padi ladang pada tahun 2020. Selain itu, komoditas jagung juga cukup memiliki dominasi dalam produksi tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Selatan yakni memiliki panen sebanyak 338.311 ton pada tahun 2020 dengan produktivitas sebesar 55,03 kuintal/ha atau menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan produktivitas sebesar 59 kuintal/ha.

Tabel II-141 Luas Panen, Produksi, serta Produktivitas Padi dan Palawija Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2018-2020

Jenis Tanaman	2018			2019			2020		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)
Padi (sawah & ladang)	594.827	2.432.248	41	578.245	2.213.467	38	2.195.321	553.143	39,69
Jagung	93.793	431.490	46	117.568	691.642	59	61.474	338.311	55,03
Kedelai	20.366	27.042	13	3.731	4.702	13	1.763	2.297	13,03
Kacang Tanah	5.214	5.432	10	4.368	4.186	10	3.006	3.512	11,68
Kacang hijau	594	720	12	196	226	12	303	324	10,69
Ubi kayu	2.612	89.136	341	2.127	70.730	333	1.686	53.539	317,59
Ubi jalar	1.086	26.120	240	766	17.434	228	575	9.042	157,18

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalimantan Selatan. 2020

B. Hortikultura

Pada sub sektor hortikultura, terdapat dua komoditas besar yakni komoditas buah-buahan dan sayuran. Pada komoditas buah-buahan prioritas adalah tanaman jeruk siam dengan produksi 158.462 ton, pisang dengan produksi sebanyak 78.772 ton, durian dengan produksi sebanyak 17.890 ton, dan nanas sebanyak 12.986 ton untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di Tabel II-142, di bawah;

Tabel II-142 Produksi Delapan Komoditas Buah-buahan Utama di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2018 - 2020(Dibuat Antar Wilayah)

Jenis Tanaman	2019			2020		
	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
Jeruk siam	4.219	141.232	33,48	4.784	158.462	33,12
Pisang	1.885	62.813	33,32	1.484	78.772	53,74
Durian	2.110	27.422	13,00	1.447	17.890	12,36
Nanas	159	12.358	77,88	157	12.986	82,75

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalimantan Selatan 2020

Pada komoditas sayuran utama, pada tahun 2020, yaitu bawang merah dengan produksi sebanyak 1.476 ton, Cabe Besar dengan produksi 12.969 ton dan Cabe Rawit dengan Produksi 15.616 ton, dan petai dengan produksi 2.250 ton untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel II-143 berikut;

Tabel II-143 Produksi Komoditas Sayuran Utama di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2018 - 2019

Jenis Tanaman	2019			2020		
	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
Bawang Merah	186	1.143	6,15	89	462	5,19
Cabe Besar	1.638	11.392	6,95	1.476	12.969	8,79
Cabe Rawit	2.428	3.768	5,67	2.329	15.616	6,71
Petai	401	1.736	4,33	453	2.463	5,44

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan 2020

Tabel II-144 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Beras (SIMTP)	Ton	1.451.537	1.538.614	1.597.646	1.454.026	1.372.639
2	Beras (KSA)	Ton			781358	790555	677105
3	LPE Pertanian Tanaman Pangan		6.03	2.53	2.08	5.99	3.25
4	Prosentase Peningkatan Produksi Produktivitas Tanaman Pangan						
5	Padi		0.94	1.81	-4.96	-6.39	-0.32



N O	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
6	Jagung		0.18	-11.52	-11.44	27.88	-14.49
7	Kedelai		4.4	-4.04	-2.86	-5.09	-1.29
8	Prosentase Peningkatan Produksi Produktivitas Hortikultura						
9	Bawang Merah		-19.82	43.59	-22.18	17.12	-14.65
10	Cabe		20.35	-13.69	6.67	10.18	42.54
11	Jeruk		-4.17	9.07	12.07	-3.98	6.69
12	Persentase peningkatan luas tambah tanam 2/thn		7.09	4.12	4.36	-2.79	-4.63
13	Rendemen Gabah ke Beras		65.38	65.38	65.38	65.38	65.69
14	Persentase Peningkatan Penyuluh yang melaksanakan kaji terap yang dapat diterapkan petani		29	43	57	71	86
15	Persentase peningkatan Balai Penyuluhan dari UTAMA ke ADITAMA		23	38	54	69	85
16	Peningkatan Kelompok Tani dari MADYA ke UTAMA		49	45	58	71	86

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Prov. Kalimantan Selatan 2021

C. Perkebunan

Perkebunan di Kalimantan Selatan meliputi perkebunan rakyat, perkebunan besar negara, dan perkebunan besar swasta, dengan luas seluruhnya meningkat dari 758.135 pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 dengan luas 759.120 hektar, dengan rincian sebagaimana Tabel II-145.

Tabel II-145 Luas Perkebunan dan Produksi Perkebunan berdasarkan Jenis Perkebunan di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2019

Jenis Perkebunan	Luas Tanaman Perkebunan		Produksi Tanaman Perkebunan Ton	
	2018	2019	2018	2019
Perkebunan Rakyat	412.584	410.928	459.023	460.095
Perkebunan Besar Negara (PTP)	20.421	19.811	24.144	24.856
Perkebunan Besar Swasta (PBS)	326.115	327.396	860.347	863.692
JUMLAH	759.120	758.135	1.343.514	1.348.643

Sumber: Dinas Perkebunan Dan Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2020

Pada sub sektor perkebunan, dominasi tanaman kelapa sawit pada tahun 2019 masih tinggi yakni sebesar 1.117.144ton mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2018 sebesar 1.110.372 dan diikuti tanaman karet sebesar 193.366ton, serta diikuti lagi dengan Kebun Karet yakni 193.366 dan berikutnya untuk produksi kelapa 25.326 pada tahun 2019 dan bisa dilihat lebih jelasnya pada Tabel II-146.

Tabel II-146 Produksi Lima Komoditas Tertinggi Komoditas Perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2018 - 2019

Jenis Tanaman	2018			2019		
	Luas Tanam	Produksi	Produktivitas	Luas Tanam	Produksi	Produktivitas
	Ha	Ton	Ton/Ha	Ha	Ton	Ton/Ha
Kelapa Sawit	424.932	1.110.372	3.32	424.557	1.117.144	3.25
Karet	270.825	194.930	1.03	271.715	193.366	1.02
Kelapa	40.872	25.245	0.89	40.792	25.326	0.89
Kopi	3.053	1.517	0.63	2.996	1.414	0.61
Lada	490	157	0.53	486	153	0.53
Kemiri	3.783	1.951	0.64	3.815	1.942	0.64
Kayu Manis	2.744	2.457	1.63	2.755	2.457	1.63
Aren	2.682	2.114	1.35	2.675	2.105	1.35
Sagu/Rumbia	6.510	4.045	1.45	5.152	4.018	1.64
Purun	1.439	360	0.49	1.440	360	0.49
Kakao	685	88	0.38	685	88	0.38
Cengkeh	481	144	0.39	468	141	0.39

Sumber: Dinas Perkebunan Dan Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2020

Kebijakan nasional pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan pada tanggal 22 Nopember 2019 berdasarkan Inpres nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2019-2024. Peraturan itu dimandatkan kepada 14 kementerian/lembaga (K/L) dan 26 provinsi penghasil sawit di seluruh Indonesia. Lima sasaran RAN KSB yakni: 1) peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, 2) penyelesaian status dan legalisasi lahan, 3) pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, 4) meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, dan 5) mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. Inpres ini menjadi momentum penting untuk perbaikan tata kelola sawit oleh semua pihak. Inpres ini memberikan mandat di antaranya: penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa, serta percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini telah menjadi penyokong PDRB utama dan diharapkan berkelanjutan. Aspek ekonomi yang telah dibangun perlu diarahkan untuk ikut serta dalam membangun perekonomian di Kalimantan Selatan. Sesuai amanat Inpres nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2019-2024 dan diturunkan melalui Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan didasarkan atas Perda No.2 Tahun 2013 tentang



Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kalimantan Selatan melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan akan menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) pada Tahun 2022.

Kontribusi PDRB Provinsi Kalimantan Selatan untuk sektor pertanian (perkebunan, pertanian, kehutanan dan perikanan) Tahun 2017 sebesar US \$ 1.026.862.000 (penyumbang devisa nomor 2 di Provinsi Kalimantan Selatan). Luas kebun kelapa sawit 538.064,48 ha (14,51% dari luas provinsi Kalsel) terdiri dari Perusahaan Besar Swasta Kelapa Sawit (PBS-KS) 339.286,26 ha, kebun plasma (masyarakat/mitra) 94.746,22 Ha dan perkebunan swadaya masyarakat seluas 104.032 ha. Penyerapan tenaga kerja langsung di PBS-KS sebanyak 59.435 orang. Penerapan sertifikasi ISPO ataupun RSPO. Dari 97 PBS KS di Provinsi Kalsel terdapat 40 PBS-KS operasional (wajib ISPO). PBS-KS yang wajib ISPO ini telah mendapatkan sertifikat dari Lembaga Akreditasi Internasional sebanyak 23 perusahaan (57,50%), sedangkan 17 perusahaan masih dalam proses sertifikasi.

D. Peternakan

Sub sektor peternakan masih menjadi sektor penting dalam peningkatan perekonomian daerah. Peran strategis sub sektor peternakan baik secara ekonomis maupun ekologis ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang PDRB yang termasuk dalam rumpun pertanian. Untuk sub sektor peternakan berdasarkan undang-undang No 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang semua undang-undang tersebut juga berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat peternak yang diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak. Pelaksanaan Program peternakan dilakukan dengan pendekatan ekonomis, pendekatan agribisnis dan pendekatan teknis. Dengan pendekatan ekonomis yaitu perbaikan tataniaga ternak dan produk ternak, mendorong insentif peternakan dan pemberdayaan peternak.

Belum optimalnya peningkatan produksi dan pengembangan hilirisasi potensi unggulan sub sektor Peternakan, yang memiliki potensi yang begitu besar sebagai salah satu leading sektor yang menjadi penggerak utama perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, perlunya upaya sejalan dengan arahan daerah yakni menitikberatkan pembangunan industri berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas (termasuk sub sektor peternakan).



Dalam rangka mewujudkan agenda besar tersebut, maka Provinsi Kalimantan Selatan perlu menyusun pola/rancang bangun sebagai haluan dalam pembangunan sub sektor peternakan dari hulu sampai hilir dengan komoditas ternak yang diunggulkan adalah kerbau, itik alabio dan sapi. Dalam hal ini dikembangkan Food Estate untuk komoditas ternak berbasis korporasi peternak yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam rangka sebagai daerah penyangga pangan untuk ibu kota negara yang baru melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Jenis ternak yang dominan, baik yang dipelihara, dipotong, maupun diproduksi daging adalah sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras petelur, dan itik. Informasi perkembangan jumlah populasi ternak besar dan kecil di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-147 Jumlah Ternak Besar, Ternak Kecil, dan Unggas (Ekor) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008-2019

Tahun	Jumlah Ternak Besar	Jumlah Ternak Kecil	Jumlah Unggas
2008	255.228	127.525	39.307.685
2009	262.833	132.575	48.661.987
2010	273.943	136.258	60.769.449
2011	162.755	115.845	62.777.387
2012	178.656	114.512	60.849.131
2013	155.793	72.507	69.497.801
2014	166.865	72.787	75.748.331
2015	175.245	69.456	84.465.566
2016	180.896	66.615	100.091.662
2017	188.395	71.901	106.239.308
2018	197.456	89.170	119.247.723
2019	206.732	85.555	126.334.793

Sumber: Dinas Perkebunan & Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2020

Tabel II-148 Jumlah Produksi Telur (Kg) di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2010-2019

Tahun	Telur Itik	Telur Ayam Buras	Telur Ayam Ras
2010	27.733.704	11.161.859	28.990.293
2011	30.672.770	9.782.194	26.826.031
2012	31.640.856	10.511.677	29.219.878
2013	30.105.890	8.192.032	33.947.005
2014	29.489.975	7.509.220	47.650.943
2015	28.677.737	8.088.808	60.261.831
2016	27.421.680	7.738.093	64.574.213
2017	28.396.218	7.855.756	77.225.904
2018	29.245.681	7.924.743	85.061.393
2019	33.128.070	8.230.455	60.910.991

Sumber: Dinas Perkebunan & Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2020



Tabel II-149 Capaian Kinerja Urusan Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	LPE Perkebunan		-4.13	5.60	0.52	0.67	-0.36
2	LPE Peternakan		8.34	8.66	7.58	7.68	1.76
3	Prosentase Peningkatan Produksi Daging (5)	Ton	89.648.00	105.826.00	106.001.00	84.435.00	79.130.00
4	Prosentase Peningkatan Produksi Telur (7)	Ton	99.639.00	113.377.00	122.232.00	103.199.00	114.882.00
5	Prosentase Peningkatan Produksi Susu (5)	Ton	126.00	112.00	260.00	202.00	112.00
6	Prosentase Peningkatan Skala Usaha Ternak	Kelompok	40.00	68.00	53.00	30.00	0.00
7	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Peternakan		2.00	2.00	14.10	10.26	6.41
8	Persentase peningkatan nilai tambah hasil ternak		41.00	53.00	65.00	68.14	5.00
9	Persentase peningkatan revitalisasi lembaga pemasaran ternak		29.00	97.80	32.26	33.80	20.00
10	Persentase produksi ternak yg dipasarkan keluar daerah	Ekor	4.107.945.00	4.420.620.00	5.889.061.00	1.947.472.00	4.521.288.00
11	Prosentase Penurunan Angka Kematian Ternak Sapi, sapi perah, kerbau dan kambing	<	3.02	2.27	2.48	2.78	2.00
12	Prosentase Penurunan Angka Kematian Ternak Ayam buras dan itik	<	4.80	3.58	3.12	3.82	0.02
13	Prosentase Penurunan Angka Kematian Ternak Ayam ras pedaging dan petelur	<	3.16	2.83	2.53	2.94	0.02
14	Prosentase Unit Usaha yang Bersertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		44.00	16.00	13.79	13.79	20.61



N O	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
15	Prosentase peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan Karet	Kg/Ha	47.20	63.51	1.071.00	70.09	72.66
16	Prosentase peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit	Ton/Ha	4.45	4.45	4.86	1.11	1.12
17	Prosentase peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	10.326.00	45.258.00	1.354.00	44.455.00	43.550.00
18	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan		5.00	5.00	14.07	14.07	0.00
19	Persentase peningkatan produk hasil perkebunan karet yang berkualitas	Ton	35.98	65.20	30.151.00	26.960.00	35.410.00
20	Persentase penurunan konflik dan gangguan usaha perkebunan	Konflik	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00
21	Prosentase penambahan kemitraan pemasaran Tanaman perkebunan (UPPB)	UPPB	5.00	6.00	21.00	17.00	0.00
22	Prosentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani Utama	KT	75.00	76.00	81.00	73.00	81.00
23	Prosentase penurunan Gangguan OPT	Ha	18.561.00	5.453.00	32.685.00	1.000.00	5.172.00

Sumber : Dinas Perkebunan & Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2021

2.3.2.2 Kelautan dan Perikanan

Pertumbuhan Produk Domestik Broto (PDB) Perikanan tahun 2020 berada pada posisi terendah selama kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu 4,3%. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) tahun 2020 mengalami defisit, yaitu berada pada angka 98,90. Nilai ekspor perikanan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 25,90% dibanding capaian tahun 2019.

Status proporsi tangkapan laut di WPP-712 dan WPP-713 cenderung berada di atas batasan biologis aman (>100% dari JTb yang ditentukan). Produksi tangkapan



laut tahun 2018 pernah mengalami kondisi lebih besar 28,63% dari JTB, dan lebih besar 2,90% dari potensi lestari (MSY).

Nelayan di Kalimantan Selatan masih banyak yang belum terlatih tentang teknologi terapan penangkapan ikan sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan. Dari 33.321 nelayan di Kalimantan Selatan, sd. tahun 2020 yang telah dilatih sebanyak 150 orang atau 0,45%.

Terbatasnya pembangunan dan pengembangan prasarana perikanan tangkap di titik sentra penangkapan ikan nelayan. khususnya dalam rangka mendukung penerapan sistem rantai dingin terhadap hasil tangkapan nelayan

Ketersediaan terbatas serta permintaan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat, menyebabkan harga ikan gabus haruan cenderung mengalami peningkatan pada musim tertentu, sehingga menjadi sumber pemicu terjadinya inflasi daerah

Kawasan ekosistem pesisir kritis yang belum direhabilitasi masih luas. Dari total ekosistem kritis seluas 12.353,10 ha, kawasan yang telah direhabilitasi baru mencapai 75,80 ha atau 0,614%.

Pembudidaya ikan di Kalimantan Selatan masih banyak yang belum terlatih tentang teknologi terapan usaha pembudidayaan ikan sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan. Dari 29.292 pembudidaya ikan di Kalimantan Selatan, sd. tahun 2020 yang telah dilatih sebanyak 330 orang atau 1,13%. Demikian pula dengan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kalimantan Selatan yang belum terlatih tentang penerapan sistem standar mutu dan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai ketentuan teknis yang dianjurkan. Dari 3.087 pengolah dan pemasar hasil perikanan di Kalimantan Selatan, sd. tahun 2020 yang telah dilatih sebanyak 180 orang atau 5,83%.

Kelompok usaha perikanan mandiri dan berprestasi dalam mengelola kelembagaan kelompoknya masih rendah. Dari 1.831 kelompok, tercatat sd. tahun 2020 yang telah meningkat kelas kelembagaannya sebanyak 69 kelompok atau 3,77%. Proporsi kelompok usaha perikanan yang menerima paket bantuan hibah sd. tahun 2020 baru mencapai 12,18%. Tercatat dari 1.831 kelompok yang terbentuk di Kalimantan Selatan, jumlah kelompok usaha perikanan yang telah menerima dan memanfaatkan paket bantuan hibah sebanyak 223 kelompok.

Belum berkembangnya sistem pengembangan usaha perikanan berorientasi kemitraan berbasis CSR.

Belum efektifnya pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.



Masih terbatasnya kegiatan restocking di kawasan reservaat perairan umum daratan. Sd. tahun 2020, tercatat baru 1 kawasan reservaat atau 16,67% dari 6 kawasan reservaat yang ada di Kalimantan Selatan.

Masih adanya pelaku usaha perikanan yang belum mematuhi ketentuan berusahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, rerata kepatuhan pelaku usaha perikanan baru mencapai 70,20%.

Masih rendahnya kontribusi perikanan budidaya laut terhadap total produksi perikanan. Pada tahun 2020 hanya memberikan kontribusi sebesar 33 ton atau 0,023%. Oleh karena itu, dalam pengembangan industri perikanan terpadu berbasis komoditas budidaya laut masih terkendala pada ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku.

Masih diperlukannya ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pembangunan industrialisasi usaha perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu SKPT, SPTD, HPI, pengembangan ikan Gabus Haruan skala industri, serta Pengembangan fasilitas pelayanan UPTD Provinsi. Pada tahun 2020, total pagu anggaran yang tersedia untuk mendukung kelima prioritas pembangunan industrialisasi usaha perikanan tersebut sebesar Rp. 15.321.691.173,00.

Masih adanya kawasan kluster sentra usaha perikanan yang belum difasilitasi pengelolannya. Saat ini terdapat 50 kluster, namun fasilitasi untuk pengembangan tangkahan nelayan sd. tahun 2020 belum pernah dilaksanakan.

Masih terjadinya kasus illegal fishing di WPPNRI 712 dan WPPNRI 713, terutama kasus dan konflik kapal nelayan cantrang yang berasal dari luar daerah. Selain itu, terbatasnya dukungan sumber daya pengawasan di lapangan menjadi permasalahan yang dijumpai sampai saat ini.

Masih terjadinya kasus illegal fishing di perairan umum seperti penggunaan stroom dan penangkapan anak-anak ikan. Luasnya jangkauan pengawasan masih terkendala dengan terbatasnya dukungan sumber daya pengawasan di lapangan menjadi permasalahan yang dijumpai sampai saat ini.

Mahalnya biaya pemberkasan perkara sd. Tahap P. 21. Sampai dengan 2020, APBD Provinsi Kalimantan Selatan belum pernah menganggarkan untuk mengakomodir proses pemberkasan tersebut.

Belum optimalnya kualitas pelayanan publik, khususnya penerapan, keaktifan dan tingkat pemanfaatan/pendayagunaan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi pelaku usaha perikanan. Pada tahun 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh nilai RB sebesar 80,00.

Terdapat 3 komponen penilaian SAKIP yang perlu ditingkatkan kualitas dan akuntabilitasnya, yaitu: Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Pada tahun 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh nilai SAKIP sebesar 82,76.

Masih terjadinya penumpukan penyerapan anggaran pada triwulan IV setiap tahunnya. Selain itu besarnya selisih antara realisasi fisik dan realisasi keuangan setiap bulannya, dengan gap mencapai > 5%. Nilai kinerja anggaran tahun 2020 sebesar 80,00.

Jika dilihat dari produksinya, baik jumlah rumah tangga perikanan, produksi maupun nilainya juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Capaian tertinggi berada pada tahun 2019 dimana jumlah rumah tangga perikanan mencapai 66.532 rumah tangga dengan produksi sebesar 434.765,00 ton dan nilai produksinya mencapai Rp 5.870.300.000.000,-.

Tabel II-150 Perkembangan Jumlah Rumah Tangga, Produksi, dan Nilai Produksi Sub Sektor Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2010-2019

Tahun	Jumlah Ruta Unit	Produksi (Ton)	Nilai produksi (Rp)
2010	56.744	242.126,30	4.038.067.330
2011	60.919	247.741,10	4.581.337.731
2012	67.095	284.300,70	5.578.497.765
2013	67.191	339.437,28	6.376.406.906
2014	67.487	364.794,07	6.972.197.094
2015	67.980	368.451,70	7.954.889.861
2016	60.273	408.444,50	5.544.738.736
2017	66.435	412.326,10	5.571.503.232
2018	66.318	437.278,10	5.719.062.120
2019	66.532	434.765,00	5.870.300.000
2020 *)	127.799	451.598,51	6.856.223.371

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Kalimantan Selatan

Tabel II-151 Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Indek	5.33	7.75	7.93	5.01	4.30
2	Ikan (ton)	Ton	408.444.50	418.761.73	428.618.00	434.765.48	451.598.51
3	LPE Perikanan	Indek	5.33	7.75	7.93	5.01	4.30



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
4	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Ton	160714.50	164715.03	177852.20	178277.36	185179.81
5	Angka konsumsi Ikan masyarakat	Kg/Kapita/Thn	48.96	50.20	51.65	57.99	60.24
6	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Ton	247730.00	254046.70	250765.80	256488.12	266418.70
7	Persentase Pelaku Usaha yang Patuh		58.00	67.00	95.00	96.00	100.00
8	Jumlah Kasus Illegal Fishing yang terjadi (usulan JFP tertangani)	Kasus	20.00	15.00	11.00	10.00	9.00

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Kalimantan Selatan

2.3.2.3 Kehutanan

Perkembangan produksi kayu bulat yang merupakan salah satu produk unggulan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya usaha izin pemanfaatan hasil hutan kayu maupun produksi kayu yang memang menurun. Namun demikian, sub sektor kehutanan terus melakukan perbaikan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan hutan sehingga perkembangannya terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2021.

Tabel II-152 Perkembangan Produksi Kayu Bulat (m³) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2020

NO.	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN										JUMLAH	
		2016		2017		2018		2019		2020		BATANG	VOLUME (M3)
		BATANG	VOLUME (M3)	BATANG	VOLUME (M3)	BATANG	VOLUME (M3)	BATANG	VOLUME (M3)	BATANG	VOLUME (M3)		
I	IUPHHK-HA (HPH)												
A.	Kabupaten Tabalong												
1	PT. Aya Yayang Indonesia	3.607	17.356,18	6.028	22.334,77	4.470	16.569,08	4.762	17.624,94	4.771	17.008,49	23.638	90.893,46
2	PT. Elbana Abadi Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PT. Hasnur Jaya Utama	-	-	363	1.630,79	-	-	-	-	-	-	363	1.630,79
B.	Kabupaten Kotabaru												
1	PT. Inhutani II (Pulau Laut)	-	16.619,25	-	2.975,44	-	16.245,55	-	8.985,71	-	7.176,45	-	52.002,40
2	PT. Inhutani II Unit Senakin	-	-	-	834,10	-	1.004,26	-	1.148,31	-	-	-	2.986,67
C.	Kabupaten Tanah Bumbu												
2	PT. Kirana Chatulistiwa	-	21.169,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.169,66
3	PT. Batulicin Bumi Bersujud (HTI)	-	2.759,21	-	9.275,98	-	5.653,74	-	1.169,31	-	1.243,61	-	20.101,85
4	PT. Jhonlin Agro Mandiri	-	-	-	325,56	-	2.308,92	-	4.235,28	-	1.559,25	-	8.429,01
D.	Kabupaten Tanah Laut												
1	PT. Hutan Rindang Banua	-	-	-	80.148,67	-	7.866,81	-	9.463,89	-	3.793,63	-	205.146,86
III	IPK/IPPKH/HGU/PERORANGAN												
A.	Kabupaten Tabalong												
1	PT. Adaro Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	510,64	-	-	-	510,64
2	PT. Adaro SK.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,03	-	360,03
B.	Kabupaten Kotabaru												
1	PT. Kalimantan Energi Lestari	-	-	-	209,29	-	635,24	-	624,14	-	9,39	-	1.478,06
2	PT. Banjar Asri	-	-	-	392,66	-	-	-	-	-	-	-	392,66
3	UD. Sarah Mulia	-	774,88	-	190,51	-	-	-	-	-	-	-	965,39
4	PHAT Abdul Basid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,43	-	130,43
5	PHAT BAIHAQI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,79	-	73,79
C.	Kabupaten Tanah Bumbu												
1	CV. Hidup Hidayah Ilahi	-	-	-	43,65	-	-	-	231,26	-	-	-	274,91
2	PT. Tunas Inti Abadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



NO.	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN										JUMLAH	
		2016		2017		2018		2019		2020		BATANG	VOLUME (M3)
		BATANG	VOLUME (M3)	BATANG	VOLUME (M3)	BATANG	VOLUME (M3)	BATANG	VOLUME (M3)	BATANG	VOLUME (M3)		
3	PT. Borneo Indobara	-	1.559,97	-	-	-	-	-	2.401,80	-	23.348,36	-	27.310,13
4	PT. Mitra Sefia Tanah Bumbu	-	-	-	-	-	323,69	-	194,26	-	-	-	517,95
5	IPPKH PT. Borneo Indobara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.190,14	-	6.190,14
D. Kabupaten Tanah Laut													
1	CV. Faris Motor	-	431,50	-	655,72	-	-	-	-	-	-	-	1.087,22
2	PT. Anugerah Lumbung Energi	-	-	-	-	-	-	-	8,10	-	-	-	8,10
E. Kabupaten Tapin													
1	PT. Binuang Mitra Bersama	-	-	-	-	-	-	-	149,72	-	-	-	149,72
2	PT. Bhumi Rantau Energi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409,01	-	409,01
3	IPPKH PT. Bhumi Rantau Energi	-	-	-	-	-	-	-	457,08	-	143,10	-	600,18
4	IPPKH SK808 PT. Bhumi Rantau Energi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,44	-	7,44
JUMLAH		3.607	60.670,65	6.391	119.017,14	4.470	50.607,29	4.762	47.204,44	14.691	61.453,12	24.001	442.826,50

KALIMANTAN
SELATAN
T a h u n

2021 - 2026

Tabel II-153 Kondisi Lahan Kritis dan sangat Kritis di Kalimantan Selatan Tahun 2019

Kabupaten	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Total (Ha)
Kab. Balangan	22.142.09	46.073.12	75.875.32	15.839.98	22.516.24	182.446.75
Kab. Banjar	141.608.24	103.690.24	105.675.57	31.917.79	71.351.96	454.243.80
Kab. Barito Kuala	178.931.93	62.102.61	212.68	139.53		241.386.75
Kab. Hulu Sungai Selatan	69.602.08	48.770.47	19.058.21	8.532.39	23.835.05	169.798.20
Kab. Hulu Sungai Tengah	41.080.67	20.777.10	51.690.75	6.327.02	25.810.99	145.686.53
Kab. Hulu Sungai Utara	48.667.30	41.872.98		70.19		90.610.47
Kab. Kotabaru	246.748.41	354.415.31	218.432.36	104.230.13	19.951.15	943.777.36
Kab. Tabalong	63.379.74	86.432.65	164.079.67	32.424.66	10.437.74	356.754.46
Kab. Tanah Bumbu	154.472.75	162.993.65	100.471.17	41.745.61	27.122.07	486.805.25
Kab. Tanah Laut	109.861.68	137.484.32	92.862.47	32.400.02	11.585.93	384.194.42
Kab. Tapin	117.129.61	57.232.79	24.666.84	6.390.98	11.757.14	217.177.36
Kota Banjarbaru	15.204.13	12.737.14	3.434.61	55.69	16.18	31.447.75
Kota Banjarmasin	8.698.54	1.056.18				9.754.72
Total (Ha)	1.217.527.17	1.135.638.56	856.459.65	280.073.99	224.384.45	3.714.083.82

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan 2021

Tabel II-154 Kondisi Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan di Kalimantan Selatan Tahun 2020

Kabupaten	Cagar Alam	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Konversi	Hutan Produksi Terbatas	Tahura	Jumlah Total
Kab. Balangan	-	20.389.05	18.309.56	-	23.69	-	38.722.31
Kab. Banjar	1.021.41	17.654.41	55.331.64	1.759.03	11.945.95	14.950.65	102.663.09
Kab. Barito Kuala	-	-	-	-	-	-	-
Kab. Hulu Sungai Selatan	228.51	18.468.26	9.564.80	-	-	-	28.261.58
Kab. Hulu Sungai Tengah	-	8.339.22	8.293.82	-	10.109.86	-	26.742.90
Kab. Hulu Sungai Utara	-	-	-	70.19	-	-	70.19
Kab. Kotabaru	2.211.36	34.967.98	78.882.38	3.113.70	1.083.10	-	120.258.52



Kabupaten	Cagar Alam	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Konversi	Hutan Produksi Terbatas	Tahura	Jumlah Total
Kab. Tabalong		9.209.75	25.926.85	2.435.33	4.415.15	-	41.987.07
Kab. Tanah Bumbu	273.50	6.407.02	47.332.08	5.527.94	3.393.37	-	62.933.91
Kab. Tanah Laut	-	9.773.16	20.011.84	5.266.21	3.034.91	1.172.86	39.258.98
Kab. Tapin	-	9.136.24	4.820.50	-	933.28	-	14.890.02
Kota Banjarbaru	36.85	-	-	-	-	-	36.85
Grand Total	3.771.63	134.345.10	268.473.46	18.172.40	34.939.31	16.123.51	475.825.42

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan 2021

Tabel II-155 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi PDRB Sektor Kehutanan		10,76	10,77	10,93	10,94	10,95
2	Persentase bertambahnya luas penanaman meliputi HTI, HPH, Rehab DAS IPPKH, PS dan RHL			3,16	5,78	5,67	4,30
3	Persentase penurunan kasus ilegal logging			72	0	35,9	2
4	Persentase peningkatan pemanfaatan RPHJP di KPH				6,66	5,53	5,87
5	Persentase penambahan luas izin dan pengelolaan perhutanan sosial				45,68	35,19	17,59
6	Persentase penerimaan PNBPD dan Retribusi Daerah		14,03	24,38	19,24	20,78	18,08
7	Persentase penurunan kejadian kebakaran atau hotspot dalam kawasan hutan		93,37	-4,78	-194,59	83,85	69,32

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan 2021

2.3.2.4 Energi dan Sumber Daya Alam

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi pertambangan yang didominasi oleh komoditas batubara, dimana sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi PDRB yang signifikan. Perkembangan produksi batubara PKP2B pada tahun 2020 sebesar 84,688,476.23 ton, sedangkan produksi batubara untuk IUP 63,186,892.03 ton.

Tabel II-156 Jumlah Produksi Batubara Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2020

No	Produksi Batubara	2016	2017	2018	2019	2020
1	PKP2B (Ton)	91,606,240.22	77,504,581.87	84,165,741.28	79,159,505.21	84,688,476.23
2	IUP (Ton)	60,122,225.01	70,501,664.40	76,508,203.71	69,646,388.62	63,186,892.03
	Total	151,728,465.23	148,006,246.27	160,673,944.99	148,805,893.83	147,875,368.26

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2021

Tabel II-157 Data Penjualan Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan

No	Tahun	Keperluan	PKP2B (Ton)	IUP (Ton)	Total (Ton)
1	2016	Domestik	38,263,438.98	29,250,424.33	151,979,326.40
		Ekspor	55,565,267.17	28,900,195.92	
2	2017	Domestik	26,529,896.65	35,194,223.65	132,841,869.98
		Ekspor	37,378,771.67	33,738,978.01	
3	2018	Domestik	28,886,821.44	33,398,611.31	151,208,798.83
		Ekspor	47,303,998.18	41,619,367.90	
4	2019	Domestik	28,844,142.74	33,710,100.39	151,691,531.89
		Ekspor	54,105,491.00	35,031,797.76	
5	2020	Domestik	32,918,656.86	35,778,486.51	152,386,886.74
		Ekspor	56,461,786.68	27,227,956.69	

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2021

Tabel II-158 Jumlah IUP di Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

No.	Kabupaten	IZIN USAHA PERTAMBANGAN					Jumlah IUP PMDN	Total IUP/Kabupaten
		Batubara	Logam	Mineral Bukan Logam	Batuan	IUP PMA/Terbitan Pusat		
1	Tabalong	17	0	1	7	2	25	27
2	Balangan	10	2	0	2	3	14	17
3	Hulu Sungai Selatan	2	0	0	3	0	5	5
4	Hulu Sungai Tengah	0	0	0	3	0	3	3
5	Tapin	14	1	0	6	0	21	21
6	Banjarnegara	29	0	1	35	1	65	66
7	Barito Kuala	0	0	0	1	0	1	1
8	Tanah Laut	46	6	0	31	0	83	83
9	Tanah Bumbu	57	3	0	8	3	68	71
10	Kotabaru	25	4	9	16	3	54	57
JUMLAH		200	16	11	112	12	339	351

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2021

Perkembangan fasilitas listrik di Provinsi Kalimantan Selatan cukup signifikan dimana terlihat pada banyaknya pelanggan listrik yang terus mengalami peningkatan. Baik pelanggan rumah tangga, usaha, dan industri, maupun umum terjadi kenaikan yang cukup menjanjikan dimana jumlah pelanggan tahun 2016 sebanyak 1.046.405 pelanggan, dimana pada tahun 2020 jumlah pelanggan menjadi sebanyak 1.300.110 pelanggan. Perkembangan Jumlah Pelanggan listrik Kalimantan Selatan tahun 2016 - 2020 bisa dilihat di tabel di bawah.

Tabel II-159 Jumlah Peningkatan Pelanggan Listrik di Kalimantan Selatan Tahun Tahun 2016 - 2020

Jenis Pelanggan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Tangga [R]	963.395	1.017.787	1.086.302	1.142.557	1.192.400
Industri [I]	542	602	632	651	679
Bisnis [B]	48.497	53.449	55.840	57.433	59.841
Umum	33.971	37.337	-	-	-
Sosial [S]	-	-	32.617	35.520	37.721
Gedung dan kantor	-	-	5.439	5.696	5.693
Jalan umum	-	-	2.941	3.310	3.776
Jumlah	1.046.405	1.109.175	1.183.771	1.245.167	1.300.110

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2021

Tabel II-160 Jumlah Pelanggan Listrik menurut Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2014 - 2020

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tanah Laut	59.862	80.404	104.163	111.249	118.655	126.240	131.634
Kotabaru	36.955	49.409	39.268	40.189	50.737	55.303	59.373
Banjarnegara	94.136	120.100	106.421	112.392	119.522	126.793	132.370
Barito Kuala	69.700	75.017	79.893	85.237	91.425	97.435	101.210
Tapin	55.798	50.911	61.344	65.437	69.696	73.294	76.381
Hulu Sungai Selatan	52.185	54.577	56.698	61.978	65.456	69.386	72.022
Hulu Sungai Utara	65.646	68.836	70.919	74.305	80.826	84.875	87.482
Hulu Sungai Tengah	64.936	54.562	72.149	75.470	78.301	82.267	84.467
Tabalong	53.342	69.472	58.567	61.729	64.938	68.282	71.043
Tanah Bumbu	95.193	70.315	65.214	72.389	77.814	83.905	88.617
Balangan	23.993	25.599	26.830	28.463	30.485	32.292	33.995
Banjarmasin	181.761	180.353	193.878	201.102	209.169	210.882	221.301
Banjarnegara	95.589	99.096	111.061	119.235	126.747	134.213	140.215
Kalimantan Selatan	949.096	998.651	1.046.405	1.109.175	1.183.771	1.245.167	1.300.110

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan dalam Angka 2021

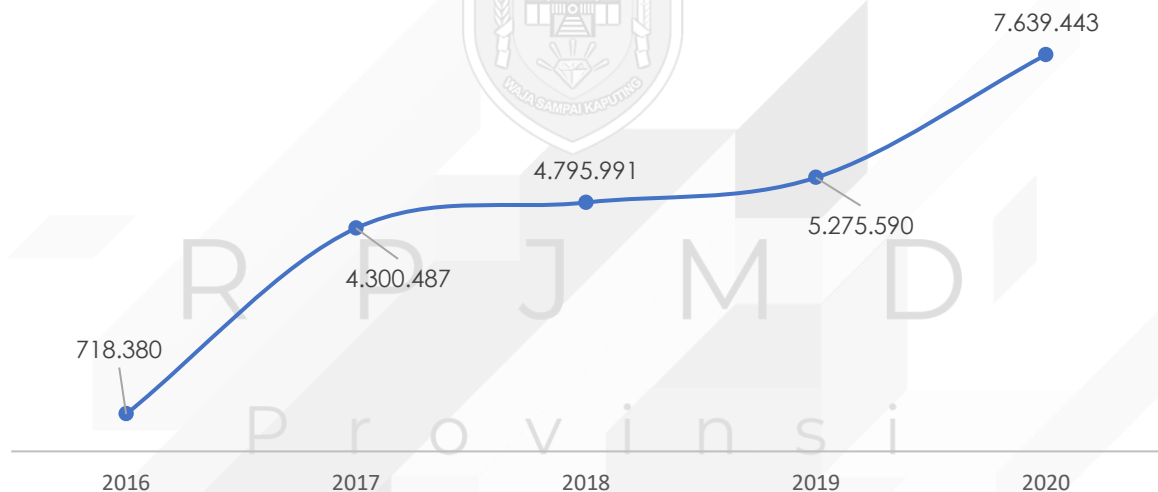
Tabel II-161 Capaian Kinerja Urusan ESDM Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Elektrifikasi	%	88.34	92.12	97.36	99.27	99.25
2	Rasio Desa Berlistrik	%	96.35	96.41	97.61	97.4	98.31
3	Persentase penurunan muka air tanah dan kualitas air tanah	%	0	4.35	3.32	7.74	16.48
4	Persentase potensi energi baru terbarukan yang dapat dimanfaatkan	%	0	0	83.33	71.4	71.4
5	Persentase luas lahan terganggu yang telah direklamasi (IUP)	%	0	0	100	44.21	77.11
6	Persentase luas lahan terganggu yang telah direvegetasi (IUP)	%	0	0	0	20.2	26.76

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan 2021

2.3.2.5 Pariwisata

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi obyek wisata yang layak untuk diperhitungkan sebagai daya tarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Hal ini terlihat perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Kalimantan Selatan baik domestik maupun mancanegara mencapai 718.380 wisatawan dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 7.639.443.



Gambar II-45 Kunjungan Wisata di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2021

Tabel II-162 Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Peningkatan Kunjungan Wisatawan (orang)	Orang	718.380	4.300.487	4.795.991	5.275.590	7.639.443
2	Lama Tinggal Wisatawan (hari)	Hari	3	3	4	4	3

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. Kalimantan Selatan, 2021

2.3.2.6 Perdagangan

Nilai ekspor menjadi salah satu pilihan menarik dalam menumbuhkembangkan perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus perekonomian nasional. Pada perkembangannya, komoditas produk tambang mendominasi ekspor di Provinsi Kalimantan Selatan dimana pada tahun 2020 sebesar 2.585.585.00 ton dimana angka tersebut memiliki nilai ekspor sebesar US\$ 36.097.854. dan di sektor Kelapa Sawit juga berkontribusi sebesar 108.787.036.65 ton dimana angka tersebut memiliki nilai US\$ 3.959.239.077 untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel dibawah;

Tabel II-163 Volume dan Nilai Realisasi Ekspor Menurut Komoditas Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2020

Komoditas	Volume (Ton)	Nilai (000 US\$)
Kelapa Sawit	108.787.036.65	3.959.239.077
Karet Alam	1.127.844.15	781.783.869
Kayu	351.110.08	270.371.563
Rotan	56.493.42	33.416.085
Perikanan	2.585.585.00	36.097.854
Produk Tambang	177.167.74	22.073.697
Produk Lainnya	122.995.03	3.452.206
Total	103.035.88	826.517.384.00

Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2021

Tabel II-164 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	LPE Perdagangan		8	7.62	8.26	7.48	7.33
2	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB		8	9.31	10.21	10.01	10.60
3	Laju Inflasi Harga		3.90				
4	Persentase Barang Beredar Yang Sesuai Dengan Ketentuan		65	80	80	65	81.01
5	Persentase Pelaku Usaha/Konsumen Yang Paham Akan Pentingnya Pengawasan Barang Beredar		100				
6	Peningkatan Bersih Nilai Ekspor		>60	-12.36	16.78	14.08	-12.62
7	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang		5				

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan 2021

2.3.2.7 Industri

Perindustrian di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami perkembangan yang menunjukkan sisi positif dalam membentuk struktur perekonomian wilayah. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian makro di Kalimantan Selatan pada tahun 2020 cukup dominan dimana besarnya mencapai 13.52 atau menurun dibandingkan tahun 2019 (13.64) dan data yang sekarang masih data sementara. Perkembangan sektor dikarenakan sejumlah potensi ekonomi yang berada di wilayah Kalimantan Selatan seperti sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia, hingga investor yang menanamkan modalnya untuk kepentingan bersama.

Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan di dalam PDRB Kalimantan Selatan dari tahun 2015 sampai 2020 mengalami fase naik turun dari 3.50(2015)

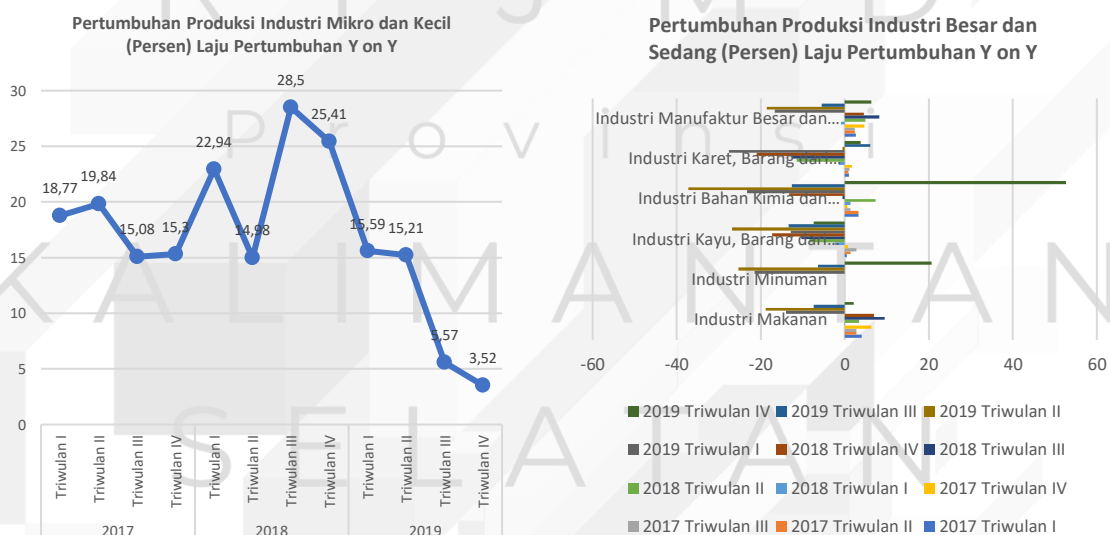
menjadi -3.38 (2020) dan meningkat menjadi 1.45 (2019). untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada Tabel II-165 di bawah.

Tabel II-165 Perkembangan Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertumbuhan (%)	3.50	6.42	6.61	4.23	1.45	-3.38
Kontribusi terhadap PDRB (ADHB)(%)	13.39	13.98	14.39	14.00	13.64	13.52

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2019

Pertumbuhan produksi dari Industri Kecil dan Mikro mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai dengan 2019. sedangkan industri besar dan sedang cenderung mengalami penurunan dari grafik dibawah menunjukkan bahwa Pertumbuhan Produksi Industri Mikro Naik Turun dari tahun ke tahun. sedangkan Pertumbuhan Produksi Industri Besar juga mengalami penurunan yang signifikan bisa di lihat dari grafik di bawah ini.



Gambar II-46 Pertumbuhan Produksi Industri Kecil dan Menengah serta Industri Besar dan Sedang Per Triwulan Tahun 2017 - 2019 (year to year)

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Tabel II-166 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4.38	5.29	5.12	4.08	-1.81
2	LPE Industri	%	6.46	5.69	4.34	1.45	-3.38
3	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	5.21	5.46	5.71	5.05	5.30
4	Persentase Pertumbuhan Sentra-Sentra industri	%	5	5	5	5	5
5	Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri	%	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Perindustrian Prov. Kalimantan Selatan 2021

2.3.2.8 Transmigrasi

Urusan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu dari Program Prioritas Nasional dan Prioritas Kementerian. Diharapkan melalui program transmigrasi dapat mendukung tujuan pembangunan nasional dan daerah yakni pemerataan jumlah penduduk, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, program transmigrasi berperan dalam mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka melalui pembukaan lapangan kerja baru, yang umumnya pada sektor informal. Kalimantan Selatan memiliki lokasi transmigrasi yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten, yaitu Barito Kuala, Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Tapin, Balangan, dan Tabalong. Sedangkan lokus Prioritas Kawasan Transmigrasi Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan adalah di Kabupaten Barito Kuala, (Nama Kawasan: Cahaya Baru), dan Lokus Kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian, yaitu Kawasan Transmigrasi Gula Habang (Kabupaten Balangan) dan Kawasan Transmigrasi Sebamban (Kabupaten Tanah Bumbu).

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Setiap wilayah di Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya yang menjadikan setiap daerah dapat berbeda dalam merencanakan pembangunannya. Terlebih lagi dalam hal daya saing daerah, dimana daya saing tersebut merupakan optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah terutama sumber daya baik alam maupun manusianya. Hal tersebut akan menjadi salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan tujuan pembangunan daerah sehingga akan tercapai tujuan pembangunan daerah yang hakiki. Terkait dengan aspek daya saing daerah diuraikan tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

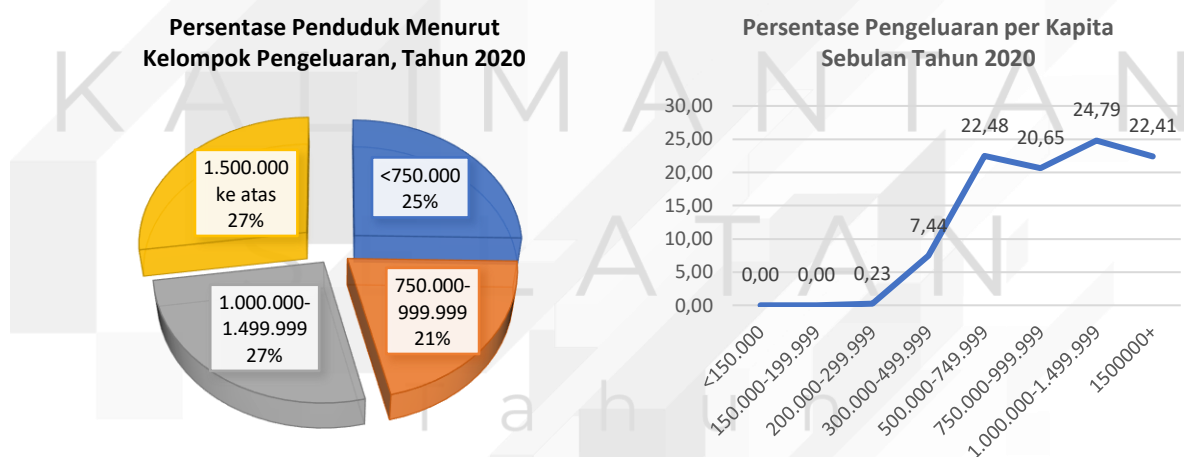
Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah terkait dengan kapasitas ekonomi daerah dimana daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan perlu adanya tinjauan terhadap kemampuan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengetahui kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dimana semakin baik kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin tinggi pula daya saing daerah tersebut dengan daerah lain.

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pada aspek kemampuan ekonomi daerah, salah satu indikator adalah pengeluaran rata-rata per kapita selama sebulan. Pengeluaran penduduk akan merepresentasikan pendapatan yang diterima dalam sebulan sehingga akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Pengeluaran rata-rata per kapita di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum mengalami kenaikan di setiap periodenya yang dikarenakan adanya berbagai hal seperti laju inflasi, peningkatan arus komoditas barang, hingga perubahan gaya hidup masyarakat.

Pada tahun 2017, Pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kalimantan Selatan sebagian besar terdapat pada golongan pengeluaran 500.000 – 749.999 rupiah yaitu sebanyak 24,83 persen.

Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kalimantan Selatan sebagian besar digunakan untuk pengeluaran makanan yaitu sebesar 22,41 persen sedangkan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk non makanan sebesar 24,79 persen, yang mengindikasikan bahwa masyarakat masih cukup tinggi upayanya dalam memenuhi kebutuhan primer.



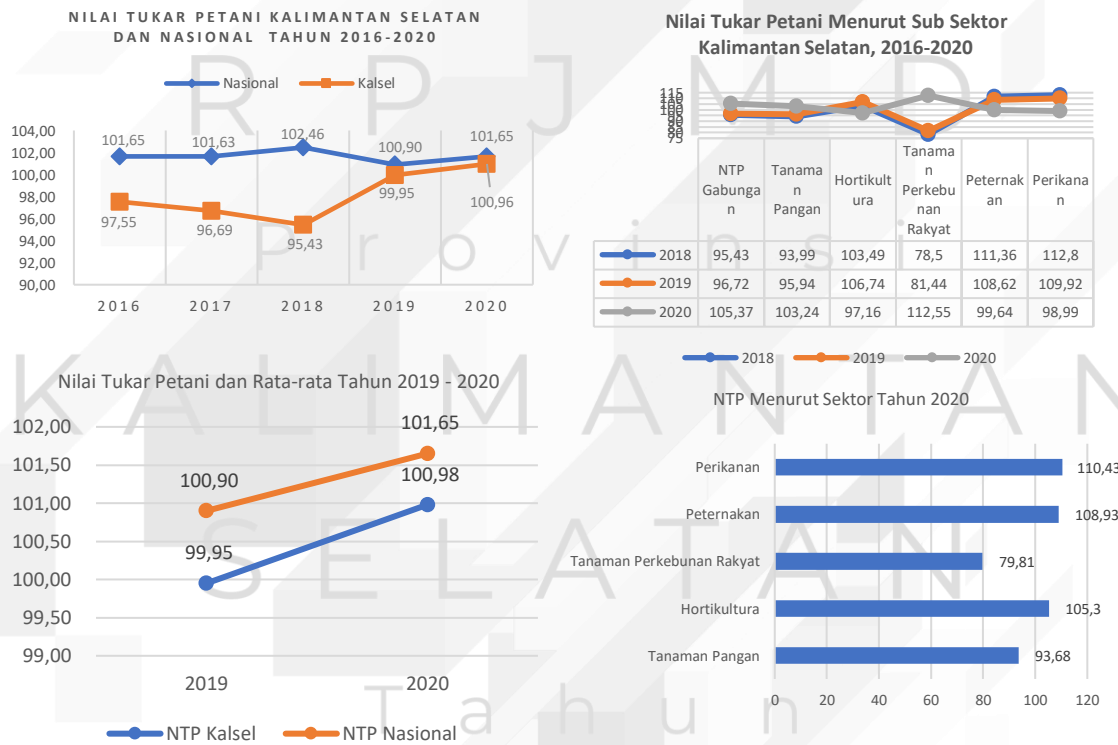
Gambar II-47 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran Per Kapita Tahun 2020 dan Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

Sumber: BPS Prov.Kalimantan Selatan 2021

2.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Nilai Tukar Petani rata-rata

Kalimantan Selatan dibandingkan dengan Nasional dari tahun 2016 sampai 2020 cenderung mengalami peningkatan. dimana NTP rata-rata tahun 2016 Kalimantan Selatan berada di bawah NTP Nasional yaitu sebesar 101.65 dan persentasenya pun naik turun hingga di tahun 2020 rata-rata NTP Kalimantan Selatan menjadi 101.65 atau berada di atas NTP Nasional dengan nilai sebesar 100.96. Jika dilihat berdasarkan sub sektor, sub sektor perikanan, peternakan dan hortikultura yang mempunyai kecenderungan meningkat dari tahun 2018 sampai 2020. sedangkan subsektor tanaman pangan dan subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat cenderung menurun. NTP sub sektor perikanan mempunyai nilai paling tinggi dan NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat mempunyai NTP terendah pada tahun 2020. sebagaimana dapat dilihat pada Gambar II-48.



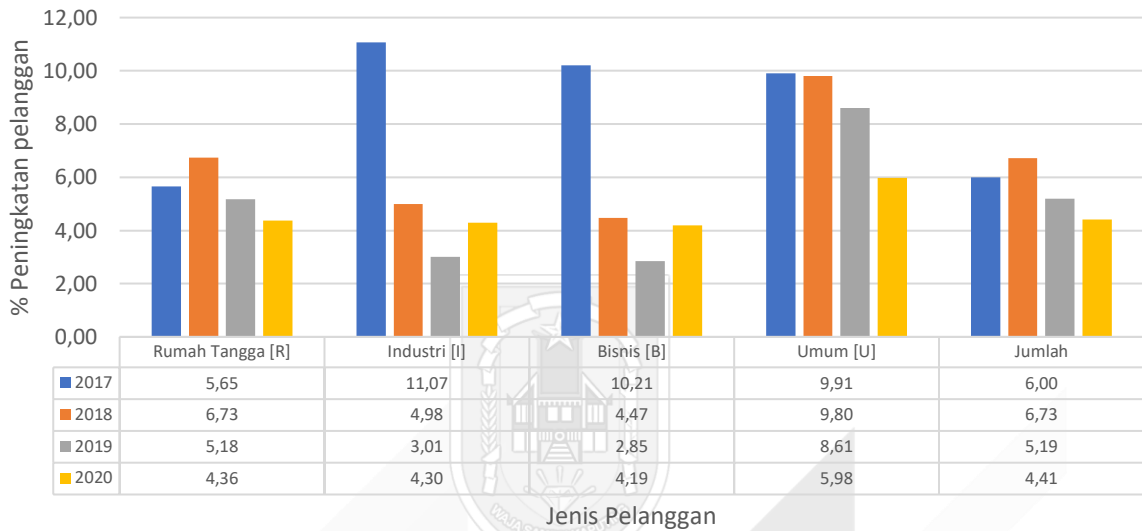
Gambar II-48 Tukar Petani Kalimantan Selatan dan Rata-rata Nasional Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan

2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Energi

Perkembangan fasilitas infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Selatan cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan jumlah pelanggan listrik dari tahun 2017 sampai 2020. Jenis pelanggan yang mengalami peningkatan pada tahun 2019 ke 2020, yakni jenis pelanggan Bisnis dan Industri, yakni dari semula masing-masing 2,85% menjadi 4,19% dan 3,01% menjadi 4,30%.

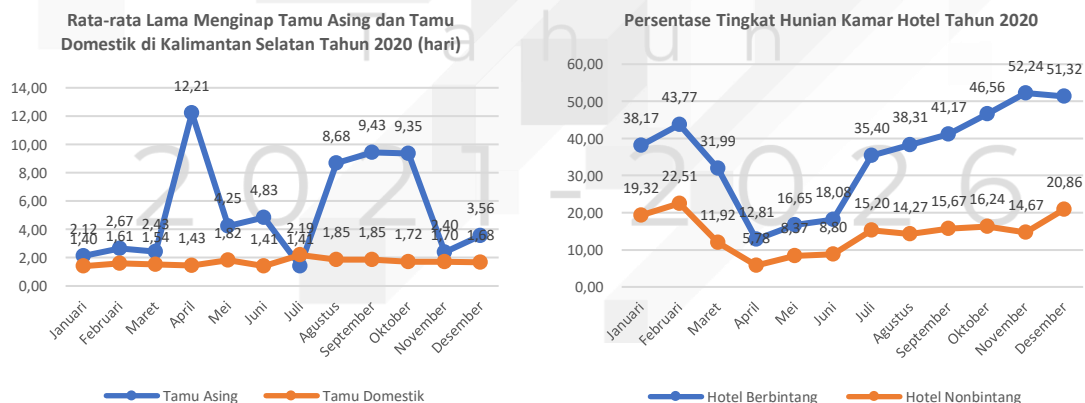


Gambar II-49 Persentase peningkatan pengguna listrik dan informasi jenis pelanggan di Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2020

Sumber BPS Prov. Kalimantan Selatan 2020

2. Hotel

Tingkat hunian kamar hotel berbintang di Provinsi Kalimantan tahun 2020 rata-rata 51.32 untuk Hotel Berbintang dan 20.86 untuk Hotel Nonbintang pada Bulan Desember. atau secara umum berada di bawah 50 rata-rata per bulannya. Jika dilihat rentangnya. tingkat hunian kamar tertinggi pada hotel berbintang di Kalimantan Selatan sebesar 52.24 pada bulan November dan terendah sebesar 5.78 pada bulan April di karenakan adanya Pandemi Covid-19. Jika dilihat dari lama menginap tamu asing dan domestik. maka lama menginap tamu asing pada tahun 2020 rata-rata 3.30 malam dan tamu domestik rata-rata 1.67 malam.



Gambar II-50 Tingkat Penghunian Kamar per Bulan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan Rata-rata Lama Menginap tamu Asing dan tamu Domestik

Sumber: BPS Kalimantan Selatan. Diolah 2021

2.4.3 Sumber Daya Manusia

1. Ketenagakerjaan

Dependency Ratio atau rasio ketergantungan merupakan suatu indikator yang dapat mengindikasikan suatu wilayah apakah tergolong maju atau tidak dari segi demografi. Rasio ketergantungan menunjukkan ketergantungan antara penduduk produktif terhadap penduduk non produktif.

Di Provinsi Kalimantan Selatan, rasio ketergantungan pada tahun 2014 mencapai 48.90 yang berarti dari 100 penduduk usia produktif akan menanggung beban sebanyak 48-49 penduduk usia non produktif. Rasio ketergantungan juga dibagi menjadi dua yakni rasio ketergantungan muda (43.30) dan rasio ketergantungan tua (5.61). Dari kedua rasio tersebut, terlihat bahwa beban tanggungan didominasi terhadap usia non produktif muda yang berumur 0-14 tahun yang mencapai 43-44 penduduk yang harus ditanggung. Penduduk usia non produktif tua hanya sebanyak 5-6 penduduk saja yang harus ditanggung bebannya oleh 100 penduduk usia produktif.

Tabel II-167 Rasio Ketergantungan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020

Uraian	Nilai
Jumlah Penduduk	4.073.584
Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)	2.889.012
Penduduk Usia Non Produktif 0-14 tahun	975.056
Penduduk Usia Non Produktif 65+	179.968
Rasio Ketergantungan Muda	33.75
Rasio Ketergantungan Tua	6.23
Rasio Ketergantungan	39.98

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan Tabel Dinamis, 2021

2.4.4 Capaian Kinerja Sasaran RPJMD Periode 2016-2021

Pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021. Visi



Provinsi Kalimantan Selatan yaitu "**Kalimantan Selatan Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing**", serta misi pembangunan yaitu : mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik; memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan lokal; mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya; mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.





Tabel II-168 Capaian Kinerja RPJMD Periode 2016-2021

MISI/TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI TAHUNKE-										TARGET AKHIR
		2014 /2015	2016 (T)	2016 (R)	2017 (T)	2017 (R)	2018 (T)	2018 (R)	2019 (T)	2019 (R)	2020 (T)	2020 (R)	2021
MISI 1: MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG AGAMIS, SEHAT, CERDAS DAN TERAMPIL													
Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia	IPM	-	68,88	69,05	69,5	69,65	70,13	70,17	70,75	70,72	71,38	71-71,8	70,91
	Tingkat Pengangguran	(2015) 4,83	4,8- 4,78	3,53	4,77- 4,71	4,77	4,7-4,5	4,5	4,25- 4,20	4,31	4,10- 4,03	4,10- 4,3	4,74
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	11,96	12,25	12,29	12,54	12,46	12,83	12,5	13,12	12,52	13,41	12,68	13,7
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,76 (2015)	7,7	7,89	7,79	7,99	8	8	8,2	8,2	8,5	8,29	9
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	67,80 (2015)	67,66	68,02	68,19	68,02	68,55	68,49	68,92	68,92	69,28	68,66	69,64
Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	69,73 (2015)	69,91		70,07		70,22	69,74	70,34	74,6	70,46	69,33	70,58
Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Persentasi peningkatan kegiatan keagamaan	100%	100%		100%		100%		100%	73%	100%		100%
Meningkatnya Indeks Pembangunan Pemberdayaan Gender	IPG	88,55 (2015)	88,6		88,6	88,60	88,8	88,61	88,88	88,61	89	88,61	89
	IDG	70,29 (2015)	67,4		67,56	71,39	67,6	71,31	67,64	74,6	67,7	74,6	67,78
	Persentase Pernikahan Anak	33,68%	-		46,85%		46,00%		45,85%	17,60%	45,60%		45,55%
MISI 2: MEWUJUDKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK													
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat												
	Indeks Reformasi Birokrasi												



MISI/TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI TAHUNKE-										TARGET AKHIR
		2014 /2015	2016 (T)	2016 (R)	2017 (T)	2017 (R)	2018 (T)	2018 (R)	2019 (T)	2019 (R)	2020 (T)	2020 (R)	2021
	Indeks Kualitas Layanan Publik												
Meningkatnya Kualitas Layanan publik	Indeks Kualitas Layanan Publik	78,13	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau
Meningkatnya Pendanaan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	-0,02%	7%		7%		7%		7%		7%		7%
Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	PersentaseCapaian Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah	0%	20%	105%	40%	104%	60%	21%	80%	80%	90%	90%	100%
Terwujudnya Aparatur Pemerintah yg Profesional dan Pemerintahan yg Akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	SAKIP	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A	A	A	BB	A
		76,3	78,52	77,29	78,66	80,26	80,26	80,74	80,55	80,74	80,56	78,49	81,01
	Indeks Profesionalisme Pegawai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	78	62,83	85	62,83	90	85	95
	Persentase Hasil Penelitian & Pengembangan yg dimanfaatkan utk Percepatan Pembangunan Daerah	-	50		60		70	82,3	80	72,72	85	79,26	95
MISI 3: MEMANTAPKAN KONDISI SOSIAL BUDAYA DAERAH YANG BERBASISKAN KEARIFAN LOKAL													
Meningkatkan kesejahteraan Sosial masyarakat	Indeks Gini	0,359	0,333	0,33	0,333	0,347	0,333	0,344	0,333	0,334	0,333	0,332	0,332
	Tingkat Kemiskinan	(2015) 4,72	4,68–4,66	4,52	4,65–4,55	4,7	4,50–4,30	4,54	4,25–4,05	4,47	4,03–4,02	5,2	4,38
Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasar	194,623	7,50%	3,45%	15%	3,45%	22,50%	27,76%	30,00%	29,68%	37,50%	25,40%	45,00%



MISI/TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI TAHUNKE-										TARGET AKHIR
		2014 /2015	2016 (T)	2016 (R)	2017 (T)	2017 (R)	2018 (T)	2018 (R)	2019 (T)	2019 (R)	2020 (T)	2020 (R)	2021
Meningkatnya desa dengan kinerja yang baik	Persentase desa dengan kinerja yang baik	2,68%	5,36%	2,68%	2,68%	8,04%	2,68%	10,72%	2,68%	13,04%	2,68%	16,89%	18,76
Meningkatnya ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat	Angka kriminalitas	7138	6699	N/A	6704	N/A	6264	5303	5724	5303	5084	5158	4344
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	-	-	-	-	47,17	-	47	51	48	52	47,43	0,53
	Persentase Pemuda Mandiri	-	-	-	-	-	-	45,00%	1,03%	24,20%	1,26%	0,53%	1,50%
Meningkatnya budaya olahraga di masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam berolahraga	-	10%	-	15%	-	25%	24,54%	30%	28,00%	35%	35,31%	40%
	Peringkat kejuaraan olahraga tingkat regional, nasional, dan internasional	-	-	-	-	-	-	-	10	-	8	6	6
Meningkatkan kualitas kehidupan yang berbasis kearifan lokal	Indeks Kebahagiaan												
Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan Kepedulian	Konflik SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningkatnya Ketahanan Budaya dan Kualitas Seni Masyarakat	Meningkatkan ketahanan budaya dan kualitas seni masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	40%		45%	42%	50%
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	53,79%	35%	56,79%	40%	57,13%	45%
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	4,01%	4,97%	-	4,88%	-	4,67%	-	4,42%		4,17%		4,09%



MISI/TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI TAHUNKE-										TARGET AKHIR
		2014 /2015	2016 (T)	2016 (R)	2017 (T)	2017 (R)	2018 (T)	2018 (R)	2019 (T)	2019 (R)	2020 (T)	2020 (R)	2021
MISI 4: MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG Mendukung PERCEPATAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA													
Meningkatkan penyediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,88	69.05	69,5	69,65	70,13	70,17	70,75	70,72	71,38	71-71,8	70,91	68,88
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,84	3,28–3,78	4,38	3,53–4,03	5,29	3,78–4,28	5,13	4,03–4,53	4,08	4,28–4,78	3,1-3,6	-1,81
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	Persentase Infrastruktur ke-PU an yang berkualitas	-	-	-	-	-	60,02	63,83	61,96	69,27	67,38	70,55	70,89
	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	-	-	-	-	-	80,5	80,5	81	74,9	81,5	79,75	82
	Persentase luasan kawasan permukiman dan perumahan dalam kondisi baik	-	-	-	76,67	-	76,76	76,7	76,89	76,89	77,03	77,02	77,17
	Rasio Elektrifikasi	84,78	87,6	88,34	90,65	92,12	92,9	97,36	94,75	99,27	95	99,25	95,5
	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi	75	77	75	79	76	79,5	78,4	80,25	80,25	81,15	81,15	81,25
MISI 5: MENGEMBANGKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH YANG BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL, DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN													
Meningkatkan daya saing Perekonomian	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,84	3,28–3,78	4,38	3,53–4,03	5,29	3,78–4,28	5,13	4,03–4,53	4,08	4,28–4,78	3,1-3,6	-1,81
	Inflasi												
Terwujudnya Mandiri Pangan	Surplus Produksi:												



MISI/TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI TAHUNKE-										TARGET AKHIR
		2014 /2015	2016 (T)	2016 (R)	2017 (T)	2017 (R)	2018 (T)	2018 (R)	2019 (T)	2019 (R)	2020 (T)	2020 (R)	2021
	Beras	724.552	1.287.208	1.357.952	1.325.824	1.485.982	1.365.599	1.525.122	1.406.567	790.444	1.448.764	878.036	1.576.839
	Daging	78.286,92	68.144	103.874,52	71.551	109.165,79	75.129	90	78.885	114.667	82.829	93.761	85.738
	Ikan	378.000	383.000	418.614,16	389.000	429.858,93	395.000	404.511	401.000	434.800	408.000		418.000
Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian	LPE Pertanian	3,67	5,32	4,38	2,81	2,24	3	3,63	3,15	3,78	3,25	-25,92	3,35
	LPE Pertanian Tanaman Pangan	4,3	6,03	6,03	2,41	2,53	2,5	2,08	2,75	5,99	2,8	-4,07	2,8
	LPE Peternakan	4,54	-	-	-	6,65	-	4,02	7	5,75	7,25	1,76	7,55
	LPE Perikanan	4,03	-	-	-	7,75	-	7,91	8,3	4,17	8,35	1,23	8,4
	LPE Perkebunan	-0,64	-	-	-	3,35	-	2,69	3,75	0,65	3,8	-0,36	3,8
	Kontribusi PDRB Sektor Kehutanan		-	-	-	-	-	-	0,54%		0,55%		0,56%
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa	LPE Industri	4	4	6,6	4	6,12	4	5,08	4	1,44	4	-5,31	4,5
	LPE Perdagangan	8,2	8	8,26	8	8,77	8	8,25	8	7,99	8	-3,57	8
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Peningkatan Kunjungan Wisatawan (orang)	654.834	753.059	654.787	866.018	718.380	1.125.823	858.727	1.463.570	5.275.590	1.902.641	7.768.439	2.473.434
	Lama Tinggal Wisatawan (hari)	3	3	-	3	3	4	3	4	3	5	3	5
Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian	Realisasi Peningkatan Nilai Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah)	5,4	7,1	6,25	8,1	11,705	9,2	9,5	10,5	15,65	12	5,79	14,4
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,86 (2014)	58	58,75	59	62,07	60	61,47	61	61,94	63	68,43	61,94



MISI/TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI TAHUNKE-										TARGET AKHIR
		2014 /2015	2016 (T)	2016 (R)	2017 (T)	2017 (R)	2018 (T)	2018 (R)	2019 (T)	2019 (R)	2020 (T)	2020 (R)	2021
Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan	Indeks Tutupan Lahan	44,11	48	44	50	49,21	51	49,29	53	46,78	55	48,48	58
	Indeks Kualitas Udara	89,02	90	85,6	91	89,02	92	87,75	93	88,78	94	88,93	95
	Indeks Kualitas Air	52,25	55	51,56	57	52,25	59	51,43	60	55,31	62	51,67	63

Sumber: RPJMD Prov. Kalimantan Selatan 2016-2021, RKPD PERUBAHAN 2020, BPS Kalimantan Selatan 2021.

RPJMD
Provinsi
KALIMANTAN
SELATAN
Tahun
2021-2026



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa IPM pada tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 70.91. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Selama periode 2019 hingga 2020, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir pada tahun 2020 memiliki peluang untuk hidup hingga 68.66 tahun, meningkat 0.17 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12.68 tahun, meningkat 0.16 tahun dibandingkan dengan tahun 2019. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8.29 tahun, meningkat 0.09 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah memerlukan strategi percepatan atau akselerasi program dan kebijakan pembangunan daerah yang dapat mempercepat laju pertumbuhan angka IPM yang saat ini IPM Provinsi Kalimantan Selatan masih dibawah rata-rata IPM Nasional yaitu 71.94. Penguatan kebijakan sektoral yang perlu dimantapkan adalah sektor penguatan sistem Kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan keterampilan, dan penanganan masalah sosial

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan I tahun 2021 berkontraksi sebesar - 1.25% jika dibandingkan dengan kondisi triwulan I tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2020, perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan I tahun 2021 mengalami kontraksi yang lebih dalam yaitu -3,55%. Kontraksi terdalam dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 4,95 persen; diikuti Pertambangan Penggalian sebesar 4,91 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 4,71 persen. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif diantaranya adalah Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,09 persen; diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,90 persen; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,76 persen.

Perekonomian Kalimantan Selatan 2021 diperkirakan lebih baik dari tahun 2020 terutama didorong oleh peningkatan pendapatan dari hasil ekspor sejalan dengan pulihnya perekonomian global dan domestik. Pertumbuhan Konsumsi RT diperkirakan membaik sejalan dengan pemulihan daya beli masyarakat. Sementara itu, Konsumsi Pemerintah diperkirakan juga mengalami perbaikan kontraksi didorong normalisasi belanja pemerintah setelah setelah masa pandemi Covid-19.

Selama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi global diprediksi mengalami pertumbuhan -3.5 persen akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan leboh berkontraksi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional



pada triwulan I tahun 2021 sebesar -0.74 (y to y). Pertumbuhan ekonomi 2021 jauh dibawah target RPJMD sebesar 4.5–5.3 dan penyesuaian perubahan target dalam Perubahan RKPDP 2021 sebesar 3.1-3.6%. Beberapa kebijakan di level nasional juga sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam merespon penanganan Pandemi Covid 19 antara lain Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan Keputusan Bersama Kemendagri dan Kemenkeu Nomor 119/2813.SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid 19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Di awal Tahun 2021. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga melakukan penyesuaian Dana Alokasi Umum untuk penanganan Covid 19 di daerah.

Gini Rasio Kalimantan Selatan Per September tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 0.351. lebih tinggi dibanding Maret tahun 2020 sebesar mencapai 0.332. Capaian ini lebih rendah dari target akhir RPJMD Kalimantan Selatan periode 2016-2021 sebesar 0.332. Peningkatan Gini Rasio pada bulan September 2021 serupa dengan yang terjadi secara Nasional, yang juga mengalami peningkatan dari 0,381 pada Maret 2020 menjadi 0,385 pada September 2020, namun Gini Rasio Kalimantan Selatan lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Nasional. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan penduduk kelompok 40 persen terbawah sebagai dampak Pandemi Covid-19, apalagi dengan beberapa kebijakan lockdown/pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menghambat aktivitas ekonomi mereka sehingga menyebabkan tingkat pengeluaran mereka juga menurun.

Diperlukan implementasi kebijakan strategis yang mampu mempertahankan angka gini rasio seperti mendorong pertumbuhan sektor produksi (pertanian dan industri). sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja di sektor formal dan meningkatkan akses UMKM terhadap kredit usaha yang diberikan oleh bank.

Tingkat pengangguran terbuka Per Februari tahun 2021 sebesar 4.33%. meningkat dibandingkan pada Februari 2020 yaitu sebesar 3,67%, namun jika dibandingkan dengan kondisi pada Agustus tahun 2020 sebesar 4,74%, kondisi pada Februari 2021 lebih baik atau mengalami penurunan. Capaian tingkat pengangguran ini masih berada dibawah target RPJMD untuk tahun 2021 yang ditargetkan antara 3.6–4.0%. Tingginya tingkat pengangguran tentunya tidak terlepas dari dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan pemerintah dalam rangka penanganan Pandemi Covid 19. Berdasarkan data BPS RI, Tingkat Pengangguran di Indonesia pada Bula Februari 2021 mencapai 6.26% dan 1.62 juta orang terdampak menjadi pengangguran karena pandemi Covid 19. Hal ini menjadi



catatan untuk Provinsi Kalimantan Selatan dalam pencapaian target akhir RPJMD di tahun 2021 yaitu sebesar 3.6–4.0.

Tingkat kemiskinan pada Agustus tahun 2020 sebesar 4.83%. mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 4.47% dan angka ini lebih rendah dari target RPJMD Tahun 2020 yaitu antara 4.03–4.02%. Tingkat Kemiskinan di seluruh Provinsi Kalimantan berada di bawah rata-rata nasional sebesar 9.78% dan Kalimantan Selatan merupakan Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah. Namun, walaupun Kalimantan Selatan memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Tentunya diperlukan pematapan pelaksanaan program dan kegiatan terkait pengurangan jumlah penduduk miskin agar tingkat kemiskinan dapat diturunkan sesuai dengan target akhir RPJMD tahun 2021.

Berdasarkan ekspose nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tanggal 13 Januari 2022 oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh nilai IKLH sebesar 71.03 dengan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 54.75 dan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 89.15. Nilai IKLH tersebut mengalami peningkatan sebesar 2.6 dibandingkan IKLH Tahun 2020 (68.43), nilai IKA mengalami peningkatan sebesar 3.08 dibandingkan IKA Tahun 2020 (51.67), dan nilai IKU mengalami peningkatan sebesar 0.22 dibandingkan IKU Tahun 2020 (88.93).

2.4.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2019-2020 (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018)

SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja. SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan



menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

2.4.5.1 Bidang Urusan Pendidikan

Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai pelayanan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan SPM bidang Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator :

1. Pendidikan menengah; dan
2. Pendidikan khusus

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan Bimtek SPM bidang pendidikan untuk menyamakan persepsi antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota terhadap target SPM. Target pencapaian SPM tahun 2019 masih sebatas melakukan pendataan terhadap anak tidak sekolah (ATS).

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019, diperolehnya data suspect ATS. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel II-169 Realisasi Pencapaian SPM Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019

No.	Kab/Kota	Suspect Anak Tidak Sekolah (ATS)
1	Banjarmasin	8.314
2	Banjarbaru	3.014
3	Banjar	13.074
4	Tapin	2.821
5	Barito Kuala	6.047
6	Tanah Laut	8.018
7	HSS	4.013
8	HST	4.630
9	HSU	4.273
10	Balangan	1.961
11	Tabalong	3.804
12	Tanah Bumbu	2.946
13	Kotabaru	7.938
TOTAL		70.853

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II-170 Realisasi Pencapaian SPM Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga negara yang berusia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	100 %	
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah warga negara yang 100% berusia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	100%	

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel II-171 Pencapaian SPM Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan

NO	PENDIDIKAN	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	SD	3	3			3	3
2.	SLTP	2	3			2	3
3.	SLTA	27	24	6	4	33	28
4.	D-I		-		-		-
5.	D-II		-		-		-
6.	D-III/AKADEMI	1	1	11	2	1	3
7.	D-IV		-		-		-
8.	S-1	37	16	18	19	18	35
9.	S-2/SPECIALIS	76	30	19	15	19	45
10.	S-3						
	JUMLAH	146	77	41	40	44	117

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SMA/SMK masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1;
2. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah menengah, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi.
3. Kondisi bangunan ruang kelas SMA/SMK/Diksus terdapat bangunan yang rusak, kondisi tersebut secara langsung berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;

Solusi untuk permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN terhadap kondisi sekolah;
2. Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan S-1, baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya murni para guru;
Melalui pemeratan di tingkat kecamatan dan menekan adanya perpindahan dari Sekolah yang kurang guru ke sekolah yang sudah memenuhi kecukupan guru.

2.4.5.2 Bidang Urusan Kesehatan

Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai pelayanan di bidang kesehatan sesuai dengan SPM bidang kesehatan dengan indikator :

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel II-172 Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel II-173 Dukungan Personil dalam Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	SD	1	0	1
2.	SLTP	1	1	2
3.	SLTA	10	10	20
4.	D1	1	0	1
5.	D2	0	1	1
6.	D3	5	5	10
7.	D4	0	8	8
8.	S1	12	28	40
9.	S2/Spesialis	17	14	32
10.	S3	1	1	2
	TOTAL	48	68	117

Permasalahan yang ada guna mencapai Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan adalah kesulitan dalam penentuan sasaran. Sasaran yang ada selama ini dalam bentuk estimasi. Oleh sebab itu perlunya SK dari pemegang kebijakan guna menentukan sasaran yang pasti.

2.4.5.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah Provinsi terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Target pelayanan air minum adalah Persentase Target Pemenuhan demand air minum curah lintas kabupaten/kota melalui pembangunan baru dan/atau peningkatan SPAM lintas kabupaten/kota. Target pencapaian SPM

Air Minum yang ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan adalah 100%.

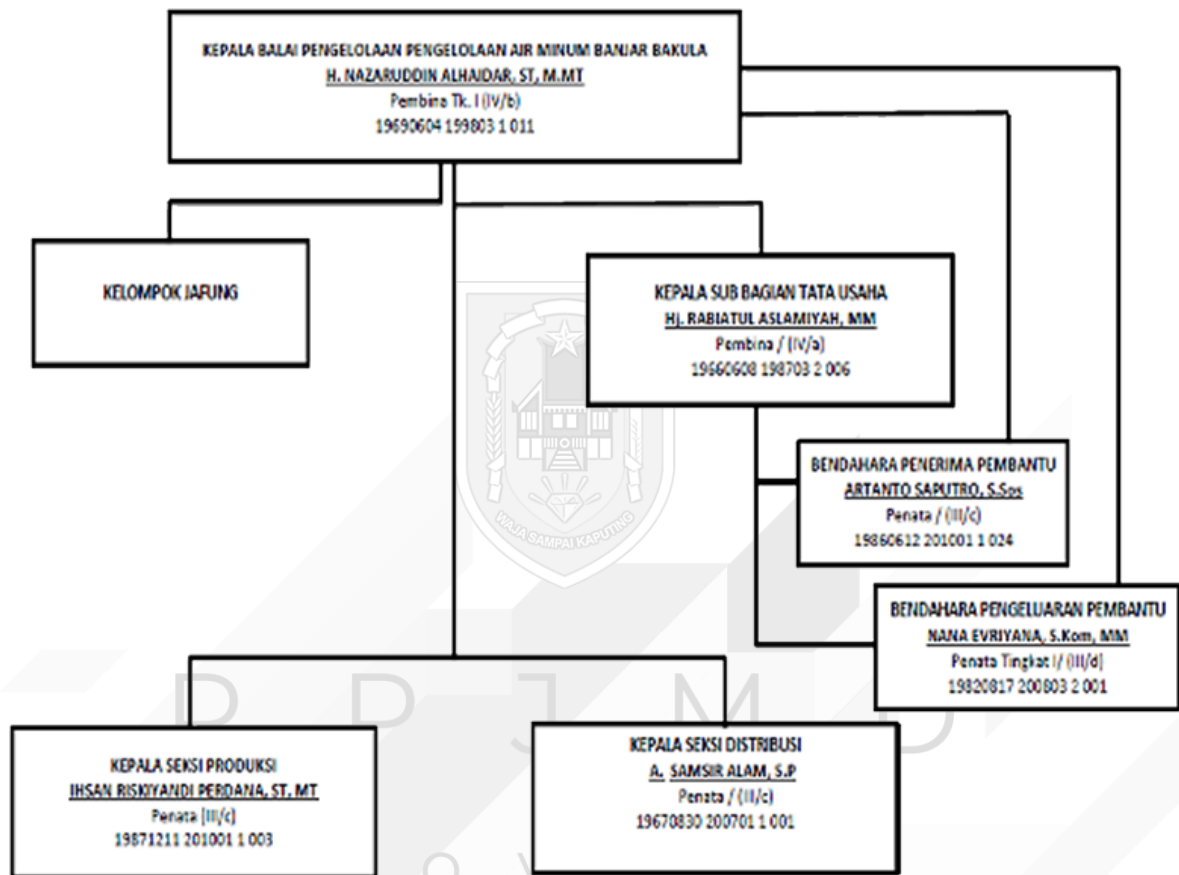
Sesuai dengan Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota yaitu kuantitas dan ukuran kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka realisasi pencapaian SPM bisa dilihat dari Tabel II-174 dibawah ini :

Tabel II-174 Target Pencapaian SPM Sub Bidang Air Minum Daerah

No.	Komponen	Indikator	Target Pelayanan	Output	Capaian SPM Tahun 2020
1.	Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota.	Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota.	Persentase (%) Target pemenuhan demand air minum curah lintas kabupaten /kota melalui pembangunan baru dan/atau peningkatan SPAM lintas kabupaten/kota.	Tersedianya air minum curah melalui SPAM lintas kabupaten /kota yang disalurkan kepada penyelenggara SPAM kabupaten /kota (BUMD /UPTD	100%

Dukungan Pencapaian SPM Air Minum tidak lepas dari dukungan semua karyawan dan karyawan UPTD Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula yang dapat dilihat dari struktur organisasi berikut :

T a h u n
2 0 2 1 - 2 0 2 6



Gambar II-51 Bagan Struktur Organisasi BLUD Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula

Permasalahan yang dihadapi adalah demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota semakin banyak, namun kapasitas pengolahan air terbatas, untuk itu diperlukan penambahan IPA 2 unit dengan kapasitas 250l/dt pada tahun 2021 yang mana hal ini telah diusulkan kepada kementerian PUPR.

2.4.5.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah perumahan rakyat yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat mencakup 2 (dua) pelayanan dasar yaitu : Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang



terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan perumahan Rakyat diatur dalam :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%. Nilai rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 adalah 100%.

Permasalahan yang berkaitan dengan SPM Bidang Prumahan Rakyat yaitu:

- Pemahaman terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat masih rendah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- Belum adanya data yang fix terkait dengan data kebencanaan baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
- Jenis bencana yang masuk dalam kategori bencana alam hampir tidak ada terjadi di provinsi Kalimantan Selatan seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan lain-lain.
- Jumlah personil yang ada di SKPD belum mencukupi untuk dapat melaksanakan kegiatan terkait SPM Bidang Perumahan Rakyat.
- Luasan wilayah yang harus dilakukan kajian sangat luas sehingga agak menyulitkan dalam melakukan survey dan identifikasi.
- Masih kurangnya koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan kegiatan yang berhubungan dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat.
- Dukungan penganggaran yang dirasa masih kurang dalam penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan Rakyat dibandingkan dengan kegiatan yang harus dilaksanakan menurut Permendagri Nomo 10 Tahun 2018 maupun Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018.



- Terjadinya pandemic Covid-19 yang melanda di seluruh dunia termasuk di Indonesia selama tahun 2020 ini berimbas kepada pengurangan anggaran untuk kegiatan-kegiatan rutin termasuk kegiatan penerapan SPM dimana sebagian anggarannya dialihkan untuk penanganan covid-19 tersebut.

Solusi terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut:

- Meningkatkan pemahaman kepada personil terhadap Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat melalui sosialisasi, bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.
- Melakukan pendataan yang akurat terkait kedua jenis SPM Bidang Perumahan Rakyat tersebut kepada SKPD provinsi maupun kabupaten/kota yang menanganinya.
- Meningkatkan pendanaan dalam penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat terkait kriteria-kriteria kegiatan yang harus dilakukan dalam penerapan SPM ini.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat, daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam rangka penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat.

2.4.5.5 Bidang Urusan Tramtibumlinmas

Penerapan SPM Bidang Urusan Tramtibumlinmas di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah tramtibumlinmas yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

SPM Bidang Tramtibumlinmas 1 (satu) pelayanan dasar yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi. Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Tramtibum meliputi:

- a. Standar pelayanan prosedur Satpol PP
- b. Standar sarana prasarana Satpol PP
- c. Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat; dan
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Tramtibum akibat penegakkan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Tramtibunlinmas dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%. Target Pencapaian SPM bidang Tramtibunlinmas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-175 Target Pencapaian SPM Bidang Tramtibunlinmas

NO	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai (%)		
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada di Provinsi	57,61 % (2.245.158 jiwa)	2019	SatpolPP& Damkar Provinsi Kalimantan Selatan.
		83,16 %	2020	SatpolPP& Damkar Provinsi Kalimantan Selatan.

Kondisi yang ada pada Penerapan SPM Bidang Urusan Tramtibumlinmas di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: Keterbatasan Jumlah Pegawai /Anggota Polisi Pamong Praja. Jumlah Pegawai/Anggota yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan saat ini jika dibandingkan dengan tugas pokok yang harus dilaksanakan dirasakan masih kurang terutama untuk Anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas dilapangan (Operasional) yang hanya berjumlah PNS/ASN pejabat struktural dan staf pelaksana 60 orang PTT/Kontrak 157 orang dan Damkar 40 orang dari kebutuhan yang ideal diharapkan sebanyak 500 orang personil; Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia pada SATPOL PP & DAMKAR Prov.Kalimantan Selatan; Dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah terkait dirasakan masih kurang terutama didalam koordinasi dan kesediaan untuk menginformasikan adanya Produk Hukum Daerah pada instansi masing – masing; Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan dalam pelaksanaan operasional kegiatan TRANTIBUMLINMAS di lapangan; Keterbatasan dana untuk menunjang Operasional pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakkan Produk Hukum Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan dana untuk menyelenggarakan kegiatan dimaksud minimal 2 % dari APBD Provinsi.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, tentunya diperlukan solusi yang baik yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, seperti, antara lain:

- a. Menambah jumlah Pegawai/Anggota Polisi Pamong Praja baik dengan



melalui mutasi dari instansi lain ke Satpol. PP dan Damkar maupun dengan cara mengusulkan penerimaan CPNS baru (diharapkan adanya penerimaan CPNS khusus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan untuk diangkat menjadi personil Pol. PP dan Damkar).

- b. Meningkatkan kemampuan Anggota Satpol. PP Prov. Kal Sel dengan cara menyelenggarakan atau mengikutsertakan dalam pelatihan keterampilan, Bimtek, Diklat dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- c. Mengusulkan dan Mengalokasikan dana secara efektif dan efisien untuk menunjang tugas-tugas operasional lainnya di lapangan dalam upaya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta Penegakkan Peraturan Daerah lainnya.

2.4.5.6 Bidang Urusan Sosial

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya. SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti skala Provinsi;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti skala provinsi
- c. provinsi
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti skala provinsi;
- e. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Dalam Panti skala provinsi;
- f. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Capaian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%. Target Pencapaian SPM bidang sosial dapat dilihat pada :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti skala provinsi dengan target capaian sebesar 100%
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti skala provinsi dengan target capaian sebesar 100%



- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti skala provinsi dengan target capaian sebesar 100%
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Dalam Panti skala provinsi dengan target capaian sebesar 100%
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial dengan target capaian sebesar 100%.

Kondisi data yang ada di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan belum satu pintu, masih ada beberapa data dari sumber yang berbeda, diantaranya : Data PMKS, Basis Data Terpadu, dan Data Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), dimana didalamnya ada data kemiskinan yang masih berbeda jumlahnya.

Masih adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, penanganan pelayanan terhadap PMKS untuk kewenangan Provinsi belum dapat maksimal karena sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Panti Sosial masih belum mencukupi. Peran PSKS dalam penanganan PMKS di wilayah masih perlu dorongan dan dukungan terutamadukung penguatan kapasitas dan mobilitas dari APBD Kabupaten/Kota.

Kurangnya dukungan SDM dan profesional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja bidang kesejahteraan sosial.

Panti Sosial Bina Wanita (PSTW) Melati Realisasi fisik tidak 100% dikarenakan di semester II hanya merekrut 44 klien (target semester II adalah 60 klien). Usulan awal di APBD perubahan untuk semester II adalah 60 klien. Menjelang pelaksanaan seleksi 60 klien ada arahan Kepala Dinas Sosial yang memberikan pandangan lain bahwa protokol Covid 19 mengkehendaki adanya physical distancing baik di dalam asrama maupun kelas, sehingga klien yang direkrut menjadi 50% dari kapasitas yang ada (kapasitas penuh 85 klien), yaitu sebanyak 44 klien. Sedangkan usulan APBD perubahan saat itu sudah sampai revisi 5, tidak dimungkinkan lagi untuk merubah target.

Untuk mengatasi kondisi tersebut diatas perlu koordinasi dengan Kabupaten/Kota mengenai permasalahan anggaran melalui Rapat Koordinasi Teknis yang biasanya hanya satu hari menjadi dua hari agar pembahasan anggaran mengenai program/kegiatan untuk di tahun yang akan datang dapat lebih intensif sehingga pemerataan penanganan dan pelayanan permasalahan kesejahteraan sosial dapat tercapai. Demikian pula dengan pelaksanaan Program/Kegiatan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pendataan ini dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota karena mereka yang mengetahui teknis

dilapangan mengenai jumlah data yang sesungguhnya.

2.4.6 Kondisi Umum Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Selatan

Indikator TPB sebanyak 235 indikator yang menjadi kewenangan provinsi telah dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 217 indikator, di mana 111 indikator telah mencapai target nasional (kategori A) yang ditetapkan dalam Perpres 59 Tahun 2017. Sedangkan 71 indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (kategori B), 11 indikator yang belum dilaksanakan (kategori C) dan 24 indikator belum ada data (kategori D). Secara umum, jumlah indikator TPB berdasarkan kategori di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-176 Jumlah Indikator TPB Berdasarkan Kategori di Kalimantan Selatan

No	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	A	B	C	D	Jumlah
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Di manapun	13	7	1	2	23
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	9	1	0	1	11
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	19	11	0	4	34
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	6	4	0	0	10
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5	7	0	3	15
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	12	4	1	0	17
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	2	1	1	2	6
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	4	12	0	3	19
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	5	3	2	1	11
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	3	3	0	3	9
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	4	4	3	0	11



No	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	A	B	C	D	Jumlah
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	1	0	1	3	5
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	1	2	0	0	3
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	4	0	0	0	4
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	3	4	0	0	7
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	13	4	0	0	17
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	7	4	2	2	15
	Total	111	71	11	24	217

KALIMANTAN
SELATAN
Tahun
2021 - 2026



R P J M D



P r o v i n s i

K A L I M A N T A N

GAMBARAN KEUANGAN SELATAN DAERAH

T a h u n

2 0 2 1 - 2 0 2 6

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lebih mengetahui kebutuhan rakyat dan potensi di daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuan keuangan daerah merupakan daya dukung manajemen pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Secara mendasar, analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek utama, daerah diharapkan mampu mandiri, antara lain tercermin dari peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Pada bab ini disajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi gambaran kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dalam 5 (lima) tahun terakhir, dan proyeksi kerangka pendanaan kedepan selama periode 2021-2026.

3.1 Kinerja Keuangan di Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan dalam periode RPJMD yang lalu yaitu periode tahun 2016 - 2021. Sebagaimana analisis kinerja masa lalu, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan ke depan. Kinerja keuangan masa lalu dimaksud terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD terdiri realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan yang meliputi realisasi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan neraca keuangan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selanjutnya, beberapa prinsip yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran daerah yaitu:



1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD;
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya disusun bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia, agar tepat sasaran sesuai kebijakan pemerintah daerah dan mempersiapkan pelaksanaan serta pertanggung jawaban pengelolaan anggaran. Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan APBD, di bawah ini diuraikan mengenai perkembangan pendapatan daerah serta perkembangan belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana disajikan pada Tabe III-1. dan 3.2. Penyajian dibagi menjadi dua buah Tabel dikarenakan adanya perubahan ketentuan Struktur APBD Pemerintah Daerah dari Struktur APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

T a h u n

2 0 2 1 - 2 0 2 6

Tabel III-1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2019 (Struktur APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006)

NO	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	PENDAPATAN DAERAH	5.218.654.285.852	5.609.663.321.767	6.592.642.996.632	6.677.457.782.393
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.500.073.656.774	2.841.891.516.564	3.557.316.628.830	4.023.568.997.352
1.1.1.	Pajak Daerah	1.867.418.431.727	2.231.848.166.299	2.816.261.395.629	3.367.383.549.200
1.1.2.	Retribusi Daerah	27.535.065.124	25.279.466.523	27.822.490.620	32.324.429.689
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	45.762.812.833	45.921.198.563	52.254.185.375	21.826.144.411
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	559.357.347.090	538.842.685.178	660.978.557.206	602.034.874.053
1.2.	DANA PERIMBANGAN	2.677.349.255.301	2.712.223.930.644	2.986.689.751.663	2.557.155.580.105
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.044.507.972.301	635.201.530.500	932.678.930.168	801.145.583.734
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	779.517.454.000	1.106.532.187.000	1.118.213.289.000	990.122.350.000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	853.323.829.000	970.490.213.144	935.797.532.495	765.887.646.371
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	41.231.373.777	55.547.874.559	48.636.616.139	96.733.204.936
1.3.1.	Pendapatan Hibah	36.231.373.777	48.047.874.559	35.886.616.139	41.214.815.936
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000	7.500.000.000	12.750.000.000	55.518.389.000
2	BELANJA DAERAH	5.178.766.888.168	5.845.800.625.741	6.082.587.192.592	4.585.927.768.839
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.311.178.671.499	2.934.445.697.666	3.193.054.584.365	2.402.760.285.541
2.1.1.	Belanja Pegawai	718.076.026.587	1.299.685.855.237	1.356.497.538.572	1.068.717.862.505
2.1.4.	Belanja Hibah	651.580.180.324	580.115.516.388	585.988.963.693	439.077.274.175
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	940.058.062.700	1.052.550.445.782	1.247.332.868.000	893.541.152.861



NO	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Parpol	1.464.401.888	1.971.328.238	3.135.994.000	1.423.996.000
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	-	122.552.021	99.220.100	-
2.2.	BELANJA LANGSUNG	2.867.588.216.669	2.911.354.928.075	2.889.532.608.227	2.183.167.483.298
2.2.1.	Belanja Pegawai	108.823.939.956	181.704.868.300	344.401.850.076	271.410.212.668
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.410.034.315.507	1.341.641.146.183	1.427.934.016.294	1.101.897.580.100
2.2.3.	Belanja Modal	1.348.729.961.206	1.388.008.913.592	1.117.196.741.858	809.859.690.530
	SURPLUS/(DEFISIT)	39.887.397.684	(236.137.303.975)	510.055.804.039	2.091.530.013.554
3	PEMBIAYAAN DAERAH	357.369.805.905	366.088.319.303	130.243.835.036	640.327.639.075
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	382.369.805.905	409.088.319.303	130.243.835.036	640.327.639.075
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	382.059.120.558	397.257.203.589	129.951.015.328	640.299.639.075
3.1.4.	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH		11.500.000.000		-
3.1.7.	Penerimaan Kembali Dana Talangan	-			-
3.1.8.	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	310.685.347	331.115.714	292.819.708	28.000.000
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.000.000.000	43.000.000.000	-	-
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan				-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000.000.000	31.500.000.000		-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	11.500.000.000	-	-

2021 - 2026

Tabel III-2 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020 (Struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

NO	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	NERATA PERTUM- BUHAN (%)
1	PENDAPATAN	5.218.654.285.851,63	5.609.663.321.766,45	6.592.642.996.631,70	6.756.797.304.944,04	6.487.758.292.203,12	5,88
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.500.073.656.773,63	2.841.891.516.563,45	3.557.316.628.829,70	3.498.836.748.488,04	2.940.404.641.480,12	5,31
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.867.418.431.726,65	2.231.848.166.299,40	2.816.261.395.628,86	2.765.973.272.084,47	2.214.723.933.308,88	6,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	27.535.065.124,11	25.279.466.523,00	27.822.490.620,00	39.968.155.612,00	22.077.561.350,00	0,19
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	45.762.812.833,37	45.921.198.563,21	52.254.185.375,19	23.818.940.216,57	34.864.255.774,63	1,52
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	559.357.347.089,50	538.842.685.177,84	660.978.557.205,65	669.076.380.575,00	668.738.891.046,61	5,04
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	.682.349.255.301,00	2.719.723.930.644,00	2.999.439.751.663,00	3.200.639.162.967,00	3.462.610.316.972,00	6,64
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.677.349.255.301,00	2.712.223.930.644,00	2.986.689.751.663,00	3.145.120.773.967,00	3.398.763.335.972,00	6,20
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	209.216.036.918,00	154.707.006.506,00	169.920.751.085,00	131.615.429.102,00	192.688.520.562,00	1,91
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	835.291.935.383,00	480.494.523.994,00	762.758.179.083,00	714.358.337.022,00	1.034.304.224.877,00	13,68
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	779.517.454.000,00	1.106.532.187.000,00	1.118.213.289.000,00	1.188.146.871.000,00	1.091.037.011.000,00	10,27
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	853.323.829.000,00	970.490.213.144,00	935.797.532.495,00	1.111.000.136.843,00	1.080.733.579.533,00	6,54
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	12.750.000.000,00	55.518.389.000,00	63.846.981.000,00	117,61
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	12.750.000.000,00	55.518.389.000,00	63.846.981.000,00	117,61
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-	-
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	36.231.373.777,00	48.047.874.559,00	35.886.616.139,00	57.321.393.489,00	84.743.333.751,00	28,72
1.3.1	Pendapatan Hibah	36.231.373.777,00	48.047.874.559,00	35.886.616.139,00	57.321.393.489,00	84.743.333.751,00	28,72



NO	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	RERATA PERTUMBUHAN (%)
2	BELANJA	5.178.766.888.168,00	5.845.800.625.741,18	6.082.587.192.592,21	7.005.774.789.958,33	6.630.726.561.521,56	6,69
2.1	BELANJA OPERASI	2.889.978.864.262,00	3.405.118.714.346,18	3.716.958.362.634,60	4.036.965.881.290,60	4.299.049.135.342,42	10,52
2.1.1	Belanja Pegawai	826.899.966.543,00	1.481.390.723.537,18	1.700.899.388.648,00	1.763.279.534.073,00	1.934.780.590.156,00	26,84
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.113.796.437.123,00	1.302.310.265.675,00	1.377.269.376.536,60	1.595.112.765.370,60	1.421.082.498.386,42	6,90
2.1.3	Belanja Hibah	947.818.058.708,00	619.446.396.896,00	631.945.871.030,00	668.542.745.822,00	940.903.081.000,00	3,48
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	-	-	4.707.732.420,00	7.894.841.025,00	-	-
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	1.464.401.888,00	1.971.328.238,00	2.135.994.000,00	2.135.995.000,00	2.282.965.800,00	
2.2	BELANJA MODAL	1.348.729.961.206,00	1.388.008.913.592,00	1.117.196.741.857,61	1.495.677.794.542,73	778.100.855.805,14	
2.2.1	Belanja Tanah	3.201.225.000,00	151.117.293.625,00	7.529.414.304,00	9.460.113.740,00	15.732.123.634,00	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	166.197.754.130,00	317.178.336.014,00	329.072.555.211,00	314.301.197.148,00	236.377.444.548,21	16,33
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	252.930.617.468,00	314.916.720.970,00	61.544.283.721,00	395.986.297.733,00	178.103.283.155,00	0,98
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	911.987.186.598,00	538.121.465.206,00	457.124.604.036,61	714.937.055.239,73	279.499.991.374,00	15,14
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	14.413.178.010,00	66.675.097.777,00	61.925.884.585,00	60.993.130.682,00	12,46	91,52
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	-	122.552.021,00	99.220.100,00	-	-7,67	-
2.3.1	Belanja Tak Terduga	-	122.552.021,00	99.220.100,00	-	1.154,38	-
2.4	BELANJA TRANSFER	940.058.062.700,00	1.052.550.445.782,00	1.248.332.868.000,00	1.473.131.114.125,00	1.243.584.302.639,00	8,25
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	940.058.062.700,00	1.052.550.445.782,00	1.247.332.868.000,00	1.473.131.114.125,00	1.243.584.302.639,00	8,25
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	1.000.000.000,00	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	39.887.397.683,63	236.137.303.974,73	510.055.804.039,49	248.977.485.014,29	142.968.269.318,44	299,85
3	PEMBIAYAAN	357.369.805.905,09	366.088.319.302,72	130.243.835.036,00	490.020.439.075,49	391.307.375.861,20	48,53
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	382.369.805.905,09	397.588.319.302,72	130.243.835.036,00	640.320.439.075,49	391.307.375.861,20	72,37
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	382.369.805.905,09	397.257.203.588,72	129.951.015.328,00	640.299.639.075,49	241.042.954.061,20	66,74
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	150.000.000.000,00	-

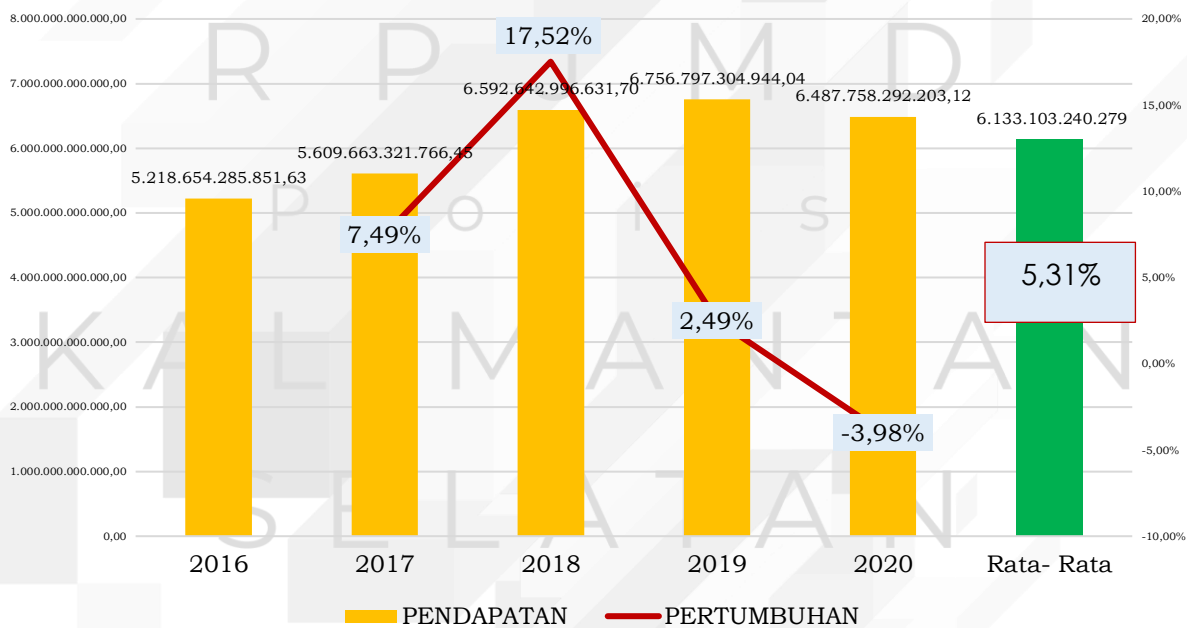


NO	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	RERATA PERTUMBUHAN (%)
3.1.3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	-	331.115.714,00	292.819.708,00	20.800.000,00	264.421.800,00	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00	31.500.000.000,00	-	150.300.000.000,00	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	150.000.000.000,00	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000.000.000,00	31.500.000.000,00	-	300.000.000,00	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-

P r o v i n s i
 K A L I M A N T A N
 S E L A T A N
 T a h u n
 2 0 2 1 - 2 0 2 6

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

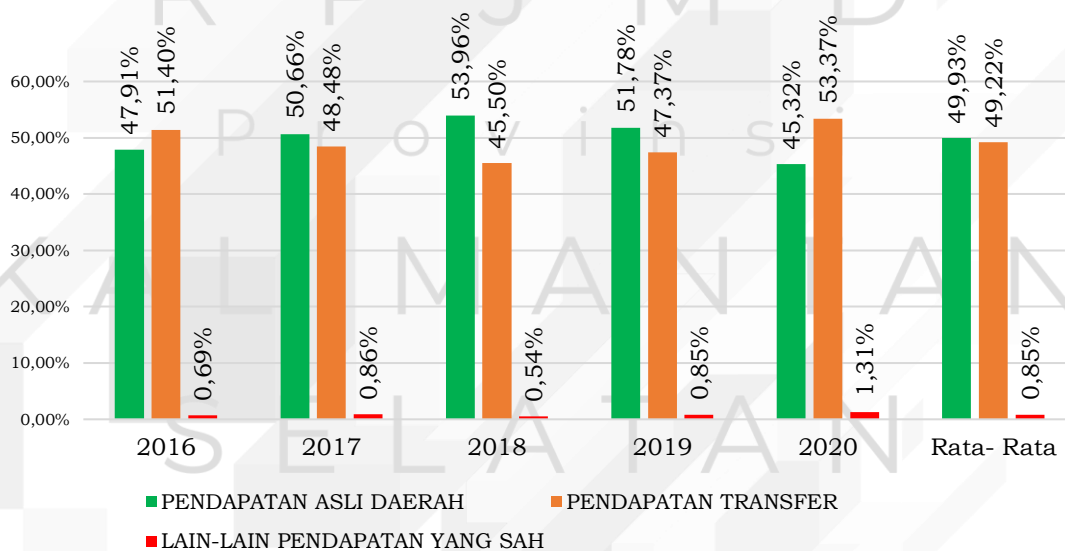
Secara umum komponen pendapatan terdiri dari : (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; (2) Pendapatan Transferyang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi,serta; (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah. Pendapatan yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016–2020, selama kurun waktu tersebut, realisasi pendapatan cenderung meningkat, rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah yakni sebesar 5,88% (lima koma delapan puluh delapan).



Gambar III.1 Pendapatan Daerah

Peningkatan pendapatan daerah didorong oleh peningkatan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu pada jenis pendapatan Pajak Daerah dengan pertumbuhan sebesar 6,00 (enam persen). Sedangkan pertumbuhan realisasi penerimaan pada kelompok pendapatan Dana Transfer Pusat untuk Pemerintah Provinsi, adalah sebesar 6,20% (enam koma dua puluh). Dari seluruh kelompok Pendapatan, peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang berasal dari pendapatan Hibah dengan persentase sebesar 28,72% (dua puluh delapan koma tujuh puluh dua).

Jika dilihat dari kontribusi setiap komponen pembentuk pendapatan, realisasi Pendapatan Daerah dalam kurun waktu tahun 2016-2020 masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 49,93 (empat puluh sembilan koma sembilan puluh tiga persen), kemudian untuk pendapatan Dana Transfer Pusat memberikan kontribusinya rata-rata sebesar 49,22% (empat puluh sembilan koma dua puluh dua), sedangkan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah hanya mencapai 0,85% (nol koma delapan puluh lima persen). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penerimaan Pendapatan Daerah, khususnya pada sektor Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah perlu ditingkatkan seoptimal mungkin, walaupun ketergantungan terhadap penerimaan Dana Transfer Pusat dalam perkembangannya selama tahun 2016-2021 pada kategori sedang, artinya bahwa komposisi Pendapatan Asli Daerah masih mampu memberikan sumbangannya terhadap Pendapatan Daerah di atas 50% (lima puluh persen).

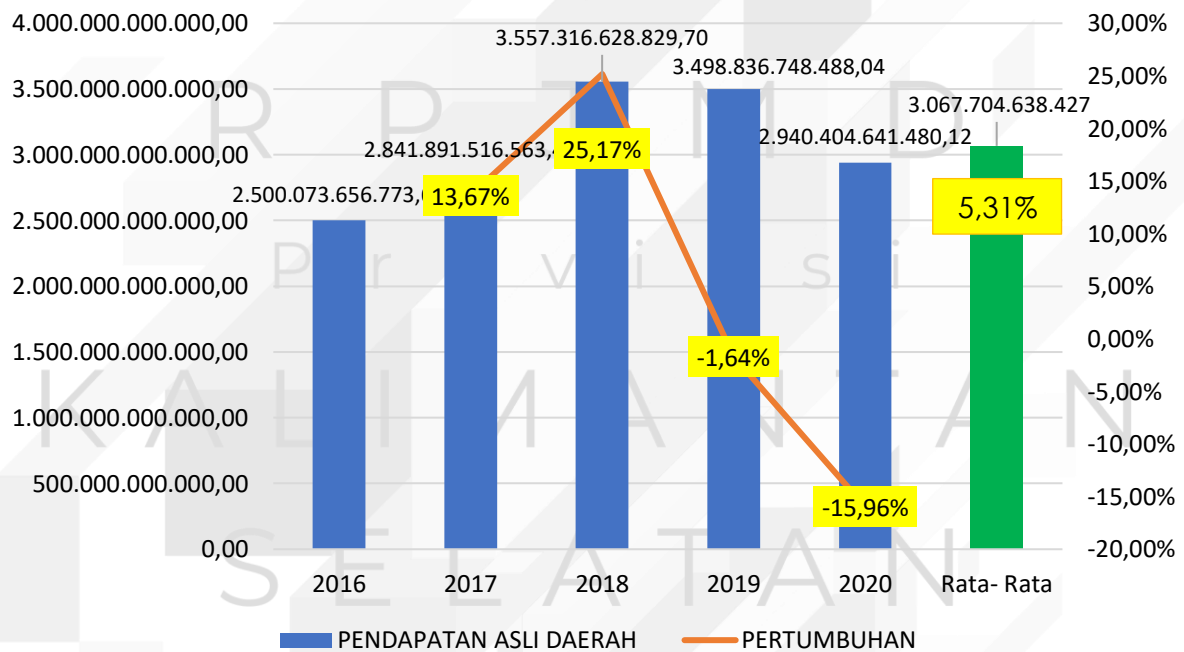


Gambar III.2 Struktur Pendapatan Daerah

3.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan dari lima tahun cukup fluktuatif, dari tahun 2016 sampai 2017 tumbuh positif di mana hal ini dipengaruhi oleh pergerakan perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan yang tumbuh bagus yang mana sektor utama perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan adalah pertambangan. Mulai tahun 2019

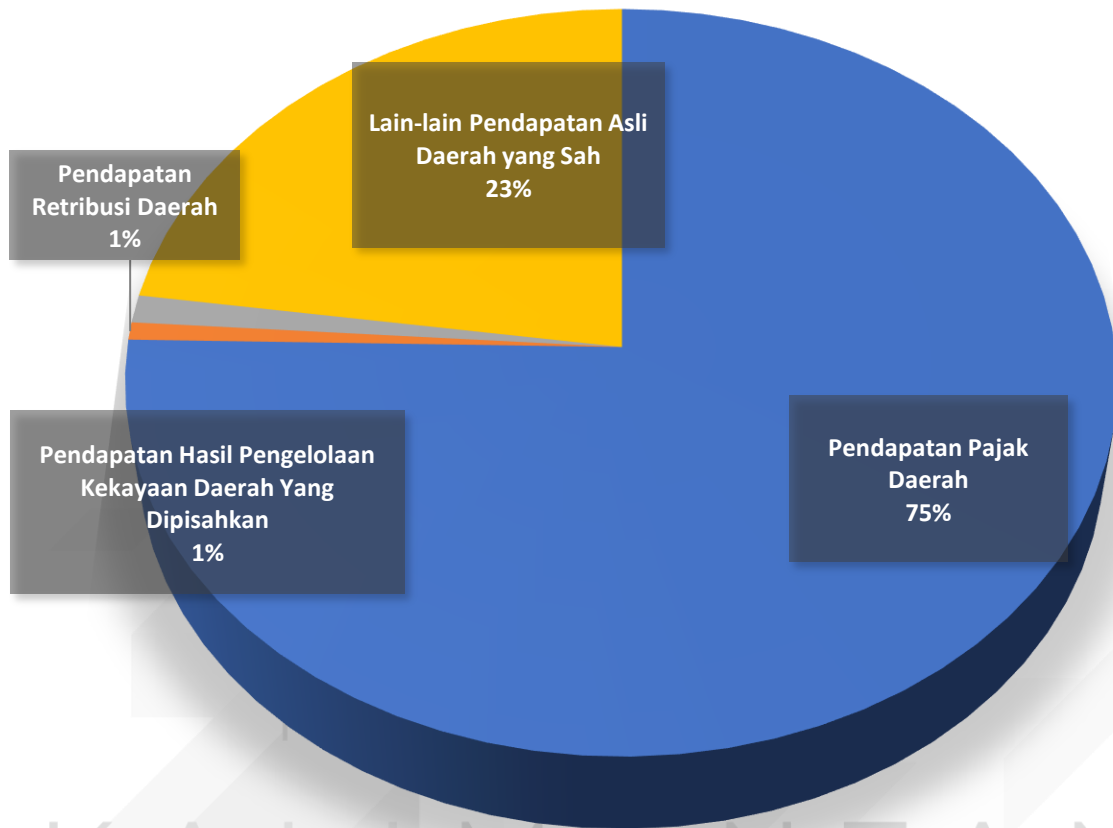
sampai 2020, perekonomian Kalimantan Selatan menghadapi berbagai tantangan seperti perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat sehingga membuat kegiatan perekonomian di negara- negara tujuan ekspor Indonesia terhambat sehingga perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan juga melambat. Hal ini membuat multiplayer effect akibat aktivitas perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan menurun sehingga membuat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan melambat sebesar -1,64 %. Pada tahun 2020 pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami kontraksi yang cukup dalam, hal ini akibat Pandemi Covid-19 yang mulai memasuki Provinsi Kalimantan Selatan pada akhir Maret 2020. Seluruh kegiatan aktivitas masyarakat dipaksa berhenti untuk menghambat laju penyebaran Covid-19. Hal ini dapat terlihat pada Gambar III.3.



Gambar III.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

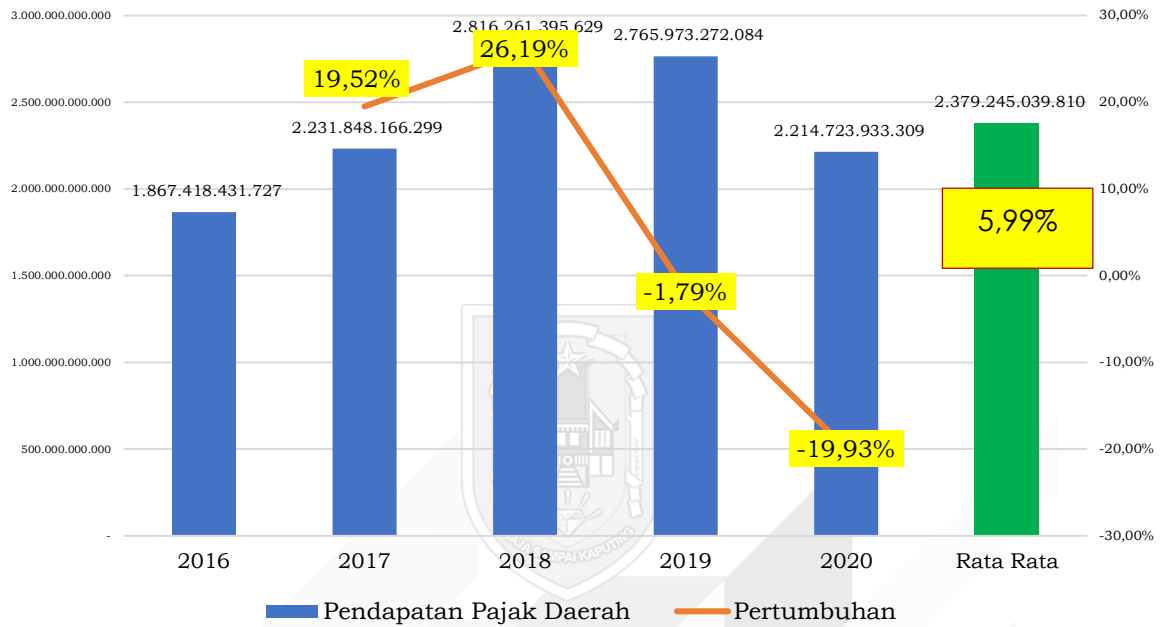
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Berdasarkan Data Tahun 2020, struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar adalah sumbangan dari Pendapatan Pajak daerah yaitu sebesar 75 %. Pendapatan Pajak daerah untuk provinsi sendiri terdiri dari Pajak Kendaran Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Melihat dari komponen tersebut, Sebagian besar pajak daerah provinsi disumbang oleh hal berkaitan dengan kendaraan bermotor atau sektor transportasi yang mana

pada saat terjadi pandemic Covid-19 pada tahun 2020, sektor ini dipaksa dibatasi untuk membatasi mobilitas masyarakat guna menekan angka masyarakat yang terpapar Covid-19.



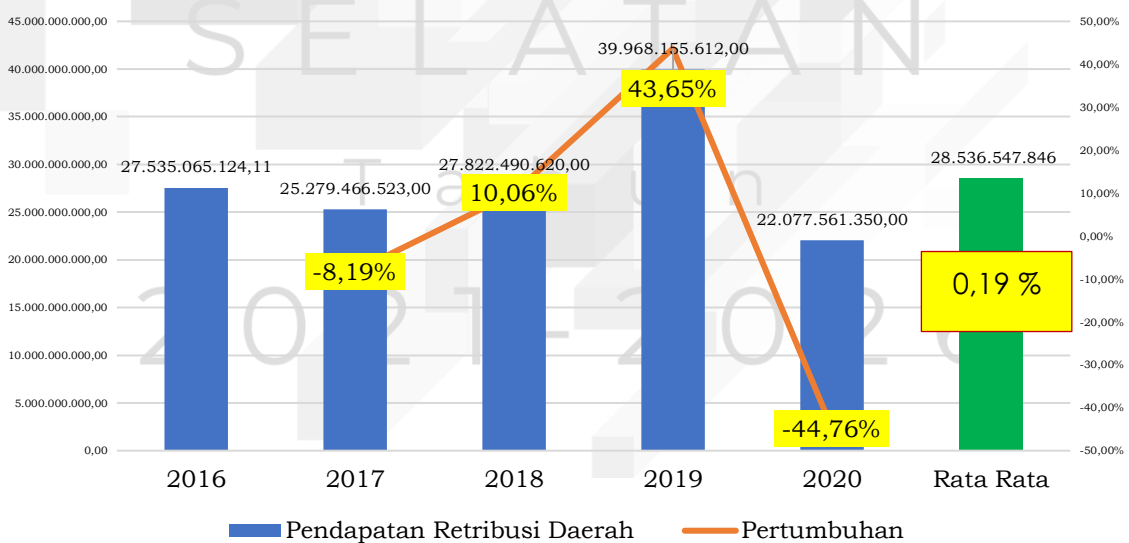
Gambar III.4 Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020

KALIMANTAN
SELATAN
Tahun
2021-2026



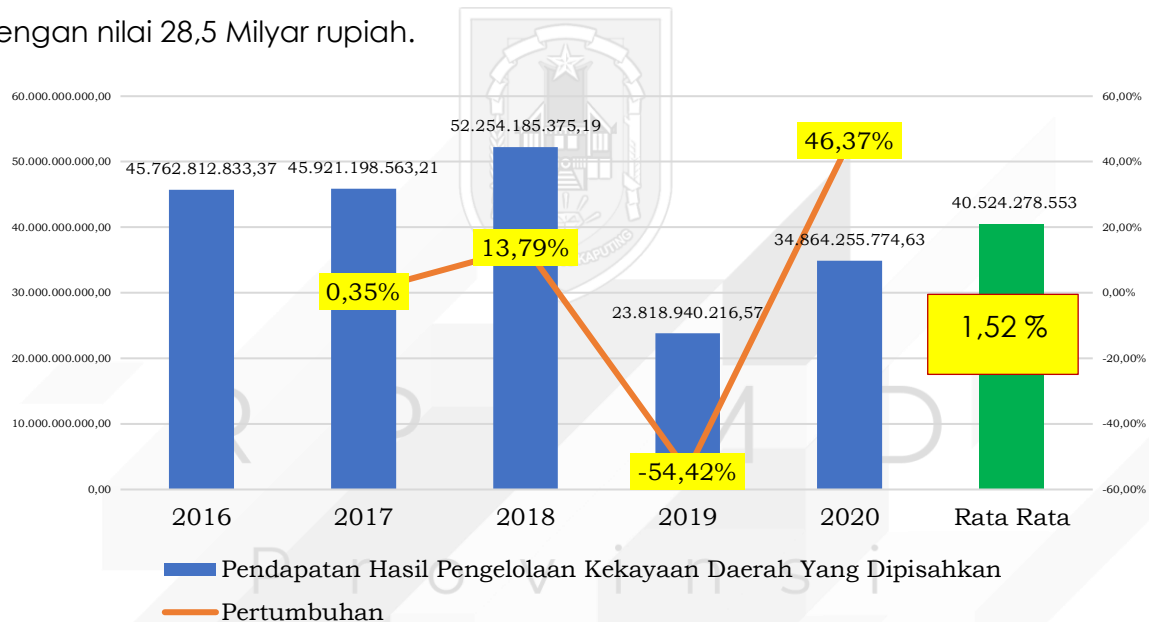
Gambar III.5 Pendapatan Pajak Daerah

Pada Gambar 3.5 terlihat Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2017 dan 2018 bila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan yang baik yaitu sebesar 19,52 % dan 26,19 %, sedangkan pada Tahun 2019 dan 2020 bila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar -1,79 dan -19,93 %. Berdasarkan perhitungan dari tahun 2016 sampai 2020, Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tumbuh rata – rata 5,99 % dengan nilai 2,3 Triliun rupiah.



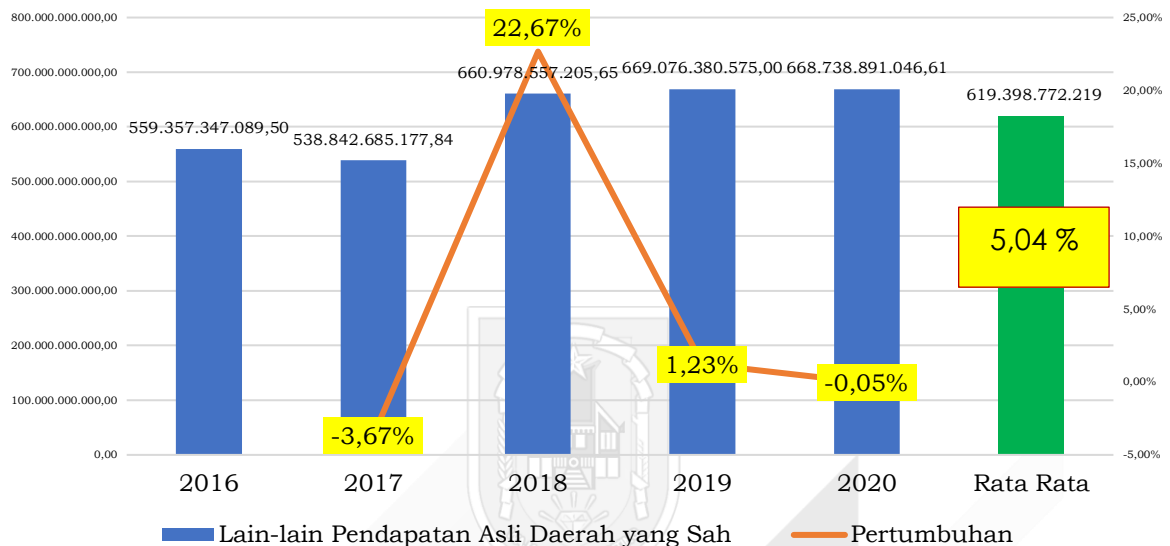
Gambar III.6 Pendapatan Retribusi Daerah

Pada Gambar 3.6 terlihat Pertumbuhan Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2018 dan 2019 bila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan yang baik yaitu sebesar 10,06 % dan 43,65 %, sedangkan pada Tahun 2020 bila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar -44,76 %. Berdasarkan perhitungan dari tahun 2016 sampai 2020, Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tumbuh rata – rata 0,19 % dengan nilai 28,5 Milyar rupiah.



Gambar III.7 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pada Gambar 3.7 terlihat Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2017, 2018, dan 2020 bila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan yang baik yaitu sebesar 0,35 %, 13,79 %, dan 46,37 %, sedangkan pada Tahun 2019 bila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar -54,42 %. Berdasarkan perhitungan dari tahun 2016 sampai 2020, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Provinsi Kalimantan Selatan tumbuh rata – rata 1,52 % dengan nilai 40,5 Milyar rupiah.

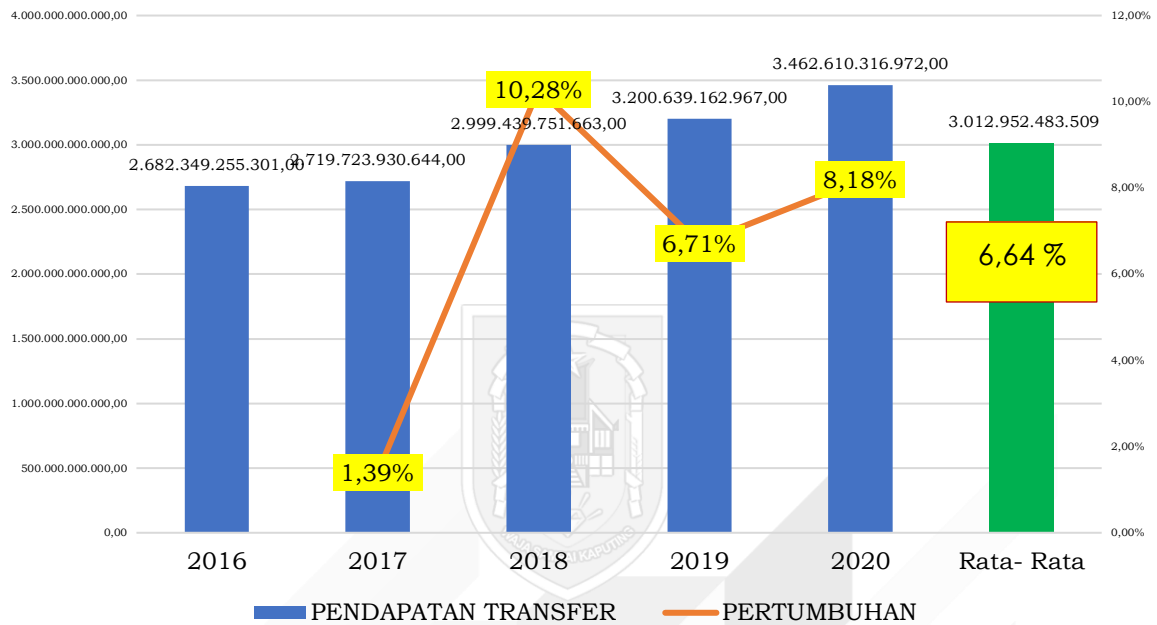


Gambar III.8 Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pada Gambar 3.8 terlihat Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2018 bila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan yang baik yaitu sebesar 22,67, sedangkan pada Tahun 2017 dan 2020 bila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar -3,67 % dan -0,05 %. Berdasarkan perhitungan dari tahun 2016 sampai 2020, Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Provinsi Kalimantan Selatan tumbuh rata – rata 5,04 % dengan nilai 619,3 Milyar rupiah.

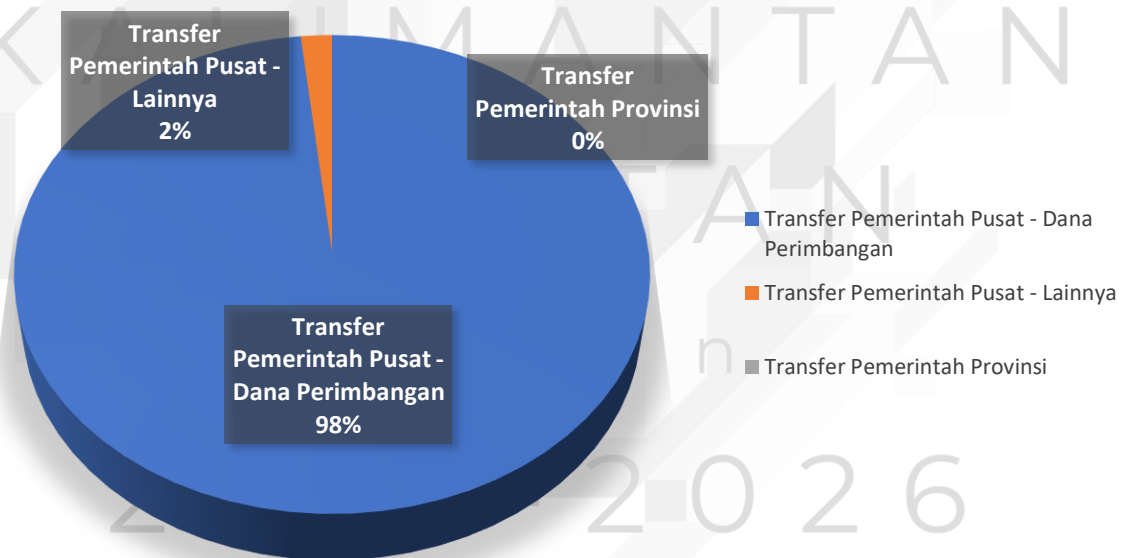
3.1.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sehingga besaran pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah sangat berpengaruh pada kondisi keuangan negara. Pada beberapa daerah yang memiliki sektor tambang, besaran dana transfer tersebut juga dipengaruhi oleh kinerja sektor pertambangan yang berjalan di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan perubahan-perubahan yang terjadi pada kewenangan masalah pertambangan yang awalnya berada di kabupaten lalu pindah ke provinsi dan terakhir berpindah ke pemerintah pusat. Sehingga kompensasi dari kegiatan sektor pertambangan tidak langsung masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi bagi hasil pendapatan daerah kegiatan pertambangan tersebut yang langsung masuk ke pemerintah pusat dibagi ke daerah melalui dana transfer.

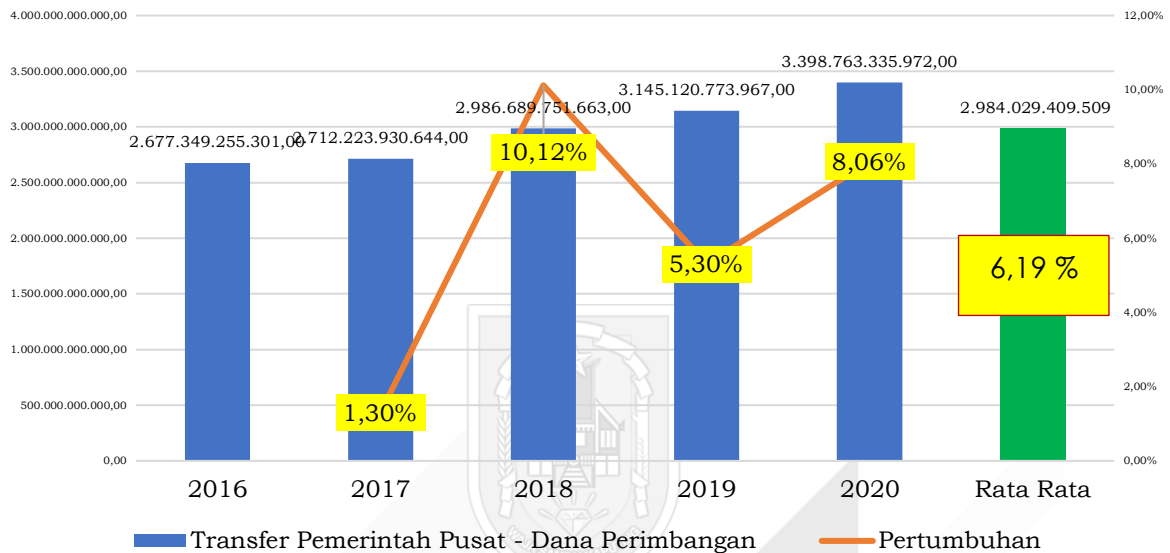


Gambar III.9 Pendapatan Transfer

Struktur Pendapatan Transfer di Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, dan Transfer Pemerintah Provinsi. Pada Pendapatan Transfer, Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan memiliki sumbangan terbesar yaitu sebesar 98 %

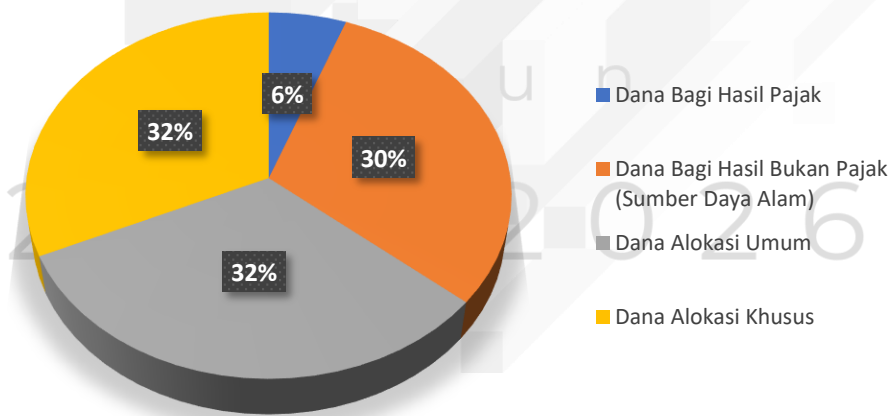


Gambar III.10 Struktur Pendapatan Transfer Tahun 2020

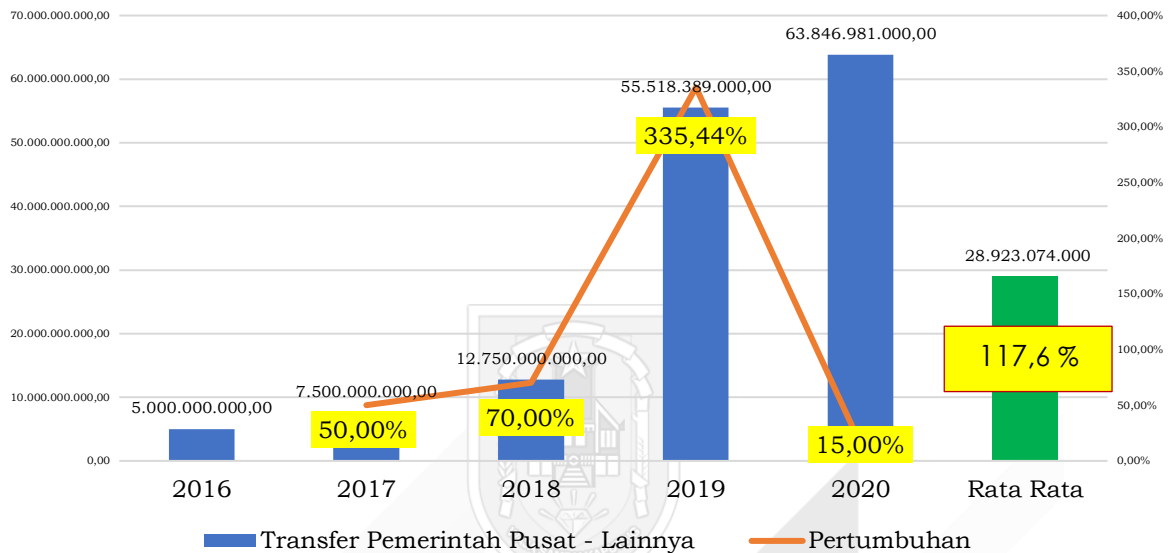


Gambar III.11 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pada Gambar 3.11 terlihat Pertumbuhan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2017 sampai 2020 tumbuh baik, walaupun pada Tahun 2019 bila dibandingkan tahun sebelumnya pertumbuhannya lebih rendah sekitar 5,30 %. Berdasarkan perhitungan dari tahun 2016 sampai 2020, Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Provinsi Kalimantan Selatan tumbuh rata – rata 6,19 % dengan nilai 2,9 Triliun rupiah. Dimana Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil Pajak memberikan sumbangan terkecil untuk Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan yaitu sebesar 6 %. Hal ini terlihat pada Gambar 3.12 berikut.



Gambar III.12 Struktur Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2020

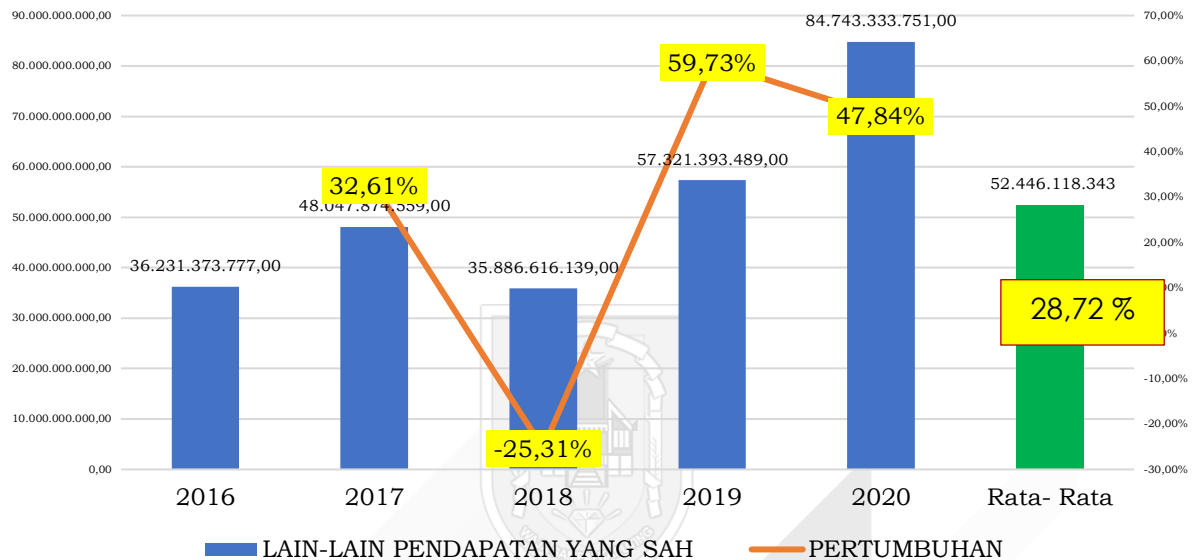


Gambar III.13 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pada Gambar 3.13 terlihat Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2017 sampai 2019 mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dari 50 % pada tahun 2017 sampai 335,4 % pada tahun 2019. Sedangkan pada Tahun 2020 bila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan yang lebih rendah sebesar 15.00 %. Berdasarkan perhitungan dari tahun 2016 sampai 2020, Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Provinsi Kalimantan Selatan tumbuh rata – rata 117,6 % dengan nilai 28,9 Milyar rupiah.

3.1.1.1.3 Lain – Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah cukup fluktuatif dimana pada tahun 2017, 2019, dan 2020 tumbuh baik, sedangkan pada 2018 tumbuh melambat sebesar -25,31 %. Pertumbuhan rata – rata dari tahun 2016 sampai 2020 adalah sebesar 28,72 % dengan nilai 52,4 Milyar Rupiah.



Gambar III.14 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

3.1.1.1.4 Kemandirian Fiskal

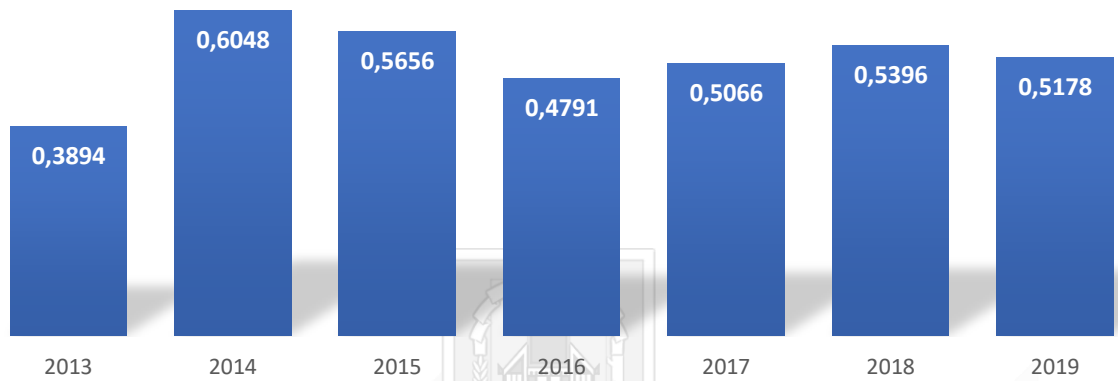
Reviu kemandirian fiskal daerah akan menghasilkan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) daerah. Nilai IKF berkisar antara 0 (semua belanja dibiayai dengan dana transfer dan tidak terdapat peranan PAD) hingga 1 (semua belanja dapat dibiayai dengan PAD dan 6 tidak terdapat dana transfer). Dengan demikian, semakin rendah nilai IKF, maka semakin Belum Mandiri. Sebaliknya, semakin tinggi nilai IKF, maka semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah. Berdasarkan Sampurna (2018), kemandirian fiskal daerah dapat dikelompokkan menjadi “Belum Mandiri”, “Menuju Kemandirian”, “Mandiri” dan “Sangat Mandiri seperti ditunjukkan pada Tabe III-3

Tabel III-3 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah

No	Nilai IKF	Kondisi kemandiri Fiskal
1	$0,00 \leq IKF < 0,25$	Belum Mandiri
2	$0,25 \leq IKF < 0,50$	Menuju kemandirian
3	$0,50 \leq IKF < 0,75$	Mandiri
4	$0,75 \leq IKF \leq 1,00$	Sangat Mandiri

Sumber: BPK RI

Berdasarkan data dari BPK RI, Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi Kalimantan Selatan cukup fluktuatif dimana pernah tertinggi sebesar 0,6048 pada tahun 2014 dari data tujuh tahun terakhir dan terendah pada 2013 sebesar 0,3894 yang mana pada tahun – tahun terakhir berada di rata – rata 0,5 atau berada pada kondisi Kemandiri Fiskal “**Mandiri**”. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 3.15



Gambar III.15 Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 - 2019

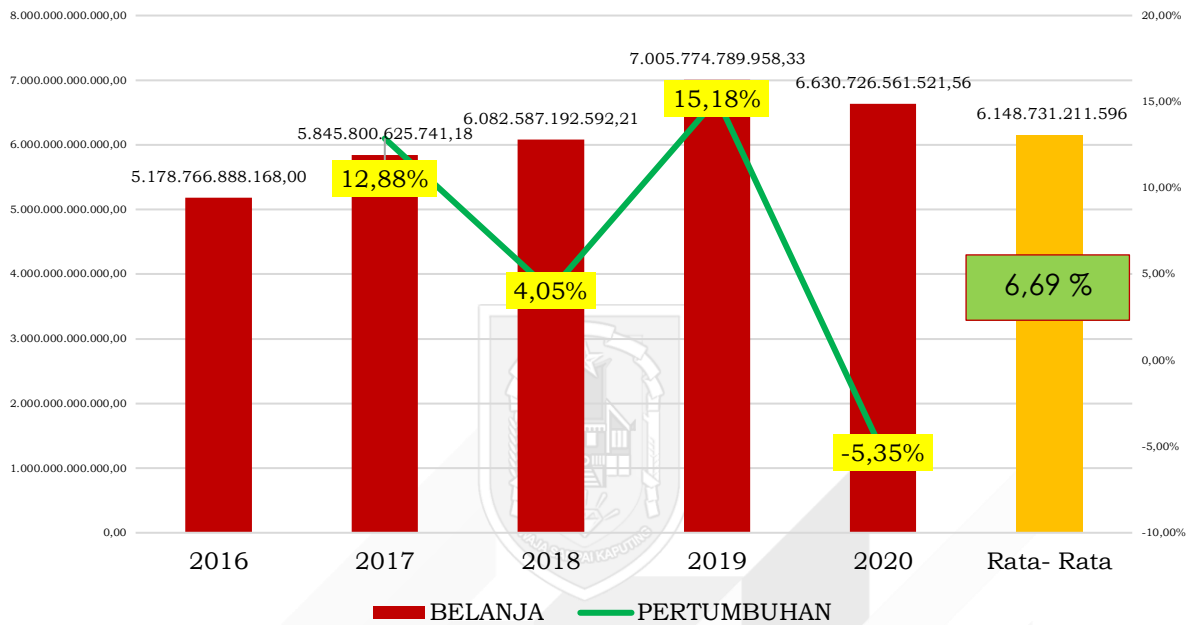
Sumber : BPK RI

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004).

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan).

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari : 1)Kelompok Belanja Operasi yang terdiri atas Jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial; 2) Kelompok Belanja Modal yang terdiri atas Jenis Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja aset tetap lainnya; (3) Kelompok Belanja Tak Terduga; (4) Kelompok Belanja Transfer yang terdiri atas Jenis Belanja Bagi hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Lokasi belanja daerah yang sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat.

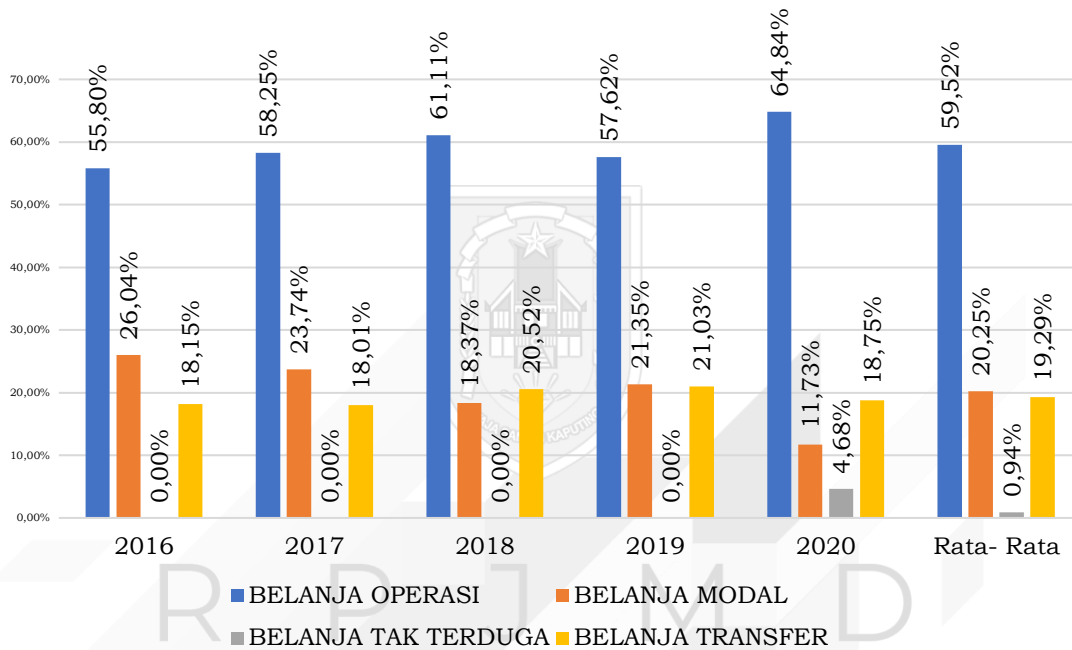


Gambar III.16 Belanja Daerah

Uraian realisasi belanja Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Gambar 3.16 selama periode Tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa Belanja daerah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan sebesar 6,69%. Kelompok Belanja Operasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,52%, pada kelompok belanja operasi kontribusi peningkatan yang signifikan adalah pada jenis belanja pegawai dengan peningkatan rata-rata per tahun adalah sebesar 26,84%, selanjutnya pada kelompok Belanja Modal mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 7,67%. Pada kelompok Belanja Modal yang mengalami kenaikan tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan 1.154,38% adalah pada jenis Belanja Tanah disusul belanja aset tetap lainnya yaitu dengan kenaikan rata-rata pertahun adalah sebesar 91,52%, selanjutnya belanja tidak terduga terjadi peningkatan yang sangat besar di tahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp 309.992.267.735,00. Pada kelompok belanja transfer terjadi kenaikan rata-rata per tahun adalah sebesar 8,25% yaitu pada jenis belanja bagi hasil.

Jika dilihat dari kontribusi setiap komponen pembentuk belanja, realisasi belanja Daerah dalam kurun waktu tahun 2016 - 2020 masih didominasi oleh Belanja Operasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 59,52 %, kemudian untuk Belanja Modal memberikan kontribusinya rata-rata sebesar 20,25 % dan Belanja Transfer rata - rata sebesar 19,29 %, sedangkan Belanja Tak Terduga hanya mencapai 0,94 %. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur Belanja Daerah, masih banyak dipergunakan

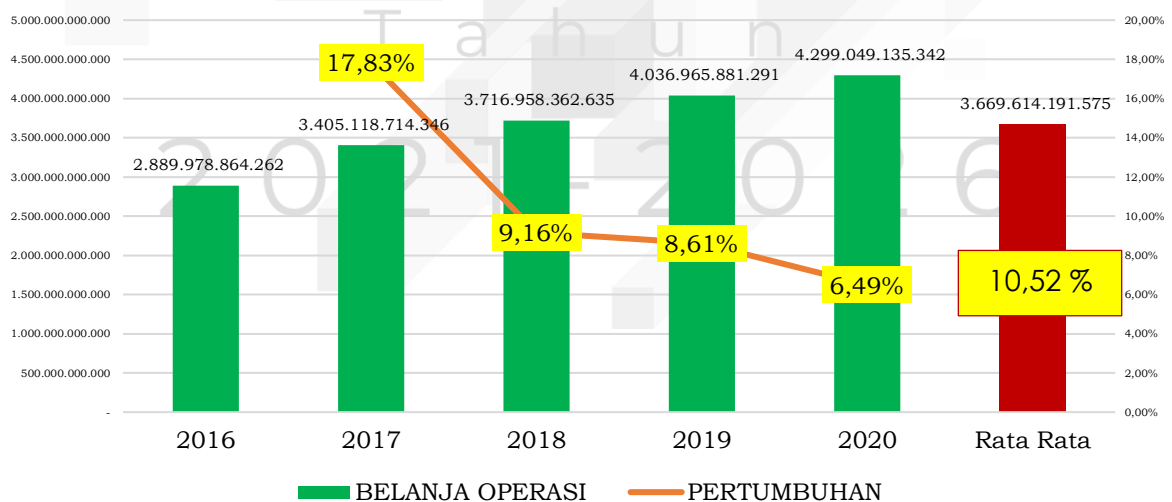
untuk Belanja Operasi yang mana peruntukannya untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, dan Belanja Hibah yang terbesar.



Gambar III.17 Struktur Belanja Daerah

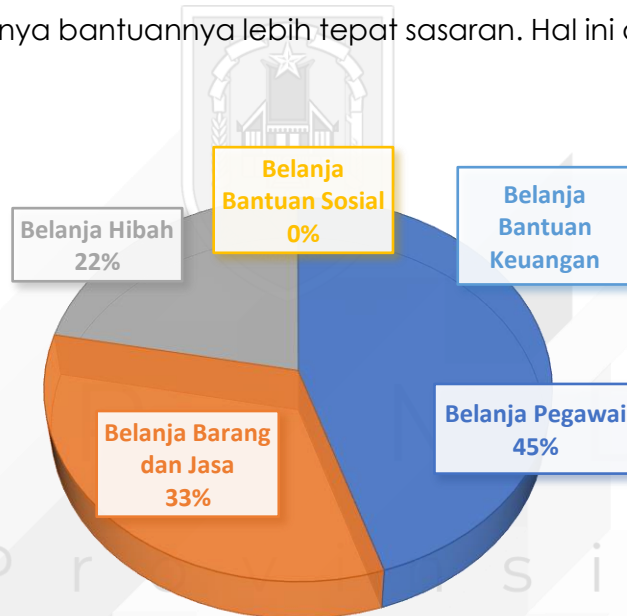
3.1.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Rata – rata pertumbuhan belanja operasi Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2016 sampai 2020 sebesar 10,52 %, dimana pertumbuhan belanja tertinggi pada tahun 2017 bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,83 %. Sedangkan untuk nilai belanja operasi tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,2 Triliun Rupiah.

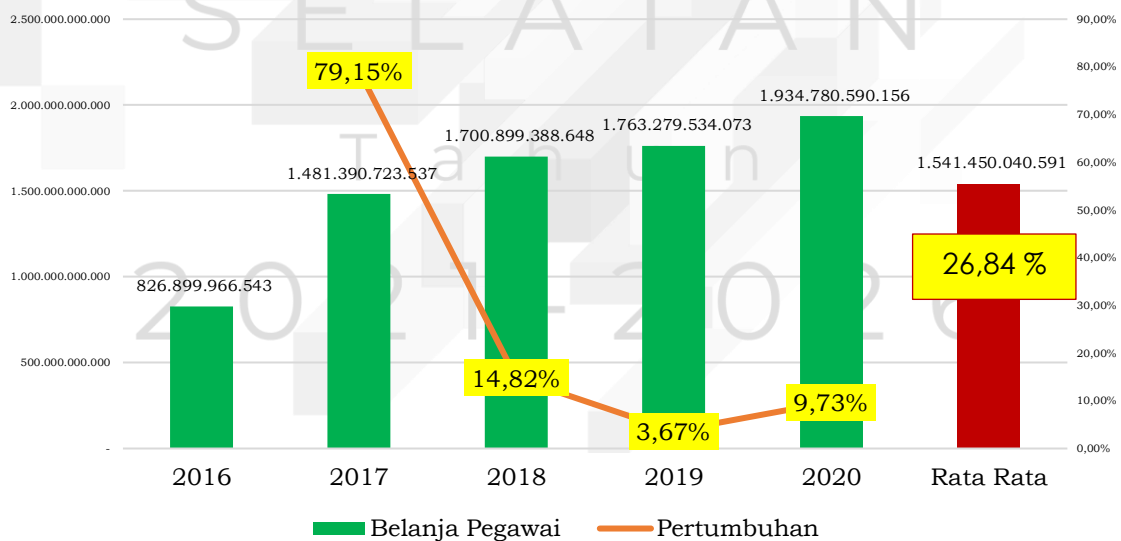


Gambar III.18 Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari beberapa belanja seperti belanja pegawai, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja hibah, dan belanja barang jasa. Berdasarkan data, struktur belanja terbesar Provinsi Kalimantan Selatan adalah untuk pendanaan belanja pegawai yaitu sebesar 45 % dan yang terendah adalah belanja bantuan sosial sebesar 0 %. Belanja bantuan sosial tersebut 0 % karena anggaran kegiatan tersebut telah dialihkan untuk mendukung kegiatan PKH dari pemerintah pusat agar penerimanya bantuannya lebih tepat sasaran. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 4.



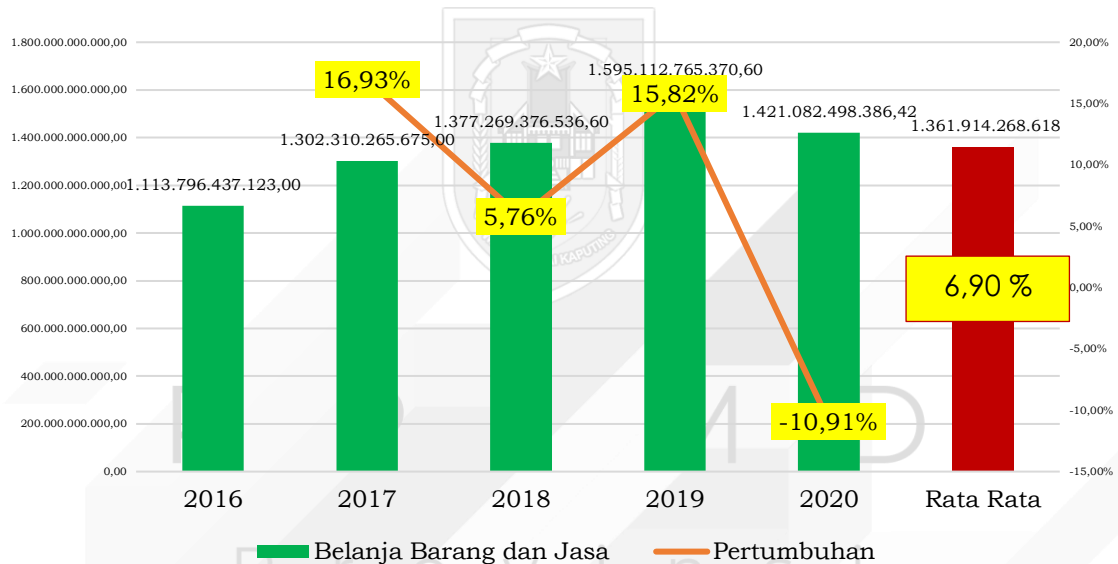
Gambar III.19 Struktur Belanja Operasi Tahun 2020



Gambar III.20 Belanja Pegawai

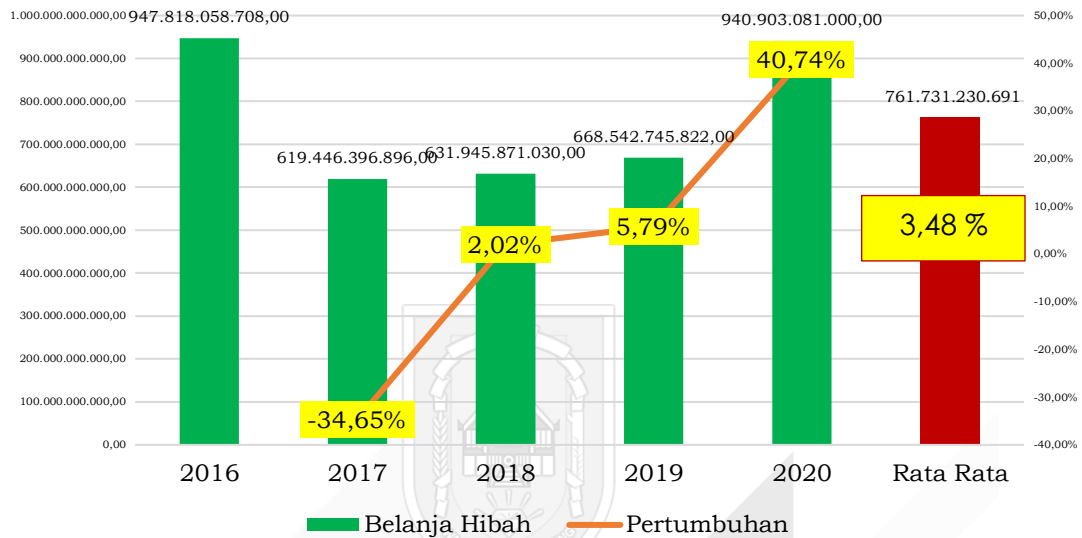
Pada Gambar 3.20 terlihat Belanja Pegawai Provinsi Kalimantan Selatan pada dari tahun 2016 sampai 2020 tumbuh rata 26,84 % dengan rata – rata nilai belanja

sebesar 1,5 Triliun rupiah. Pertumbuhan belanja yang tertinggi pada tahun 2017 sebesar 79,15 % dikarenakan perpindahan wewenang SMA, SMK, dan sekolah selevelnya dari Pemerintah Kabupaten dan Kota ke Pemerintah Provinsi. Hal ini membuat terjadinya perpindahan tanggung jawab pembayaran gaji ASN dan pegawai di SMA, SMK, dan sekolah selevelnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



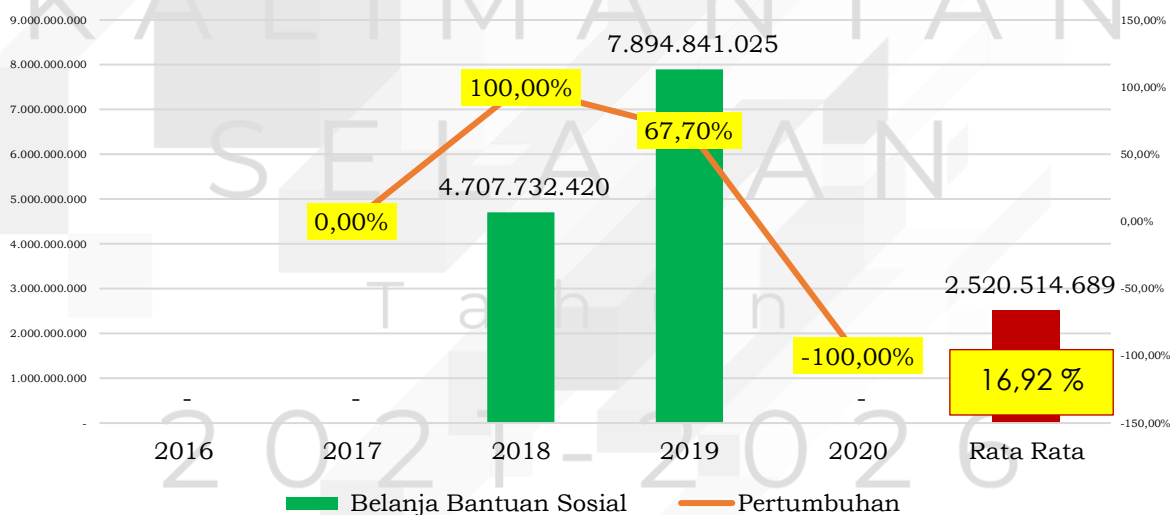
Gambar III.21 Belanja Barang dan Jasa

Pada Gambar 3.21 terlihat Belanja Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan pada dari tahun 2016 sampai 2020 tumbuh rata 6,90 % dengan rata – rata nilai belanja sebesar 1,3 Triliun rupiah. Pertumbuhan belanja yang tertinggi pada tahun 2017 sebesar 16,93 %. Pertumbuhan belanja terendah pada tahun 2020 yaitu tumbuh melambat -10,91 %. Hal ini diakibatkan oleh terjadinya pandemi covid-19 yang mana memaksa seluruh kegiatan masyarakat dilakukan pembatasan. Pembatasan tersebut juga membatasi seluruh kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan yang mana mempengaruhi penundaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Pada sisi lain juga, pengaruh pembatasan sosial yang membuat pembatasan kegiatan perekonomian masyarakat juga membuat penurunan pendapatan daerah sehingga pada tahun 2020 pemerintah juga harus menurunkan pengeluaran belanjanya tersebut.



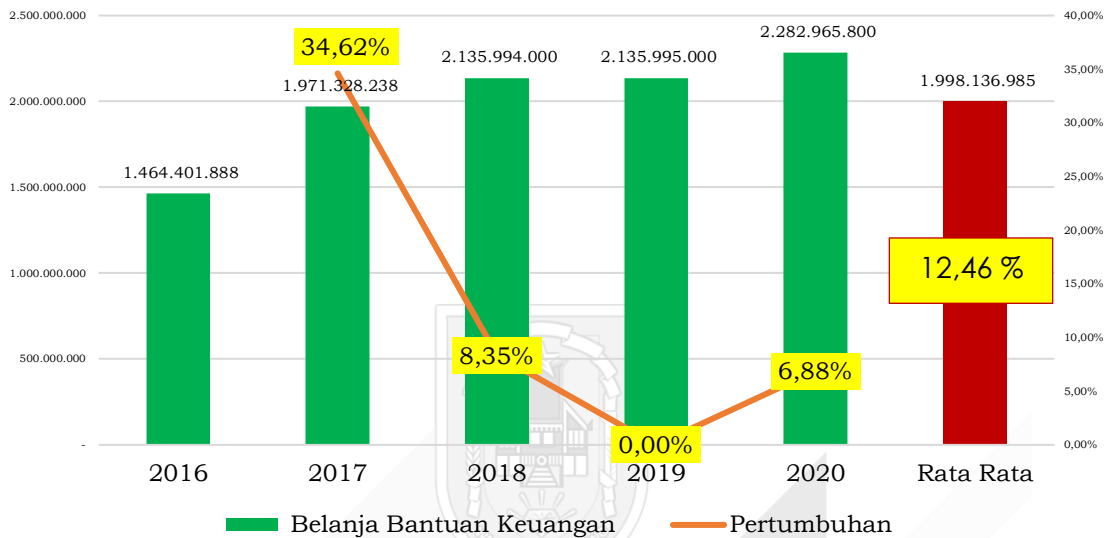
Gambar III.22 Belanja Hibah

Pada Gambar 3.22 terlihat Belanja Hibah Provinsi Kalimantan Selatan pada dari tahun 2016 sampai 2020 tumbuh rata - rata 3,48 % dengan rata - rata nilai belanja sebesar 761 Milyar rupiah. Pertumbuhan belanja yang tertinggi pada tahun 2020 sebesar 40,74 %. Hal ini dikarenakan peningkatan penganggaran untuk menanggulangi pandemi covid-19 di Kalimantan Selatan pada tahun 2020. Pertumbuhan belanja terendah pada tahun 2017 yaitu tumbuh melambat -34,65 %.



Gambar III.23 Belanja Bantuan Sosial

Pada Gambar 3.23 terlihat Belanja Bantuan Sosial Provinsi Kalimantan Selatan pada dari tahun 2016 sampai 2020 tumbuh rata - rata 16,92 % dengan rata - rata nilai belanja sebesar 2,5 Milyar rupiah.

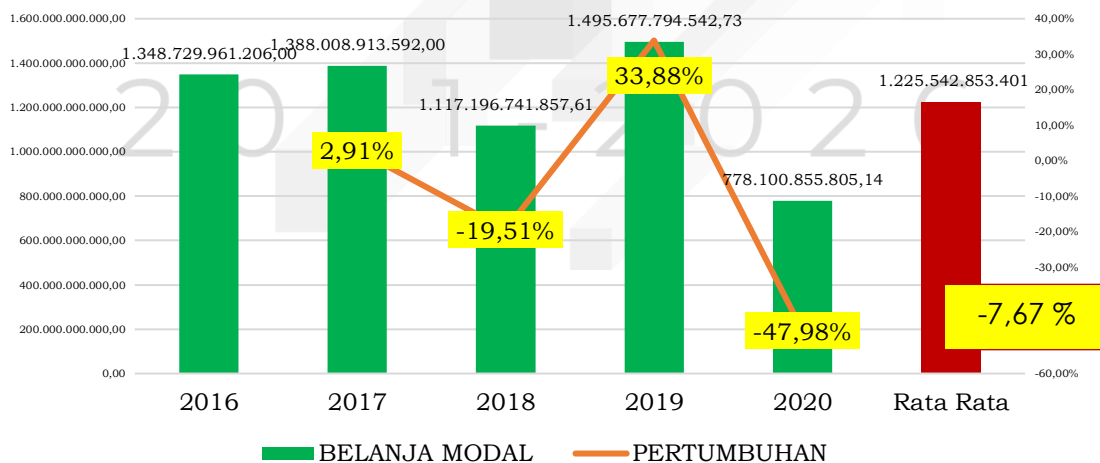


Gambar III.24 Belanja Bantuan Keuangan

Pada Gambar 3.24 terlihat Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan pada dari tahun 2016 sampai 2020 tumbuh rata-rata 12,46 % dengan rata – rata nilai belanja sebesar 1,9 Milyar rupiah.

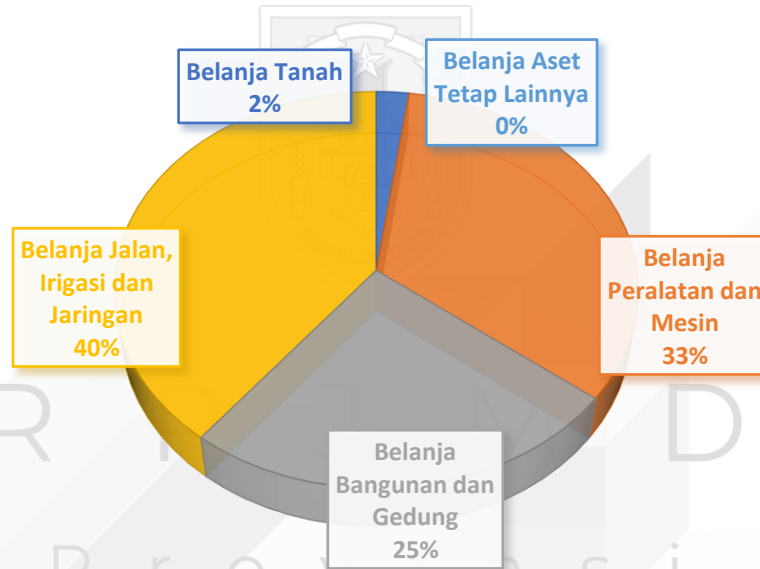
3.1.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal adalah salah satu kunci utama agar suatu badan atau institusi bisa memperoleh aset tetap dengan cara membeli. Selain itu, Belanja modal adalah hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Manfaatnya akan bisa dirasakan hingga satu tahun anggaran lebih setelah dilakukannya pengeluaran. Rata-rata pertumbuhan belanja modal Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2016 sampai 2020 sebesar -7,67 %, dimana pertumbuhan belanja tertinggi pada tahun 2019 bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 33,88 %. Sedangkan untuk nilai rata – rata belanja modal adalah sebesar 1,2 Triliun Rupiah.

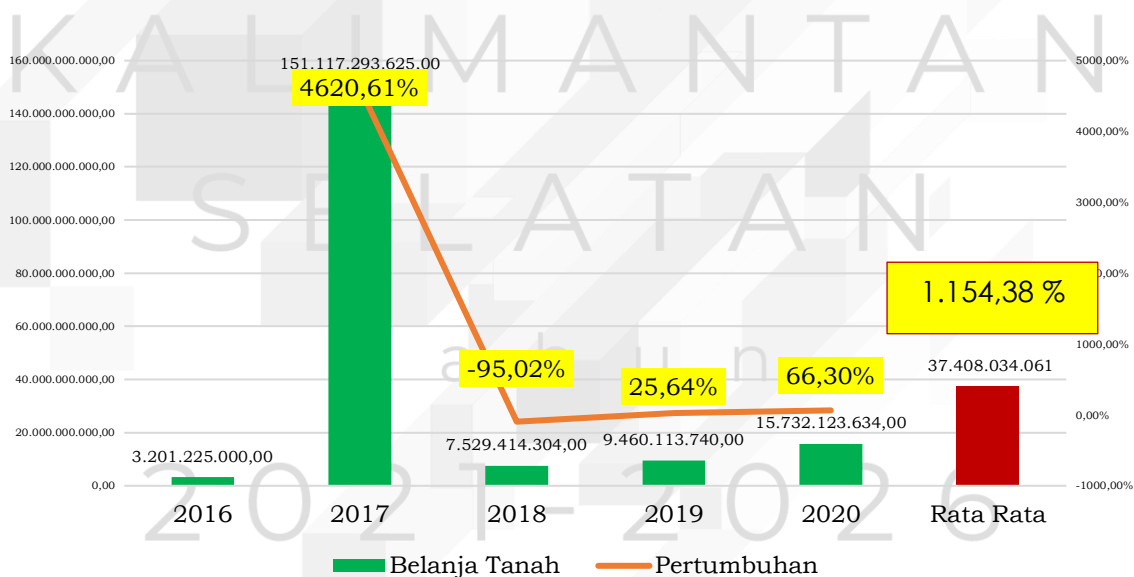


Gambar III.25 Belanja Modal

Belanja modal terdiri dari beberapa belanja seperti Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Bangunan dan Gedung; Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Berdasarkan data, struktur belanja terbesar Provinsi Kalimantan Selatan adalah untuk pendanaan belanja jalan, irigasi, dan jaringan yaitu sebesar 40 % dan yang terendah adalah belanja aset tetap lainnya sebesar 0 %. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 3.26.

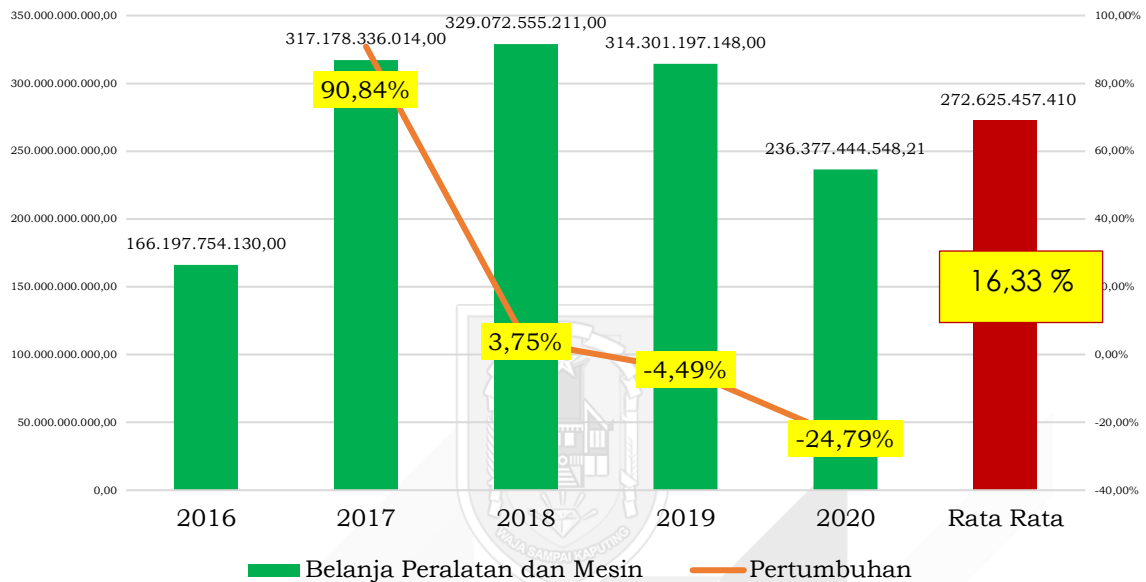


Gambar III.26 Struktur Belanja Modal Tahun 2020



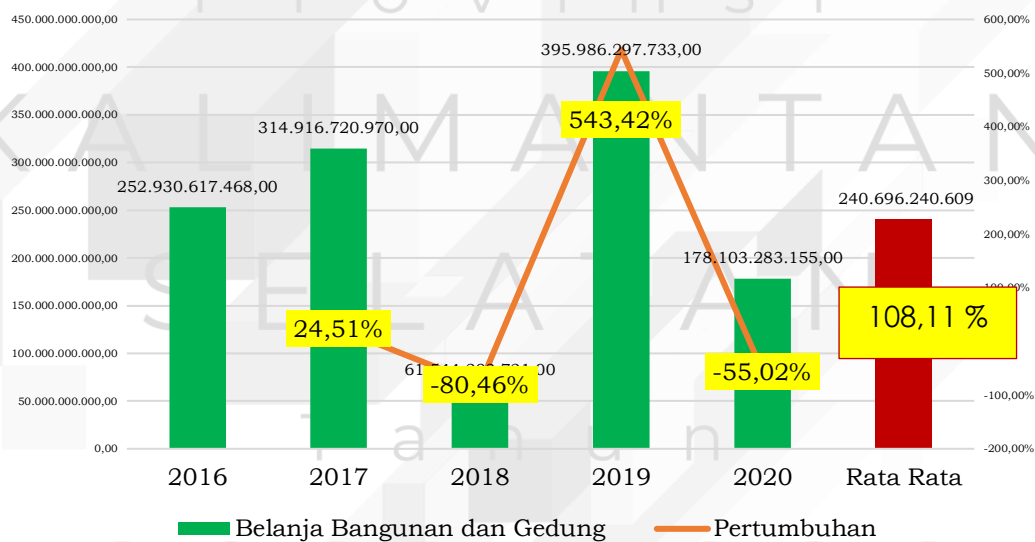
Gambar III.27 Belanja Tanah

Pada Gambar 3.27 terlihat Belanja Tanah Provinsi Kalimantan Selatan pada dari tahun 2016 sampai 2020 tumbuh rata-rata 1.154,38 % dengan rata-rata nilai belanja sebesar 37,4 milyar rupiah.



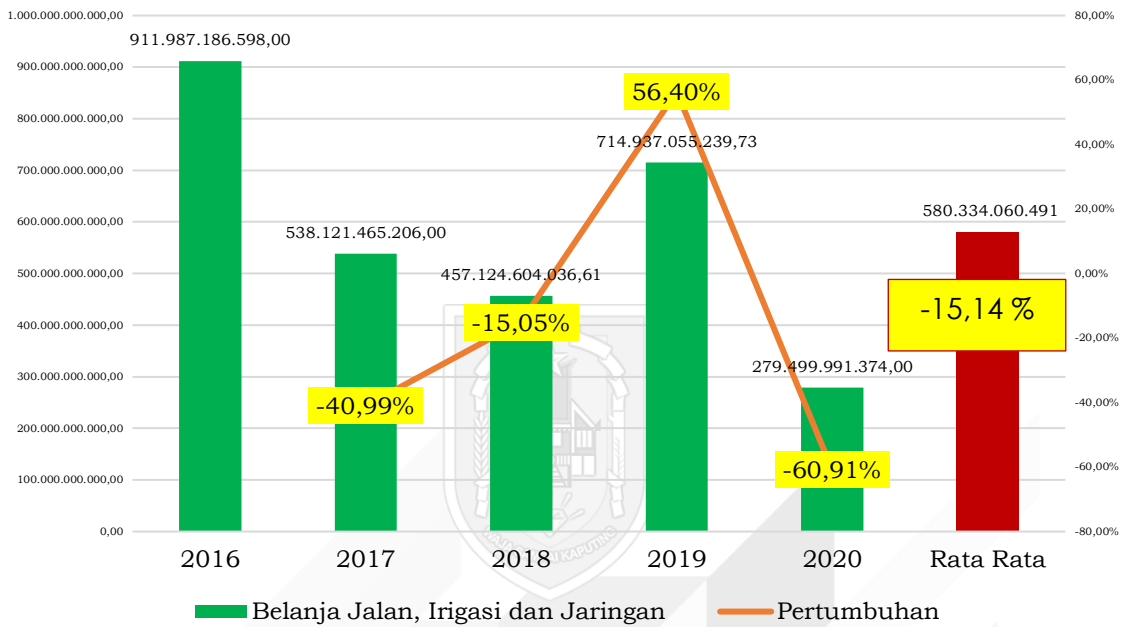
Gambar III.28 Belanja Peralatan dan Mesin

Pada Gambar 3.28 terlihat Belanja Peralatan dan Mesin Provinsi Kalimantan Selatan pada dari tahun 2016 sampai 2020 tumbuh rata-rata 16,33 % dengan rata-rata nilai belanja sebesar 272 milyar rupiah.



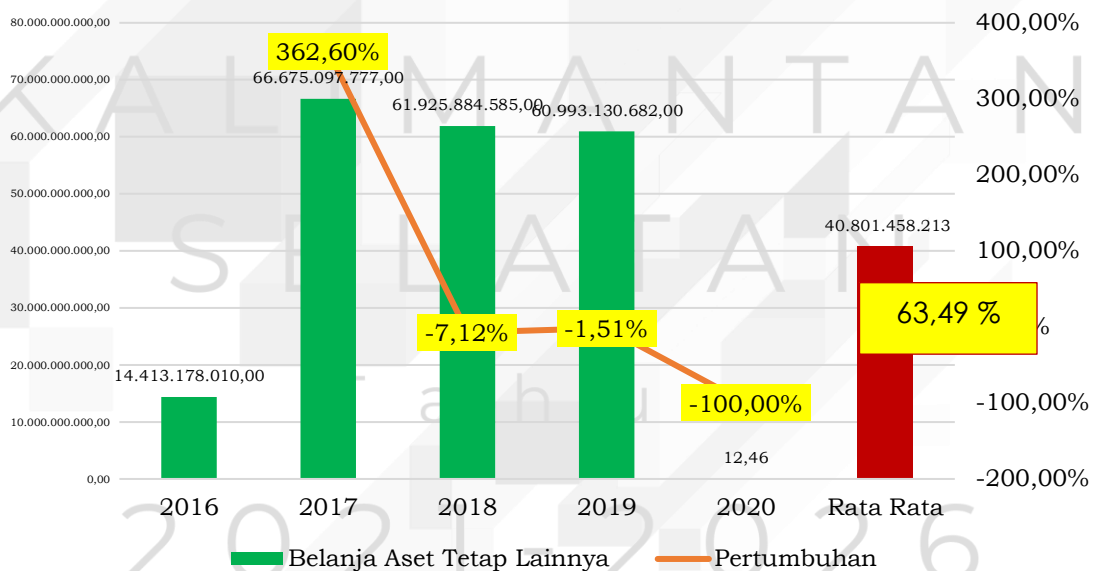
Gambar III.29 Belanja Bangunan dan Gedung

Pada Gambar 3.29 terlihat Belanja Bangunan dan Gedung Provinsi Kalimantan Selatan pada dari tahun 2016 sampai 2020 tumbuh rata-rata 108,11 % dengan rata-rata nilai belanja sebesar 240 milyar rupiah.



Gambar III.30 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pada Gambar 3.30 terlihat Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Provinsi Kalimantan Selatan pada dari tahun 2016 sampai 2020 tumbuh rata-rata -15,14 % dengan rata – rata nilai belanja sebesar 580 milyar rupiah.

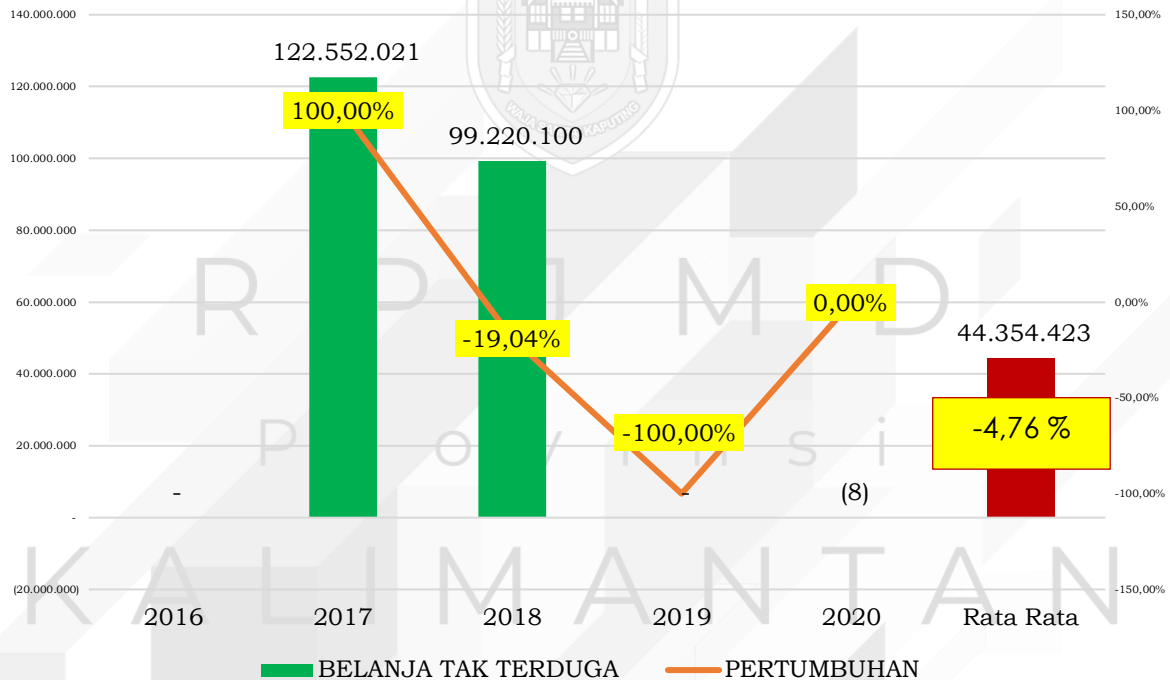


Gambar III.31 Belanja Aset Tetap Lainnya

Pada Gambar 3.31 terlihat Belanja Aset Tetap Lainnya Provinsi Kalimantan Selatan pada dari tahun 2016 sampai 2020 tumbuh rata-rata -63,49 % dengan rata-rata nilai belanja sebesar 40 milyar rupiah.

3.1.1.2.3 Belanja Tak Terduga

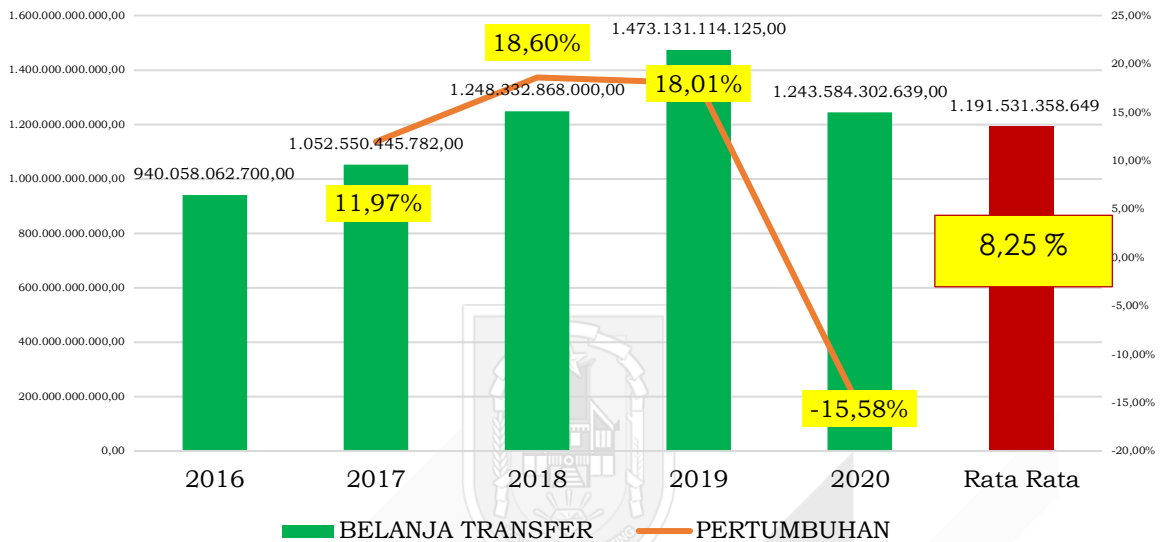
Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Rata – rata pertumbuhan belanja modal Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2016 sampai 2020 sebesar -4,76 %, dimana nilai rata-rata belanja modal adalah sebesar 44 Juta Rupiah.



Gambar III.32 Belanja Tak Terduga

3.1.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Rata-rata pertumbuhan belanja modal Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2016 sampai 2020 sebesar 8,25 %, dimana nilai rata-rata belanja modal adalah sebesar 1,1 Triliun Rupiah.



Gambar III.33 Belanja Transfer

Belanja transfer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Berdasarkan data, struktur belanja terbesar Provinsi Kalimantan Selatan adalah untuk pendanaan belanja bagi hasil. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 6.



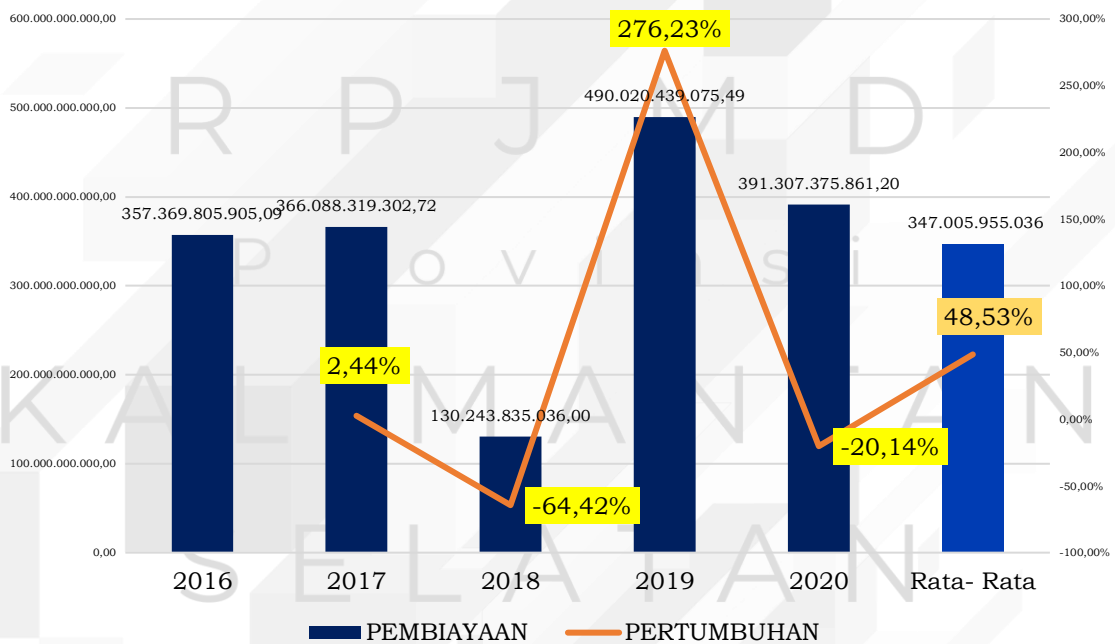
Gambar III.34 Struktur Belanja Transfer Tahun 2020

3.1.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum

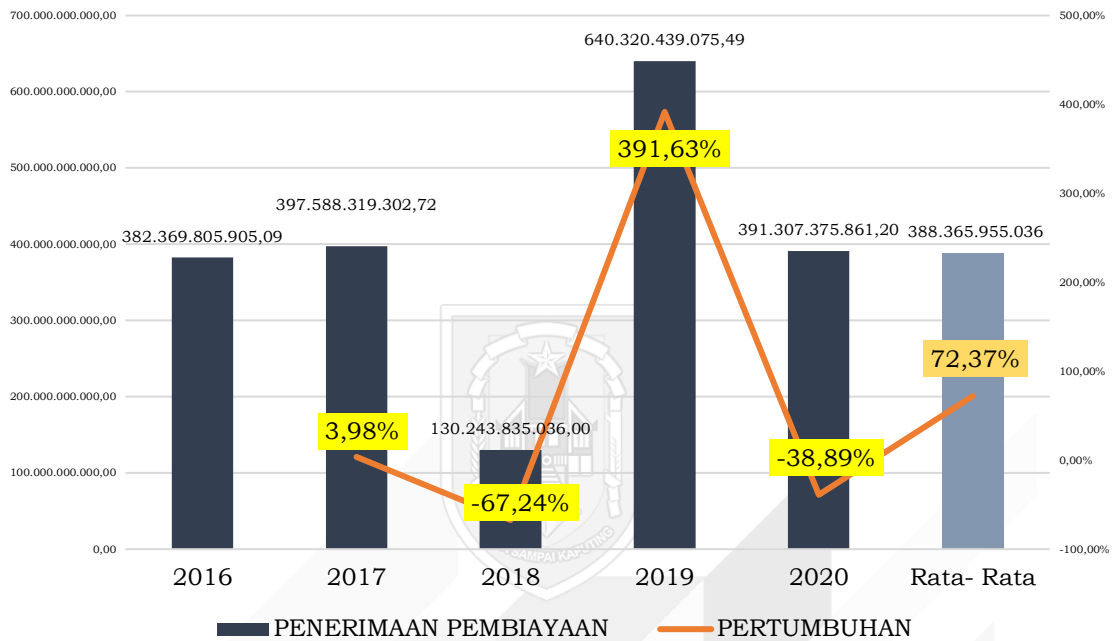


akun pembiayaan daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari kelompok :1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Kembali Investasi dan; 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; dan 3) Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) tahun berjalan. Perkembangan realisasi pembiayaan netto dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 48,53%. Akun Pembiayaan dengan kelompok Penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 72,37%, sedangkan pengeluaran pembiayaan realisasi terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp150.300.000.000,00.

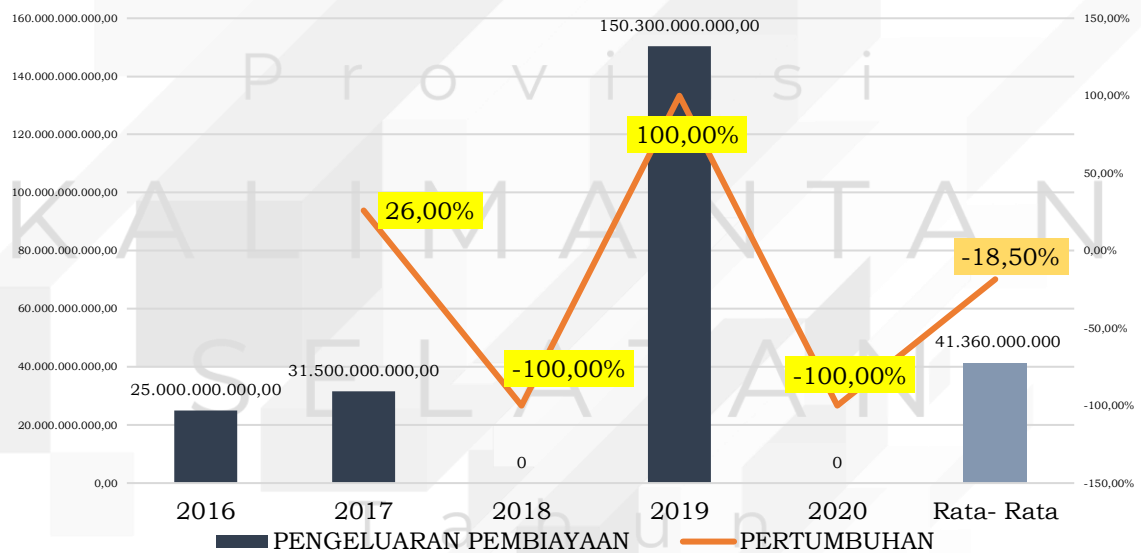


Gambar III.35 Pembiayaan Daerah

2021 - 2026

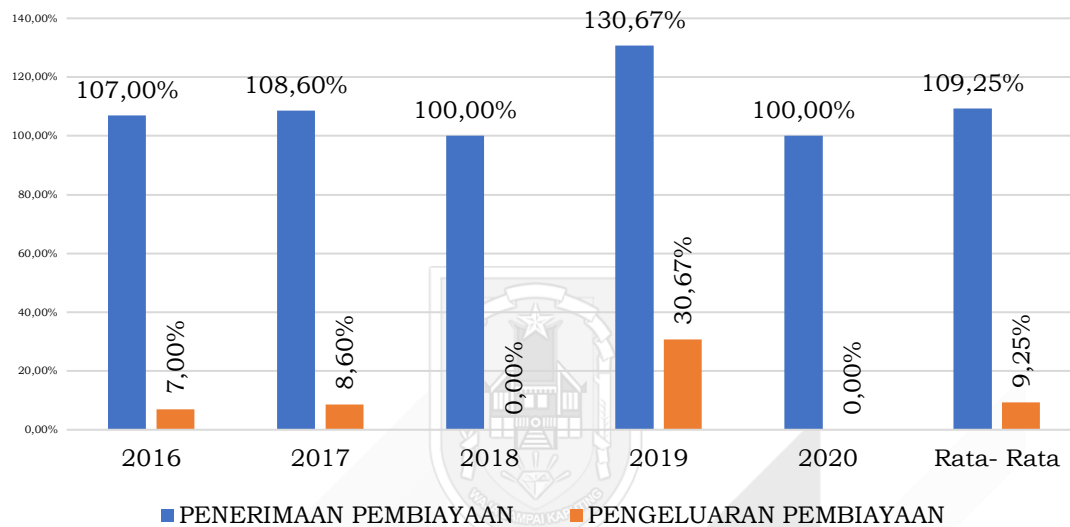


Gambar III.36 Penerimaan Pembiayaan



Gambar III.37 Pengeluaran Pembiayaan

Melihat dari perbandingan antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap Total Pembiayaan Daerah, realisasi Pembiayaan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 paling besar adalah melalui Penerimaan Pembiayaan dengan rata-rata sebesar 109,25%, sedangkan untuk rata-rata Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar 9,25%.

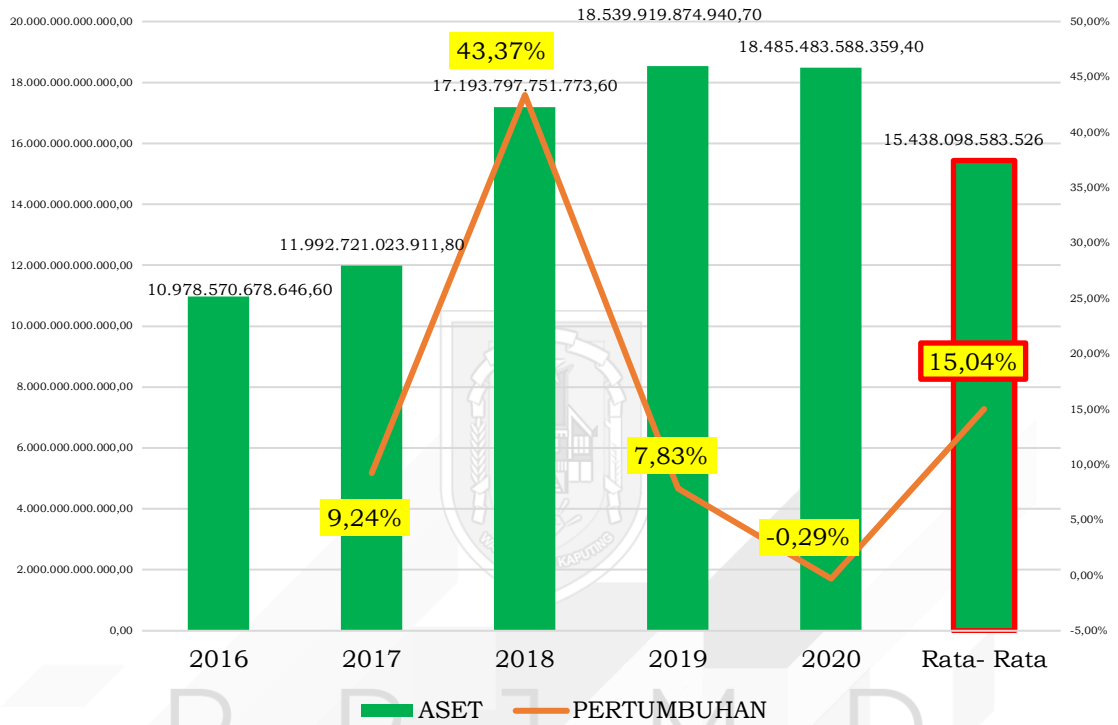


Gambar III.38 Struktur Pembiayaan

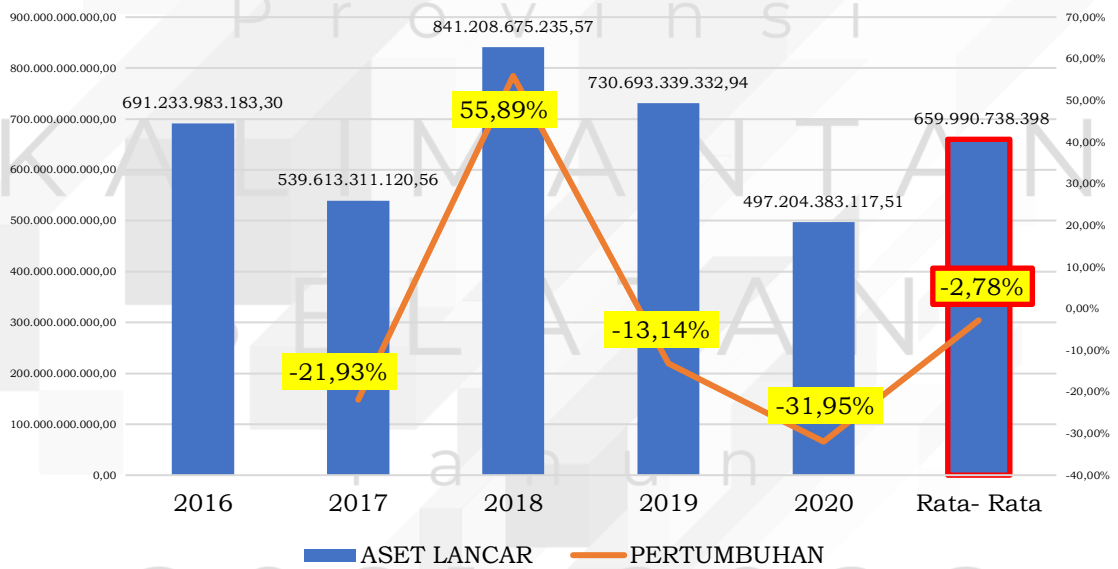
3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tahun tertentu. Analisis neraca daerah bertujuan menggambarkan kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah, melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Perkembangan Aset Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode Tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,04%. Rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain Aset Lancar rata-rata per tahun mengalami penurunan sebesar -2,78, Aset Tetap mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 16,48, Investasi Jangka Panjang mengalami penurunan rata-rata per per tahun -1,70, sedangkan Aset Lainnya mengalami kenaikan cukup besar dengan kenaikan rata-rata per tahun 83,06%.

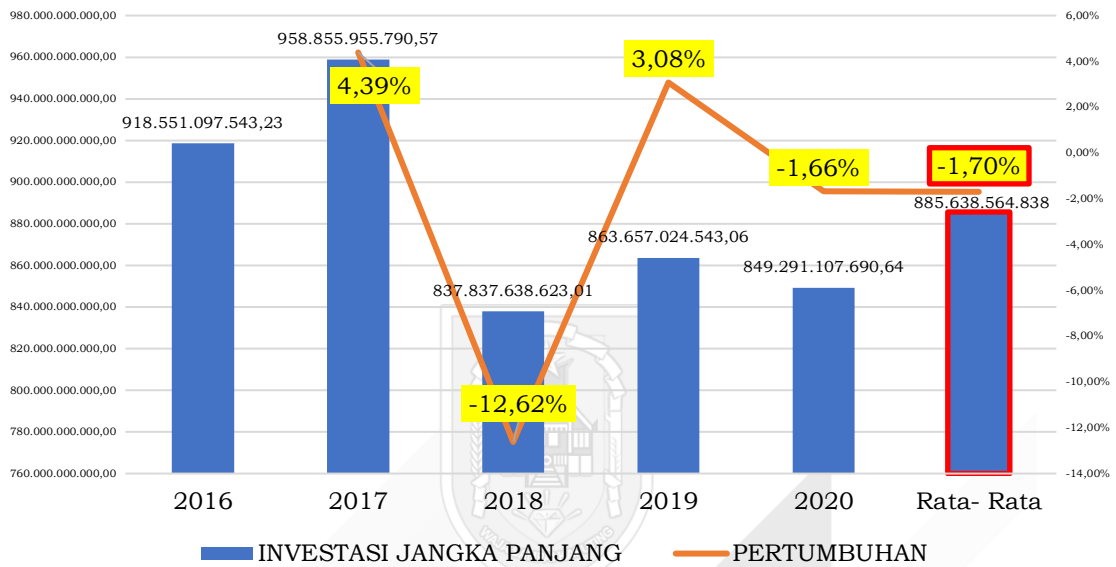
2021 - 2026



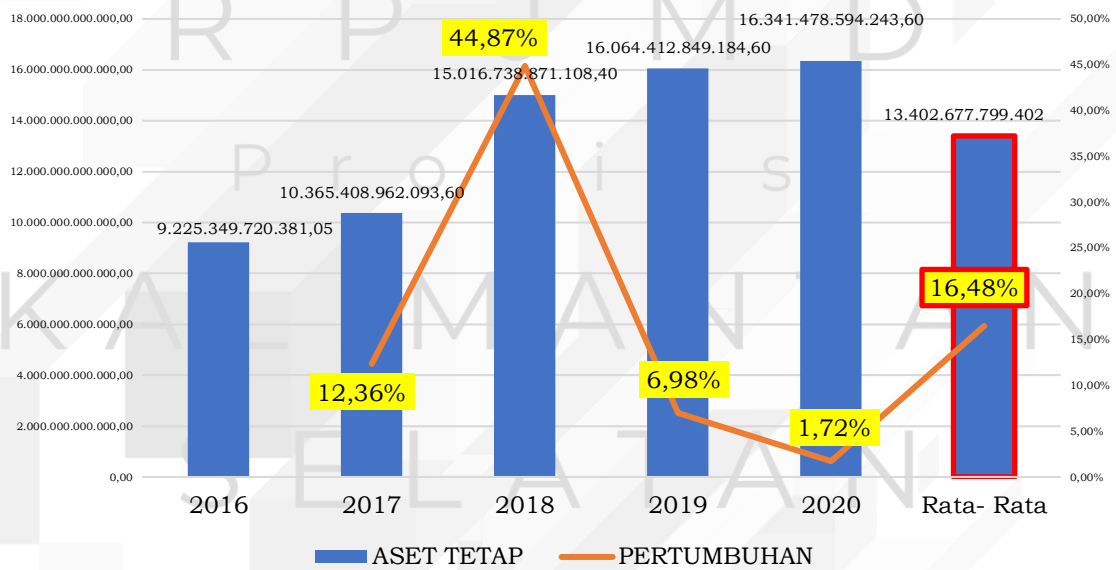
Gambar III.39 Aset Daerah



Gambar III.40 Aset Lancar

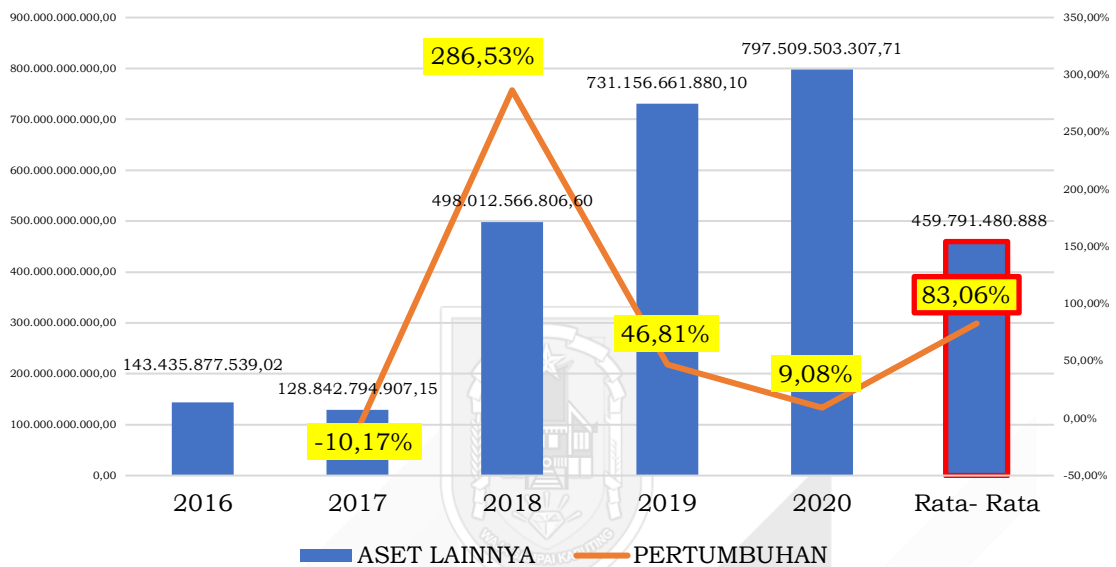


Gambar III.41 Aset Lancar

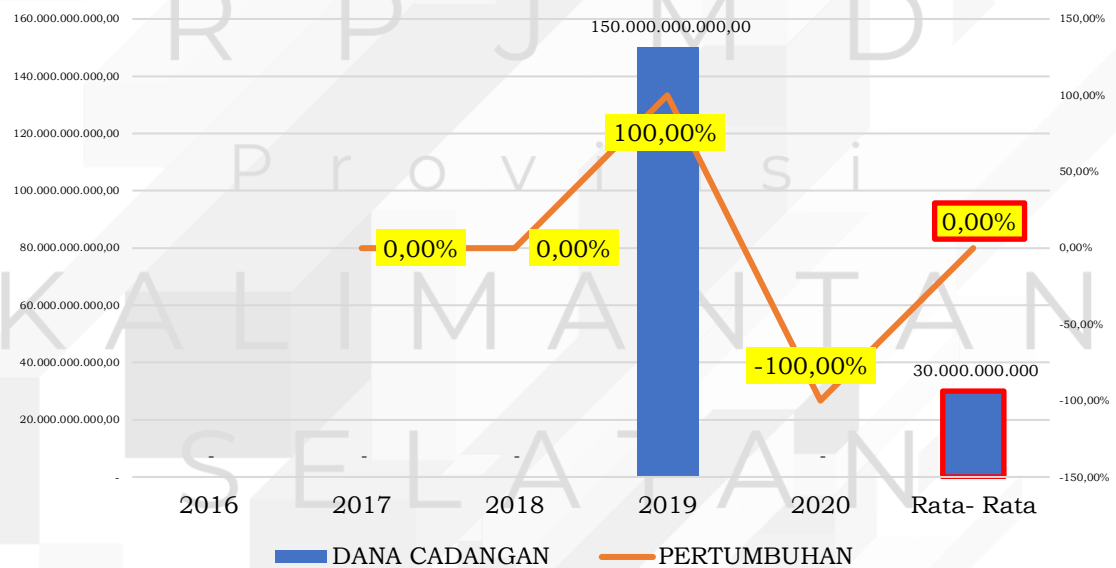


Gambar III.42 Aset Tetap

2021 - 2026

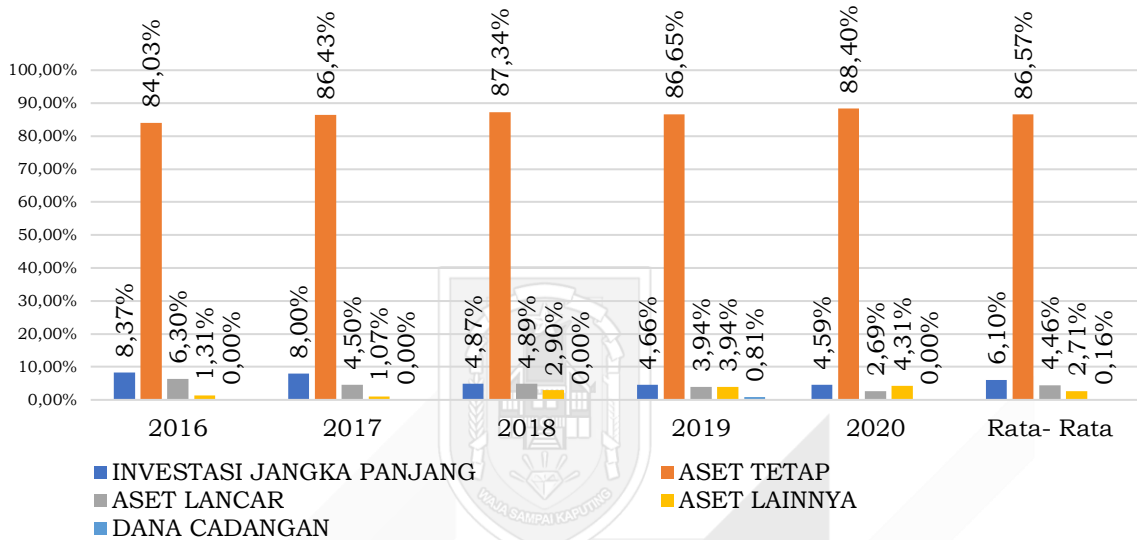


Gambar III.43 Aset Lainnya



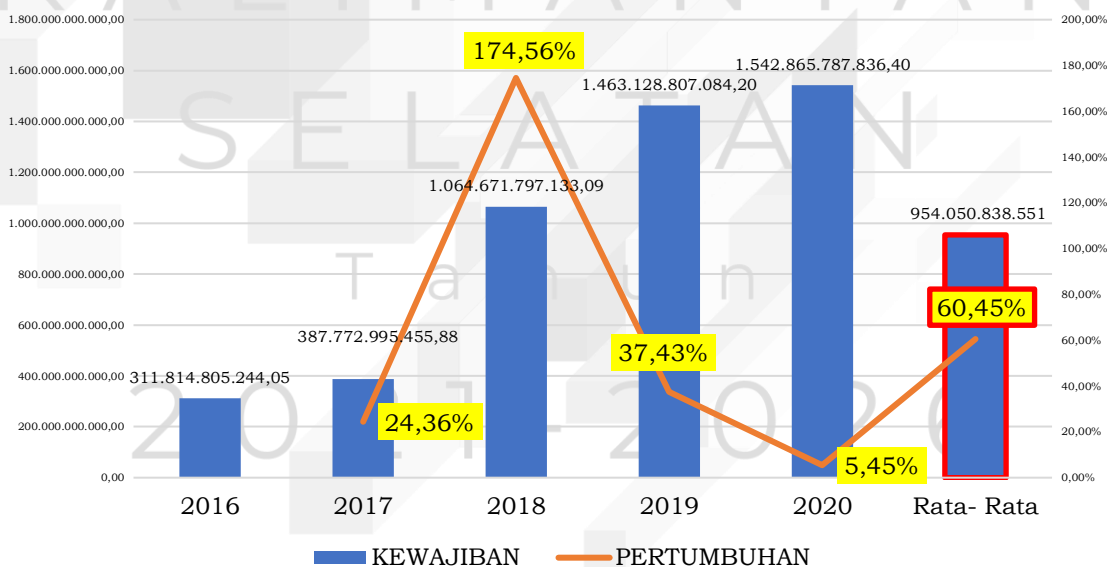
Gambar III.44 Dana Cadangan

Melihat dari komposisi Aset Daerah dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020, komposisi paling besar adalah Aset Tetap dengan rata-rata sebesar 86,57 %, sedangkan untuk rata-rata paling rendah adalah Dana Cadangan sebesar 0,16 % .

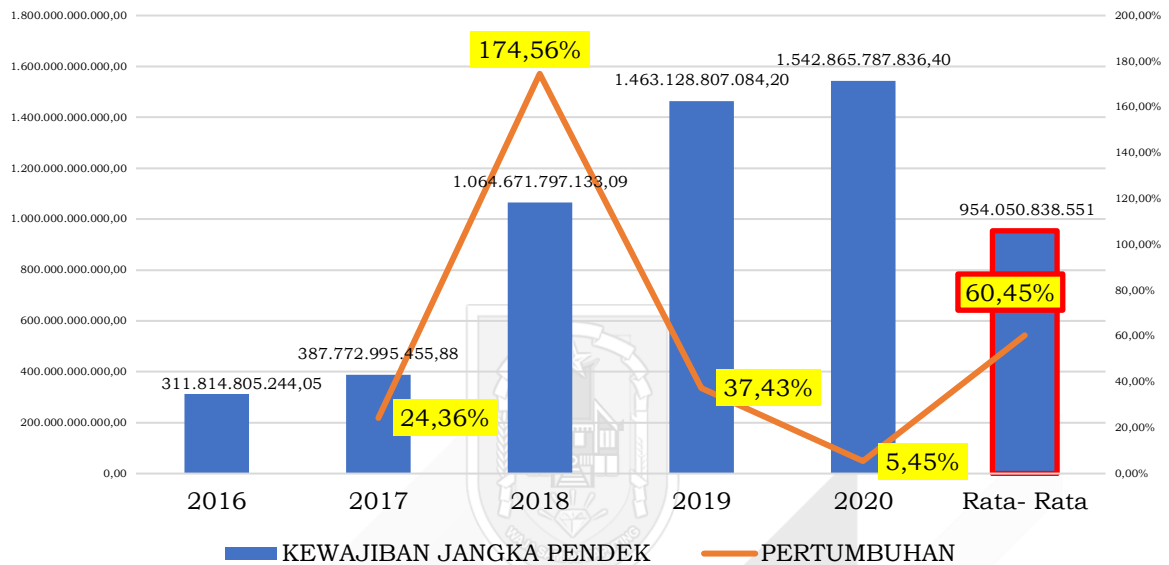


Gambar III.45 Struktur Aset Daerah

Sementara itu Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 60,45%, kewajiban ini berasal dari Kewajiban Jangka Pendek, sedangkan Kewajiban Jangka Panjang tidak ada dikarenakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak mempunyai Kewajiban Utang Pemerintah Pusat dan Utang Jangka Panjang Lainnya.

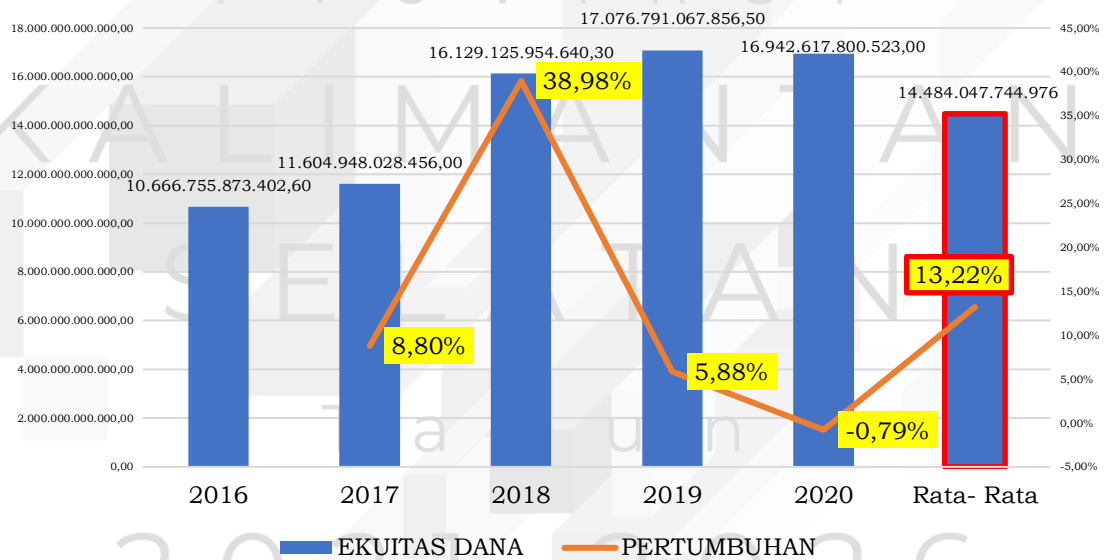


Gambar III.46 Kewajiban



Gambar III.47 Kewajiban Jangka Pendek

Selanjutnya pada Ekuitas Dana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada periode tersebut rata-rata pertumbuhan ekuitas yang diperoleh sebesar 13,22.



Gambar III.48 Ekuitas Dana

3.1.2.1 Analisis Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio tersebut antara lain:

- 1) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas tersebut antara lain :

- a. Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek

Current ratio atau rasio lancar digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, seperti hutang dan upah. Ini dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi hasilnya, semakin kuat posisi keuangan pemerintah daerah. Kondisi Rasio Lancar Provinsi Kalimantan Selatan dapat terlihat pada Tabe III-4.

Tabel III-4 Rasio Lancar Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aktiva Lancar	691.233.983.18 3,30	539.613.311.12 0,56	841.208.675.23 5,57	730.693.339.33 2,94	497.204.383.11 7,51
2	Kewajiban Jangka Pendek	311.814.805.24 4,05	387.772.995.45 5,88	1.064.671.797.1 33,09	1.463.128.807.0 84,20	1.542.865.787.8 36,40
3	Rasio Lancar	2,22	1,39	0,79	0,50	0,32



Gambar III.49 Rasio Lancar

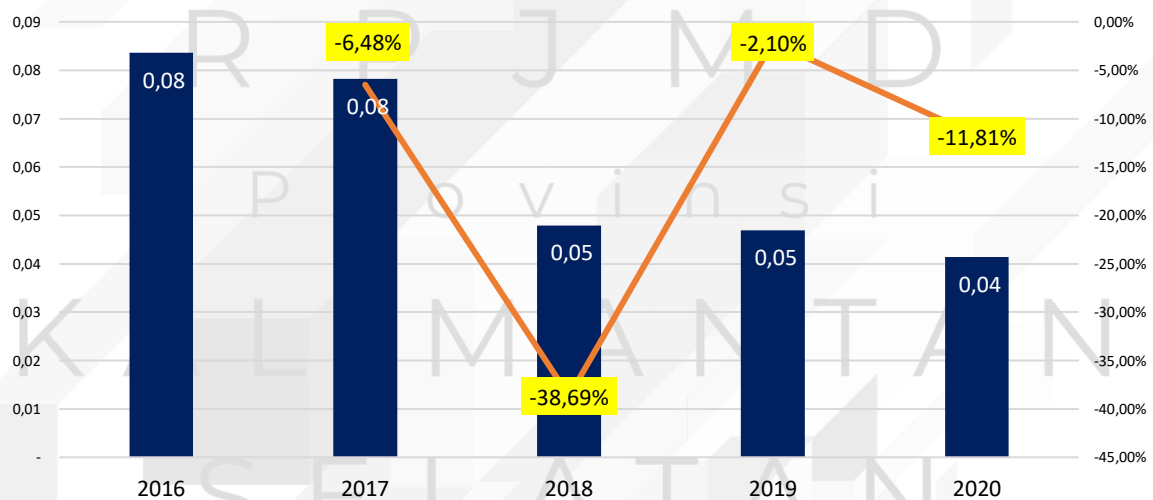
- b. Rasio quick = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek

Quick ratio atau biasa disebut rasio cepat atau *acid-test ratio* berfungsi sebagai indikator likuiditas jangka pendek pemerintah daerah, atau kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Dengan kata lain, ini menguji seberapa banyak pemerintah daerah memiliki aset untuk melunasi semua kewajibannya. Kondisi Rasio quick Provinsi Kalimantan Selatan dapat terlihat pada Tabel III-5.

Tabel III-5 Rasio Quick Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aktiva Lancar	918.551.097.54 3,23	958.855.955.79 0,57	837.837.638.62 3,01	863.657.024.54 3,06	849.291.107.69 0,64
2	Persediaan	26.626.679.227 ,79	51.393.742.374 ,21	64.520.553.069 ,81	62.092.965.372 ,51	147.913.749.60 8,02
3	Kewajiban Jangka Pendek	10.666.755.873 .402,60	11.604.948.028 .456,00	16.129.125.954 .640,30	17.076.791.067 .856,50	16.942.617.800 .523,00
4	Rasio Lancar	0,08	0,08	0,05	0,05	0,04



Gambar III.50 Rasio Quick

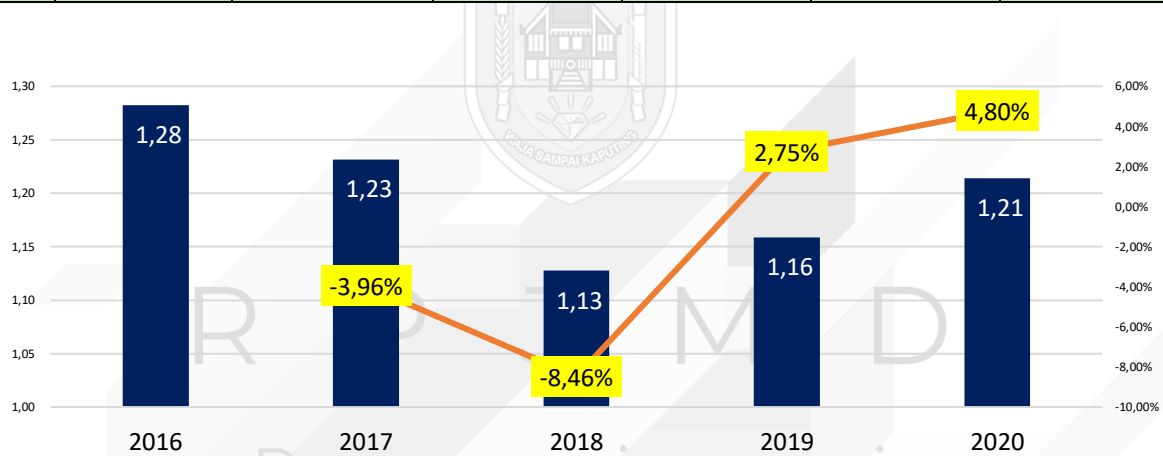
2) Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas tersebut antara lain:

- Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset Rasio hutang atau *debt ratio* adalah rasio solvabilitas yang mengukur total kewajiban perusahaan sebagai persentase dari total asetnya. Dalam arti tertentu, *debt ratio* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya dengan asetnya. Kondisi Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Provinsi Kalimantan Selatan dapat terlihat pada Tabe III-6.

Tabel III-6 Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Hutang	4.143.728.159. 501,95	4.669.799.022. 529,63	4.716.025.931. 580,84	5.286.643.931. 407,62	5.832.822.721. 729,40
2	Total Aset	3.230.931.824. 701,80	3.791.232.534. 476,16	4.182.825.384. 795,41	4.563.418.700. 057,03	4.804.381.474. 154,00
3	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	1,28	1,23	1,13	1,16	1,21



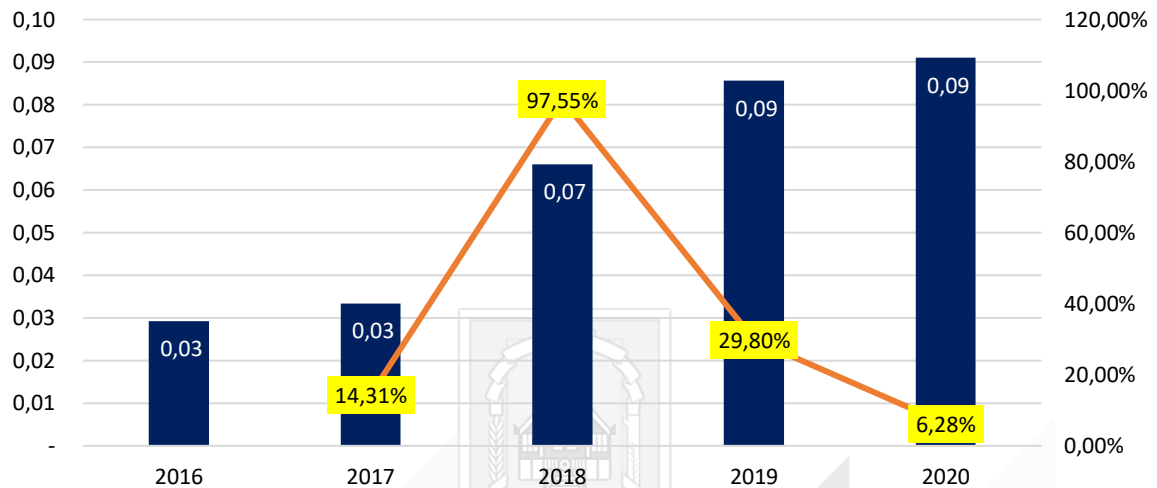
Gambar III.51 Rasio Total Hutang terhadap Total Aset

b) Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas

Debt to Equity Ratio (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional pemerintah daerah harus berada dalam jumlah yang proporsional. Kondisi Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Provinsi Kalimantan Selatan dapat terlihat pada Tabe III-7.

Tabel III-7 Rasio Hutang terhadap Modal Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Hutang	311.814.805.2 44,05	387.772.995.4 55,88	1.064.671.797 .133,09	1.463.128.807 .084,20	1.542.865.787 .836,40
2	Total Ekuitas	10.666.755.87 3.402,60	11.604.948.02 8.456,00	16.129.125.95 4.640,30	17.076.791.06 7.856,50	16.942.617.80 0.523,00
3	Rasio Hutang terhadap Modal	0,03	0,03	0,07	0,09	0,09



Gambar III.52 Rasio Hutang terhadap Modal

3) Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.

- a) Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), dihitung dengan formula sebagai berikut.

Rata-rata umur piutang = $365 : \text{perputaran piutang}$

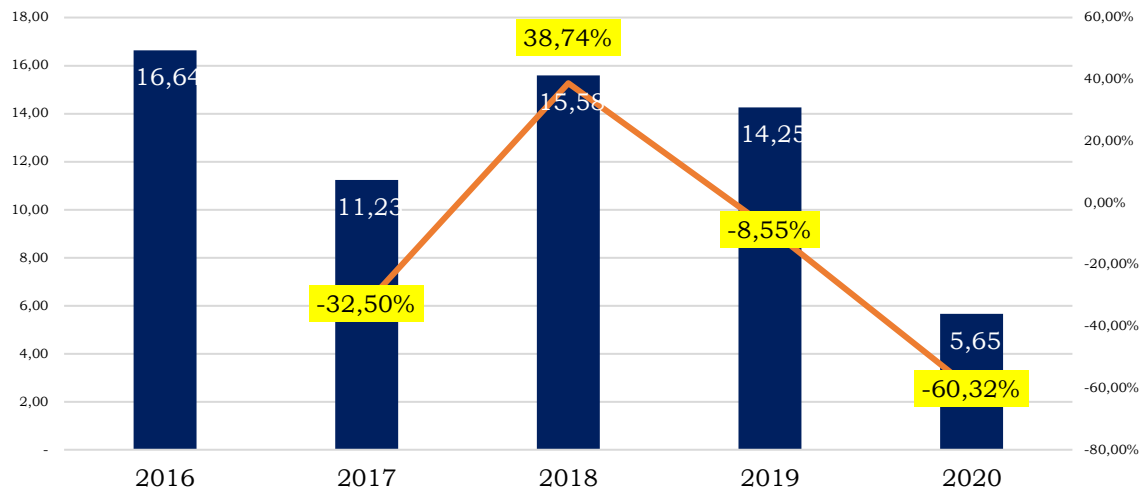
Dimana Perputaran piutang = $\frac{\text{pendapatan daerah}}{\text{rata-rata piutang}}$
pendapatan daerah.

Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah = $\frac{(\text{saldo awal piutang} + \text{saldo akhir piutang})}{2}$.

Kondisi Rata-rata Umur Piutang Provinsi Kalimantan Selatan dapat terlihat pada Tabe III-8.

Tabel III-8 Rata-rata Umur Piutang Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo Awal Piutang	266.349.069. 033,45	209.370.884. 284,81	135.774.664. 092,29	426.993.203. 232,57	100.487.797. 522,29
2	Saldo Akhir Piutang	209.370.884. 284,81	135.774.664. 092,29	426.993.203. 232,57	100.487.797. 522,29	100.487.797. 522,29
3	Rata - Rata Piutang Pendapatan Daerah	237.859.976. 659,13	172.572.774. 188,55	281.383.933. 662,43	263.740.500. 377,43	100.487.797. 522,29
4	Pendapatan Daerah	5.218.654.28 5.851,63	5.609.663.32 1.766,45	6.592.642.99 6.631,70	6.756.797.30 4.944,04	6.487.758.29 2.203,12
5	Perputaran Piutang	21,94	32,51	23,43	25,62	64,56
6	Rata - rata Umur Piutang	16,64	11,23	15,58	14,25	5,65



Gambar III.53 Rasio Hutang terhadap Modal

- b) Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut.

Rata-rata umur persediaan = $365 : \text{perputaran persediaan}$ Dimana :

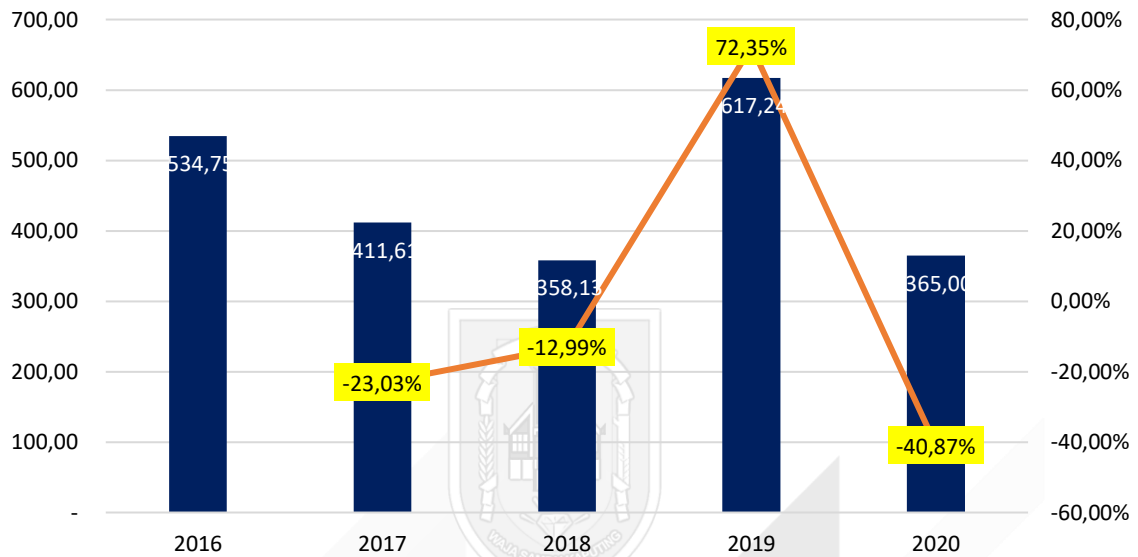
Perputaran persediaan = $\text{nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun} : \text{rata-rata nilai persediaan}$.

Sedangkan, rata-rata nilai persediaan = $(\text{saldo awal persediaan} + \text{saldo akhir persediaan}) : 2$

Kondisi Rata-rata Umur Piutang Provinsi Kalimantan Selatan dapat terlihat pada Tabe III-9.

Tabel III-9 Rata-rata Umur Persediaan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo Awal Persediaan	26.626.679. 227,79	51.393.742. 374,21	64.520.553. 069,81	62.092.965. 372,51	147.913.749 .608,02
2	Saldo Akhir Persediaan	51.393.742. 374,21	64.520.553. 069,81	62.092.965. 372,51	147.913.749 .608,02	147.913.749 .608,02
3	Rata - Rata Nilai Persediaan	39.010.210. 801,00	57.957.147. 722,01	63.306.759. 221,16	105.003.357 .490,27	147.913.749 .608,02
4	Nilai Persediaan	26.626.679. 227,79	51.393.742. 374,21	64.520.553. 069,81	62.092.965. 372,51	147.913.749 .608,02
5	Perputaran Persediaan	0,68	0,89	1,02	0,59	1,00
6	Rata - rata Umur Persediaan	534,75	411,61	358,13	617,24	365,00



Gambar III.54 Rata-rata Umur Persediaan

R P J M D
P r o v i n s i
K A L I M A N T A N
S E L A T A N
T a h u n
2 0 2 1 - 2 0 2 6



Tabel III-10 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	RERATA PERTUMBUHAN (%)
1	ASET	10.978.570.678.646,60	11.992.721.023.911,80	17.193.797.751.773,60	18.539.919.874.940,70	18.485.483.588.359,40	15,04
1.1	ASET LANCAR	691.233.983.183,30	539.613.311.120,56	841.208.675.235,57	730.693.339.332,94	497.204.383.117,51	- 2,78
1.1.1	Kas	397.325.011.588,72	129.985.141.128,20	640.508.046.240,13	241.042.954.061,20	248.341.191.542,76	66,53
1.1.2	Piutang	266.349.069.033,45	209.370.884.284,81	135.774.664.092,29	426.993.203.232,57	100.487.797.522,29	20,37
1.1.3	Beban dibayar dimuka	933.223.333,34	148.863.543.333,34	405.411.833,34	564.216.666,66	461.644.444,44	3,943
1.1.4	Persediaan	26.626.679.227,79	51.393.742.374,21	64.520.553.069,81	62.092.965.372,51	147.913.749.608,02	63,25
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	918.551.097.543,23	958.855.955.790,57	837.837.638.623,01	863.657.024.543,06	849.291.107.690,64	-1,70
1.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	917.257.961.402,23	958.404.530.830,10	837.620.796.132,00	863.440.582.051,06	849.006.421.390,64	- 1,68
1.2.2	Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM	1.293.136.141,00	451.424.960,47	216.842.491,01	216.442.492,00	284.686.300,00	- 21,43
1.3	ASET TETAP	9.225.349.720.381,05	10.365.408.962.093,60	15.016.738.871.108,40	16.064.412.849.184,60	16.341.478.594.243,60	16,48
1.3.1	Tanah	3.559.990.857.021,90	3.690.908.912.342,54	7.902.000.826.892,99	7.918.240.051.124,06	7.940.384.667.562,61	29,56
1.3.2	Peralatan dan mesin	1.137.941.721.826,33	1.583.835.576.784,49	2.041.569.302.143,33	2.326.525.364.507,25	2.713.835.680.613,77	24,67
1.3.3	Gedung dan bangunan	3.230.931.824.701,80	3.791.232.534.476,16	4.182.825.384.795,41	4.563.418.700.057,03	4.804.381.474.154,00	10,51
1.3.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	4.143.728.159.501,95	4.669.799.022.529,63	4.716.025.931.580,84	5.286.643.931.407,62	5.832.822.721.729,40	9,03
1.3.5	Aset tetap lainnya	31.588.695.156,10	105.640.899.370,14	200.692.933.749,90	212.110.732.356,69	246.782.012.003,25	86,61
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	222.239.706.167,00	445.739.670.335,00	257.889.054.935,66	382.812.554.393,00	219.676.927.412,05	16,06
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-3.101.071.243.994,03	-3.921.747.653.744,40	-4.284.264.562.989,69	-4.625.338.484.661,05	-5.416.404.889.231,52	15,19
1.3	ASET LAINNYA	143.435.877.539,02	128.842.794.907,15	498.012.566.806,60	731.156.661.880,10	797.509.503.307,71	83,06
1.3.1	Tagihan penjualan angsuran	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Kemitraan dengan pihak kedua	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Aset tak berwujud	4.226.996.142,16	5.382.143.654,28	4.822.589.975,81	2.159.012.954,81	20.712.445.815,41	205,26
1.3.5	Aset Lain-Lain	139.208.881.396,86	123.460.651.252,87	493.189.976.830,79	728.997.648.925,29	776.797.057.492,30	85,63
1.4	DANA CADANGAN	-	-	-	150.000.000.000,00	-	-
1.4.1	Dana Cadangan Pemilu Kepala Daerah	-	-	-	150.000.000.000,00	-	-



NO	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	RERATA PERTUM- BUHAN (%)
	JUMLAH ASET DAERAH	311.814.805.244,05	387.772.995.455,88	1.064.671.797.133,09	1.463.128.807.084,20	1.542.865.787.836,40	60,45
2	KEWAJIBAN	311.814.805.244,05	387.772.995.455,88	1.064.671.797.133,09	1.463.128.807.084,20	1.542.865.787.836,40	60,45
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	311.814.805.244,05	387.772.995.455,88	1.064.671.797.133,09	1.463.128.807.084,20	1.542.865.787.836,40	60,45
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-			2.085.000,00	-
2.1.2	Utang Dana Bos	2.885.159.700,00	5.585.108.384,00	380.962.270,00	5.883.519.482,40	5.386.199.482,42	359,08
2.1.3	Pendapatan Diterima Dimuka	8.367.293.943,03	2.124.709.842,88	2.645.991.594,62	247.380.782.663,80	234.587.179.957,58	2.298,5
2.1.4	Utang Belanja	300.562.351.601,02	380.029.051.429,00	616.263.203.714,06	623.251.988.243,77	658.157.512.733,00	23,83
2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	34.125.800,00	445.381.639.554,41	586.612.516.694,23	644.732.810.663,40	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAERAH	10.666.755.873.402,60	11.604.948.028.456,00	16.129.125.954.640,30	17.076.791.067.856,50	16.942.617.800.523,00	13,22
3	EKUITAS DANA	10.666.755.873.402,60	11.604.948.028.456,00	16.129.125.954.640,30	17.076.791.067.856,50	16.942.617.800.523,00	13,22
3.1	EKUITAS	10.666.755.873.402,60	11.604.948.028.456,00	16.129.125.954.640,30	17.076.791.067.856,50	16.942.617.800.523,00	13,22
	JUMLAH EKUITAS DANA	10.978.570.678.646,70	11.992.721.023.911,90	17.193.797.751.773,40	18.539.919.874.940,70	18.485.483.588.359,40	15,04
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	10.978.570.678.646,70	11.992.721.023.911,90	17.193.797.751.773,40	18.539.919.874.940,70	18.485.483.588.359,40	15,04

KALIMANTAN
SELATAN
Tahun
2021-2026

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah digambarkan dari APBD, merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dipergunakan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan publik. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

Pada sub bab ini akan dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

A. Kebijakan Pendapatan

Berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah, Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur serta mengelola pendapatan daerah, pendapatan daerah itu sendiri merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tertentu.

Secara umum, pendapatan daerah diupayakan mengalami peningkatan melalui berbagai upaya, baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Selanjutnya pada Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tertuang dalam pasal 285 dan 286, telah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah secara umum terdapat pada komponen pendapatan yang terdiri dari : (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; (2) Pendapatan Transfer yang berasal dari Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa, Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Antar Daerah; serta (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA).



Sejalan dengan kebutuhan pendanaan untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah yang terus meningkat, maka secara umum arah kebijakan pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 hingga 2026, akan ditempuh sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi serta revitalisasi pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih rasional dan proporsional, seiring dengan tuntutan transformasi manajemen keuangan daerah serta dinamika perubahan ketentuan yang mendasari.
- 2) Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabel terhadap pengelolaan anggaran pendapatan daerah secara terukur dengan tujuan optimalnya ekspektasi capaian kinerja yang dapat terpenuhi dalam kurun waktu tertentu.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi serta dukungan secara penuh dan sinergis dengan Pemerintah Pusat, melalui penguatan kerja sama pengelolaan pendapatan dalam rangka mengoptimalkan pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
- 4) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan dari sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, melalui penggalian potensi dan perbaikan manajemen pengelolaan pendapatan yang profesional, transparan, efisien, efektif dan akuntabel serta sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Meningkatkan manajemen dan kualitas potensi Sumber Daya Manusia, aparatur pengelola pendapatan daerah yang mumpuni, dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam upaya peningkatan pelayanan seiring dengan optimalnya pendapatan daerah.

Diharapkan pencapaian realisasi penerimaan dapat memenuhi sebagaimana target yang telah ditetapkan dan diupayakan lebih meningkat, maka kebijakan perencanaan pendapatan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, diasumsikan berdasarkan kajian analisis secara realistis berpedoman atas perolehan perkembangan realisasi penerimaan pada periode tahun sebelumnya, kemudian memperhitungkan estimasi perolehan pemasukan penerimaan dari program intensifikasi maupun ekstensifikasi yang telah dan akan dilaksanakan secara rasional serta terukur.

Untuk melaksanakan arah dan kebijakan tersebut, lebih fokus dan penguatan strategi pada upaya-upaya, antara lain :



- 1) Mengoptimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, meliputi peningkatan penerimaan pada komponen pendapatan yang terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah, antara lain (1) Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Pajak Air Permukaan; dan (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b. Jenis Retribusi, seperti (1) Retribusi Jasa Umum; (2) Retribusi Jasa Usaha; dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu.
- 2) Penyederhanaan mekanisme dan prosedur administrasi pemungutan Pajak / Retribusi Daerah, melalui integrasi data dan sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi serta peningkatan penggalian potensi dengan dikerjasamakan kepada pihak terkait. Melakukan pengendalian dan pengawasan lebih intensif atas pengelolaan pemungutan, seiring dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- 3) Melakukan updating data percepatan proses pelaporan terkait sumber-sumber pendapatan dari dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, serta bagi hasil dari produksi.
- 4) Melakukan konsultasi, koordinasi dan konsolidasi serta rekonsiliasi lebih intens per-periodik terhadap dana bagi hasil dengan Pemerintah Pusat dan antar daerah.
- 5) Melakukan penjajakan dana-dana block grant (terutama hibah/bantuan sosial) dan specific grant (DAK), yaitu jasa yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung pendanaan atas pembangunan dan peningkatan prasarana struktur dan infrastruktur yang diperlukan daerah berdasarkan skala prioritas.
- 6) Peningkatan kerja sama dan koordinasi antar SKPD penghasil, dalam rangka penguatan manajemen pengelolaan pendapatan daerah yang mengarah pada diversifikasi pendapatan dan penerapan kebijakan privatisasi dengan tetap berorientasi mengutamakan kepentingan pelayanan publik.
- 7) Peningkatan dukungan penguatan likuiditas BUMD, bagi perusahaan daerah yang mempunyai jaminan, bahwa kondisi break event point (BEP) mempunyai kontribusi positif terhadap pendapatan, yaitu melalui penyertaan modal yang disesuaikan dengan kemampuan APBD.
- 8) Peningkatan percepatan proses penyesuaian/ perkebangan produk hukum dan perundang-undangan pengelolaan pendapatan daerah.



- 9) Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, melalui sosialisasi regulasi pajak dan retribusi daerah serta law enforcement (penindakan/kepatuhan) pemenuhan kewajiban pajak dan lainnya.
- 10) Peningkatan sarana dan prasarana untuk memenuhi standar pelayanan yang sudah ditentukan, kenyamanan dan jaminan pengamanan proses kegiatan pelayanan serta pengelolaan pendapatan daerah secara komprehensif.
- 11) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset Pemerintah Daerah, baik yang dikelola sendiri maupun dikerjasamakan dengan pihak swasta dan swasta pemerintah (BUMN) maupun BUMD yang diarahkan mempunyai core bisnis dalam rangka peningkatan PAD.

B. Kebijakan Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2016-2020 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :

- 1) Memprioritaskan belanja daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari (1) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan; (2) Urusan Pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- 2) Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan prudent spending



melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

- 3) Pendukung belanja daerah terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sustainable Development Goals (SDG's).
- 4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 5) Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
- 6) Pemenuhan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari Belanja APBD, dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.
- 7) Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, pemberdayaan koperasi dan UKM, serta dukungan infrastruktur.
- 8) Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (multi years).
- 9) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 11) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- 12) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan



sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

C. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber darimasyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi :

- 1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD;



- 2) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran;
- 3) Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Bantul pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa mendatang.

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi Belanja untuk pembangunan dan semakin kecilnya Belanja Aparatur. Belanja Aparatur merupakan pengeluaran wajib dan mengikat yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah.

Perkembangan proporsi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun ke tahun memperlihatkan trend yang berfluktuatif, meski secara besaran nominal belanja untuk aparatur tersebut cenderung meningkat. Secara keseluruhan rata-rata proporsi belanja aparatur selama 5 tahun terakhir 24,58% terhadap total pengeluaran, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 26,84%.

Tabel III-11 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) (a)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) (b)	Persentase $(c)=(a)/(b) \times 100\%$
1	Tahun Anggaran 2016	826.899.966.543	5.203.766.888.168	15,89
2	Tahun Anggaran 2017	1.481.390.723.537	5.877.300.625.741	25,21
3	Tahun Anggaran 2018	1.700.899.388.648	6.082.587.192.592	27,96
4	Tahun Anggaran 2019	1.763.279.534.073	7.156.074.789.958	24,64
5	Tahun Anggaran 2020	1.934.780.590.156	6.630.726.561.522	29,18

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut: a. Pembiayaan daerah terdiri atas: 1) penerimaan pembiayaan; dan 2) pengeluaran pembiayaan.

3.2.2.1 Defisit Riil Anggaran

Defisit riil dalam APBD terjadi apabila pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah menimbulkan adanya defisit dalam APBD.

Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya. Perkembangan Defisit riil Provinsi Kalimantan Selatan selama 5 tahun terakhir terlihat bahwa pada Tabe III-12.

Tabel III-12 Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Realisasi Pendapatan Daerah	5.218.654.285. 852	5.609.663.321. .766	6.592.642.996. 632	6.756.797.304. .944	6.487.758.292. 203
Dikurangi realisasi:						
2	Belanja Daerah	5.178.766.888. 168	5.845.800.625. .741	6.082.587.192. 592	7.005.774.789. .958	6.630.726.561. 522
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	25.000.000.00 0	31.500.000.00 0	-	150.300.000.0 00	-
Defisit riil		14.887.397.68 4	267.637.303.9 75	510.055.804.0 39	399.277.485.0 14	142.968.269.3 18

3.2.2.2 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Penerimaan Pembiayaan Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari : a. SILPA; b.

pencairan Dana Cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan Pinjaman Daerah; e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah di luar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi dalam APBD sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Perkembangan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel III-13.

Tabel III-13 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020

No.	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil				
		Tahun 2016 (%)	Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	958,62	- 168,23	25,48	- 257,17	- 168,60
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	- 104,92
3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	-	0,14	0,06	0,01	0,18
4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan



mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak

tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selama 5 tahun terakhir (2016-2020), sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) setiap tahunnya.

Dari uraian SiLPA yang ada, dari 7 (tujuh) item ada terdapat 4 (empat) item yang berkontribusi terhadap bertambahnya penerimaan SiLPA, yakni dari:

- 1) Pelampauan Penerimaan PAD,
- 2) Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan,
- 3) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan
- 4) Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya.

RPJMD
Provinsi
KALIMANTAN
SELATAN
Tahun
2021-2026

Tabel III-14 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	382.369.805.905,09	100	382.369.805.905,09	100	129.951.015.328,00	100,00	640.299.639.075,49	100	241.042.954.061,20	100
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Pada akhir tahun 2019, beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan Pemerintah Pusat, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kesemuanya ini merupakan hal baru di dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus diterapkan dan diberlakukan mulai tahun anggaran 2021.

Selain adanya peraturan baru yang terbit di akhir tahun 2019, terjadinya kejadian luar biasa (KLB) wabah pandemik Covid-19 yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, antara lain aspek social dan ekonomi juga turut mempengaruhi struktur kerangka pendanaan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin mengawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan memutuskan penyebaran pandemik ini, dimana Belanja Daerah yang sebelumnya fokus untuk melaksanakan program/kegiatan yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, pada tahun mendatang selain tetap menuntaskan program/kegiatan strategis, juga harus mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemik Covid-19.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

3.3.1.1 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 sampai dengan 2026 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 1,7 %. Rata-rata pertumbuhan positif ditunjukkan oleh komponen Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Lain – lain Pendapatan Yang Sah diproyeksikan mengalami kenaikan dengan rata-rata pertahun sama sebesar 1,7%.



Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang berasal dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil, untuk itu kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah yang diproyeksikan dapat meningkat setiap tahunnya, selanjutnya proyeksi kenaikan pertahun terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat relatif kecil, ini dilakukan dengan memperhatikan sering terjadinya pemotongan terhadap Dana Alokasi Umum dan perhitungan kelebihan salur atas Dana Bagi Hasil.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah melalui Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Meningkatkan efesiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja agar target yang ditetapkan sesuai dengan potensi Pendapat Daerah.
 - c. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
 - d. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan asset daerah secara professional.
 - e. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar SKPD-SKPD penghasil pendapatan.
 - f. Memantapkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur di bidang pendapatan.
- 2) Pendapatan Transfer yaitu dengan Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian teknis yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang menghasilkan Dana Bagi Hasil baik itu Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yang meberikan kontribusi yang cukup besar selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta Dana Insentif Daerah. Selain itu juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri yang mengelola urusan keuangan khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.



- 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan penerimaan pendapatan berupa bantuan keuangan maupun hibah dari pemerintah.

3.3.1.2 Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah

Penyusunan proyeksi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam program dan kegiatan.

Belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 sampai dengan 2026 diproyeksikan mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,1% setiap tahunnya. Rata-rata peningkatan Belanja Daerah ditunjukkan oleh kelompok Belanja Modal sebesar 5,36%, sementara untuk Belanja Tak Terduga diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar 21,87% sampai dengan tahun 2026, selanjutnya pada kelompok belanja operasi diproyeksikan rata-rata per tahun naik 0,92%, dan pada jenis belanja pegawai yang digunakan untuk memenuhi gaji dan tunjangan ASN diproyeksikan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 2,28%

Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah :

- 1) Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.
- 2) Memenuhi pelaksanaan program unggulan yang merupakan program prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun
- 3) Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.
- 4) Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional.
- 5) Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijangkau melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang.
- 6) Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan



perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat.

- 7) Mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan social yang terdampak pandemik Covid-19.

3.3.1.3 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternative sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan lebih diarahkan kepada penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaan meliputi :

- 1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD Bank Kalsel.

Salah satu BUMD terbesar milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Bank Kalsel memerlukan dana tambahan untuk modal inti usahanya. Hal ini dikarenakan perubahan Ketentuan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang mana salah satunya mewajibkan Modal Inti Minimum Bank Umum paling sedikit Rp. 3.000.000.000.000,00 (Tiga Triliun Rupiah) yang harus dipenuhi terakhir pada tahun 2024. Sehingga seluruh pemerintah daerah baik Kota, Kabupaten, dan Provinsi bersepakat untuk menambahkan setoran modalnya ke Bank kalsel. Berdasarkan pembagian untuk alokasi penganggaran penyertaan modal, Proyeksi Alokasi anggaran untuk



penyertaan modal pada bank kalsel dianggarkan sekitar 272.492.000.000, (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta) dengan formulasi anggaran berupa uang sebesar Rp75.000.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) yang dialokasikan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah), tahun 2023 sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah), dan sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) pada tahun 2024. Sisanya Rp197.492.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta) untuk memenuhi kecukupan penyertaan modal pemerintah provinsi kalsel pada Bank Kalsel di investasikan berupa aset tidak bergerak (Inbrenng). Hal ini terlihat pada Tabel III – 15.

2) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD Jamkrida.

Penyertaan modal pada BUMD Jamkrida direncanakan sebesar Rp 32.000.000.000,- (Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah) yang dialokasikan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah).

Tabel III-15 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 s/d Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	PENDAPATAN	6.462.109.633.960,00	6.571.319.286.773,92	6.682.374.582.721,00	6.795.306.713.168,99	6.910.147.396.621,54
01.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.712.293.569.960,00	3.775.031.331.292,32	3.838.829.360.791,76	3.903.705.576.989,15	3.969.678.201.240,26
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	2.935.210.000.000,00	2.984.815.049.000,00	3.035.258.423.328,70	3.086.554.290.682,96	3.138.717.058.195,50
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	29.061.817.000,00	29.552.961.707,30	30.052.406.760,15	30.560.292.434,40	31.076.761.376,54
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	42.854.009.600,00	43.578.242.362,24	44.314.714.658,16	45.063.633.335,88	45.825.208.739,26
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	705.167.743.360,00	717.085.078.222,78	729.203.816.044,75	741.527.360.535,91	754.059.172.928,96
01.02	PENDAPATAN TRANSFER	2.685.360.264.000,00	2.730.742.852.461,60	2.776.892.406.668,20	2.823.821.888.340,89	2.871.544.478.253,85
01.02.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.680.525.916.000,00	2.725.826.803.980,40	2.771.893.276.967,67	2.818.738.273.348,42	2.866.374.950.168,01
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	902.961.708.000,00	918.221.760.865,20	933.739.708.623,82	949.519.909.699,56	965.566.796.173,49



NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.093.343.743.000,00	1.111.821.252.256,70	1.130.611.031.419,84	1.149.718.357.850,83	1.169.148.598.098,51
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	684.220.465.000,00	695.783.790.858,50	707.542.536.924,01	719.500.005.798,02	731.659.555.896,01
01.02.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	4.834.348.000,00	4.916.048.481,20	4.999.129.700,53	5.083.614.992,47	5.169.528.085,84
1.2.2.2	Dana Insentif Daerah	4.834.348.000,00	4.916.048.481,20	4.999.129.700,53	5.083.614.992,47	5.169.528.085,84
01.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	64.455.800.000,00	65.545.103.020,00	66.652.815.261,04	67.779.247.838,95	68.924.717.127,43
01.03.01	Pendapatan Hibah	64.455.800.000,00	65.545.103.020,00	66.652.815.261,04	67.779.247.838,95	68.924.717.127,43
2	BELANJA	6.427.109.633.960,00	6.535.727.786.773,92	6.930.374.582.721,00	6.855.306.713.169,42	6.970.147.396.622,00
02.01	BELANJA OPERASI	4.023.363.003.999,00	4.091.357.838.766,58	4.355.155.457.791,34	4.077.936.737.816,52	4.172.881.968.905,00
02.01.01	Belanja Pegawai	1.791.532.508.622	1.821.809.408.018	1.852.597.987.013	1.906.984.441.251	1.954.659.052.282
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.941.867.693.177,00	1.974.685.257.191,69	2.008.057.438.038,23	1.872.652.322.282,08	1.919.468.630.339,00
02.01.03	Belanja Hibah	283.322.802.200,00	288.110.957.557,18	492.980.032.739,90	296.754.286.283,71	296.754.286.284,00
02.01.04	Belanja Bantuan Sosial	6.640.000.000,00	6.752.216.000,00	1.520.000.000,00	1.545.688.000,00	2.000.000.000,00
02.01.05	Belanja Bantuan Keuangan					



NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
02.02	BELANJA MODAL	1.113.596.629.961,00	1.132.416.413.007,34	1.223.153.234.929,66	1.404.144.171.811,90	1.352.522.108.096,00
02.02.01	Belanja Tanah	178.398.782.427,00	181.413.721.850,02	179.922.252.654,36	182.962.938.724,23	80.984.919.250,00
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	129.285.775.569,00	131.470.705.176,12	160.517.311.177,93	208.599.943.925,07	203.760.851.154,00
02.02.03	Belanja Bangunan dan Gedung	259.745.870.400,00	264.135.575.609,76	315.845.424.225,37	389.238.047.177,12	300.908.090.821,00
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	492.125.553.165,00	500.442.475.013,49	558.433.114.272,00	614.765.555.644,54	758.433.114.271,00
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	54.040.648.400,00	54.953.935.357,96	8.435.132.600,00	8.577.686.340,94	8.435.132.600,00
02.02.06	Belanja Aset Lainnya					
02.03	BELANJA TAK TERDUGA	80.000.000.000,00	81.352.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	150.000.000.000,00
02.03.01	Belanja Tak Terduga	80.000.000.000,00	81.352.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	150.000.000.000,00
02.04	BELANJA TRANSFER	1.210.150.000.000,00	1.230.601.535.000,00	1.252.065.890.000,00	1.273.225.803.541,00	1.294.743.319.621,00
02.04.01	Belanja Bagi Hasil	1.210.000.000.000,00	1.230.449.000.000,00	1.252.065.890.000,00	1.273.225.803.541,00	1.294.743.319.621,00
02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	150.000.000,00	152.535.000,00	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	35.000.000.000,00	35.591.500.000,00	(248.000.000.000,00)	(60.000.000.000,43)	(60.000.000.000,46)



NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
3	PEMBIAYAAN	(35.000.000.000,00)	(35.591.500.000,00)	248.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00
03.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00	99.408.500.000,00	285.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00
03.01.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	100.000.000.000,00	99.408.500.000,00	85.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	200.000.000.000,00	-	-
03.01.03	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-
03.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	135.000.000.000,00	135.000.000.000,00	37.000.000.000,00	-	-
03.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-	-	-
03.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	37.000.000.000,00	-	-
03.02.03	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) serta belanja operasi dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2021-2026 untuk mendanai pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan hasil analisa, total penerimaan pada tahun 2021 sebesar Rp 6.462.109.633.960,00 dan walaupun berfluktuasi akan tetapi dapat diproyeksikan terus meningkat sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp 6.910.147.396.621,54. Walaupun peningkatan penerimaan rata-rata per tahun relatif kecil, yang terpenting dalam proyeksi formulasi proyeksi penerimaan 2021-2026 Pemerintah Provinsi Kalimantan memasang sikap optimis formulasi proyeksi penerimaan tersebut akan tercapai dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi. Proyeksi total penerimaan setelah dikurangi dengan proyeksi belanja pegawai, maka diperoleh angka proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Adapun proyeksi riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini.

KALIMANTAN
SELATAN
Tahun
2021-2026

Tabel III-16 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 s/d Tahun 2026

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
1	Pendapatan	6.462.109.633.960	6.571.319.286.774	6.682.374.582.721	6.795.306.713.169	6.910.147.396.622
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	200.000.000.000	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	100.000.000.000	99.408.500.000	85.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
	Total penerimaan	6.562.109.633.960	6.670.727.786.774	6.967.374.582.721	6.855.306.713.169	6.970.147.396.622
	Dikurangi:					
4	Belanja Pegawai	1.791.532.508.622	1.821.809.408.018	1.852.597.987.013	1.906.984.441.251	1.954.659.052.282
5	Pengeluaran Pembiayaan	135.000.000.000	135.000.000.000	37.000.000.000	0	0
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	4.635.577.125.338	4.713.918.378.756	5.077.776.595.708	4.948.322.271.918	5.015.488.344.340

2021 - 2026



Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut untuk memandu alokasi pendanaan yang dibagi menjadi 2 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran dialokasikan sebagai berikut:

- A. Prioritas I dialokasikan untuk membiayai Belanja wajib dan mengikat serta program - program pemenuhan Visi Misi Kepala Daerah terkait Pelayanan Dasar.

Rencana Alokasi Pengeluaran berkaitan dengan Pembiayaan Belanja Gaji, Tunjangan ASN serta dan untuk Belanja pemenuhan Visi Misi Kepala Daerah terkait Urusan Wajib Pelayanan Dasar yaitu Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman, Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

- B. Prioritas II dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan Visi Misi Kepala Daerah terkait Urusan Pemerintahan Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Lainnya.

Rencana alokasi pengeluaran berkaitan dengan program prioritas yang memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi untuk pencapaian Visi Misi Kepala Daerah seperti Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Pangan, dan lain-lain.



Tabel III-17 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 s/d Tahun 2026

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2022	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
1	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	4.635.577.125.338	4.713.918.378.756	5.077.776.595.708	4.948.322.271.918	5.015.488.344.340
2	BELANJA	6.427.109.633.960	6.535.727.786.774	6.930.374.582.721	6.855.306.713.169	6.970.147.396.622
	PRIORITAS I	4.083.294.758.181	4.152.302.439.594	4.308.556.551.628	4.334.951.935.049	4.415.430.483.732
	PRIORITAS II	2.343.814.875.779	2.383.425.347.180	2.621.818.031.093	2.520.354.778.121	2.554.716.912.890

KALIMANTAN
SELATAN
Tahun
2021-2026



3.4 Sumber Pendanaan Lainnya

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, selain bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan, juga memerlukan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) berupa Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi yang bersumber dari APBN adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Tugas pembantuan yang bersumber dari APBN adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian dekonsentrasi dan tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sumber pendanaan pembangunan non APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan selain APBN juga berasal dari Program Kemitraan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan komitmen Perusahaan untuk berperan dalam pembangunan. program CSR/TJSLP pun beragam, tidak hanya terbatas pada program sosial maupun ekonomi, ada beberapa bidang lain yang dapat dijadikan sasaran pertanggungjawaban sosial perusahaan seperti pendidikan, dan lingkungan. Besarnya kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan juga dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan investasi Pemerintah dan Swasta/masyarakat.

T a h u n

2 0 2 1 - 2 0 2 6



R P J M D **IV**
P r o v i n s i
K A L I M A N T A N
S E L A T A N
T a h u n **DAERAH**
2 0 2 1 - 2 0 2 6

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan atau pada akhirnya dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah

Isu strategis ini adalah bagian dari berbagai fakta dan permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang telah diinventarisir dan dianalisis dalam Bab IV RPJMD ini. Selanjutnya rumusan permasalahan tersebut dikelompokkan menjadi isu strategis yang merupakan permasalahan utama untuk dijadikan prioritas. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara metodologi, alur fikir munculnya isu-isu strategis pembangunan dalam Bab ini dapat dijelaskan melalui bagan IV.1 berikut:



Gambar IV-1 Alur Metodologi Penetapan Isu-Isu Strategis Pembangunan

Sedangkan penetapan indikator untuk menentukan strategis atau tidaknya suatu permasalahan pembangunan dalam berbagai bidang sebagaimana diuraikan dalam Bab ini dapat dilihat dari enam aspek, sebagai berikut :

- Memiliki Pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- Dampak yang ditimbulkan kepada publik;
- Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;

- e. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani oleh pemerintahan yang bersangkutan;
- f. Merupakan janji politik Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.

Untuk menentukan berbagai fakta dan permasalahan pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, maka fakta dan permasalahan itu dianalisis, baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif.

Secara kualitatif, fakta-fakta dan permasalahan pembangunan yang memenuhi sebanyak mungkin indikator penentuan isu strategis sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan sebagai isu paling strategis, begitu seterusnya sampai dengan yang paling sedikit memenuhi kualifikasi indikator dimaksud.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

4.1.1 Permasalahan Pokok Pembangunan Kalimantan Selatan

4.1.1.1 Ketimpangan Antara Wilayah

Indeks Williamson adalah indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar wilayah. Angka indeks Williamson sebagai ukuran ketimpangan pendapatan antar wilayah mempunyai selang nilai antara 0 (nol) dan 1 (satu). Indeks Williamson sama dengan 0 (nol) menunjukkan nilai ketimpangan yang rendah (pemerataan sempurna). Sedang Indeks Williamson sama dengan 1 (satu) menunjukkan nilai ketimpangan yang tinggi (kesenjangan sempurna). Hasil pengukuran dari Indeks Williamson (IW) dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- $IW < 0,4$ = tingkat ketimpangan rendah.
- $0,4 < IW < 0,5$ = tingkat ketimpangan sedang (moderat).
- $IW > 0,5$ = tingkat ketimpangan tinggi.

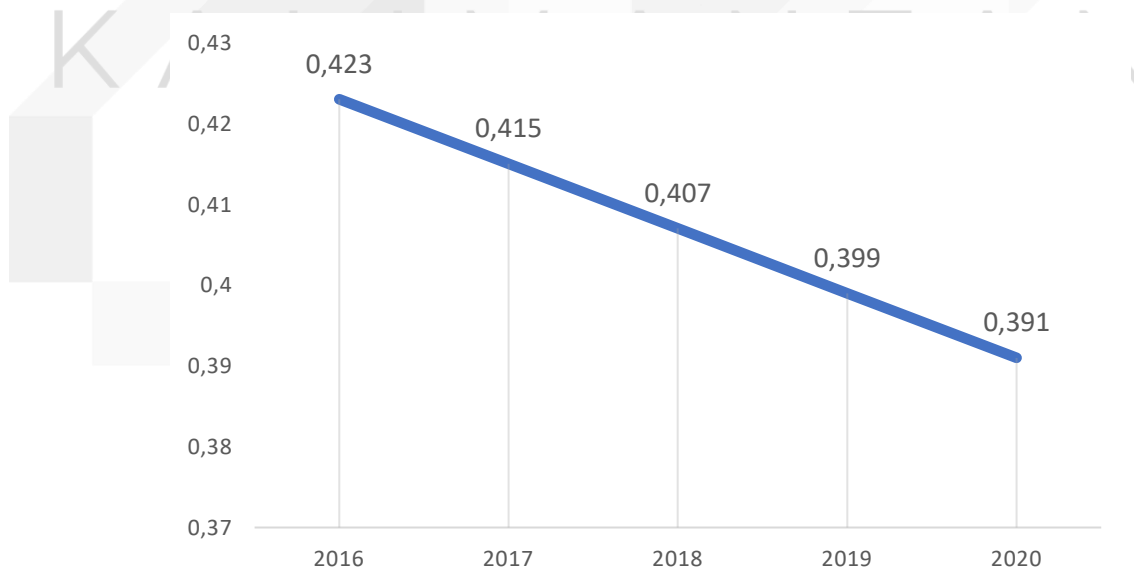
Nilai Indeks Williamson Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah. Pada kurun waktu tahun 2016 – 2020, Indeks Williamson Kalimantan Selatan semakin menurun yaitu dari 0,423 menjadi 0,391. Pertumbuhan

rata-rata Indeks Williamson dalam kurun waktu 2016-2020 adalah -1,95%. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang semakin menurun. Kecenderungan penurunan Indeks Williamson diharapkan dapat menjadi indikator pemerataan wilayah yang semakin baik.

Tabel IV-1 Indeks Williamson Kalimantan Selatan (2016-2020)

Indikator	Indeks Williamson (%)					Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Indeks Williamson	0,423	0,415	0,407	0,399	0,391	-1,95
Kategori Ketimpangan	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan upaya-upaya tepat sasaran pada lokasi dengan ketimpangan ekonomi cukup tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian karena meskipun ada daerah-daerah di Kalimantan Selatan yang maju secara ekonomi tetapi masih terdapat daerah-daerah yang relative tertinggal yang memerlukan pemberdayaan ekonomi dan dukungan sarana dan prasarana wilayah, sehingga ketimpangan antar wilayah tidak semakin tidak melebar. Grafik perkembangan indeks Williamson Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 pada Gambar IV.4.



Gambar IV-2 Perkembangan Indeks Williamson Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

4.1.1.2 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Tingkat kemiskinan pada Agustus tahun 2020 sebesar 4.83%. mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 4.47% dan angka ini lebih rendah dari target RPJMD Tahun 2020 yaitu antara 4.03–4.02%. Tingkat



Kemiskinan di seluruh Provinsi Kalimantan berada di bawah rata-rata nasional sebesar 9.78% dan Kalsel merupakan Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah. Namun, walaupun Kalsel memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Tentunya diperlukan pemantapan pelaksanaan program dan kegiatan terkait pengurangan jumlah penduduk miskin agar tingkat kemiskinan dapat diturunkan sesuai dengan target akhir RPJMD tahun 2021.

Gini ratio merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Angka gini ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 (nol) dan 1 (satu). Gini ratio sama dengan 0 (nol) menunjukkan nilai ketimpangan yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan gini ratio sama dengan 1 (satu) menunjukkan nilai ketimpangan yang tinggi (kesenjangan sempurna). Todaro mengklasifikasikan nilai gini ratio sebagai berikut:

- Gini Ratio bernilai $> 0,50$ menandakan kesenjangan tinggi;
- Gini Ratio bernilai $0,3-0,5$ menandakan kesenjangan sedang;
- Gini Ratio bernilai $< 0,3$ menandakan kesenjangan rendah;

Indeks Gini Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2016-2020 menunjukkan tren penurunan (positif). Pada kondisi awal RPJMD Tahun 2015 Indeks Gini sebesar 0,359 dan menurun di Maret 2020 menjadi sebesar 0,332. Selama periode tersebut, rata-rata capaian kinerja terhadap target RPJMD diperoleh predikat penilaian kinerja "Sangat Baik" yaitu sebesar 97,48%. Namun demikian, Indeks Gini Provinsi Kalimantan Selatan selalu lebih rendah dari rata-rata nasional (tahun 2020 sebesar 0,381).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan masyarakat secara horisontal di Provinsi Kalimantan Selatan cenderung lebih merata dibandingkan dengan pendapatan penduduk secara nasional dan menempatkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan terendah ke-12 dari 34 provinsi di Indonesia. Untuk mempertahankan capaian indeks gini tersebut, tentunya diperlukan implementasi kebijakan strategis yang mampu mempertahankan angka gini rasio seperti mendorong pertumbuhan sektor produksi (pertanian dan industri), sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja di sektor

formal dan meningkatkan akses UMKM terhadap kredit usaha yang diberikan oleh bank.

4.1.1.3 Disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Wilayah

Dibandingkan dengan Provinsi lain di pulau Kalimantan pada tahun 2020 nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 70,91 namun masih berada dibawah rata-rata Provinsi se Kalimantan dan Nasional. Jika dilihat secara nasional nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan berada di urutan 21 dari 34 Provinsi sedangkan Nilai IPM tertinggi terdapat di Provinsi DKI. Jakarta dengan nilai 80,77. Sementara itu IPM terendah terdapat di Provinsi Papua dengan nilai 60,44. Salah satu penyebab masih rendahnya IPM di Provinsi Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Upaya peningkatan IPM masih belum berjalan sesuai harapan yang dikarenakan kondisi geografis yang sulit dan permukiman masyarakat yang sporadic, sehingga layanan pendidikan dan kesehatan relative sulit dilakukan. Hal ini nampak pada capaian IPM Kabupaten/ Kota dengan disparitas yang relatif tinggi. Kota Banjarbaru mencapai 79,10 di tahun 2020 yang dibentuk oleh indikator Harapan Lama Sekolah selama 14,81 Tahun, Rata-rata Lama Sekolah selama 10,95 Tahun, Angka Harapan Hidup saat Lahir selama 71,99 Tahun, dan Pengeluaran Per Kapita sebesar 13.675 ribu Rupiah. Dari capaian indikator tersebut, semua indikator berada pada capaian yang terbaik di Kalimantan Selatan kecuali Pengeluaran Per Kapita pada peringkat kedua di Kalimantan Selatan setelah Kota Banjarmasin. Sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai IPM sebesar 65,59 pada tahun 2020, dengan indikator Harapan Lama Sekolah berada pada peringkat 11 dengan angka selama 12,91 Tahun, indikator Rata-rata Lama Sekolah berada pada peringkat 4 dengan angka selama 7,53 Tahun, indikator Angka Harapan Hidup saat Lahir berada pada peringkat 13 dengan angka selama 63,83 Tahun, dan indikator Pengeluaran Per Kapita peringkat 13 dengan angka sebesar 9.527 ribu Rupiah pada tahun 2020 dari 13 Kabupaten/ Kota. Pencapaian IPM di Kalimantan Selatan dihadapkan dengan berbagai permasalahan antara lain akses pelayanan pendidikan dan kesehatan terbatas dan disparitas pembinaan terhadap UMKM.

Selain perbandingan capaian IPM secara regional dan nasional, capaian IPM di Kabupaten/Kota se Kalsel juga terdapat kesenjangan antara capaian tertinggi dan terendah. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 tertinggi di Kalimantan



Selatan yaitu Kota Banjarbaru yaitu 79,10, sementara terendah yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu 65,59. Hanya 3 Kabupaten/Kota yang capaiannya diatas capaian Provinsi yaitu Kota Banjarbaru (79,10), Kota Banjarmasin (77,10) dan Kabupaten Tabalong (72,19).

4.1.1.4 Pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19)

Pandemi COVID-19 telah menyebar ke hampir semua negara di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun demikian waktu penyebaran dan lama pandemi, tingkat gangguan, serta kemampuan negara-negara didunia untuk meresponsnya sangat bervariasi. Negara yang lebih besar dan maju umumnya memiliki sumber daya dan infrastruktur yang lebih lengkap untuk menghadapi pandemi sehingga memberikan kemampuan *recovery* yang lebih cepat. Namun bagi negara-negara sedang berkembang, termasuk negara berkembang ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) memulai pandemi dengan fasilitas infrastruktur kesehatan yang kurang memadai dan hal ini menambah tingkat resiko serta dampaknya terhadap bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Survei yang dilakukan kepada 100 eksekutif ASEAN menunjukkan bahwa 40% responden mempercayai bahwa akan ada serangan kedua virus covid-19 yang berdampak pada pertumbuhan jangka panjang yang lambat serta pemulihan ekonomi dunia yang terjadi perlahan. Pada skenario ini intervensi ekonomi dipercaya akan efektif dalam menopang konsumsi utama tetapi kemungkinan serangan kedua virus covid-19 akan mengarah ke *lockdown* putaran kedua (McKinsey 2020). *Lockdown* putaran kedua ini yang dipercaya akan memperburuk kondisi ekonomi global serta memperlambat upaya pemulihan ekonomi secara global.

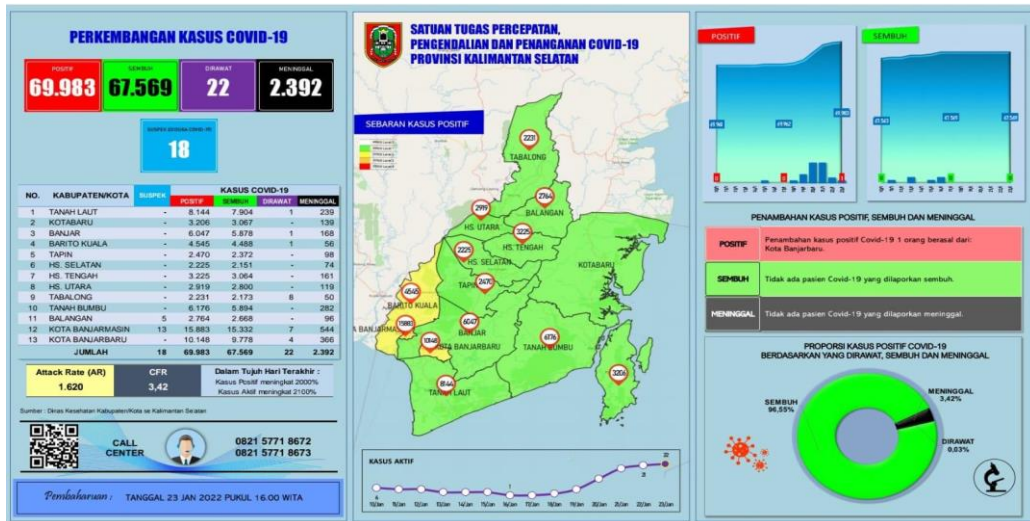
Berdasarkan prediksi berdasarkan skenario tersebut diatas, maka tingkat pertumbuhan ekonomi global akan menjadi minus 11,1% dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan Q4 2019. Beberapa negara berkembang ASEAN diprediksi akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Misalkan, Thailand (-13%), Malaysia (-13,5%), dan Filipina (-13,6%). Sementara itu, perekonomian Indonesia diperkirakan mengalami penurunan sebesar minus 10,3%, sedikit lebih bagus dibanding rata-rata penurunan ekonomi global. Pada akhir 2020 semua Negara ini diprediksi akan mengalami pertumbuhan PDB tahunan yang lebih rendah dibandingkan dengan krisis keuangan global 2008, yaitu minus 11,5% hingga minus 5,3% untuk tahun 2020 dibandingkan dengan minus 2,2% pada 2008 dan menjadi 4,5% pada tahun 2009 (McKinsey 2020 & OECD 2010). Dari sisi perdagangan dunia negara-



negara di Asia juga terdampak sangat parah. Perdagangan intra-Asia diperkirakan turun 13% dari 2019 hingga 2020. Sedangkan perdagangan dari Asia ke Barat turun sekitar 20%.

Keberlangsungan bisnis dan keselamatan karyawan merupakan tantangan utama saat ini. Metode *work from home* atau pekerjaan jarak jauh menjadi metode utama dimasa ini. Hampir semua lini bisnis mengalami perlambatan dalam aktivitas mereka. Dalam dunia pendidikan Institusi pendidikan beralih ke sistem belajar *online* sebagai upaya agar proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun ruang kelas fisik ditutup. Pada sisi lain, dunia usaha dan pemerintah dipaksa untuk memenuhi permintaan di area kritis yang mencakup makanan, persediaan rumah tangga, dan barang medis. Pandemi COVID-19 telah berdampak sangat serius terhadap perekonomian dengan memunculkan krisis ekonomi dan sistem keuangan yang tidak terduga sebelumnya. Di sisi moneter Bank sentral di seluruh dunia menghadapi tantangan likuiditas dan solvabilitas bagi hampir semua sektor industri yang ada di negara masing-masing. Hal ini menjadi fokus bank sentral dan pemerintahan hampir di seluruh dunia agar sistem keuangan masing-masing negara tetap berfungsi dengan baik. Guncangan terhadap mata pencaharian atau ketenagakerjaan sebagai akibat besarnya tenaga kerja yang di PHK bisa menjadi yang terbesar dalam hampir satu abad (Mckinsey Global Institute, 2020).

Tidak terkecuali di Kalimantan Selatan yang menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang juga mengalami pandemi dan masuk pada bulan yang sama yaitu di bulan Maret. Saat ini, sudah hampir 2 tahun baik Indonesia maupun Kalimantan Selatan terus berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi dan pengawasan melalui berbagai peraturan dan kebijakan daerah untuk membatasi kegiatan yang beresiko tinggi terpapar COVID-19. Dengan masalah ini, maka sudah seharusnya isu pandemi masuk pada agenda program RPJMD Tahun 2021-2026 terutama untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan juga strategi dalam urusan kesehatan penduduk di Kalimantan Selatan. Untuk dapat memberikan gambaran isu pandemi saat ini, melalui website corona.kalselprov.go.id per Januari 2022, disebutkan data mengenai kondisi terbaru COVID-19 yang di *update* secara berkala oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut adalah infografisnya :



Gambar IV-3 Perkembangan Data Perkembangan Kasus Konfirmasi, Sembuh dan Meninggal (COVID-19) di Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber : corona.kalselprov.go.id, 23 Januari 2022.

Pada data terbaru yaitu 23 Januari 2022, jumlah kasus positif tertinggi masih terdapat di dua kota besar di Kalimantan Selatan yaitu Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Rentang kasus positif dan sembuh adalah 69.983 orang (positif) dan 67.569 (sembuh) dimana dari angka tersebut dari tahun 2019 (awal pandemi) sampai dengan saat ini sudah ada total 2.392 orang yang meninggal dan sisanya 22 orang masih dirawat. Untuk melihat perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Kalimantan selama 3 tahun terakhir, di bawah ini adalah perbandingannya :

Tabel IV-2 Data Perbandingan Kasus COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan

Periode Waktu	Jumlah Kasus COVID-19 (orang)				
	Suspek	Positif	Sembuh	Dirawat	Meninggal
21 Mei 2020 (periode awal COVID-19 masuk ke Indonesia)	ODP : 938 PDP : 85	424	77	-	56
1 Januari 2021	277	15.399	13.875	938	586
1 Januari 2022	10	69.957	67.553	13	2.391

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

Merujuk pada Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada periode Februari 2021, dilaporkan bahwa Pandemi virus Corona (COVID-19) berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2020. Sejalan dengan dampak perlambatan ekonomi dunia dan nasional akibat kebijakan pembatasan sosial



berskala besar (PSBB) untuk memitigasi penyebaran COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 terkontraksi 1,81%(yoy), lebih rendah dibandingkan 2019 yang tumbuh 4,08%(yoy). Pada triwulan IV 2020, kinerja keuangan pemerintah daerah Kalimantan Selatan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, mengalami penurunan dibandingkan dengan kinerja pada triwulan IV 2019. Hal ini seiring dengan melemahnya pendapatan korporasi ditengah menurunnya aktivitas perekonomian pada masa pandemi. Selain itu juga, terjadi tekanan inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga merupakan dampak dari anjuran untuk melakukan aktivitas *work from home* (wfh) selama pandemi dimana adanya peningkatan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta penyediaan makanan dan minuman/restoran disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap komoditas pangan serta makanan dan minuman siap saji. Disisi lain pada sektor pertambangan, para pengusaha cenderung *wait and see* dengan mengamankan biaya untuk dapat bertahan dalam situasi pandemi. Namun, pada tahun 2021 ini, pandemi COVID-19 diperkirakan secara perlahan dapat dikendalikan didukung oleh program vaksinasi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan secara keseluruhan tahun 2021 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Dari sisi permintaan, peningkatan terutama dipengaruhi oleh perbaikan kinerja konsumsi RT, investasi, dan ekspor. Peningkatan kinerja konsumsi RT sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat seiring peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang berangsur pulih.

4.1.1.5 Struktur Perekonomian Daerah Berkelanjutan Yang Masih Belum Kuat

Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha selama 5 tahun terakhir masih didominasi oleh 5 (lima) lapangan usaha, yaitu pertambangan dan penggalan sebesar 18,29%, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14,39%, industri pengolahan sebesar 13,52%, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,46%, dan konstruksi sebesar 8,26%. Secara total, kelima lapangan usaha tersebut mencapai 64,92%, 12 lapangan usaha lainnya berbagi nilai sebesar 35,08%. Selain itu, upaya transformasi ekonomi dengan menggeser kontribusi sektor pertambangan ke arah sektorsektor antara lain: sektor Pertanian (dalam arti luas), Industri pengolahan, dan Perdagangan, sudah mulai terlihat meskipun belum optimal. Share Sektor Pertambangan tahun 2016 tercatat 20,98% dan turun menjadi 18,29% di tahun 2020. Namun demikian, peningkatan share dari sektor pengganti



lainnya tercatat untuk 5 (lima) besar hanya sektor Perdagangan dari 9,41% menjadi 10,46%, dan Konstruksi dari 7,83% menjadi 8,26%. Share dari sektor unggulan yakni Pertanian (dalam arti luas) dan industri pengolahan masih menunjukkan kinerja yang menurun.

Dominannya sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur perekonomian daerah menjadi salah satu yang membuat struktur ekonomi berkelanjutan masih belum kuat. Pada struktur perekonomian wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB atas dasar harga berlaku turun dari 19,08% di tahun 2019 menjadi 18,29% di tahun 2020. Masih tingginya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian harus menjadi perhatian mengingat sektor tersebut merupakan sektor yang tidak dapat diperbaharui sumber dayanya, sehingga perlu kebijakan riil terkait transformasi struktur ekonomi ke sektor lain seperti Industri, Pertanian dan Pariwisata dalam rangka mempertahankan kinerja perekonomian daerah untuk ke depannya.

Pada sisi pengeluaran, PDRB Kalimantan Selatan masih ditopang dari sektor Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), baik untuk ADHB maupun ADHK. Pada tahun 2020, komposisi PDRB ADHB yakni konsumsi rumah tangga 48,9%, konsumsi non rumah tangga 1,08%, konsumsi pemerintah 12,25%, PMTB 25,04% dan Nett Ekspor-Impor 12,68%. Sedangkan komposisi PDRB ADHK yakni konsumsi rumah tangga 47,31%, konsumsi non rumah tangga 0,95%, konsumsi pemerintah 10,23%, PMTB 22,98% dan Nett Ekspor-Impor 18,48%.

Produk tambang juga masih menjadi primadona dalam perdagangan ke luar negeri (ekspor) dimana pada tahun 2019 mencapai lebih dari US\$ 5,5 milyar dengan volume mencapai hampir 133 juta ton. Meskipun nilai ekspor tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan ekspor produk tambang pada tahun 2018 yang mencapai lebih dari US\$ 6,49 Milyar dengan volume hampir mencapai 132 juta ton, perlu digarisbawahi bahwa ekspolrasi produk pertambangan sebagian meninggalkan degradasi kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Selatan. selain produk tambang, Provinsi Kalimantan Selatan juga masih didominasi ekspor bahan mentah dan setengah jadi seperti karet, sawit, kayu lapis dan lainnya. Oleh karenanya, pemberian ijin pertambangan maupun pengawasan melekat pada setiap perusahaan pertambangan dan penggalian harus menjadi titik tolak pengembangan pembangunan berkelanjutan.



Pengeluaran konsumsi masyarakat yang cukup rendah juga membuat perkembangan perekonomian mikro tidak tumbuh signifikan. Pengeluaran konsumsi masyarakat menunjukkan daya beli masyarakat di suatu wilayah yang mengindikasikan tinggi rendahnya perekonomian mikro dalam pembangunan daerah. Dalam kajian analisisnya, pengeluaran penduduk akan merepresentasikan pendapatan yang diterima dalam sebulan sehingga akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan secara menyeluruh.

Pengeluaran rata-rata per kapita di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum mengalami kenaikan di setiap periodenya yang dikarenakan adanya berbagai hal seperti laju inflasi, peningkatan arus komoditas barang, hingga perubahan gaya hidup masyarakat. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kalimantan Selatan pada tahun 2020 yaitu Rp 12.032.000,- sebagian besar digunakan untuk pengeluaran makanan yaitu sebesar Rp 628.902 rupiah atau 50,30% sedangkan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk non makanan sebesar 621.460 rupiah atau 49,70%. Pengeluaran per Kapita Provinsi Kalsel merupakan peringkat keempat jika dibandingkan Provinsi lain di Kalimantan, dan hanya berada diatas Kalimantan Barat.

4.1.1.6 Sumber Daya Manusia Yang Belum Berdaya Saing

Dalam mengkaji permasalahan pokok sumber daya manusia yang belum berdaya saing, maka dilakukan analisis data dan informasi untuk mempertajam penelaahan atas permasalahan agar perumusan kebijakan pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Capaian pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian indikator indeks pembangunan manusia. IPM di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2014-2020 mengalami tren peningkatan di setiap tahunnya, dimana IPM pada tahun 2020 sudah mencapai 70,72. Meskipun begitu, angka IPM tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 71,94. Selain itu, jika dibandingkan dengan provinsi lain se-regional Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan berada pada peringkat ke-empat di atas Kalimantan Barat (67,66) dan jauh dari peringkat pertama yakni Kalimantan Timur (76,24).

Salah satu permasalahan pembagunan SDM di Provinsi Kalsel yaitu belum optimalnya kualitas pendidikan. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh jenjang pendidikan yang dimiliki baik pendidikan formal maupun informal. Dalam penelaahan permasalahan pendidikan akan menggunakan rata-rata lama sekolah sebagai tolak ukur rata-rata jenjang pendidikan yang diduduki oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan dimana pada tahun 2020 hanya mencapai 8,29 tahun



yang berarti rata-rata penduduk Kalimantan Selatan hanya mengenyam pendidikan sampai bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 8. Angka Rata-rata Lama Sekolah juga menjadi indikator yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga ARLS perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan nilai IPM.

Belum optimalnya kualitas pendidikan juga dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menunjukkan seberapa tinggi atensi masyarakat terhadap pendidikan sesuai usia sekolah pada umumnya. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah maka semakin tinggi pula masyarakat usia sekolah yang mengenyam bangku pendidikan. Namun secara umum, semakin tinggi usia sekolah maka angka partisipasi sekolah juga semakin rendah mengingat makin banyak hambatan dalam mengikuti jenjang pendidikan seperti biaya, cakupan sekolah, hingga masalah sosial lainnya.

Indikator yang mempengaruhi IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) dimana tahun 2019, AHH di Kalimantan Selatan berada pada usia 68,49 tahun dan pada tahun 2020 meningkat hingga mencapai usia 68,66 tahun. Angka tersebut mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2019 akan memiliki peluang hidup hingga usia 68,66 tahun. Meskipun mengalami peningkatan pelayanan kesehatan di setiap tahunnya, namun jika dibandingkan dengan angka harapan hidup se-regional Kalimantan, Kalimantan Selatan berada pada urutan kedua setelah Kalimantan Barat (70,56 tahun). Permasalahan kualitas kesehatan juga dapat dilihat dari masih tingginya angka kematian Ibu dan angka kematian bayi di Kalimantan Selatan.

Kenaikan jumlah penduduk setiap tahun secara otomatis juga meningkatkan kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan dimana pada tahun 2020 mencapai 110 jiwa per km². Dibandingkan dengan Provinsi Lainnya, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki angka kepadatan penduduk yang paling tinggi di seluruh regional Kalimantan. Kalimantan Selatan diprediksikan akan mengalami bonus demografi, dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial-ekonomi. Salah satunya adalah menyebabkan angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif. Jumlah penduduk usia kerja yang semakin meningkat akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu



pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Permasalahan bonus demografi ini harusnya bisa diselesaikan dan dipersiapkan dari sekarang. Pengembangan sumber daya manusia yang merupakan investasi jangka panjang yang menjadi senjata utama kemajuan suatu bangsa. Penduduk berkualitas akan mampu menjawab tantangan bonus demografi yang terjadi di Kalimantan Selatan. Usia produktif sudah mencapai 53,69% atau sebesar 2.186.967 dari total jumlah penduduk Kalimantan Selatan, namun dari jumlah penduduk tersebut terdapat 51,14% yang berkerja yaitu sebesar 2.083.319. Sementara perbaikan pendidikan, kesehatan dan status gizi masyarakat mendorong terjadinya peningkatan harapan usia hidup yang mana penduduk tidak bekerja usia 60 tahun ke atas masih memiliki kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa.

Permasalahan yang sering timbul dalam pembangunan suatu wilayah adalah rendahnya daya saing tenaga kerja sehingga tidak bisa memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada. rendahnya daya saing juga diiringi dengan belum optimalnya keterampilan sumberdaya manusia, dalam menghadapi tantangan kerja kedepan. Rendahnya daya saing tenaga kerja inilah yang akan memberi dampak beruntun pada permasalahan pembangunan berikutnya seperti pendapatan rendah, kemiskinan, hingga pengangguran.

Tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan cukup rendah yakni mencapai 4,31% pada tahun 2019, menurun dibandingkan tahun 2018 di angka 4,50%. Meskipun begitu, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kalimantan Selatan menurun dari 70,27 % menjadi 69,41% di tahun 2019. Rendahnya daya saing tenaga kerja dalam menyongsong Industri 4.0 menjadi permasalahan pembangunan bidang sumber daya manusia yang perlu diperhatikan.

Salah satu indikasi rendahnya daya saing maupun kualitas tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan adalah variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Di Provinsi Kalimantan Selatan, penduduk bekerja hanya memiliki ijazah Sekolah Dasar mencapai 43,03%. Hanya 12,07% dari angkatan kerja yang bekerja yang mengantongi ijazah Perguruan tinggi.

4.1.1.7 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan yang Belum Optimal

Sebagai bagian dari Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Potensi sumber daya tersebut selama ini cukup tinggi dieksploitasi sehingga menyebabkan berbagai kerusakan-kerusakan



lingkungan hidup. Degradasi kualitas lingkungan mulai meningkat secara signifikan dan tentu saja akan berimbas pada kerentanan ekosistem yang berada di dalamnya.

Degradasi lingkungan dapat terjadi akibat pemanfaatan lahan dan masuknya bahan-bahan pencemar berbentuk padat dan cair ke lingkungan yang mana bahan-bahan ini bukan merupakan bagian dari komponen lingkungan asli. Degradasi lingkungan dapat pula terjadi akibat proses eksploitasi terhadap lahan dan tanah, seperti yang terjadi pada proses penambangan timah, emas, batu bara, dan lain sebagainya. Selain itu pembukaan lahan untuk usaha perekonomian mengakibatkan tutupan lahan semakin berkurang. Untuk kawasan pesisir pelestarian tanaman mangrove dan terumbu karang harus terus diupayakan untuk menghindari degradasi yang lebih parah akibat kerusakan lingkungan.

Dari capaian indeks lingkungan hidup menjelaskan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan belum berjalan dengan baik mengingat nilai indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Kalsel masih berada di urutan terbawah se Kalimantan. Berdasarkan rilis dari Kementerian LHK, Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalsel yaitu 68,78 terdiri dari komponen indeks kualitas air (IKA) 75,80, indeks kualitas udara (IKU) 87,75 dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) 49,29 dan menduduki peringkat 25 dari 34 Provinsi.

Dalam perspektif IKLH, Nilai indeks kualitas lingkungan hidup ini merupakan resultan dari upaya menjaga laju deforestasi, pengelolaan sampah dan limbah, upaya rehabilitasi dan pengendalian pencemaran dalam bentuk partisipasi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Angka indeks ini bukan semata-mata peringkat, namun lebih kepada suatu dorongan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Dalam konteks ini para pihak di tingkat provinsi terutama pemerintah provinsi dapat menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal, yaitu 100. Semakin jauh dengan angka 100, mengindikasikan harus semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan. Beberapa potensi yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup tersebut antara lain : industri kima, karet, plastik, makanan dan minuman, pengolahan kayu, tekstil, perkebunan, pertambangan, pertanian, peternakan, limbah padat sarana transportasi, beban limbah cair dari penginapan dan rumah sakit, keterbatasan fasilitas buang air besar, dan timbunan sampah.

Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup Kalimantan Selatan tentunya tidak terlepas dari penurunan kualitas dan kuantitas air sungai. Berdasarkan data Dnas



Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, beberapa sungai yang dilakukan pengamatan sebagian besar terkategori sungai dengan pencemaran ringan, dan beberapa sungai tercemar sedang. Rendahnya indeks lingkungan hidup dibandingkan provinsi tetangga juga terlihat dari potensi bencana yang terjadi di Kalimantan Selatan. Bencana banjir, puting beliung, tanah longsor, bencana kekeringan, kebakaran pemukiman dan kebakaran hutan lahan menjadi catatan kasus di tahun 2019 yang perlu mendapat perhatian untuk perencanaan selanjutnya. Penanganan bencana di Kalimantan Selatan dilaksanakan secara berjenjang yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab utama dan sekaligus pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya. Pada saat kejadian bencana, dukungan bantuan tanggap darurat oleh Pemprov. Kalsel dengan mempertimbangkan: jumlah korban manusia, kerusakan prasarana dan sarana, kerugian harta benda, luas areal terkena bencana dan dampak mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Sepanjang tahun 2018 - 2020, Kalimantan Selatan telah mengalami 73 kali banjir. Jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, banjir melanda 15 kali, tahun 2019 sebanyak 20 kali dan tahun 2020 menjadi 38 kali. Banjir Kalimantan Selatan pada Januari 2021 adalah bencana banjir terbesar yang menimpa beberapa kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan dan banyak menimbulkan kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi dan korban jiwa. Luas genangan diperkirakan mencapai 695.114,65 ha dan tinggi genangan mencapai 0,5 – 5 meter (KLHK, 2021). Kerusakan fisik diperkirakan mencapai 102.340 rumah, 1.418 sekolah dan 847 tempat ibadah, sedangkan kerugian ekonomi diperkirakan sebesar Rp19,2 T. Selanjutnya bencana puting beliung terjadi 129 kasus dengan taksiran kerugian kurang lebih Rp 664.500.000,-. Kebakaran pemukiman terjadi 353 kali dengan jumlah jiwa terdampak 4338 orang atau 1318 KK.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan salah satu indikator penilaian indeks kualitas lingkungan hidup. Hasil review lahan kritis terbaru yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Provinsi Kalsel menyatakan bahwa pada Tahun 2018 ini luas lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan masih mencapai 511.594 Ha, angka ini turun dari data hasil review pada Tahun 2014 yang menyebutkan lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai seluas 640.708 Hektar, dengan rincian di dalam kawasan hutan seluas 283.185,00 Ha (\pm 44,20 %) dan di luar kawasan hutan seluas 357.523,00 Ha (\pm 55,80 %). Selanjutnya pada



Tahun 2019, Dinas Kehutanan mencatat telah terjadi 88 kali kasus kebakaran hutan dengan luasan terdampak 336,31 Ha.

Pembangunan berkelanjutan memang menjadi pokok perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya Provinsi Kalimantan Selatan. Berkenaan dengan itu pula, berikut analisis data dan informasi pembangunan daerah sebagai kajian singkat terkait permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

4.1.1.8 Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Masih Perlu Ditingkatkan

Dalam perwujudan good government di setiap lingkungan pemerintahan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni accountability, transparency, predictability, dan participation. Jika keseluruhan faktor tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan seksama maka sudah dapat dipastikan bahwa pemerintahan daerah akan berjalan pada koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional.

Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan roda pemerintahannya berusaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi setiap penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, terlihat peningkatan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir terkait evaluasi terhadap pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 terealisasi sebesar 68,47 (Kategori B) dari Tahun 2016 dengan nilai sebesar 59,91 (Kategori CC). Beberapa kategori penilaian dalam indeks reformasi birokrasi yaitu Komponen Pengungkit meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sdm, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan public dan Komponen Hasil meliputi akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan public, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan Kinerja organisasi. Beberapa catatan perbaikan antara lain penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkatan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah, meningkatkan penerapan E-Government, mengoptimalkan pengelolaan system manajemen SDM, penguatan pelaksanaan pengendalian internal, optimalisasi implementasi pelayanan public dan pembangunan zona integritas pada seluruh unit kerja yang strategis.



4.1.1.9 Keterbatasan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan

Salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan adalah ketersediaan pembiayaan pembangunan. Kebutuhan pembiayaan pembangunan semakin meningkat seiring dengan proyek-proyek strategis yang dicanangkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain dari percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah memerlukan pendanaan yang cukup untuk mengatasi permasalahan pembangunan seperti kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah. Di sisi lain Pemerintah Daerah dihadapkan pada keterbatasan kemampuan fiskal. Oleh karena itu, pembiayaan daerah perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Dalam arti sempit, upaya pemenuhan pembiayaan pembangunan dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menutup defisit anggaran. Usaha yang dilakukan mulai dari optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah hingga melalui sumber utang. Dalam arti luas pembiayaan pembangunan tidak cukup hanya dari APBD saja, namun juga harus melibatkan aktor lain di luar pemerintah seperti dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha atau melalui penggalan dana-dana CSR. Dari sisi APBD, postur pendapatan dan belanja daerah menunjukkan, Provinsi Kalimantan Selatan masih tergantung transfer dari pusat.

Proporsi transfer Dana Perimbangan pada Pendapatan Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan masih cukup besar, sehingga diperlukan penguatan pembiayaan yang berasal dari potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD ini masih menggunakan instrumen generik seperti pajak dan retribusi. Maka, langkah memperbesar kegiatan investasi dalam komposisi PDRB Provinsi Kalimantan Selatan semakin diperlukan.

4.1.2 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan

4.1.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar

- 1) Pendidikan
 - a. Capaian APK terendah di Kalimantan dan di bawah rata-rata Nasional;
 - b. Capaian APM dan APS berada di peringkat 3 Kalimantan, namun masih di bawah rata-rata Kalimantan dan Nasional.
 - c. Belum optimalnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. Belum adanya pemetaan *link and match* antara sekolah dengan dunia usaha dan industri;



- e. Belum meratanya penyebaran sekolah sesuai dengan penyebaran penduduk.
- 2) Kesehatan
- a. Capaian Angka Harapan Hidup masih di bawah rata-rata nasional.
 - b. Angka Kematian Ibu masih relatif tinggi
 - c. Masih terjadinya kematian bayi dan balita.
 - d. Masih tingginya prevalensi penyakit menular
 - e. Masih tingginya kasus penyakit tidak menular
 - f. Angka Gizi buruk dan prevalensi stunting masih di atas rata-rata nasional.
 - g. Pemenuhan SPM pada pelayanan krisis kesehatan dan penanganan KLB belum berjalan optimal
 - h. Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap dan vaksinasi covid 19 belum optimal.
 - i. Sumber daya manusia kesehatan yang sesuai standar masih rendah.
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Masih adanya jalan dan jembatan kewenangan Provinsi yang belum dalam kondisi mantap dan memenuhi standar (lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton)
 - b. Jaringan jalan belum merata, konektivitas antar kawasan terutama daerah-daerah yang terisolir belum terhubung dengan baik, selain itu aksesibilitas pada kawasan- kawasan yang dianggap strategis daerah belum layak dan terhubung. Sehingga hal ini mengakibatkan tingkat mobilitas antar wilayah terbatas
 - c. Masih rendahnya penyediaan air baku di Kabupaten/Kota karena adanya ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan penyediaan air bersih.
 - d. Belum optimalnya pembangunan, pengembangan, operasi dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi sehingga berpengaruh terhadap belum terpenuhinya kebutuhan air untuk irigasi
 - e. Masih rendahnya pembangunan infrastruktur dalam penanganan potensi abrasi pantai dan bencana banjir yang disebabkan daerah pengaliran sungai yang cukup luas dengan debit yang cukup besar
 - f. Belum terpenuhinya akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman ke seluruh masyarakat di Kalimantan Selatan



- g. Belum optimalnya pelayanan sistem air minum dan persampahan regional di Kalimantan Selatan sebagai pendukung akses pelayanan infrastruktur daerah secara regional.
 - h. Masih kurangnya penataan bangunan gedung dan lingkungan di kawasan perkotaan dan kawasan strategis daerah Provinsi Kalimantan Selatan
 - i. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi yang ditandai masih rendahnya SDM bersertifikat secara professional.
 - j. Belum optimalnya keselarasan perencanaan penataan ruang antar stakeholder yang diakibatkan kurangnya koordinasi, sinkronisasi serta system pendataan dan informasi.
 - k. Masih diperlukan penyusunan rencana kawasan strategis provinsi yang aplikatif didukung dengan pemanfaatan dan pengendalian untuk mendukung kesesuaian dan keselarasan penataan ruang.
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Ketimpangan antara kebutuhan dengan ketersediaan rumah (Backlog Rumah) yang masih tinggi
 - b. Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan penanganan rumah di daerah rawan bencana dan program pemerintah yang belum optimal
 - c. Masih luasnya kawasan permukiman kumuh di Kalimantan Selatan sehingga perlunya penanganan kawasan permukiman kumuh pada kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru.
 - d. Pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang tidak memenuhi standar, berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan permukiman
 - e. Kurangnya kolaborasi antar SKPD terkait dalam penanganan masalah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan di permukiman yang layak
 - f. Rendahnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak.
- 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
- a. Masih tingginya pelanggaran K3;
 - b. Lambatnya pelayanan tindak lanjut (respon time rate) dari pengaduan masyarakat;



- c. Masih tingginya indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) di Kalimantan Selatan;
 - d. Masih rendahnya kapasitas penanganan risiko bencana;
 - e. Rendahnya literasi masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- 6) Sosial
- a. Kurangnya sinergitas dan koordinasi dari berbagai pihak untuk menangani kompleksitas permasalahan PPKS.
 - b. Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana baik dalam penampungan maupun perawatan dan rehabilitasi medik, untuk SPM pelayanan PPKS dalam panti.
 - c. Penanganan rehabilitasi sosial belum maksimal;
 - d. Peningkatan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum maksimal.
 - e. Penanganan bencana masih belum optimal
 - f. Updating Data Kemiskinan belum optimal

4.1.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1) Tenaga kerja
- a. Ketidakseimbangan antara penyediaan lapangan pekerjaan dengan kebutuhan masyarakat terhadap lapangan kerja sehingga jumlah penganggur relatif besar;
 - b. Lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan keahlian sumber daya manusia yang ada;
 - c. Wirausaha baru kurang berkembang dan belum adanya tempat atau wadah sebagai sarana penampung hasil produk kewirausahaan;
 - d. Rendahnya kualitas angkatan kerja yang ditandai oleh tingkat pendidikan formal angkatan kerja provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh tamatan (maksimal) sekolah dasar, termasuk di dalamnya mereka yang belum tamat dan tidak pernah sekolah;
 - e. Rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang hingga saat ini pada umumnya dirasakan masih jauh dari memadai;
 - f. Sarana dan prasarana belum mendukung untuk melaksanakan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan jaman maupun teknologi;
 - g. Dengan adanya revolusi industri 4.0 maka dapat tercipta pengangguran yang dipengaruhi oleh melebarnya ketimpangan ekonomi karena peran digitalisasi dapat menggeser peran konvensional dalam pasar;



- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
 - a. Pengarusutamaan Gender belum berjalan optimal;
 - b. Belum optimalnya pelayanan perlindungan perempuan;
 - c. Belum optimalnya upaya perlindungan anak;
 - d. Masih tingginya kasus perkawinan anak;
- 3) Pangan
 - a. Laju peningkatan kebutuhan pangan lebih cepat dibandingkan dengan laju kemampuan produksinya;
 - b. Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan. khususnya di wilayah-wilayah terpencil;
 - c. Terbatasnya kemampuan dalam mengantisipasi dinamika permasalahan ketahanan pangan;
- 4) Pertanahan
 - a. Masih rendahnya jumlah lahan bersertifikat, sehingga penanganan masalah pertanahan membutuhkan peningkatan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
 - b. Masih minimnya data layanan untuk urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi
 - c. Masih lambatnya proses penyelesaian pembebasan dan kasus pertanahan;
- 5) Lingkungan Hidup
 - a. Kualitas Air Sungai yang Rendah
 - b. Pengelolaan persampahan dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3);
 - c. Luas Lahan Kritis yang berpotensi terus meningkat
 - d. Potensi keanekaragaman hayati belum terkelola secara optimal
 - e. Potensi kerusakan ekosistem gambut, mangrove dan terumbu karang diwilayah pesisir
 - f. Perubahan Iklim
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. belum maksimalnya cakupan akta kematian;
 - b. belum maksimalnya cakupan akta perkawinan.
 - c. belum maksimalnya cakupan akta kelahiran;



- d. Masih terdapat penduduk usia dewasa yang belum memiliki KTP;
 - e. Masih tingginya pasangan pernikahan yang tidak memiliki akte nikah;
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Belum optimalnya pengelolaan lembaga ekonomi perdesaan (Manajemen Usaha);
 - b. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
 - c. Masih terdapat desa dengan status desa tertinggal dan sangat tertinggal;
 - d. Rendahnya indeks desa membangun.
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Belum maksimalnya Penerapan Grand Desain Pembangunan Kependudukan;
 - b. Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang belum ber KB;
 - c. Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang putus ber KB;
 - d. Masih banyak ditemukan usia kawin pertama di bawah rata-rata usia ideal (usia ≤ 21 tahun) pada Pasangan Usia Subur (PUS), sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.
 - e. Kurangnya pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program kependudukan keluarga berencana yang ditujukan pada program pembangunan keluarga (KKBPK) untuk disesuaikan dengan program lini bawah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk.
- 9) Perhubungan
- a. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan jalan; belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antar kota, perkotaan dan perdesaan. Hal tersebut juga dikarenakan masih kurang optimalnya penerapan peraturan sistem transportasi dan manajemen lalu lintas.
 - b. Belum optimalnya sarana dan prasarana angkutan masal (bus rapit transit) untuk mengurangi kepadatan lalu lintas angkutan jalan dan pelayanan jasa transportasi daerah perkotaan.
 - c. Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi.
 - d. Masih tingginya jumlah fatalitas kecelakaan akibat dari kurangnya disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelayakan armada, ketiadaan rambu



dan fasilitas keselamatan di jalan, serta rendahnya law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas.

- e. Belum berkembangnya transportasi laut dan sungai yang representatif yang digunakan untuk perlintasan regional, nasional maupun internasional yang dapat digunakan untuk pengembangan transportasi orang maupun barang. Diperlukan dukungan investasi baik dari pemerintah maupun swasta untuk pengembangan serta sarana dan prasarana transportasi laut dan sungai baik regional maupun internasional
- f. Belum adanya Pembangunan transportasi perkeretaapian di Kalimantan Selatan sebagai pendukung perekonomian sebagai Pintu gerbang Ibu Kota Negara
- g. Belum optimalnya pelayanan jaringan penerbangan Bandar Udara Syamsudin Noor dan bandara lainnya di Kalimantan Selatan dalam melayani penerbangan komersial dari dan ke Kalimantan Selatan.
- h. Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan kebisingan) akibat dominannya pengguna lalu lintas kendaraan pribadi di jalan

10) Komunikasi dan Informatika

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana telekomunikasi;
- b. Belum maksimalnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- c. Belum maksimalnya penyediaan informasi dan komunikasi public oleh pemerintah daerah.
- d. Terbatasnya infrastruktur akses internet dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang menghubungkan antar SKPD.
- e. Penerapan berbagi pakai data di SKPD belum maksimal
- f. Masih terdapat area blankspot di Kalimantan Selatan

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro

- a. Masih rendah kualitas kinerja kelembagaan Koperasi;
- b. Masih banyaknya koperasi tidak aktif;
- c. Belum optimalnya kinerja pelayanan kepada masyarakat dari aparatur Koperasi;
- d. Lemahnya akses bagi KUKM pada sumber daya produktif (pembiayaan dan penjaminan);
- e. Lemahnya daya saing sumber daya manusia pada KUKM;



- f. Rendahnya daya saing produk UKM dalam menghadapi pasar domestik dan global;
- g. UMKM menurun dikarena dampak pandemi covid-19 yang melanda dunia, terkhusus di Indonesia;

12) Penanaman Modal

- a. Kinerja realisasi investasi PMA/PMDN tidak tercapai terkendala akibat covid 19 sehingga banyak perusahaan yang menunda realisasi investasinya
- b. Kurangnya Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN;
- c. Belum optimalnya Promosi Investasi yang berkelanjutan;
- d. Belum adanya Matchmaking dalam rangka kemitraan dunia usaha;

13) Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki masih jauh dari ketentuan yang seharusnya;
- b. Pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi masih belum bisa dilakukan secara maksimal;
- c. SDM dengan kompetensi dan pengalaman profesional bidang kepemudaan masih sangat terbatas;
- d. Masih banyak organisasi pemuda yang pasif;
- e. Masih sedikitnya Wirausaha muda;
- f. Masih kurangnya kegiatan – kegiatan olahraga yang melibatkan peran serta masyarakat secara massal guna membudayakan olahraga di Kalimantan selatan.
- g. Masih kurangnya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

14) Statistik

- a. Masih rendahnya SDM Perstatistikan;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana urusan statistik;
- c. Belum Optimalnya pengelolaan statistik sectoral;

15) Persandian

- a. Sarana prasarana pendukung persandian masih terbatas;
- b. SDM penyelenggara persandian tidak memiliki kompetensi sandi;

16) Kebudayaan

- a. Belum optimalnya penggalian potensi unsur budaya;
- b. Belum optimalnya pengembangan unsur budaya;
- c. Belum optimalnya aktualisasi unsur budaya;



- d. Sarana dan prasarana seni budaya masih kurang;
- e. Kurang produktifnya pelaku seni budaya daerah dalam berkarya
- f. Belum maksimalnya publikasi dan promosi Kebudayaan;
- g. Kurang optimalnya pembinaan terhadap lembaga budaya daerah

17) Perpustakaan

- a. Belum optimalnya perpustakaan digital;
- b. Rendahnya minat masyarakat Kalimantan Selatan untuk melakukan aktivitas membaca
- c. Masih Kurangnya Koleksi Bahan Pustaka yang terbaru untuk Layanan Umum, Referensi, Deposit, Layanan Anak, Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS).
- d. Belum optimalnya kegiatan pembinaan perpustakaan dan promosi perpustakaan.

18) Kearsipan

- a. Depo arsip belum berjalan optimal;
- b. Kurangnya pemahaman ASN terhadap kearsipan;
- c. Belum lengkapnya regulasi daerah tentang pengelolaan arsip.
- d. Belum terlaksananya pengelolaan kearsipan secara handal dan komprehensif berbasis TIK
- e. Rendahnya komitmen pencipta Kearsipan skala Provinsi dalam menerapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) KeKearsipan.

4.1.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Pariwisata

- a. Mapping destinasi belum dilakukan (inventarisasi dan sarana prasarana dimiliki) yang hasil akhirnya adalah penyusunan pola perjalanan dengan berbagai pilihan: wisata budaya, wisata belanja, wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, agro dan ekowisata
- b. Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) belum menyatu Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait.
- c. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dunia pariwisata dan dibandingkan kecepatan pemilik modal menginvestasikan modal dalam industri pariwisata



- d. Keterbatasan dana dan fokus kabupaten/kota dalam mengembangkan objek-objek wisatanya menjadi objek.
- e. Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata yang berkualitas masih belum memadai

2) Pertanian

- a. Belum optimalnya produksi tanaman pangan dan hortikultura
- b. Belum optimalnya kelembagaan penyuluhan dan petani
- c. Menurunnya daya dukung sumber daya lahan dan air, serta Dampak Perubahan Iklim
- d. Belum optimalnya prasarana dan sarana pertanian
- e. Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian
- f. Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi pasar
- g. Masih rendahnya perlindungan terhadap petani dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani yang berbasis korporasi petani
- h. Sistem perbenihan tanaman pangan dan hortikultura masih belum tertata dengan baik
- i. Pembangunan Perkebunan Ramah Lingkungan masih kurang efektif
- j. Belum optimalnya Integrasi Sawit – Sapi
- k. Belum optimalnya pengembangan Kawasan perkebunan/peternakan berbasis korporasi pekebun/peternak
- l. Pematangan ternak sapi betina produktif cukup tinggi
- m. Pengeluaran Ternak dan Hasil Ternak Keluar Kalimantan Selatan Cukup Banyak namun belum memberikan kontribusi yang memadai terhadap PAD.
- n. Penyakit Hewan yang mempengaruhi pembangunan peternakan
- o. Harga Pakan dan Bahan Pakan Ternak Unggas Cenderung Meningkat
- p. Jaminan Keamanan Pangan yang ASUH masih rendah

3) Kehutanan

- a. Masih rendahnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
- b. Masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan bencana kabut asap dan kerusakan lahan
- c. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan berbasis Perhutanan Sosial
- d. Masih rendahnya penerimaan sektor kehutanan untuk mendukung penerimaan daerah



4) Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Menurunnya cadangan air tanah akibat pengambilan air tanah yang berlebihan atau tidak sesuai kemampuan daya dukung air tanah.
- b. Kurangnya pengelolaan terhadap bukaan lahan bekas tambang.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan untuk peningkatan porsi bauran energi.
- d. Kurangnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah terpencil.

5) Perdagangan

- a. Berlaku peraturan tentang larangan ekspor produk tambang menuntut adanya pergerakan investasi secara cepat dalam rangka hilirisasi produk – produk hasil tambang ;
- b. Maraknya barang beredar di pasaran yang belum memenuhi ketentuan standar dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen terutama produk elektronik dan mainan anak;
- c. Peningkatan penggunaan dan cinta produk dalam negeri dalam rangka memanfaatkan jumlah penduduk Indonesia sebagai potensi pasar yang besar ;
- d. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia khususnya Kalimantan Selatan yang berdampak signifikan terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi yang belum ada kepastian kapan akan berakhirnya ;
- e. Masih terjadinya perang dagang antara Amerika dan Cina yang mengakibatkan penurunan produk ekspor Indonesia dan ini sudah barang tentu pasti berimbas kepada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan ;
- f. Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai 31 Desember 2015 menyebabkan terjadinya beberapa deregulasi perdagangan luar negeri terutama menyangkut pembebasan bea masuk untuk barang – barang dari ASEAN selain itu di dalam 2015 terjadi deregulasi beberapa barang ekspor yang merupakan produk unggulan ekspor Kalimantan Selatan seperti batu bara, produk hasil hutan dan produk minyak sawit (CPO);

6) Perindustrian

- a. Pemasaran yang terbatas.
- b. Lemahnya struktur industri.
- c. Terbatasnya IKM yang memiliki izin usaha industri.



- d. Masih rendahnya kualitas SDM industri.
 - e. Belum tersedianya lahan clear dan clean untuk sentra IKM dan kawasan industri yang mendukung penumbuhan dan pengembangan industri.
 - f. Belum tersedianya data dan informasi industri yang memadai (valid dan up to date) untuk menarik investasi dan pengembangan industri.
 - g. Lambatnya investasi di sektor hilir industri.
 - h. Belum optimalnya pemanfaatan SDA lokal menjadi produk unggulan.
 - i. Masih rendahnya produktivitas industri.
 - j. Kurangnya jumlah wirausaha industri.
- 7) Kelautan dan Perikanan
- a. Belum optimalnya Pengembangan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
 - b. Belum dimanfaatkannya secara optimal potensi sumber daya ikan di laut di wilayah > 5 mil laut.
 - c. Terbatasnya pembangunan dan pengembangan prasarana perikanan tangkap di titik sentra penangkapan ikan nelayan, khususnya dalam rangka mendukung penerapan sistem rantai dingin terhadap hasil tangkapan nelayan
 - d. Belum berkembangnya kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan yang mandiri dan berbadan hukum
 - e. Masih terbatasnya upaya pelestarian terhadap stock sumber daya ikan lokal, sehingga perlu adanya upaya pelepasliaran (restocking) di perairan umum
 - f. Pada umumnya usaha pembudidaya ikan masih menerapkan sistem tradisional dan/atau sistem semi-intensif
 - g. Masih besarnya ketergantungan pembudidaya ikan terhadap pakan ikan pabrikan yang menyebabkan tingginya biaya produksi budidaya ikan hingga 60 % khusus untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan
 - h. Belum berkembangnya pengembangan usaha budidaya ikan lokal sebagai komoditas perikanan khas daerah
 - i. Pada umumnya para pembudidaya ikan masih belum memahami tentang ketentuan dan penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
 - j. Masih terjadinya serangan hama dan penyakit ikan/udang di kawasan sentra pembudidayaan ikan
 - k. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan



- l. Kesulitan pada akses permodalan usaha merupakan salah satu faktor yang membuat UMKM sektor kelautan dan perikanan terbatas pengembangannya dalam upaya peningkatan produktifitas dan kesejahteraannya
 - m. Masih terbatasnya penyebarluasan informasi tentang potensi. peluang usaha. dan pengembangan investasi sektor kelautan dan perikanan.
 - n. Masih terbatasnya penyebarluasan informasi dan penguatan edukasi kepada masyarakat tentang ikan dan manfaatnya bagi kesehatan. kekuatan. dan kecerdasan
 - o. Masih terjadinya kegiatan illegal fishing di perairan umum maupun perairan laut di Kalimantan Selatan
 - p. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki POKMASWAS dan aparat pengawas dalam mendukung pelaksanaan operasional pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan di lapangan
- 8) Transmigrasi
- a. Terbatasnya lahan yang memenuhi kriteria *Clear and Clean* (2C) dan Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang (3L)
 - b. Rendahnya aspek legalitas dalam status kepemilikan lahan transmigrasi
 - c. Kurang optimalnya kerjasama dengan daerah penerima peserta transmigrasi
 - d. Belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi Kurangnya koordinasi dengan skpd lain dalam hal peningkatan pemberdayaan transmigrasi.

4.1.2.4 Urusan Penunjang Pemerintahan

- 1) Perencanaan
 - a. Capaian kinerja sasaran dan program prioritas daerah belum sepenuhnya berbasis data;
 - b. Hasil monitoring dan evaluasi masih belum optimal dan belum sepenuhnya menjadi acuan dalam perencanaan berikutnya;
 - c. Hasil kajian belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan pembangunan daerah;
 - d. Belum optimalnya kerjasama daerah dalam pencapaian prioritas pembangunan daerah.
- 2) Keuangan



- a. Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum maksimal;
 - b. Data potensi pendapatan belum valid;
 - c. Belum optimalnya tata kelola potensi pendapatan;
 - d. Kepatuhan wajib pajak masih rendah;
- 3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- a. Kebutuhan ASN belum terpenuhi secara kuantitatif;
 - b. Belum optimalnya pengelolaan ASN;
 - c. Data ASN belum terintegrasi secara nasional;
 - d. Merit sistem masih belum optimal
- 4) Pengawasan
- a. Terjadinya temuan-temuan yang sifatnya berulang dan rutinitas;
 - b. Belum optimalnya pengelolaan resiko di lingkup SKPD;
 - c. Kurang optimalnya implementasi SAKIP di jajaran SKPD;
 - d. Masih kurangnya kapasitas APIP;
 - e. Jumlah dan kualitas SDM auditor dan pengawas masih kurang;
 - f. Kurang efektifnya koordinasi antara APIP dan APH.
- 5) Sekretariat Daerah
- a. Kuantitas dan kualitas SDM belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi lingkup SETDA;
 - b. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SETDA;
 - c. Belum optimalnya koordinasi lintas sector dalam menjawab permasalahan pembangunan daerah.
 - d. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah
- 6) Sekretariat Dewan
- a. Belum optimalnya pelayanan pada DPRD
- 7) Kesbangpolinmas
- a. Masih rendahnya pemahaman ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - b. Masih rendahnya pembinaan dan pengembangan ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi;
 - c. Rendahnya partisipasi politik masyarakat;
 - d. Masih kurangnya pemberdayaan dan pengawasan ormas.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada saat saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan.

Penentuan isu strategis Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

4.2.1.1 Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) yang belum tercapai. Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG'S, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) diTahun 2016-2030 antara lain:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- 3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;



- 7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- 8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
- 11) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- 12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
- 16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.2.1.2 Kesadaran Aksi Global terkait Climate Action (Aksi Iklim)

Konferensi Tingkat Tinggi Aksi Iklim (climate action) oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tahun 2019 telah berhasil menyepakati roadmap untuk pijakan aksi bersama. Roadmap ini berfungsi sebagai pedoman dalam mendorong negara-negara dan stake holders lainnya untuk berbuat lebih banyak sejak roadmap disepakati. Kesadaran global akan aksi iklim ini lahir dari kenyataan bahwa tanpa akselerasi upaya perbaikan kondisi lingkungan secara bersama sama maka dunia berisiko tidak mampu menghindari perubahan iklim yang tak terkendali dengan konsekuensi bencana bagi manusia dan semua sistem alam yang menopang keberlanjutan hidup umat manusia.



Informasi terbaru menyatakan bahwa iklim saat ini berpotensi menyebabkan suhu akan naik lebih dari 3 derajat di abad ini, hal tersebut merupakan kondisi yang sangat berbahaya bagi dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu akselerasi dalam perbaikan lingkungan adalah suatu hal yang wajib dilakukan secara global. Meskipun upaya pengurangan emisi global telah mulai dilakukan sejak satu dekade terakhir tetapi hasil yang diharapkan masih belum optimal. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh PBB, masih terjadi kesenjangan emisi yang signifikan antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang dicapai. Bila ingin mencapai target 2030 maka mulai saat ini perlu mengurangi emisi sebesar 7,6% setiap tahun selama 10 tahun kedepan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat (unfoundation.org, 2020).

Sesuai roadmap terbaru yang telah disepakati oleh PBB, maka sangat diharapkan mulai tahun 2020 secara global harus mulai terjadi proses dekarbonisasi dimana salah satu sumber utama dari emisi karbon berasal dari aktivitas ekonomi. Hal ini merupakan tantangan utama dalam aksi iklim ini, mengingat selalu ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dengan besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Perlindungan terhadap ekosistem merupakan salah satu alternatif upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh semua negara, serta upaya untuk lebih beradaptasi untuk masa depan terkait pola hidup rendah emisi.

Berdasarkan roadmap tersebut semua negara diharapkan mengurangi lebih banyak emisi berdasarkan Perjanjian Paris. Semua negara diharapkan berpartisipasi aktif dalam aksi ini, dan terutama negara ekonomi terkemuka yang tergabung dalam G20 (Group of Twenty). Indonesia yang tergabung dalam negara-negara G20 dipastikan akan menjadi bagian dari negara-negara utama yang diharapkan berperan lebih aktif dalam aksi iklim ini.

Terkait hal tersebut maka Provinsi Kalimantan Selatan harus mengambil peran yang penting dalam menjalankan aksi iklim tersebut. Hal ini perlu dilakukan, mengingat Provinsi Kalimantan Selatan adalah berbatasan dan merupakan penyangga calon Ibukota Negara Baru di Panajam Paser Utama yang nanti sangat berpengaruh pada pengendalian pengurangan emisi karbon sebagian besar terkait dengan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu upaya Provinsi Kalimantan Selatan dalam ikut aktif menyukseskan aksi pelaksanaan aksi iklim bagi Indonesia perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyusun perencanaan pembangunan ke depan.

4.2.1.3 Revolusi Industri 4.0

Saat ini dunia sedang berada dalam permulaan era revolusi industri ke 4 atau yang dikenal dengan revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 didefinisikan sebagai perubahan yang revolusioner berbasiskan berbagai teknologi terkini, dimana salah satu teknologi terkini yang sangat menonjol penerapannya saat ini adalah teknologi informatika.

Oleh karena itu revolusi industri 4.0 bisa diartikan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika teknologi informasi diterapkan pada semua Industri. Didalam revolusi industri ini yang terjadi adalah proses otomatisasi berkelanjutan dari praktik manufaktur dan industri tradisional dengan menggunakan teknologi pintar (smart) modern.

Penggunaan teknologi informasi memungkinkan terjadinya komunikasi mesin ke mesin (M2M) dalam skala besar dan aplikasi internet of things (IoT) yang terintegrasi untuk meningkatkan otomatisasi, meningkatkan komunikasi dan proses monitoring otomatis (self monitoring), serta produksi mesin pintar yang dapat menganalisis dan mendiagnosis masalah tanpa perlu campur tangan manusia (Moore,2019).

Istilah Revolusi Industri Ke-empat pertama kali dikenalkan oleh Klaus Schwab (2015), ketua eksekutif World Economic Forum, dalam artikel yang diterbitkan oleh Foreign Affairs dengan judul "Menguasai Revolusi Industri Ke empat". Topik tersebut kemudian menjadi tema pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia tahun 2016, di Davos-Klosters, Swiss. Di mana selanjutnya pada 10 Oktober 2016, Forum Ekonomi Dunia mengumumkan pembukaan pusat revolusi industri ke-4 di San Francisco.

Menurut Schwab (2015) dalam revolusi industry ke-4 ini ditandai dengan penggabungan antara; perangkat keras, perangkat lunak, dan biologi (sistem fisik siber). Selain itu terjadi kemajuan yang signifikan dalam komunikasi dan konektivitas. Secara umum era ini ditandai dengan terobosan dalam teknologi baru di bidang-bidang seperti robotika, kecerdasan buatan, nanoteknologi, komputasi kuantum, bioteknologi, internet of things, industry internet of things, desentralisasi konsensus, teknologi nirkabel generasi kelima, percetakan 3 dimensi (3D), dan kendaraan otonom penuh (fully autonomous vehicles).

Terdapat empat prinsip desain yang diidentifikasi sebagai bagian integral dari revolusi industri 4.0, yaitu; Pertama, "interkoneksi" yang menunjukkan kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk terhubung dan berkomunikasi satu



sama lain melalui Internet of things (IoT), atau internet of people (IoP). Kedua, “transparansi informasi” di mana transparansi yang diberikan oleh teknologi Industri 4.0 memberi operator informasi yang komprehensif untuk menginformasikan keputusan.

Inter-konektivitas yang memungkinkan operator untuk mengumpulkan data dan informasi dalam jumlah besar dari semua titik dalam proses manufaktur, mengidentifikasi area utama yang dapat mengambil manfaat dari perbaikan untuk meningkatkan fungsionalitas. Ketiga adalah “asistensi teknis” yang berupa fasilitas teknologi dalam bentuk sistem untuk membantu manusia dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, serta kemampuan untuk membantu manusia dengan tugas-tugas yang sulit atau tidak aman/berbahaya. Dan, terakhir adalah “keputusan terdesentralisasi” yang merupakan kemampuan system fisik dunia maya untuk membuat keputusan sendiri dan untuk melakukan tugas mereka seotonom mungkin (Gronau et all, 2016).

Revolusi Industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perubahan yang tidak pernah ada pada dalam sejarah revolusi industry sebelumnya. Revolusi Industri 4.0 memiliki kecepatan eksponensial, yaitu bergerak sedemikian dengan kelipatan yang luar biasa sehingga memiliki efek “disruption” industri disetiap negara pada keseluruhan sistem. Disruption ini terjadi secara meluas, mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, sampai penataan kota, konstruksi, pelayanan kesehatan, pendidikan, kompetisi bisnis dan juga hubungan-hubungan sosial. Pada bidang ekonomi pengaruh disruption ini sangat jelas terlihat. Bidang pekerjaan baru bermunculan dan sebagian pekerjaan lama berangsur hilang. Banyak pekerjaan biasanya dilakukan oleh tenaga manusia mulai digantikan oleh tenaga mesin atau robot, yang berakibat kepada hilangnya sumber penghidupan manusia pada bidang-bidang tersebut. Akan tetapi disisi lain memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya. Pada saat ini sudah mulai bermunculan pekerjaan baru seperti; data miner, analis big data, ilmuwan kecerdasan buatan (artificial intelligence), cyber security, application designer, gene designer, dan lain-lain.

Pada bidang organisasi dan institusi publik, disruption ini memaksa bidang tersebut untuk memikirkan ulang dan beradaptasi terkait bagaimana seharusnya mereka beroperasi di era ini. Pada masa revolusi industri sebelumnya, seorang pengambil keputusan baik pada pemerintahan maupun organisasi bisnis dan social memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dan menganalisa sebuah masalah



yang muncul dan memutuskan respon yang diperlukan. Hal tersebut tidak berlaku lagi untuk era revolusi industri 4.0. Dalam era ini respon serta pengambilan keputusan harus cepat, sehingga perlu memiliki integrasi data, kemampuan analisa big data dan perlu bantuan dari kecerdasan buatan.

Pada bidang sosial kemasyarakatan revolusi industri 4.0 memunculkan beberapa fenomena baru yang perlu diantisipasi agar tidak membawa efek negatif. Revolusi industri 4.0 mengharuskan masyarakat mampu untuk menyerap, menampung dan menerima modernitas baru tetapi disisi lain, tetap bisa mengamalkan kepercayaan dan nilai-nilai luhur yang mereka percayai. Hal ini berdampak pada munculnya kegalauan tersendiri bagimasyarakat/komunitas tertentu. Fenomena lain yang muncul dalam era ini sebagai dampak dari proses digitalisasi adalah “me-centered emergency” (berfokus dan mementingkan diri sendiri) dalam masyarakat. Secara lebih luas dampak dari revolusi industri terlihat pada perubahan tingkah laku, pola komunikasi dan sosialisasi, pola belajar, privasi, kepemilikan, konsumsi, waktu bekerja, waktu istirahat, gaya hidup, dan sebagainya.

Bila disikapi dengan positif maka era ini sebenarnya membawa harapan, peluang dan juga tantangan. Peluang terbesar secara makro ekonomi adalah proses otomatisasi dan digitalisasi berpeluang meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi salah satu tantangan terbesar dari sisi makro ekonomi terkait dengan masalah ketenagakerjaan, terutama karena akan hilangnya berbagai jenis pekerjaan tradisional karena digantikan dengan sistem, aplikasi dan mesin/robot. Hal ini tentunya harus mulai dipikirkan dan diantisipasi agar mampu meredam dampak negatif yang timbul.

4.2.1.4 Kesenjangan Global dalam Pembangunan Manusia (Global Inequality Human Development)

Perubahan paradigma dan pemahaman mengenai kesenjangan dalam pembangunan manusia (human development) merupakan salah satu hal utama yang ditekankan dalam laporan “Human Development Report 2019” oleh PBB. Lebih lanjut lagi diperlukan perspektif yang lebih menyeluruh dan luas terkait pemahaman kesenjangan dalam pembangunan manusia. Kesenjangan diharapkan tidak lagi dilihat hanya sebagai indikator yang hanya memiliki dimensi tunggal. Kerangka pikir terbaru dalam melihat kesenjangan mengharuskan pemangku kepentingan melihat kesenjangan. Pertama, lebih dari sekedar melihat kesenjangan pendapatan



(ekonomi) sebagai indikator utama. Kedua, kesenjangan arus dilihat lebih dari hanya sekedar angka jauh tidaknya dari nilai rata-rata kondisi umum. Sedangkan ketiga, kesenjangan tidak bias dilihat dari sudut pandang static yang didasari kondisi saat ini, tetapi harus mulai dilihat dengan sudut pandang dinamik, utamanya dampak perubahan-perubahan yang terjadi dimasa depan dan pengaruhnya terhadap upaya penanganan kesenjangan (Human Developmentc Reports,2020).

Pemahaman yang tepat terkait masalah kesenjangan akan sangat membantu kemajuan yang diterima sebagai hasil dari proses pembangunan. Laporan terakhir dari PBB menunjukkan bahwa, secara global, kemajuan pembangunan manusia terhambat sebesar hampir 20% sebagai akibat berbagai kesenjangan yang ada. Kesenjangan tersebut antara lain; pelayanan pendidikan yang tidak merata, pelayanan kesehatan yang tidak merata, serta kesenjangan dalam kualitas standar hidup. Selain itu laporan tersebut juga memprediksi bahwa dengan cara penanganan kesenjangan seperti saat ini maka setidaknya diperlukan waktu 100 tahun agar terwujud kesetaraan gender.

Secara umum, setidaknya hingga 2018, dampak kesenjangan di Indonesia terhadap berkurangnya nilai Human Development Index (HDI) masih lebih baik bila dibanding dengan rata-rata dunia. Akan tetapi bila dilihat dari tren jangka panjang terlihat bahwa tren yang terjadi di Indonesia dalam satu dekade terakhir relatif stagnan sedangkan tren dunia mengalami penurunan. Selain itu dikawasan Asia timur dan Pasifik, secara rata-rata, terlihat tren yang terus menurun dengan signifikan dan bahkan sejak tahun 2017 mampu menunjukkan hasil yang lebih baik dari pada kondisi di Indonesia. Dalam konteks persaingan global tentunya hal ini perlu mendapat perhatian serius bagi pemerintah Indonesia dan khususnya daerah-daerah di Indonesia yang berencana untuk bersaing secara global dan menjadi bagian dalam perekonomian global seperti Provinsi Kalimantan Selatan.

4.2.1.5 Menipisnya cadangan mineral dunia

Pada era pembangunan sekarang ini mineral sangat dibutuhkan dalam setiap pembangunan seperti emas, tembaga, timah, batubara, bijih besi, dan sebagainya. Mineral ini merupakan supporting bahan dalam pembangunan sehingga dengan banyaknya pembangunan yang sedang berlangsung di semua Negara, kebutuhan mineral akan semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya antisipasi terhadap perkembangan perekonomian tanpa mengindahkan kualitas



lingkungan hidup menjadi pembangunan berkelanjutan yang tidak menghilangkan etika pembangunan kualitas lingkungan.

Keberlanjutan sumber energi di masa depan semakin menipis, selain khawatir akan kapasitasnya yang semakin berkurang, masyarakat dunia juga khawatir akan isu global warming yang diakibatkan oleh hasil pembakaran energi fosil sehingga membuat lapisan ozon semakin tipis. Indonesia sendiri masih sangat tergantung dengan pasokan energi yang berasal dari energi fosil untuk digunakan sebagai bahan bakar minyak (BBM).

Selama kurun waktu waktu dari 2017 sampai 2020, Provinsi Kalimantan Selatan telah berupaya melaksanakan pengendalian produksi batu bara melalui penetapan kuota produksi di Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan pengendalian laju penjualan melalui sistem kuota penjualan, yang dievaluasi per 2 (dua) bulan. Evaluasi pengendalian penjualan dilaksanakan melalui ketentuan IUP OP PMDN yang telah memiliki persetujuan RKAB, penempatan Jaminan Reklamasi, ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, ketersediaan Kepala Teknik Tambang, Pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO), dan Pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Terkait strategi DMO, seiring terbatasnya peran dan kewenangan urusan pertambangan di Pemerintah Provinsi, kebijakan evaluasi dan pengendalian oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan melalui Keputusan Menteri ESDM 13.K/HK.021/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batubara Ke Luar Negeri dan Pengenaan Denda Serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri.

Namun demikian, tingginya konsumsi BBM di Indonesia yang cukup memprihatinkan, diperlukan adanya pembaharuan dalam menyikapi krisis energi dengan penggunaan energi alternatif. Energi alternatif ini sangat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan kondisi geografis Indonesia yang beriklim tropis dan kesuburan tanah yang berpotensi. Sumber energi alternatif dapat berasal dari sampah yang kita hasilkan baik organik maupun anorganik serta berasal dari sumber energi terbarukan seperti biomassa, matahari, angin, dan sebagainya. Diharapkan ke depannya, Indonesia memiliki sumber energi yang akan mencukupi kebutuhan energi dalam negeri tanpa khawatir dengan peningkatan pemanasan global.



4.2.1.6 Ancaman Krisis Ekonomi Global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang nantinya akan berdampak pada perekonomian beberapa Negara termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Negara Indonesia karena Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam pertemuan para pemimpin 20 negara di Los Cabos, Meksiko, memaparkan bahwa sejak 2008, negara-negara industri Barat dihempaskan oleh krisis ekonomi. Dalam menghadapi resesi global, seperti halnya program penanggulangan krisis ekonomi tidak banyak memberikan harapan. Negara Amerika Serikat sebagai Negara Adidaya belum sepenuhnya dapat keluar dari krisis ekonomi, termasuk negara-negara zona euro.

Ancaman ini bermula dari tingginya tumpukan hutang baik oleh rakyat maupun negaranya sehingga berimbas pada krisis ekonomi. Begitu juga Indonesia yang memiliki cukup banyak hutang, dikhawatirkan akan terjadi krisis yang sebentar lagi menghempaskan perekonomian Negara Indonesia. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (Failed States Index) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Negara Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (in danger). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi sebuah negara, dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (Failed States).

Dalam menghadapi perekonomian global, Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar terempat di dunia juga harus memperhatikan perang dagang antara China dengan Amerika Serikat yang telah di mulai sejak Maret 2018. Pada tahun tersebut Amerika Serikat mulai menetapkan tarif dan hambatan perdagangan lainnya untuk produk-produk dari China yang masuk ke Amerika Serikat. Amerika Serikat merasa China melakukan "praktik perdagangan yang tidak adil". Amerika menuduh China melakukan pencurian kekayaan intelektual dan pemindahan paksa teknologi Amerika ke China. Sebagai akibat dari praktik perdagangan yang tidak adil bagi Amerika Serikat adalah meningkatnya defisit neraca perdagangan Amerika Serikat. Defisit neraca perdagangan Amerika Serikat terhadap China sebenarnya telah berlangsung lama, akan tetapi dalam 10 tahun terakhir semakin memburuk.

Perang dagang antara AS dengan China ini mengancam perekonomian secara global, bukan hanya hubungan antara dua negara tersebut, Akibat

pemotongan perdagangan AS-China, pertumbuhan ekonomi global bisa diperkirakan akan turun.

Belajar dari pengalaman sejarah, ketegangan antar dua Negara adidaya ini sangat perlu tetap diwaspadai dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan strategis Indonesia di Indonesia. Hal ini mengingatkan bahwa baik Amerika Serikat maupun China adalah dua partner dagang Indonesia yang selama ini cukup penting. Baik Ekspor dan Impor Indonesia dari kedua negara tersebut selama ini cukup besar, oleh karena itu apapun yang terjadi di kedua negara tersebut, khususnya secara ekonomi, akan berdampak langsung dengan perekonomian di Indonesia.

4.2.2 Isu Kebijakan Nasional

4.2.2.1 Penelaahan RPJMN Tahun 2020-2024

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam Pembangunan Tahun 2020-2024 beserta isu strategisnya sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
 - a. Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan makin berkurang. SDA tidak hanya menjadi sumber

bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga menjadi sumber devisa.

b. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi

Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam.

c. Transformasi Struktural Berjalan Lambat

Setelah era reformasi pada tahun 1998, Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia terus turun dari sebelumnya mencapai 6,0% pada periode 1990- 2000 hingga mencapai rata-rata sekitar 5,0% pada periode 2000-2015. Kondisi ini disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang tidak bagus, kualitas investasi rendah dimana proporsi PMDN masih lebih rendah dibandingkan dengan PMA, peningkatan kualitas UMKM belum optimal.

d. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga dianggap kurang.

2) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Tantangan pembangunan berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2021-2025 adalah mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan luar Jawa meningkatkan keterpaduan antar-provinsi dalam satu pulau dan antar-pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya dan sarana dan prasarana.

3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing

a. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan

Jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut harus dimanfaatkan agar Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi. Apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan. Dalam pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial masih banyak terkendala dengan keserasian



pendataan penduduk. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun demikian, masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK.

b. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk

Belum semua penduduk miskin dan rentan memperoleh jaminan perlindungan sosial.

c. Pemenuhan Layanan Dasar

Belum semua penduduk mendapatkan layanan dasar sesuai standar. Hal ini dapat dilihat dari derajat kesehatan yang belum optimal, kematian ibu, stunting masih ditemukan di Indonesia. Belum semua penduduk mendapatkan layanan pendidikan.

d. Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan mereka dalam setiap sektor pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.

e. Pengentasan Kemiskinan

Dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat.

f. Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing

Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan.

4) Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa



- a. Melemahnya ketahanan budaya bangsa;
 - b. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia;
 - c. Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti;
 - d. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama;
 - e. Belum kukuhnya kerukunan umat beragama;
 - f. Rendahnya budaya literasi;
 - g. Belum optimalnya peran keluarga.
- 5) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi & Pelayanan Dasar
- a. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau. Masih terbatas ketersediaan perumahan yang layak, masih kurangnya sanitasi dan air minum yang layak;
 - b. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih Terbatas;
 - c. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur;
 - d. Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
 - e. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi;
 - f. Konektivitas Transportasi Jalan;
 - g. Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, kualitas jalan dan fasilitas transformasi digital.
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, & Perubahan Iklim
- a. Belum tercapainya indeks kualitas lingkungan hidup;
 - b. Ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
- a. Regulasi yang disharmoni inkonsisten tumpang tindih multitafsir;
 - b. Pemberantasan korupsi belum optimal;
 - c. Indeks profesionalisme ASN;
 - d. Kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintah;
 - e. Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal, efektif dan berintegritas;
 - f. Pelayanan publik yang berkualitas dengan berorientasi pada perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan.



Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas yang dimiliki Negara Indonesia yang terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia sehingga memiliki posisi geografis yang strategis. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki Pulau Kalimantan menjadikan pulau Kalimantan memiliki posisi yang strategis baik pada koridor nasional, regional ASEAN, hingga global atau internasional. Dalam koridor nasional, wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai pengeksportor batu bara di beberapa Negara ASEAN dan juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perkebunan sawit pada level nasional maupun ASEAN. Sedangkan pada level internasional, selain sebagai paru-paru dunia juga Kalimantan merupakan salah satu penghasil sumber daya mineral yang tinggi sebagai sumber energi kehidupan manusia saat ini. Isu Strategis pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan secara umum adalah:

- 1) Peran Wilayah Pulau Kalimantan sebagai paru- paru dunia terancam dengan tingginya ancaman kerusakan hutan;
- 2) Potensi bencana tinggi, khususnya bencana ebakaran hutan dan lahan, serta banjir, yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya kesiapsiagaan, mitigasi dan adaptasi yang komprehensif;
- 3) Penguatan peran daerah perbatasan sebagai pintu beranda negara belum optimal;
- 4) Menurunnya penerimaan daerah akibat ketergantungan yang tinggi pada komoditas mentah sehingga perekonomian Kalimantan rentan terhadap pergerakan harga komoditas di pasar global;
- 5) Infrastruktur dan layanan dasar untuk kesehatan dan produktivitas yang masih terbatas serta penerapan SPM yang masih perlu ditingkatkan;
- 6) Tata kelola dan kelembagaan pengelolaan kawasan metropolitan serta kerjasama antar daerah yang belum optimal;
- 7) Konektivitas intra-wilayah belum memadai;
- 8) Pengembangan industri berbasis sumberdaya alam belum optimal;
- 9) Ketahanan fisik dan sosial kota masih rentan atas perubahan iklim, bencana dan polusi, dan juga rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan

Arah kebijakan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan secara umum diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan, diversifikasi, dan pelestarian alam. Pengembangan wilayah bertumpu pada pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan dari sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), PKS, kawasan transmigrasi, kawasan



pertambangan minyak bumi, gas bumi dan batubara, serta sentra produksi perikanan di SKPT. Selanjutnya, pengolahan sumber daya alam berupa kelapa sawit, kayu, alumunium, dan bauksit, yang difokuskan pada Kawasan Industri (KI) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Outlet untuk komoditas mentah maupun barang olahan di Pulau Kalimantan diarahkan di pelabuhan hub Pontianak.

Selain pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam, dikembangkan juga kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata, yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), serta Wilayah Metropolitan dan Kota Baru sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan. Secara rinci, strategi pembangunan Pulau Kalimantan adalah sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan peran sebagai lumbung energi nasional;
- 2) Mengembangkan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang;
- 3) Memperkuat peran kawasan perdesaan prioritas nasional agar menjamin basis produksi untuk hilirisasi industri;
- 4) Revitalisasi kawasan transmigrasi
- 5) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara
- 6) Menjaga kawasan dengan fungsi pelestarian lingkungan dan ekologis;
- 7) Menjamin pemenuhan konektivitas, infrastruktur pelayanan dasar pada wilayah metropolitan, kota dan perkotaan;
- 8) Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah untuk mempercepat penerapan SPM, meningkatkan kerjasama antara daerah dan meningkatkan PAD;
- 9) Mengarusutamakan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang diarahkan kepada peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural serta adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
- 10) Pembangunan Ibu Kota Negara sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional yang terintegrasi dengan wilayah sekitarnya; dan
- 11) Pembangunan desa terpadu yang mencakup pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa; transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran badan usaha milik desa; perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam hal pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa; penguatan pendamping

desa dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; serta penetapan batas desa.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan lingkungan, pembangunan Wilayah juga dilakukan dengan memperhatikan kaidah pembangunan rendah karbon:

- 1) Mengoptimalkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air;
- 2) Mengkonservasi hutan primer dan habitat spesies kunci;
- 3) Mengembangkan energi baru terbarukan;
- 4) Mengoptimalkan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
- 5) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi massal;
- 6) Menegakkan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

4.2.2.2 Kebijakan Pemerintah Tentang Penanganan Dampak COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi)

Sejak awal tahun 2020 tepatnya pada bulan Maret, Indonesia dihebohkan oleh salah satu fenomena yaitu pandemi Covid-19. Sampai dengan bulan Agustus 2020, total kasus di Indonesia 165.887 dengan 7.169 kematian di 34 provinsi. Telah diberlakukan berbagai macam kebijakan oleh Pemerintah Indonesia dalam merespon pandemi COVID-19 ini. Salah satu kebijakannya yaitu pada awal bulan Maret 2020 telah diberlakukannya *social distancing* dan *physical distancing* bagi masyarakat Indonesia (Hadiwardoyo, 2020). Kebijakan tersebut meliputi Instruksi Menteri Dalam Negeri No 31 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Kalimantan hingga Permenkes No. 10 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin, dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19.

Pada hampir semua negara, upaya menangani pandemi COVID-19 sedang berlangsung. Sejumlah besar intervensi kesehatan masyarakat telah diterapkan. Pada banyak negara, diberlakukan sistem perawatan kesehatan seperti dalam kondisi perang, seperti untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur, persediaan, dan pekerja terlatih. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pasokan medis yang sangat dibutuhkan. Perang melawan COVID-19 adalah hal yang harus



dimenangkan terlebih dahulu saat ini jika kita ingin merencanakan arah yang tepat secara ekonomi dan sosial menuju kondisi normal baru. Kondisi normal baru adalah realitas baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah tercapai kondisi normal baru maka dipastikan akan terjadi restrukturisasi dramatis terhadap tatanan ekonomi dan sosial.

Pemerintah setempat selalu berupaya untuk tetap memberikan proteksi melalui kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), tingkat pemberian tes antigen dan PCR serta program vaksinasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat bertahan dalam situasi pandemi global. Maka, di dalam RPJMD ini akan sangat disarankan untuk dapat memiliki program-program dan arah pembangunan yang berkaitan dengan penanganan dan pemulihan bencana pandemi COVID-19 yang telah ada di Kalimantan Selatan sejak tahun 2020 lalu.

Menghadapi tantangan pandemi global tersebut, ketahanan merupakan kebutuhan vital. Masalah jangka pendek pengelolaan kas untuk likuiditas dan solvabilitas jelas merupakan hal yang terpenting. Tetapi segera setelah itu, bisnis perlu bertindak berdasarkan rencana ketahanan yang lebih luas karena guncangan mulai meningkatkan struktur industri yang sudah mapan, mengatur ulang posisi kompetitif selamanya. Sebagian besar penduduk akan mengalami ketidakpastian dan tekanan keuangan pribadi. Pimpinan sektor publik, swasta, dan sosial perlu membuat keputusan "melalui siklus" yang sulit yang menyeimbangkan keberlanjutan ekonomi dan sosial, mengingat kohesi sosial sudah berada dibawah tekanan berat dari populisme dan tantangan lain yang ada sebelum virus korona.

Ketika memasuki era normal baru maka tantangan pertama adalah mengembalikan bisnis ke operasional setelah penghentian atau penurunan drastis dalam operasi mereka, dan ini tidak mudah. Pengalaman dari negara-negara yang telah *recovery* dan memasuki normal baru lebih awal, seperti China, menunjukkan bahwa banyak rantai pasokan input (*supply chain*) yang belum sepenuhnya siap melayani kebutuhan industri. Selain itu perlu waktu bagi pekerja dan karyawan untuk mencapai tingkat produktivitas tenaga kerja sebelumnya. Pada konteks ini peran pemerintah pada masing-masing Negara sangat penting untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Bagi negara berkembang seperti Indonesia permasalahan terkait upaya *recovery* pada dunia usaha menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Selain keterbatasan sumber daya dan dana bagi intervensi juga besarnya ketergantungan impor terhadap barang modal dan bahan baku industri.



Kondisi dimana masih banyak rantai pasokan (*supply chain*) dari pihak luar negeri yang belum *recovery* sepenuhnya tentu perlu dipikirkan dengan baik cara mengatasinya agar industri dalam negeri bisa segera berangsur-angsur beroperasi dengan normal dan penyerapan tenaga kerja kembali normal. Meskipun demikian, negara-negara di Asia Tenggara masih memiliki beberapa potensi bagi percepatan *recovery* ekonomi mereka. Menurut studi yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute (2020), setidaknya terdapat lima sektor yang sangat berpotensi, yaitu; (1) Sebagai pusat manufaktur; (2) Infrastruktur hijau; (3) investasi dalam sektor digital; (4) Pelatihan ulang bakat, dan (5) Industri makanan bernilai tinggi. Potensi ini bila mampu dimanfaatkan dengan baik, maka tidak hanya dapat mempercepat pemulihan ekonomi di negara-negara ini tetapi juga meletakkan dasar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan bagi negara-negara berkembang di ASEAN setelah era normal baru.

4.2.2.3 Undang-Undang Pemindahan Ibukota Negara

Dalam rangka mengurangi dampak ekonomi dan penurunan kualitas lingkungan akibat padatnya penduduk di Pulau Jawa dan DKI Jakarta, Indonesia kini menanggulangnya dengan cara memindahkan Ibu kota Negara baru di luar Pulau Jawa, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Alasannya adalah karena resiko bencana yang minim, kawasan tersebut juga dinilai cukup strategis diantara kota-kota yang berkembang, yakni kota Balikpapan, Samarinda dan Banjarmasin. Dalam rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ini, diproyeksikan dapat menumbuhkan berbagai sektor di wilayah Pulau Kalimantan khususnya dan Wilayah Tengah dan Selatan Kalimantan.

Pemindahan IKN juga akan berpengaruh terhadap inflasi hanya saja karena proyek ini dilakukan secara bertahap maka dampak yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan. Untuk dampak yang akan terjadi pada pertumbuhan ekonomi, tergantung dari tahapan perencanaan. Apabila perencanaan yang dilakukan benar-benar matang, efek pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat tumbuh dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam kajian yang telah dilakukan pemindahan ibukota mampu meningkatkan perekonomian 0,1-0,2% karena adanya dorongan investasi baru.

Pemindahan IKN yang tengah direncanakan oleh pemerintah ternyata memiliki dampak ekonomi pada daerah baru tersebut. Pemindahan ibu kota ke lokasi baru ke Kalimantan diharapkan dapat memberikan efek positif karena adanya penggunaan dari sumber daya potensial yang selama ini masih belum termanfaatkan serta



diprediksi akan meningkatkan perekonomian daerah di wilayah Kalimantan menjadi +0,1%.

Pemindahan IKN akan menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan dan indikasi ketimpangan akan menyempit. Pemindahan IKN ke wilayah Kalimantan akan menyebabkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan baik ditingkat regional maupun ditingkat nasional.

Hasil kajian terhadap penyediaan dan penyebaran tenaga kerja yang berkecimpung dalam pembangunan proyek perpindahan IKN, bahwa 56% merupakan penduduk asal Pulau Jawa. Penduduk Kalimantan menyumbang sekitar 8% dari jumlah proyek.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur ini membutuhkan dukungan logistik kepada IKN dari wilayah sekitarnya termasuk Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga memerlukan persiapan penyangga pangan baru, antarlain melalui Sistem Klaster Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan dengan menggunakan teknologi pertanian modern.

Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan juga diharapkan akan berperan sebagai *hinterland* pemasok kebutuhan logistik pangan kepada IKN di Kalimantan Timur, salah satu produk pertanian yang sangat penting adalah perkebunan dan hortikultura. Alasannya adalah bahwa Kalimantan Selatan memiliki kekayaan buah, sayur mayur, rempah-rempah yang melimpah serta perikanan (ikan gabus) dan peternakan (daging ayam ras, telur ayam ras).

Diharapkan dengan mulai berjalannya roda pemerintahan di IKN baru nantinya, **tidak melakukan impor pangan dari wilayah lain di luar Pulau Kalimantan** dan kebutuhan pangan dapat diproduksi masyarakat Kalimantan Selatan sendiri, sehingga, ibu kota negara baru akan menuju kemandirian pangan.

Untuk menyediakan kebutuhan logistik kepada IKN diperlukan persiapan penggunaan dan pemanfaatan ruang untuk kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan dengan menggunakan teknologi pertanian modern serta menyiapkan sumberdaya manusia yang unggul untuk menopang kebutuhan tenaga kerja di IKN.

Dukungan transportasi konektivitas terhadap distribusi logistik menuju IKN di Kalimantan Timur dari wilayah sekitarnya termasuk dari Kalimantan Selatan

merupakan faktor yang harus dipersiapkan dalam mendorong Ibukota Negara sebagai pusat pemerintahan melalui Pemaduan Jaringan Prasarana, Layanan, dan Pelayanan Transportasi Antarmoda, dengan indikator kinerja transportasi yang terukur dari kawasan penyangga menuju IKN yang pada akhirnya akan mengembangkan ekonomi wilayah.



Gambar IV-4 Dukungan transportasi konektivitas terhadap distribusi logistik

Konektivitas IKN dalam konteks regional, nasional dan global internasional juga perlu dipersiapkan melalui pengembangan transportasi antarmoda yang terintegrasi, dalam rangka mendukung pergerakan distribusi logistik manusia, barang dan jasa.

Konektivitas IKN



Gambar IV-5 Konektivitas IKN

4.2.2.4 Proyek Strategis Nasional di Kalimantan Selatan

Proyek Strategis Nasional (disingkat PSN) adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. PSN diatur melalui Peraturan Presiden, sementara pelaksanaan proyeknya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha serta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri. Landasan hukum Proyek Strategis Nasional adalah Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yang berturut-turut diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2018, Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021, Proyek Strategi Nasional yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kawasan Industri Jorong (PSN Sektor Kawasan Industri) dan Bendungan Tapin (PSN Sektor Bendungan dan Irigasi). Provinsi Kalimantan Selatan juga mendukung Program Pengembangan Wilayah melalui Percepatan Pembangunan Kawasan metropolitan Banjarmasin, serta mendukung Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate) yang akan dibangun di Kalimantan Tengah.

Selanjutnya sesuai dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, ditetapkan 41 Proyek Prioritas Strategis. Provinsi Kalimantan Selatan mendukung beberapa proyek strategis sebagai berikut:

Tabel IV-3 Daftar Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024 terkait dengan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
1	Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang, Denpasar, Banjarmasin dan Makassar	Meningkatnya share PDRB Wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap nasional Meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota di dalam Wilayah Metropolitan	Rp 222,92 Triliun (APBN, APBD, KPBU, Swasta)	Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Kominfo, Kementerian ESDM, Kemendagri, BPS, BUMN, Swasta, Pemda



No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
2	Ibu Kota Negara (IKN)	<p>Memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah NKRI</p> <p>Mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia untuk pemerataan wilayah</p> <p>Estimasi peningkatan Real GDP Nasional sebesar 0,1% - 0,2% dan Output Multiplier 2,3;</p> <p>Peningkatan Kesempatan Kerja (Employment Multiplier 2,9);</p> <p>Penurunan Kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Kenaikan Price of capital 0,23% dan Kenaikan Price of Labour 1,37%)</p> <p>Mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris ke Indonesia-sentris</p> <p>Ketersediaan lahan yang luas dapat membangun ibu kota baru dengan kawasan hijau yang lebih dominan dari wilayah terbangun</p> <p>Mengurangi beban Pulau Jawa dan Jabodetabek</p>	<p>Rp 466,98 Triliun</p> <ul style="list-style-type: none"> • APBN: 91,29 • KPBU: 252,46 • Badan Usaha: 123,23 	<p>KemenPPN/Bappenas</p> <p>KemenATR/BPN</p> <p>KemenPUPR</p> <p>Badan Usaha (BUMN/ Swasta)</p>
3	Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2219 Km)	<p>Tersambungnya jaringan pipa gas bumi wilayah Kalimantan (Trans Kalimantan)</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan gas bumi di sektor industri, pembangkit listrik, hingga kebutuhan jaringan gas rumah tangga dan komersial di Kalimantan</p> <p>Mendukung penyediaan energi untuk calon ibukota negara</p> <p>Meningkatnya pemanfaatan potensi gas bumi di wilayah Natuna</p>	<p>Rp 36,4 Triliun (Badan Usaha)</p>	<p>KemenESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)</p>
4	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	<p>Meningkatkan kapasitas jumlah limbah B3 medis yang terolah hingga mencapai 26.880 ton/tahun</p>	<p>Rp 4,6 Triliun</p> <p>APBN: Rp 0,6 T</p> <p>KPBU: Rp 3,0 T</p> <p>Swasta: Rp 1,0 T</p>	<p>Kemen LHK, Kemenkes, Badan Usaha</p>

4.2.3 Isu Kebijakan Lainnya

4.2.3.1 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalsel

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalsel menggambarkan tingkat ketercapaian SDG's Kalimantan Selatan, sesuai yang diamanahkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang KLHS. Secara umum strategi terhadap capaian TPB untuk masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:

- Indikator yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional (Kategori A)
- Indikator yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional atau termasuk kategori B adalah mendorong pencapaian indikator tersebut agar dapat mencapai target nasional.
- Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (kategori C)
- Indikator yang belum memiliki data dan ada target yang ditetapkan secara nasional (kategori D)

Identifikasi isu strategis dalam dokumen KLHS dijabarkan berdasarkan pilar-pilar yaitu Pilar Sosial (meliputi TPB 1, TPB 2, TPB 3, TPB 4, TPB 5), Pilar Ekonomi (meliputi TPB 7, TPB 8, TPB 9, TPB 10 dan TPB 17), Pilar Lingkungan (meliputi TPB 11, TPB 12, TPB 14, TPB 15) dan Pilar Hukum dan Tata Kelola (meliputi TPB 16).

Provinsi
KALIMANTAN
SELATAN
Tahun
2021 - 2026

Tabel IV-4 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Pada Pilar Sosial

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis berdasarkan analisis capaian TPB	Kode Indikator	Kategori Capaian	Isu Strategis terkait DDDT Lingkungan Hidup dan Keuangan Daerah	Wilayah Prioritas
Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan Perkotaan dan kemiskinan pedesaan (<i>rural poverty</i>) dalam Segala Bentuk Di manapun	1. Belum optimalnya penanganan penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas, termasuk tuna wisma	1.3.1.(c)	B	-	Kabupaten Banjar, Barito Kuala dan Tabalong
	2. Belum terpenuhinya target SPM rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	1.4.1.(d)	B	Pasokan air bersih	Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala dan Tapin
	3. Belum terpenuhinya target SPM rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	1.4.1.(e)	B	Pencemaran tanah dan air	Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala dan Tapin
	4. Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat	1.4.1.(i)	B	-	Kabupaten Banjar, Kotabaru dan Tapin
	5. Masih minimnya pendampingan psikososial korban bencana sosial.	1.5.1.(c)	C	-	Wilayah terparah yang terdampak banjir



TPB Pilar Sosial	Isu Strategis berdasarkan analisis capaian TPB	Kode Indikator	Kategori Capaian	Isu Strategis terkait DDDT Lingkungan Hidup dan Keuangan Daerah	Wilayah Prioritas
Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	1. Masih adanya prevelensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak/balita di bawah usia 5 tahun di Provinsi Kalimantan	2.2.1*	A	Ketersediaan pangan	Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala dan Tapin
	2. Kurangnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan dan tingkat konsumsi ikan	2.2.2.(c)	B	Produktivitas dan daya dukung pangan semakin menurun	Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala dan Tapin
Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	1. Belum tercapainya target nasional persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	3.1.2 (a)	B	-	Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu dan Tapin (dilihat dr data Angka Kematian Ibu (AKI))
	2. Belum tercapainya target nasional persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	3.2.2.(b)	B	-	-
	3. Masih tingginya kasus malaria di Provinsi Kalimantan Selatan dengan angka kejadian per 1.000 orang penduduk	3.3.3*	B	Genangan air (outbreak banjir)	Kabupaten Tapin, Barito Kuala dan Banjarbaru
	4. Prevalensi tekanan darah tinggi.	3.4.1.(b)	B	-	-
	5. Prevalensi obesitas penduduk usia ≥ 18 thn	3.4.1.(c)	B	-	-
	6. Prevalensi penyalahgunaan narkoba	3.5.1.(e)	B	-	-
	7. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	3.7.1.(b)	B	-	-



TPB Pilar Sosial	Isu Strategis berdasarkan analisis capaian TPB	Kode Indikator	Kategori Capaian	Isu Strategis terkait DDDT Lingkungan Hidup dan Keuangan Daerah	Wilayah Prioritas
	8. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR).	3.7.2*	D	-	-
	9. Total Fertility Rate (TFR).	3.7.2.(a)	D	-	-
	10. Cakupan Asuransi Kesehatan Masyarakat	3.8.2*	A	-	-
	11. Belum meratanya kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan di setiap kabupaten/kota	3.c.1*	A	-	Kabupaten Tapin, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	1. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Sederajat	4.1.1.(f)	B	-	Kabupaten Tapin, Kotabaru dan Kota Banjarmasin
	2. Masih rendahnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥15 tahun.	4.1.1.(g)	B	-	Kabupaten Barito Kuala, Banjar dan Kotabaru
	3. Belum seimbang proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baik	4.4.1*	A	-	-
	4. Masih kurangnya proporsi sekolah terhadap akses sarana dan prasarana pendukung	4.a.1*	A	Daya dukung lahan perkotaan	-
Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan	1. Kurangnya jumlah peraturan kebijakan yang responsif terhadap isu gender dan mendukung pemberdayaan perempuan	5.1.1*	B	-	-



TPB Pilar Sosial	Isu Strategis berdasarkan analisis capaian TPB	Kode Indikator	Kategori Capaian	Isu Strategis terkait DDDT Lingkungan Hidup dan Keuangan Daerah	Wilayah Prioritas
	2. Meningkatnya kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) terhadap perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun)	5.2.2*	B	-	-
	3. Masih tingginya proporsi perempuan umur 20-24 tahun yg berstatus kawin sebelum umur 15 tahun & sebelum umur 18 tahun.	5.3.1*	B	-	-
	4. Unmeet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	5.6.1.(a)	B	-	-
	5. Belum meratanya proporsi kursi yang di duduki perempuan di parlemen daerah (provinsi dan kabupaten/kota)	5.5.1*	A	-	-

Tabel IV-5 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Pada Pilar Ekonomi

TPB Pilar Ekonomi	Isu Strategis Berdasarkan Analisis Capaian TPB	Kategori Capaian	Indikator TPB	Isu Strategis Terkait DDDT Lingkungan Hidup Dan Keu. Daerah	Lokasi Prioritas
Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	1. Bauran energi terbarukan.	A	7.2.1*	<ul style="list-style-type: none"> - DD untuk tanaman penghasil energi hijau (paparan GGIF) - DD untuk batubara - DD air PLTA Hidro 	- Kawasan Industri Batulicin, Seradang, Tapin, Jorong, Mantuil, dan KEK Mekar Putih
	2. Pemanfaatan bahan baku nabati dan energi hijau untuk industri	B			- Kawasan Pertanian khususnya di Rawa Batang Banyu, kawasan LP2B, Kota Baru, Tanah Bumbu - Hutan Produksi di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjar, HSU, HST, HSS, Balangan, dan Tabalong



TPB Pilar Ekonomi	Isu Strategis Berdasarkan Analisis Capaian TPB	Kategori Capaian	Indikator TPB	Isu Strategis Terkait DDDT Lingkungan Hidup Dan Keu. Daerah	Lokasi Prioritas
	3. Pemanfaatan teknologi batubara bersih	D			- Seluruh kawasan pertambangan PKP2B, IUP, dan PMA di Kalimantan Selatan
Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Menurunnya laju pertumbuhan PDRB per kapita	B	8.1.1*	DD untuk pertambangan DD untuk pertanian -> lahan	Kawasan peruntukan industri ekstraktif dan non ekstraktif, Optimalisasi ekonomi berbasis digital, Kawasan potensi pariwisata
	Masih tingginya persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	B	8.6.1*		
	Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.	B	8.9.1.(a)		
	Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	B	8.9.1.(b)		
	Belum dikembangkannya potensi pariwisata berbasis konservasi	B		DD hutan dan DD perairan	Geopark Meratus
	Belum dikembangkannya potensi pariwisata berbasis digital	B		DD risiko bencana	Geopark Meratus,
	Pencapaian target proporsi kredit UMKM terhadap total kredit belum optimal	B	8.10.1. (b)		Kawasan perkotaan Banjarbakula
	Belum meningkatnya Peran kawasan metropolitan Banjarbakula sebagai mesin pertumbuhan ekonomi wilayah	B	8.1.1	DD lahan	Kawasan perkotaan Banjarbakula
	Belum berkembangnya ekonomi berbasis konservasi geologi dan bahari	B	8.9.1 8.9.1.c		



TPB Pilar Ekonomi	Isu Strategis Berdasarkan Analisis Capaian TPB	Kategori Capaian	Indikator TPB	Isu Strategis Terkait DDDT Lingkungan Hidup Dan Keu. Daerah	Lokasi Prioritas
	Belum meningkatnya kualitas generasi milenial	B	8.6.1		
	Belum banyaknya masyarakat petani, nelayan dan budi daya ikan tawar yang bekerja mandiri		8.3.1 b		
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	1. Belum mantapnya fasilitas penyeberangan	B	9.1.2.b		
	2. Rendahnya Daya Saing Industri Menengah terutama hilirisasi industri	B	9.2.1		
	3. Belum optimalnya penurunan emisi CO2 / Emisi Gas Rumah Kaca.	B	9.4.1		Seluruh kota/kabupaten
	4. Belum berkembangnya hilirisasi industri	B	9.3.1*		Kawasan Industri Batulicin, Seradang, Tapin, Jorong, Mantuil, dan KEK Mekar Putih
	5. Penerapan industri hijau yang belum menyeluruh	B	9.4.1*		
Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara	1. Masih adanya desa tertinggal.	D	10.1.1.c	-	
	2. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	B	10.4.1.b		
Tujuan 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	1. Belum optimalnya penerimaan dari sektor pajak daerah	B	17.1.1	-	
	Minimnya akses broadband ke kabupaten/kota	B	17.6.2.b		
	3. Masih banyaknya penduduk yang belum terlayani mobile broadband.	B	17.6.2.(c)		
	4. Belum berkembangnya ekonomi digital yang disebabkan belum meratanya penduduk yang menggunakan internet	B	17.8.1 a		
	5. Jumlah kabupaten yang terlayani akses telekomunikasi universal dan internet	B	17.8.1		Seluruh kabupaten/kota

TPB Pilar Ekonomi	Isu Strategis Berdasarkan Analisis Capaian TPB	Kategori Capaian	Indikator TPB	Isu Strategis Terkait DDDT Lingkungan Hidup Dan Keu. Daerah	Lokasi Prioritas
	6. Belum dioptimalkannya kemitraan dengan organisasi internasional serta multi national development bank terutama terkait pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU	C	17.17.1. (b) 17.17.1. (a)		

Sumber : KLHS RPJMD Prov. Kalsel, 2020

Tabel IV-6 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Pada Pilar Lingkungan

TPB Pilar Lingkungan	Isu Strategis berdasarkan analisis capaian TPB	Kode Indikator	Kategori Capaian	Isu Strategis terkait DDDT Lingkungan Hidup dan Keuangan Daerah	Wilayah Prioritas
Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	1. Belum terpenuhinya target SPM rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	6.1.1.(a)	B	Kualitas dan kuantitas baku mutu air menurun	
	2. Belum terpenuhinya target SPM rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	6.2.1.(b)	B	Potensi menurunnya air tanah pada daerah perkebunan sawit dan pertambangan	
	3. Masih ada kabupaten/kota yang belum memiliki pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	6.3.1.(a)	B		
	4. Belum optimalnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	6.2.1.(e)	C		
	5. Masih rendahnya keterpaduan pengendalian banjir di Kalimantan Selatan	6.5.1.(a) 6.5.1.(i)	B		DAS Barito
	6. Belum optimalnya kinerja DTA di Kalimantan Selatan dalam mengendalikan banjir	6.5.1.(e) 6.6.1.(d) 6.6.1.(e)	B		DTA Batangalal, DTA Riam Kiwa



TPB Pilar Lingkungan	Isu Strategis berdasarkan analisis capaian TPB	Kode Indikator	Kategori Capaian	Isu Strategis terkait DDDT Lingkungan Hidup dan Keuangan Daerah	Wilayah Prioritas
	7. Belum bekerjanya sistem monitoring berkala terhadap potensi kebencanaan terkait air (water related disaster)	6.5.1.(b)	B		Stamet Banjar, Stamet Kota Baru
	8. Belum terpeliharanya danau/waduk di Kalimantan Selatan	6.6.1.(b), 6.6.1.(c)	B		
Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	1. Belum tercapainya pengembangan transportasi, yang berkualitas, andal, tangguh dan berkelanjutan	11.2.1.(a)	B		
	2. Masih belum optimalnya penanganan bencana banjir dan karhutla.	11.5.1.(a)	B	Permukiman di daerah bantaran sungai Permukiman di kawasan lindung	DAS Barito
	3. Belum optimalnya peranan Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan	11.3.2.(a)	C	Peta risiko bencana perlu perbaharuan	
	4. Belum optimalnya pemanfaatan oleh kab/kota terkait RTH di kawasan perkotaan	11.7.1.(a)	C		
	5. Belum optimalnya peran perkotaan Banjarbakula dalam mewujudkan kota yang tangguh dan berkelanjutan	11.1.1.(b) 11.1.1.(c)	B		Banjarbakula
	6. Transporasi umum yang belum berjalan dengan baik di perkotaan	11.2.1.(a) 11.2.1.(b)	B		Kota Banjarmasin, Banjarbaru
	7. Belum berkembangnya kota pusaka di Kalsel	11.4.1.(a)	B		Banjar, Banjarmasin, Balangan, Tabalong
	8. Belum tertanganinya masalah persampahan di perkotaan	11.6.1.(a)	B		Banjarmasi, Banjarbaru, Banjar, Tanah Bumbu, Kota Baru
	9. Belum sistematisnya penanganan banjir di Kalsel	11.5.1.(c) 11.b.1*	B		DAS Barito



TPB Pilar Lingkungan	Isu Strategis berdasarkan analisis capaian TPB	Kode Indikator	Kategori Capaian	Isu Strategis terkait DDDT Lingkungan Hidup dan Keuangan Daerah	Wilayah Prioritas
Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	1. Belum optimalnya pengurangan sampah di sumber sampah	12.5.1.(a)	D		
	2. Perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	12.6.1.(a)	D		
	3. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	12.7.1.(a)	C		
	4. Masih rendahnya fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan belum teregister.	12.8.1.(a)	C		
Tujuan 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	1. Masih belum optimalnya pemanfaatan oleh kab/kota terkait RTH di kawasan perkotaan	13.1.1*	B		
	2. Belum sistematisnya inventarisasi penurunan emisi GRK di Kalsel	13.2.1.(a)	B		
Tujuan 14: Melestarikan & Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan untuk Pembangunan Berkelanjutan	1. Indikator TPB di Kalsel sudah mencapai target nasional (Perpres 59/2017)		A		
	2. Belum berkembangnya ekonomi biru (blue economy)	14.5.1	B		Tanah Laut, Kota Baru
Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	1. Masih adanya kerusakan pada kawasan konservasi	15.2.1.(a)	B	Konversi lahan hutan oleh perkebunan dan pertambangan	Kotabaru, Tanah Bumbu
	2. Belum tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	15.6.1*	B	Menurunnya jasa lingkungan	
	3. Belum adanya Dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati	15.9.1.(a)	B	Meningkatnya sedimen tersuspensi dan potensi pencemaran limbah	
	4. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi	15.3.1.(a)	B	Data potensi, ketersediaan dan pemanfaatan jasa	Banjar, Kotabaru

TPB Pilar Lingkungan	Isu Strategis berdasarkan analisis capaian TPB	Kode Indikator	Kategori Capaian	Isu Strategis terkait DDDT Lingkungan Hidup dan Keuangan Daerah	Wilayah Prioritas
	terhadap luas lahan keseluruhan			lingkungan yang masih minim	
				Meningkatnya lahan kritis	

Tabel IV-7 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola

TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola	Isu Strategis berdasarkan analisis capaian TPB	Kode Indikator	Kategori Capaian	Isu Strategis terkait DDDT Lingkungan Hidup dan Keu. Daerah
Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	16.1.3.(a)	B	
	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	16.2.3.(a)	B	
	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	16.5.1.(a)	B	
	Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik dan pemerintah daerah	16.6.2.(a)	B	

Sumber : KLHS RPJMD Prov. Kalsel, 2020

4.2.3.2 Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK)

Forum ini merupakan kerjasama antar provinsi di Kalimantan, antara lain Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara yang bertujuan untuk menjadi wadah kerjasama untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk Kalimantan. Forum ini hampir dilaksanakan setiap tahun oleh regional Kalimantan dengan lingkup kerjasama FKRP2RK sebagai berikut:

1. Koordinasi dan kerjasama regional untuk mempercepat pembangunan di Kalimantan,
2. Membangun daya saing ekonomi Kalimantan, dan



3. Membangun dan mempercepat penguatan konektivitas, kedaulatan pangan, energi, kemaritiman dan kawasan perbatasan, serta industri dan pariwisata regional Kalimantan secara terpadu, efektif dan efisien.

Pelaksanaan FKRP2RK pada tahun 2020 dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut serta komitmen anggotanya untuk terus berusaha meningkatkan pembangunan daerah regional Kalimantan dimana fokus pembahasan dalam FKRP2RK yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan sebagai berikut:

- I. Bidang Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kemiskinan
 1. Pemenuhan Tenaga Kesehatan di daerah 3T
 2. Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Kesehatan
 3. Penanganan Stunting Wilayah Kalimantan
 4. Pemenuhan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 5. Peningkatan Akses Pengelolaan SDA bagi Masyarakat Asli Kalimantan melalui Reforma Agraria
 6. Peningkatan aksesibilitas dan Konektivitas untuk Penguatan Ekonomi Keluarga Miskin pada Daerah 3T
 7. Bantuan Beasiswa Bagi mahasiswa miskin
- II. Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
 1. Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - Jalan Bebas Hambatan Banjarbaru-Batulicin (+180 Km)
 - Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan – Pulau Laut (+ 6 Km)
 - Jalan Lintas Pulau Laut Kotabaru (+130 Km)
 - Pembangunan Jalan Lintas Barat (Ruas Marabahan-Margasari-BuasBuas – Amuntai – Tanjung) (+175 Km)
 - Jalan Buas Buas Keladan (Batas Kalteng)
 - Ruas Jalan Long Bawan-Binuang (34,79 Km)
 2. Sumber Daya Air, meliputi Pembangunan Bendungan Riam Kiwa (+ 1.161,83 Ha, Tinggi 42 Meter) dan Pembangunan Bendungan Kusan (+ 2058 Ha, Tinggi 80 Meter)
 3. Keciptakarya, meliputi Pengembangan SPAM Regional Banjarbakula (1500 liter/detik) dan Pengembangan TPA Regional Banjarbakula (30 Ha)



4. Perumahan dan Permukiman, meliputi Pembangunan Perkantoran Pemerintahan, Pembangunan Perumahan dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
- III. Bidang Perhubungan
1. Transportasi Darat
 - Pembangunan Jalan Kereta Api Trase Tanjung-Banjarmasin (+213Km)
 - Pembangunan Jalan Kereta Api Trase Banjarmasin-Pelaihari-Batas Kaltim
 - Pengembangan BRT Banjarbakula
 - Jalan Akses Bandara Syamsudin Noor (+21,29 Km)
 - Pembangunan Jalan KA Palangkaraya – Banjarmasin
 2. Transportasi Laut, meliputi Pengembangan Pelabuhan Mekar Putih, Pengembangan Pelabuhan Trisakti dan Pengembangan/Peningkatan Pelabuhan ASDP
 3. Transportasi Udara meliputi Bandara Udara Syamsudin Noor, Bandara Gusti Syamsir Alam dan Bandara Bersujud
- IV. Bidang Energi
1. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 2. Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Energi
 3. Perumusan Regulasi Pendistribusian Energi
 4. Perumusan Regulasi Pendistribusian Energi
- V. Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
1. Penanggulangan Karhutla
 2. Pengendalian Ekosistem Gambut
 3. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan
 4. Mitigasi Perubahan Iklim

4.2.3.3 Isu Strategis Daerah Lainnya

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalsel Tahun 2021-2026 juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, identifikasi isu strategis dari dokumen RPJMD disajikan pada tabel berikut:



No	ISU STRATEGIS PROVINSI KALSEL	ISU STRATEGIS PROVINSI KALTARA	ISU STRATEGIS PROVINSI KALTIM	ISU STRATEGIS PROVINSI KALBAR	ISU STRATEGIS PROVINSI KALTENG
1	Masih terjadinya kerusakan lingkungan (pencemaran air, lubang tambang, dan deforestasi) dan belum optimalnya mitigasi bencana banjir dan kebakaran hutan lahan	Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	Pelestarian Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan
2	Belum mantapnya infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung ekonomi (termasuk energi dan konektivitas)	Masih Rendahnya aksesibilitas dan Dukungan Penyediaan Layanan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Terintegrasi	Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah	Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta akses infrastruktur dasar termasuk di daerah perbatasan. Belum sadanya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang.	Pengembangan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Tengah Pemekaran Wilayah Tumpang Tindih Lahan
3	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia	Masih Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018. Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Masih rendahnya kesejahteraan penduduk. Keberagaman penduduk Kalimantan Barat yang rentan akan terjadinya konflik sosial.	Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah Pembangunan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Perwujudan Ketentraman dan Ketertiban Berbasis Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat yang Berkeadilan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 Penurunan Angka Stunting Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan



No	ISU STRATEGIS PROVINSI KALSEL	ISU STRATEGIS PROVINSI KALTARA	ISU STRATEGIS PROVINSI KALTIM	ISU STRATEGIS PROVINSI KALBAR	ISU STRATEGIS PROVINSI KALTENG
4	Belum terdiversifikasi sektor ekonomi di Kalimantan Selatan dalam mendukung transformasi struktur ekonomi daerah (pertanian, hilirisasi komoditas unggulan dan pelaku UMKM)	Rentanannya ketahanan ekonomi Daerah sebagai Kawasan Perbatasan dalam Menghadapi Persaingan Global	Percepatan Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan secara vertikal maupun horizontal	Terjadinya kesenjangan ekonomi dimasyarakat.	Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan
5	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan ke masyarakat berbasis digital	Belum Optimalnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan	Pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Kualitas regulasi, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang relatif rendah yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis 4.0 Corporate Education dalam Manajemen ASN
6	Kalimantan Selatan memiliki peluang besar menjadi gerbang food estate di Kalteng dan Ibu Kota Negara di Kaltim (jalur logistik dan konektivitas)	Masih Rendahnya Daya Saing dan Tingginya Kesenjangan antar Wilayah	Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah		Pengembangan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Tengah

Isu strategis daerah lainnya menjadi peluang untuk melaksanakan kerjasama daerah untuk pengembangan potensi daerah serta melihat potensi daerah lain yang dapat mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Kerjasama Daerah merupakan usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama daerah meliputi penyediaan pelayanan publik; kerjasama dalam aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah; kerja sama investasi, serta kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan. Selain kerjasama antar daerah, dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah dapat melaksanakan kerjasama

dengan pihak ketiga, kerjasama daerah dengan pemerintah daerah diluar negeri dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri.

4.2.4 Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, isu strategis Internasional, Isu Strategi pembangunan nasional dalam RPJMN Nasional Tahun 2020 -2024, maka dirumuskan rancangan isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

4.2.4.1 Sumber Daya Manusia

Sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, kualitas sumber daya manusia harus diperhatikan semenjak perencanaan pembangunan hingga realisasi perencanaan yang telah dirumuskan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus memberikan perhatian khusus dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga akselerasi pembangunan dapat terlaksana.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga secara otomatis akan memberikan dampak positif kepada pemerataan kesejahteraan masyarakat sehingga kehidupan setiap penduduk Kalimantan Selatan menjadi lebih baik. Selain itu, sumber daya manusia yang berdaya saing akan menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan siap dalam menghadapi segala permasalahan yang akan muncul selama pelaksanaan pembangunan dan mampu memanfaatkan peluang maupun potensi yang ada untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Saat ini, sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Selatan masih butuh pembenahan terutama terkait kualitasnya.

Kualitas sumberdaya manusia Kalimantan Selatan jika di ukur dengan IPM, masih peringkat 4 di regional pulau Kalimantan. kondisi ini menunjukkan bahwa daya saing SDM Kalimantan selatan rendah. Pada sisi lain adalah masih rendahnya kualitas tenaga kerja tingginya angka pengangguran dari masyarakat local yang berakibat pada rendahnya penghasilan masyarakat. Dalam rangka memaksimalkan kualitas SDM di Kalimantan Selatan diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : Memastikan Link dan matchnya pendidikan dengan dunia kerja, pengembangan sekolah vokasi melalui kurikulum berbasis potensi local, mengembangkan system pelayanan kesehatan yang berorientasi pad penyakit regenaratif dan mendorong investasi padat karya pada sector pengolahan bahan-bahan primer.



Dalam rangka melaksanakan perbaikan SDM Kalimantan selatan diperlukan beberapa langkah-langkah pendukung sebagai berikut :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan yang kompeten dan sesuai potensi yang dimiliki daerah.
- b. Mendorong Kabupaten/kota meningkatkan partisipasi sekolah pada pendidikan dasar guna meningkatkan ARLS.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang dapat diakses anak usia sekolah guna meningkatkan Rata-rata harapan lama sekolah.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai gejala umum penyakit tidak menular.
- e. Memperbaiki sistem pelayanan kesehatan pada layanan kesehatan tingkat pertama.
- f. Memperkuat peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan melalui berbagai gerakan bersama lintas sektor dan pemangku kepentingan non pemerintah lainnya.
- g. Menjamin berkembangnya usaha kecil mikro di masyarakat.
- h. Fasilitasi literasi digital dan talenta digital dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang berdaya saing pada industri 4.0.

4.2.4.2 Ekonomi

Dominannya sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur perekonomian daerah menjadi salah satu yang membuat struktur ekonomi berkelanjutan masih belum kuat. Pada struktur perekonomian wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB atas dasar harga berlaku naik dari 18.71% di tahun 2019 menjadi 18.29%. Masih tingginya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian harus menjadi perhatian mengingat sektor tersebut merupakan sektor yang tidak dapat diperbaharui sumber dayanya. sehingga perlu kebijakan riil terkait transformasi struktur ekonomi ke sektor lain seperti Industri. Pertanian dan Pariwisata dalam rangka mempertahankan kinerja perekonomian daerah untuk kedepannya. berdasarkan PDRB Provinsi Kalsel Tahun 2020. kontribusi sektor pertanian sebesar 14.39%. Industri 13.52% dan Perdagangan sebesar 10.46%.

Pengeluaran konsumsi masyarakat yang cukup rendah juga membuat perkembangan perekonomian mikro tidak tumbuh signifikan. Pengeluaran konsumsi masyarakat menunjukkan daya beli masyarakat di suatu wilayah yang



mengindikasikan tinggi rendahnya perekonomian mikro dalam pembangunan daerah. Dalam kajian analisisnya, pengeluaran penduduk akan merepresentasikan pendapatan yang diterima dalam sebulan sehingga akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan secara menyeluruh.

Pengeluaran rata-rata per kapita di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum mengalami kenaikan di setiap periodenya yang dikarenakan adanya berbagai hal seperti laju inflasi, peningkatan arus komoditas barang, hingga perubahan gaya hidup masyarakat. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita masyarakat Kalimantan Selatan mencapai Rp.12.032 juta per tahun. Dalam sepuluh tahun terakhir, pengeluaran per kapita masyarakat rata-rata meningkat sebesar 1.68% per tahun. Covid-19 selama tahun 2020 memberikan dampak terhadap turunnya pengeluaran perkapita masyarakat Kalimantan Selatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, upaya transformasi ekonomi dengan menggeser kontribusi sektor pertambangan ke arah sektor-sektor antara lain: sektor Pertanian (dalam arti luas), Industri pengolahan, dan Perdagangan, sudah mulai terlihat meskipun belum optimal. Share Sektor Pertambangan tahun 2016 tercatat 20,98% dan turun menjadi 18,29% di tahun 2020. Namun demikian, peningkatan share dari sektor pengganti lainnya tercatat untuk 5 (lima) besar hanya sektor Perdagangan dari 9,41% menjadi 10,46%, dan Konstruksi dari 7,83% menjadi 8,26%. Share dari sektor unggulan yakni Pertanian (dalam arti luas) dan industri pengolahan masih menunjukkan kinerja yang menurun. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2013-2020 cenderung dinamis meskipun mengalami perlambatan, dimana pada tahun 2013 memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33% dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2015 yang hanya mencapai 3,82%. Namun pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan mulai menunjukkan angka yang membaik dengan tumbuh sebesar 4,40% dan mengalami kenaikan di tahun 2017 sebesar 5,28% akibat adanya fenomena commodities boom. Akan tetapi pada tahun 2018 dan 2019, pertumbuhan ekonomi tercatat tumbuh melambat sebesar 5,13% dan 4,01%. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tercatat mengalami kontraksi sebesar -1,81%.

Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan dan nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 berada di urutan ke-3 setelah Kalimantan Utara (-1,11%) dan Kalimantan Tengah (-1,4%).



Selain tantangan global, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dibayangi juga oleh adanya tantangan domestik. Unsur-unsur penting penggerak ekonomi, yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara diproyeksikan akan mengalami perlambatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Peningkatan investasi pasca implementasi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan diproyeksikan akan tumbuh semakin efektif dan efisien dalam rangka menggerakkan semua sektor perekonomian. Dari sisi lapangan usaha, perlu perbaikan dari sisi industri manufaktur. Industri manufaktur harus didorong, salah satunya melalui strategi hilirisasi sumber daya alam. Selain industri manufaktur, peluang lain berasal dari sektor pariwisata.

Pembangunan perekonomian daerah juga didukung oleh sektor-sektor di bidang perekonomian seperti pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan, yang sampai saat ini masih memiliki potensi dan berperan penting dalam perekonomian Kalimantan Selatan. Sektor pertanian dan industri pengolahan tersebut cukup memiliki kontribusi dominan terhadap struktur perekonomian Kalimantan Selatan selain sektor pertambangan. Diharapkan, prospek sektor pertanian dan industri pengolahan akan memberikan multiplier effect terhadap sektor dominan lainnya seperti perdagangan dan transportasi Masih ketergantungan dengan komoditas bahan mentah/setengah jadi. Komoditas utama Kalimantan Selatan seperti batubara, sawit, karet dan kayu lapis kebanyakan langsung dijual tanpa pengolahan sehingga Ketika harga menurun sangat berpengaruh terhadap perekonomian Kalimantan Selatan. Dalam mendorong perekonomian tentunya diperlukan pemanfaatan adopsi teknologi digital dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian khususnya di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif dan lain-lain.

4.2.4.3 Infrastruktur

Pembangunan daerah merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dibentuknya suatu regional wilayah sehingga mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun perlu digaris bawahi bahwa salah satu inti dari tujuan pelaksanaan pembangunan daerah adalah pemerataan hasil pembangunan sehingga dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. Oleh karenanya, pembangunan daerah juga dapat diartikan sebagai pengembangan setiap lini kehidupan masyarakat yang menyebabkan rasa nyaman, damai, dan



sejahtera setiap individu yang tinggal di dalamnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Hasil dari pembangunan daerah yang paling sering dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah pembangunan di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memenuhi capaian target setiap bidang tersebut, perlu adanya penyempurnaan setiap fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur berkualitas di Provinsi Kalimantan Selatan dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Keuntungan dalam peningkatan aksesibilitas wilayah tersebut adalah terbentuknya jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Hingga saat ini, di Provinsi Kalimantan Selatan belum terpenuhi pemerataan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan kelistrikan di setiap lapisan masyarakat sehingga hasil pembangunan belum dinikmati secara maksimal.

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi penghasil batubara di Indonesia. Namun dalam pemanfaatannya, batubara belum menjadi salah satu sumber energi Kalimantan Selatan. Konsep membangun sejatinya perlu memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang merupakan konsep pembangunan atas dasar penambahan nilai sumber daya. Hal ini merupakan amanat menurut instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2006 disertai Peraturan menteri ESDM No. 25 tahun 2013, tentang pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN). Energi alternatif merupakan sumber energi pengganti dari sumber energi yang pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi. Saat ini peningkatan kebutuhan energi didominasi oleh energi fosil yang tak terbarukan tentunya tak ramah lingkungan. Energi terbarukan pada dasawarsa sekarang lebih dikenal dengan energi alternatif, seperti; tenaga air, panas bumi, mini/mikro hidro, biomassa, tenaga surya, tenaga angin, bahan bakar nabati, biogas, dan sampah kota.



4.2.4.4 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Pembangunan daerah yang optimal akan terealisasi jika tiga unsur pembangunan daerah yakni pemerintah (government), dunia usaha (swasta), dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan baik. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah sinergi dalam rangka mencapai tujuan. Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus berlandaskan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan asas transparansi, profesionalitas, dan memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, makmur, merata, dan berkesinambungan.

Pembangunan daerah akan terlaksana melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi setiap tahapan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai domain penting dalam mengatur setiap langkah jalannya program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itulah perlu adanya perwujudan good governance pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan agar capaian kinerja lebih optimal.

Good governance merupakan tata laksana pemerintahan yang baik dalam artian seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi pemerintahan untuk menuju suatu tujuan yang baik. Good governance juga didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemimpinan yang baik secara umum. Dalam good governance mengandung pengertian terkait nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai aparatur pemerintah daerah memiliki tugas dalam melayani masyarakat maupun swasta untuk berkembang dari sisi kuantitas maupun kualitasnya di segala bidang. Oleh karenanya, peran ini harus dijalankan dengan rasa amanah dan tanggungjawab yang tinggi agar tugas, pokok, dan fungsi pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan pembangunan daerah.

Perbaikan kinerja pemerintah daerah terus dilakukan melalui penerapan reformasi birokrasi seutuhnya melalui:

1. Perbaikan transparansi kinerja pemerintah daerah melalui perbaikan SAKIP;
2. Perbaikan Indeks Pelayanan Publik;



3. Perbaikan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);
4. Perbaikan Indeks Profesionalisme ASN;
5. Perbaikan Indeks Pelayanan Publik;
6. Peningkatan Indeks Kerukunan Umat beragama dan;
7. Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia.

Namun demikian berdasarkan pengukuran keberhasilan kinerja pemerintah daerah masih berada pada posisi indeks RB sebesar 68,47. Angka capaian ini sangat dipengaruhi oleh kinerja yang lainnya seperti SAKIP, Indeks Pelayanan Publik, IPAK, IP ASN dan Indeks Pelayanan Publik. Tantangan dalam perbaikan kinerja pemerintah daerah yaitu peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Pemda dalam mendukung akselerasi transformasi digital di Pemerintah Daerah.

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan tentunya juga berkaitan dengan upaya membangun daya saing daerah. Salah satu indikator pada daya saing adalah permasalahan konflik, salah satunya diukur dengan Indeks kerukunan umat beragama. Angka capaian Indeks Kerukunan Umat beragama di Kalimantan Selatan pada Tahun 2019 menempati urutan ke 5 di pulau Kalimantan dengan nilai 72,51 berada dibawah Provinsi dengan capaian tertinggi se Kalimantan yaitu Kaltara dengan nilai 77,97. Keadaan ini dipengaruhi oleh pendidikan keluarga, peran pemerintah dan implementasi kebijakan lokal yang adil pada berbagai tatanan masyarakat.

Dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini menjalankan Pusat Pemerintahan di Kawasan Perkantoran Provinsi di Cempaka, Kota Banjarbaru. Pemindehan Ibukota Provinsi Kalsel ke Kota Banjarbaru juga menjadi suatu wacana untuk dapat mengurangi dampak negatif dari pertumbuhan perekonomian dan penurunan kualitas lingkungan akibat padatnya penduduk di Kota Banjarmasin, serta menumbuhkan berbagai sektor di wilayah Kota dan Kabupaten lainnya.

4.2.4.5 Peningkatan Kualitas Lingkungan

Proses pemanfaatan Sumber daya alam dalam rangka pembangunan daerah tentu saja dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan



lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Namun Tidak dapat dipungkiri, penambahan penduduk, peningkatan urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi berdampak pada kualitas lingkungan. Permasalahan utama lingkungan di Kalimantan Selatan adalah masih belum optimalnya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)s. IKLH terdiri dari beberapa unsur yang menyumbang, antara lain Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Oleh karena itu, pencapaian target IKLH perlu didukung oleh peningkatan 4 (empat) unsur tersebut. Permasalahan lingkungan yang juga terkait dengan IKLH adalah meningkatnya potensi bencana daerah di Kalimantan Selatan yaitu banjir dan kabut asap yang harus mendapatkan penanganan yang lebih baik di masa depan karena berdampak pada kesehatan masyarakat.

Permasalahan lingkungan lain yaitu terkait penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Gas rumah kaca merupakan penyumbang terbesar pada perubahan iklim dunia. Gas rumah kaca terjadi karena adanya aktivitas yang menghasilkan karbon dengan sumber utama yang berasal dari aktivitas ekonomi. Kebijakan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon penting untuk diadaptasi dan diterapkan pada rencana pembangunan daerah. Perbaikan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan merupakan langkah awal menuju pembangunan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon di daerah.

4.2.4.6 Gerbang Ibukota Negara dan Food Estate

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di Kalimantan Timur. Sebagai Ibu Kota Negara baru, Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam melimpah. Batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebelah timurnya berbatasan dengan sebagian (12 mil) Selat Makasar dan Laut Sulawesi. Sementara itu, sisi selatannya berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemindahan Ibu Kota Negara sudah termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan merupakan salah satu kegiatan prioritas pengembangan kawasan perkotaan. Salah satu yang mendasari pemindahan ibukota negara yaitu mengubah mindset



pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentri sehingga merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila. Pemindahan Ibukota Negara keluar pulau Jawa untuk pemeratakan kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Guna menjamin pembangunan berkelanjutan, maka pembangunan pusat pertumbuhan perlu mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.

Permasalahan lainnya yang mungkin muncul terkait pemindahan ibukota negara yaitu ketersediaan pangan. Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk menjadi lumbung padi Nasional. Kalimantan Selatan memiliki lahan sawah paling luas dibanding provinsi lain di Kalimantan, sehingga mungkin untuk Provinsi Kalimantan Selatan, menjadi lumbung padi Nasional, karena kebutuhan pangan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, tentunya penyediaan pangan untuk ibukota negara baru menjadi tantangan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya. Untuk meningkatkan kapasitas produksi tanaman pangan di Kalimantan Selatan perlu roadmap atau pemetaan pembangunan pertanian yang terstruktur. Kalsel sebagai penyangga pangan nasional dan daerah yang memiliki surplus beras harus mampu menjadi daerah penyuplai bahan pangan ke wilayah Ibukota Negara.

Pemindahan Ibukota Negara juga tentunya diiringi pemindahan penduduk pekerja secara masif baik dari sektor pemerintah ataupun sektor swasta. Penambahan penduduk baru ini tentunya membutuhkan pangan dan sumber daya manusia yang berkualitas. Terkait penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, rendahnya indeks pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Selatan di regional Kalimantan menjadi permasalahan pembangunan yang harus diatasi. Dalam perspektif birokrasi pemerintahan, pemindahan pusat pemerintahan harus dibarengi dengan meningkatnya kapasitas aparatur di lingkup Pemerintah Provinsi utamanya daerah-daerah penyangga kawasan ibukota kedepannya. Belum efektifnya reformasi birokrasi pemerintah daerah menjadi permasalahan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat diimplementasikan.

Sesuai dengan Perpres 109 Tahun 2020, Food Estate merupakan salah satu Program Strategis nasional yaitu program peningkatan penyediaan pangan nasional. Penetapan food estate di Kalimantan Tengah merupakan respon pemerintah terhadap Pandemi global COVID-19 yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dunia, terutama terkait dengan kelangkaan dan krisis



pangan di dunia dalam jangka menengah-panjang. Dalam KLHS cepat yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK. Kawasan Eks - PLG (Pengembangan Lahan Gambut) di Kalimantan Tengah yang dulunya dalam kondisi rusak berat setelah dilakukan pemulihan berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2016 membuahkan hasil kawasan terpulihkan sekitar 47 ribu hektar. KLHS cepat ini merekomendasi reposisi areal Eks-PLG sebagai PSN Pembangunan Wilayah Pertanian Pusat Pangan Nasional Terpadu. Modern dan Berkelanjutan. dengan tipe penggunaan lahan sebagai berikut :

1. Padi sawah (Rice) sepanjang tahun;
2. MIX-FARMING: Padi-hortikultura;
3. Padi-jagung-semangka;
4. Padi estate atau usaha masyarakat untuk padi dan jagung dan Agro-forestry;
5. Padi estate atau padi rakyat dan palawija/sayuran serta Agro-forestry dan sapi;
6. Padi dan palawija/sayuran serta Agro-forestry dan sapi;
7. Padi-palawija-sayuran;
8. Tanaman Purun pada Zona 3.4.

Penetapan food estate di Kalimantan Tengah tentunya merupakan suatu isu strategis yang harus direspon dengan baik oleh daerah tetangga termasuk Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa program (dari 20 program/kegiatan yang direncanakan) yang dapat dijadikan peluang oleh Kalsel antara lain : penguatan dan fokus litbang sektor pertanian. stimulasi pemuda tani moderns. Pusat penelitian dan inovasi gambut-ITPC. serta program dalam investasi SDM yang modifikasi kebijakan transmigrasi dan penyebaran tenaga kerja masyarakat atau pemuda sebagai tenaga pelopor pembangunan.



R P J M D

V

P r o v i n s i

K A L I M A N T A N

S E L A T A N

T a h u n

2 0 2 1 - 2 0 2 6

VISI

MISI

TUJUAN

DAN

SASARAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud di masa mendatang. Visi pembangunan untuk periode 2021-2026 sesungguhnya merupakan bagian dari kerangka pembangunan jangka panjang dan kelanjutan dari pembangunan lima tahun sebelumnya.

Rencana Pembangunan Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 memiliki Visi "**Kalimantan Selatan 2025 Maju dan Sejahtera sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Industri**" dengan Misi:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan IPTEK dan IMTAQ.
2. Mengembangkan ekonomi ke arah industri dan perdagangan, yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik.
3. Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan, yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan.
4. Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
5. Menciptakan taat asas dan tertib hukum, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial budaya dan agama.

Pada setiap tahapan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 terdapat Penekanan 5 Tahunan. Penekanan 5 Tahunan tersebut dipedomani dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel V-1 Penekanan 5 Tahun RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan

Penekanan 5 Tahun Pertama 2006-2010	Penekanan 5 Tahun Kedua 2011-2015	Penekanan 5 Tahun Ketiga 2016-2021	Penekanan 5 Tahun Keempat 2021-2026
Menata Ulang Fondasi Pembangunan Daerah. Secara umum tujuannya adalah menata ulang pembangunan dan membenahi struktur semua bidang untuk menciptakan landasan yang kokoh	Memantapkan Fondasi Pembangunan Daerah Secara umum tujuannya adalah peningkatan basis pembangunan daerah dengan penekanan pada peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan IPTEK yang mendukung industrialisasi pertanian secara cermat	Meningkatkan Daya Saing Secara umum tujuannya adalah pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pemanfaatan SDA dan teknologi secara efisien, inovatif dan berwawasan lingkungan (daya saing)	Mewujudkan Perdagangan dan Jasa Berbasis Agroindustri dalam rangka mencapai Masyarakat Maju dan Sejahtera Secara umum tujuannya adalah terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai wilayah perdagangan dan jasa berbasis agroindustri yang maju dan sejahtera dengan daya saing yang tinggi dalam menyongsong era globalisasi
Implementasi dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan			
	RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2011-2015	RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021	RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026
Visi	Terwujudnya Kalimantan Selatan yang Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Damai (Bermunajat Tahun 2015"	Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing"	Kalsel MAJU (Makmur Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibu Kota Negara

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan sesuai misi yang diemban.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah **"KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA"** dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut:

Tabel V-2 Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA	Makmur Sejahtera	Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat, Jasmani, Rohani, Aman dan Sentosa
	Berkelanjutan	Pembangunan dengan Memperhatikan Keseimbangan antara Sosial, Ekonomi dan Lingkungan
	Kalsel Gerbang Ibu Kota Negara	Kaltim telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara yang baru, Kalsel dari letaknya yang strategis menjadi Gerbang Ibu Kota Negara Baru

5.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Sesuai dengan harapan terwujudnya "KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA" maka dirumuskan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan Visi, sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur.
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana.

Untuk lebih jelasnya perumusan penjelasan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 5.2. dibawah ini.

Tabel V-3 Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

No.	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA	Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur	Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan, Pendidikan dan Sosial Budaya, Kesehatan, Keterampilan, Kepemudaan dan Olah Raga
2		Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata	Meningkatkan Ekonomi melalui Transformasi Struktur Ekonomi dari Komoditas Bahan Mentah Industri Turunannya (Hilirisasi)
3		Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	Membangun Sarana Prasarana Pembangunan Pelayanan Dasar dan Ekonomi berbasis Kewilayahan (daratan dan lautan)
4		Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik	Melanjutkan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk mendorong Investasi
5		Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana	Pengendalian Banjir, Pencemaran, Perusakan Lingkungan, Ketahanan Iklim, dan Pembangunan Rendah Karbon serta Kebakaran Hutan Lahan berbasis Teknologi

"KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA". Makna mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, aman dan sentosa dengan upaya untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan ekonomi yang merata dengan memperhatikan keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan, memperkuat sarana prasarana dasar perekonomian untuk kemakmuran masyarakat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, penguatan terhadap ketahanan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sebagaimana halnya Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, maka janji-



Janji yang telah disampaikan pada saat kampanye merupakan substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi. Janji-janji dimaksud dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, selanjutnya akan menjadi pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran dalam penyusunan RPJMD merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja dan prioritas pembangunan tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Untuk mencapai Kelima misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai tahun 2021-2026 pada masing-masing misi tersebut, perumusan tujuan dan keterkaitannya dengan misi RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel V.3.

T a h u n
2 0 2 1 - 2 0 2 6



Tabel V-4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
VISI	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA										
MISI 1	Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudhi Pekerti Luhur										
Meningkatnya Toleransi dan Nilai-nilai Keagamaan		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	N/A	69.1	72.71	73.32	73.85	74.3	74.7	74.7
	Meningkatnya Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama	Jumlah Konflik antar dan inter umat beragama	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Angka	70.91	71.28	71.70	72.20	72.65	73.05	73.50	73.50
	Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.29	8.34	8.47	8.56	8.65	8.74	8.83	8.83
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.68	12.81	12.94	13.07	13.2	13.33	13.46	13.46
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	68.66	68.83	70.64	71.05	71.46	71.99	72.3	72.3
	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88.86	88.91	88.97	89.04	89.1	89.16	89.23	89.23
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74.48	74.44	75.39	76.33	77.27	78.21	79.15	79.15
	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	50.67	51.08	52	52.665	53.33	53.995	54.66	54.66
	Menurunnya Pernikahan Anak	Proporsi Perempuan umur 20-24	%	16.24	16.26	15.01	13.77	12.53	11.29	10.04	10.04



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		tahun yang menikah sebelum 18 tahun										
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	65.11	69.87	69.89	69.91	69.93	69.95	69.97	69.97	69.97
	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	58,64*	60.15	61.67	63.2	64.74	66.29	66.29	66.29
	Meningkatnya Prestasi dan Partisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga	Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang berolahraga	%	N/A	N/A	35	37	39	41	43	43	43
		Jumlah Medali Emas	Buah	N/A	45	30	40	50	35	45	200	200
MISI 2 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata												
	Meningkatnya perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	-1.81	3.48	4,0 - 4,5	4,5 - 5,2	5,2 - 6,0	6,0 - 6,24	6,24 - 6,5	6,24 - 6,5	6,24 - 6,5
	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	-0.96	1.16	0,65 - 2,5	1,5 - 3,45	3,15 - 3,95	3,5 - 4,2	3,75 - 4,75	3,75 - 4,75	3,75 - 4,75
		LPE Sektor Industri Pengolahan	%	-3.38	6.23	1,9 - 2,57	2,5 - 3,65	3,65 - 4,65	4,5 - 5,25	5,25 - 6,5	5,25 - 6,5	5,25 - 6,5
		LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	%	-3.38	2.2	6,95 - 7,2	7,2 - 7,85	7,85 - 8,2	8,2 - 9,1	9,1 - 10	9,1 - 10	9,1 - 10
		LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	%	-2.02	2.3	6,18 - 6,61	6,61 - 7,1	7,1 - 7,8	7,8 - 8,25	8,25 - 9,1	8,25 - 9,1	8,25 - 9,1



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun Rupiah	7.76	12,72	11.66	12.55	13.52	14.55	15.67	15.67
Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan		Persentase penduduk miskin	%	4.38	4.83	4,80 - 4,60	4,60 - 4,40	4,40 - 4,22	4,22 - 4,05	4,05 - 3,77	4,05 - 3,77
		Indeks Gini	Indeks	0.332	0.330	0.328	0.326	0.324	0.322	0.310	0.310
	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Mandiri	%	18.79	19,00*	19.29	19.79	20.29	20.79	21.29	21.29
	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Rupiah per Orang per Tahun	12,032,000	12,143,000	12,146,875	12,208,904	12,266,652	12,320,671	12,371,414	12,371,414
		Nilai Tukar Petani	%	99.18	101,58*	102.23	102.7	103.18	103.69	103.8	103.8
Menurunnya tingkat Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.74	4.95	4.39	4.22	4.05	3.88	3.71	3.71
	Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69.33	69.26	69.74	69.94	70.16	70.38	70.60	70.60
MISI 3	Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian										
	Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan	Indeks Williamson	Indeks	0.391	0,383*	0.375	0.367	0.359	0.351	0.343	0.343
	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	Indeks	67.56	76.57	79.33	81.21	85.21	87.04	88.26	88.26
	Meningkatnya Konektivitas antar kawasan	Rasio Konektivitas	Rasio	0.55	0.57	0.59	0.61	0.63	0.65	0.67	0.67



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Terwujudnya pembangunan kawasan-kawasan strategis berdasarkan keseimbangan keruangan	Persentase kesesuaian tata ruang	%	85	83.5	84	84.5	85	85.5	86	86
MISI 4	Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik										
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68.47	70,85*	72.05	73.24	74.44	75.64	76.84	76.84
	Terwujudnya Pemerintahan yang Bebas KKN	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks	3.7	3,8*	3.85	3.95	4.05	4.15	4.2	4.2
	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Predikat SAKIP	Predikat	BB	A*	A	A	A	A	A	A
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.03	2.6	3.1	3.25	3.4	3.55	3.65	3.65
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	N/A	71.17	72	75	78	80	82	82
	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Sangat Baik (4,41)	Sangat Baik (4,42)*	Sangat Baik (4,44)	Prima (4,51)	Prima (4,52)	Prima (4,53)	Prima (4,54)	Prima (4,54)
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kasesel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	74.05	79,48*	79.49	79.5	79.51	79.52	79.53	79.53
MISI 5	Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana										
Menguatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68.43	70,26*	70.58	70.9	71.22	71.54	71.86	71.86



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	48.48	49,84*	51.24	52.64	54.04	55.44	56.84	56.84
		Indeks Kualitas Air	Indeks	51.67	55,90*	55.97	56.04	56.12	56.19	56.26	56.26
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	88.93	88,38*	88.5	88.63	88.73	88.85	88.97	88.97
		Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	64.19	68,69*	69.27	69.86	70.44	71.02	71.6	71.6
	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	16.5	18.0	21.0	22.2	24.6	26.6	28.9	28.9
Meningkatnya Ketahanan Bencana		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	144.81	138*	138	135	132	129	126	126
	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.47	0,51*	0.54	0.57	0.6	0.63	0.66	0.66

Keterangan : Kondisi Awal Yang bertanda bintang (*) adalah Target / Proyeksi





5.4 Keselarasan RPJMD 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024

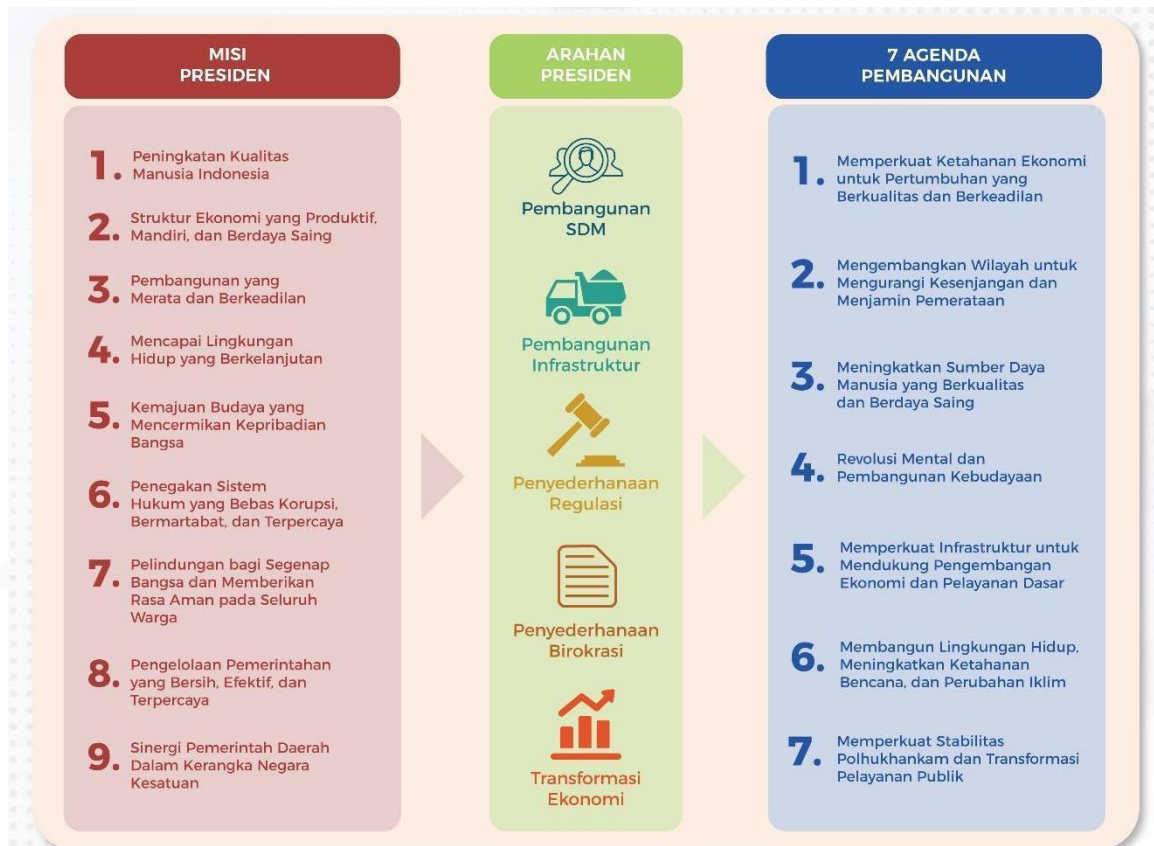
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur Kalimantan Selatan yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024. Selanjutnya RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 untuk diselaraskan dan disinergikan dalam mendukung pencapaian tujuan nasional. Melalui penyelarasan antara RPJMD Kalimantan Selatan dengan RPJMN tersebut, diharapkan dapat terwujud capaian dukungan pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2020-2024 sebagai upaya sinergi antara pusat dan daerah serta antar wilayah, dengan mengacu kepada pembagian urusan pemerintahan. Penyelarasan pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2020-2024 tersebut didasarkan pendekatan perencanaan pembangunan nasional dan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial (HITS) dalam lingkup kewilayahan secara lintas bidang dan antar bagian urusan pemerintahan. Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan nasional tersebut dilaksanakan dengan menggunakan prinsip *money follows program*.

Pendekatan tersebut mengutamakan pembagian sumber daya (anggaran) berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN dilaksanakan dengan Penyelarasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah

Visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada periode tahun 2020-2024 ialah, "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan



Gambar V-1 Strategi Dalam Pelaksanaan Misi Nawacita dan Pencapaian Sasaran Visi Indonesia 2045

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi



Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-undang Pemberdayaan UMKM

4. Penyederhanaan Birokrasi, dan Memprioritaskan Investasi

Untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi.

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun target dan sasaran makro pembangunan nasional tahun 2020 – 2024 adalah:

Wilayah Pembangunan	Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi (%) 2020-2024	Kontribusi (Share) Ekonomi Regional (% per PDRB) 2024	Kebutuhan Investasi (Rp. Triliun) 2024	Tingkat Kemiskinan (%) 2024	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2024
Papua	6,6	2,1	41,1	18,2	2,5
Maluku	7,3	0,6	18,8	9,0	4,6
Nusa Tenggara	6,0	1,5	19,9	12,1	2,1
Sulawesi	7,6	7,0	110,7	7,2	3,5
Kalimantan	6,7	8,8	143,1	3,7	3,4
Sumatera	6,0	20,9	251,1	7,1	3,6
Jawa-Bali	5,9	59,2	742,4	6,2	4,1

*Realisasi sampai dengan tiga triwulan pertama tahun 2019

Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2020-2024



Gambar V-2 Target Pembangunan Wilayah Tahun 2024

Adapun tujuan pembangunan nasional dapat dilihat pada Nawa Cita Presiden Joko Widodo sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, perubahan iklim
4. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
5. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tabel V-5 Penyelarasan Visi-Misi-Tujuan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan

Visi Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”			
Visi Pembangunan Kalimantan Selatan RPJMD 2021-2026: “KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”			
Misi RPJMN	Misi RPJMD	Tujuan RPJMN	Tujuan RPJMD



Misi-1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi-1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatnya Toleransi dan Nilai-nilai Keagamaan
Misi-5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa			
Misi-7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga			
Misi-2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Misi-2: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Daerah Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
Misi-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi-3: Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan Menurunnya tingkat Pengangguran
Misi-6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Misi-4: Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing daerah
Misi-8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya			
Misi-9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan			
Misi-4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Misi-5: Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, perubahan iklim	Menguatnya Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Ketahanan Bencana



Tabel V-6 Penyeragaman Target Indikator Makro Nasional dan Provinsi

No	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024 Target					Indikator Pembangunan	RPJMD Provinsi Target						
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,4-5,7	5,7 - 6,0	5,3 - 5,9	6,2-6,5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,81	3,48	4,0 - 4,5	4,5 - 5,2	5,2 - 6,0	6,0 - 6,24	6,24 - 6,5
2	Tingkat Kemiskinan (%)	10,19	9,2 - 9,7	7,5 - 8,0	8,5 - 7,5	6,0-7,0	Tingkat Kemiskinan (%)	4,38	4,83	4,80 - 4,60	4,60 - 4,40	4,40 - 4,22	4,22 - 4,05	4,05 - 3,77
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,07	5,9 - 6,5	4,4 - 4,9	6,0 - 5,3	3,6-4,3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,74	4,95	4,39	4,22	4,05	3,88	3,71
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,51	73,26	74,01	74,77	75,54	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,91	71,28	71,70	72,20	72,65	73,05	73,50
5	Rasio Gini	0,385	0,377 - 0,382	0,374 - 0,378	0,378 - 0,375	0,360-0,374	Indeks Gini	0,332	0,330	0,328	0,326	0,324	0,322	0,310
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	26	26,3	26,7	27	27,3	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	16,5	18,0	21,0	22,2	24,6	26,6	28,9

Sumber : RPJMN 2020-2024, RKP 2021, RKP 2022, RKP 2023



R P J M D

VI

P r o v i n s i

K A L I M A N T A N

STRATEGI

S E L A T A N

ARAH KEBIJAKAN

T a h u n

DAN

2 0 2 1 - 2 0 2 6

PROGRAM

PEMBANGUNAN

DAERAH

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar



tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD.

Tabel VI-1 Agenda/Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026

T E M A P E M B A N G U N A N

2022	2023	2024	2025	2026
Memantap-kan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan Memperhati-kan Lingkungan	Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendukung Sektor Utama yang Sinergi dengan Kebijakan Nasional	Pemantapan Kualitas Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian melalui intensitas kerjasama yang Mendukung Pembangunan	Mewujudkan Kemandirian Daerah menuju Kalimantan Selatan yang Makmur dan Sejahtera

Tabel VI-2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

A R A H K E B I J A K A N

2022	2023	2024	2025	2026
Menguatkan Pijakan menuntaskan Pandemi Covid-19 dengan perkuatan SDM (khususnya Kesehatan Masyarakat) dan mulai peningkatan perekonomian skala besar	Peningkatan kualitas SDM (seluruh aspek) dalam mendukung perekonomian yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan	Peningkatan kualitas SDM dan prasarana wilayah mendukung sektor-sektor unggulan Daerah dan kebijakan Nasional yang dilaksanakan di Kalsel	Pengembangan kualitas SDM dan prasarana wilayah mendukung perekonomian berkelanjutan berpedoman pada pencapaian Pembangunan Global (SDGs)	Memantapkan kualitas SDM dan prasarana wilayah menuju Kalsel MAJU (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan)

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 berdasarkan masing-masing sasaran serta tema pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel VI-3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Misi 1

Untuk mencapai Misi 1, ditetapkan 2 Tujuan, 8 Sasaran, 11 Indikator Kinerja, 18 Strategi, 28 Arah Kebijakan

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja		Strategi		Arah Kebijakan	
Visi		KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA							
Misi I		Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur							
1	Meningkatnya Toleransi dan Nilai-nilai Keagamaan	1	Meningkatnya Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama	Jumlah Konflik antar dan inter umat beragama (kasus)	1	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan keagamaan	1	Peningkatan pendidikan keagamaan di keluarga	
							2	Peningkatan pembinaan kerukunan umat beragama	
							3	Implementasi kebijakan lokal yang setara	
2	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	2	Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	2	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	4	Pemenuhan standar minimum pendidikan	
							5	Revitalisasi Pendidikan sesuai Kebutuhan Tenaga Kerja (Link and Match)	
		3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	4	Peningkatan promosi Kesehatan Masyarakat	6	Beasiswa pendidikan	
							7	Pengembangan pendidikan filial	
		5	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	10	Standarisasi pelayanan bidang kesehatan Fisik dan Mental				
					8	Mengembangkan model promosi kesehatan berbasis elektronik			
		4	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (indeks)	6	Pengarustamaan Gender yang meliputi Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	11	Penguatan Data, Informasi, dan Analisis Gender	
							Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (indeks)	7	Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
				12	Pengembangan kebijakan gender				
		5	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (indeks)	8	Penanaman kesadaran perbaikan kualitas hidup bidang pendidikan	13	Peningkatan kualitas perempuan	
14	Peningkatan peran organisasi pemuda bidang pendidikan								



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
Visi	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA			
Misi I	Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur			
			9	15
			10	16
			11	17
			12	18
	6	Menurunnya Pernikahan Anak	Angka Perkawinan Anak (%)	13
				19
				20
	7	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	14
				15
				16
	8	Meningkatnya Prestasi dan Partisipasi di Bidang Olahraga	Persentase Masyarakat usia 7-60 Tahun yang Berolahraga	17
			Jumlah Medali Emas	18
				25
				26
				27
				28

Tabel VI-4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Misi 2



Untuk mencapai Misi II, ditetapkan 3 Tujuan, 5 Sasaran, 9 Indikator Kinerja, 42 Strategi, 75 Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
Visi	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA			
Misi II	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata			
1	Meningkatnya perekonomian daerah	1	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
			1	Peningkatan produksi pertanian dengan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
			2	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
			3	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian
			4	Peningkatan perizinan usaha pertanian
			5	Peningkatan produksi Perikanan Tangkap di perairan laut dan air tawar
			1	Pengawasan, penataan peredaran sarana - prasarana pertanian
			2	Pengendalian dan pengawasan mutu benih dan obat-obatan
			3	Pengelolaan sumberdaya genetik (SDG) hewan (Itik Alabio, dan Kerbau Rawa), tumbuhan dan mikroorganisme
			4	Peningkatan penyediaan mutu benih dan bibit
			5	Pengembangan dan Pengelolaan Kelapa Sawit berbasis RAD KSB
			6	Penjaminan kesehatan hewan
			7	Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan
			8	Peningkatan kesejahteraan hewan
			9	Pengendalian, pencegahan dan penanganan bencana pertanian
			10	Peningkatan penerbitan izin usaha pertanian
			11	Peningkatan penangkapan ikan di wilayah laut dan wilayah lainnya lintas kabupaten/kota
			12	Peningkatan penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal
			13	Peningkatan pengelolaan pelabuhan perikanan



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
Visi	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA			
Misi II	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata			
			14	Peningkatan izin pengadaan kapal tangkap dan pendaftarannya
			6	Peningkatan produksi perikanan budidaya di perairan laut dan air tawar
			15	Peningkatan Penerbitan izin usaha perikanan budidaya
			16	Peningkatan Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut
			7	Pengelolaan Sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
			17	Penyediaan infrastruktur pangan
			8	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat, serta pengembangan UMKM
			18	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
			19	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
			20	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Peningkatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
			9	Penanganan Kerawanan dan Pengawasan Keamanan Pangan
			21	Penurunan Desa Rawan Pangan
			22	Peningkatan komoditas pangan yang aman dikonsumsi
		LPE Sektor Industri Pengolahan (%)	10	Peningkatan perencanaan dan pembangunan industri
			23	Penyusunan rencana pembangunan industri ramah lingkungan
			24	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana prasarana industri



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan		
Visi	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA					
Misi II	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata					
			11	Pengendalian izin usaha industri	25	Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
			12	Peningkatan Pengelolaan sistem informasi industri nasional	26	Penyediaan informasi industri berbasis Sistem Informasi
		LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor (%)	13	Pengembangan Ekspor	27	Peningkatan promosi dan misi dagang produk ekspor unggulan
			14	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	28	Pembangunan dan pengelolaan sarpras distribusi dan pasar
			15	Standarisasi dan perlindungan konsumen	29	Pelaksanaan perlindungan, pengujian dan pengawasan barang beredar
			16	Peningkatan perizinan dan pendaftaran perusahaan	30	Peningkatan dan pengawasan penerbitan perizinan usaha perdagangan
			17	Peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	31	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri
		LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum (%)	18	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	32	Pengelolaan daya tarik, Kawasan Strategis dan destinasi pariwisata
					33	Peningkatan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
			19	Peningkatan Pemasaran Pariwisata	34	Peningkatan Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri melalui media
			20	Pengembangan ekonomi kreatif	35	Penyediaan sarana prasarana usaha kreatif
					36	Pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			21	Pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekokraf	37	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekokraf



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan						
Visi	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA									
Misi II	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata									
	2	Meningkatnya Investasi yang berdampak ke daerah	Nilai Realisasi PMA & PMDN industri dan pertanian (Rp.)	22	Pengembangan iklim penanaman modal	38	Peningkatan pemberian fasilitas di bidang penanaman modal			
						39	Pembuatan Peta Promosi Investasi			
				23	Peningkatan Promosi penanaman modal	40	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal			
				24	Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	41	Penyediaan Pelayanan Terpadu berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik			
				25	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	42	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal			
				26	Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	43	Pengelolaan, penyajian data dan informasi perizinan secara elektronik			
2	3	Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang Mandiri (%)	27	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan	44	Penguatan Data dan Informasi PPKS			
						45	Rencana Penanganan PPKS Terpadu			
	4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (juta Rp./orang)		28	Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	46	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel		
							29	Peningkatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	47	Peningkatan Pemahaman, Pengetahuan, Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
							30	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	48	Fasilitasi Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan	
Visi	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA				
Misi II	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata				
			31	49	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	50	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
			32	51	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
				52	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
				53	Peningkatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
			33	54	Peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi perdesaan
		NTP (angka)	34	55	Pengendalian harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
				56	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
			35	57	Pengembangan Kapasitas Penyuluh dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani dalam bentuk Korporasi Petani berbasis Food Estate sesuai karakteristik Kalimantan selatan



Tujuan		Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan					
Visi		KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA								
Misi II		Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata								
3	Menurunnya Tingkat Pengangguran	5	Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	36	Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	58	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
					37	Peningkatan Perencanaan Tenaga Kerja	59	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro		
							38	Peningkatan Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	60	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
									61	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
							39	Penempatan Tenaga Kerja dalam dan luar negeri	62	Peningkatan pelayanan bagi pencari kerja
									63	Pengelolaan informasi pasar kerja online
									64	Peningkatan job fair/bursa kerja, termasuk ekonomi digital
									65	Perlindungan calon pekerja terintegrasi secara online
					40	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis	66	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial		
							67	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		
68	Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada provinsi									
				69	Peningkatan peran Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi					
				70	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)					



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
Visi	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA			
Misi II	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata			
			41 Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan	71 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 72 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan 73 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
			42 Pengembangan Jasa Konstruksi	74 Peningkatan Kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan Bersertifikat 75 Peningkatan Tertib Jasa Konstruksi

RPJMD
Provinsi
KALIMANTAN
SELATAN
Tahun
2021-2026

Tabel VI-5 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Misi 3

Untuk mencapai Misi III, ditetapkan 1 Tujuan, 3 Sasaran, 3 Indikator Kinerja, 6 Strategi, 23 Arah Kebijakan

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja		Strategi		Arah Kebijakan														
Visi		KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA																				
Misi III		Memperkuat Sarana dan Prasarana Perekonomian																				
1	Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan	1	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar untuk pemenuhan standar hidup layak	Indeks Infrastruktur Dasar wilayah	1	Pemenuhan infrastruktur dasar Perumahan dan Permukiman	1	Meningkatkan dan mengoptimalkan Pengembangan Penyediaan Sarana Air Baku	2	Meningkatkan akses penduduk terhadap air minum	3	Meningkatkan Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	4	Meningkatkan pengelolaan persampahan yang terintegrasi antar wilayah	5	Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat dengan mengurangi tingkat kekumuhan kawasan permukiman	6	Meningkatkan pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	7	Meningkatkan pola hubungan lintas sektor dalam penanganan pencapaian infrastruktur dasar permukiman	8	Meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi disertai peningkatan kecepatan dalam pemenuhan digital society
					2	Perluasan dan perkuatan jaringan telekomunikasi																



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
Visi	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA			
Misi III	Memperkuat Sarana dan Prasarana Perekonomian			
			3 Peningkatan akses layanan listrik yang memenuhi standar	9 Meningkatkan jangkauan pelayanan listrik untuk kepentingan aktivitas pelayanan publik dan rumah tangga hingga ke pelosok
			4 Perluasan budaya hemat energi dan pemakaian energi baru dan terbarukan (EBT).	10 Meningkatkan konsumsi energi hijau, bersih, dan terbarukan kepada dunia usaha maupun masyarakat.
	2 Meningkatnya konektivitas yang menghubungkan antar kawasan	Rasio Konektivitas	5 Pengembangan dan pembangunan Infrastruktur transportasi yang nyaman dan aman untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah pembangunan	11 Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan diseluruh daerah
				12 Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah - wilayah yang menjadi strategis daerah
				13 Meningkatkan pola hubungan kerjasama dalam penyediaan infrastruktur skala besar yang melayani interaksi antar provinsi, maupun di dalam provinsi
				14 Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis sungai, rel dan jalan yang aman, nyaman dan terjangkau dan antar moda
				15 Meningkatkan sistem keselamatan lalu lintas transportasi darat maupun transportasi air (pelayaran)
				16 Meningkatkan sistem manajemen transportasi yang terintegrasi
				17 Membangun sistem transportasi yang handal yang menghubungkan antar titik pertumbuhan perekonomian



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
Visi	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA			
Misi III	Memperkuat Sarana dan Prasarana Perekonomian			
				18 Mengupayakan pengembangan jaringan jalan dan infrastruktur lainnya yang ramah lingkungan dan memenuhi prinsip pengamanan lingkungan hidup (eco road)
	3 Terwujudnya pembangunan kawasan - kawasan strategis berdasarkan keseimbangan keruangan.	Persentase Kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang	6 Peningkatan pembangunan wilayah yang terintegrasi sesuai penetapan dalam RTRW	19 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang terpadu antar sektor dalam implementasi pelaksanaan pembentukan kawasan - kawasan strategis, antara lain wilayah metropolitan Banjarbakula, Kawasan industri, Kawasan rawa batang banyu, Kawasan geopark, Kawasan pariwisata, dan Kawasan sentra perekonomian lainnya
				20 Meningkatkan kinerja sistem irigasi yang terintegrasi pada kawasan - kawasan pertanian dengan sistem pengelolaan terpadu
				21 Meningkatkan keterpaduan infrastruktur dan Kawasan pendukungnya dalam mendukung percepatan implementasi kawasan strategis daerah yang telah ditetapkan
				22 Memenuhi pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan strategis daerah
				23 Mengembangkan sistem penatagunaan tanah yang terintegrasi lintas sektor

Tabel VI-6 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Misi 4

Untuk mencapai Misi IV, ditetapkan 1 Tujuan, 4 Sasaran, 7 Indikator Kinerja, 7 Strategi, 14 Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan	
Visi	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA				
Misi IV	Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik				
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Saing Daerah	1 Terwujudnya Pemerintahan yg Bebas KKN	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	1 Peningkatan pencegahan korupsi	1 Mengembangkan Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
	2 Meningkatkan Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK Predikat Sakip	2 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah	
			3 Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah	3 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	
			4 Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	4 Peningkatan kualitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah	
				5 Peningkatan kualitas pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	
	3 Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	6 Meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	6 Peningkatan kebijakan internal SPBE	
			7 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	7 Peningkatan tata kelola SPBE	
	4 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kalsel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	7 Memperbaiki sistem dan kelembagaan demokrasi	8 Peningkatan Layanan SPBE	
				9 Peningkatan sikap mental ASN	
				10 Peningkatan kinerja ASN	
				11 Peningkatan kualitas tata kelola sistem pelayanan publik	
				12 Mendorong kebebasan sipil yang sehat	
				13 Meningkatkan pendidikan Politik masyarakat	
				14 Peningkatan pembinaan lembaga demokrasi	

Tabel VI-7 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Misi 5

Untuk mencapai Misi V, ditetapkan 2 Tujuan, 3 Sasaran, 3 Indikator Kinerja, 9 Strategi, 27 Arah Kebijakan

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Visi		KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA							
Misi V		Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana							
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan	IKLH (IKA, IKU, IKL, IKAL)	1	Pengoptimalan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	1	Mengoptimalkan penerapan instrumen lingkungan dan penegakan hukum	
							2	Meningkatkan peran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan LH	
							3	Penurunan beban pencemaran melalui efektifitas pengelolaan limbah, emisi udara dan persampahan	
							4	Mendorong pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampungnya	
							5	Menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering	
					2	Peningkatan kelestarian air tanah	6	Konservasi air tanah pada zona kritis dan rusak	
							7	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	
					3	Peningkatan kualitas lingkungan tambang	8	Monitoring dan pembinaan penguasaan pertambangan	
					4	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif	9	Peningkatan kapasitas pengawasan dan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	
							10	Peningkatan penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di bidang perikanan	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Visi	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA				
Misi V	Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana				
	2	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	<p>5 Peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>11 Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan</p> <p>12 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan</p> <p>13 Mengoptimalkan upaya pemanfaatan lahan yang tidak produktif dengan memberdayakan masyarakat dengan pengembangan tanaman perkebunan</p> <p>14 Mengedukasi masyarakat tentang pendidikan lingkungan sejak dini</p> <p>6 Penggunaan Energi yang berkeadilan</p> <p>15 Peningkatan konsumsi energi hijau, bersih, dan terbarukan kepada dunia usaha maupun masyarakat</p> <p>7 Peningkatan kualitas lingkungan ekosistem dan perairan wilayah pesisir serta penguatan ketahanan bencana</p> <p>16 Pengelolaan ekosistem sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan</p> <p>17 Pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p>	
2	Meningkatnya Ketahanan Bencana	3	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	<p>8 Pemberdayaan masyarakat tanggap bencana</p> <p>18 Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan</p> <p>19 Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana</p> <p>20 Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana</p> <p>21 Peningkatan kapasitas kelembagaan bencana (Tagana) dalam menghadapi bencana</p>



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Visi	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA				
Misi V	Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana				
			22	Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara upaya menjaga keberlanjutan lingkungan demi	
			23	Melatih masyarakat dalam mengenali tanda-tanda bahaya hidro-meteorologis dan geofisika sehingga dapat segera memunculkan respons	
		9	Peningkatan kemampuan mitigasi penanggulangan dan penanganan bencana	24	Meningkatkan sarana prasarana mitigasi dan pengurangan risiko bencana
				25	Meningkatkan sinergi antar OPD/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana
				26	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal
				27	Mempercepat pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik

T a h u n
2 0 2 1 - 2 0 2 6

6.2 Rencana Proyek Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan serangkaian janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024. Prioritas pembangunan daerah merupakan perwujudan agenda prioritas yang akan dilaksanakan selama masa berlakunya RPJMD. Selanjutnya 25 (dua puluh lima) proyek prioritas pembangunan yang telah direncanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih akan menjadi agenda prioritas yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam program pembangunan daerah tahun 2021-2026.

Tabel VI-8 Proyek Prioritas Pembangunan

Misi	Proyek Prioritas Pembangunan
Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudhi Pekerti Luhur	Memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat melalui ketahanan terhadap penyakit menular, penurunan perkawinan anak, stunting, AKI/AKB berbasis Dasa Wisma
	Meningkatkan Pendidikan Vokasi berbasis link and match berkeluaran sesuai dengan dunia usaha
	Beasiswa untuk masyarakat tidak mampu jenjang SMA dan S1, Beasiswa S1, S2 dan S3 untuk ASN
	Memperkuat Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan keterampilan berbasis digital
	Memperkuat nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya (menyediakan Asrama Mahasiswa Ilmu Agama Islam, menyelenggarakan MTQ tingkat Nasional)
	Meningkatkan Indeks Kepemudaan dan Prestasi Olahraga
	Pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata	Mendorong ekonomi syariah (memperkuat Baznas)
	Hilirisasi industri pertambangan dan pertanian
	Pengelolaan dan Pengembangan Kelapa Sawit berkelanjutan
	Mengembangkan Pariwisata berbasis alam (ekowisata)
	Mendorong ekonomi kreatif kearifan lokal berbasis teknologi digital
Mendorong perdagangan berbasis ekonomi digital	
Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	Pemenuhan sarana prasarana dasar untuk standar hidup layak
	Pembangunan kawasan-kawasan ekonomi baru mendukung IKN
	Meningkatkan konektivitas kawasan pertumbuhan ekonomi
	Pemenuhan sarana prasarana pendukung perekonomian
	Penyediaan sumber energi terbarukan bagi pemenuhan kebutuhan energi



Misi	Proyek Prioritas Pembangunan
	Pemenuhan kecepatan akses internet dan pengurangan blank spot
	Pembangunan Rencana Objek Sentral Perkotaan dan Objek Strategis Provinsi lainnya
Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik	Pengembangan smart Province (Provinsi Cerdas)
	Mempermudah perizinan dengan pelayanan berbasis elektronik (SIMAPAN, dukungan implementasi Online Single Submission/OSS)
	Menjaga stabilitas bidang politik, hukum dan keamanan
Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana	Pembangunan ramah lingkungan
	Revolusi hijau
	Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
	Pengendalian Banjir
	Pengendalian Pencemaran Lingkungan
	Martapura Asri (Aman berSih Ramah Indah)

P r o v i n s i
 K A L I M A N T A N
 S E L A T A N
 T a h u n
 2 0 2 1 - 2 0 2 6



Tabel VI-9 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Kalimantan Selatan

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
VISI	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA																	
Misi -1	Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbud Pekerti Luhur					1.058.830.349.820		900.813.650.986		908.335.732.471		936.775.510.491		953.110.137.539		4.757.865.381.307		
Tujuan	Meningkatnya Toleransi dan Nilai-nilai Keagamaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	-	69,1	72,71	122.908.190.378	73,32	30.238.761.272	73,85	30.770.942.917	74,3	31.092.435.479	74,7	31.481.607.757	74,70	246.491.937.803	
Sasaran	Meningkatnya Toleransi Antar dan Intra Umat Beragama	Jumlah Konflik antar dan intra umat beragama	Kasus	0	0	0	122.908.190.378	0	30.238.761.272	0	30.770.942.917	0	31.092.435.479	0	31.481.607.757	0	246.491.937.803	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fasilitas Pembinaan kegiatan keagamaan	%	N/A	100*	100	117.611.698.400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	117.611.698.400	Bro Kesejahteraan Rakyat	
		Tingkat Kondusifitas Kerukunan Umat Beragama	%	N/A	72,71*	73	N/A	73,85	24.722.556.176	74,3	25.093.394.519	74,7	25.376.609.495	75,05	25.666.156.811	75,05	100.858.717.202	Bro Kesejahteraan Rakyat
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks kinerja ORMAS	Indeks	N/A	N/A	80	3.855.554.000	80,32	3.850.000.000	80,64	3.927.000.000	80,96	4.005.540.000	81,29	4.085.650.800	81,28	19.723.744.800	Bakesbangpol
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks ketahanan nasional	Indeks	N/A	2,85*	2,9	612.764.800	2,95	639.196.203	2,97	671.552.315	2,99	656.106.611	3	663.592.788	3	3.243.212.717	Bakesbangpol
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Indeks kewaspadaan nasional	Indeks	N/A	61*	62	828.173.178	63	1.027.008.893	64	1.078.996.083	65	1.054.179.173	66	1.066.207.357	66	5.054.564.684	Bakesbangpol
Tujuan	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Angka	70,91	71,28	71,70	935.922.159.442	72,20	870.574.889.714	72,65	877.564.789.554	73,05	905.683.075.011	73,50	921.628.529.783	73,50	4.511.373.443.504	
Sasaran	Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,29	8,34	8,47	191.432.244.407	8,56	192.193.459.898	8,65	192.517.100.199	8,74	192.619.197.748	8,83	193.011.734.860	8,83	961.773.737.113	
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,68	12,81	12,94	446.675.236.951	13,07	448.451.406.428	13,2	449.206.567.132	13,33	449.444.794.745	13,46	450.340.714.674	13,46	2.244.138.719.930	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SM sederajat dan Pendidikan Khusus	Persen	93,36	93,8*	94,24	618.749.169.602	94,68	483.410.444.854	95,12	484.167.091.016	95,56	484.351.539.774	96	485.294.516.884	96,00	2.555.972.762.131	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM SM sederajat dan Pendidikan Khusus	Persen	66,04	N/A	N/A	N/A	66,94	55.246.409.187	67,24	55.332.882.254	67,54	55.353.961.921	67,84	55.461.729.761	67,84	221.394.983.123	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Guru pendidikan SMA/SMK/Dikus yang profesional	Persen	74,36	75*	75,64	19.136.572.256	76,28	14.950.838.501	76,92	14.974.239.928	77,56	14.979.944.529	78,2	15.009.108.770	78,20	79.050.703.983	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Peserta Didik SMA yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi	%	40	45,5*	N/A	N/A	55,9	25.890.309.590	61,2	25.930.833.752	66,4	25.940.712.387	71,9	25.991.215.991	71,90	103.753.071.720	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Lulusan SMK yang bekerja	%	20	22,76*	N/A	N/A	28,26	32.870.738.822	31,02	32.922.188.927	33,78	32.934.730.996	36,54	32.998.851.154	36,54	131.726.509.899	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Peserta Didik Pendidikan Khusus yang mandiri	%	40,01	41,71*	N/A	N/A	45,11	26.517.000.905	46,81	26.558.505.980	48,51	26.568.623.734	50,21	26.620.349.809	50,21	106.264.480.429	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Guru pendidikan SMA/SMK/Dikus yang profesional	%	74,36	75*	75,64	207.961.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75,64	207.961.700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase Peserta Didik SMA yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi	%	40	45,5*	N/A	N/A	55,9	123.856.664	61,2	125.949.842	66,4	128.078.394	71,9	130.242.919	71,90	508.127.819	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Lulusan SMK yang bekerja	%	20	22,76*	N/A	N/A	28,26	157.250.343	31,02	159.907.874	33,78	162.610.317	36,54	165.358.431	36,54	645.126.964	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		Presentase Peserta Didik Pendidikan Khusus yang mandiri	%	40,01	41,71*	N/A	N/A	45,11	126.854.693	46,81	128.998.537	48,51	131.178.613	50,21	133.395.531	50,21	520.427.374	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase Guru pendidikan SMA/SMK/Dikus yang profesional	%	74,36	75*	75,64	13.777.800	76,28	232.762.768	76,92	254.669.220	77,56	244.211.828	78,20	249.280.285	78,20	994.701.901	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Presentase Lembaga Pendidikan Terakreditasi	%	67,815	85*	N/A	N/A	98	518.400.000	98	518.400.000	98	518.400.000	98	518.400.000	98	2.073.400.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SAstra	Presentase tutur bahasa dan sastra bersertifikat	%	N/A	10*	N/A	N/A	14	600.000.000	16	650.000.000	18	750.000.000	20	800.000.000	20	2.800.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,66	68,83	70,64	129.192.224,376	71,05	132.251.114,025	71,46	135.220.799,276	71,99	161.866.423,779	72,30	175.172.207,218	72,30	733.702.768,674	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	135	104*	112	81.279.726,037	111	51.909.256,077	110	52.849.439,531	109	53.060.898,322	108	53.636.719,444	108	292.736.039,410	Dinas Kesehatan, RSUD Ulin, RSUD Moch Ansoari Saleh, RSJ, Sambang Uhum, RSGM
		Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Angka	9	9*	N/A	N/A	8	33.213.758,507	7	33.815.328,026	7	33.950.628,390	6	34.319.063,331	6	135.298.778,255	Dinas Kesehatan, RSUD Ulin, RSUD Moch Ansoari Saleh, RSJ, Sambang Uhum, RSGM
		Prevalensi Stunting	%	31,75	30*	29	1.241.326,728	26	792.772,689	24	807.131,434	23	810.360,892	21	819.154,993	21	4.470.746,735	Dinas Kesehatan, RSUD Ulin, RSUD Moch Ansoari Saleh, RSJ, Sambang Uhum, RSGM
		Angka Kesakitan	%	N/A	15,6*	13	2.857.597,944	12,5	1.825.003,487	12	1.858.058,056	11,5	1.865.492,434	11	1.885.736,908	11	10.291.888,829	Dinas Kesehatan, RSUD Ulin, RSUD Moch Ansoari Saleh, RSJ, Sambang Uhum, RSGM
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Fasyankes dengan SDM Sesuai Standar	%	N/A	56,84*	58	35.310.236,620	59,16	35.582.993,112	60,34	36.821.942,337	61,55	61.560.891,563	62,78	73.139.840,788	62,78	242.415.904,419	Dinas Kesehatan, RSJ, Sambang Uhum, RSGM
		Presentase SDM Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi sesuai standar/akreditasi kedokteran	%	100	100*	100	2.090.311,548	100	2.271.254,879	100	2.350.336,745	100	3.929.418,610	100	4.668.500,476	100	15.309.822,259	Dinas Kesehatan, RSJ, Sambang Uhum, RSGM
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase Faskes dengan tatakelola Farmalikes sesuai standar	%	58,4	71*	77	5.421.625,000	78,2	5.421.625,000	80	5.421.625,000	84	5.421.625,000	89	5.421.625,000	89	27.108.125,000	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	%	N/A	75,46*	77	991.400,500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	77	991.400,500	Dinas Kesehatan
		Presentase Penerapan Cluster gerakan masyarakat hidup sehat di Kabupaten/Kota	%	61,54	73,85*	N/A	N/A	76,92	1.234.450,273	84,62	1.296.938,146	92,31	1.267.108,569	100	1.281.566,278	100	5.080.063,267	Dinas Kesehatan
		Cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	88,60	91,19	90	480.000,000	93	580.917,776	95	610.323,834	98	596.286,385	98	603.090,013	98	2.870.618,008	Dinas Kesehatan
Sasaran	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88,86	88,91	88,97	1.291.982,790	89,04	2.077.828,395	89,1	2.218.329,312	89,16	2.260.762,218	89,23	2.450.802,809	89,23	10.299.705,523	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,48	74,44	75,39	553.706,910	76,33	890.497,883	77,27	950.712,562	78,21	968.898,093	79,15	1.050.344,061	79,15	4.414.159,510	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase ARG pada belanja langsung APBD	%	N/A	19,6*	20	1.223.302,200	30	612.732,363	40	565.143,475	50	454.445,175	60	459.630,395	60	3.315.253,608	DP3A



KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		TPAK Perempuan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	60	442.732.363	61	465.143.475	62	454.445.175	63	459.630.395	63	1.821.951.408	DP3A
2.8.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Angka	N/A	0,98*	1	293.344.900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	293.344.900	DP3A
		Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPPo (per 100.000)penduduk perempuan	Rasio	N/A	N/A	N/A	N/A	94	217.319.041	93	228.319.731	92	223.068.377	91	225.613.587	91	894.320.737	DP3A
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	144.879.361	100	152.213.154	100	148.712.251	100	150.409.058	100	596.213.824	DP3A
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD menerapkan sistem data gender dan anak lengkap	%	N/A	100*	100	142.657.000	100	92.984.828	100	97.691.720	100	95.444.810	100	96.533.836	100	525.312.194	DP3A
		Persentase Kabupaten/Kota Yang Membuat Data Gender (Laporan Situasi Perempuan & Anak)	%	N/A	100*	N/A	N/A	100	92.984.828	100	97.691.720	100	95.444.810	100	96.533.836	100	382.655.194	DP3A
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kebutuhan ber- KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	N/A	7,80*	7,96	186.385.600	8,12	250.346.747	8,28	263.019.300	8,45	256.969.856	8,62	259.901.882	8,62	1.216.623.384	Disdukcapil KB
		Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	N/A	1,47*	N/A	N/A	1,53	250.346.747	1,56	263.019.300	1,59	256.969.856	1,62	259.901.882	1,62	1.030.237.784	Disdukcapil KB
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penurunan Unmidneed	%	12	N/A	N/A	N/A	9	432.000.000	8	518.400.000	7	622.080.000	6	746.496.000	6	2.318.976.000	Disdukcapil KB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan UPPKS	%	80	N/A	N/A	N/A	84,9	432.000.000	86,6	518.400.000	88,3	622.080.000	90,1	746.496.000	90,09	2.318.976.000	Disdukcapil KB
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	50,67	51,08	52	12.279.914.900	52,665	9.885.765.964	53,33	10.386.183.437	53,995	10.147.301.218	54,66	10.263.081.924	54,66	52.962.247.442	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	%	N/A	76,44*	78	12.001.816.100	79,56	2.434.314.096	81,15	2.557.539.075	82,77	2.498.715.677	84,43	2.527.226.023	84,43	22.019.610.971	Dispora
		Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih (White Collar)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	0,408	2.434.314.096	0,42	2.557.539.075	0,42	2.498.715.677	0,43	2.527.226.023	0,44	10.017.794.871	Dispora
		Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	6,01	2.434.314.096	6,02	2.557.539.075	6,04	2.498.715.677	6,05	2.527.226.023	6,06	10.017.794.871	Dispora
		Persentase Pemuda Berpengadapan Dalam Rapat Kemasyarakatan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	5,01	2.434.314.096	5,02	2.557.539.075	5,03	2.498.715.677	5,04	2.527.226.023	5,05	10.017.794.871	Dispora
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepramukaan	%	N/A	29,4*	30	278.098.800	30,6	148.509.580	31,21	156.027.135	31,84	152.438.511	32,47	154.177.834	32,47	889.251.859	Dispora
Sasaran	Menurunnya Pernikahan Anak	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	%	16,24	16,26	15,01	553.265.400	13,77	572.514.730	12,53	606.557.425	11,29	690.306.605	10,04	698.183.003	10,04	3.120.827.162,80	
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	65,11	69,87	69,89	1.416.487.730	69,91	1.498.178.476	69,93	1.842.406.555	69,95	1.806.972.604	69,97	1.824.146.623	69,97	8388191988	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	Poin	0	80,36*	82	553.265.400	83,64	572.514.730	85,31	606.557.425	87,02	690.306.605	88,76	698.183.003	88,76	3.120.827.163	DP3A
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%	N/A	73,5*	75	613.886.800	76,5	689.785.251	78,03	934.826.180	79,5906	913.325.178	81,182412	923.746.218	81,18	4.075.569.627	DP3A



KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ PEMBANGUNAN/ DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Anak korban Kekerasan	Rasio	N/A	1,176*	1,2	802.600.930	1,224	292.797.742	1,248	302.526.792	1,273	297.882.475	1,299	300.133.468	1,299	1.995.941.407	DP3A
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	N/A	100*	N/A	N/A	100	292.797.742	100	302.526.792	100	297.882.475	100	300.133.468	100	1.193.340.477	DP3A
		Persentase korban kekeraan anak yang terlayani	%	N/A	100*	N/A	N/A	100	222.797.742	100	302.526.792	100	297.882.475	100	300.133.468	100	1.123.340.477	DP3A
Sasaran	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	0	58,64*	60,15	28.277.593.200	61,67	19.866.812.736	63,2	20.813.857.070	64,74	20.596.535.176	66,29	20.778.531.964	66,29	110.333.330.146	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	%	N/A	3,68*	3,76	4.108.868.500	-	-	-	-	-	-	-	-	3,76	4.108.868.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Kebudayaan Daerah yang Berkembang	%	N/A	N/A	N/A	N/A	36,36	4.384.083.859	45,45	4.504.766.184	54,55	4.447.156.562	63,64	4.475.078.618	63,64	17.811.085.223	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	%	N/A	3,68*	3,76	6.092.214.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,76	6.092.214.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Kesenian tradisional yang Berkembang	%	N/A	N/A	N/A	N/A	26,67	200.414.000	33,33	210.558.957	40	205.716.101	46,67	208.063.321	46,67	824.752.379	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	%	N/A	3,68*	3,76	3.278.177.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,76	3.278.177.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase cagar budaya non benda yang terlindungi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	7	281.173.326	7,14	590.812.641	7,28	577.223.950	7,43	583.810.075	7,58	2.033.019.992	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Objek Sejarah yang ditetapkan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	10	100.000.000	20	115.000.000	30	132.250.000	40	152.087.500	40	499.337.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	%	N/A	3,68*	3,76	593.292.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,76	593.292.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	16,27	655.877.863	17,97	689.078.400	19,66	673.229.597	21,36	680.911.147	21,36	2.699.097.006	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	%	N/A	3,68*	3,76	5.404.769.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,76	5.404.769.300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	%	N/A	N/A	N/A	N/A	15	5.418.341.263	17,5	5.515.447.698	25	5.469.092.401	30	5.491.559.745	30,00	21.894.441.108	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	N/A	58,8*	N/A	N/A	61,2	3.425.877.108	62,42	3.586.582.984	63,67	3.509.867.485	64,95	3.547.049.720	64,95	14.069.377.297	Dispersip
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	N/A	N/A	45	6.838.637.900	46,35	3.425.877.108	47,74	3.586.582.984	49,17	3.509.867.485	50,65	3.547.049.720	52,17	20.908.015.197	Dispersip
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	%	N/A	100*	100	677.431.100	100	678.833.382	100	713.195.928	100	696.792.422	100	704.742.823	100	3.470.995.654	Dispersip
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Makam Pahlawan dalam Kondisi Bak	%	N/A	100*	100	1.284.203.400	100	1.296.334.825	100	1.301.831.294	100	1.375.339.174	100	1.388.179.294	100	6.645.887.987	Dinas Sosial
Sasaran	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga	Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang berolahraga	%	0	0	35	25.133.198.102	37	12.877.097.931	39	13.128.936.628	41	13.417.771.086	43	13.568.585.854	43	78.125.589.601	
		Jumlah Medali Emas	Buah	0	45	30	100.532.792.406	40,00	51.508.391.724	50	52.515.746.513	35	53.671.084.343	45	54.274.343.416	200	312.502.358.403	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet Binaan PPLP Yang Berprestasi	%	N/A	24,5*	25	125.665.990.508	25,50	12.877.097.931	26,01	13.128.936.628	26,53	13.417.771.086	27,06	13.568.585.854	27,06	178.658.382.007	Dispora



KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
		Persentase Prasarana dan Sarana Olahraga Berstandar	%	N/A	N/A	N/A	N/A	15,03	12.877.097.931	15,06	13.128.936.628	15,09	13.417.771.086	15,12	13.568.585.854	15,15	52.992.391.499	Dispora	
		Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga	%	N/A	N/A	N/A	N/A	35,87	12.877.097.931	35,94	13.128.936.628	36,02	13.417.771.086	36,09	13.568.585.854	36,16	52.992.391.499	Dispora	
		Persentase Atlet Olahraga Berprestasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	20,04	12.877.097.931	20,08	13.128.936.628	20,12	13.417.771.086	20,16	13.568.585.854	20,20	52.992.391.499	Dispora	
		Persentase Tenaga Keolahragaan Berprestasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	15,03	12.877.097.931	15,06	13.128.936.628	15,09	13.417.771.086	15,12	13.568.585.854	15,15	52.992.391.499	Dispora	
Misi -2	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata							212.252.971.043									1.119.813.866.777		
Tujuan	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	-1,81	3,48	4,0 - 4,5		135.001.209.140	4,5 - 5,2	120.758.961.379	5,2 - 6,0	126.476.345.661	6,0 - 6,24	135.752.181.127	6,24 - 6,5	142.407.918.394	6,24 - 6,5	660.396.615.701	
Sasaran	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	-0,96	1,16	0,65 - 2,5		110.812.058.590	1,5 - 3,45	93.971.235.486	3,15 - 3,95	97.451.853.037	3,5 - 4,2	101.264.551.133	3,75 - 4,75	105.658.868.023	3,75 - 4,75	509.158.566.269	
		LPE Sektor Industri Pengolahan	%	-3,38	6,23	1,9 - 2,57		5.532.668.750	2,5 - 3,65	6.160.000.000	3,65 - 4,65	6.650.000.000	4,5 - 5,25	8.090.000.000	5,25 - 6,5	8.220.000.000	5,25 - 6,5	34.652.668.750	
		LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	%	-3,38	2,2	6,95 - 7,2		2.004.239.300	7,2 - 7,85	2.650.000.000	7,85 - 8,2	2.900.000.000	8,2 - 9,1	3.010.000.000	9,1 - 10	3.215.000.000	9,1 - 10	13.779.239.300	
		LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	%	-2,02	2,3	6,18 - 6,61		11.977.491.300	6,61 - 7,1	12.571.577.706	7,1 - 7,8	13.398.735.476	7,8 - 8,25	16.643.609.024	8,25 - 9,1	18.070.969.927	8,25 - 9,1	72.662.383.433	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Yang Memenuhi Stok Pangan Minimal	%	69,78	71,98*	74,18		351.969.900	76,37	600.000.000	78,57	700.000.000	80,77	800.000.000	82,97	900.000.000	82,97	3.351.969.900	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Koefisien Variasi (CV) harga beras di tingkat konsumen (%)	%	7,44	7,3*	7,2		482.680.400	7,1	497.988.600	7	520.624.445	6,9	588.531.982	6,8	633.803.672	6,80	2.723.629.099	Dinas Ketahanan Pangan
		Konsumsi beras per kapita per tahun (Kg/Kap/Th)	Kg/Kap/Th	96,1	95,3*	93,6		520.000.000	91,9	536.491.790	90,2	560.877.781	88,5	634.035.752	86,8	682.807.733	86,80	2.934.213.056	Dinas Ketahanan Pangan
		Konsumsi pangan lokal per kapita per tahun (Kg/Kap/Th)	Kg/Kap/Th	19,25	20,03*	20,94		596.598.500	21,85	615.519.610	22,76	643.497.774	23,67	727.432.267	24,58	783.388.595	24,58	3.366.436.746	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Desa Rawan Pangan	%	16,28	16,19*	16,09		304.868.100	15,99	400.000.000	15,89	520.000.000	15,79	630.000.000	15,69	650.000.000	15,69	2.504.868.100	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Komoditas Pangan Yang Aman Dikonsumsi	%	80	80*	80		303.131.500	82	450.000.000	84	560.000.000	86	670.000.000	88	690.000.000	88	2.673.131.500	Dinas Ketahanan Pangan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura	%	0,94	N/A	0,78 (TP) dan 1,83 (Hortikultura)		45.954.133.800	1,22	46.018.788.039	1,40	46.925.234.714	1,42	47.698.947.104	1,50	48.737.374.669	1,50	235.334.478.325,10	Dinas TPH
		Produktivitas Tanaman Perkebunan (Karet) per Hektar per tahun	Kg/ha	451,98	72*	75,33		1.951.070.100	75,5	1.953.815.119	76	1.992.300.035	76,5	2.025.149.465	77	2.069.237.881	77	9.991.572.601	Dinas Bunak
		Persentase peningkatan produksi peternakan	%	3	4*	5		5.784.336.937	6	5.792.475.093	7	5.906.571.313	8	6.003.960.009	9	6.134.668.923	9	29.622.012.275	Dinas Bunak
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura	%	1,045	N/A	2,5 (TP) dan 2 (Hortikultura)		5.545.065.100	2,25	5.786.201.852	2,25	5.830.932.694	2,25	5.917.667.762	2,25	6.062.123.801	2,25	29.141.991.209	Dinas TPH
		Persentase ketersediaan prasarana perkebunan dan peternakan yang sesuai untuk peningkatan produksi	%	N/A	N/A	15		1.903.168.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	1.903.168.700	Dinas Bunak
		Persentase ketersediaan prasarana perkebunan yang sesuai untuk peningkatan produksi	%	12	13*	N/A		N/A	16	1.500.000.000	17	1.511.595.908	18	1.534.080.882	19	1.571.529.292	19	6.117.206.082	Dinas Bunak



KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase ketersediaan prasarana peternakan yang sesuai untuk peningkatan produksi	%	10	13*	N/A	N/A	16	485.931.285	17	489.687.827	18	496.971.929	19	509.103.499	19	1.981.694.540	Dinas Bunak
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian jumlah kasus penyakit hewan menular	%	10,51	75*	80	1.164.733.400	85	1.577.000.000	90	1.813.000.000	95	2.085.000.000	100	2.398.000.000	100	9.037.733.400	Dinas Bunak
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luasan pertanian yang dapat dikendalikan akibat bencana alam	%	2,9	2,5*	2,5	2.891.359.805	2,5	3.614.199.756	2,5	4.517.749.695	2,5	5.647.187.119	2,5	7.058.983.899	2,5	23.729.480.274	Dinas TPH
		Luas areal pengendalian penanggulangan bencana	ha	5000	5500*	6300	467.486.800	6500	619.942.000	6600	712.933.000	6700	819.873.000	6800	942.854.000	6800	3.563.088.800	Dinas Bunak
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi teknis usaha perkebunan	%	100	100*	100	221.696.900	100	292.021.000	100	335.825.000	100	386.199.000	100	444.128.000	100	1.679.869.900	Dinas Bunak
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi	ton	207229	260000*	264476.48	11.604.238.990	211000	8.200.000.000	212500	8.500.000.000	214000	8.750.000.000	215500	9.000.000.000	215500	46.054.238.990	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	ton	139079	155.000*	157000	7.148.144.408	167419	7.500.000.000	177272	7.750.000.000	187465	7.850.000.000	198450	8.000.000.000	198450	38.248.144.408	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri	%	3	5*	5,75	5.071.045.450	6	5.300.000.000	6,25	5.500.000.000	7,65	6.740.000.000	7,72	6.800.000.000	10	29.411.045.450	Dinas Perindustrian
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	15	16*	18,75	284.727.300	20,56	560.000.000	25,7	700.000.000	30	820.000.000	40	850.000.000	26	3.214.727.300	Dinas Perindustrian
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	50	65*	100	176.896.000	100	300.000.000	100	450.000.000	100	530.000.000	100	570.000.000	100	2.026.896.000	Dinas Perindustrian
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tertib Usaha	%	100	100	100	216.351.900	100	450.000.000	100	475.000.000	100	500.000.000	100	525.000.000	100	2.166.351.900	Dinas Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	N/A	0,05*	0,10	148.218.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,10	148.218.000	Dinas Perdagangan
		Persentase Rekomendasi Revitalisasi Pasar Rakyat yang dilanjutkan	%	100	N/A	N/A	N/A	100	400.000.000	100	410.000.000	100	420.000.000	100	430.000.000	100	1.660.000.000	Dinas Perdagangan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	-26,96	57,71	5,96	670.119.600	8	700.000.000	10	745.000.000	12	790.000.000	14	810.000.000	14	3.735.119.600	Dinas Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	75	100*	100	259.813.000	100	330.000.000	100	375.000.000	100	390.000.000	100	435.000.000	100	1.789.813.000	Dinas Perdagangan
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan	%	50	60*	65	709.736.800	70,5	770.000.000	80	875.000.000	83	910.000.000	85	1.015.000.000	85	4.279.736.800	Dinas Perdagangan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	10,46	10,28	10,50	503.761.000	11	750.000.000	12	800.000.000	13	850.000.000	14	900.000.000	14	3.803.761.000	Dinas Perdagangan
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggulan yang sesuai Sapta Pesona	%	N/A	N/A	20	4.225.298.400	20	4.300.000.000	20	4.450.000.000	20	7.260.000.000	20	7.986.000.000	100	28.221.298.400	Dinas Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0,09	5*	5	1.001.328.000	5	1.021.333.027	5	1.055.061.327	5	1.087.157.213	5	1.151.326.261	5	5.316.205.829	Dinas Pariwisata



KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	99,9	10*	10	5.000.345.300	10	5.100.244.678	10	5.268.674.149	10	5.428.951.811	10	5.749.393.665	10	26.547.609.604	Dinas Pariwisata
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Kenaikan Hak Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif yang telah dilindungi	%	N/A	N/A	20	629.379.900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	629.379.900	Dinas Pariwisata	
		Persentase Peningkatan Pendapatan Produk Kreatif	%	N/A	N/A	N/A	N/A	5	800.000.000	5	1.050.000.000	5	1.235.000.000	5	1.458.500.000	5	4.543.500.000	Dinas Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Tingkat hunian okomodasi	%	37,65	38*	40	1.121.139.700	44	1.350.000.000	48	1.575.000.000	52	1.632.500.000	56	1.725.750.000	56	7.404.389.700	Dinas Pariwisata
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Bidang Kehutanan Terhadap Pemenuhan Pembayaran PNPB dan Restribusi Daerah	%	100	100*	100	23.617.375.250	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	23.617.375.250	Dihut	
		Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNPB dan Retribusi Daerah	%	100	100*	100	N/A	100	6.030.861.343	100	6.061.022.850	100	6.299.514.863	100	6.590.864.059	100	24.982.263.115	Dihut
		Persentase peningkatan unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat	%	N/A	N/A	10	N/A	10	1.500.000.000	10	1.600.000.000	10	1.700.000.000	10	1.800.000.000	50	6.600.000.000	Dihut
Sasaran	Meningkatkan Investasi yang berdampak ke daerah	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun Rupiah	7,76	12,72	11,66	4.674.751.200	12,55	5.406.148.187	13,52	6.075.757.148	14,55	6.744.020.969	15,67	7.243.080.444	15,67	30.143.757.949	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi pelaksanaan kemitraan	%	N/A	100*	100	265.806.400	100	383.445.000	100	395.388.000	100	425.000.000	100	440.931.600	100	1.910.571.000	DPMPPTSP
		Persentase Potensi Investasi Daerah berbasis lingkungan	%	N/A	20*	20	190.569.500	25	215.545.000	30	227.488.000	35	251.285.200	40	260.000.000	40	1.144.887.700	DPMPPTSP
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan calon investor	%	N/A	30*	30	963.166.600	32	1.295.520.000	36	1.411.008.000	40	1.511.008.000	42	1.726.496.000	42	6.907.198.600	DPMPPTSP
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM Peningkatan (Pelayanan) pengaduan	Poin	85,25	85*	88,25	1.163.635.100	88,5	1.222.400.000	88,75	1.378.880.000	89	1.468.864.000	89,25	1.599.840.000	95	6.833.619.100	DPMPPTSP
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	%	100	100*	100	547.438.300	100	364.000.000	100	471.744.000	100	579.488.000	100	599.653.200	100	2.562.323.500	DPMPPTSP
		Persentase Perusahaan yang aktif dalam investasinya	%	25,76	30*	35	324.842.400	40	673.600.000	45	713.930.400	50	941.422.640	50	1.032.685.200	50	3.686.480.640	DPMPPTSP
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi	%	100	100*	100	212.545.800	100	502.200.000	100	689.944.000	100	797.688.000	100	805.432.000	100	3.007.809.800	DPMPPTSP
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Regulasi Lingkup Perekonomian yang Dimplementasikan	%	93	100*	100	1.006.747.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	1.006.747.100	Biro Perekonomian	
		Prosentase BUMD yang Sehat	%	60	100*	100	N/A	100	340.653.722	100	357.897.613	100	349.665.968	100	353.655.657	100	1.401.872.959	Biro Perekonomian
		Prosentase BLUD yang Baik	%	30	100*	100	N/A	100	408.784.466	100	429.477.136	100	419.599.161	100	424.386.788	100	1.682.247.551	Biro Perekonomian
Tujuan	Menurunya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan	Persentase Penduduk Miskin	%	4,38	4,83	4,80 - 4,60	39.167.445.303	4,60 - 4,40	39.988.202.235	4,40 - 4,22	41.272.529.032	4,22 - 4,05	41.251.410.864	4,05 - 3,77	41.722.089.462	4,05 - 3,77	203.401.676.897	
		Indeks Gini	Indeks	0,332	0,33	0,328	29.924.643.950	0,326	43.470.990.139	0,324	45.208.388.140	0,322	40.800.252.688	0,31	42.019.626.613	0,31	201.423.901.529	



KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
Sasaran	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PKKS yang Mandiri	%	18,79	19,00*	19,29	39.167.445.303	19,79	39.988.202.235	20,29	41.272.529.032	20,79	41.251.410.864	21,29	41.722.089.462	21,29	203.401.676.897	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	N/A	10,38*	10,6	1.827.991.100	10,81	2.049.308.005	11,03	2.153.043.976	11,25	2.103.523.964	11,36	2.127.525.173	11,47	10.261.392.218	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PKKS yang Mandiri	%	18,79	19,00*	19,29	32.036.213.113	19,79	32.313.367.210	20,29	33.149.069.858	20,79	33.168.241.251	21,29	33.546.690.884	21,29	164.213.582.315	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Pendapatan Penduduk Miskin	%	N/A	6,35*	6,48	5.303.241.090	6,61	5.625.527.021	6,74	5.970.415.198	6,88	5.979.645.649	7,01	6.047.873.406	7,01	28.926.702.364	Dinas Sosial
Sasaran	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Rupiah per Orang per Tahun	12.032.000	12.143.000	12.146.875	18.312.191.800	12.208.904	32.269.688.637	12.266.652	33.731.851.326	12.320.671	26.894.323.542	12.371.414	27.804.672.375	12.371.414	139.012.727.679	
		Nilai Tukar Petani	%	99,18	101,58*	102,23	11.612.452.150	102,7	11.201.301.502	103,18	11.476.536.814	103,69	13.905.929.145	103,8	14.214.954.239	103,8	62.411.173.851	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	25	30*	35	485.292.500	40	749.234.600	45	1.025.000.000	50	1.175.000.000	55	1.350.000.000	55	4.784.527.100	Dinas Koperasi UKM
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	20	30*	33	287.799.300	36	700.000.000	39	825.000.000	42	925.000.000	50	1.025.000.000	50	3.762.799.300	Dinas Koperasi UKM
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang telah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	N/A	10*	12	2.729.913.800	14	3.099.914.000	16	3.099.964.000	18	3.179.964.000	20	3.219.964.000	80	15.239.719.800	Dinas Koperasi UKM
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	22	23*	25	927.378.300	25	1.100.000.000	31	1.250.000.000	39	1.350.000.000	47	1.550.000.000	47	6.177.378.300	Dinas Koperasi UKM
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	%	0,5	1*	1,8	2.621.315.100	2	2.700.000.000	2,2	2.750.000.000	2,4	2.810.000.000	2,6	2.925.000.000	11	13.806.315.100	Dinas Koperasi UKM
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	0,8	1*	1,8	2.926.131.100	1,9	3.269.390.000	2	3.338.000.000	2,1	3.401.000.000	2,2	3.521.000.000	10	16.455.521.100	Dinas Koperasi UKM
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Indeks Ketahanan Sosial	Poin	N/A	0,74*	0,763	8.334.361.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,76	8.334.361.700	DPMD	
		Indeks Ketahanan Ekonomi	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	0,61	8.379.871.948	0,62	8.897.190.066	0,64	1.365.054.695	0,65	1.380.629.969	0,66	20.022.746.678	DPMD
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Pengumpulan ZIS	%	2	5*	5	N/A	5	12.361.278.088	5	12.546.697.260	5	12.688.304.847	5	12.833.078.406	5	50.429.358.601	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Inflasi yang Stabil	%	0,79	3 ± 1%*	3 ± 1%	N/A	3 ± 1%	613.176.699	3 ± 1%	644.215.703	3 ± 1%	629.398.742	3 ± 1%	636.580.182	3 ± 1%	2.523.371.326	Biro Perekonomian



KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	N/A	0,05*	0,1	616.436.500	0,11	681.562.703	0,3	698.401.311	0,4	777.783.320	0,5	906.077.476	0,5	3.680.261.309	Dinas Perdagangan
		Persentase kinerja realisasi pupuk	%	N/A	96	90	152.342.400	91	168.437.297	92	172.598.689	93	192.216.680	94	223.922.524	94	909.517.591	Dinas Perdagangan
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelembagaan ketenagaan dan penerapan penyuluhan pertanian	%	N/A	N/A	100	5.932.520.650	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	5.932.520.650	Dinas TPH	
		Persentase Kelembagaan Penyuluhan yang Nak Kelas	%	N/A	N/A	N/A	N/A	3,73	2.531.927.640	3,88	2.573.448.183	4,04	2.591.540.378	4,21	2.624.369.242	4,21	10.321.285.444	Dinas TPH
		Persentase SDM Pertanian yang berkualitas	%	N/A	N/A	N/A	N/A	1,39	952.488.489	1,41	968.108.145	1,43	974.914.267	1,48	987.264.191	1,48	3.882.775.092	Dinas TPH
		Persentase Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian yang Diterapkan Oleh Petani	%	N/A	N/A	N/A	N/A	21,13	2.507.988.962	22,23	2.549.116.940	23,33	2.567.038.078	24,44	2.599.556.554	24,44	10.223.700.534	Dinas TPH
		Persentase Peningkatan Penguatan Kelembagaan Perkebunan dan Peternakan	%	8	9*	10,83	567.352.300	11	573.079.305	12	582.477.111	13	586.572.118	14	594.002.640	14	2.903.483.473	Dinas Bunak
		Prosentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perkebunan dan Peternakan	%	70	75*	75	739.282.900	75	746.745.418	75	758.991.138	75	764.327.097	75	774.009.366	75	3.783.355.919	Dinas Bunak
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi ikan masyarakat	Kg/Kap/tn	60,24	61*	62,06	1.048.416.200	63	1.310.000.000	64	1.410.000.000	65	2.400.000.000	66	2.500.000.000	66	8.668.416.200	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN BERKARYAWAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan perhutanan sosial yang operasional	%	N/A	25*	25	2.556.101.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	2.556.101.200	Dihut	
		Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	%	N/A	N/A	10	N/A	10	1.115.894.990	10	1.119.179.595	10	2.422.138.464	10	2.369.172.064	50	7.026.385.114	Dihut
Tujuan	Menurunnya tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,74	4,95	4,39	8.159.672.650	4,22	10.154.000.000	4,05	11.342.000.000	3,88	12.338.000.000	3,71	12.598.000.000	3,71	54.591.672.650	
Sasaran	Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,33	69,26	69,74	8.159.672.650	69,94	10.154.000.000	70,16	11.342.000.000	70,38	12.338.000.000	70,6	12.598.000.000	70,60	54.591.672.650	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	100	100*	100	385.789.000	100	425.000.000	100	467.000.000	100	515.000.000	100	565.000.000	100	2.357.789.000	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	21,27	21,3*	21,33	1.567.373.250	21,43	1.570.000.000	21,53	1.700.000.000	21,63	2.150.000.000	21,73	2.200.000.000	21,73	9.187.373.250	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	5,5	6,2*	6,22	130.632.500	6,23	138.000.000	6,24	190.000.000	6,25	210.000.000	6,26	230.000.000	6,26	898.632.500	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga Kerja yang ditempatkan	%	0,48	0,5*	24,87	852.442.300	26,03	870.000.000	27,21	880.000.000	28,41	890.000.000	29,63	900.000.000	29,63	4.392.442.300	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PPP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	9,1	9,2*	11,49	1.012.937.300	12,48	1.100.000.000	13,47	1.200.000.000	14,46	1.900.000.000	15,46	2.100.000.000	15,46	7.312.937.300	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangundangan bidang ketenagakerjaan	%	9,1	9,2*	18,96	2.317.091.900	22,21	2.400.000.000	24,99	2.500.000.000	27,39	2.600.000.000	29,48	2.700.000.000	29,48	12.517.091.900	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi



KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Meningkatnya Kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan Bersertifikat	%	20	23*	18	1.138.043.400	32	1.728.000.000	53	2.580.000.000	72	2.600.000.000	83	2.330.000.000	83	10.376.043.400	Dinas PUPR
		Persentase Pengembangan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi yang terintegrasi melalui 3 layanan dasar (SIPJAKI)	%	70	70*	70	512.284.400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	512.284.400	Dinas PUPR	
		Persentase Pemda di Provinsi yang Menginput Informasi Pembina Jasa Konstruksi dalam SIPJAKI dengan lengkap	%	70	70*	70	N/A	70	1.573.000.000	70	1.350.000.000	70	973.000.000	70	1.073.000.000	100	4.969.000.000	Dinas PUPR
		Persentase Meningkatnya Terlibat Jasa Konstruksi	%	24	27*	5	243.078.600	12	350.000.000	21,5	475.000.000	31,5	500.000.000	41,5	500.000.000	100	2.068.078.600	Dinas PUPR
Misi -3	Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian						796.582.164.667		990.839.278.782		1.099.555.725.119		1.136.457.116.040		1.169.844.783.024		5.193.279.067.632	
Tujuan	Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan	Indeks Williamson	Indeks	0,391	0,383*	0,375	796.582.164.667	0,367	990.839.278.782	0,359	1.099.555.725.119	0,351	1.136.457.116.040	0,343	1.169.844.783.024	0,34	5.193.279.067.632	
Sasaran	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	Indeks	67,56	76,57	79,33	63.983.433.200	81,21	132.319.300.318	85,21	185.433.011.563	87,04	270.162.136.977	88,26	288.983.935.757	88,26	940.881.817.815	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Pelayanan Air Minum	%	77,51	85,49*	88,68	27.464.283.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	88,68	27.464.283.200	Dinas PUPR	
		Cakupan Pelayanan Air Minum yang Layak	%	77,51	85,49*	88,68	N/A	94,34	33.045.000.000	100	64.090.000.000	100	105.181.000.000	100	114.547.735.585	100	316.863.735.585	Dinas PUPR
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan Pelayanan Persampahan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	50,27	6.700.000.000	52,27	7.070.000.000	54,27	11.100.000.000	56,27	7.000.000.000	56,27	31.870.000.000	Dinas PUPR
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Pelayanan Air Limbah	%	84,45	62,33*	90	1.776.977.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	1.776.977.500	Dinas PUPR	
		Cakupan Pelayanan Air Limbah yang Layak	%	84,45	62,33*	90	N/A	93	10.275.000.000	97	25.550.000.000	100	60.100.000.000	100	70.200.000.000	100	166.125.000.000	Dinas PUPR
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Genangan yang Tertangani	%	27,72 Ha (Baseline)	27,72 Ha (Baseline)*	N/A	N/A	7	4.179.000.000	15,9	4.739.000.000	23,7	4.679.000.000	33,4	5.839.000.000	33,4	19.436.000.000	Dinas PUPR
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman di kawasan strategis yang sesuai standar	%	N/A	N/A	N/A	N/A	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.750.000.000	10	2.840.000.000	10	9.590.000.000	Dinas PUPR
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Yang Layak	%	37,43	38,49*	45,98	5.085.455.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	39,47	5.085.455.000	Dinas Perkim	
		Persentase RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni	%	37,51	38,49*	39,47	N/A	43,75	13.550.000.000	48,02	13.550.000.000	52,96	13.550.000.000	57,89	13.550.000.000	57,89	54.200.000.000	Dinas Perkim
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh	%	N/A	N/A	64,63	16.290.620.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	64,63	16.290.620.000	Dinas Perkim	
		Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	%	22,91	26,92*	30,93	N/A	34,97	24.480.000.000	39,19	24.480.000.000	43,61	24.480.000.000	48,07	24.480.000.000	48,07	97.920.000.000	Dinas Perkim
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	%	42,7	43,93*	45,16	6.812.495.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45,16	6.812.495.500	Dinas Perkim	
		Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	%	42,7	43,93*	45,16	N/A	46,41	17.550.000.000	47,66	21.525.000.000	48,91	21.525.000.000	50,16	21.525.000.000	50,16	82.125.000.000	Dinas Perkim



KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2.14.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Wilayah Bebas Blanksot	%	89	90*	100	N/A	91	200.000.000	92	300.000.000	93	400.000.000	94	500.000.000	94	1.400.000.000	Diskominfo
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kapasitas Penyediaan Air Baku	%	13,68	N/A	18,11	3.989.120.000	23,16	4.300.000.000	28,84	4.300.000.000	34,53	4.450.000.000	51,37	4.800.000.000	51,37	21.839.120.000	Dinas PUPR
3.29.06	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang Mandiri	%	100	100*	100	394.936.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	394.936.000	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
		Persentase satuan permukiman yang difasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	450.000.000	100	495.000.000	100	545.000.000	100	600.000.000	100	2.090.000.000	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase rumah tangga tidak mampu berlistrik	%	N/A	N/A	3,54	2.169.546.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,54	2.169.546.000	Dinas ESDM
		Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Tidak Mampu	%	N/A	N/A	N/A	N/A	88,72	10.579.568.130	88,92	11.750.225.829	89,11	14.164.414.177	89,31	15.143.424.768	89,31	51.637.632.904	Dinas ESDM
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang ditangani di TPA Sampah Regional Banjarbakula	%	98	100*	100	N/A	100	5.010.732.188	100	5.583.785.734	100	7.237.722.800	100	7.958.775.404	100	25.791.016.126	DLH
Sasaran	Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Rasio Konektivitas	Rasio	0,55	0,57	0,59	415.332.693.875	0,61	425.008.433.767	0,63	459.537.200.000	0,65	496.991.000.000	0,67	526.662.640.000	0,67	2.323.531.967.642	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kematapan Jalan	%	79,92	76*	81	284.176.529.975	81	279.733.433.767	82	302.400.000.000	83	327.600.000.000	84	345.800.000.000	84	1.539.709.963.742	Dinas PUPR
		Tingkat Aksesibilitas Jalan	%	27,82	30,22*	35,75	108.000.000.000	43,75	118.800.000.000	51,75	129.600.000.000	60,11	140.400.000.000	66,84	151.200.000.000	66,84	648.000.000.000	Dinas PUPR
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Memenuhi Standar di Ruas Jalan Provinsi	%	N/A	N/A	17	8.575.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17	8.575.000.000	Dishub
		Persentase rekomendasi andalain yang ditindaklanjuti	%	N/A	N/A	20	100.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	100.000.000	Dishub
		Persentase Auditor, inspektor, UPPKB, Perusahaan dan Pengemudi Angkutan Umum yang dibina	%	N/A	N/A	15	325.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	325.000.000	Dishub
		Persentase manajemen rekayasa lalulintas di jalan provinsi	%	17,6	19,5*	20	9.806.889.900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	9.806.889.900	Dishub
		Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa	%	17,6	19,5*	20	N/A	30	14.917.500.000	40	15.492.750.000	50	16.240.250.000	60	16.315.000.000	60	62.965.500.000	Dishub
		Persentase Ketersediaan Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar Untuk Mengangkut Penumpang/Barang	%	N/A	N/A	67,5	2.500.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	67,5	2.500.000.000	Dishub
		Persentase Terangkutnya Penumpang dan Barang	%	65	65*	67,5	N/A	70	2.065.500.000	72,5	2.145.150.000	75	2.248.650.000	77,5	2.259.000.000	77,5	8.718.300.000	Dishub
		Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Penggunaan Jalan di Kalsel	%	635 kejadian	3*	2,65	N/A	2,6	5.967.000.000	2,5	6.197.100.000	2,25	6.496.100.000	2	6.526.000.000	2	25.186.200.000	Dishub
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Terkait Angkutan Perairan yang ditindaklanjuti	%	N/A	N/A	20	125.416.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	125.416.200	Dishub



KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi sesuai standard	%	N/A	N/A	20	1.667.709.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	1.667.709.700	Dishub
		Persentase Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Antar Kota dan Kabupaten dalam Provinsi yang Beroperasi	%	20	40*	40	56.148.100	60	2.975.000.000	60	3.152.200.000	60	3.456.000.000	60	4.012.640.000	60	13.651.988.100	Dishub
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	2.200.000.000	Dishub
Sasaran	Terwujudnya pembangunan kawasan-kawasan strategis berdasarkan keseimbangan keuangan	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	%	85	83,5	84	317.266.037.592	84,5	433.511.544.697	85	454.585.513.556	85,5	369.303.979.063	86	354.198.207.267	86	1.928.865.282.175	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	85	86*	86	5.171.376.900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	86	5.171.376.900	Dinas PUPR	
		Nilai Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	80	80.5*	81	N/A	82	26.800.000.000	83	23.500.000.000	84	20.500.000.000	85	25.400.000.000	85	96.200.000.000	Dinas PUPR
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase infrastruktur rigasi dalam kondisi baik	%	30	40.5*	54,03	50.273.387.365	54,43	80.980.000.000	54,83	84.610.000.000	55,23	86.002.084.796	55,63	86.040.000.000	55,63	387.905.472.161	Dinas PUPR
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Sarana dan Prasarana Publik dan Aparatur Perkantoran dalam Kondisi Baik	%	88	100*	100	42.108.565.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	42.108.565.700	Dinas PUPR	
		Persentase sarana dan prasarana Bangunan Gedung dalam kondisi baik	%	88	100*	100	N/A	100	81.398.000.000	100	100.438.000.000	100	129.618.000.000	100	115.798.000.000	100	427.252.000.000	Dinas PUPR
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Sarana dan Prasarana Publik dan Aparatur Perkantoran dalam Kondisi Baik	%	88	100*	100	40.103.922.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	40.103.922.300	Dinas PUPR	
		Persentase sarana dan prasarana Bangunan dan Lingkungannya dalam kondisi baik	%	88	100*	100	N/A	100	64.250.000.000	100	65.550.000.000	100	66.650.000.000	100	60.150.000.000	100	256.600.000.000	Dinas PUPR
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	35,313	44,87*	20	1.310.620.000	40	1.320.620.000	40	1.337.968.632	80	1.471.765.495	100	1.618.942.045	100	7.059.916.172	Dinas PUPR
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	100	100*	20	2.502.602.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	2.502.602.800	Dinas PUPR	
		Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Selesai Tepat Waktu	%	N/A	N/A	20	N/A	40	2.814.248.140	60	3.095.672.954	80	3.745.764.275	100	3.745.764.275	100	13.401.449.644	Dinas PUPR
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	100	100*	20	174.861.722.427	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	174.861.722.427	Dinas PUPR	
		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Selesai Tepat Waktu	%	35,313	44,87*	20	N/A	40	174.861.722.427	60	174.861.722.427	80	60.000.000.000	100	60.000.000.000	100	469.723.444.854	Dinas PUPR
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	100	100*	20	771.850.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	771.850.300	Dinas PUPR	



KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Aset Tanah Provinsi untuk Infrastruktur yang dibebaskan oleh Seksi Pertanahan Dinas PUPR	%	N/A	N/A	20	N/A	40	901.954.130	60	992.149.543	80	1.091.364.497	100	1.200.500.947	100	4.185.969.117	Dinas PUPR
3.29.06	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Ska Areal HPL yang dapat dikembangkan oleh Pemda	%	N/A	N/A	20	161.989.800	40	185.000.000	60	200.000.000	80	225.000.000	100	245.000.000	100	1.016.989.800	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
Misi - 4	Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik						4.276.672.872.189		4.313.214.902.133		4.574.563.778.456		4.418.718.836.140		4.464.638.727.532		22.047.809.116.449	
Tujuan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,47	70,85*	72,05	4.276.672.872.189	73,24	4.313.214.902.133	74,44	4.574.563.778.456	75,64	4.418.718.836.140	76,84	4.464.638.727.532	76,84	22.047.809.116.449	
Sasaran	Tarwujudnya Pemerintahan yg Bebas KKN	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks	3,7	3,8*	3,85	2.412.150.800	3,95	2.417.144.954	4,05	2.539.500.832	4,13	2.481.092.313	4,15	2.509.401.576	4,15	12.359.290.475	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Poin	3,7	3,8*	3,85	2.412.150.800	3,95	2.417.144.954	4,05	2.539.500.832	4,13	2.481.092.313	4,15	2.509.401.576	4,15	12.359.290.475	Inspektorat
Sasaran	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	WTP	1.325.995.135.700	WTP	1.335.264.828.323	WTP	1.367.409.646.236	WTP	1.372.452.848.476	WTP	1.388.112.535.477	WTP	6.789.234.994.210	
		Predikat Sakip	Predikat	BB	A*	A	12.214.850.600	A	11.946.278.429	A	13.269.054.666	A	14.740.093.544	A	16.376.273.018	A	68.546.550.257	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,03	2,6	3,1	13.773.994.700	3,25	14.037.399.900	3,4	14.161.268.000	3,55	20.410.795.000	3,65	22.547.284.000	3,65	84.930.741.600	
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	-	71,17	72	25.247.849.456	75	25.611.186.915	78	26.622.811.197	80	26.596.686.540	82	26.900.154.733	82	130.978.688.841	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase alumni Pelatihan yang Menerapkan Kompetensi Teknis, Manajerial, Sosial Kultural, dan Pemerintahan Sesuai Tujuan Diklat	%	N/A	89,10*	90,00	17.235.024.691	90,90	5.784.091.901	91,81	6.076.882.633	92,73	5.937.114.332	93,65	6.004.856.807	94,59	41.037.970.364	BPSDM
		Persentase Peserta Diklat yang Memenuhi Standar Kompetensi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	95,48	5.784.091.901	95,95	6.076.882.633	96,43	5.937.114.332	96,91	6.004.856.807	96,91	23.802.945.673	BPSDM
		Indeks Kepuasan Pelayanan BPSDM	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	84,05	5.784.091.901	84,47	6.076.882.633	84,89	5.937.114.332	85,32	6.004.856.807	85,32	23.802.945.673	BPSDM
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Visitor (akses) Terhadap Informasi Publik yang Valid	Visitor	200000	200.000*	220000	2.756.855.000	240000	3.201.424.000	260000	3.850.000.000	280000	6.400.000.000	300000	7.500.000.000	1300000	23.708.279.000	Diskominfo
		Persentase Sentimen Positif Terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	%	48	48*	50	6.667.148.900	52	6.363.677.900	54	5.758.204.000	56	9.283.888.000	58	10.109.164.000	58	38.182.082.800	Diskominfo
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase SKPD yang Menerapkan E-Government	%	89	100*	100	2.947.644.700	100	2.930.258.000	100	2.939.165.000	100	3.051.340.000	100	3.085.887.000	100	14.954.294.700	Diskominfo
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral yang Akurat	Jenis	230	230*	235	556.385.000	240	600.000.000	245	650.000.000	250	670.000.000	255	680.000.000	255	3.156.385.000	Diskominfo
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKI)	Poin	3,11	3,11*	3,15	845.961.100	3,19	942.040.000	3,23	963.899.000	3,27	1.005.567.000	3,31	1.172.233.000	3,31	4.929.700.100	Diskominfo
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase perangkat daerah Prov Kalsel dengan kelembagaan yang ideal	%	N/A	100*	100	2.380.618.900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	2.380.618.900	Biro Organisasi
		Nilai laporan kinerja pemda	%	11,71	12*	12,2	N/A	12,3	445.035.050	12,4	511.790.308	12,5	588.558.854	13	676.842.682	13	2.222.226.893	Biro Organisasi



KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Perangkat Daerah dengan kualifikasi nilai SAKIP minimal A	%	N/A	80*	80	N/A	90	386.512.700	95	444.489.605	100	511.163.046	100	587.837.503	100	1.930.002.853	Bro Organisasi
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB dgn baik	%	N/A	50*	60	N/A	70	229.219.610	80	263.602.552	90	303.142.934	100	348.614.374	100	1.144.579.470	Bro Organisasi
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program prioritas dengan tingkat ketercapaian >85%	%	100	100*	100	1.305.811.674	100	1.622.505.642	100	1.795.951.496	100	1.987.938.711	100	2.200.449.359	100	8.912.656.881	Bappeda
		Persentase Dokumen Perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Prov / Kab / Kota dengan nilai baik	%	100	100*	100	1.625.809.326	100	1.622.505.642	100	1.795.951.496	100	1.987.938.711	100	2.200.449.359	100	9.232.654.533	Bappeda
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERJISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja) SKPD Provinsi dengan nilai baik	%	100	100*	100	2.761.044.280	100	2.444.959.931	100	2.706.326.147	100	2.995.632.413	100	3.315.865.517	100	14.223.828.288	Bappeda
		Persentase SKPD Provinsi yang menerapkan perencanaan anggaran berbasis kinerja	%	100	100*	100	1.725.652.675	100	2.826.984.920	100	3.129.189.608	100	3.463.699.977	100	3.833.969.505	100	14.979.496.685	Bappeda
		Persentase program prioritas dengan tingkat ketercapaian >85%	%	N/A	100*	100	2.415.913.745	100	2.368.554.933	100	2.621.753.455	100	2.902.018.900	100	3.212.244.720	100	13.520.485.753	Bappeda
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	7,78	5,15*	N/A	N/A	5,28	259.938.281.273	5,30	264.845.745.419	5,32	265.707.684.830	5,34	268.739.409.514	5,34	1.059.231.121.035	Bakeuda
		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	22,1	26,95*	21	1.300.529.253.900	27,87	547.961.225.419	24,89	564.400.770.431	25,73	565.234.355.968	25,75	571.683.679.969	25,75	3.549.809.285.687	Bakeuda
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	0,48	0,39*	N/A	N/A	0,49	270.565.570.383	0,48	276.262.373.426	0,48	278.666.349.951	0,48	281.845.933.004	0,48	1.107.340.226.765	Bakeuda
		Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	4,36	4,36*	N/A	N/A	1,73	231.244.124.861	2,17	235.609.862.166	2,61	236.376.653.513	3,05	239.073.711.130	3,05	942.304.351.670	Bakeuda
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Assets management	%	24,5	24,5*	25	1.776.384.900	25	1.802.353.181	25	1.935.230.899	25	2.086.120.588	25	2.109.923.224	25	9.710.012.791	Bakeuda
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	%	1,65	1,6*	1,6	15.192.704.368	1,6	15.228.904.399	1,6	15.452.737.375	1,6	15.631.796.334	1,6	15.810.155.130	1,6	77.316.297.606	Bakeuda
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	-5,88	0,05*	0,06	1.470.403.632	0,05	1.473.907.199	0,05	1.495.570.546	0,05	1.512.900.505	0,05	1.530.162.700	0,05	7.482.944.582	Bakeuda
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase SKPD yang menerapkan manajemen talenta Sumber Daya Manusia Aparatur	%	N/A	N/A	85	1.731.945.443	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85	1.731.945.443	BKD	
		Persentase SKPD melaksanakan Pemetaan Talenta SDMA	%	N/A	N/A	N/A	N/A	81	2.370.149.540	82	2.408.390.340	83	2.521.225.549	85	2.549.992.732	85	9.849.758.160	BKD
		Persentase SKPD dengan IP ASN Minimal kategori Sedang	%	N/A	N/A	75	5.828.864.463	76	5.253.769.109	77	5.338.535.208	78	5.588.650.286	80	5.652.416.786	80	27.662.235.852	BKD
		Indek Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Bidang Kepegawaian	Indeks	81,72	83,63*	85	452.014.859	86	634.992.565	87	645.237.751	88	675.467.708	90	683.174.794	90	3.090.887.677	BKD
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OBRK Tanpa Temuan Indikasi Kerugian Negara/Daerah	%	N/A	100*	100	7.026.388.900	100	7.050.461.607	100	7.407.355.974	100	7.236.986.787	100	7.319.560.806	100	36.040.754.074	Inspektorat
Sasaran	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Sangat Baik (4,41)	Sangat Baik (4,42)*	Sangat Baik (4,44)	2.879.717.142.533	Prima (4,51)	2.912.402.584.095	Prima (4,52)	2.938.578.504.136	Prima (4,53)	2.970.134.539.427	Prima (4,54)	2.996.114.672.662	Prima (4,54)	14.696.947.442.853	



KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	%	N/A	100*	100	15.669.892.575	100	15.186.285.549	100	15.955.015.323	100	15.588.049.971	100	15.765.909.621	100,00	78.165.153.039	SATPOLPP DAMKAR	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	N/A	60*	60	2.407.212.470	61	2.091.821.325	62	2.197.709.321	63	2.147.162.007	64	2.171.661.125	64	11.015.566.248	SATPOLPP DAMKAR	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan	%	N/A	39,2*	40	271.339.500	40,80	154.971.579	41,62	162.816.240	42,45	159.071.466	43,30	160.886.472	43,30	909.085.256	Disudicapil KB	
		Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kalimantan Selatan	%	N/A	99,15*	N/A	N/A	99,25	154.971.579	99,30	162.816.240	99,35	159.071.466	99,40	160.886.472	99,40	637.745.756	Disudicapil KB	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran di Kalimantan Selatan	%	N/A	94,52*	95	344.706.200	95,48	115.448.217	95,95	121.292.206	96,43	118.502.486	96,91	119.854.599	96,91	819.803.708	Disudicapil KB	
		Persentase Kepemilikan Akte Kematian Berdasarkan Laporan Peristiwa Kematian pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	%	N/A	100*	N/A	N/A	100	115.448.217	100	121.292.206	100	118.502.486	100	119.854.599	100,00	475.097.508	Disudicapil KB	
		Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akte Perkawinan Pasangan dari Laporan Perkawinan di Kalimantan Selatan	%	N/A	100*	N/A	N/A	100	115.448.217	100	121.292.206	100	118.502.486	100	119.854.599	100,00	475.097.508	Disudicapil KB	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan	%	N/A	90,46*	92,31	727.673.800	94,16	388.420.971	96,04	408.082.840	97,96	398.696.935	99,92	403.246.067	99,92	2.326.120.612	Disudicapil KB	
		Tingkat Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 (satu) Tahun	%	N/A	100*	N/A	N/A	100	388.420.971	100	408.082.840	100	398.696.935	100	403.246.067	100,00	1.598.446.812	Disudicapil KB	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan	%	N/A	90,46*	92,31	118.653.600	94,16	140.348.822	96,04	147.453.279	97,96	144.061.854	99,92	145.705.600	99,92	696.223.155	Disudicapil KB	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Indeks Ketahanan Sosial	Poin	N/A	0,74*	0,763	117.528.000	0,78	160.529.610	0,79	168.655.619	0,81	164.776.539	0,83	166.656.640	0,83	778.146.408	DPMD	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Indeks Ketahanan Sosial	Poin	N/A	0,74*	0,763	1.744.878.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,76	1.744.878.600	DPMD	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Desa	Poin	N/A	60*	N/A	N/A	62	2.133.600.029	64	2.241.602.862	66	2.190.045.996	68	2.215.034.421	68	8.780.283.308	DPMD	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase SKPD yang Mengelola Asip Sesuai NSPK	%	N/A	35,28*	36	2.930.794.900	36,72	2.936.861.645	37,45	3.005.525.582	38,20	3.014.558.494	38,97	3.048.954.606	38,97	14.936.695.227	Dispersip	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase SKPD yang Mengelola Asip Sesuai NSPK	%	N/A	35,28*	36	559.176.100	36,72	560.333.595	37,45	561.697.681	38,20	575.157.634	38,97	581.720.183	38,97	2.838.085.193	Dispersip	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase SKPD yang Mengelola Asip Sesuai NSPK	%	N/A	35,28*	36	6.612.400	36,72	6.626.088	37,45	6.961.500	38,20	6.801.386	38,97	6.878.990	38,97	33.880.363	Dispersip	
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase PD yang melaksanakan Tata Laksana dengan "BAIK"	%	N/A	50*	60	N/A	70	328.505.205	80	377.780.986	90	434.448.134	100	499.615.354	100	1.640.349.678	Biro Organisasi	
		Jumlah Unit Pelayanan Publik dengan Pelayanan Publik Prima (Nilai A)	Jumlah	N/A	1 Unit Pelayanan*	2 Unit Pelayanan	N/A	3 Unit Pelayanan	319.195.150	4 Unit Pelayanan	367.074.423	5 Unit Pelayanan	422.135.586	6 Unit Pelayanan	485.455.924	6 Unit Pelayanan	1.593.861.082	Biro Organisasi	
		Persentase Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	N/A	100*	100	N/A	100	582.762.960	100	670.177.404	100	770.704.015	100	886.309.617	100	2.909.953.995	Biro Organisasi	



KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Perangkat Daerah yang berbasis kinerja	%	N/A	100*	100	N/A	100	715.347.725	100	822.649.884	100	946.047.366	100	1.087.954.471	100	3.571.999.446	Biro Organisasi
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) 100%	%	N/A	100*	100	1.759.397.080	100	2.019.171.030	100	2.121.381.467	100	2.072.589.694	100	2.096.237.942	100	10.068.777.213	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat Kepuasan Masyarakat Bidang Kesra Pelayanan Dasar	%	80	85*	85	N/A	85	12.361.278.088	85	12.546.697.260	85	12.688.304.847	85	12.833.078.406	85	50.429.358.601	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Bidang Kesra Non Pelayanan Dasar	%	80	85*	85	N/A	85	12.361.278.088	85	12.546.697.260	85	12.688.304.847	85	12.833.078.406	85	50.429.358.601	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Indeks Kepuasan Pelayanan Bidang Hukum Yang Diberikan	Poin	N/A	83.3*	85	3.889.498.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85	3.889.498.100	Biro Hukum
		Persentase Kualitas Produk Hukum Daerah Sesuai Ketentuan Perundang-undangan Yang Dimanfaatkan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100*	100	N/A	100	2.434.455.493	100	2.470.972.325	100	2.498.860.815	100	2.527.372.816	100	9.931.661.450	Biro Hukum
		Persentase Keberhasilan Pendampingan Bantuan/Layanan Hukum (Litigasi & Non Litigasi) Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100*	100	N/A	100	1.622.970.329	100	1.647.314.884	100	1.665.907.210	100	1.684.915.211	100	6.621.107.633	Biro Hukum
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat	Level 3	Level 3*	Level 3+	2.932.928.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Level 3+	2.932.928.700	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Predikat Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Predikat	N/A	Cukup*	Baik	N/A	Baik	1.153.987.687	Baik	1.212.402.543	Baik	1.184.517.285	Baik	1.198.032.627	Baik	4.748.940.142	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	93,39	83*	85	N/A	87	1.153.987.687	90	1.212.402.543	94	1.184.517.285	96	1.198.032.627	96	4.748.940.142	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	N/A	25*	25	N/A	25	1.153.987.687	25	1.212.402.543	25	1.184.517.285	25	1.198.032.627	25	4.748.940.142	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Pengendalian Administrasi dan Pelaporan Pelaksanaan	%	N/A	100*	100	691.631.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	691.631.200	Biro Administrasi Pembangunan
		Persentase permasalahan pembangunan daerah yang dapat diselesaikan	%	10	20*	35	N/A	50	966.595.720	65	1.015.524.795	80	992.167.725	95	1.003.488.359	95	3.977.776.599	Biro Administrasi Pembangunan
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	IKM DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Pelayanan Set. DPRD	Poin	N/A	80,85*	82,5	113.039.326.300	84,15	114.403.932.630	85,83	116.440.071.188	87,55	117.039.326.300	89,30	118.039.326.300	89,30	578.961.982.718	Sekretariat DPRD
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di manfaatkan untuk Percepatan Pembangunan Daerah	%	79,26	88,2*	90	1.381.086.300	90,05	1.784.099.557	90,1	1.874.410.677	90,15	1.831.299.231	90,2	1.852.194.355	90,20	8.723.090.121	Balitbangda
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan	Poin	N/A	78,21*	79	325.673.800	79,79	342.016.612	80,59	359.329.493	81,39	351.064.914	82,21	355.070.565	83,03	1.733.155.384	Badan Penghubung
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100*	100	2.730.799.132.908	100	2.734.049.476.035	100	2.755.890.918.516	100	2.786.878.168.749	100	2.810.746.126.996	100	13.818.363.823.205	Semua SKPD
Sasaran	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kalsel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	74,05	79,48*	79,49	17.311.748.400	79,5	11.535.479.516	79,51	211.982.993.389	79,52	11.902.780.841	79,53	12.078.406.066	79,53	264.811.408.213	



KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Angka Penanganan Konflik Sosial	Angka	N/A	N/A	N/A	6.971.790.800	N/A	3.540.239.758	N/A	3.719.446.695	N/A	3.633.899.421	N/A	3.675.362.213	N/A	21.540.738.886	Bakesbangpol
		Indeks Capaian Revolusi Mental	Indeks	N/A	67,01*	N/A	N/A	67,03	3.540.239.758	67,04	3.719.446.695	67,05	3.633.899.421	67,06	3.675.362.213	67,06	14.568.948.086	Bakesbangpol
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada	Persen	N/A	68,60*	70,00	10.339.957.600	71,40	4.455.000.000	72,82	204.544.100.000	74,28	4.634.982.000	75,77	4.727.681.640	75,77	228.701.721.240	Bakesbangpol
Misi - 5	Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana						80.371.027.511		113.658.704.869		120.367.353.453		129.960.146.831		140.478.877.421		584.836.110.085	
Tujuan	Menguhnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,43	70,26*	70,58	28.493.163.400	70,9	41.763.378.427	71,22	46.971.396.888	71,54	55.881.883.802	71,86	62.324.297.712	71,86	235.434.120.228	
Sasaran	Menurunkan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	48,48	49,84*	51,24	10.493.427.825	52,64	14.143.900.176	54,04	15.689.273.998	55,44	17.575.471.326	56,84	19.607.462.005	56,84	77.509.535.329	
		Indeks Kualitas Air	Indeks	51,67	55,90*	55,97	5.829.682.125	56,04	7.857.722.320	56,12	8.716.263.332	56,19	9.764.150.737	56,26	10.893.034.447	56,26	43.060.852.961	
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,93	88,38*	88,5	3.964.183.845	88,63	5.343.251.178	88,73	5.927.059.066	88,85	6.639.622.501	88,97	7.407.263.424	88,97	29.281.380.013	
		Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	64,19	68,69*	69,27	3.031.434.705	69,86	4.086.015.606	70,44	4.532.456.933	71,02	5.077.358.383	71,6	5.644.377.912	71,60	22.391.643.540	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	48,48	49,84*	51,24	449.145.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	51,24	449.145.200	DLH	
		Persentase luasan lahan terdampak yang dikendalikan	%	100	100*	100	N/A	100	673.525.518	100	707.619.380	100	691.344.134	100	699.232.370	100	2.771.721.401	DLH
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	51,67	55,9*	55,97	8.385.674.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55,97	8.385.674.800	DLH	
		Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter Indeks Kualitas Air	%	9,62	11,54*	13,46	N/A	15,38	2.402.362.718	17,31	3.278.567.942	23,07	3.764.001.920	30,76	4.747.907.486	30,76	14.192.840.066	DLH
		Persentase kualitas udara dengan kategori baik dan sangat baik	%	100	100*	100	N/A	100	551.777.821	100	753.025.786	100	864.520.899	100	1.090.505.620	100	3.259.830.125	DLH
		Persentase air laut dengan kualitas kategori baik	%	0	17,39*	21,74	N/A	21,74	39.762.138	26,07	54.264.441	26,07	62.298.986	30,43	78.583.866	30,43	234.909.431	DLH
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	48,48	49,48*	51,24	1.804.580.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	51,24	1.804.580.600	DLH	
		Persentase Peningkatan keanekaragaman hayati	%	N/A	4*	7,2	N/A	10,7	1.126.326.680	12,1	1.477.171.720	14,99	1.716.589.000	18,73	2.222.067.770	18,73	6.542.155.170	DLH, Balitbangda (kebum Raya Baru)
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	51,67	55,9*	55,97	353.609.400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55,97	353.609.400	DLH	
		Persentase usaha dan/kegiatan yang menerapkan pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan	%	100	100*	100	N/A	100	850.757.430	100	1.115.758.440	100	1.297.456.000	100	1.678.940.600	100	4.942.912.470	DLH
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	48,48	49,48*	51,24	245.284.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	51,24	245.284.600	DLH	
		Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH	%	N/A	N/A	33	N/A	50	291.602.370	50	381.375.060	50	443.558.000	50	574.480.880	50	1.691.016.310	DLH



KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	51.67	55.9*	55.97	2.458.865.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55.97	2.458.865.700	DLH
		Persentase sekolah yang berbudaya lingkungan	%	27	100*	100	N/A	100	420.663.097	100	450.163.969	100	462.650.983	100	486.168.669	100	1.819.646.718	DLH
		Persentase partisipasi komunitas yang melakukan kegiatan pelestarian lingkungan sesuai kriteria	%	51	100*	100	N/A	100	551.029.177	100	589.672.550	100	606.029.367	100	636.835.328	100	2.383.566.421	DLH
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	51.67	55.9*	55.97	284.535.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55.97	284.535.500	DLH	
		Persentase masyarakat yang mendapat penghargaan di bidang lingkungan hidup sesuai kriteria	%	N/A	N/A	100	N/A	100	500.000.000	100	625.000.000	100	781.250.000	100	976.562.500	100	2.882.812.500	DLH
		Persentase dunia usaha yang mendapat kategori taati di bidang lingkungan hidup	%	93	100*	100	N/A	100	396.987.250	100	496.234.063	100	620.292.578	100	775.365.723	100	2.288.879.614	DLH
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	51.67	55.9*	55.97	3.713.341.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55.97	3.713.341.000	DLH	
		Persentase pengelolaan sampah di Kalsel	%	78	98*	99	N/A	99	326.786.882	99	364.159.939	100	472.025.400	100	519.050.570	100,00	1.682.022.791	DLH
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	51.67	55.9*	55.97	285.337.900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55.97	285.337.900	DLH	
		Persentase kasus LH yang diselesaikan	%	100	100*	100	N/A	100	450.931.500	100	590.448.440	100	686.631.000	100	888.017.980	100	2.616.228.920	DLH
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan	%	21.984,67 Ha	15*	15	N/A	15	12.462.391.704	15	12.524.718.541	15	13.017.547.132	15	13.619.601.730	60	51.624.259.107	Dihut
		Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan	%	1.730.065,63 Ha	95*	95	N/A	95	4.139.247.717	95	4.159.948.897	95	4.323.636.547	95	4.523.602.427	95	17.146.435.588	Dihut
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase penanganankantik satwa liat yang dilindungi dan tidak dilindungi	%	N/A	N/A	100	2.925.636.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	2.925.636.000	Dihut	
		Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esensial yang aman dari ancaman kepunahan	%	100	100*	100	N/A	100	1.807.734.280	100	2.099.138.760	100	2.079.056.000	100	2.474.920.270	100	8.460.849.310	Dihut
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Rehabilitasi DAS	%	N/A	N/A	5	250.670.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	250.670.300	Dihut	
		Persentase penyediaan dokumen perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	%	100	100*	100	N/A	100	425.000.000	100	450.000.000	100	517.500.000	100	595.125.000	100	1.987.625.000	Dihut
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGELOLOGIAN	Persentase zona pemanfaatan air tanah yang dikonservasi	%	N/A	N/A	34,33	610.912.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	34,33	610.912.200	Dinas ESDM	
		Persentase luas wilayah Cekungan Air Tanah yang dikonservasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	1,54	1.085.216.000	14,53	1.563.289.000	26,38	1.630.580.000	48,39	1.728.050.000	48,39	6.007.135.000	Dinas ESDM



KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase luas lahan terganggu akibat usaha pertambangan yang direklamasi (IUP)	%	N/A	N/A	5	375.670.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	375.670.000	Dinas ESDM
		Persentase luas lahan yang direvegetasi akibat usaha pertambangan yang telah dilakukan reklamasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	51,62	1.678.787.000	52,12	1.684.496.400	52,62	1.719.435.000	53,12	1.757.119.000	53,12	6.839.837.400	Dinas ESDM
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	%	100	100*	100	1.175.465.300	100	1.250.000.000	100	1.500.000.000	100	3.300.000.000	100	3.500.000.000	100	10.725.465.300	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sasaran	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	16,5	18	21	5.174.434.900	22,2	10.332.489.146	24,6	12.106.343.560	26,6	16.825.280.856	28,9	18.752.159.924	28,90	63.190.708.385	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan emisi GRK dari Busines As Usual	Gg CO2- eq	8917	6505*	7406	N/A	8415	1.366.599.625	9485	1.865.034.654	10606	2.141.176.923	11770	2.700.877.990	11770	8.073.689.191	DLH
		Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Lahan Gambut	Indeks	53	54*	54,15	N/A	55	1.884.646.159	55	2.572.026.460	56	2.952.847.922	56	3.724.718.810	56,00	11.134.239.350	DLH
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	51,67	55,9*	55,97	481.053.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55,97	481.053.600	DLH
		Persentase dunia usaha yang taat terhadap pengelolaan lingkungan	%	0	88,89*	100	N/A	100	695.436.580	100	911.938.160	100	1.060.045.000	100	1.372.483.370	100	4.039.903.110	DLH
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kampung atau desa yang melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sesuai kriteria	%	24	100*	100	N/A	100	379.909.320	100	406.552.152	100	417.829.426	100	439.068.721	100	1.643.359.618	DLH
		Persentase peningkatan pelestari lingkungan sesuai kriteria	%	0	58*	64,71	N/A	70,59	1.156.795.220	76,47	1.237.920.634	83,35	1.272.259.083	88,24	1.336.931.134	88,24	5.003.906.074	DLH
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks	N/A	N/A	0,6	193.512.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,60	193.512.000	DPMD
		Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	N/A	N/A	0,69	2.160.117.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,69	2.160.117.500	DPMD
		Indeks Ketahanan Lingkungan	Indeks	N/A	N/A	0,76	792.914.000	0,77	3.240.173.282	0,78	3.391.484.854	0,79	7.123.780.702	0,8	7.205.063.040	1	21.753.415.878	DPMD
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase institusi pemerintah daerah yang melaksanakan penghematan energi	%	N/A	N/A	20	65.940.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	65.940.000	Dinas ESDM
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	N/A	N/A	100	1.480.897.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	1.480.897.800	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi (ha)	ha	75,8	N/A	N/A	N/A	135,8	1.500.000.000	155,8	1.600.000.000	175,8	1.700.000.000	195,8	1.800.000.000	195,8	6.600.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan



KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan emisi dari Limbah Padat domestik di TPA (Pembuangan akhir sampah padat)	%	0	27.5*	30.5	N/A	33.4	108.928.961	36.3	121.386.646	39.3	157.341.800	42.4	173.016.857	42.40	560.674.264	DLH
Tujuan	Meningkatnya Kelahanan Bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	144.81	138*	138	51.877.864.111	135	71.895.326.442	132	73.395.956.566	129	74.078.263.029	126	78.154.579.710	126.00	349.401.989.857	
Sasaran	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Kelahanan Daerah	Indeks	0,47	0,51*	0,54	51.877.864.111	0,57	71.895.326.442	0,6	73.395.956.566	0,63	74.078.263.029	0,66	78.154.579.710	0,66	349.401.989.857	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100*	100	3.374.542.985	100	2.155.150.177	100	2.194.184.382	100	2.202.963.653	100	2.226.870.392	100,00	12.153.711.589	Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang terdampak dan Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100*	100	395.038.175	100	252.290.932	100	256.860.440	100	257.888.178	100	260.686.801	100,00	1.422.764.526	Dinas Kesehatan
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengendali Daya Rusak Air dalam Kondisi Baik	%	21	24,74*	29,02	36.500.834.600	33,3	48.236.000.000	37,58	49.136.000.000	41,86	49.836.000.000	46,14	53.536.000.000	46,14	237.244.834.600	Dinas PUPR
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana /Program Pemerintah Provinsi	%	N/A	N/A	100	N/A	100	6.775.000.000	100	6.775.000.000	100	6.775.000.000	100	6.775.000.000	100	27.100.000.000	Dinas Perkim
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	144.81	138*	138	5.234.826.450	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	138	5.234.826.450	BPBD
		Peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	468.449.988	100	492.162.927	100	480.843.179	100	486.329.600	100	1.927.785.695	BPBD
		Persentase penanganan pra bencana	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	2.816.028.938	100	2.958.576.323	100	2.890.529.068	100	2.923.510.005	100	11.588.644.334	BPBD
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	2.170.538.734	100	2.280.411.405	100	2.227.961.942	100	2.253.382.988	100	8.932.295.069	BPBD
		Persentase peningkatan upaya penanganan darurat bencana	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	157.892.162	100	165.884.663	100	162.069.316	100	163.918.526	100	649.764.667	BPBD
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	N/A	100*	100	6.372.621.900	100	6.507.403.015	100	6.768.518.254	100	6.783.458.235	100	6.953.486.593	100	33.385.487.997	Dinas Sosial
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan	%	1.730.013 Ha	99*	99	N/A	99	2.356.572.496	99	2.368.358.172	99	2.461.549.458	99	2.575.394.804	99	9.761.874.931	Dihut

Keterangan :
- Kondisi Awal Yang bertanda bintang [*] adalah Target / Proyeksi
- N/A = Indikator dimaksud tidak digunakan di tahun berkenaan



R P J M D **VII**
P r o v i n s i
K A L I M A N T A N
KERANGKA PENDANAAN
S E L A T A N
T a h u n
2 0 2 1 - 2 0 2 6
PEMBANGUNAN
D A N
PROGRAM
PERANGKAT DAERAH



BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama enam tahun ke depan.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan, APBN maupun sumber-sumber lain yang sah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



Tabel VII-1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
2	BELANJA	6.427.109.633.960,00	6.535.727.786.773,92	6.930.374.582.721,00	6.855.306.713.169,42	6.970.147.396.622,00
02.01	BELANJA OPERASI	4.023.363.003.999,00	4.091.357.838.766,58	4.355.155.457.791,34	4.077.936.737.816,52	4.172.881.968.905,00
02.01.01	Belanja Pegawai	1.791.532.508.622	1.821.809.408.018	1.852.597.987.013	1.906.984.441.251	1.954.659.052.282
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.941.867.693.177,00	1.974.685.257.191,69	2.008.057.438.038,23	1.872.652.322.282,08	1.919.468.630.339,00
02.01.03	Belanja Hibah	283.322.802.200,00	288.110.957.557,18	492.980.032.739,90	296.754.286.283,71	296.754.286.284,00
02.01.04	Belanja Bantuan Sosial	6.640.000.000,00	6.752.216.000,00	1.520.000.000,00	1.545.688.000,00	2.000.000.000,00
02.01.05	Belanja Bantuan Keuangan					
02.02	BELANJA MODAL	1.113.596.629.961,00	1.132.416.413.007,34	1.223.153.234.929,66	1.404.144.171.811,90	1.352.522.108.096,00
02.02.01	Belanja Tanah	178.398.782.427,00	181.413.721.850,02	179.922.252.654,36	182.962.938.724,23	80.984.919.250,00
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	129.285.775.569,00	131.470.705.176,12	160.517.311.177,93	208.599.943.925,07	203.760.851.154,00
02.02.03	Belanja Bangunan dan Gedung	259.745.870.400,00	264.135.575.609,76	315.845.424.225,37	389.238.047.177,12	300.908.090.821,00
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	492.125.553.165,00	500.442.475.013,49	558.433.114.272,00	614.765.555.644,54	758.433.114.271,00
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	54.040.648.400,00	54.953.935.357,96	8.435.132.600,00	8.577.686.340,94	8.435.132.600,00
02.02.06	Belanja Aset Lainnya					
02.03	BELANJA TAK TERDUGA	80.000.000.000,00	81.352.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	150.000.000.000,00



NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
02.03.01	Belanja Tak Terduga	80.000.000.000,00	81.352.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	150.000.000.000,00
02.04	BELANJA TRANSFER	1.210.150.000.000,00	1.230.601.535.000,00	1.252.065.890.000,00	1.273.225.803.541,00	1.294.743.319.621,00
02.04.01	Belanja Bagi Hasil	1.210.000.000.000,00	1.230.449.000.000,00	1.252.065.890.000,00	1.273.225.803.541,00	1.294.743.319.621,00
02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	150.000.000,00	152.535.000,00	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	35.000.000.000,00	35.591.500.000,00	(248.000.000.000,00)	(60.000.000.000,43)	(60.000.000.000,46)

Provinsi
KALIMANTAN
SELATAN
Tahun
2021-2026

7.2 Program Perangkat Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Penyusunan RPJMD ini, dilakukan setelah RKPD tahun 2022 ditetapkan, sehingga dalam dinamika penulisan ada perubahan - perubahan indikator yang digunakan di dalam dokumen. Untuk mengakomodir indikator yang terlanjur digunakan dalam RKPD 2022, maka target indikator tahun 2022 tetap dimuat, sedangkan untuk tahun berikutnya karena indikator tidak dipakai lagi maka target dituliskan N/A. Demikian pula halnya indikator yang baru digunakan sejak tahun 2023 maka target tahun 2022 disebut N/A.

Indikasi rencana program prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Jumlah dana yang tersedia tersebut diketahui dengan melihat kerangka pendanaan pembangunan daerah yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif

Selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas serta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Namun juga oleh sumber pendanaan lainnya yang sah (APBN dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan hanya yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel VII-2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

Kode Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Rencana Dasar Penanggung Jawab			
			2020	2021 *)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Tarjet	Rp	Tarjet	Rp	Tarjet	Rp	Tarjet	Rp	Tarjet	Rp		Tarjet	Rp	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.418.588.560.988		1.422.625.945.956		1.424.266.709.120		1.426.172.120.366		1.429.048.793.663		7.120.702.130.093		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					780.481.079.630	100	781.981.079.630	100	782.543.041.789	100	784.108.127.873	100	785.676.344.129	100	3.914.789.673.051		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	780.481.079.630	100	781.981.079.630	100	782.543.041.789	100	784.108.127.873	100	785.676.344.129	100	3.914.789.673.051		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					637.885.741.858		638.885.741.858		639.885.741.858		640.129.513.342		641.375.772.348		3.198.162.511.284		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APK SM sederajat dan Pendidikan Khusus	%	93,36	93,80	94,24	618.749.169.602	94,68	483.410.444.854	95,12	484.167.091.016	95,56	484.351.539.774	96,00	485.294.516.884	96,00	2.555.972.762.131		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APM SM sederajat dan Pendidikan Khusus	%	66,04	N/A	N/A	N/A	66,94	55.246.409.187	67,24	55.332.882.254	67,54	55.353.961.921	67,84	55.461.729.761	67,84	221.394.983.123		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru pendidikan SMA/SMK/Dikus yang profesional	%	74,36	75,00	75,64	19.136.572.256	76,28	14.950.838.501	76,92	14.979.239.928	77,56	14.979.944.529	78,20	15.009.108.770	78,20	79.050.703.983		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Peserta Didik SMA yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi	%	40,00	45,50	N/A	N/A	55,90	25.890.309.590	61,20	25.930.833.752	66,40	25.940.712.387	71,90	25.991.215.991	71,90	103.753.071.720		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Lulusan SMK yang bekerja	%	20,00	22,76	N/A	N/A	28,26	32.870.738.822	31,02	32.922.188.927	33,78	32.934.730.996	36,54	32.998.851.154	36,54	131.726.509.899		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Peserta Didik Pendidikan Khusus yang mandiri	%	40,01	41,71	N/A	N/A	45,11	26.517.000.905	46,81	26.558.505.980	48,51	26.568.623.734	50,21	26.620.349.809	50,21	106.264.480.429		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					207.961.700		407.961.700		414.856.253		421.867.323		428.996.881		1.881.643.857		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru pendidikan SMA/SMK/Dikus yang profesional	%	74,36	75,00	75,64	207.961.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75,64	207.961.700		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Peserta Didik SMA yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi	%	40,00	45,50	N/A	N/A	55,90	123.856.664	61,20	125.949.842	66,40	128.078.394	71,90	130.242.919	71,90	508.127.819		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Lulusan SMK yang bekerja	%	20,00	22,76	N/A	N/A	28,26	157.250.343	31,02	159.907.874	33,78	162.610.317	36,54	165.358.431	36,54	645.126.964		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Peserta Didik Pendidikan Khusus yang mandiri	%	40,01	41,71	N/A	N/A	45,11	126.854.693	46,81	128.998.537	48,51	131.178.613	50,21	133.395.531	50,21	520.427.374		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					13.777.800		232.762.768		254.669.220		244.211.828		249.280.285		994.701.901		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru pendidikan SMA/SMK/Dikus yang profesional	%	74,36	75,00	75,64	13.777.800	76,28	232.762.768	76,92	254.669.220	77,56	244.211.828	78,20	249.280.285	78,20	994.701.901		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					-		518.400.000		518.400.000		518.400.000		518.400.000		2.073.600.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Lembaga Pendidikan Terakreditasi	%	67,82	85,00	N/A	N/A	98,00	518.400.000	98,00	518.400.000	98,00	518.400.000	98,00	518.400.000	98,00	2.073.600.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SAstra					-		600.000.000		650.000.000		750.000.000		800.000.000		2.800.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase futur bahasa dan sastra bersertifikat	%	-	10,00	N/A	N/A	14,00	600.000.000	16,00	650.000.000	18,00	750.000.000	20,00	800.000.000	20,00	2.800.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.009.041.977.225		1.011.074.527.428		1.019.117.222.449		1.050.758.616.515		1.069.097.908.942		5.159.090.252.559		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					875.600.171.688		875.835.054.518		880.835.054.518		885.835.054.518		890.835.054.518		4.408.940.389.762		Dinas Kesehatan, RSUD Ulin, RSUD Moch Anwar Saleh, RSJ, Sambong Lihum, RSGM
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	875.600.171.688	100	875.835.054.518	100	880.835.054.518	100	885.835.054.518	100	890.835.054.518	100	4.408.940.389.762		Dinas Kesehatan, RSUD Ulin, RSUD Moch Anwar Saleh, RSJ, Sambong Lihum, RSGM
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					89.148.231.869		90.148.231.869		91.781.001.869		92.148.231.869		93.148.231.869		456.373.929.345		Dinas Kesehatan, RSUD Ulin, RSUD Moch Anwar Saleh, RSJ, Sambong Lihum, RSGM
	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	135	104	112	81.279.726.037	111	51.909.256.077	110	52.849.439.531	109	53.040.898.322	108	53.636.719.444	108	292.736.039.410		Dinas Kesehatan, RSUD Ulin, RSUD Moch Anwar Saleh, RSJ, Sambong Lihum, RSGM
	Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Angka	9	9	N/A	N/A	8	33.213.758.507	7	33.815.328.026	7	33.950.628.390	6	34.319.063.331	6	135.298.778.255		Dinas Kesehatan, RSUD Ulin, RSUD Moch Anwar Saleh, RSJ, Sambong Lihum, RSGM
	Prevalensi Stunting	%	31,75	30	29	1.241.326.728	26	792.772.689	24	807.131.434	23	810.360.892	21	819.154.993	21	4.470.746.735		Dinas Kesehatan, RSUD Ulin, RSUD Moch Anwar Saleh, RSJ, Sambong Lihum, RSGM
	Angka Kesakitan	%	-	15,6	13	2.857.597.944	12,5	1.825.003.487	12	1.858.058.056	11,5	1.865.492.434	11	1.885.736.908	11	10.291.888.829		Dinas Kesehatan, RSUD Ulin, RSUD Moch Anwar Saleh, RSJ, Sambong Lihum, RSGM
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100	3.374.542.985	100	2.155.150.177	100	2.194.184.382	100	2.202.963.653	100	2.226.870.392	100	12.153.711.589		Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang terdampak dan Bertsiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100	100	395.038.175	100	252.290.932	100	256.860.440	100	257.888.178	100	260.686.801	100	1.422.764.526		Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					37.400.548.148		37.854.247.991		39.172.279.082		45.490.310.173		77.808.341.244		257.725.726.678		Dinas Kesehatan, RSJ, Sambong Lihum, RSGM
	Persentase Fasyankes dengan SDM Kesehatan sesuai Standar	%	N/A	56,84	58,00	35.310.236.620	59,16	35.582.993.112	60,34	36.821.942.337	61,55	61.560.891.565	62,78	73.139.840.788	62,78	242.415.904.419		Dinas Kesehatan, RSJ, Sambong Lihum, RSGM
	Persentase SDM Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi sesuai standar/akreditasi kedokteran	%	100	100	100	2.090.311.548	100	2.271.254.879	100	2.350.336.745	100	3.929.418.610	100	4.668.500.476	100	15.309.822.259		Dinas Kesehatan, RSJ, Sambong Lihum, RSGM
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					5.421.625.000		5.421.625.000		5.421.625.000		5.421.625.000		5.421.625.000		27.108.125.000		Dinas Kesehatan
	Persentase Faskes dengan tatakelola Farmakes sesuai standar	%	58,40	71,00	77,00	5.421.625.000	78,20	5.421.625.000	80,00	5.421.625.000	84,00	5.421.625.000	89	5.421.625.000	89	27.108.125.000		Dinas Kesehatan



Kode Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2020	2021 *)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.471.400.500		1.815.368.049		1.907.261.980		1.863.394.954		1.884.656.291		8.942.081.774	Dinas Kesehatan
	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	%	N/A	75,46	77,00	991.400.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	77,00	991.400.500	Dinas Kesehatan	
	Persentase Penerapan Cluster gerakan masyarakat hidup sehat di Kabupaten/Kota	%	61,54	73,85	N/A	N/A	76,92	1.234.450.273	84,62	1.296.938.146	92,31	1.267.566.278	100,00	1.281.566.278	100	5.080.063.267	Dinas Kesehatan
	Cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	89	91,19	90	480.000.000	93	580.917.776	95	610.323.834	98	596.286.385	98	603.090.013	98	2.870.618.008	Dinas Kesehatan
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					650.722.139.113		821.732.933.767		925.060.427.500		1.070.899.874.434		1.105.304.329.171		4.573.719.703.984	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					49.263.735.173		57.385.500.000		57.672.427.500		57.960.789.638		58.250.593.586		280.533.045.896	Dinas PUPR
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	49.263.735.173	100	57.385.500.000	100	57.672.427.500	100	57.960.789.638	100	58.250.593.586	100	280.533.045.896	Dinas PUPR
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					90.763.341.965		133.516.000.000		138.046.000.000		140.288.084.796		144.376.000.000		646.989.426.761	Dinas PUPR
	Persentase Kapasitas Penyediaan Air Baku	%	13,68	N/A	18,11	3.989.120.000	23,16	4.300.000.000	28,84	4.300.000.000	34,53	4.450.000.000	51,37	4.800.000.000	51,37	21.839.120.000	Dinas PUPR
	Persentase infrastruktur rigasi dalam kondisi baik	%	30,00	40,50	54,03	50.273.387.345	54,43	80.980.000.000	54,83	84.610.000.000	55,23	86.002.084.796	55,63	86.040.000.000	55,63	387.905.472.161	Dinas PUPR
	Persentase Pengendali Daya Rusak Air dalam Kondisi Baik	%	21,00	24,74	29,02	36.500.834.600	33,30	48.236.000.000	37,58	49.136.000.000	41,86	49.836.000.000	46,14	53.536.000.000	46,14	237.244.834.600	Dinas PUPR
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					27.464.283.200		33.045.000.000		64.090.000.000		105.181.000.000		114.547.735.585		344.328.018.785	Dinas PUPR
	Cakupan Pelayanan Air Minum	%	77,51	85,49	88,68	27.464.283.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	88,68	27.464.283.200	Dinas PUPR
	Cakupan Pelayanan Air Minum yang Layak	%	77,51	85,49	88,68	N/A	94,34	33.045.000.000	100,00	64.090.000.000	100,00	105.181.000.000	100,00	114.547.735.585	100,00	316.863.735.585	Dinas PUPR
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					-		6.700.000.000		7.070.000.000		11.100.000.000		7.000.000.000		31.870.000.000	Dinas PUPR
	Cakupan Pelayanan Persampahan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	50,27	6.700.000.000	52,27	7.070.000.000	54,27	11.100.000.000	56,27	7.000.000.000	56,27	31.870.000.000	Dinas PUPR
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.776.977.500		10.275.000.000		25.550.000.000		60.100.000.000		70.200.000.000		167.901.977.500	Dinas PUPR
	Cakupan Pelayanan Air Limbah	%	84,45	62,33	90	1.776.977.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90,00	1.776.977.500	Dinas PUPR
	Cakupan Pelayanan Air Limbah yang Layak	%	84,45	62,33	90	N/A	93,00	10.275.000.000	97,00	25.550.000.000	100,00	60.100.000.000	100,00	70.200.000.000	100,00	166.125.000.000	Dinas PUPR
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					-		4.179.000.000		4.739.000.000		4.679.000.000		5.839.000.000		19.436.000.000	Dinas PUPR
	Persentase Luas Genangan yang Tertangani	%	27,72 Ha (Baseline)	27,72 Ha (Baseline)	N/A	N/A	7	4.179.000.000	15,9	4.739.000.000	23,7	4.679.000.000	33,4	5.839.000.000	33,4	19.436.000.000	Dinas PUPR
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					-		2.000.000.000		2.000.000.000		2.750.000.000		2.840.000.000		9.590.000.000	Dinas PUPR
	Persentase permukiman di kawasan strategis yang sesuai standar	%	N/A	N/A	N/A	N/A	10,00	2.000.000.000	10,00	2.000.000.000	10,00	2.750.000.000	10,00	2.840.000.000	10,00	9.590.000.000	Dinas PUPR
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					42.108.565.700		81.398.000.000		100.438.000.000		129.618.000.000		115.798.000.000		469.340.565.700	Dinas PUPR
	Persentase Sarana dan Prasarana Publik dan Aparatur Perkantoran dalam Kondisi Baik	%	88	100	100	42.108.565.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	42.108.565.700	Dinas PUPR	
	Persentase sarana dan prasarana Bangunan Gedung dalam kondisi baik	%	88	100	100	-	100	81.398.000.000	100	100.438.000.000	100	129.618.000.000	100	115.798.000.000	100	427.252.000.000	Dinas PUPR
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					40.103.922.300		64.250.000.000		65.550.000.000		66.650.000.000		60.150.000.000		296.703.922.300	Dinas PUPR
	Persentase Sarana dan Prasarana Publik dan Aparatur Perkantoran dalam Kondisi Baik	%	88	100	100	40.103.922.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	40.103.922.300	Dinas PUPR	
	Persentase sarana dan prasarana Bangunan dan Lingkungannya dalam kondisi baik	%	88	100	100	N/A	100	64.250.000.000	100	65.550.000.000	100	66.650.000.000	100	60.150.000.000	100	256.600.000.000	Dinas PUPR
1 03 10	PROGRAM PENYELenggaraAN JALAN					392.176.529.975		398.533.433.767		432.000.000.000		468.000.000.000		497.000.000.000		2.187.709.963.742	Dinas PUPR
	Tingkat Keamanan Jalan	%	79,92	76,00	81,00	284.176.529.975	81,00	279.733.433.767	82,00	302.400.000.000	83,00	327.600.000.000	84,00	345.800.000.000	84,00	1.539.709.963.742	Dinas PUPR
	Tingkat Aksesibilitas Jalan	%	27,82	30,22	35,75	108.000.000.000	43,75	118.800.000.000	51,75	129.600.000.000	60,11	140.400.000.000	66,84	151.200.000.000	66,84	648.000.000.000	Dinas PUPR
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					1.893.406.400		3.651.000.000		4.405.000.000		4.073.000.000		3.903.000.000		17.925.406.400	Dinas PUPR
	Persentase Meningkatnya Kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan Bersertifikat	%	20	23	18	1.138.043.400	32	1.728.000.000	53	2.580.000.000	72	2.600.000.000	83	2.330.000.000	83	10.376.043.400	Dinas PUPR
	Persentase Pengembangan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi yang terintegrasi melalui 3 layanan dasar (SIPJAKI)	%	70	70	70	512.284.400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	512.284.400	Dinas PUPR	
	Persentase Pemda di Provinsi yang Menginput Informasi Pembina Jasa Konstruksi dalam SIPJAKI dengan lengkap	%	70	70	70	N/A	70	1.573.000.000	70	1.350.000.000	70	973.000.000	70	1.073.000.000	100	4.969.000.000	Dinas PUPR
	Persentase Meningkatnya Tertib Jasa Konstruksi	%	24	27	5	243.078.600	12	350.000.000	21,5	475.000.000	31,5	500.000.000	41,5	500.000.000	100	2.068.078.600	Dinas PUPR
1 03 12	PROGRAM PENYELenggaraAN PENATAAN RUANG					5.171.376.900		26.800.000.000		23.500.000.000		20.500.000.000		25.400.000.000		101.371.376.900	Dinas PUPR
	Persentase Kesesuaian Pemantaatan Ruang	%	85	86	86	5.171.376.900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	86	5.171.376.900	Dinas PUPR	
	Nilai Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	80	80,5	81	N/A	82	26.800.000.000	83	23.500.000.000	84	20.500.000.000	85	25.400.000.000	85	96.200.000.000	Dinas PUPR
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					36.534.815.890		71.490.762.555		75.511.441.368		75.557.348.575		75.603.485.317		334.697.853.705	



Kode Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkit Daerah Penanggung Jawab		
			2020	2021 *)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					8.346.245.390		9.135.762.555		9.181.441.368		9.227.348.575		9.273.485.317		45.164.283.205	Dinas Perkim
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	8.346.245.390	100	9.135.762.555	100	9.181.441.368	100	9.227.348.575	100	9.273.485.317	100	45.164.283.205	Dinas Perkim
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					5.085.455.000		20.325.000.000		20.325.000.000		20.325.000.000		20.325.000.000		86.385.455.000	Dinas Perkim
	Pensetase Rumah Yang Layak	%	37,43	38,49	45,98	5.085.455.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	39,47	5.085.455.000	Dinas Perkim
	Pensetase RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni	%	37,51	38,49	39,47	N/A	43,75	13.550.000.000	48,02	13.550.000.000	52,96	13.550.000.000	57,89	13.550.000.000	57,89	54.200.000.000	Dinas Perkim
	Pensetase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana /Program Pemerintah Provinsi	%	N/A	N/A	100	N/A	100	6.775.000.000	100	6.775.000.000	100	6.775.000.000	100	6.775.000.000	100	27.100.000.000	Dinas Perkim
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					16.290.620.000		24.480.000.000		24.480.000.000		24.480.000.000		24.480.000.000		114.210.620.000	Dinas Perkim
	Pensetase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	%	N/A	N/A	64,63	16.290.620.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	64,63	16.290.620.000	Dinas Perkim
	Pensetase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	%	22,91	26,92	30,93	N/A	34,97	24.480.000.000	39,19	24.480.000.000	43,61	24.480.000.000	48,07	24.480.000.000	48,07	97.920.000.000	Dinas Perkim
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					6.812.495.500		17.550.000.000		21.525.000.000		21.525.000.000		21.525.000.000		88.937.495.500	Dinas Perkim
	Pensetase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	%	42,70	43,93	45,16	6.812.495.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45,16	6.812.495.500	Dinas Perkim
	Pensetase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	%	42,70	43,93	45,16	N/A	46,41	17.550.000.000	47,66	21.525.000.000	48,91	21.525.000.000	50,16	21.525.000.000	50,16	82.125.000.000	Dinas Perkim
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					45.431.710.420		45.438.655.375		47.314.690.110		48.180.452.237		48.730.191.197		235.095.699.339	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					22.119.778.925		22.547.638.678		23.264.930.148		24.683.836.755		24.965.479.332		117.581.663.838	SATPOLPP DAMKAR, BPBD
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	22.119.778.925	100	22.547.638.678	100	23.264.930.148	100	24.683.836.755	100	24.965.479.332	100	117.581.663.838	SATPOLPP DAMKAR, BPBD
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					15.669.892.575		15.186.285.549		15.955.015.323		15.588.049.971		15.765.909.621		78.165.153.039	SATPOLPP DAMKAR
	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	%	N/A	100	100	15.669.892.575	100	15.186.285.549	100	15.955.015.323	100	15.588.049.971	100	15.765.909.621	100	78.165.153.039	SATPOLPP DAMKAR
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					5.234.826.450		5.612.909.822		5.897.035.317		5.761.403.505		5.827.141.119		28.333.316.214	BPBD
	IRB	poin	144,81	138	138	5.234.826.450	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	138	5.234.826.450	BPBD
	Peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	468.449.988	100	492.162.927	100	480.843.179	100	486.329.600	100	1.927.785.695	BPBD
	Pensetase penanganan pra bencana	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	2.816.028.938	100	2.958.576.323	100	2.890.529.068	100	2.923.510.005	100	11.588.444.334	BPBD
	Pensetase penanganan tanggap darurat bencana	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	2.170.538.734	100	2.280.411.405	100	2.227.961.942	100	2.253.382.988	100	8.932.295.069	BPBD
	Pensetase peningkatan upaya penanganan darurat bencana	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	157.892.162	100	165.884.663	100	162.069.316	100	163.918.526	100	649.764.667	BPBD
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2.407.212.470		2.091.821.325		2.197.709.321		2.147.162.007		2.171.661.125		11.015.566.248	SATPOLPP DAMKAR
	Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	N/A	60,00	60,00	2.407.212.470	61,00	2.091.821.325	62,00	2.197.709.321	63	2.147.162.007	64	2.171.661.125	64	11.015.566.248	SATPOLPP DAMKAR
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					86.996.213.158		88.563.808.468		90.458.144.951		93.553.853.518		95.720.411.586		455.292.431.681	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					40.171.942.555		40.771.868.393		41.115.266.371		44.143.645.244		45.656.656.237		211.859.378.800	Dinas Sosial
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	40.171.942.555	100	40.771.868.393	100	41.115.266.371	100	44.143.645.244	100	45.656.656.237	100	211.859.378.800	Dinas Sosial
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1.827.991.100		2.049.308.005		2.153.043.976		2.103.523.964		2.127.525.173		10.261.392.218	Dinas Sosial
	Pensetase PKS yang berkualifikasi terampil dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	N/A	10,39	10,60	1.827.991.100	10,81	2.049.308.005	11,03	2.153.043.976	11,25	2.103.523.964	11,36	2.127.525.173	11,47	10.261.392.218	Dinas Sosial
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					32.036.213.113		32.313.367.210		33.149.069.858		33.148.241.251		33.546.690.884		164.213.582.315	Dinas Sosial
	Pensetase PPKS yang Mandiri	%	18,79	19,00	19,29	32.036.213.113	19,79	32.313.367.210	20,29	33.149.069.858	20,79	33.148.241.251	21,29	33.546.690.884	21,29	164.213.582.315	Dinas Sosial
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					5.303.241.090		5.625.527.021		5.970.415.198		5.979.645.449		6.047.873.406		28.926.702.364	Dinas Sosial
	Pensetase Peningkatan Pendapatan Penduduk Miskin	%	N/A	6,35	6,48	5.303.241.090	6,61	5.625.527.021	6,74	5.970.415.198	6,88	5.979.645.449	7,01	6.047.873.406	7,01	28.926.702.364	Dinas Sosial
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					6.372.621.900		6.507.403.015		6.768.518.254		6.783.458.235		6.953.486.593		33.385.487.997	Dinas Sosial
	Pensetase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	N/A	100	100	6.372.621.900	100	6.507.403.015	100	6.768.518.254	100	6.783.458.235	100	6.953.486.593	100	33.385.487.997	Dinas Sosial
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					1.284.203.400		1.296.334.825		1.301.831.294		1.375.339.174		1.388.179.294		6.645.887.987	Dinas Sosial
	Pensetase Makam Pahlawan dalam Kondisi Baik	%	N/A	100,00	100,00	1.284.203.400	100,00	1.296.334.825	100,00	1.301.831.294	100,00	1.375.339.174	100,00	1.388.179.294	100,00	6.645.887.987	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					43.426.214.937		44.503.000.000		45.937.000.000		48.265.000.000		49.695.000.000		231.826.214.937	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					37.159.948.687		38.000.000.000		39.000.000.000		40.000.000.000		41.000.000.000		195.159.948.687	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi



Kode Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021 *)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	37.159.948.687	100	38.000.000.000	100	39.000.000.000	100	40.000.000.000	100	41.000.000.000	100	195.159.948.687	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					385.789.000		425.000.000		467.000.000		515.000.000		565.000.000		2.357.789.000	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
	Persenlase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	100	100	100	385.789.000	100	425.000.000	100	467.000.000	100	515.000.000	100	565.000.000	100	2.357.789.000	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.698.005.750		1.708.000.000		1.890.000.000		2.360.000.000		2.430.000.000		10.086.005.750	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
	Persenlase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	21,27	21,30	21,33	1.567.373.250	21,43	1.570.000.000	21,53	1.700.000.000	21,63	2.150.000.000	21,73	2.200.000.000	21,73	9.187.373.250	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	5,50	6,20	6,22	130.632.500	6,23	138.000.000	6,24	190.000.000	6,25	210.000.000	6,26	230.000.000	6,26	898.632.500	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					852.442.300		870.000.000		880.000.000		890.000.000		900.000.000		4.392.442.300	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
	Persenlase tenaga Kerja yang ditempatkan	%	0,48	0,50	24,87	852.442.300	26,03	870.000.000	27,21	880.000.000	28,41	890.000.000	29,63	900.000.000	29,63	4.392.442.300	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.012.937.300		1.100.000.000		1.200.000.000		1.900.000.000		2.100.000.000		7.312.937.300	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
	Persenlase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	9,10	9,20	11,49	1.012.937.300	12,48	1.100.000.000	13,47	1.200.000.000	14,46	1.900.000.000	15,46	2.100.000.000	15,46	7.312.937.300	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					2.317.091.900		2.400.000.000		2.500.000.000		2.600.000.000		2.700.000.000		12.517.091.900	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
	Persenlase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	9,10	9,20	18,96	2.317.091.900	22,21	2.400.000.000	24,99	2.500.000.000	27,39	2.600.000.000	29,48	2.700.000.000	29,48	12.517.091.900	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					11.501.872.444		11.558.304.783		12.128.109.055		11.856.103.946		11.987.938.554		59.032.328.782	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					7.872.815.214		7.883.978.793		8.072.941.800		7.887.264.138		7.977.257.822		39.694.257.767	DP3A
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	7.872.815.214	100	7.883.978.793	100	8.072.941.800	100	7.887.264.138	100	7.977.257.822	100	39.694.257.767	DP3A
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					1.223.302.200		1.055.464.726		1.030.286.950		908.890.350		919.260.789		5.137.205.015	DP3A
	Persenlase ARG pada belanja langsung APBD	%	N/A	19,60	20,00	1.223.302.200	30,00	612.732.363	40,00	565.143.475	50,00	454.445.175	60,00	459.630.395	60,00	3.315.253.608	DP3A
	TPAK Perempuan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	60,00	442.732.363	61,00	465.143.475	62,00	454.445.175	63,00	459.630.395	63,00	1.821.951.408	DP3A
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					293.344.900		362.198.402		380.532.885		371.780.629		376.022.646		1.783.879.461	DP3A
	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah di evaluasi	Angka	N/A	0,98	1,00	293.344.900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	293.344.900	DP3A
	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000) penduduk perempuan	Rasio	N/A	N/A	N/A	N/A	94,00	217.319.041	93,00	228.319.731	92,00	223.068.377	91,00	225.613.587	91,00	894.320.737	DP3A
	Persenlase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	144.879.361	100	152.213.154	100	148.712.251	100	150.409.058	100	596.213.824	DP3A
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					553.265.400		572.514.730		606.557.425		690.306.405		698.183.003		3.120.827.163	DP3A
	Indeks Ketahanan Keluarga	Poin	N/A	80,36	82	553.265.400	83,64	572.514.730	85,31	606.557.425	87,02	690.306.405	88,76	698.183.003	88,76	3.120.827.163	DP3A
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					142.657.000		185.969.656		195.383.440		190.889.621		193.067.671		907.967.388	DP3A
	Persenlase OPD menerapkan sistem data gender dan anak lengkap	%	N/A	100	100	142.657.000	100	92.984.828	100	97.691.720	100	95.444.810	100	96.533.836	100	525.312.194	DP3A
	Persenlase Kabupaten/Kota Yang Membuat Data Gender (Laporan Situasi Perempuan & Anak)	%	N/A	100	N/A	N/A	100	92.984.828	100	97.691.720	100	95.444.810	100	96.533.836	100	382.655.194	DP3A
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					613.886.800		689.785.251		934.826.180		913.325.178		923.746.218		4.075.569.627	DP3A
	Persenlase Kabupaten/Kota Layak Anak	%	N/A	73,50	75,00	613.886.800	76,50	689.785.251	78,03	934.826.180	79,59	913.325.178	81,18	923.746.218	81,18	4.075.569.627	DP3A
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					802.600.930		808.393.225		907.580.375		893.647.426		900.400.405		4.312.422.361	DP3A
	Rasio Anak korban Kekerasan	Rasio	N/A	1,18	1,20	802.600.930	1,22	292.797.742	1,25	302.526.792	1,27	297.882.475	1,30	300.133.468	1,30	1.995.941.407	DP3A
	Persenlase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	N/A	100	N/A	N/A	100	292.797.742	100	302.526.792	100	297.882.475	100	300.133.468	100	1.193.340.477	DP3A
	Persenlase korban kekerasan anak yang terlayani	%	N/A	100	N/A	N/A	100	222.797.742	100	302.526.792	100	297.882.475	100	300.133.468	100	1.123.340.477	DP3A
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					12.601.243.629		13.171.995.229		13.676.995.229		14.321.391.229		15.111.778.429		68.883.403.745	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					10.041.995.229		10.071.995.229		10.171.995.229		10.271.391.229		10.771.778.429		51.329.155.345	Dinas Kelautan Pangan
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	10.041.995.229	100	10.071.995.229	100	10.171.995.229	100	10.271.391.229	100	10.771.778.429	100	51.329.155.345	Dinas Kelautan Pangan
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					351.969.900		600.000.000		700.000.000		800.000.000		900.000.000		3.351.969.900	Dinas Kelautan Pangan
	Persenlase Peningkatan Lumbung Pangan Yang Memenuhi Stok Pangan Minimal	%	69,78	71,98	74,18	351.969.900	76,37	600.000.000	78,57	700.000.000	80,77	800.000.000	82,97	900.000.000	82,97	3.351.969.900	Dinas Kelautan Pangan
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.599.278.900		1.650.000.000		1.725.000.000		1.950.000.000		2.100.000.000		9.024.278.900	Dinas Kelautan Pangan
	Koefisien Variasi (CV) harga beras di tingkat konsumen (%)	%	7,44	7,3	7,2	482.680.400	7,1	497.988.600	7	520.624.445	6,9	588.531.982	6,8	633.803.672	6,8	2.723.629.099	Dinas Kelautan Pangan
	Konsumsi beras per kapita per tahun (Kg/Kap/Th)	Kg/Kap/Th	96,1	95,3	93,6	520.000.000	91,9	536.491.790	90,2	560.877.781	88,5	634.035.752	86,8	682.807.733	86,8	2.934.213.056	Dinas Kelautan Pangan



Kode Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2020	2021 *)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
	Konsumsi pangan lokal per kapita per tahun (Kg/Kap/Th)	Kg/kap/Th	19,25	20,03	20,94	596.598.500	21,85	615.519.610	22,76	643.497.774	23,67	727.432.267	24,58	783.388.595	24,58	3.366.436.746	Dinas Keluhan Pangan
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					304.868.100		400.000.000		520.000.000		630.000.000		650.000.000		2.504.868.100	Dinas Keluhan Pangan
	Persentase Penurunan Desa Rawan Pangan	%	16,28	16,19	16,09	304.868.100	15,99	400.000.000	15,89	520.000.000	15,79	630.000.000	15,69	650.000.000	15,69	2.504.868.100	Dinas Keluhan Pangan
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					303.131.500		450.000.000		560.000.000		670.000.000		690.000.000		2.673.131.500	Dinas Keluhan Pangan
	Persentase Komoditas Pangan Yang Aman Dikonsumsi	%	80	80	80	303.131.500	82	450.000.000	84	560.000.000	86	670.000.000	88	690.000.000	88	2.673.131.500	Dinas Keluhan Pangan
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					179.446.795.527		179.898.544.697		180.287.513.556		66.308.894.267		66.565.207.267		672.504.955.314	
2 10 03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					1.310.620.000		1.320.620.000		1.337.968.632		1.471.765.495		1.618.942.045		7.059.916.172	Dinas PUPR
	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	35,313	44,879	20	1.310.620.000	40	1.320.620.000	60	1.337.968.632	80	1.471.765.495	100	1.618.942.045	100	7.059.916.172	Dinas PUPR
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					2.502.602.800		2.814.248.140		3.095.672.954		3.745.764.275		3.745.764.275		15.904.052.444	Dinas PUPR
	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	100	100	20	2.502.602.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	2.502.602.800	Dinas PUPR
	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Selesai Tepat Waktu	%	N/A	N/A	20	N/A	40	2.814.248.140	60	3.095.672.954	80	3.745.764.275	100	3.745.764.275	100	13.401.449.644	Dinas PUPR
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					174.861.722.427		174.861.722.427		174.861.722.427		60.000.000.000		60.000.000.000		644.585.167.281	Dinas PUPR
	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	100	100	20	174.861.722.427	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	174.861.722.427	Dinas PUPR
	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Selesai Tepat Waktu	%	35,313	44,879	20	N/A	40	174.861.722.427	60	174.861.722.427	80	60.000.000.000	100	60.000.000.000	100	469.723.444.854	Dinas PUPR
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					771.850.300		901.954.130		992.149.543		1.091.364.497		1.200.500.947		4.957.819.417	Dinas PUPR
	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	100	100	20	771.850.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	771.850.300	Dinas PUPR
	Persentase Asef Tanah Provinsi untuk Infrastruktur yang dibebaskan oleh Seksi Pertanahan Dinas PUPR	%	N/A	N/A	20	N/A	40	901.954.130	60	992.149.543	80	1.091.364.497	100	1.200.500.947	100	4.185.969.117	Dinas PUPR
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					39.208.619.710		40.748.062.175		45.286.721.541		49.867.480.438		55.503.249.726		230.614.133.589	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					20.747.191.410		21.562.501.543		21.704.615.371		22.159.409.217		22.423.658.077		108.597.375.618	DLH
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	20.747.191.410	100	21.562.501.543	100	21.704.615.371	100	22.159.409.217	100	22.423.658.077	100	108.597.375.618	DLH
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					449.145.200		673.525.518		707.619.380		691.344.134		699.232.370		3.220.866.601	DLH
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	48,48	49,84	51,24	449.145.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	51,24	449.145.200	DLH
	Persentase luasan lahan terdampak yang dikendalikan	%	100	100	100	N/A	100	673.525.518	100	707.619.380	100	691.344.134	100	699.232.370	100	2.771.721.401	DLH
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					8.385.674.800		6.245.148.460		8.522.919.282		9.784.846.449		12.342.593.772		45.281.182.964	DLH
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	51,67	55,9	55,97	8.385.674.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55,97	8.385.674.800	DLH
	Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter Indeks Kualitas Air	%	9,62	11,54	13,46	N/A	15,38	2.402.362.718	17,31	3.278.567.942	23,07	3.764.001.920	30,76	4.747.907.486	30,76	14.192.840.066	DLH
	Persentase kualitas udara dengan kategori baik dan sangat baik	%	100	100	100	N/A	100	551.777.821	100	753.025.786	100	864.520.899	100	1.090.505.620	100	3.259.830.125	DLH
	Persentase air laut dengan kualitas kategori baik	%	0	17,39	21,74	N/A	21,74	39.762.138	26,07	54.264.441	26,07	62.298.986	30,43	78.583.866	30,43	234.909.431	DLH
	Persentase penurunan emisi GRK dari Business As Usual	Gg CO2-eq	8917	6505	7406	N/A	8415	1.366.599.625	9485	1.865.034.654	10606	2.141.176.923	11770	2.700.877.990	11770	8.073.689.191	DLH
	Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Lahan Gambut	Indeks	53	54	54,15	N/A	55	1.884.646.159	55	2.572.026.460	56	2.952.847.922	56	3.724.718.810	56	11.134.239.350	DLH
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					1.804.580.600		1.126.326.680		1.477.171.720		1.716.589.000		2.222.067.770		8.346.735.770	DLH
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	48,48	49,48	51,24	1.804.580.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	51,24	1.804.580.600	DLH
	Persentase Peningkatan keanekaragaman hayati	%	0	4	7,2	N/A	10,7	1.126.326.680	12,1	1.477.171.720	14,99	1.716.589.000	18,73	2.222.067.770	18,73	6.542.155.170	DLH, Balitbangda (Kebun Raya Banjar)
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					353.609.400		850.757.430		1.115.758.440		1.297.456.000		1.678.940.600		5.296.521.870	DLH
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	51,67	55,9	55,97	353.609.400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55,97	353.609.400	DLH
	Persentase usaha dan/kegiatan yang menerapkan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	%	100	100	N/A	N/A	100	850.757.430	100	1.115.758.440	100	1.297.456.000	100	1.678.940.600	100	4.942.912.470	DLH
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					481.053.600		695.436.580		911.938.160		1.060.045.000		1.372.483.370		4.520.956.710	DLH
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	51,67	55,9	55,97	481.053.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55,97	481.053.600	DLH
	Persentase dunia usaha yang taat terhadap pengelolaan lingkungan	%	0	88,89	100	N/A	100	695.436.580	100	911.938.160	100	1.060.045.000	100	1.372.483.370	100	4.039.903.110	DLH
2 11 07	PROGRAM PENGUKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					245.284.600		291.602.370		381.375.060		443.558.000		574.480.880		1.936.300.910	DLH
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	48,48	49,48	51,24	245.284.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	51,24	245.284.600	DLH



Kode Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020	2021 *)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Persenase MHA yang diakui terakait dengan PPLH	%	N/A	N/A	33	N/A	50	291.602.370	50	381.375.060	50	443.558.000	50	574.480.880	50	1.691.016.310	DLH	
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						2.458.865.700		2.508.396.814		2.684.309.305		2.758.768.859		2.899.003.854		13.309.344.532	DLH
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	51,67	55,9	55,97	2.458.865.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55,97	2.458.865.700	DLH	
	Persenase sekolah yang berbudaya lingkungan	%	27	100	100	N/A	100	420.663.097	100	450.163.969	100	462.650.983	100	486.168.669	100	1.819.646.718	DLH	
	Persenase kampung atau desa yang melakukan adaptasi dan miligasi perubahan iklim sesuai kriteria	%	24	100	100	N/A	100	379.909.320	100	406.552.152	100	417.829.426	100	439.068.721	100	1.643.359.618	DLH	
	Persenase parlibasi komunitas yang melakukan kegiatan pelestarian lingkungan sesuai kriteria	%	51	100	100	N/A	100	551.029.177	100	589.672.550	100	606.029.367	100	636.835.328	100	2.383.566.421	DLH	
	Persenase peningkatan pelestari lingkungan sesuai kriteria	%	0	58	64,71	N/A	70,59	1.156.795.220	76,47	1.237.920.634	83,35	1.272.259.083	88,24	1.336.931.136	88,24	5.003.906.074	DLH	
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					284.535.500		896.987.250		1.121.234.063		1.401.542.578		1.751.928.223		5.456.227.614	DLH	
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	51,67	55,9	55,97	284.535.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55,97	284.535.500	DLH	
	Persenase masyarakat yang mendapat penghargaan di bidang Lingkungan Hidup sesuai kriteria	%	0	0	100	N/A	100	500.000.000	100	625.000.000	100	781.250.000	100	976.562.500	100	2.882.812.500	DLH	
	Persenase dunia usaha yang mendapat kategori taat dibidang lingkungan hidup	%	93	100	100	N/A	100	396.987.250	100	496.234.063	100	620.292.578	100	775.365.723	100	2.288.879.614	DLH	
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					285.337.900		450.931.500		590.448.440		686.831.000		888.017.980		2.901.566.820	DLH	
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	51,67	55,9	55,97	285.337.900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55,97	285.337.900	DLH	
	Persenase kasus LH yang diselesaikan	%	100	100	100	N/A	100	450.931.500	100	590.448.440	100	686.831.000	100	888.017.980	100	2.616.228.920	DLH	
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					3.713.341.000		5.446.448.030		6.069.332.320		7.867.090.000		8.650.842.830		31.747.054.180	DLH	
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	51,67	55,9	55,97	3.713.341.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55,97	3.713.341.000	DLH	
	Persenase Sampah yang diangani di TPA Sampah Regional Banjarbakula	%	98	100	100	N/A	100	5.010.732.188	100	5.583.785.734	100	7.237.722.800	100	7.958.775.404	100	25.791.016.126	DLH	
	Persenase Pengurangan emisi dari Limbah Padat domestik di TPA (Pembuangan)	%	N/A	27,5	30,5	N/A	33,4	108.928.961	36,3	121.386.646	39,3	157.341.800	42,4	173.016.857	42,4	560.674.264	DLH	
	Persenase pengelolaan sampah di Kabel	%	78	98	99	N/A	99	326.786.882	99	364.159.939	100	472.025.400	100	519.050.570	100	1.682.022.791	DLH	
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					8.699.504.296		8.961.211.731		9.414.828.269		9.198.287.218		9.303.239.675		45.577.071.189		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					7.237.131.196		7.387.733.158		7.761.700.211		7.583.181.106		7.669.705.202		37.639.450.873	Diadukcapil KB	
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	7.237.131.196	100	7.387.733.158	100	7.761.700.211	100	7.583.181.106	100	7.669.705.202	100	37.639.450.873	Diadukcapil KB	
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					271.339.500		309.943.157		325.632.480		318.142.933		321.772.943		1.546.831.013	Diadukcapil KB	
	Persenase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan	%	N/A	39,20	40,00	271.339.500	40,80	154.971.579	41,62	162.816.240	42,45	159.071.466	43,30	160.886.472	43,30	909.085.256	Diadukcapil KB	
	Persenase Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kalimantan Selatan	%	N/A	99,15	N/A	N/A	99,25	154.971.579	99,30	162.816.240	99,35	159.071.466	99,40	160.886.472	99,40	637.745.756	Diadukcapil KB	
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					344.706.200		346.344.652		363.876.619		355.507.457		359.563.797		1.769.998.724	Diadukcapil KB	
	Persenase Kepemilikan Akte Kelahiran di Kalimantan Selatan	%	N/A	94,53	95,00	344.706.200	95,48	115.448.217	95,95	121.292.206	96,43	118.502.486	96,91	119.854.599	96,91	819.803.708	Diadukcapil KB	
	Persenase Kepemilikan Akte Kematian Berdasarkan Laporan Peristiwa Kematian pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	%	N/A	100,00	N/A	N/A	100,00	115.448.217	100,00	121.292.206	100,00	118.502.486	100,00	119.854.599	100,00	475.097.508	Diadukcapil KB	
	Persenase Kepemilikan Buku Nikah/Akte Perkawinan Pasangan dari Laporan Perkawinan di Kalimantan Selatan	%	N/A	100,00	N/A	N/A	100,00	115.448.217	100,00	121.292.206	100,00	118.502.486	100,00	119.854.599	100,00	475.097.508	Diadukcapil KB	
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					727.673.800		776.841.941		816.165.680		797.393.869		806.492.133		3.924.567.424	Diadukcapil KB	
	Persenase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan	%	N/A	90,46	92,31	727.673.800	94,16	388.420.971	96,04	408.082.840	97,96	398.696.935	99,92	403.246.067	99,92	2.326.120.612	Diadukcapil KB	
	Tingkat Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 (satu) Tahun	%	N/A	100,00	N/A	N/A	100,00	388.420.971	100,00	408.082.840	100,00	398.696.935	100,00	403.246.067	100,00	1.598.446.812	Diadukcapil KB	
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					118.653.600		140.348.822		147.453.279		144.061.854		145.705.600		696.223.155	Diadukcapil KB	
	Persenase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan	%	N/A	90,46	92,31	118.653.600	94,16	140.348.822	96,04	147.453.279	97,96	144.061.854	99,92	145.705.600	99,92	696.223.155	Diadukcapil KB	
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					23.483.766.992		24.474.222.705		25.793.530.858		21.683.079.448		21.930.483.587		117.365.083.790		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					10.140.455.192		10.560.047.836		11.094.597.457		10.839.421.716		10.963.099.517		53.597.421.718	DPMD	
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	10.140.455.192	100	10.560.047.836	100	11.094.597.457	100	10.839.421.716	100	10.963.099.517	100	53.597.421.718	DPMD	
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA					117.528.000		160.529.610		168.655.619		164.776.539		166.656.640		778.146.408	DPMD	
	Indeks Ketahanan Sosial	Poin	N/A	0,75	0,763	117.528.000	0,78	160.529.610	0,79	168.655.619	0,81	164.776.539	0,83	166.656.640	0,83	778.146.408	DPMD	
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					8.334.361.700		8.379.871.948		8.897.190.066		1.365.054.695		1.380.629.969		28.357.108.378	DPMD	
	Indeks Ketahanan Sosial	Poin	N/A	0,75	0,763	8.334.361.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,763	8.334.361.700	DPMD	



Kode Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			2020	2021 *)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
	Indeks Ketahanan Ekonomi	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	0,61	8.379.871.948	0,62	8.897.190.066	0,64	1.365.054.695	0,65	1.380.629.969	0,66	20.022.746.678	DPMD	
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							1.744.878.600		2.133.600.029		2.241.602.862		2.190.045.996		2.215.034.421	10.525.161.908	DPMD
	Indeks Ketahanan Sosial	Poin	N/A	0,75	0,763	1.744.878.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,763	1.744.878.600	DPMD	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Desa	Poin	N/A	60,00	N/A	N/A	62,00	2.133.600.029	64,00	2.241.602.862	66,00	2.190.045.996	68,00	2.215.034.421	68,00	8.780.283.308	DPMD	
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							3.146.543.500		3.240.173.282		3.391.484.854		7.123.780.702		7.205.063.040	24.107.045.378	DPMD
	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks	N/A	N/A	0,60	193.512.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,60	193.512.000	DPMD	
	Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	N/A	N/A	0,69	2.160.117.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,69	2.160.117.500	DPMD	
	Indeks Ketahanan Lingkungan	Indeks	N/A	N/A	0,74	792.914.000	0,77	3.240.173.282	0,78	3.391.484.854	0,79	7.123.780.702	0,80	7.205.063.040	0,80	21.753.415.878	DPMD	
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							186.385.600		1.364.693.495		1.562.838.599		1.758.099.711		2.012.795.764	6.884.813.169	
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							186.385.600		500.693.495		526.038.599		513.939.711		519.803.764	2.246.861.169	Ditadukcapil KB
	Persentase Kebutuhan ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	N/A	7,80	7,94	186.385.600	8,12	250.346.747	8,28	263.019.300	8,45	256.969.856	8,62	259.901.882	8,62	1.216.623.384	Ditadukcapil KB	
	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	N/A	1,47	N/A	N/A	1,53	250.346.747	1,56	263.019.300	1,59	256.969.856	1,62	259.901.882	1,62	1.030.237.784	Ditadukcapil KB	
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							-		432.000.000		518.400.000		622.080.000		746.496.000	2.318.976.000	Ditadukcapil KB
	Persentase Penurunan Unmetneed	%	12,00	N/A	N/A	N/A	9,00	432.000.000	8,00	518.400.000	7,00	622.080.000	6,00	746.496.000	6,00	2.318.976.000	Ditadukcapil KB	
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							-		432.000.000		518.400.000		622.080.000		746.496.000	2.318.976.000	Ditadukcapil KB
	Persentase Peningkatan UPPKS	%	80,00	N/A	N/A	N/A	84,90	432.000.000	86,59	518.400.000	88,33	622.080.000	90,09	746.496.000	90,09	2.318.976.000	Ditadukcapil KB	
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							42.389.519.636		45.068.647.643		47.072.058.087		48.076.556.351		48.965.962.549	231.572.744.266	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							19.233.355.736		18.593.647.643		19.534.858.087		19.085.556.351		19.303.322.549	95.750.740.366	Dishub
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	19.233.355.736	100	18.593.647.643	100	19.534.858.087	100	19.085.556.351	100	19.303.322.549	100	95.750.740.366	Dishub	
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							21.306.889.900		22.950.000.000		23.835.000.000		24.985.000.000		25.100.000.000	118.176.889.900	Dishub
	Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Memenuhi Standar di Ruas Jalan Provinsi	%	N/A	N/A	17	8.575.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17	8.575.000.000	Dishub	
	Persentase rekomendasi andatalin yang difindaklanjuti	%	N/A	N/A	20,00	100.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20,00	100.000.000	Dishub	
	Persentase Auditor, inspektor, UPPKB, Perusahaan dan Pengemudi Angkutan Umum yang dibina	%	N/A	N/A	15,00	325.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15,00	325.000.000	Dishub	
	Persentase manajemen rekayasa kalulintas di jalan provinsi	%	17,60	19,50	20,00	9.806.889.900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20,00	9.806.889.900	Dishub	
	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa	%	17,60	19,50	20,00	N/A	30	14.917.500.000	40	15.492.750.000	50	16.240.250.000	60	16.315.000.000	60	62.965.500.000	Dishub	
	Persentase Ketersediaan Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Untuk Mengangkut Penumpang/Barang	%	N/A	N/A	67,5	2.500.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	67,5	2.500.000.000	Dishub	
	Persentase Terangkutnya Penumpang dan Barang	%	65	65	67,5	N/A	70	2.065.500.000	72,5	2.145.150.000	75	2.248.650.000	77,5	2.259.000.000	77,5	8.718.300.000	Dishub	
	Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Penggunaan Jalan di Kabel	%	635 kejadian	3,00	2,65	N/A	2,60	5.967.000.000	2,50	6.197.100.000	2,25	6.496.100.000	2,00	6.526.000.000	2,00	25.186.200.000	Dishub	
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							1.849.274.000		2.975.000.000		3.152.200.000		3.456.000.000		4.012.640.000	15.445.114.000	Dishub
	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Terkait Angkutan Perairan yang di Tindaklanjuti	%	N/A	N/A	20	125.416.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	125.416.200	Dishub	
	Persentase Kelabuhan sungai dan danau yang beroperasi sesuai standard	%	N/A	N/A	20	1.667.709.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	1.667.709.700	Dishub	
	Persentase Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Antar Kota dan Kabupaten dalam Provinsi yang Beroperasi	%	20	40	40	56.148.100	60,00	2.975.000.000	60,00	3.152.200.000	60,00	3.456.000.000	60,00	4.012.640.000	60	13.651.988.100	Dishub	
2 15 05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPAIAN							-		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	2.200.000.000	Dishub
	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapain	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	2.200.000.000	Dishub	
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							23.792.019.696		24.358.065.900		24.852.439.600		31.254.934.000		33.517.757.000	137.775.216.196	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							11.420.371.096		11.662.706.000		12.005.070.600		12.119.706.000		12.322.706.000	59.530.559.696	Diskominfo
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	11.420.371.096	100	11.662.706.000	100	12.005.070.600	100	12.119.706.000	100	12.322.706.000	100	59.530.559.696	Diskominfo	
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							9.424.003.900		9.565.101.900		9.608.204.000		15.683.888.000		17.609.144.000	61.890.361.800	Diskominfo
	Visitor (akses) Terhadap Informasi Publik yang Valid	Visitor	200.000	200.000	220.000	2.756.855.000	240.000	3.201.424.000	260.000	3.850.000.000	280.000	6.400.000.000	300.000	7.500.000.000	1.300.000	23.708.279.000	Diskominfo	
	Persentase Sentimen Positif Terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	%	48	48	50	6.667.148.900	52	6.363.677.900	54	5.758.204.000	56	9.283.888.000	58	10.109.164.000	58	38.182.082.800	Diskominfo	
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							2.947.644.700		3.130.258.000		3.239.165.000		3.451.340.000		3.585.887.000	16.354.294.700	Diskominfo



Kode Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021 *)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pensentase SKPD yang Menerapkan E-Government	%	89,00	100,00	100,00	2.947.644.700	100,00	2.930.258.000	100,00	2.939.165.000	100,00	3.051.340.000	100,00	3.085.887.000	100,00	14.954.294.700	Dikominfo
	Pensentase Wilayah Bebas Blankspot	%	89,00	90,00	100,00	N/A	91,00	200.000.000	92,00	300.000.000	93,00	400.000.000	94,00	500.000.000	94,00	1.400.000.000	Dikominfo
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					25.325.445.508		27.128.538.600		27.987.944.000		28.640.944.000		29.490.944.000		138.573.876.108	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					15.347.615.408		15.600.000.000		15.700.000.000		15.800.000.000		15.900.000.000		78.347.615.408	Dinas Koperasi UKM
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	15.347.615.408	100	15.700.000.000	100	15.700.000.000	100	15.800.000.000	100	15.900.000.000	100	78.347.615.408	Dinas Koperasi UKM
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					485.292.500		749.234.600		1.025.000.000		1.175.000.000		1.350.000.000		4.784.527.100	Dinas Koperasi UKM
	Pensentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	25	30	35	485.292.500	40	749.234.600	45	1.025.000.000	50	1.175.000.000	55	1.350.000.000	55	4.784.527.100	Dinas Koperasi UKM
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					287.799.300		700.000.000		825.000.000		925.000.000		1.025.000.000		3.762.799.300	Dinas Koperasi UKM
	Pensentase usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	20	30	33	287.799.300	36	700.000.000	39	825.000.000	42	925.000.000	50	1.025.000.000	50	3.762.799.300	Dinas Koperasi UKM
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					2.729.913.800		3.009.914.000		3.099.964.000		3.179.964.000		3.219.964.000		15.239.719.800	Dinas Koperasi UKM
	Pensentase Koperasi yang telah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	0	10	12	2.729.913.800	14	3.009.914.000	16	3.099.964.000	18	3.179.964.000	20	3.219.964.000	80	15.239.719.800	Dinas Koperasi UKM
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					927.378.300		1.100.000.000		1.250.000.000		1.350.000.000		1.550.000.000		6.177.378.300	Dinas Koperasi UKM
	Pensentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	22	23	25	927.378.300	25	1.100.000.000	31	1.250.000.000	39	1.350.000.000	47	1.550.000.000	47	6.177.378.300	Dinas Koperasi UKM
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					2.621.315.100		2.700.000.000		2.750.000.000		2.810.000.000		2.925.000.000		13.806.315.100	Dinas Koperasi UKM
	Pensentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	%	0,5	1	1,8	2.621.315.100	2	2.700.000.000	2,2	2.750.000.000	2,4	2.810.000.000	2,4	2.925.000.000	11	13.806.315.100	Dinas Koperasi UKM
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					2.926.131.100		3.269.390.000		3.338.000.000		3.401.000.000		3.521.000.000		16.455.521.100	Dinas Koperasi UKM
	Pensentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	%	0,8	1	1,8	2.926.131.100	1,9	3.269.390.000	2	3.338.000.000	2,1	3.401.000.000	2,2	3.521.000.000	10	16.455.521.100	Dinas Koperasi UKM
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					15.411.794.492		16.509.514.560		17.256.904.050		18.013.108.400		18.603.732.560		85.795.092.062	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					11.743.790.392		11.852.804.560		11.968.521.650		12.038.352.560		12.138.732.560		59.742.201.722	DPMPFSP
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	11.743.790.392	100	11.852.804.560	100	11.968.521.650	100	12.038.352.560	100	12.138.732.560	100	59.742.201.722	DPMPFSP
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					456.375.900		598.990.000		622.876.000		676.285.200		700.931.600		3.055.458.700	DPMPFSP
	Pensentase realisasi pelaksanaan kemitraan	%	0	100	100	265.806.400	100	383.445.000	100	395.388.000	100	425.000.000	100	440.931.600	100	1.910.571.000	DPMPFSP
	Pensentase Potensi Investasi Daerah berbasis lingkungan	%	0	20	20	190.569.500	25	215.545.000	30	227.488.000	35	251.285.200	40	260.000.000	40	1.144.887.700	DPMPFSP
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					963.166.600		1.295.520.000		1.411.008.000		1.511.008.000		1.726.496.000		6.907.198.600	DPMPFSP
	Pensentase Peningkatan calon investor	%	0	30	30	963.166.600	32	1.295.520.000	36	1.411.008.000	40	1.511.008.000	42	1.726.496.000	42	6.907.198.600	DPMPFSP
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					1.163.635.100		1.222.400.000		1.378.880.000		1.468.864.000		1.599.840.000		6.833.619.100	DPMPFSP
	Nilai IKM Penanganan (Pelayanan) pengaduan	Poin	85,25	85	88,25	1.163.635.100	88,5	1.222.400.000	88,75	1.378.880.000	89	1.468.864.000	89,25	1.599.840.000	95	6.833.619.100	DPMPFSP
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					872.280.700		1.037.600.000		1.185.474.400		1.520.910.440		1.632.338.400		6.248.804.140	DPMPFSP
	Pensentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	%	100	100	100	547.438.300	100	364.000.000	100	471.744.000	100	579.488.000	100	599.653.200	100	2.562.323.500	DPMPFSP
	Pensentase Perusahaan yang aktif dalam investasinya	%	25,76	30	35	324.842.400	40	673.600.000	45	713.930.400	50	941.422.440	50	1.032.685.200	50	3.686.480.640	DPMPFSP
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					212.545.800		502.200.000		689.944.000		797.688.000		805.432.000		3.007.809.800	DPMPFSP
	Pensentase Pengelolaan Sistem Informasi	%	100	100	100	212.545.800	100	502.200.000	100	689.944.000	100	797.688.000	100	805.432.000	100	3.007.809.800	DPMPFSP
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					151.969.459.377		88.571.772.508		91.055.275.632		91.915.004.293		92.952.344.492		516.463.856.302	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					14.023.553.969		14.300.516.889		15.024.409.054		14.678.847.646		14.846.333.298		72.873.660.856	Dispora
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	14.023.553.969	100	14.300.516.889	100	15.024.409.054	100	14.678.847.646	100	14.846.333.298	100	72.873.660.856	Dispora
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					12.001.816.100		9.737.256.384		10.230.156.302		9.994.862.707		10.108.904.090		52.072.995.583	Dispora
	Pensentase Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	%	N/A	76,44	78,00	12.001.816.100	79,56	2.434.314.096	81,15	2.557.539.075	82,77	2.498.715.677	84,43	2.527.226.023	84,43	22.019.610.971	Dispora
	Pensentase Pemuda Wirasaha Kerah Putih (White Collar)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	0,41	2.434.314.096	0,42	2.557.539.075	0,42	2.498.715.677	0,43	2.527.226.023	0,44	10.017.794.871	Dispora
	Pensentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	6,01	2.434.314.096	6,02	2.557.539.075	6,04	2.498.715.677	6,05	2.527.226.023	6,06	10.017.794.871	Dispora
	Pensentase Pemuda Berpendapat Dalam Rapat Kemasyarakatan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	5,01	2.434.314.096	5,02	2.557.539.075	5,03	2.498.715.677	5,04	2.527.226.023	5,05	10.017.794.871	Dispora



Kode Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Paragraf Daerah Penanggung Jawab		
			2020	2021 *)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					125.665.990.508		64.385.489.655		65.644.483.141		67.088.855.429		67.842.929.270		390.627.948.003	Dispora
	Pensefasi Atlet Binaan PPLP Yang Berprestasi	%	N/A	24,50	25,00	125.665.990.508	25,50	12.877.097.931	26,01	13.128.936.628	26,53	13.417.771.086	27,06	13.568.585.854	27,06	178.658.382.007	Dispora
	Pensefasi Prasarana dan Sarana Olahraga Berstandar	%	N/A	N/A	N/A	N/A	15,03	12.877.097.931	15,06	13.128.936.628	15,09	13.417.771.086	15,12	13.568.585.854	15,15	52.992.391.499	Dispora
	Pensefasi Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga	%	N/A	N/A	N/A	N/A	35,87	12.877.097.931	35,94	13.128.936.628	36,02	13.417.771.086	36,09	13.568.585.854	36,16	52.992.391.499	Dispora
	Pensefasi Atlet Olahraga Berprestasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	20,04	12.877.097.931	20,08	13.128.936.628	20,12	13.417.771.086	20,16	13.568.585.854	20,20	52.992.391.499	Dispora
	Pensefasi Tenaga Keolahragaan Berprestasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	15,03	12.877.097.931	15,06	13.128.936.628	15,09	13.417.771.086	15,12	13.568.585.854	15,15	52.992.391.499	Dispora
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					278.098.800		148.509.580		156.027.135		152.438.511		154.177.834		889.251.859	Dispora
	Pensefasi Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepramukaan	%	N/A	29,40	30,00	278.098.800	30,60	148.509.580	31,21	156.027.135	31,84	152.438.511	32,47	154.177.834	32,47	889.251.859	Dispora
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					556.385.000		600.000.000		650.000.000		670.000.000		680.000.000		3.156.385.000	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					556.385.000		600.000.000		650.000.000		670.000.000		680.000.000		3.156.385.000	Diskominfo
	Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral yang Akurat	Jenis	230	230	235	556.385.000	240	600.000.000	245	650.000.000	250	670.000.000	255	680.000.000	255	3.156.385.000	Diskominfo
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					845.961.100		942.040.000		963.899.000		1.005.567.000		1.172.233.000		4.929.700.100	
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					845.961.100		942.040.000		963.899.000		1.005.567.000		1.172.233.000		4.929.700.100	Diskominfo
	Tingkat Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	Poin	3,11	3,11	3,15	845.961.100	3,19	942.040.000	3,23	963.899.000	3,27	1.005.567.000	3,31	1.172.233.000	3,31	4.929.700.100	Diskominfo
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					19.477.320.800		11.039.890.312		11.625.463.880		11.504.668.410		11.591.510.407		65.239.054.008	
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					4.108.868.500		4.384.083.859		4.504.766.184		4.447.156.562		4.475.078.618		21.919.953.723	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	%	N/A	3,68	3,76	4.108.868.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,76	4.108.868.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pensefasi Kebudayaan Daerah yang Berkembang	%	N/A	N/A	N/A	N/A	36,36	4.384.083.859	45,45	4.504.766.184	54,55	4.447.156.562	63,64	4.475.078.618	63,64	17.811.085.223	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					6.092.214.000		200.414.000		210.558.957		205.716.101		208.063.321		6.916.966.379	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	%	N/A	3,68	3,76	6.092.214.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,76	6.092.214.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pensefasi Kesenian tradisional yang Berkembang	%	N/A	N/A	N/A	N/A	26,67	200.414.000	33,33	210.558.957	40,00	205.716.101	46,67	208.063.321	46,67	824.752.379	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					3.278.177.000		381.173.326		705.812.641		709.473.950		735.897.575		5.810.534.492	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	%	N/A	3,68	3,76	3.278.177.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,76	3.278.177.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pensefasi cagar budaya non benda yang terlindungi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	7,00	281.173.326	7,14	590.812.641	7,28	577.223.950	7,43	583.810.075	7,58	2.033.019.992	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pensefasi Objek Sejarah yang ditetapkan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	10,00	100.000.000	20,00	115.000.000	30,00	132.250.000	40,00	152.087.500	40,00	499.337.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					593.292.000		655.877.863		689.078.400		673.229.597		680.911.147		3.292.389.004	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	%	N/A	3,68	3,76	593.292.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,76	593.292.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pensefasi Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	16,27	655.877.863	17,97	689.078.400	19,66	673.229.597	21,36	680.911.147	21,36	2.699.097.006	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					5.404.769.300		5.418.341.263		5.515.447.698		5.469.092.401		5.491.559.745		27.299.210.408	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	%	N/A	3,68	3,76	5.404.769.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,76	5.404.769.300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pensefasi cagar budaya yang dikelola secara terpadu	%	N/A	N/A	N/A	N/A	15,00	5.418.341.263	17,50	5.515.447.698	25,00	5.469.092.401	30,00	5.491.559.745	30,00	21.894.441.108	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					27.176.027.181		27.354.942.707		28.064.845.860		29.091.806.224		29.418.013.027		141.105.435.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					19.659.958.181		19.824.355.108		20.178.483.964		21.375.278.833		21.619.170.764		102.657.246.849	Dispersip
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	19.659.958.181	100	19.824.355.108	100	20.178.483.964	100	21.375.278.833	100	21.619.170.764	100	102.657.246.849	Dispersip
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					6.838.637.900		6.851.754.217		7.173.165.968		7.019.934.970		7.094.099.439		34.977.392.694	Dispersip
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	N/A	58,8	N/A	N/A	61,20	3.425.877.108	62,42	3.586.582.984	63,67	3.509.867.485	64,95	3.547.049.720	64,95	14.069.377.297	Dispersip
	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	N/A	N/A	45	6.838.637.900	46,35	3.425.877.108	47,74	3.586.582.984	49,17	3.509.867.485	50,65	3.547.049.720	52,17	20.908.015.197	Dispersip
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASAKH KUNO					677.431.100		678.833.382		713.195.928		696.792.422		704.742.823		3.470.995.656	Dispersip
	Pensefasi Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	%	N/A	100	100	677.431.100	100	678.833.382	100	713.195.928	100	696.792.422	100	704.742.823	100	3.470.995.656	Dispersip
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIFAN					3.496.583.400		3.503.821.328		3.574.184.763		3.596.517.514		3.637.553.779		17.808.640.783	
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					2.930.794.900		2.936.861.645		3.005.525.582		3.014.558.494		3.048.954.606		14.936.695.227	Dispersip



Kode Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2020	2021 *)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
	Pensentase SKPD yang Mengelola Anisip Sesuai NSPK	%	N/A	35,28	36,00	2.930.794.900	36,72	2.936.861.645	37,45	3.005.525.582	38,20	3.014.558.494	38,97	3.048.954.606	38,97	14.936.695.227	Dispersip
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					559.176.100		560.333.595		561.697.681		575.157.434		581.720.183		2.838.085.193	Dispersip
	Pensentase SKPD yang Mengelola Anisip Sesuai NSPK	%	N/A	35,28	36,00	559.176.100	36,72	560.333.595	37,45	561.697.681	38,20	575.157.434	38,97	581.720.183	38,97	2.838.085.193	Dispersip
2 24 04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					6.612.400		6.628.088		6.961.500		6.801.386		6.878.990		33.880.363	Dispersip
	Pensentase SKPD yang Mengelola Anisip Sesuai NSPK	%	N/A	35,28	36,00	6.612.400	36,72	6.628.088	37,45	6.961.500	38,20	6.801.386	38,97	6.878.990	38,97	33.880.363	Dispersio
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					58.727.081.992		56.260.000.000		57.760.000.000		61.500.000.000		62.800.000.000		297.047.081.992	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					36.269.919.294		36.500.000.000		37.000.000.000		37.500.000.000		38.000.000.000		185.269.919.294	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	36.269.919.294	100	36.500.000.000	100	37.000.000.000	100	37.500.000.000	100	38.000.000.000	100	185.269.919.294	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					1.480.897.800		1.500.000.000		1.600.000.000		1.700.000.000		1.800.000.000		8.080.897.800	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pensentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	N/A	N/A	100	1.480.897.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	1.480.897.800	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi (ha)	ha	75,8	N/A	N/A	N/A	135,8	1.500.000.000	155,8	1.600.000.000	175,8	1.700.000.000	195,8	1.800.000.000	195,8	6.600.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					11.604.238.990		8.200.000.000		8.500.000.000		8.750.000.000		9.000.000.000		46.054.238.990	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi	ton	207.229	260.000	264.476,48	11.604.238.990	211.000	8.200.000.000	212.500	8.500.000.000	214.000	8.750.000.000	215.500	9.000.000.000	215.500	46.054.238.990	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					7.148.144.408		7.500.000.000		7.750.000.000		7.850.000.000		8.000.000.000		38.248.144.408	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	ton	139.079	155.000	157.000	7.148.144.408	167.419	7.500.000.000	177.272	7.750.000.000	187.465	7.850.000.000	198.450	8.000.000.000	198.450	38.248.144.408	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.175.465.300		1.250.000.000		1.500.000.000		3.300.000.000		3.500.000.000		10.725.465.300	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pensentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	%	100	100	100	1.175.465.300	100	1.250.000.000	100	1.500.000.000	100	3.300.000.000	100	3.500.000.000	100	10.725.465.300	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					1.048.416.200		1.310.000.000		1.410.000.000		2.400.000.000		2.500.000.000		8.668.416.200	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Angka konsumsi ikan masyarakat	Kg/Kap/thn	60,24	61	62,04	1.048.416.200	63	1.310.000.000	64	1.410.000.000	65	2.400.000.000	66	2.500.000.000	66	8.668.416.200	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					24.449.460.100		25.157.954.084		26.093.749.491		29.408.124.441		30.881.936.885		135.991.225.001	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					12.471.968.800		12.586.376.378		12.695.014.015		12.764.515.417		12.810.966.958		63.328.841.568	Dinas Pariwisata
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	12.471.968.800	100	12.586.376.378	100	12.695.014.015	100	12.764.515.417	100	12.810.966.958	100	63.328.841.568	Dinas Pariwisata
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					4.225.298.400		4.300.000.000		4.450.000.000		7.240.000.000		7.986.000.000		28.221.298.400	Dinas Pariwisata
	Pensentase Objek Wisata Unggulan yang sesuai Sapta Pesona	%	N/A	N/A	20	4.225.298.400	20	4.300.000.000	20	4.450.000.000	20	7.240.000.000	20	7.986.000.000	100	28.221.298.400	Dinas Pariwisata
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					6.001.673.300		6.121.577.706		6.323.735.476		6.516.109.024		6.900.719.927		31.863.815.433	Dinas Pariwisata
	Pensentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0,09	5	5	1.001.328.000	5	1.021.333.027	5	1.055.061.327	5	1.087.157.213	5	1.151.326.261	5	5.316.205.829	Dinas Pariwisata
	Pensentase peningkatan perijinan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	99,9	10	10	5.000.345.300	10	5.100.244.678	10	5.268.674.149	10	5.428.951.811	10	5.749.393.665	10	26.547.609.604	Dinas Pariwisata
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					629.379.900		800.000.000		1.050.000.000		1.235.000.000		1.458.500.000		5.172.879.900	Dinas Pariwisata
	Pensentase Kenakan Hak Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif yang telah dilindungi	%	N/A	N/A	20	629.379.900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	629.379.900	Dinas Pariwisata	
	Pensentase Peningkatan Pendapatan Produk Kreatif	%	N/A	N/A	N/A	N/A	5	800.000.000	5	1.050.000.000	5	1.235.000.000	5	1.458.500.000	5	4.543.500.000	Dinas Pariwisata
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.121.139.700		1.350.000.000		1.575.000.000		1.632.500.000		1.725.750.000		7.404.389.700	Dinas Pariwisata
	Tingkat hunian akomodasi	%	37,65	38	40	1.121.139.700	44	1.350.000.000	48	1.575.000.000	52	1.632.500.000	56	1.725.750.000	56	7.404.389.700	Dinas Pariwisata
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					148.881.361.950		150.757.621.950		153.724.244.195		157.876.768.824		161.395.131.726		772.635.128.645	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					75.759.154.558		75.805.017.994		76.256.272.492		77.777.340.615		77.887.925.769		383.485.711.428	Dinas TPH, Dinas Bunnak
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	48.164.014.395	100	48.193.172.154	100	48.480.057.987	100	49.447.079.694	100	49.517.384.398	100	243.801.708.629	Dinas TPH
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	27.595.140.163	100	27.611.845.840	100	27.776.214.505	100	28.330.260.921	100	28.370.541.371	100	139.684.002.799	Dinas Bunnak
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					53.689.540.837		53.765.078.250		54.824.106.063		55.728.056.578		56.941.281.473		274.948.043.201	Dinas TPH, Dinas Bunnak
	Pensentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura	%	-3,70	1,31 (0,78 TP dan 1,83 Hortikultura)	1,35 (0,78 TP dan 1,92 Hortikultura)	45.954.133.800	46,018.788,039	46.018.788,039	1,56 (0,78 TP dan 2,33 Hortikultura)	46.925.234.714	1,58 (0,78 TP dan 2,38 Hortikultura)	47.698.947.104	1,68 (0,78 TP dan 2,58 Hortikultura)	48.737.374.669	1,68 (0,78 TP dan 2,58 Hortikultura)	235.334.478.325	Dinas TPH
	Produktivitas Tanaman Perkebunan (Karet) per Hektar per tahun	Kg/ha	451,98	72	75,33	1.951.070.100	75,5	1.953.815.119	76,00	1.992.300.035	76,50	2.025.149.465	77,00	2.069.237.881	77,00	9.991.572.601	Dinas Bunnak
	Pensentase peningkatan produksi peternakan	%	3	4	5	5.784.336.937	6	5.792.475.093	7	5.906.571.313	8	6.003.960.009	9	6.134.668.923	9	29.622.012.275	Dinas Bunnak



Kode Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021 *)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					7.448.233.800		7.772.133.137		7.832.216.429		7.948.720.573		8.142.756.592		39.144.060.531	Dinas TPH, Dinas Bunnak
	Persenfasi peningkatan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura	%	1,05	N/A	2,5 (TP) dan 2 (Hortikultura)	5.545.065.100	2,25	5.786.201.852	2,25	5.830.932.694	2,25	5.917.667.762	2,25	6.062.123.801	2,25	29.141.991.209	Dinas TPH
	Persenfasi ketersediaan prasarana perkebunan dan peternakan yang sesuai untuk peningkatan produksi	%	N/A	N/A	15	1.903.168.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	1.903.168.700	Dinas Bunnak
	Persenfasi ketersediaan prasarana perkebunan yang sesuai untuk peningkatan produksi	%	12	13	N/A	N/A	16	1.500.000.000	17,00	1.511.595.908	18,00	1.534.080.882	19,00	1.571.529.292	19,00	6.117.206.082	Dinas Bunnak
	Persenfasi ketersediaan prasarana peternakan yang sesuai untuk peningkatan produksi	%	10	13	N/A	N/A	16	485.931.285	17,00	489.687.827	18,00	496.971.929	19,00	509.103.499	19,00	1.981.694.540	Dinas Bunnak
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.164.733.400		1.577.000.000		1.813.000.000		2.085.000.000		2.398.000.000		9.037.733.400	Dinas Bunnak
	Persenfasi penurunan kejadian jumlah kasus penyakit hewan menular	%	10,51	75	80	1.164.733.400	85	1.577.000.000	90	1.813.000.000	95	2.085.000.000	100	2.398.000.000	100	9.037.733.400	Dinas Bunnak
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					3.358.846.605		4.234.141.756		5.230.682.695		6.467.060.119		8.001.837.899		27.292.569.074	Dinas TPH, Dinas Bunnak
	Persenfasi luasan pertanian yang dapat dikendalikan akibat bencana alam	%	2,9	2,5	2,5	2.891.359.805	2,5	3.614.199.756	2,5	4.517.749.695	2,5	5.647.187.119	2,5	7.058.983.899	2,5	23.729.480.274	Dinas TPH
	Luas areal pengendalian penanggulangan bencana	ha	5.000	5.500	6.300	467.486.800	6.500	619.942.000	6.600	712.933.000	6.700	819.873.000	6.800	942.854.000	6.800	3.543.088.800	Dinas Bunnak
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					221.696.900		292.021.000		335.825.000		386.199.000		444.128.000		1.679.869.900	Dinas Bunnak
	Persenfasi rekomendasi teknis usaha perkebunan	%	100	100	100	221.696.900	100	292.021.000	100	335.825.000	100	386.199.000	100	444.128.000	100	1.679.869.900	Dinas Bunnak
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					7.239.155.850		7.312.229.813		7.432.141.516		7.484.391.939		7.579.201.993		37.047.121.111	Dinas TPH, Dinas Bunnak
	Persenfasi peningkatan kelembagaan ketenagaan dan penerapan penyuluhan pertanian	%	N/A	N/A	100	5.932.520.650	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	5.932.520.650	Dinas TPH
	Persenfasi Kelembagaan Penyuluhan yang Naik Kelas	%	N/A	N/A	N/A	N/A	3,73	2.531.927.640	3,88	2.573.448.183	4,04	2.591.540.378	4,21	2.624.369.242	4,21	10.321.285.444	Dinas TPH
	Persenfasi SDM Pertanian yang berkualitas	%	N/A	N/A	N/A	N/A	1,39	952.488.489	1,41	968.108.145	1,43	974.914.267	1,48	987.264.191	1,48	3.882.775.092	Dinas TPH
	Persenfasi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian yang Diterapkan Oleh Petani	%	N/A	N/A	N/A	N/A	21,13	2.507.988.962	22,23	2.549.116.940	23,33	2.567.038.078	24,44	2.599.556.554	24,44	10.223.700.534	Dinas TPH
	Persenfasi Peningkatan Penguatan Kelembagaan Perkebunan dan Peternakan	%	8	9	10,83	567.352.300	11	573.079.305	12	582.477.111	13	594.002.640	14	594.002.640	14	2.903.483.473	Dinas Bunnak
	Prosenfasi Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perkebunan dan Peternakan	%	70	75	75	739.282.900	75	746.745.418	75	758.991.138	75	764.009.097	75	774.009.366	75	3.783.355.919	Dinas Bunnak
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					109.709.506.656		110.832.863.430		111.730.146.901		114.496.991.942		116.978.740.556		563.748.249.485	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					80.359.723.906		80.995.160.899		81.347.780.086		81.676.049.477		82.430.060.202		406.808.774.571	Dishut
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	80.359.723.906	100	80.995.160.899	100	81.347.780.086	100	81.676.049.477	100	82.430.060.202	100	406.808.774.571	Dishut
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					23.617.375.250		26.489.073.260		26.714.048.460		27.802.248.000		29.109.463.020		133.732.207.990	Dishut
	Persenfasi Kepatuhan Pelaku Usaha Bidang Kehutanan Terhadap Pemenuhan Pembayaran PNPB dan Restribusi Daerah	%	100	100	100	23.617.375.250	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	23.617.375.250	Dishut
	Persenfasi pelaku usaha yang bebas tunggakan PNPB dan Restribusi Daerah	%	100	100	100	N/A	100	6.030.861.343	100	6.061.022.850	100	6.299.514.863	100	6.590.864.059	100	24.982.263.115	Dishut
	Persenfasi peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan	%	21.984,67 Ha	15	15	N/A	15	12.462.391.704	15	12.524.718.541	15	13.017.547.132	15	13.619.601.730	60	51.624.259.107	Dishut
	Persenfasi luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan	%	1.730.065,63 Ha	95	95	N/A	95	4.139.247.717	95	4.159.948.897	95	4.323.636.547	95	4.523.602.427	95	17.146.435.588	Dishut
	Persenfasi luas hutan yang bebas kebakaran hutan	%	1.730.013 Ha	99	99	N/A	99	2.356.572.496	99	2.368.358.172	99	2.461.549.458	99	2.575.394.804	99	9.761.874.931	Dishut
	Persenfasi peningkatan unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat	%	N/A	N/A	10	N/A	10	1.500.000.000	10	1.600.000.000	10	1.700.000.000	10	1.800.000.000	50	6.600.000.000	Dishut
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					2.925.636.000		1.807.734.280		2.099.138.760		2.079.056.000		2.474.920.270		11.386.485.310	Dishut
	Persenfasi penanganankonflik satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi	%	N/A	N/A	100	2.925.636.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	2.925.636.000	Dishut
	Persenfasi populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esensial yang aman dari ancaman kepunahan	%	100	100	100	N/A	100	1.807.734.280	100	2.099.138.760	100	2.079.056.000	100	2.474.920.270	100	8.460.849.310	Dishut
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					2.556.101.200		1.115.894.990		1.119.179.595		2.422.138.464		2.369.172.064		9.582.486.314	Dishut
	Persenfasi peningkatan perhutanan sosial yang operasional	%	N/A	25	25	2.556.101.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	2.556.101.200	Dishut
	Persenfasi Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	%	N/A	N/A	10	N/A	10	1.115.894.990	10	1.119.179.595	10	2.422.138.464	10	2.369.172.064	50	7.026.385.114	Dishut
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH AIRAN SUNGAI (DAS)					250.670.300		425.000.000		450.000.000		517.500.000		595.125.000		2.238.295.300	Dishut
	Persenfasi peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Rehabilitasi DAS	%	N/A	N/A	5	250.670.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	250.670.300	Dishut
	Persenfasi penyediaan dokumen perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	%	100	100	100	N/A	100	425.000.000	100	450.000.000	100	517.500.000	100	595.125.000	100	1.987.625.000	Dishut
3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					26.183.547.492		35.885.641.525		37.813.636.119		40.630.342.285		43.292.605.601		183.805.773.222	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					22.961.479.492		22.542.070.395		22.815.624.890		23.115.913.108		24.664.011.833		116.099.099.718	Dinas ESDM
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	22.961.479.492	100	22.542.070.395	100	22.815.624.890	100	23.115.913.108	100	24.664.011.833	100	116.099.099.718	Dinas ESDM



Kode Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021 *)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3 29 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					610.912.200	1.085.216.000	1.563.289.000	1.630.580.000	1.728.050.000	6.618.047.200	Dinas ESDM					
	Persenfasi zona pemanfaatan air tanah yang dikonservasi	%	N/A	N/A	34,33	610.912.200	N/A	N/A	N/A	N/A	34,33	610.912.200	Dinas ESDM				
	Persenfasi luas wilayah Cekungan Air Tanah yang dikonservasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	1,54	1.085.216.000	14,53	1.563.289.000	26,38	1.630.580.000	48,39	1.728.050.000	48,39	6.007.135.000	Dinas ESDM
3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					375.670.000	1.678.787.000	1.684.496.400	1.719.435.000	1.757.119.000	7.215.507.400	Dinas ESDM					
	Persenfasi luas lahan terganggu akibat usaha pertambangan yang direklamasi (IUP)	%	N/A	N/A	5	375.670.000	N/A	N/A	N/A	N/A	5	375.670.000	Dinas ESDM				
	Persenfasi luas lahan yang direvegetasi akibat usaha pertambangan yang telah dilakukan reklamasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	51,62	1.678.787.000	52,12	1.684.496.400	52,62	1.719.435.000	53,12	1.757.119.000	53,12	6.839.837.400	Dinas ESDM
3 29 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN					65.940.000	-	-	-	-	65.940.000	Dinas ESDM					
	Persenfasi institusi pemerintah daerah yang melaksanakan penghematan energi	%	N/A	N/A	20	65.940.000	N/A	N/A	N/A	N/A	20	65.940.000	Dinas ESDM				
3 29 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					2.169.546.000	10.579.568.130	11.750.225.829	14.164.414.177	15.143.424.768	53.807.178.904	Dinas ESDM					
	Persenfasi rumah tangga tidak mampu berlistrik	%	N/A	N/A	3,54	2.169.546.000	N/A	N/A	N/A	N/A	3,54	2.169.546.000	Dinas ESDM				
	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Tidak Mampu	%	N/A	N/A	N/A	N/A	88,72	10.579.568.130	88,92	11.750.225.829	89,11	14.164.414.177	89,31	15.143.424.768	89,31	51.637.632.904	Dinas ESDM
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					16.260.927.031	17.261.468.178	17.756.041.587	18.374.293.667	19.396.508.350	89.049.238.813						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					12.984.147.831	13.011.468.178	13.185.041.587	13.544.293.667	14.151.508.350	66.876.459.613	Dinas Perdagangan					
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	12.984.147.831	100	13.011.468.178	100	13.185.041.587	100	13.544.293.667	100	14.151.508.350	100	66.876.459.613	Dinas Perdagangan
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					216.351.900	450.000.000	475.000.000	500.000.000	525.000.000	2.166.351.900	Dinas Perdagangan					
	Tertib Usaha	%	100	100	100,00	216.351.900	100	450.000.000	100	475.000.000	100	500.000.000	100	525.000.000	100	2.166.351.900	Dinas Perdagangan
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					148.218.000	400.000.000	410.000.000	420.000.000	430.000.000	1.808.218.000	Dinas Perdagangan					
	Persenfasi stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	N/A	0,05	0,10	148.218.000	N/A	N/A	N/A	N/A	0,10	148.218.000	Dinas Perdagangan				
	Persenfasi Rekomendasi Revitalisasi Pasar Rakyat yang difinansikan	%	100	N/A	N/A	N/A	100	400.000.000	100	410.000.000	100	420.000.000	100	430.000.000	100	1.660.000.000	Dinas Perdagangan
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					768.778.900	850.000.000	871.000.000	970.000.000	1.130.000.000	4.589.778.900	Dinas Perdagangan					
	Persenfasi stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	N/A	0,05	0,10	616.436.500	0,11	681.562.703	0,3	698.401.311	0,4	777.783.320	0,5	906.077.476	0,5	3.680.261.309	Dinas Perdagangan
	Persenfasi kinerja realisasi pupuk	%	N/A	96	90	152.342.400	91	168.437.297	92	172.598.689	93	192.216.680	94	223.922.524	94	909.517.591	Dinas Perdagangan
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					670.119.600	700.000.000	765.000.000	790.000.000	810.000.000	3.735.119.600	Dinas Perdagangan					
	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	-26,96	57,71	5,96	670.119.600	8	700.000.000	10	765.000.000	12	790.000.000	14	810.000.000	14	3.735.119.600	Dinas Perdagangan
3 30 06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					969.549.800	1.100.000.000	1.250.000.000	1.300.000.000	1.450.000.000	6.069.549.800	Dinas Perdagangan					
	Persenfasi komadifi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	75	100	100	259.813.000	100	330.000.000	100	375.000.000	100	390.000.000	100	435.000.000	100	1.789.813.000	Dinas Perdagangan
	Persenfasi barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan	%	50	60	65	709.736.800	70,5	770.000.000	80	875.000.000	83	910.000.000	85	1.015.000.000	85	4.279.736.800	Dinas Perdagangan
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					503.761.000	750.000.000	800.000.000	850.000.000	900.000.000	3.803.761.000	Dinas Perdagangan					
	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	10,46	10,28	10,50	503.761.000	11	750.000.000	12	800.000.000	13	850.000.000	14	900.000.000	14	3.803.761.000	Dinas Perdagangan
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					19.673.338.342	20.660.000.000	21.250.000.000	22.990.000.000	23.220.000.000	107.793.338.342						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					14.140.669.592	14.500.000.000	14.600.000.000	14.900.000.000	15.000.000.000	73.140.669.592	Dinas Perindustrian					
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	14.140.669.592	100	14.500.000.000	100	14.600.000.000	100	14.900.000.000	100	15.000.000.000	100	73.140.669.592	Dinas Perindustrian
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					5.071.045.450	5.300.000.000	5.500.000.000	6.740.000.000	6.800.000.000	29.411.045.450	Dinas Perindustrian					
	Persenfasi Pertumbuhan Industri	%	3	5	5,75	5.071.045.450	6	5.300.000.000	6,25	5.500.000.000	7,65	6.740.000.000	7,72	6.800.000.000	9,5	29.411.045.450	Dinas Perindustrian
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					284.727.300	560.000.000	700.000.000	820.000.000	850.000.000	3.214.727.300	Dinas Perindustrian					
	Persenfasi jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	15	16	18,75	284.727.300	20,56	560.000.000	25,7	700.000.000	30	820.000.000	40	850.000.000	26	3.214.727.300	Dinas Perindustrian
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					176.896.000	300.000.000	450.000.000	530.000.000	570.000.000	2.026.896.000	Dinas Perindustrian					
	Persenfasi Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	50	65	100	176.896.000	100	300.000.000	100	450.000.000	100	530.000.000	100	570.000.000	100	2.026.896.000	Dinas Perindustrian
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					556.925.800	635.000.000	695.000.000	770.000.000	845.000.000	3.501.925.800						
3 32 02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					161.989.800	185.000.000	200.000.000	225.000.000	245.000.000	1.016.989.800	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi					
	Persenfasi Luas Sisa Areal HPL yang dapat dikembangkan oleh Pemda	%	N/A	N/A	20	161.989.800	40	185.000.000	60	200.000.000	80	225.000.000	100	245.000.000	100	1.016.989.800	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi



Kode Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2020	2021 *)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3 32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					394.936.000		450.000.000		495.000.000		545.000.000		600.000.000		2.484.936.000	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang Mandiri	%	100	100	100	394.936.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	394.936.000	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
	Persentase satuan permukiman yang difasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	450.000.000	100	495.000.000	100	545.000.000	100	600.000.000	100	2.090.000.000	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4 01	SEKRETARIAT DAERAH					265.517.189.216		196.702.127.055		199.573.493.353		202.298.766.724		205.386.257.201		1.069.478.033.548	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					135.244.669.736		120.021.387.696		121.058.650.342		122.699.301.384		124.327.500.412		623.351.509.570	Sekda
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	135.244.669.736	100	120.021.387.696	100	121.058.650.342	100	122.699.301.384	100	124.327.500.412	100	623.351.509.570	Sekda
4 01 02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					2.380.618.900		3.006.578.400		3.457.565.160		3.976.199.934		4.572.629.924		17.393.592.318	Biro Organisasi
	Persentase perangkat daerah Prov Kalsel dengan kelembagaan yang ideal	%	N/A	100	100	2.380.618.900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	2.380.618.900	Biro Organisasi	
	Nilai laporan kinerja pemda	%	11,71	12,00	12,20	N/A	12,30	445.035.050	12,40	511.790.308	12,50	588.558.854	13,00	676.842.682	13,00	2.222.226.893	Biro Organisasi
	Persentase Perangkat Daerah dengan kualifikasi nilai SAKIP minimal A	%	N/A	80,00	80,00	N/A	90,00	386.512.700	95	444.489.605	100	511.163.046	100	587.837.503	100,00	1.930.002.853	Biro Organisasi
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB dgn baik	%	N/A	50,00	60,00	N/A	70,00	229.219.610	80	263.602.552	90	303.142.934	100	348.614.374	100,00	1.144.579.470	Biro Organisasi
	Persentase PD yang melaksanakan Tata Laksana dengan "BAIK"	%	N/A	50,00	60,00	N/A	70,00	328.505.205	80	377.780.986	90	434.448.134	100	499.615.354	100,00	1.640.349.678	Biro Organisasi
	Jumlah Unit Pelayanan Publik dengan Pelayanan Publik Prima (Nilai A)	Jumlah	N/A	1 Unit Pelayanan	2 Unit Pelayanan	N/A	3 Unit Pelayanan	319.195.150	4 Unit Pelayanan	367.074.423	5 Unit Pelayanan	422.135.586	6 Unit Pelayanan	485.455.924	6 Unit Pelayanan	1.593.861.082	Biro Organisasi
	Persentase Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	N/A	100,00	100,00	N/A	100,00	582.762.960	100	670.177.404	100	770.704.015	100	886.309.617	100,00	2.909.953.995	Biro Organisasi
	Persentase Perangkat Daerah yang berbasis kinerja	%	N/A	100,00	100,00	N/A	100,00	715.347.725	100	822.649.884	100	946.047.366	100	1.087.954.471	100,00	3.571.999.446	Biro Organisasi
4 01 03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					1.759.397.080		2.019.171.030		2.121.381.467		2.072.589.694		2.096.237.942		10.068.777.213	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Persentase peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) 100%	%	N/A	100	100	1.759.397.080	100	2.019.171.030	100	2.121.381.467	100	2.072.589.694	100	2.096.237.942	100	10.068.777.213	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4 01 04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					117.611.698.400		61.806.390.441		62.733.486.298		63.441.524.237		64.165.392.028		369.758.491.404	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Persentase Fasilitas Pembinaan kegiatan keagamaan	%	N/A	100	100	117.611.698.400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	117.611.698.400	Biro Kesejahteraan Rakyat	
	Tingkat Kondusifitas Kerukunan Umat Beragama	%	N/A	72,71	73,00	N/A	73,85	24.722.556.176	74,30	25.093.394.519	74,70	25.376.609.695	75,05	25.666.156.811	75,05	100.858.717.202	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Persentase Peningkatan Pengumpulan ZIS	%	2,00	5,00	5,00	N/A	5,00	12.361.278.088	5,00	12.546.697.260	5,00	12.688.304.847	5,00	12.833.078.406	5,00	50.429.358.601	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Tingkat Kepuasan Masyarakat Bidang Kesra Pelayanan Dasar	%	80,00	85,00	85,00	N/A	85,00	12.361.278.088	85,00	12.546.697.260	85,00	12.688.304.847	85,00	12.833.078.406	85,00	50.429.358.601	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Tingkat Kepuasan Masyarakat Bidang Kesra Non Pelayanan Dasar	%	80,00	85,00	85,00	N/A	85,00	12.361.278.088	85,00	12.546.697.260	85,00	12.688.304.847	85,00	12.833.078.406	85,00	50.429.358.601	Biro Kesejahteraan Rakyat
4 01 05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					3.889.498.100		4.057.425.822		4.118.287.209		4.164.768.024		4.212.288.027		20.442.267.183	Biro Hukum
	Indeks Kepuasan Pelayanan Bidang Hukum Yang Diberikan	Poin	N/A	83,30	85,00	3.889.498.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85,00	3.889.498.100	Biro Hukum	
	Persentase Kualitas Produk Hukum Daerah Sesuai Ketentuan Perundang-undangan Yang Dimanfaatkan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100,00	100,00	N/A	100,00	2.434.455.493	100,00	2.470.972.325	100,00	2.498.860.815	100,00	2.527.372.816	100,00	9.931.661.450	Biro Hukum
	Persentase Keberhasilan Pendampingan Bantuan/Layanan Hukum (Litigasi & Non Litigasi) Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100,00	100,00	N/A	100,00	1.622.970.329	100,00	1.647.314.884	100,00	1.665.907.210	100,00	1.684.915.211	100,00	6.621.107.633	Biro Hukum
4 01 06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.006.747.100		1.362.614.886		1.431.590.452		1.398.663.871		1.414.622.626		6.614.238.935	Biro Perekonomian
	Persentase Regulasi Lingkup Perekonomian yang Dimplementasikan	%	93,00	100,00	100,00	1.006.747.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	1.006.747.100	Biro Perekonomian	
	Persentase BUMD yang Sehat	%	60,00	100,00	100,00	N/A	100,00	340.653.722	100,00	357.897.613	100,00	349.665.968	100,00	353.655.657	100,00	1.401.872.959	Biro Perekonomian
	Persentase BLUD yang Baik	%	30,00	100,00	100,00	N/A	100,00	408.784.466	100,00	429.477.136	100,00	419.599.161	100,00	424.386.788	100,00	1.682.247.551	Biro Perekonomian
	Tingkat inflasi yang Stabil	%	0,79	3 ± 1%	3 ± 1%	N/A	3 ± 1%	613.176.699	3 ± 1%	644.215.703	3 ± 1%	629.398.742	3 ± 1%	636.580.182	3 ± 1%	2.523.371.326	Biro Perekonomian
4 01 07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					2.932.928.700		3.461.963.060		3.637.207.630		3.553.551.855		3.594.077.881		17.179.749.128	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat	Level 3	Level 3+	Level 3+	2.932.928.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Level 3+	2.932.928.700	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	Predikat Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Predikat	N/A	Cukup	Baik	N/A	Baik	1.153.987.687	Baik	1.212.402.543	Baik	1.184.517.285	Baik	1.198.032.627	Baik	4.748.940.142	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	93,39	85,00	85,00	N/A	87,00	1.153.987.687	90,00	1.212.402.543	94,00	1.184.517.285	96,00	1.198.032.627	96,00	4.748.940.142	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	N/A	25,00	25,00	N/A	25,00	1.153.987.687	25,00	1.212.402.543	25,00	1.184.517.285	25,00	1.198.032.627	25,00	4.748.940.142	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4 01 08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					691.631.200		966.595.720		1.015.524.795		992.167.725		1.003.488.359		4.669.407.799	Biro Administrasi Pembangunan
	Persentase Kebijakan Pengendalian Administrasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang efektif	%	N/A	100	100	691.631.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	691.631.200	Biro Administrasi Pembangunan	
	Persentase permasalahan pembangunan daerah yang dapat diselesaikan	%	10	20	35	N/A	50	966.595.720	65	1.015.524.795	80	992.167.725	95	1.003.488.359	95	3.977.776.599	Biro Administrasi Pembangunan



Kode Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
			2020	2021 *)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp					
4 02	SEKRETARIAT DPRD					197.002.127.241			198.429.294.201			200.665.432.759			208.184.995.416			210.167.917.500			1.014.449.767.116	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					83.962.800.941			84.025.361.571			84.225.361.571			91.145.669.116			92.128.591.200			435.487.784.398	Sekretariat DPRD
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	83.962.800.941	100	84.025.361.571	100	84.225.361.571	100	91.145.669.116	100	92.128.591.200	100	435.487.784.398	435.487.784.398	100	435.487.784.398	100	435.487.784.398	Sekretariat DPRD
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					113.039.326.300			114.403.932.630			116.440.071.188			117.039.326.300			118.039.326.300			578.961.982.718	Sekretariat DPRD
	IKM DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Pelayanan Set. DPRD	Poin	N/A	80,85	82,50	113.039.326.300	84,15	114.403.932.630	85,83	116.440.071.188	87,55	117.039.326.300	89,30	118.039.326.300	89,30	578.961.982.718	578.961.982.718	89,30	578.961.982.718	89,30	578.961.982.718	Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
5 01	PERENCANAAN					27.091.394.972			29.987.465.095			33.193.125.113			36.741.470.188			40.669.133.351			167.682.588.718	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					17.257.163.272			19.101.954.026			21.143.952.911			23.404.241.477			25.906.154.891			106.813.466.578	Bappeda
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	17.257.163.272	100	19.101.954.026	100	21.143.952.911	100	23.404.241.477	100	25.906.154.891	100	106.813.466.578	106.813.466.578	100	106.813.466.578	100	106.813.466.578	Bappeda
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					2.931.621.000			3.245.011.285			3.591.902.991			3.975.877.421			4.400.898.717			18.145.311.415	Bappeda
	Persentase program prioritas dengan tingkat ketercapaian >85%	%	100	100	100	1.305.811.674	100	1.622.505.642	100	1.795.951.496	100	1.987.938.711	100	2.200.449.359	100	8.912.656.881	8.912.656.881	100	2.200.449.359	100	8.912.656.881	Bappeda
	Persentase Dokumen Perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Prov / Kab / Kota dengan nilai baik	%	100	100	100	1.625.809.326	100	1.622.505.642	100	1.795.951.496	100	1.987.938.711	100	2.200.449.359	100	9.232.654.533	9.232.654.533	100	2.200.449.359	100	9.232.654.533	Bappeda
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					6.902.610.700			7.640.499.784			8.457.269.211			9.361.351.289			10.362.079.742			42.723.810.726	Bappeda
	Persentase Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja) SKPD Provinsi dengan nilai baik	%	100	100	100	2.761.044.280	100,00	2.444.959.931	100	2.706.326.147	100	2.995.632.413	100	3.315.865.517	100	14.223.828.288	14.223.828.288	100	3.315.865.517	100	14.223.828.288	Bappeda
	Persentase SKPD Provinsi yang menerapkan perencanaan anggaran berbasis kinerja	%	100	100	100	1.725.652.675	100,00	2.826.984.920	100	3.129.189.608	100	3.463.699.977	100	3.833.969.505	100	14.979.496.685	14.979.496.685	100	3.833.969.505	100	14.979.496.685	Bappeda
	Persentase program prioritas dengan tingkat ketercapaian >85%	%	-	100	100	2.415.913.745	100,00	2.368.554.933	100	2.621.753.545	100	2.902.018.900	100	3.212.244.720	100	13.520.485.753	13.520.485.753	100	3.212.244.720	100	13.520.485.753	Bappeda
5 02	KEUANGAN					1.519.193.860.952			1.529.302.953.964			1.564.269.981.797			1.571.624.396.319			1.589.556.630.681			7.773.947.823.714	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					200.225.114.152			201.088.587.249			204.267.691.536			206.408.534.630			208.763.656.010			1.020.753.583.577	Bakeuda
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	200.225.114.152	100	201.088.587.249	100	204.267.691.536	100	206.408.534.630	100	208.763.656.010	100	1.020.753.583.577	1.020.753.583.577	100	208.763.656.010	100	1.020.753.583.577	Bakeuda
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					1.300.529.253.900			1.309.709.201.937			1.341.118.751.442			1.345.985.044.262			1.361.342.733.617			6.658.684.985.158	Bakeuda
	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	7,78	5,15	N/A	N/A	5,28	259.938.281.273	5,30	264.845.745.419	5,32	265.707.684.830	5,34	268.739.409.514	5,34	1.059.231.121.035	1.059.231.121.035	5,34	268.739.409.514	5,34	1.059.231.121.035	Bakeuda
	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	%	22,10	26,95	21,00	1.300.529.253.900	27,87	547.961.225.419	24,89	564.400.770.431	25,73	565.234.355.968	25,73	571.683.679.969	25,73	3.549.809.285.687	3.549.809.285.687	25,73	571.683.679.969	25,73	3.549.809.285.687	Bakeuda
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	0,48	0,39	N/A	N/A	0,49	270.565.570.383	0,48	276.262.373.426	0,48	278.666.349.951	0,48	281.845.933.004	0,48	1.107.340.226.765	1.107.340.226.765	0,48	281.845.933.004	0,48	1.107.340.226.765	Bakeuda
	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	4,36	4,36	N/A	N/A	1,73	231.244.124.861	2,17	235.609.862.166	2,61	236.376.653.513	3,05	239.073.711.130	3,05	942.304.351.670	942.304.351.670	3,05	239.073.711.130	3,05	942.304.351.670	Bakeuda
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.776.384.900			1.802.353.181			1.935.230.899			2.086.120.588			2.109.923.224			9.710.012.791	Bakeuda
	Assets management	%	24,50	24,50	25,00	1.776.384.900	25,00	1.802.353.181	25,00	1.935.230.899	25,00	2.086.120.588	25,00	2.109.923.224	25,00	9.710.012.791	9.710.012.791	25,00	2.109.923.224	25,00	9.710.012.791	Bakeuda
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					16.663.108.000			16.702.811.598			16.948.307.921			17.144.696.839			17.340.317.830			84.799.242.188	Bakeuda
	Rasio PAD	%	1,65	1,60	1,60	15.192.704.368	1,60	15.228.904.399	1,60	15.452.737.375	1,60	15.631.796.334	1,60	15.810.155.130	1,60	77.316.297.606	77.316.297.606	1,60	15.810.155.130	1,60	77.316.297.606	Bakeuda
	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	-5,88	0,05	0,06	1.470.403.632	0,05	1.473.907.199	0,05	1.495.570.546	0,05	1.512.900.305	0,05	1.530.162.700	0,05	7.482.944.582	7.482.944.582	0,05	1.530.162.700	0,05	7.482.944.582	Bakeuda
5 03	KEPEGAWAIAN					23.585.800.955			23.890.313.418			24.273.374.723			25.571.387.104			25.863.156.631			123.184.032.830	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					15.572.976.190			15.631.402.205			15.881.211.424			16.786.043.561			16.977.572.318			80.849.205.699	BKD
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	15.572.976.190	100	15.631.402.205	100	15.881.211.424	100	16.786.043.561	100	16.977.572.318	100	80.849.205.699	80.849.205.699	100	16.977.572.318	100	80.849.205.699	BKD
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					8.012.824.765			8.258.911.213			8.392.163.298			8.785.584.543			8.885.584.312			42.334.827.131	BKD
	Persentase SKPD yang menerapkan manajemen Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur	%	N/A	N/A	85	1.731.945.443	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85	1.731.945.443	1.731.945.443	85	1.731.945.443	85	1.731.945.443	BKD
	Persentase SKPD melaksanakan Pemelaksanaan Talenta SDMA	%	N/A	N/A	N/A	N/A	81,00	2.370.149.540	82,00	2.408.390.340	83,00	2.521.225.549	85,00	2.549.992.732	85,00	9.849.758.160	9.849.758.160	85,00	2.549.992.732	85,00	9.849.758.160	BKD
	Persentase SKPD dengan IP ASN Minimal kategori Sedang	%	N/A	N/A	75	5.828.864.463	76,00	5.253.769.109	77,00	5.338.535.208	78,00	5.588.650.286	80,00	5.652.416.786	80,00	27.662.235.852	27.662.235.852	80,00	5.652.416.786	80,00	27.662.235.852	BKD
	Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Bidang Kepegawaian	Indeks	81,72	83,63	85	452.014.859	86,00	634.992.565	87,00	645.237.751	88,00	675.467.708	90,00	683.174.794	90,00	3.090.887.677	3.090.887.677	90,00	683.174.794	90,00	3.090.887.677	BKD
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					33.750.621.793			33.950.433.016			35.669.003.935			34.848.616.844			35.246.239.563			173.464.915.151	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					16.515.597.102			16.598.157.313			17.438.356.036			17.037.273.847			17.231.669.142			84.821.053.441	BPSDM
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	16.515.597.102	100	16.598.157.313	100	17.438.356.036	100	17.037.273.847	100	17.231.669.142	100	84.821.053.441	84.821.053.441	100	17.231.669.142	100	84.821.053.441	BPSDM
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					17.235.024.691			17.352.275.703			18.230.447.899			17.811.342.997			18.014.570.421			88.643.861.710	BPSDM



Kode Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021 *)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persenase alumni Pelatihan yang Menerapkan Kompetensi Teknis, Manajerial, Sosial Kultural, dan Pemerintahan Sesuai Tujuan Diklat	%	N/A	89,10	90,00	17.235.024.691	90,90	5.784.091.901	91,81	6.076.882.633	92,73	5.937.114.332	93,65	6.004.856.807	94,59	41.037.970.364	BPJMD
	Persenase Peserta Diklat yang Memenuhi Standar Kompetensi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	95,48	5.784.091.901	95,95	6.076.882.633	96,43	5.937.114.332	96,91	6.004.856.807	96,91	23.802.945.673	BPJMD
	Indeks Kepuasan Pelayanan BPJMD	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	84,05	5.784.091.901	84,47	6.076.882.633	84,89	5.937.114.332	85,32	6.004.856.807	85,32	23.802.945.673	BPJMD
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					13.144.815.900		13.453.526.973		13.734.544.508		13.809.449.985		13.967.015.809		48.109.353.175	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					11.763.729.600		11.669.427.414		11.860.133.831		11.978.150.753		12.114.821.453		59.386.263.054	Balitbangda
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	11.763.729.600	100	11.669.427.414	100	11.860.133.831	100	11.978.150.753	100	12.114.821.453	100	59.386.263.054	Balitbangda
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.381.086.300		1.784.099.557		1.874.410.677		1.831.299.231		1.852.194.355		8.723.090.121	Balitbangda
	Persenase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di manfaatkan untuk Percepatan Pembangunan Daerah	%	79,26	88,20	90	1.381.086.300	90,05	1.784.099.557	90,10	1.874.410.677	90,15	1.831.299.231	90,20	1.852.194.355	90,20	8.723.090.121	Balitbangda
5 07	PENGEOLOLAAN PENGHUBUNG					9.148.771.669		9.211.637.505		9.263.413.016		9.343.454.516		9.450.063.333		46.417.340.039	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					8.823.097.869		8.869.620.893		8.904.083.523		8.992.389.602		9.094.992.767		44.684.184.655	Badan Penghubung
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	8.823.097.869	100	8.869.620.893	100	8.904.083.523	100	8.992.389.602	100	9.094.992.767	100	44.684.184.655	Badan Penghubung
5 07 02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					325.673.800		342.016.612		359.329.493		351.064.914		355.070.565		1.733.155.384	Badan Penghubung
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan	Poin	N/A	78,21	79,00	325.673.800	79,79	342.016.612	80,59	359.329.493	81,39	351.064.914	82,21	355.070.565	83,03	1.733.155.384	Badan Penghubung
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6 01	INSPEKTORAT DAERAH					26.077.915.184		26.216.330.285		26.843.400.924		26.909.902.703		27.216.944.693		133.264.493.790	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					16.639.375.484		16.748.723.724		16.896.544.119		17.191.823.604		17.387.982.311		84.844.449.242	Inspektorat
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	16.639.375.484	100	16.748.723.724	100	16.896.544.119	100	17.191.823.604	100	17.387.982.311	100	84.844.449.242	Inspektorat
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					7.026.388.900		7.050.461.607		7.407.355.974		7.236.986.787		7.319.560.806		36.040.754.074	Inspektorat
	Persenase OBRIK Tanpa Temuan Indikasi Kerugian Negara/Daerah	%	N/A	100	100	7.026.388.900	100	7.050.461.607	100	7.407.355.974	100	7.236.986.787	100	7.319.560.806	100	36.040.754.074	Inspektorat
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					2.412.150.800		2.417.144.954		2.539.500.832		2.481.092.313		2.509.401.576		12.359.290.475	Inspektorat
	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Poin	3,70	3,80	3,85	2.412.150.800	3,95	2.417.144.954	4,05	2.539.500.832	4,13	2.481.092.313	4,15	2.509.401.576	4,15	12.359.290.475	Inspektorat
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					31.844.650.396		26.449.254.176		227.146.386.823		27.778.023.717		28.169.193.052		341.387.508.165	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					9.236.410.018		9.397.569.565		9.485.845.036		10.159.417.092		10.275.336.041		48.554.577.750	Bakesbangpol
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100	100	100	9.236.410.018	100	9.397.569.565	100	9.485.845.036	100	10.159.417.092	100	10.275.336.041	100	48.554.577.750	Bakesbangpol
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					6.971.790.800		7.080.479.516		7.438.893.389		7.267.798.841		7.350.724.426		36.109.686.973	Bakesbangpol
	Angka Penanganan Konflik Sosial	Angka	0	0	0	6.971.790.800	0	3.540.239.758	0	3.719.446.695	0	3.633.899.421	0	3.675.362.213	0	21.540.738.886	Bakesbangpol
	Indeks Capaian Revolusi Mental	Indeks	N/A	67,01	N/A	N/A	67,03	3.540.239.758	67,04	3.719.446.695	67,05	3.633.899.421	67,06	3.675.362.213	67,06	14.568.948.086	Bakesbangpol
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					10.339.957.600		4.455.000.000		204.544.100.000		4.634.982.000		4.727.681.640		228.701.721.240	Bakesbangpol
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/kada	Persen	N/A	68,60	70,00	10.339.957.600	71,40	4.455.000.000	72,82	204.544.100.000	74,28	4.634.982.000	75,77	4.727.681.640	75,77	228.701.721.240	Bakesbangpol
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					3.855.554.000		3.850.000.000		3.927.000.000		4.005.540.000		4.085.650.800		19.723.744.800	Bakesbangpol
	Indeks kinerja ORMAS	Indeks	N/A	N/A	80	3.855.554.000	80,32	3.850.000.000	80,64	3.927.000.000	80,96	4.005.540.000	81,29	4.085.650.800	81,28	19.723.744.800	Bakesbangpol
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					612.764.800		639.196.203		671.552.315		656.106.611		663.592.788		3.243.212.717	Bakesbangpol
	Indeks ketahanan nasional	Indeks	N/A	2,85	2,9	612.764.800	2,95	639.196.203	2,97	671.552.315	2,99	656.106.611	3	663.592.788	3	3.243.212.717	Bakesbangpol
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					828.173.178		1.027.008.893		1.078.996.083		1.054.179.173		1.066.207.357		5.054.564.684	Bakesbangpol
	Indeks kewaspadaan nasional	Indeks	N/A	61	62	828.173.178	63	1.027.008.893	64	1.078.996.083	65	1.054.179.173	66	1.066.207.357	66	5.054.564.684	Bakesbangpol
TOTAL						6.427.109.633.960		6.535.727.786.774		6.930.374.582.721		6.855.306.713.169		6.970.147.396.622		33.718.466.113.246	

Keterangan :

- Kondisi Awal Yang bertanda bintang (*) adalah Target / Proyeksi
- N/A = Indikator dimaksud tidak digunakan di tahun berkenaan



R P J M D **VIII**

P r o v i n s i

K A L I M A N T A N

KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

2 0 2 1 - 2 0 2 6 **DAERAH**



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan sasaran kinerja daerah disusun berdasarkan tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi pembangunan. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 pada proses pengukurannya diterjemahkan ke dalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator



yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.



R P J M D
P r o v i n s i
K A L I M A N T A N
S E L A T A N
T a h u n
2 0 2 1 - 2 0 2 6



Tabel VIII-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator Kinerja Utama	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	N/A	69.1	72.71	73.32	73.85	74.3	74.7	74.7
2	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Angka	70.91	71.28	71.70	72.20	72.65	73.05	73.50	73.50
3	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	50.67	51.08	52	52.665	53.33	53.995	54.66	54.66
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	-1.81	3.48	4,0 - 4,5	4,5 - 5,2	5,2 - 6,0	6,0 - 6,24	6,24 - 6,5	6,24 - 6,5
5	Persentase penduduk miskin	%	4.38	4.83	4,80 - 4,60	4,60 - 4,40	4,40 - 4,22	4,22 - 4,05	4,05 - 3,77	4,05 - 3,77
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.74	4.95	4.39	4.22	4.05	3.88	3.71	3.71
7	Indeks Williamson	Indeks	0.391	0,383*	0.375	0.367	0.359	0.351	0.343	0.343
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68.47	70,85*	72.05	73.24	74.44	75.64	76.84	76.84
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68.43	70,26*	70.58	70.9	71.22	71.54	71.86	71.86
10	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	144.81	138*	138	135	132	129	126	126
11	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	16.5	18	21	22.2	24.6	26.6	28.9	28.9
12	Indeks gini	Indeks	0.332	0.330	0.328	0.326	0.324	0.322	0.310	0.310

2021 - 2026

Tabel VIII-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi										
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1.81	3.48	4,0 - 4,5	4,5 - 5,2	5,2 - 6,0	6,0 - 6,24	6,24 - 6,50	6,24 - 6,50
2	Laju Inflasi	%	1,68	2,5*	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0
3	PDRB per Kapita (ADHK)	Rp. Juta/orang	32.21	32.85	33,16 - 34,16	34,16 - 35,70	35,70 - 37,56	37,56 - 39,81	39,81 - 42,36	39,81 - 42,36
4	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp. Juta/orang	44.08	46.712	47,50 - 49,61	49,61 - 51,60	51,60 - 53,66	53,66 - 55,81	55,81 - 57,48	55,81 - 57,48
4	Kemiskinan	%	4.38	4.83	4,80 - 4,60	4,60 - 4,40	4,40 - 4,22	4,22 - 4,05	4,05 - 3,77	4,05 - 3,77
5	Indeks Gini	Indeks	0.332	0.330	0.328	0.326	0.324	0.322	0.310	0.310
Fokus Kesejahteraan Sosial										
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70.91	71.28	71.70	72.20	72.65	73.05	73.50	73.50
2	Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	8.29	8.34	8.47	8.56	8.65	8.74	8.83	8.83
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.68	12.81	12.94	13.07	13.2	13.33	13.46	13.46
4	Indeks Williamsons	Indeks	0.391	0.383*	0.375	0.367	0.359	0.351	0.343	0.343
5	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68.66	68.83	70.64	71.05	71.46	71.99	72.3	72.3
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.74	4.95	4.39	4.22	4.05	3.88	3.71	3.71



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68.43	70,26*	70.58	70.9	71.22	71.54	71.86	71.86
8	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	16.5	18	21	22.2	24.6	26.6	28.9	28.9
9	Indeks Resiko Bencana	Indeks	144.81	138*	138	135	132	129	126	126
10	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	%	69.33	69.26	69.74	69.94	70.16	70.38	70.6	70.6
ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Nilai Tukar Petani	%	99.18	101,58*	102.23	102.7	103.18	103.69	103.8	103.8
2	Keterbukaan Ekonomi (Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB ADHK)	Rasio	0.185	0.203	0.194	0.195	0.196	0.196	0.197	0.197
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	49.38	49.72	50	50.28	50.55	50.83	51.11	51.11
4	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR	Rasio	1.19	1.11	1.2	1.24	1.27	1.28	1.3	1.3
5	Rasio Elektrifikasi	%	99.25	99.34	99.43	99.52	99.61	99.7	99.79	99.79
6	Rasio Konektivitas	Rasio	0.55	0.57	0.59	0.61	0.63	0.65	0.67	0.67
7	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	Indeks	67.56	76.57	79.33	81.21	85.21	87.04	88.26	88.26
8	Konflik antar dan inter umat beragama yg ditangani	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib Dasar										
1	Pendidikan									
	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	%	64.71	65.03	65.43	65.83	66.23	66.23	67.03	67.03
	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	%	32.6	33	33.4	33.8	34.2	34.6	35	35
	APK SM sederajat dan Pendidikan Khusus	Persen	93.36	93.8	94.24	94.68	95.12	95.56	96	96
	APM SM sederajat dan Pendidikan Khusus	Persen	66.04	0	0	66.94	67.24	67.54	67.84	67.84
	Persentase Guru pendidikan SMA/SMK/Diklus yang professional	Persen	74.36	75	75.64	76.28	76.92	77.56	78.2	78.2
2	Kesehatan									
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	terdampak dan Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)									
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Ratio TT.1000 penduduk	1,6125 : 1000	1,43 : 1000	1,5 : 1000	1,5 : 1000	1,5 : 1000	1,5 : 1000	1,5 : 1000	1,5 : 1000
	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Angka	9	9	0	8	7	7	6	6
	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	135	104	112	111	110	109	108	108
	Persentase Fasyankes dengan SDMK Sesuai Standar	%	0	56.84	58	59.16	60.34	61.55	62.78	62.78
	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	%	0	75.46	77	0	0	0	0	77
	Cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	88.60%	91.19%	90%	93%	95%	98%	98%	98%
	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan Kawasan Sehat	Angka	6	7	7	10	12	13	13	13
	Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu (5,5% per tahun);	%	102	140 (-37,3%)	91 (11%)	85 (16,5%)	80 (22%)	74 (27,5%)	68 (33%)	68 (33%)
	Persentase Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	80.78	85.01	85.5	87	89	91	93	93



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0.187	0.190	0.215	0.220	0.225	0.230	0.235	0.235
	Persentase Puskesmas yang terakreditasi (Utama)	%	14.34	14.34	14.34	14.76	15.18	15.18	16.03	16.03
	Persentase Rumah Sakit terakreditasi (Paripurna)	%	23:08	23:08	25	25	27	27	29	29
	Persentase Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN mendapatkan pelayanan kesehatan;	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	Angka	7	9	10	10	12	13	13	13
	Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	65	69.3	73	76	79	82	85	85
	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	%	85.4	26.3	90	90	90	90	90	90
	Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	60	52.8	93.5	94	94.5	95	95	95
	Jumlah Kab/kota yang menerapkan KTR	Angka	5	5	5	6	7	8	9	9
	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 Tahun;	%	19.5	19.2	15	14	13	12	11	11
	prevalensi tekanan darah tinggi	%	42	36.6	31	30	29	28	27	27



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Persentase Fasyankes dengan Alkes sesuai standar	%	52	70	72	74	76	78	80	80
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	38.9	42.42	45.93	49.45	52.97	56.48	60	
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	%	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	16.67	30.56	44.45	58.34	72.22	86.11	100	
	Tingkat Kemantapan Jalan	%	79.92	76	81	81	82	83	84	84



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Persentase Meningkatnya Kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan Bersertifikat	%	20	23	18	32	53	72	83	83
	Persentase Pengendali Daya Rusak Air dalam Kondisi Baik	%	21	24.74	29.02	33.3	37.58	41.86	46.14	46.14
	Tingkat aksesibilitas Jalan	%	27.82	30.22	35.75	43.75	51.75	60.11	66.84	66.84
	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	%	30	54.03	54.43	54.83	55.23	55.63	55.63	55.63
	Cakupan Pelayanan Air Limbah yang layak	%	84.45	62.33	90	93	97	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Air Minum yang layak	%	77.51	85.49	88.68	94.34	100	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Persampahan	%	0	0	0	50.27	52.27	54.27	56.27	56.27
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
	Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana /Program Pemerintah Provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni	%	37.51	38.49	39.47	43.75	48.02	52.96	57.89	57.89
	Persentase Luasa Kawasan Kumuh 10-15 Hektar yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase luasan kawasan	%	22.91	26.92	30.93	34.97	39.19	43.61	48.07	48.07



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	permukiman kumuh yang tertangani									
	Persentase Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	%	42.7	43.93	45.16	46.41	47.66	48.91	50.16	50.16
5	Ketentraman, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	75	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase penanganan pra bencana	%	0	0	0	100	100	100	100	100
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	0	0	0	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	0	60	60	61	62	63	64	64
6	Sosial									
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	1.7	1.98	2.27	2.55	2.84	3.12	3.41	3.41



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	8.36	8.64	8.50	8.79	9.07	9.36	9.64	9.64
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	0.43	0.715	0.45	0.735	1.02	1.305	1.59	1.59
	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	2.26	2.55	2.26	2.55	2.83	3.12	3.40	3.40
	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	0	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase PPKS yang Mandiri	%	18.79	19.00*	19.29	19.79	20.29	20.79	21.29	21.29
	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	0	10.39	10.60	10.81	11.03	11.25	11.36	11.47
	Persentase Peningkatan Pendapatan Penduduk Miskin	%	0	6.35	6.48	6.61	6.74	6.88	7.01	7.01
	Persentase Makam Pahlawan dalam Kondisi Baik	%	0	100	100	100	100	100	100	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar										
1	Tenaga Kerja									
	Persentase kabupaten / kota yang menyusun	%	100	100	100	100	100	100	100	100



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	rencana tenaga kerja									
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	21.27	21.30	21.33	21.43	21.53	21.63	21.73	21.73
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	5.50	6.20	6.22	6.23	6.24	6.25	6.26	6.26
	Persentase tenaga Kerja yang ditempatkan	%	0.48	0.50	24.87	26.03	27.21	28.41	29.63	29.63
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	9.10	9.20	11.49	12.48	13.47	14.46	15.46	15.46
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	9.10	9.20	18.96	22.21	24.99	27.39	29.48	29.48
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	%	0	0.98	1.00	1.02	1.04	1.06	1.08	1.08
	Rasio Anak korban Kekerasan	Rasio	0	1.18	1.20	1.22	1.25	1.27	1.30	1.30
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0	19.6	20	30	40	50	60	60



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Indeks Ketahanan Keluarga	Poin	0	80.36	82.00	83.64	85.31	87.02	88.76	88.76
	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%	0	73.50	75.00	76.50	78.03	79.59	81.18	81.18
	TPAK Perempuan	%	0	0	0	60	61	62	63	63
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88.86	88.91	88.97	89.04	89.10	89.16	89.23	89.23
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74.48	74.44	75.39	76.33	77.27	78.21	79.15	79.15
	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	%	16.24	16.26	15.01	13.77	12.53	11.29	10.04	10.04
	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen (DPRD)	%	-	20	20	20	25	25	25	25
	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	%	16.24	16.26	15.01	13.77	12.53	11.29	10.04	10.04
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	65.11	69.87	69.89	69.91	69.93	69.95	69.97	69.97
3	Pangan									
	Persentase cadangan pangan	%	22.24	20.19	20.22	20.32	20.72	21.14	21.82	21.82
	Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Yang Memenuhi Stok Pangan Minimal	%	69.78	71.98	74.18	76.37	78.57	80.77	82.97	82.97
	Koefisien Variasi (CV) harga beras di tingkat konsumen (%)	%	7.44	7.3	7.2	7.1	7	6.9	6.8	6.8



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Konsumsi beras per kapita per tahun (Kg/Kap/Th)	Kg/Kap/Th	96.1	95.3	93.6	91.9	90.2	88.5	86.8	86.8
	Konsumsi pangan lokal per kapita per tahun (Kg/Kap/Th)	Kg/Kap/Th	19.25	20.03	20.94	21.85	22.76	23.67	24.58	24.58
	Persentase Penurunan Desa Rawan Pangan	%	16.28	16.19	16.09	15.99	15.89	15.79	15.69	15.69
	Persentase Komoditas Pangan Yang Aman Dikonsumsi	%	80	80	80	82	84	86	88	88
4	Pertanahan									
	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	35.313	44.879	20	40	60	80	100	100
5	Lingkungan Hidup									
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68.43	70,26*	70.58	70.9	71.22	71.54	71.86	71.86
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase luasan lahan terdampak yang dikendalikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter Indeks Kualitas Air	%	9.62	11.54	13.46	15.38	17.31	23.08	30.77	30.77



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Persentase kualitas udara dengan kategori baik dan sangat baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase air laut dengan kualitas kategori baik	%	0	17.39	21.74	21.74	26.07	26.07	30.43	30.43
	Persentase penurunan emisi GRK dari Bussines As Usual	Gg CO2-eq	8917	6505	7406	8415	9485	10606	11770	11770
	Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Lahan Gambut	Indeks	53	54	54.15	55	55	56	56	56
	Persentase dunia usaha yang taat terhadap pengelolaan lingkungan	%	0	88.89	100	100	100	100	100	100
	Persentase Peningkatan keanekaragaman hayati	%	0	4	7:02	10:07	12:01	14.99	18.73	18.73
	Persentase usaha dan/kegiatan yang menerapkan pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengelolaan sampah di Kalsel	%	78	98	99	99	99	100	100	100
	Persentase Sampah yang ditangani di TPA Sampah Regional Banjarbakula	%	98	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pengurangan emisi dari Limbah Padat domestik di TPA (Pembuangan akhir sampah padat)	%	0	27.5	30.5	33.4	36.3	39.3	42.4	42.4



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH	%	0	0	33	50	50	50	50	50
	Persentase sekolah yang berbudaya lingkungan	%	27	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kampung atau desa yang melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sesuai kriteria	%	24	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase partisipasi komunitas yang melakukan kegiatan pelestarian lingkungan sesuai kriteria	%	51	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase peningkatan pelestari lingkungan sesuai kriteria	%	0	58	64.71	70.59	76.47	83.35	88.24	88.24
	Persentase masyarakat yang mendapat penghargaan di bidang Lingkungan Hidup sesuai kriteria	%	0	0	100	100	100	100	100	100
	Persentase dunia usaha yang mendapat kategori taat dibidang lingkungan hidup	%	93	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kasus LH yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	Tingkat Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 (satu) Tahun	%	0	100	0	100	100	100	100	100



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Pemanfaatan data kependudukan	%	5	80	80	80	80	80	80	80
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan	%	0	39.2	40	40.8	41.616	42.448	43.297	43.297
	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kalimantan Selatan	%	0	99.15	0	99.249	99.299	99.348	99.398	99.398
	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran di Kalimantan Selatan	%	0	94.53	95	95.475	95.95	96.43	96.91	96.91
	Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pasangan dari Laporan Perkawinan di Kalimantan Selatan	%	0	100	0	100	100	100	100	100
	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan	%	0	90.46	92.31	94.16	96.04	97.96	99.92	99.92
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	Persentase peningkatan status desa mandiri	Desa	6	6	9	13	13	13	13	13
	Persentase pengentasan desa tertinggal	Desa	223	223	201	181	181	181	181	181
	Indeks Ketahanan Ekonomi	Poin	0	0	0	0.61	0.62	0.64	0.65	0.66
	Indeks Ketahanan Sosial	Poin	0	0.75	0.76	0.78	0.79	0.81	0.83	0.83



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Indeks Ketahanan Lingkungan	Indeks	0	0	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.80
	Jumlah BUMDes berkembang	Buah	-	522	542	562	582	602	622	622
	Jumlah BUMDes Maju	Buah	-	45	50	55	60	65	70	70
	Jumlah Desa Berkembang	Desa	-	1334	1364	1394	1424	-	-	1424
	Jumlah Desa Mandiri	Desa	-	28	28	48	58	68	78	78
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	Persentase Kebutuhan ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	0	7.80	7.96	8.12	8.28	8.45	8.62	8.62
	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2:45	2:43	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0	1.47	0	1.53	1.56	1.59	1.62	1.62
9	Perhubungan									
	Rasio konektivitas	Rasio	0.55	0.57	0.59	0.61	0.63	0.65	0.67	0.67
		Rasio	0.45	0.46	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.50
	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa	%	17.6	19.5	20	30	40	50	60	60
	Persentase Terangkutnya Penumpang dan Barang	%	65.0	65.0	67.5	70.0	72.5	75.0	77.5	77.5
	Persentase Lintas Penyeberangan dan	%	20	40	40	60	60	60	60	60



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Kapal Angkutan Penyeberangan Antar Kota dan Kabupaten dalam Provinsi yang Beroperasi									
10	Komunikasi dan Informatika									
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.03	2.60	3.10	3.25	3.40	3.55	3.65	3.65
	Visitor (akses) Terhadap Informasi Publik yang Valid	Visitor	200000	200000	220000	240000	260000	280000	300000	1300000
	Persentase SKPD yang Menerapkan E-Government	%	89	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah									
	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	17.31	20	25	30	35	40	45	45
	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	14.60	15.00	16.67	18.17	19.67	21.17	22.67	22.67
	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	25	30	35	40	45	50	55	55



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Persentase usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	20	30	33	36	39	42	50	50
	Persentase Koperasi yang telah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	0	10	12	14	16	18	20	80
	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	22	23	25	25	31	39	47	47
	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	%	0.5	1	1.8	2	2.2	2.4	2.6	11
	Persentase jumlah usaha kecil yang	%	0.8	1	1.8	1.9	2	2.1	2.2	10



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	diberikan dukungan fasilitasi pemasaran									
12	Penanaman Modal									
	Persentase Peningkatan calon investor	%	0	30	30	32	36	40	42	42
	Persentase realisasi pelaksanaan kemitraan	%	0	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Potensi Investasi Daerah berbasis lingkungan	%	0	20	20	25	30	35	40	40
	Nilai IKM Penanganan (Pelayanan) pengaduan	Poin	85.25	85	88.25	88.5	88.75	89	89.25	95
	Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Perusahaan yang aktif dalam investasinya	%	25.76	30	35	40	45	50	50	50
	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Kepemudaan dan Olah Raga									
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	50.67	51.08	52	52.67	53.33	53.99	54.66	54.66
	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	-	45	30	40	50	35	45	200
	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Sosial Masyarakat	%	-	76.44	78	79.56	81.15	82.77	84.43	84.43
	Persentase Pemuda Wirusaha Kerah Putih (White Collar)	%	-	-	-	0.4	0.41	0.42	0.43	0.44



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi	%	-	-	-	6.01	6.02	6.04	6.05	6.06
	Persentase Pemuda Berpendapat Dalam Rapat Kemasyarakatan	%	-	-	-	5.01	5.02	5.03	5.04	5.05
	Persentase Atlet Binaan PPLP Yang Berprestasi	%	-	24.5	25	25.5	26.01	26.53	27.06	27.06
	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepramukaan	%	-	29.4	30	30.6	31.212	31.83	32.47	32.47
14	Statistik									
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	70.83	80	90	93	96	98	100	100
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	70.83	80	90	93	96	98	100	100
	Jumlah Jenis Data Statistik Sektorial yang Akurat	Jenis	230	230	235	240	245	250	255	255
15	Persandian									
	Tingkat Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	Poin	3.11	3.11	3.15	3.19	3.23	3.27	3.31	3.31



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
16	Kebudayaan									
	Persentase Kebudayaan Daerah yang Berkembang	0	-	-	-	36.36	45.45	54.55	63.64	63.64
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	57.13	58.64	60.15	61.67	63.2	64.74	66.29	66.29
	Persentase Kesenian tradisional yang Berkembang	%	-	-	-	26.67	33.33	40	46.67	46.67
	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	-	20	20	28	32	36	40	40
17	Perpustakaan									
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	-	-	45	46.35	47.74	49.17	50.64	52.16
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	-	58.8	-	61.2	62.424	63.67	64.94	64.94
18	Kearsipan									
	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	46.75	20.16	27.05	33.95	40.95	47.5	54.43	54.43
	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara	%	100	100	100	100	100	100	100	100



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Persentase SKPD yang Mengelola Arsip Sesuai NSPK	%	-	35.28	36.00	36.72	37.45	38.20	38.97	38.97
Layanan Urusan Pilihan										
1	Pariwisata									
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0.09	5	5	5	5	5	5	5
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	99.9	10	10	10	10	10	10	10
	Tingkat hunian akomodasi	%	37.65	38	40	44	48	52	56	56
2	Pertanian									
	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura	%	0.9397	-	0,78 (TP) dan 1,83 (Hortikultura)	1.2179	1.3965	1.4179	1.5036	1.5036
	Produktivitas Tanaman Perkebunan (Karet) per Hektar per tahun	Kg/ha	451.98	72	75.33	75.5	76	76.5	77	77
	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	3	4	5	6	7	8	9	9
	Persentase penurunan kejadian jumlah kasus penyakit hewan menular	%	10.51	75	80	85	90	95	100	100
3	Energi dan Sumber Daya Mineral									



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	100	13.82	17.89	21.95	26.02	30.08	34.15	34.15
	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	98.31	98.36	98.41	98.46	98.51	98.56	98.61	98.61
4	Perdagangan									
	Tertib Usaha	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	N/A	96	90	91	92	93	94	94
	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	-26.96	57.71	5.96	8	10	12	14	14
	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	75	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan	%	50	60	65	70.5	80	83	85	85
	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	0	0.05	0.1	0.11	0.3	0.4	0.5	0.5
	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	10.46	10.28	10.5	11	12	13	14	14
5	Perindustrian									
	Persentase Pertumbuhan Industri	%	3	5	5.75	6	6.25	7.65	7.72	9.5
	Persentase jumlah hasil pemantauan	%	15	16	18.75	20.56	25.7	30	40	26



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait									
	Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	50	65	100	100	100	100	100	100
6	Kelautan dan Perikanan									
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	ton	139079	155000	157000	167419	177272	187465	198450	198450
	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Transmigrasi									
	Persentase Luas Sisa Areal HPL yang dapat dikembangkan oleh Pemda	%	0	0	20	40	60	80	100	100
	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang Mandiri	%	100	100	100	-	-	-	-	100
	Persentase satuan permukiman yang difasilitasi pengembangan	%	-	-	-	100	100	100	100	100



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	kawasan transmigrasi									
8	Kehutanan									
	Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan	%	21.984,67 Ha	15	15	15	15	15	15	60
	Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esensial yang aman dari ancaman kepunahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNBP dan Retribusi Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase peningkatan unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat	%	1.730.065,63 Ha	10	10	10	10	10	10	50
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	%	-	10	10	10	10	10	10	50
	Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan	%	95	95	95	95	95	95	95	95



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Persentase penyediaan dokumen perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan	%	1.730.013 Ha	99	99	99	99	99	99	99
PENUNJANG URUSAN										
1	Perencanaan dan Keuangan									
	Rasio PAD	%	1.65	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	Opini Laporan keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Maturitas SPIP	Nilai	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	7.78	5.1548	-	5.28	5.3	5.32	5.34	5.34
	Persentase program prioritas dengan tingkat ketercapaian >85%	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja) SKPD Provinsi dengan nilai baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Assets management	%	24.5	24.5	25	25	25	25	25	25



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
2	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan									
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	N/A	71.17	72	75	78	80	82	82
	Persentase SKPD yang menerapkan manajemen talenta Sumber Daya Manusia Aparatur	%	-	-	85	-	-	-	-	85
3	Penelitian dan pengembangan									
	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di manfaatkan untuk Percepatan Pembangunan Daerah	%	79.26	88.2	90	90.05	90.1	90.15	90.2	90.2
4	Pengawasan									
	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Poin	3.7	3.8	3.85	3.95	4.05	4.131	4.15	4.15
	Persentase OBRİK Tanpa Temuan Indikasi Kerugian Negara/Daerah	%	-	100	100	100	100	100	100	100
5	Penunjang Urusan Pemerintahan Lainnya									
	Persentase peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan	%	0	100	100	100	100	100	100	100



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja di akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	tingkat capaian hasil (outcome) 100%									
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB dgn baik	%	-	50	60	70	80	90	100	100
	Persentase Kualitas Produk Hukum Daerah Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Yang Dimanfaatkan Pemerintahan Daerah	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Keberhasilan Pendampingan Bantuan/Layanan Hukum (Litigasi & Non Litigasi) Pemerintahan Daerah	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100
	Predikat Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Predikat	0	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

2021 - 2026



R P J M D

IX

P r o v i n s i

K A L I M A N T A N

PENUTUP

S E L A T A N

T a h u n

2 0 2 1 - 2 0 2 6



BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen RPJMD ini berisi penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2021-2024. Dokumen RPJMD ini disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis serta pendekatan atas bawah dan bawah atas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2021-2026 merupakan pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu menjadi penting untuk dipahami oleh semua pihak terkait bagaimana melaksanakan RPJMD baik dalam tahapan normal maupun pada masa transisi sehingga RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pedoman transisi dimaksud untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahap pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya penetapan kaidah pelaksanaan berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku pembangunan dalam melaksanakan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2021-2026.

9.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan pedoman transisi. Setelah RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 berakhir, maka perlu disusun RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan periode berikutnya sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun



berikutnya. Pada saat transisi yakni berakhirnya RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dan belum ditetapkannya RPJMD periode berikutnya sebagai dokumen penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan RKPD. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan provinsi dengan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024, maka pengaturan masa berakhir RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 akan mengikuti peraturan atau kebijakan yang berlaku pada saat itu. Dengan demikian, penyusunan RKPD untuk tahun rencana pada saat masa peralihan tersebut juga akan mengikuti peraturan atau kebijakan yang berlaku pada saat itu.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Untuk memberikan pedoman sekaligus arahan yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan RPJMD Periode 2021-2026, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Setiap perangkat daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, dengan berpedoman pada Perda RPJMD. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun.
2. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Berkaitan dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan merupakan pedoman



- dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),
4. Gubernur berkewajiban menyebar luaskan peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 kepada masyarakat.
 5. Gubernur dalam hal ini dilaksanakan oleh Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sesuai peraturan perundang-undangan.
 6. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
 7. Penyusunan RPJMD kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sehingga terwujud sinergi pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota.
 8. Pendanaan pembangunan daerah selain direncanakan bersumber dari APBD dapat juga didanai dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

9.3 Perubahan RPJMD

Sebagaimana amanat pasal 342 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RPJMD dapat dilaksanakan apabila:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- c. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.



Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Namun apabila memenuhi kriteria huruf c yaitu terjadi perubahan yang mendasar, maka perubahan RPJMD dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Selanjutnya dokumen perubahan RPJMD akan menjadi pedoman penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD.



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

RPJMD
Provinsi
KALIMANTAN
SELATAN
Tahun
2021-2026



Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan